RKPD

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan mentawai Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman:
   a. penyelenggaraan pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
   b. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah;
   c. penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; dan
   d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
   a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
   b. prioritas pembangunan daerah;
   c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
   d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

(2) Selain muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2023 juga memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 7 Juli 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 7 Juli 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

RINALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022 NOMOR 24

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 24 TAHUN 2022
TANGGAL 7 JULI 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Daftar Tabel vi
Daftar Gambar xi

BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1 Latar Belakang I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I.5
1.3 Hubungan Antar Dokumen I.10
1.4 Maksud dan Tujuan I.12
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I.13

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II.1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis II.1
2.1.1.1 Aspek Geografis II.1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II.8
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana II.20
2.1.1.4 Aspek Demografi II.23
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II.29
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II.29
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II.51
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II.59
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II.61
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.61
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.103
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan II.129
2.1.3.4 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan II.142
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II.148
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II.148
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II.152

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II.157
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....II.158
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II.160
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....II.261
2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II.261
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II.273
2.3.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.273
2.3.2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.277
2.3.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pilihan II.285
2.3.2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Penunjang II.287
2.3.3 Standar Pelayanan Minimal II.290

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....III.1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.5
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023 .....III.5
3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional III.5
3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat III.6
3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah.....III.8
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 .....III.12
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....III.14
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah III.15
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah.....III.20
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaaan Daerah.....III.24

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV.1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023 .IV.1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2023 .IV.4
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 ..IV.8
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023.....IV.11
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional IV.11
4.2.2 Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat.....IV.26

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 .....IV.36
4.2.3.1 Prioritas Pembangunan IV.36
4.2.3.2 Arah Kebijakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) IV.42
4.3 Inovasi Pembangunan Daerah IV.204

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V.1
5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023.....V.1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....VI.1

BAB VII PENUTUP VII.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 ..... II.2
Tabel 2.2 Jumlah Desa dan Dusun Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 ..... II.3
Tabel 2.3 Luasan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Kepulauan Mentawai II.4
Tabel 2.4 Struktur PDRB ADHB (%) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.9
Tabel 2.5 Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.11
Tabel 2.6 Tingkat Resiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai II.21
Tabel 2.7 Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 ..... II.24
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 ..... II.25
Tabel 2.9 Rasio Ketergantungan Kepulauan Mentawai Berdasarkan Jenis Kelamin, 2021 ..... II.28
Tabel 2.10 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.35
Tabel 2.11 Indikator Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.40
Tabel 2.12 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita se Bulan menurut kelompok komoditas (Rupiah) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2021 ..... II.44
Tabel 2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021 ..... II.47
Tabel 2.14 Penduduk Angkatan Kerja Berusia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2021.. II.48
Tabel 2.15 Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2021 ..... II.49
Tabel 2.16 Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021 ..... II.50
Tabel 2.17 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.60
Tabel 2.18 Perkembangan Kepemudaaan dan Keolahragaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.60
Tabel 2.19 Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2021 ..... II.64
Tabel 2.20 Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis (Persen), 2021 ..... II.65

Tabel 2.21 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.72
Tabel 2.22 Angka Kesakitan Menurut Karakteristik (Persen), 2021 ..... II.75
Tabel 2.23 Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan (Persen), 2021 ..... II.76
Tabel 2.24 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi (Persen), 2021 ..... II.77
Tabel 2.25 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Merokok dan Rata-Rata Batang Rokok yang dihisap per Minggu (Persen), 2021 ..... II.78
Tabel 2.26 Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.79
Tabel 2.27 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.84
Tabel 2.28 Jumlah Layanan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.85
Tabel 2.29 Rasio Jumlah Tenaga Medis dan Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.86
Tabel 2.30 Jumlah Bayi yang Diberi Imunisasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.86
Tabel 2.31 Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.88
Tabel 2.32 Kondisi Jalan Trans Mentawai, 2021 ..... II.88
Tabel 2.33 Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.91
Tabel 2.34 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 ..... II.97
Tabel 2.35 Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.98
Tabel 2.36 Perkembangan Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.99
Tabel 2.37 Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.102
Tabel 2.38 Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.103
Tabel 2.39 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.106
Tabel 2.40 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.107
Tabel 2.41 Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.108

Tabel 2.42 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.110
Tabel 2.43 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.111
Tabel 2.44 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017-2021 ..... II.112
Tabel 2.45 Perkembangan Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.114
Tabel 2.46 Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.115
Tabel 2.47 Perkembangan Indikator Pelabuhan Laut dan Penyebrangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.116
Tabel 2.48 Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.118
Tabel 2.49 Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.119
Tabel 2.50 Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.21
Tabel 2.51 Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.121
Tabel 2.52 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.123
Tabel 2.53 Perkembangan Indikator Urusan Persandian, 2017-2021.. II.124
Tabel 2.54 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.126
Tabel 2.55 Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.127
Tabel 2.56 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.129
Tabel 2.57 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.130
Tabel 2.58 Jumlah Sarana Tangkap Nelayan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.131
Tabel 2.59 Jumlah Nelayan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2011 ..... II.132
Tabel 2.60 Banyaknya dan jenis Objek Wisata Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.133
Tabel 2.61 Banyaknya Resort, Wisma, dan Penginapan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.134
Tabel 2.62 Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.134
Tabel 2.63 Produksi Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.136
Tabel 2.64 Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021..... II.139
Tabel 2.65 Perkembangan Kontribusi Perindustrian Terhadp PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.140

Tabel 2.66 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 .....II.144
Tabel 2.67 Perkembangan Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 .....II.148
Tabel 2.68 Angka Konsumsi RT Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2017-2021 .....II.149
Tabel 2.69 Rasio Angka Konsumsi RT Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2017-2021.....II.150
Tabel 2.70 Angka Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2017-2021.....II.151
Tabel 2.71 Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021.....II.157
Tabel 2.72 Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2021.....II.160
Tabel 2.73 Kecenderungan Kejadian Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai II.264
Tabel 2.74 Tingkat Bahaya Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai II.265
Tabel 2.75 Pencapaian SPM Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 ..II.291
Tabel 3.1 Indikator sasaran Pembangunan Nasional, 2023 .....III.6
Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Provinsi Sumatea Barat, 2023 .....III.7
Tabel 3.3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2023.....III.12
Tabel 3.4 Derajat Otonomi Fiskal Daerah, 2017-2021.....III.15
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....III.18
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....III.22
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 .....III.25
Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional, 2023.....IV.3
Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan Propinsi Sumatera Barat , 2023.....IV.7
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.....IV.8
Tabel 4.4 Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.....IV.10
Tabel 4.5 Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 .....IV.10
Tabel 4.6 Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2023 .....IV.42
Tabel 4.7 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi IV.45
Tabel 4.8 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 .....IV.108
Tabel 4.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 .....IV.109

Tabel 4.10 Dukungan Program Daerah (RKPD) Tahun 2023 Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2023 ..... IV.112
Tabel 4.11 Dukungan Program Daerah (RKPD) Tahun 2023 Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2023 ..... IV.167
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama VI.1
Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai , 2023 ..... VI.4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I.11
Gambar 2.1 Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai II.5
Gambar 2.2 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 ..... II.26
Gambar 2.3 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Rentang 14 Tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 ..... II.27
Gambar 2.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.31
Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2021 ..... II.32
Gambar 2.6 Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 ..... II.34
Gambar 2.7 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.36
Gambar 2.8 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2021 ..... II.39
Gambar 2.9 Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.42
Gambar 2.10 Pengeluaran Perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.43
Gambar 2.11 Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021 ..... II.51
Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.52
Gambar 2.13 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.54
Gambar 2.14 Rata-Rata Lama Sekolah(Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.56
Gambar 2.15 Harapan Lama Sekolah(Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.57
Gambar 2.16 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.58
Gambar 2.17 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.66
Gambar 2.18 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.68
Gambar 2.19 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.69
Gambar 2.20 Perkembangan Rasio Siswa terhadap Guru Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.70
Gambar 2.21 Perkembangan Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.89
Gambar 2.22 Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.99

Gambar 2.23 Produktivitas Tenaga Kerja (miliar rupiah) Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.105
Gambar 2.24 Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.141
Gambar 2.25 Produktivitas Total Daerah (miliar rupiah) Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..... II.152
Gambar 3.1 Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2023 ..... III.9
Gambar 3.2 Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, 2017-2023 ..... III.11
Gambar 4.1 Sasaran PDB Per Kapita menuju High Income Country Pasca Covid 19 ..... IV.2
Gambar 4.2 Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023 ..... IV.14
Gambar 4.3 Pelaku Usaha IV.205
Gambar 4.4 Peresmian Forum Sikereita oleh Bupati IV.206
Gambar 4.5 Pelatihan e-commerce IV.207

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran setiap tahun dari RPJMD.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 sebagaimana amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Selain itu, penyusunan dokumen RKPD ini berpedoman pada Permendagri terkait pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023, RKP Tahun 2023, RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RKPD ini sangat penting, mengingat:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023–2026.
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran pada RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023–2026.

4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dan penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

Penanganan dan pengendalian COVID-19 yang semakin baik terutama pelaksanaan vaksinasi yang secara masif dilakukan untuk membentuk kekebalan komunitas telah mampu menjaga asa dan harapan masyarakat untuk kembali menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi seperti biasa. Pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun 2021 tumbuh positif 3,69 persen dan pada triwulan I tahun 2022 tumbuh 5,01 persen menjadi indikasi semakin membaiknya ekonomi secara nasional. Begitu juga skala regional di Propinsi Sumatera Barat, dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tumbuh positif sebesar 3,29 persen dan pada triwulan I tahun 2020 tumbuh sebesar 3,64 persen yang tentunya bagian dari agregasi pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/ kota termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sebagai sebuah sistem perencanaan yang selaras dan berkelanjutan, pembangunan sumberdaya manusia dan infrastruktur ekonomi menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 sebagai upaya meningkatkan produktivitas masyarakat dan memberikan nilai tambah pada setiap usaha ekonomi yang sedang dan terus diupayakan menuju transformasi ekonomi daerah. Hal ini juga sejalan dengan tema

pembangunan nasional tahun 2023 sebagai estafet pembangunan berkelanjutan dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Momentum pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 menjadi landasan kuat untuk mendorong akselerasi ekonomi pada tahun 2023. Akselerasi tersebut didorong oleh agenda transformasi ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19melalui produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial, transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk memulai mengembalikan dan mengangkat pertumbuhan ekonomi ketingkat yang lebih baik.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 ini, mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Sebagai catatan, tahun 2023 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019-2023;
24. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026. Hubungan antara RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
2. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035.

3. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
4. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

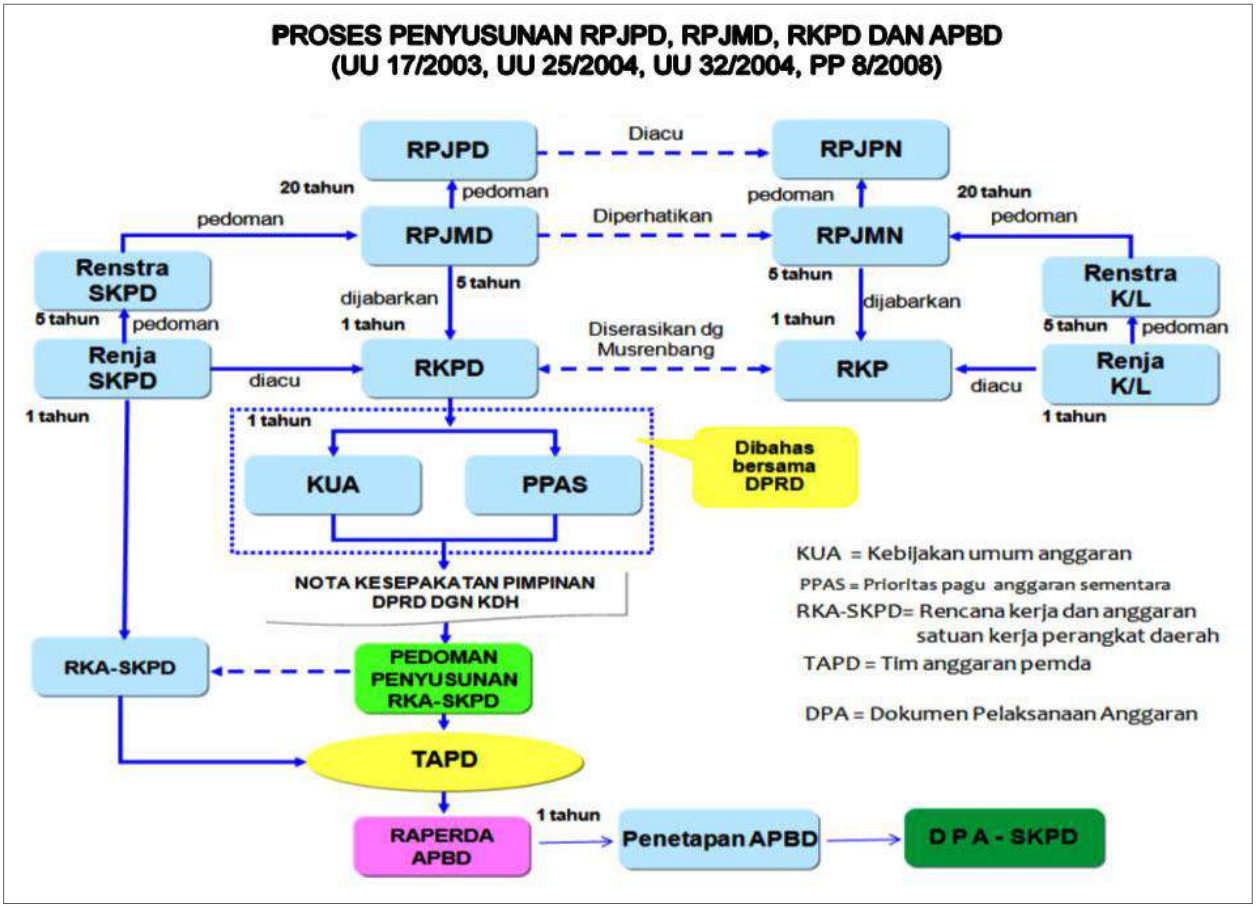

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dimaksudkan agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (RKPD) Tahun 2023 antara lain:

1. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2023.
2. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.
3. Menjadi acuan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023.
4. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD;

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; berisi terkait evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Bab ini memuat kondisi Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi pelaksanaan RPJMD kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022; Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Bab ini berisikan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, menguraikan kebijakan pembangunan nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2020-2021), dan perkiraan untuk tahun 2024.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; berisi Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII Penutup; Berisi penegasan bahwa RKPD adalah pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023.

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografis

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak pada posisi $0^0$55'00"–$3^0$21'00" Lintang Selatan dan $98^0$35'00"-$100^0$32'00" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara geografis berbatasan dengan:

- sebelah Utara adalah Selat Siberut;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
- sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai;
- sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya kabupaten yang wilayah administrasinya terpisah oleh laut dengan Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah sekitar luas wilayah 6.011,35 km^2 dan panjang garis pantai 1.402,66 km.

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 yang terdiri atas 10 kecamatan, 43 desa dan 341 dusun, dengan Kecamatan Siberut Barat memiliki luas

wilayah terbesar yaitu 1.124,86 km^2 dan Kecamatan Sikakap dengan luas wilayah terkecil yaitu 278,45 km^2.

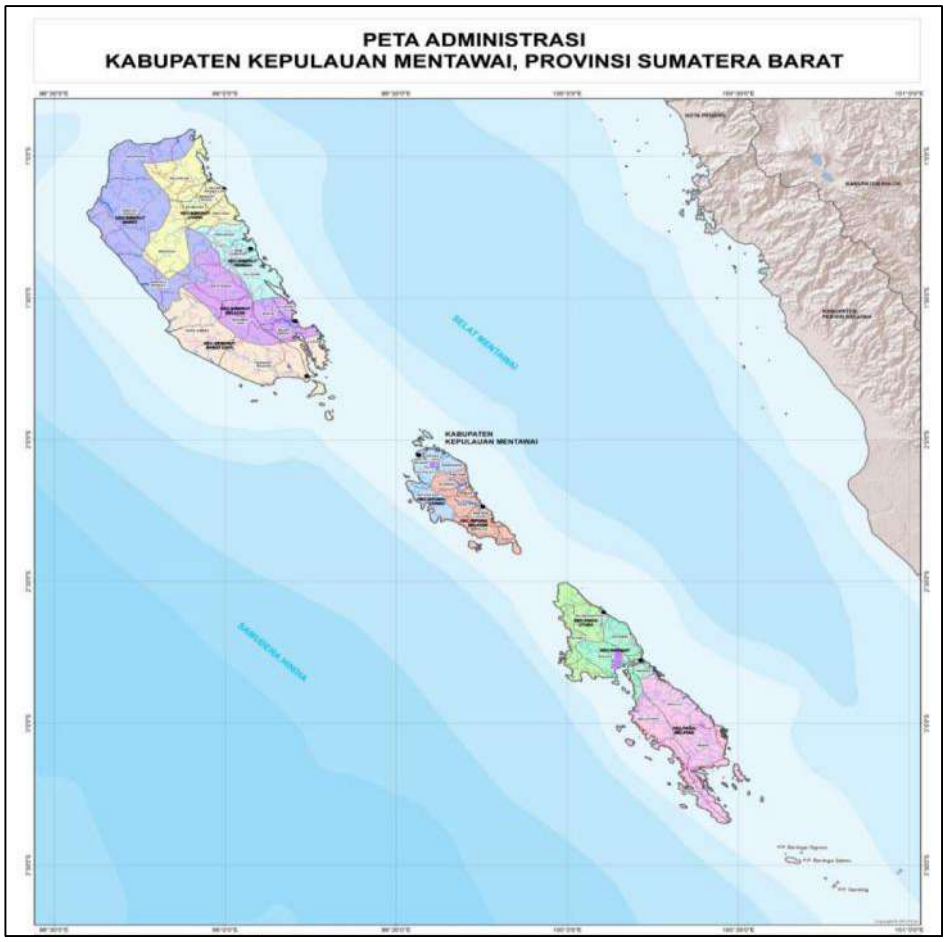

Adapun keadaan geografis dan administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap kecamatanya disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 2.1
Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km^2)	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Pagai Selatan	Bulasat	901,08	$2^0$49'04"-$3^0$21'00"	$100^0$07'01"-$100^0$32'00"
2	Sikakap	Taikako	278,45	$2^0$37'12"-$3^0$55'04"	$100^0$00'00"-$100^0$16'12"
3	Pagai Utara	Saumanganya'	342,02	$2^0$30'00"-$2^0$51'36"	$99^0$57'00"-$100^0$09'36"
4	Sipora Selatan	Sioban	268,47	$2^0$06'00"-$2^0$24'36"	$99^0$36'00"-$99^0$52'12"
5	Sipora Utara	Sido Makmur	383,08	$1^0$57'00"-$2^0$18'00"	$98^0$30'00"-$99^0$42'00"

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km^2)	Lintang Selatan	Bujur Timur
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	508,33	$1^0$19'48"-$1^0$42'00"	$98^0$48'00"-$99^0$18'00"
7	Siberut Barat Daya	Pei-Pei	649,08	$1^0$27'36"-$1^0$57'00"	$98^0$45'00"-$99^0$19'48"
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	739,87	$1^0$15'00"-$1^0$33'00"	$98^0$54'00"-$99^0$12'00"
9	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	816,11	$0^0$54'00"-$1^0$27'00"	$98^0$40'48"-$99^0$06'00"
10	Siberut Barat	Betaet	1.124,86	$0^0$55'00"-$1^0$34'12"	$98^0$35'00"-$98^0$59'24"

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Jumlah desa dan dusun di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditunjukkan tabel 2.2 dengan jumlah desa sebanyak 43 desa dan dusun sebanyak 431 dusun. Kecamatan Pagai Selatan dengan jumlah dusun paling banyak yaitu dengan 49 dusun dan Kecamatan Siberut Utara dengan jumlah dusun paling sedikit yaitu dengan 26 dusun

Tabel 2.2
Jumlah Desa dan Dusun
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	Pagai Selatan	Bulasat	4	49
2	Sikakap	Taikako	3	44
3	Pagai Utara	Saumanganya'	3	30
4	Sipora Selatan	Sioban	7	43
5	Sipora Utara	Sido Makmur	6	29
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	5	34
7	Siberut Barat Daya	Pei-Pei	3	25
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	3	32
9	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	6	26
10	Siberut Barat	Betaet	3	29
Jumlah			43	341

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Luasan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dibagi kedalam 5 kawasan penggunaan lahan, antara lain hutan lindung, kawasan suaka dan pelestarian alam, hutan produksi tetap, hutan produksi dapat dikonversi dan areal penggunaan lainnya.

Tabel 2.3
Luasan Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai

	Hutan Lindung	Suaka dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Areal Penggunaan Lainnya	Total
Penggunaan Lahan (ha)	7.217,28	183.378,9	250.971,2	50.727	108.840,62	601.135

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Luasan penggunaan lahan di Kabupaten Kepulauan didominasi oleh kawasan hutan dengan persentase sekitar 81,89 persen dan areal penggunaan lainnya sekitar 18,11 persen. Untuk luasan hutan produksi tetap menjadi kawasan hutan dengan persentase sebesar 41,75 persen atau seluas 250.971,2 ha dan kawasan suaka dan pelestarian alam sebesar 30,51 persen atau seluas 183.378,9 ha, kawasan hutan lindung sebesar 7.217,28 ha atau sekitar 1,20 persen dari luas wilayah. Untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 50.727 ha atau sekitar 8,44 persen dari total luas wilayah dan memiliki potensi yang besar untuk dikelola oleh masyarakat dan pemerintah. Areal penggunaan lainnya sebagai areal penopang kehidupan

masyarakat sebesar 108.840,62 ha atau sekitar 18,11 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai.

Gambar 2.1
Persentase Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai

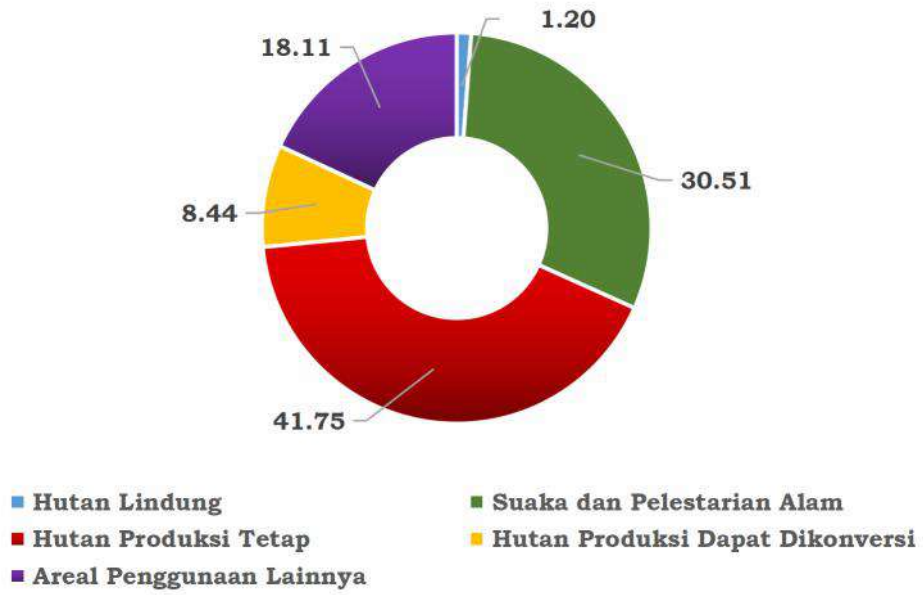

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Peruntukan dan Penggunaan kawasan hutan oleh pihak swasta maupun pemerintah, yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain KSA/KPA yang ditunjuk seluas ± 183.397 Ha termasuk Kawasan Taman Nasional Siberut (TNS) di Pulau Siberut melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor K.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 96.904 ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 147.213 Ha, peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 9.906 Ha di Provinsi Sumatera Barat, Hutan Produksi (HP) yang ada di Pulau Siberut dikelola dalam bentuk

IUPHHK-HA oleh PT. Salaki Summa Sejahtera seluas ± 48.420 Ha sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 413/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, dicadangkan seluas ± 79.795 ha di Pulau Siberut (eks IUPHHK-HA Koperasi Andalas Madani) untuk IUPHHK-Restorasi Ekosistem kepada PT. Global Green melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.769/Menhut-VI/2009 tanggal 28 September 2009.

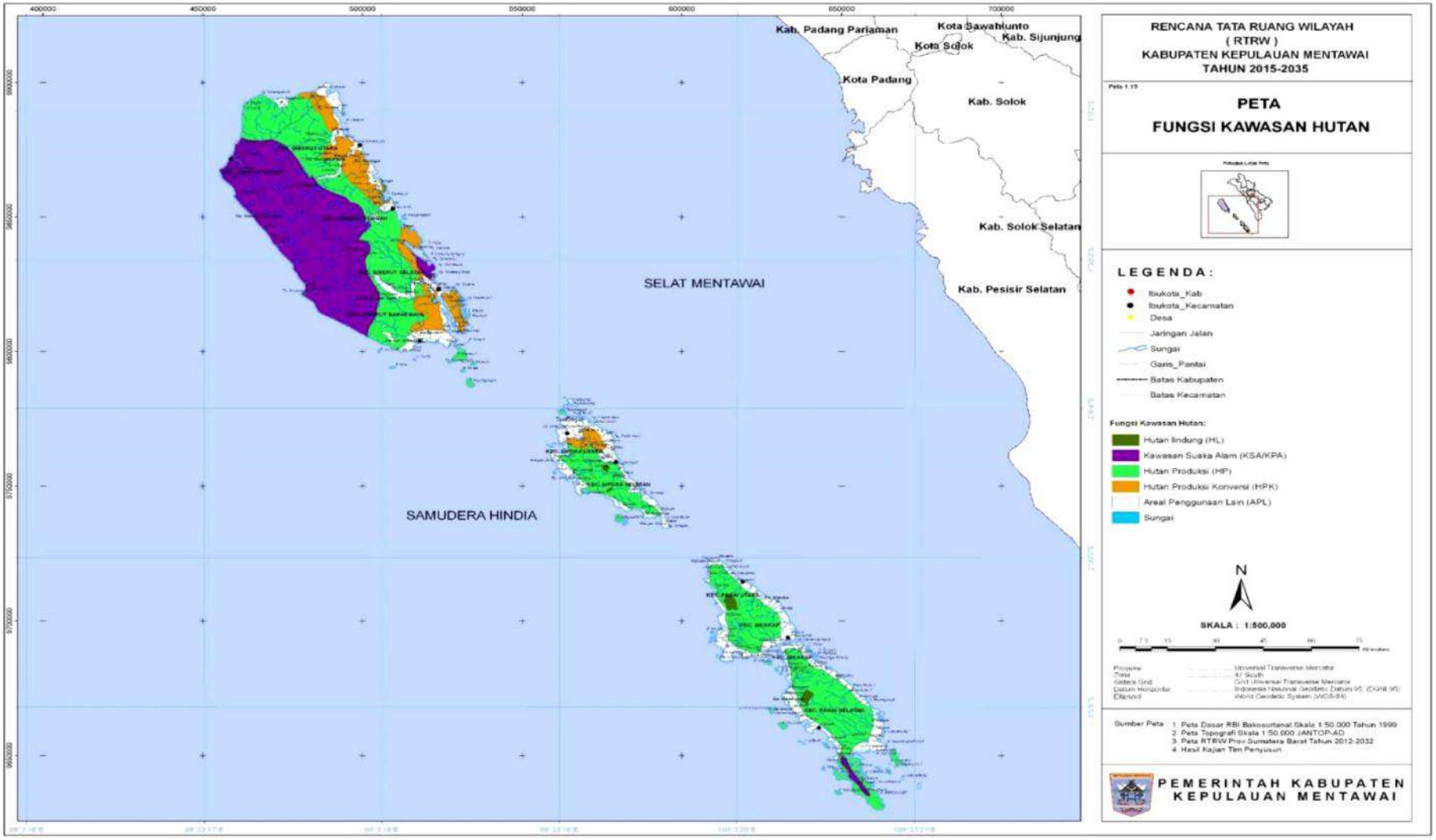
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW)
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2015-2035
Peta 1.15
PETA
FUNGSI KAWASAN HUTAN
Kab. Padang Pariaman
Kota Sawahlunto
Kab. Sijunjung
Kota Solok
Kota Padang
Kab. Solok
Kab. Solok Selatan
Kab. Pesisir Selatan
SELAT MENTAWAI
SAMUDERA HINDIA
LEGENDA :
Ibukota_Kab
Ibukota_Kecamatan
Desa
Jaringan Jalan
Sungai
Garis_Pantai
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Fungsi Kawasan Hutan:
Hutan lindung (HL)
Kawasan Suaka Alam (KSA/KPA)
Hutan Produksi (HP)
Hutan Produksi Konversi (HPK)
Areal Penggunaan Lain (APL)
Sungai
N
SKALA : 1:500.000
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Zona : 47 South
Sistem Grid : Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Indonesia Nasional Geodetic Datum 95 (DGN 95)
Elipsoid : World Geodetic System (WGS-84)
Sumber Peta :
1. Peta Dasar RBI Bakosurtanal Skala 1:50.000 Tahun 1999
2. Peta Topografi Skala 1:50.000 JANTOP-AD
3. Peta RTRW Prov Sumatera Barat Tahun 2012-2032
4. Hasil Kajian Tim Penyusun
PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Arah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kepulauan Mentawai sesuai dengan RTRW melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan wilayah daerah.

Tabel 2.4 menunjukkan struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi pada sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan dengan rata-rata kontribusi pada PDRB sebesar 48,03 persen, artinya sektor primer masih menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat Mentawai. Jika dilihat tren transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor manufaktur/ industri dan sektor jasa

belum menunjukkan perubahan (kenaikan) yang signifikan

Tabel 2.4
Struktur PDRB ADHB (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
A	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	49,03	47,61	46,21	48,46	48,87	48,03
B	Pertambangan dan Penggalian	1,77	1,74	1,62	1,64	1,65	1,68
C	Industri Pengolahan	2,8	2,68	2,34	2,43	2,57	2,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dll	-	-	-	-	-	-
F	Konstruksi	12,08	12,59	13,11	13,25	13,66	12,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran	12,25	12,55	12,82	12,8	12,72	12,62
H	Transportasi dan Pergudangan	10,48	11,14	11,8	8,58	7,48	9,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,77	0,78	0,8	0,76	0,81	0,78
J	Informasi dan Komunikasi	0,81	0,85	0,9	0,99	1,04	0,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12
L	Real Astate	0,89	0,89	0,91	0,92	0,91	0,90
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan	6,47	6,45	6,65	7,21	7,25	6,80
P	Jasa Pendidikan	1,07	1,1	1,14	1,23	1,23	1,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,57	0,59	0,61	0,69	0,74	0,64
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,82	0,84	0,89	0,83	0,88	0,85

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Kontribusi Sektor kontruksi terhadap PDRB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang positif yaitu dari 12,08 persen tahun 2017 meningkat menjadi 13,66 persen pada tahun 2021 dengan rata-rata capaian sebesar 12,93 persen.

Analisis potensi pengembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan PDRB dapat diketahui bahwa sektor lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan merupakan sektor maju dan tumbuh pesat dan juga sudah menjadi sektor basis ekonomi masyarakat Mentawai secara umum, kedepan sektor ini juga sangat potensial untuk dikembangkan dengan tingkat pertumbuhan sektor yang tinggi dan memiliki keunggulan kompetitif untuk wilayah Sumatera Barat.

Tabel 2.5
Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Lapangan Usaha		Tipologi Klassen	Analisis LQ	Analisis DLQ	Pertumbuhan Proporsional	Keunggulan Kompetitif	Pergeseran Bersih
A	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
B	Pertambangan dan Penggalian	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
C	Industri Pengolahan	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dll	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
F	Konstruksi	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
G	Perdagangan Besar dan Eceran	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
H	Transportasi dan Pergudangan	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
J	Informasi dan Komunikasi	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
L	Real Astate	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
M, N	Jasa Perusahaan	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
O	Administrasi Pemerintahan	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
P	Jasa Pendidikan	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
R,S ,T, U	Jasa Lainnya	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif

Sumber :BPS (data diolah)

Untuk sektor lapangan usaha industri pengolahan menjadi sektor relatif tertinggal namun memiliki potensi untuk dikembangkan kedepan dan berdasarkan analisis *shift share* memiliki pergeseran sektor yang progresif sehingga sektor ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam struktur ekonomi daerah. Begitu juga dengan konsep hilirisasi sektor primer yang menjadi prioritas pembangunan daerah untuk memberikan nilai tambah (*value added*) dan peningkatan ekonomi masyarakat memiliki peluang besar dalam proses perencanaan pembangunan. Sajalan dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga secara tipologi klassen sebagai sektor potensial /masih dapat berkembang dengan pesat dan analisis *shift share* memiliki keunggulan kompetitif kedepannya seiring dengan prioritas pembangunan pada sektor pariwisata sebagai penopang pengembangan sektor ini. Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas 601.134,96 ha terdiri atas kawasan hutan lindung

seluas 492.294,38 ha sekitar 82 persen dari luas wilayah, sedangkan 108.840,62 ha atau sekitar 18 persen adalah kawasan Area Penggunaan Lain (APL), potensi pengembangan wilayah Kepulauan Mentawai dapat dikembangkan melalui pengembangan kawasan budidaya yang telah ditetapkan antara lain.

1) Kawasan peruntukan hutan produksi.

   Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi tetap yang merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun cara tebang habis. Kawasan ini terdapat di seluruh kecamatan, dengan luasan 246.011,41 hektar. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang dapat dicadangkan atau diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan diluar sektor kehutanan seperti perkebunan, pertanian, permukiman, industri. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Siberut Barat, Kecamatan Siberut

Barat Daya, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Selatan dengan luasan kurang lebih 54.856,28 hektar.

2) Kawasan peruntukan pertanian.

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi sawah dan komoditas tanaman pangan lainnya dengan total luas adalah 24.934,03 ha. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan komoditi sayuran dan buah-buahan dengan total luas adalah 3.740,17 ha. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas lahan adalah 90.818 ha dengan komoditas perkebunan skala kecil atau perkebunan rakyat khas Mentawai yaitu coklat, karet, cengkeh, pala, kelapa, nilam, manau. Kawasan perkebunan rakyat tidak merusak alam dan lingkungan sekitar hutan. Kawasan peruntukan peternakan terdapat di seluruh

wilayah daerah dengan memanfaatkan areal pertanian dan perkebunan.

3) Kawasan peruntukan perikanan.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap di seluruh perairan wilayah daerah dengan pusat perikanan tangkap di Kecamatan Siberut Utara, Tuapejat, Pagai Utara dan Sikakap. Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri dari Budidaya perikanan laut meliputi: Muara Sigep, Malancan, Sirilogui, Saibi Samukop, Saliguma, Malilimok, Katurei (Pulau Siberut), Teraet, Teluk Beriulou, Teluk Pukarajat, Tuapejat (Pulau Sipora), Sikakap dan Betumonga (Pulau Pagai Utara), Pulau Tanopo, Makalo dan Sinaka (Pulau Pagai Selatan). Budidaya perikanan darat meliputi: Bosua, Saureinu, Nemnemleleu, (Sipora Selatan), Malancan, Sirilogui, Bojakan, Sotboyak, Muara Sikabaluan, Monganpoula (Siberut Utara), Muara Siberut, Salappak, Maileppet, Muntei,

Madobag, Matotonan (Siberut Selatan), Saibi Samukop, Cimpungan (Siberut Tengah), Saumanganya, Betumonga, Silabu (Pagai Utara), Matobe, Taikako (Sikakap), Desa Malakopa dan Desa Bulasat (Pagai Selatan). Kawasan Minapolitan adalah Sikakap dan Muara Siberut (Siberut Selatan). Kawasan pengolahan hasil perikanan memiliki prasarana pendukung, meliputi bagian wilayah Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara dan bagian wilayah Muara Siberut di Kecamatan Siberut Selatan, Muara Sikabaluan di Kecamatan Siberut Utara, Sikakap. Prasarana pendukung kawasan pengolahan hasil perikanan terdiri atas rencana pengembangan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Tuapejat dan Sikakap, rencana pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuapejat, Sikakap, Muara Siberut dan Muara Sikabaluan, dan rencana pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Sikakap.

4) Kawasan peruntukan industri.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri rumah tangga yang dapat dikembangkan di setiap kecamatan dengan memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

5) Kawasan peruntukkan pertambangan.

Kawasan peruntukkan pertambangan diperuntukkan untuk wilayah pertambangan terdapat di Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang memiliki potensi bahan tambang jenis bebatuan (galian C).

6) Kawasan peruntukan pariwisata.

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah terdapat di Pulau Siberut yang meliputi kawasan Madobag dan Matotonan (Siberut Selatan), Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat),

Bojakan (Siberut Utara), Sagulubbek (Siberut Barat Daya), benteng peninggalan Jepang di Sioban (Sipora Selatan). Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di pulau Siberut yang meliputi kawasan Sigapokna, Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut Utara), Sibudda Oinan (Siberut Tengah), Matotonan dan Madobag (Siberut Selatan), Katurei dan Sagulubbek (Siberut Barat Daya). Kawasan peruntukan pariwisata bahari terdapat di Silabu (Pagai Utara), Sikakap, Malakopa dan Sinakak (Pagai Selatan), Katiet, Bosua, Gobi dan Pulau Siruamata (Sipora Selatan), Mapaddegat, Teluk Pukarajat, Taraet dan Matuptuman (Sipora Utara), Teluk Katurei dan Taileleu (Siberut Barat Daya), Saibi Samukop dan Saliguma (Siberut Tengah), Sirilogui (Siberut Utara), dan Pulau-pulau kecil lainnya. Kawasan peruntukan ekonomi khusus pariwisata terdapat di Mapaddegat seluas 300 ha, Katiet, Gobi dan Bosua 100 ha, Teluk Katurei 300

ha, Taraet 50 ha, Matutuman Buggei Siata 50 ha. Kawasan peruntukan konservasi budaya terdapat di Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan dan Sakudei Kecamatan Siberut Barat Daya, Simatalu Kecamatan Siberut Barat.

7) Kawasan peruntukan permukiman.

   Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan yaitu Muara Siberut (PKW), Tuapejat (PKL), Sikakap (PKLp), Muara Sikabaluan, Saibi Samukop, Pasakiat Taileleu, Saumanganyak, Bulasat, Sido Makmur dan Sioban. Kawasan peruntukan perdesaan yaitu pusat lingkungan pemukiman disetiap dusun diluar kawasan perkotaan dan kawasan hunian tetap (huntap) korban tsunami.

8) Kawasan peruntukan lainnya.

   Kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, seperti kawasan bandara, kawasan militer AD, AL,

kepolisian dan satuan keamanan dan pertahanan lainnya.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan potensi yang rawan bencana baik berupa gempa bumi (tektonik), gelombang besar tsunami, abrasi pantai dan longsor. Dari 43 desa yang ada, 33 desa diantaranya merupakan desa pesisir, yang pada kondisi saat ini kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana terhadap bahaya tsunami. Sebagaimana yang telah terjadi pada tanggal 25 Oktober 2010, bencana gempa bumi berkekuatan 7,2 SR (atau 7,5 SR menurut USGS) telah memicu terjadinya gelombang tsunami.

Dilihat dari tingkat bahaya bencana yang akan terjadi bahwa tingkat bahaya bencana diperoleh berdasarkan luas terdampak bahaya (rendah, sedang dan tinggi) yang memiliki persentase luas bahaya terdampak paling besar.

Tabel 2.6
Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
1	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi
2	Gempa Bumi	Tinggi
3	Tsunami	Tinggi
4	Cuaca Ekstrim	Tinggi
5	Tanah Longsor	Tinggi
6	Banjir	Tinggi
7	Kekeringan	Sedang
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), 2021

Tabel 2.6 memperlihatkan bahwa tingkat bahaya tinggi berpotensi terjadi terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, cuaca ekstrim, tanah longsor, banjir, bencana gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan sedangkan tingkat bahaya sedang terhadap bencana kekeringan. Indeks bahaya disesuaikan dengan standar parameter yang telah ditentukan oleh BNPB dengan merujuk kepada peta bahaya setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

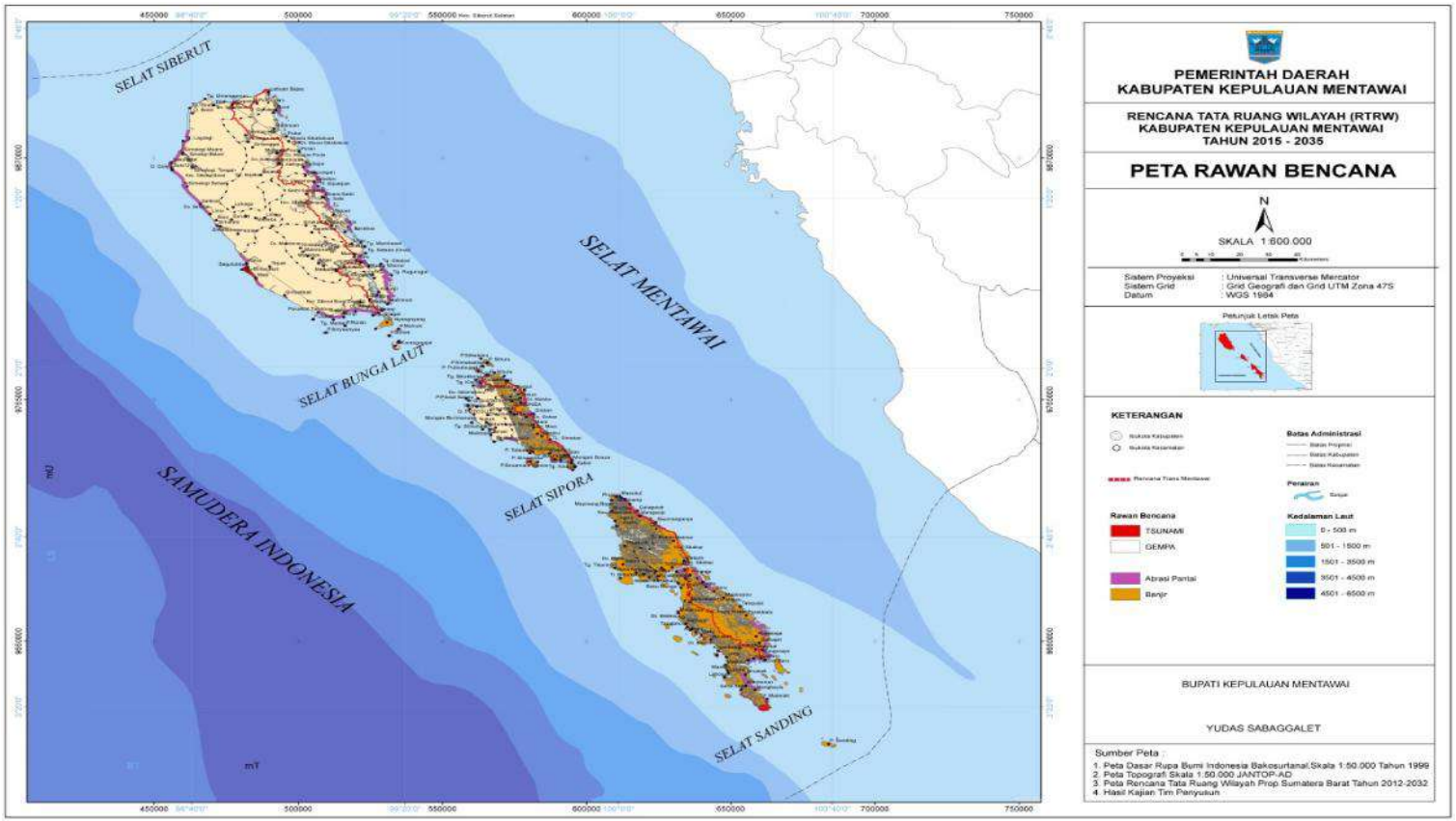
SELAT SIBERUT
SELAT MENTAWAI
SELAT BUNGA LAUT
SELAT SIPORA
SAMUDERA INDONESIA
SELAT SANDING
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2015 - 2035
PETA RAWAN BENCANA
N
SKALA 1:600.000
Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 47S
Datum : WGS 1984
Petunjuk Letak Peta
KETERANGAN
Batas Administrasi
Perairan
Rawan Bencana
TSUNAMI
GEMPA
Abrasi Pantai
Banjir
Kedalaman Laut
0 - 500 m
501 - 1500 m
1501 - 3500 m
3501 - 4500 m
4501 - 6500 m
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
YUDAS SABAGGALET
Sumber Peta :
1. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Bakosurtanal,Skala 1:50.000 Tahun 1999
2. Peta Topografi Skala 1:50.000 JANTOP-AD
3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Prop Sumatera Barat Tahun 2012-2032
4. Hasil Kajian Tim Penyusun

2.1.1.4 Aspek Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Secara umum keadaan kependudukan di Kepulauan Mentawai dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Secara teori (BPS), penduduk diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Penduduk menjadi aset dan modal besar dalam pembangunan, sebagai pelaku dan penikmat hasil pembangunan. Integrasi perencanaan dengan kependudukan menjadi hal penting bagi daerah dalam mengarahkan esensi pembangunan daerah, bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibanding dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Disisi lain, tantangan pertumbuhan penduduk menjadi permasalahan tersendiri di daerah baik itu dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, ketimpangan distribusi, tingkat ketergantungan, kepadatan penduduk yang akan dikaitkan dengan daya dukung lingkungan/alam. Jumlah penduduk per kecamatan, luas daerah dan kepadatan penduduk disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk,
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

No	Kecamatan	Luas Daerah (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (orang/km^2)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Jenis Kelamin (jiwa)	
						Laki-Laki	Perempuan
1	Pagai Selatan	901,08	9.385	10,02	0,13	4.895	4.490
2	Sikakap	278,45	10.236	32,75	0,17	5.309	4.927
3	Pagai Utara	342,02	6.086	16,39	0,91	3.174	2.912
4	Sipora Selatan	268,47	9.903	28,42	0,93	5.101	4.802
5	Sipora Utara	383,08	12.228	44,84	2,17	6.292	5.936
6	Siberut Selatan	508,33	10.039	30,60	1,07	5.171	4.868
7	Siberut Barat Daya	649,08	7.126	7,02	0,96	3.736	3.390
8	Siberut Tengah	739,87	7.160	12,14	1,00	3.715	3.445
9	Siberut Utara	816,11	8.351	10,66	0,17	4.365	3.986
10	Siberut Barat	1.124,86	7.875	6,76	0,92	4.133	3.742
2021		6.011,35	88.389	19,96	0,84	45.891	42.498
2020		6.011,35	87.623	14,52	1,41	45.477	42.146
2019		6.011,35	92.021	15,31	1,82		
2018		6.011,35	90.373	15	1,90		

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 tercatat sebanyak 88.389 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2021, dengan laju pertumbuhan rata sebesar 0,84 persen. Laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Sipora Utara. Hal ini kemungkinan disebabkan sebagai ibukota kabupaten dengan tingkat kelahiran dan migrasi penduduk yang cukup intens. Tingkat kepadatan penduduk di Kepulauan Mentawai dikategorikan masih sangat jarang yaitu 19,96 orang/km^2, artinya setiap km^2 terdapat sekitar 19-20 orang penduduk. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan

Sipora Utara dengan kepadatan penduduk sebesar 44,84 orang/km^2, kemudian Kecamatan Sikakap dengan kepadatan penduduk 32,75 orang/km^2 dan Kecamatan Siberut Selatan dengan kepadatan penduduk 30,60 orang/km^2.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur dan jenis Kelamin
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
0 - 4	3.569	3.404	104,8
5 - 9	4.058	3.953	102,7
10 - 14	4.982	4.676	106,5
15 - 19	4.566	4.047	112,8
20 - 24	3.922	3.845	102,0
25 - 29	3.883	3.838	101,2
30 - 34	4.019	3.864	104,0
35 - 39	3.562	3.067	116,1
40 - 44	3.118	2.882	108,2
45 - 49	2.705	2.384	113,5
50 - 54	2.422	2.080	116,4
55 - 59	1.754	1.567	111,9
60 - 64	1.322	1.229	107,6
65 - 69	784	706	111,0
70 - 74	596	573	104,0
75+	418	383	109,1
Total	45.891	42.498	108,2

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan atau dengan rasio 108,2, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 108 orang penduduk laki-laki di Kepulauan Mentawai. Untuk kelompok umur usia non produksif lansia (65+ tahun), rasionya cukup besar yaitu 108,03. Artinya

setiap 100 orang penduduk lansia perempuan terdapat 108 orang lansia laki-laki. Kondisi ini menggambarkan penduduk lansia laki-laki lebih banyak daripada penduduk lansia perempuan, apakah data ini disebabkan oleh kematian, perpindahan atau migrasi penduduk lansia perempuan cukup sering tentunya perlu analisis lebih lanjut lagi.

Komposisi penduduk Kepulauan Mentawai jika dilihat dari piramida penduduk seperti pada Gambar 2.2 menunjukkan bahwa kelompok usia 10-14 tahun memiliki komposisi paling besar dari struktur usia penduduk di Kepulauan Mentawai, namun menurun tajam pada komposisi kelompok usia 55+ tahun.

Gambar 2.2
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

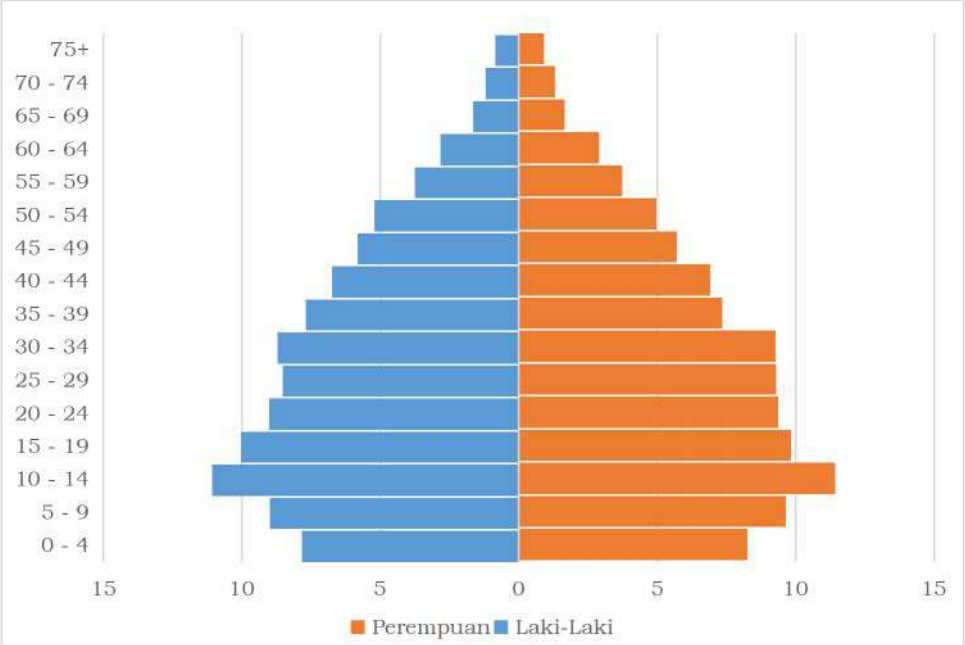

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Tingkat kelahiran dan perpindahan penduduk menjadi indikator cukup tingginya komposisi penduduk usia 0-9 tahun, namun di sisi lain masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat berdampak pada penurunan jumlah penduduk kelompok usia produktif hingga penduduk pada kelompok usia lansia. Jika dilihat komposisi penduduk dari kelompok usia dengan rentang usia 14 tahun seperti pada Gambar 2.3 piramida penduduk usia rentang 14 tahun, menunjukkan bahwa kelompok usia 0-14 tahun dan 15-29 tahun dengan komposisi terbesar. Kelompok usia produktif 30-44 tahun, 45-59 tahun mengalami penurunan.

Gambar 2.3
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Rentang 14 Tahun
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

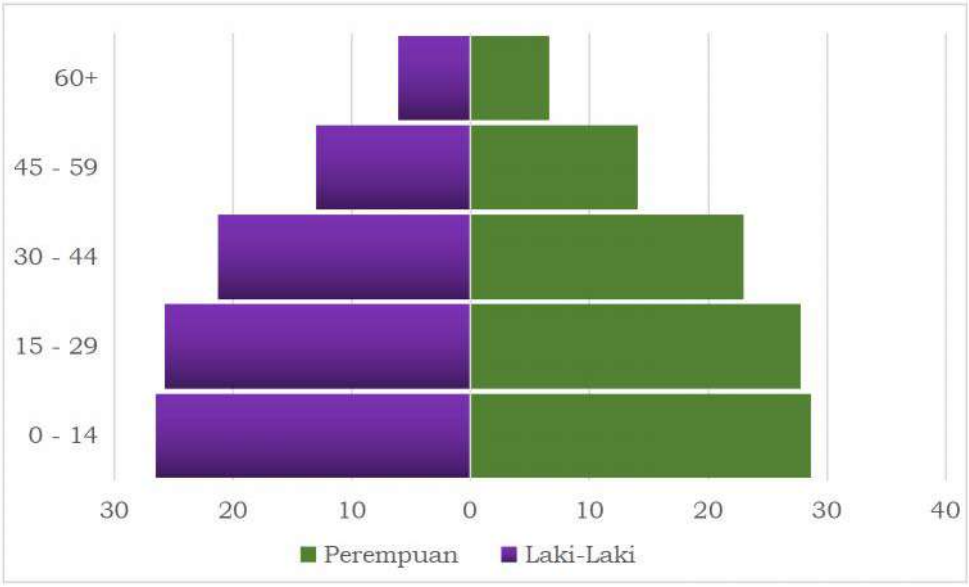

Hal ini mengindikasikan terjadinya pengurangan jumlah penduduk baik pria dan wanita kelompok usia produktif, apakah itu akibat adanya kematian atau karena perpindahan. Penduduk

pada usia produktif yang menjadi tulang punggung pembangunan perlu menjadi perhatian, agar dapat ambil bagian dalam proses pembangunan, tentunya intervensinya dimulai dari menjadi embrio kehidupan, lahir dan balita, baik itu dari segi kesehatan individu, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungannya.

Tabel 2.9
Rasio Ketergantungan Kepulauan Mentawai
Berdasarkan Jenis Kelamin, 2021

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio
Penduduk Usia 0 - 14	12.609	12.033	24.642	104,8
Penduduk Usia 15 - 64	31.273	28.803	60.076	108,6
Penduduk Usia 65 +	1798	1662	3.460	108,2
Rasio Ketergantungan	46,07	47,55	46,78	

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa kelompok usia produktif laki-laki lebih besar dari pada perempuan dengan rasio 108,6. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif perempuan terdapat 108-109 penduduk usia produktif laki-laki. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2021, rasio ketergantungan Kepulauan Mentawai tahun 2021 sudah dibawah 50 persen yaitu sebesar 46,07 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 46 penduduk usia tidak produktif. Jika rasio ketergantungan ini ditahun berikutnya mengalami penurunan maka Kepulauan Mentawai akan mendapatkan bonus demografi yang tentunya sangat berguna dalam pembangunan di daerah

terkhususnya dengan ketersediaan sumber daya manusia yang produktif dan memiliki daya saing dan kompetitif.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan pembangunan yang sebesarnya adalah menyejahterakan masyarakatnya. Sejatinya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menghilangkan ketimpangan pembangunan baik dari sisi pendapatan, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial dan ekonomi. Pembangunan manusia menjadi pembangunan yang senyata-nyatanya benar dan realitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh positif tidak serta merta memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi merata dan setidaknya menjadi t*rickle-down effect* yang diharapkan menetes kebawah membantu ekonomi masyarakat dengan tetap membutuhkan intervensi pemerintah daerah sebagai katalisator pembangunan sehingga masyarakat benar-benar merasakan arti pembangunan.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kerugian pendapatan bagi masyarakat mulai dari masyarakat dengan bidang usaha mikro, kecil, menegah sampai pada kategori besar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi seperti pertumbuhan

ekonomi tahun 2020 ditutup pada angka minus 1,85 persen di Kabupaten Kepulauan Mentawai, minus 1,6 persen di Propinsi Sumatera Barat dan minus 2,07 untuk skala Nasional. Berbagai upaya pemulihan ekonomi dan percepatan regulasi kebijakan harus segera dilaksanakan karena jika tidak bertindak, akan berisiko terhambat peluang, pertumbuhan yang rapuh, dan bahkan keresahan sosial. Berbagai upaya pengendalian secara maksimal dilakukan agar perekonomian masyarakat dapat kembali tumbuh dan mampu bergerak, berakselerasi seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Melalui vaksinasi yang secara masif dilakukan sejak tahun 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan disetiap aktivitas sosial ekonomi masyarakat telah mampu meningkatkan konsumsi masyarakat sebagai dampak berangsur pulihnya mobilitas masyarakat dan secara agregat pertumbuhan ekonomi membaik dan tumbuh positif.

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan ekonomi suatu daerah, semakin membaiknya distribusi ekonomi/pendapatan masyarakat dan meningkatnya daya beli masyarakat serta menurunnya tingkat kemiskinan.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan

pembangunan secara umum. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkat menunjukkan perkembangan produksi barang dan jasa suatu daerah ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah yang dilihat dari berbagai waktu tertentu.

Gambar 2.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

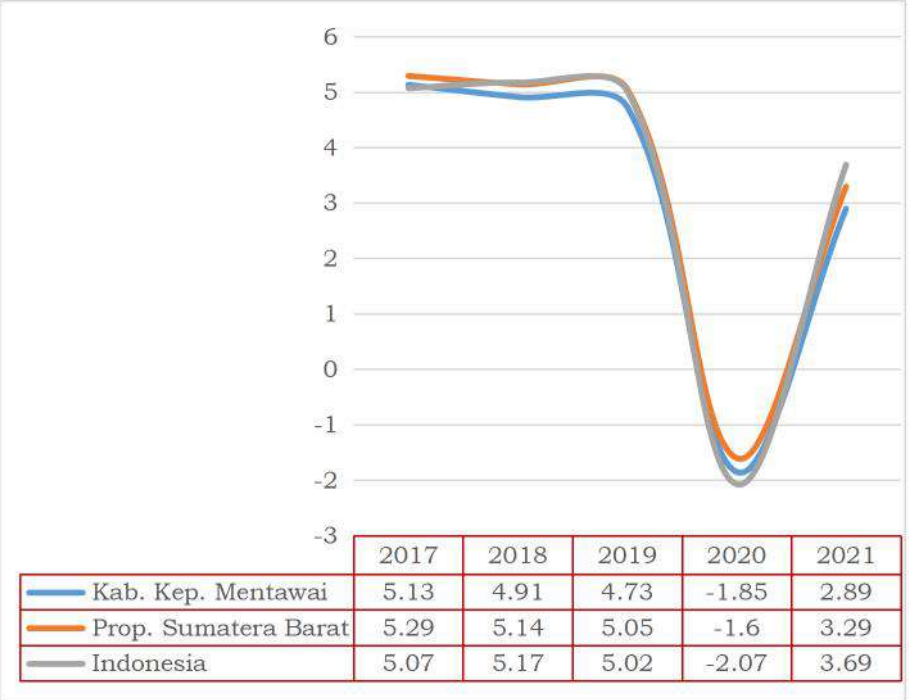

	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kep. Mentawai	5.13	4.91	4.73	-1.85	2.89
Prop. Sumatera Barat	5.29	5.14	5.05	-1.6	3.29
Indonesia	5.07	5.17	5.02	-2.07	3.69

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Capaian pembangunan makro tahun 2021 menunjukkan hasil yang membaik jika dibandingkan dengan tahun 2020. Perkembangan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang dapat dilihat pada Gambar 2.4 bahwa tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Mentawai telah pada posisi

positif 2,89 persen meningkat jika dibandingkan tahun 2020 dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar minus 1,85 persen.

Tentu ini menjadi awal yang baik dimana aktivitas masyarakat yang berangsur pulih, menjalankan aktivitas dengan tatanan kehidupan dengan kebiasan baru yang beriringan dengan pandemi COVID-19. Capaian ini juga seiring dengan perbaikan capaian pertumbuhan ekonomi skala regional di Propinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 3,29 persen dan secara Nasional yaitu sebesar 3,69 persen pada tahun 2021.

Gambar 2.5
Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB ADHK
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2021

1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13	Jasa Perusahaan
2	Pertambangan dan Penggalian	8	Transportasi dan Pergudangan	14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
3	Industri Pengolahan	9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15	Jasa Pendidikan
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10	Informasi dan Komunikasi	16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11	Jasa Keuangan dan Asuransi	17	Jasa lainnya
6	Konstruksi	12	Real Estate		

Gambar 2.5 menunjukkan laju pertumbuhan sektoral pada PDRB dalam kurun waktu 2020-2021. Dari perkembangan laju pertumbuhan sektoral menunjukkan bahwa tahun 2021 sebagaian besar laju pertumbuhan sektoral berada pada angka yang positif, kecuali sektor transportasi dan pergudangan, namun jika dilihat dari angka capaiannya, antara tahun 2020 dan 2021 sudah mengalami perbaikan yaitu sebesar minus 28,78 persen tahun 2020 membaik menjadi minus 8,86 persen tahun 2021. Untuk sektor yang dominan (tumbuh) dimasa pandemi COVID-19 seperti sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor infomasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial relatif terjaga walaupun ada perlambatan dari sisi permintaan.

Berdasarkan kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 ditopang oleh sektor pertanian dengan kontribusi sektoral sebesar 48,87 persen. Sebagai daerah yang bertumpu pada sektor primer, kontribusi sektor pertanian perkebunan kehutanan dan perikanan menjadi pilar utama yang membangun ekonomi masyarakat Mentawai, begitu juga selama pandemi COVID-19 dimana diberlakukannya pembatasan aktivitas sosial masyarakat, sektor pertanian perkebunan kehutanan dan perikanan menjadi penopang ekonomi dan sebagai menjaga ketahanan pangan selama terjadi pandemi tahun 2020 dan 2021.

Gambar 2.6
Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

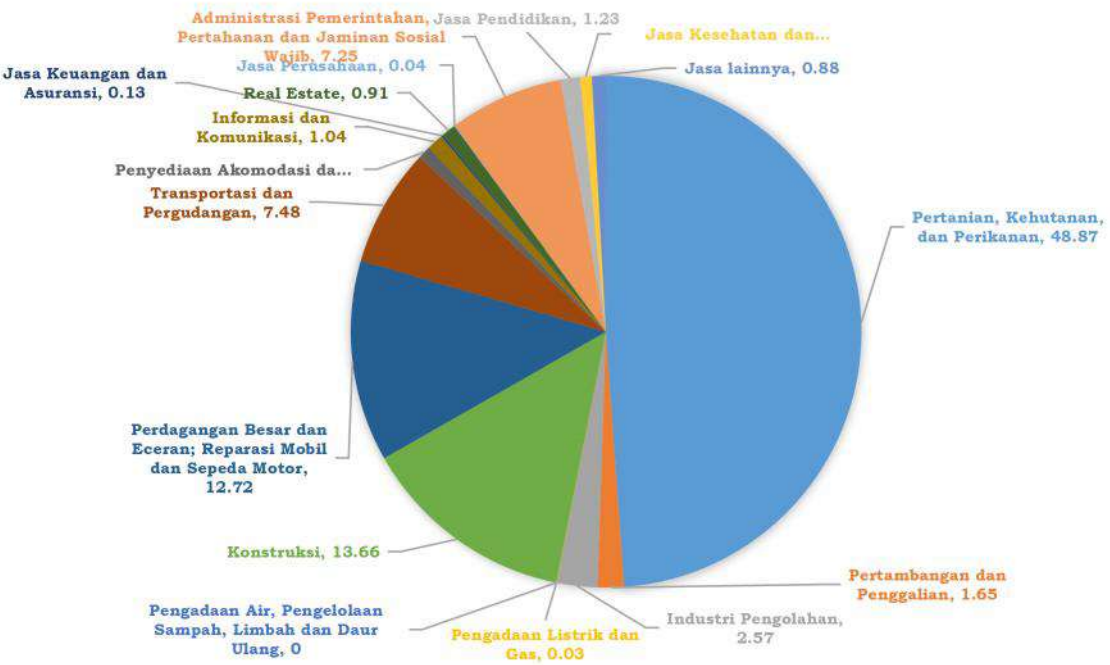

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Secara keseluruhan komponen penyusun PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 didominasi oleh 3 sektor utama antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 48,87 persen, konstruksi 13,66 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,72 persen.

2. Pendapatan Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor

produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Selain sebagai data pencapaian pembangunan daerah, pendapatan per kapita juga dapat menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi daerah. Pendapatan per kapita yang tinggi mengindikasikan tingginya daya beli masyarakat.

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
ADHK	2.741.550	2.875.664	3.011.724	2.956.010	3.041.550
ADHB	4.001.871	4.525.824	4.641.481	4.647.100	4.843.810
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
ADHB	46,10	47,06	50,12	53,18	54,80

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Tabel 2.10 menunjukkan perkembangan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2017-2021 yang mengalami kenaikan. Untuk PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan dari 4,647 triliun rupiah meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 menjadi sebesar 4,843 triliun rupiah. Begitu juga dengan PDRB perkapita yang dapat dilihat dengan membaginya dengan total jumlah penduduk, didapat bahwa pada

tahun 2017 PDRB perkapita sebesar 46,10 juta rupiah mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 PDRB perkapita menjadi sebesar 54,80 juta rupiah.

Secara umum gambaran pendapatan perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017-2021 pada Gambar 2.7 mengalami tren kenaikan. Pendapatan perkapita yang diartikan sebagai total produktifitas sumber daya yang ada di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yaitu tahun 2017 sebesar 46,19 juta rupiah perkapita pertahun meningkat menjadi 54,8 juta perkapita pertahun pada tahun 2021.

Gambar 2.7
Pendapatan Perkapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

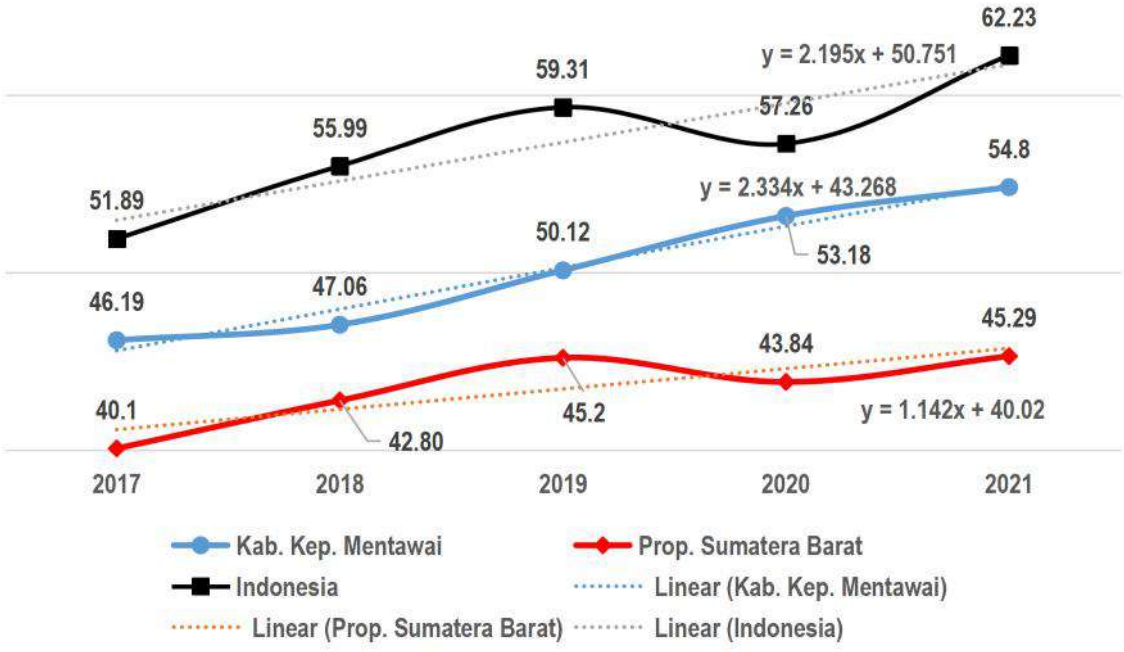

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Jika dibandingkan tren kenaikan pendapatan perkapita di kurun waktu yang sama antara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat dan Indonesia menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai berada diatas rata-rata pendapatan per kapita Propinsi Sumatera Barat, namun secara Nasional pendapatan perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dibawah rata-rata pendapatan nasional. Namun angka statistik yang tidak berbanding lurus ketika terjadi kenaikan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada kenyataannya tidak berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan (Tahun 2021 = 14,84 persen), fenomena ini mengindikasikan bahwa belum menjadi syarat utama bagi daerah ketika pendapatan per kapita menjadi ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Jika dilihat dari nilai intersep/ tren, Capaian pendapatan perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh angka yang paling tinggi yaitu sebesar 2.334, sedangkan Propinsi Sumatera Barat sebesar 2.195 dan nasional sebesar 1.142, hal ini mengindikasikan bahwa proyeksi pendapatan perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mengalami kenaikan lebih baik.

3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu

tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (Word Bank, 1990). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS).

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2016-2021 mengalami tren penurunan walaupun secara agregat tidak signifikan. Jika dilihat Gambar 2.8 tingkat kemiskinan daerah dari sisi persentase mengalami penurunan yaitu 15,12 persen tahun 2016 turun menjadi 14,84 persen pada tahun 2021. Dampak pandemi terlihat dari meningkatnya tingkat kemiskinan yang dapat dilihat dari kenaikan, yaitu dari 14,35 persen ditahun 2020 menjadi 14,84 persen ditahun 2021. Begitu juga dari disisi jumlah masyarakat miskin mengalami penambahan yaitu pada tahun 2019 penduduk miskin berjumlah 13.220 jiwa dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebanyak 14.310 jiwa atau bertambah 1.090 jiwa.

Jika dilihat secara kasat mata yaitu berdasarkan perbandingan angka persentase penduduk miskin yang tinggi dengan tingkat pengangguran terbuka yang dikatakan masih rendah tentu analoginya tidak sesuai. Analisis sederhananya tentu

dengan rendahnya tingkat pengangguran berimplikasi pada rendahnya tingkat kemiskinan. Namun, hal itu menjadi bias ketika dilihat secara definisi masing-masing indikator ekonomi pembangunan antara tingkat pengangguran dengan persentase penduduk miskin.

Gambar 2.8
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2021

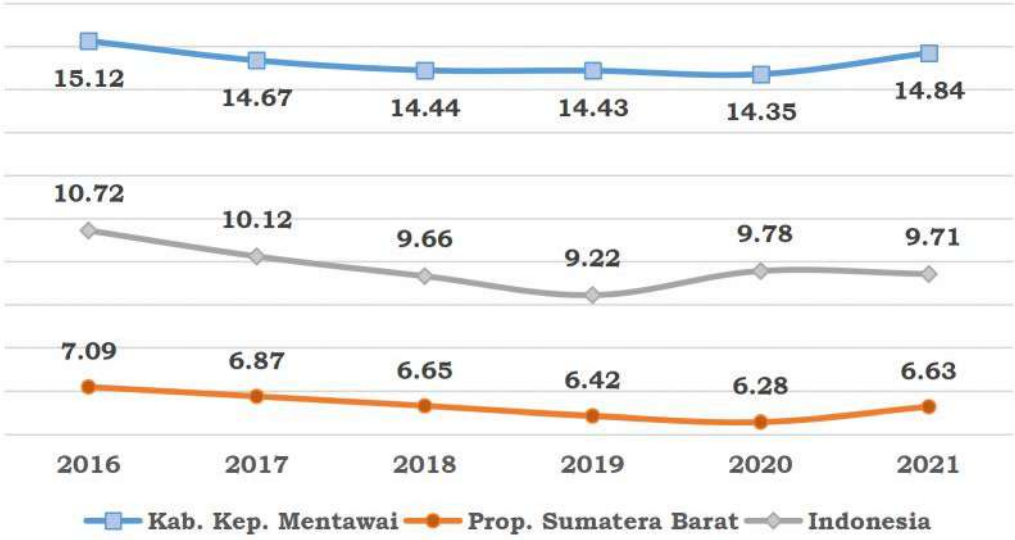

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Begitu juga jika dilihat dari perbandingan pencapaian penurunan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.8 menunjukkan bahwa pencapaian tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada jauh diatas pencapaian penurunan tingkat kemiskinan Propinsi Sumatera Barat dan secara Nasional. Pada Tahun 2021 tingkat kemiskinan Propinsi Sumatera Barat sebesar 6,63 persen,

Nasional sebesar 9,71 persen dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,84 persen. Jika dianalisis lebih dalam lagi indikator kemiskinan sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11
Indikator Kemiskinan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,70	0,61	0,42	0,77	0,63
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,58	2,42	1,87	2,84	2,43
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	280.695	294.284	310.033	340.191	356.403
Tingkat Kemiskinan (persen)	14,67	14,44	14,43	14,35	14,84
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	12.950	12.990	13.200	13.370	14.310

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Tabel 2.11 menunjukkan perkembangan berbagai indikator kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren penurunan, pada tahun 2017 capaiannya sebesar 0,70 dan mengalami penurunan menjadi 0,42 pada tahun 2019 dan ada kenaikan pada tahun 2020 menjadi 0,77 sebagai dampak COVID-19 lalu kembali turun menjadi 0,63 di tahun 2021. Capaian indeks keparahan kemiskinan dalam kurun waktu 2017-2021 mengindikasikan bahwa semakin rendahnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kepulauan Mentawai.

Begitu juga dengan indikator indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2017-2021 menunjukkan tren penurunan yaitu pada tahun 2017 sebesar

2,58 lalu turun pada tahun 2019 menjadi 1,87, walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,87 lalu turun pada tahun 2021 menjadi 2,43. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan kurun waktu 2017-2021 menunjukkan kecenderungan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin kecil. Kondisi ini menggambarkan tentu masih perlunya penanganan melalui program pembangunan yang terintegrasi dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kepulauan Mentawai.

4. Rasio Gini

Rasio gini menjadi salah satu ukuran untuk melihat sejauh mana pemerataan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Jika nilai rasio gini bernilai 0 maka dikatakan pemerataan pendapatan sempurna, namun jika rasio gini bernilai 1 maka dikatakan ketimpangan pendapatan sempurna.

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Ketimpangan Rendah
0,4 - 0,5	Ketimpangan Sedang
> 0,5	Ketimpangan Tinggi

Gambar 2.9 menunjukkan perkembangan rasio gini Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat dikatakan cukup baik. Walaupun pencapaiannya selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Namun secara tren perkembangannya berada pada

posisi 0,31. Perbandingan pencapaian Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional menunjukkan perkembangan yang baik, bahwa pencapaian Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 5 tahun terakhir berada di bawah rata- rata pencapaian Rasio Gini Nasional dan hanya terpaut 0,03 dari pencapaian rata-rata Rasio Gini Propinsi Sumatera Barat (0,31).

Capaian rasio gini Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan yaitu tahun 2020 sebesar 0,273 menjadi 0,321 pada tahun 2021. Artinya ada peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Kepulauan Mentawai. Namun, secara umum pencapaian rasio gini Kabupaten Kepulauan Mentawai 5 tahun terakhir masih dikategorikan pada tingkat ketimpangan rendah (0<rasio gini<0,4).

Gambar 2.9
Rasio Gini
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

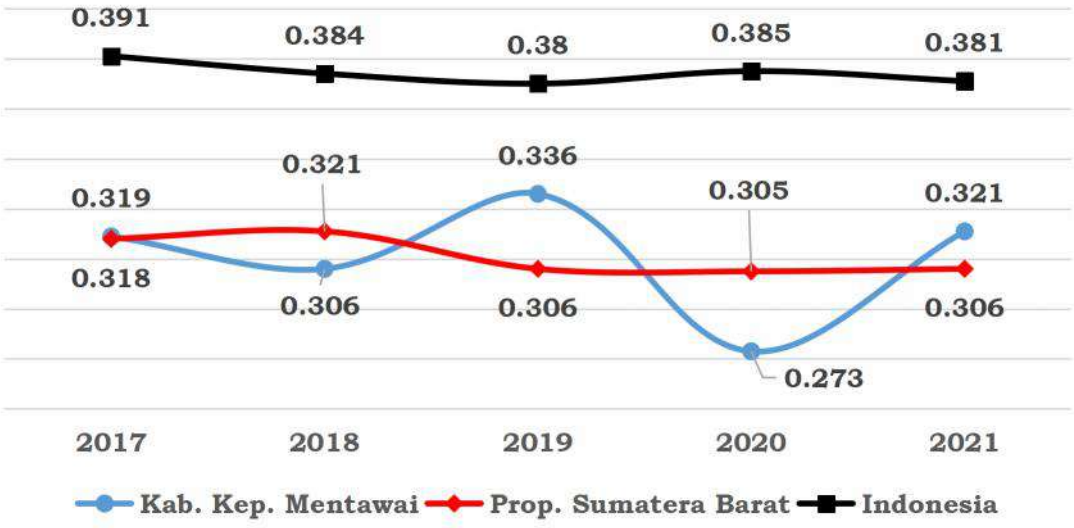

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

5. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita didefenisikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran.

Gambar 2.10
Pengeluaran Perkapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

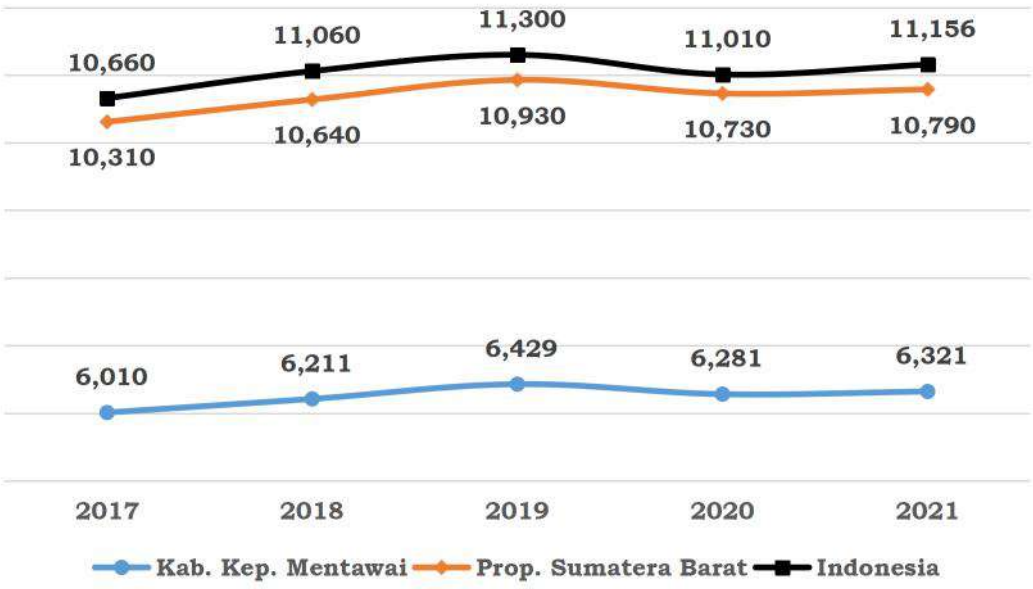

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran perkapita masyarakat Kepulauan Mentawai yang ditunjukkan melalui Gambar 2.10 memperlihatkan terjadi peningkatan pengeluaran perkapita, yaitu pada tahun 2017 pengeluaran perkapita masyarakat Kepulauan Mentawai sebesar Rp.6,01 juta/kapita/tahun naik pertahunnya hingga tahun 2021 menjadi sebesar Rp.6,32 juta/kapita/tahun, peningkatan ini mengindikasikan membaiknya ekonomi dan daya beli masyarakat. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19, yang mengakibatkan penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat yaitu menjadi sebesar 6,28 juta/kapita/tahun.

Tabel 2.12
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan
Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2021

Uraian	2020	%	2021	%
Makanan				
Padi-padian	68.080	10,93	78.576	12,38
Umbi-umbian	29.860	4,80	28.980	4,57
Ikan/udang/cumi/kerang	65.383	10,50	89.962	14,18
Daging	25.727	4,13	24.703	3,89
Telur dan susu	23.931	3,84	29.646	4,67
Sayur-sayuran	50.527	8,12	63.697	10,04
Kacang-kacangan	3.866	0,62	5.772	0,91

Uraian	2020	%	2021	%
Buah-buahan	95.736	15,38	22.379	3,53
Minyak dan kelapa	20.150	3,24	22.415	3,53
Bahan minuman	24.424	3,92	25.976	4,09
Bumbu-bumbuan	10.144	1,63	11.924	1,88
Konsumsi lainnya	7.196	1,16	9.559	1,51
Makanan dan minuman jadi	114.890	18,45	119.181	18,78
Rokok	82.694	13,28	101.848	16,05
JUMLAH (I)	622.608		634.621	
Bukan Makanan				
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	165.468	52,64	222.319	53,15
Aneka komoditas dan jasa	75.248	23,94	107.296	25,65
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	25.680	8,17	28.203	6,74
Barang tahan lama	16.348	5,20	23.098	5,52
Pajak, pungutan, dan asuransi	19.381	6,17	31.295	7,48
Keperluan pesta dan upacara	11.746	3,74	6.053	1,45
JUMLAH (II)	314.320		418.263	
TOTAL (JUMLAH I+II)	936.929		1.052.884	

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Pengeluaran rata-rata perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan total anggota rumah tangga tersebut. Tabel 2.12 menunjukkan perkembangan pengeluaran masyarakat per bulan berdasarkan jenis makanan dan non makanan. Dalam kurun tahun 2021 pengeluaran rata-rata perkapita sudah mengalami perbaikan yang ditandai dengan peningkatan mayoritas konsumsi atau pengeluaran di masing-masing uraian. Pergerakan barang dan orang atau mobilisasi yang

sudah mulai lancar menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya aktivitas masyarakat yang ditandai dengan peningkatan konsumsi.

Untuk jenis pengeluaran makanan (14 item) hampir seluruhnya mengalami kenaikan konsumsi di tahun 2021. konsumsi barang makanan pokok dan sehari-hari seperti padi-padian, ikan, udang, telur, susu, sayuran hingga pada konsumsi rokok mengalami kenaikan. Masa tanggap COVID-19 yang dirasakan dan menjadi atensi masyarakat di tahun 2020 sepertinya pada tahun 2021 sudah mulai terbuka, sehingga pemenuhan kebutuhan tidak sekedar antisipasi dan memenuhi kebutuhan kesehatan namun juga sudah pada memenuhi kebutuhan lainnya.

6. Tingkat Pengangguran

Salah satu faktor utama dalam pembangunan daerah adalah tersedianya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing. Penguatan sumberdaya manusia menjadi penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.13
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
Kab. Kepulauan Mentawai	1,96	2,31	2,92	3,98	2,79	2,79
Kab. Pesisir Selatan	5,95	6,03	6,02	7	5,97	6,19
Kab. Solok	6,05	6,12	4,72	4,65	4,67	5,24
Kab. Sijunjung	3,32	3,22	3,64	5,3	3,57	3,81
Kab. Tanah Datar	3,72	4,01	3,2	4,79	4,63	4,07
Kab. Padang Pariaman	6,65	7,03	6,08	8,13	8,41	7,26
Kab. Agam	4,23	4,93	4,78	4,61	5,06	4,72
Kab. Lima Puluh Kota	2,6	2,73	2,3	3,03	2,25	2,58
Kab. Pasaman	6,81	6,04	5,28	5,04	4,92	5,62
Kab. Solok Selatan	5,54	5,84	4,91	5,62	4,84	5,35
Kab. Dharmasraya	3,69	4,02	5,06	5,31	5	4,62
Kab. Pasaman Barat	3,99	3,36	4,74	4,69	5,02	4,36
Kota Padang	9,44	9,29	8,74	13,64	13,37	10,90
Kota Solok	5,88	6,03	7,06	8,35	5,15	6,49
Kota Sawahlunto	6,19	5,92	6,84	8,2	6,38	6,71
Kota Padang Panjang	5,43	5,35	4,38	7,22	4,9	5,46
Kota Bukittinggi	6,94	7,24	6,2	7,51	6,09	6,80
Kota Payakumbuh	3,45	3,95	4,13	6,68	6,47	4,94
Kota Pariaman	5,97	5,82	5,48	5,73	6,09	5,82
Prop. Sumatera Barat	5,58	5,55	5,32	6,88	6,52	5,97

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Tabel 2.13 menunjukkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat kurun waktu 2017-2021. Pada tabel tersebut dapat dilihat daerah dengan tingkat pengangguran terendah yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan rata-rata TPT sebesar 2,58 persen dan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata TPT sebesar 2,79 persen.

Tabel 2.14
Penduduk Angkatan Kerja Berusia 15 Tahun Keatas
Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			
	Bekerja (jiwa)	%	Pengangguran (jiwa)	%
Belum pernah bersekolah atau tidak menamatkan SD	214	0,41	-	
SD/MI/Sederajat	15.038	29,11	231	15,56
SMP/MTs/Sederajat	8.474	16,40	53	3,57
SMA/SMK/MAN/Sederajat	6.305	12,20	69	4,65
Diploma I, II	14.770	28,59	914	61,55
Diploma III	1.591	3,08	-	
Diploma IV/Strata I	817	1,58	87	5,86
Strata II/III	4.459	8,63	131	8,82
Jumlah	51.668	-	1.485	-

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Berdasarkan jumlah angkatan kerja Kepulauan Mentawai tahun 2021 seperti pada Tabel 2.14 menunjukkan bahwa kualitas angkatan kerja yang bekerja yang dilihat dari pendidikan tertinggi berada pada jenjang SD/MI/Sederajat sebesar 29,11 persen, tamatan SMA/SMK/MI/sederajat sebesar 12,20 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa *hard skill* penduduk Kepulauan Mentawai yang bekerja masih sangat rendah dan tidak memiliki nilai tawar yang kuat dalam dunia kerja, jika diakumulasikan tamatan SMA/SKM/MAN/sederajat hingga jenjang yang belum pernah bersekolah/tidak tamat SD angka ini bahkan mencapai 58,12 persen dari total angkatan kerja tahun 2021. Ini menjadi perhatian untuk memaksimalkan peranan sekolah kejuruan dan sekolah kesetaraan untuk meningkatkan disiplin ilmu dan keahlian masyarakat (angkatan kerja) di Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.15
Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2021

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Berusaha Sendiri	5.860	2.343	8.203	15,88
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	11.192	5.095	16.287	31,52
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	110	190	300	0,58
Buruh/Karyawan/Pegawai	5.683	4.635	10.318	19,97
Pekerja Bebas di Pertanian	870	98	968	1,87
Pekerja Bebas di non Pertanian	873	183	1.056	2,04
Pekerja Keluarga/Tak dibayar	4.896	9.640	14.536	28,13
Jumlah	29.484	22.184	51.668	

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Dilihat dari penduduk Kepulauan Mentawai yang bekerja (15+ tahun) seperti pada Tabel 2.15 menunjukkan bahwa status pekerjaan utama masyarakat Mentawai pada kriteria status pekerjaan penduduk berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tak dibayar dengan persentase sebesar 31,52 persen, dengan jumlah tenaga kerja laki-laki yang mendominasi (11.192 jiwa) sedangkan perempuan sebanyak 5.095 jiwa dan pekerja keluarga/tak dibayar dengan persentase sebesar 28,13 persen, dengan jumlah tenaga kerja perempuan lebih banyak yaitu sebesar 9.640 jiwa sedangkan pekerja laki-laki sebanyak 4.896 jiwa. Hal ini menjadi wajar dikarenakan oleh sektor primer (pertanian, peternakan dan perikanan) sebagai sumber utama mata pencarian masyarakat Mentawai dan masih bersifat kekeluargaan.

Tabel 2.16
Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	19.835	11.669	31.504	66,45
Industri Pengolahan, Pedagangan, Konstruksi, Transportasi, Akomodasi	3.904	2.860	6.764	14,27
Jasa-Jasa	4.995	4.150	9.145	19,29
Jumlah	28.734	18.679	47.413	

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama seperti pada Tabel 2.16 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Mentawai bekerja di sektor primer (pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan) yaitu sebanyak 31.504 jiwa atau sekitar 66,45 persen sedangkan untuk lapangan usaha di sektor industri pengolahan, pedagangan, konstruksi, transportasi, akomodasi, jumlah pekerja/ masyarakat yang bekerja di sektor ini berbeda jauh dengan jumlah di sektor primer yaitu hanya sebanyak 6.764 jiwa atau sekitar 14,27 persen dengan jumlah pekerja laki-laki mendominasi sebanyak 3.904 jiwa dan pekerja perempuan sebanyak 2.280 jiwa.

Gambar 2.11
Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021

Gambar 2.11 menunjukkan dominasi pekerja laki-laki untuk setiap sektor pekerjaan utama di Kepulauan Mentawai terutama di sektor industri pengolahan yaitu dengan kontribusi sebesar 57,71 persen atau sebanyak 3.904 jiwa. Namun, semakin berimbang di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebesar 62,96 persen, begitu juga di sektor jasa-jasa dengan dominasi pekerja laki-laki sebesar 53,05 persen atau sebanyak 19.835 jiwa.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator ukuran keberhasilan pembangunan dalam menyejahterahkan masyarakat dapat dilihat dari capaian indeks pembangunan manusia setiap tahunnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga)

dimensi dasar umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

Gambar 2.12
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

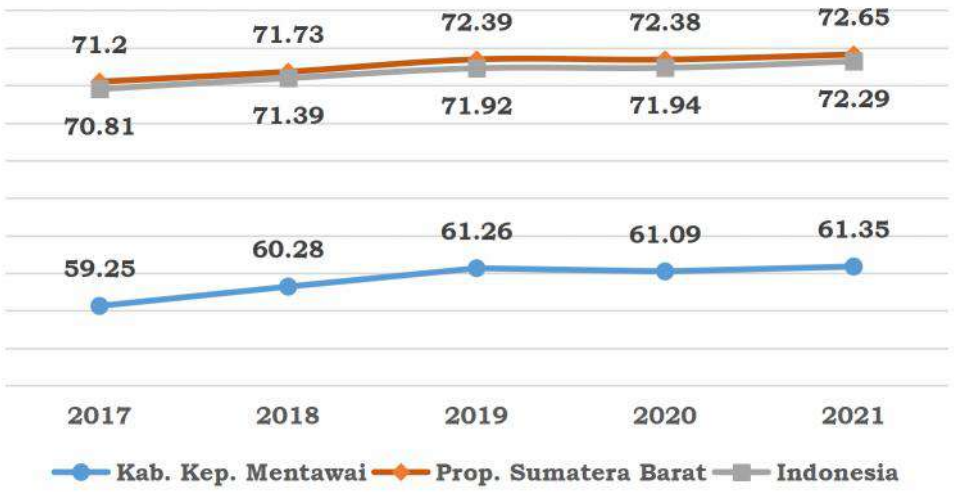

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2021 seperti terlihat dalam Gambar 2.12 Jika dilihat dari perbandingan capaian IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Propinsi Sumatera Barat dan nasional, tampak pada Gambar 2.12 bahwa capaian IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2017-2021 berada jauh dibawah capaian rata-rata IPM Propinsi Sumatera Barat dan Nasional. Capaian IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih di bawah pencapaian IPM menunjukkan belum baiknya kinerja elemen/indikator yang membangun IPM itu sendiri, antara lain harapan lama sekolah, rata lama sekolah, pendapatan perkapita dan angka harapan hidup masih rendah.

IPM ini merupakan angka komposit dari capaian angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Pada tahun 2017, capaian IPM Kepulauan Mentawai sebesar 59,25 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 61,26. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 61,09. penurunan ini terjadi pada sisi pengeluaran perkapita masyarakat selama pandemi yang mengalami penurunan lalu mengaami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 61,35.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Indeks pembangunan gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Pembangunan gender menjadi hal penting dalam melihat bagaimana kesetaraan gender yang lebih dimaknai sebagai

kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak -haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah capaian IPD Propinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Gambar 2.13
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

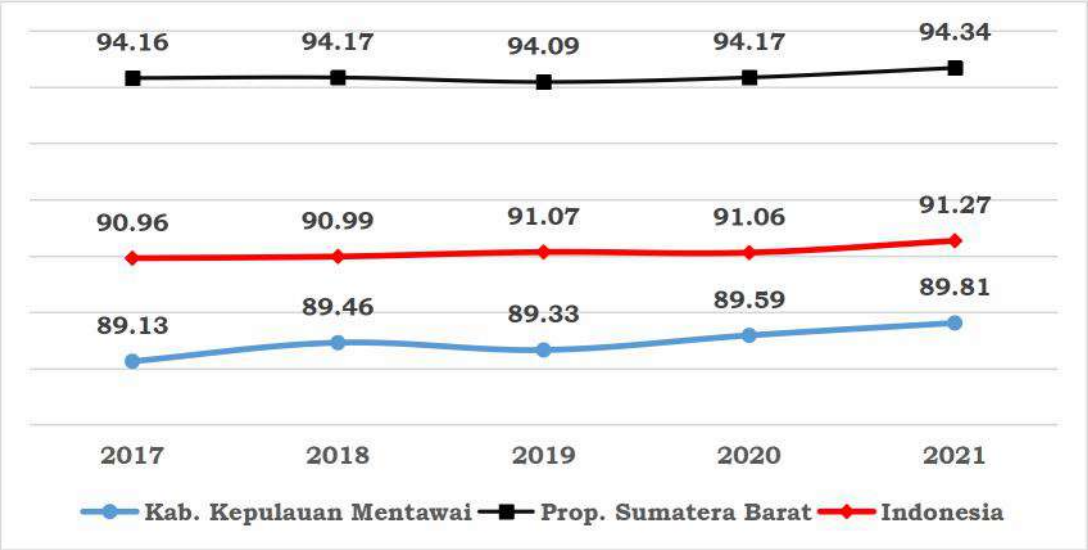

Sumber : BPS (diolah)

Gambar 2.13 menunjukkan perkembangan IPG Kepulauan Mentawai Tahun 2017 sebesar 89,13 mengalami peningkatan pencapaian hingga tahun 2021 IPG Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 89,81 artinya ketimpangan peran antara perempuan dengan laki-laki semakin berkurang (menuju 100). Namun, jika dilihat dari tren perkembangan IPG Kepulauan Mentawai kurun waktu 2017-2021 menunjukkan tren menaik (peningkatan), berbeda dengan tren IPG Nasional yang menaik tapi sangat landai,

begitu juga tren IPG Propinsi Sumatera Barat tren menurun sangat landai. Kondisi ini tentunya menjadi optimisme peningkatan IPG tahun-tahun berikutnya agar capaiannya jauh lebih baik.

3. Rata dan Harapan Lama Sekolah

Mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Amanat tersebut membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut andil dalam penyelenggaraan kegiatan sosial kemanusiaan. Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sejatinya pembangunan ekonomi daerah yang mengalami peningkatan haruslah berbanding lurus pembangunan manusianya.

Gambar 2.14 menunjukkan perkembangan rata-rata lama sekolah di Kepulauan Mentawai setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tahun 2017 rata-rata lama sekolah di Kepulauan Mentawai sebesar 6,69 tahun naik setiap tahunnya hingga tahun 2021 menjadi sebesar 7,2 tahun atau setara dengan kelas 7 SMP/sederajat. Jika dibandingkan dengan capaian Propinsi Sumatera Barat (9,07 tahun atau setara dengan kelas 8-9

SMP/sederajat) dan secara Nasional (8,54 tahun atau setara dengan kelas 8 SMP/sederajat) tentunya capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih jauh dibawahnya (tampak seperti Gambar 2.14).

Gambar 2.14
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

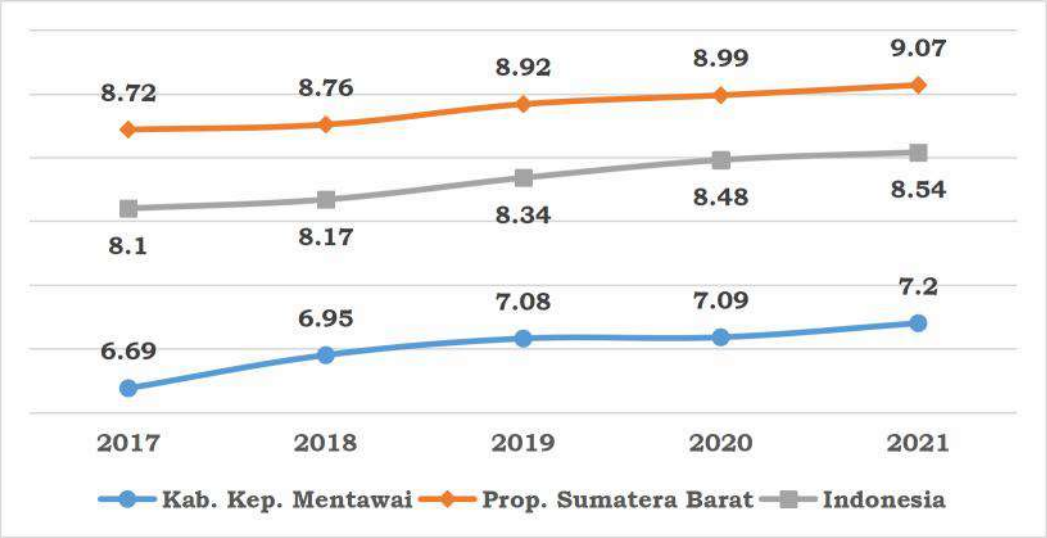

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Begitu juga capaian harapan lama sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditampilkan melalui Gambar 2.15 menunjukkan bahwa capaian harapan lama sekolah selama kurun waktu 2017-2021 berada dibawah capaian harapan lama sekolah Propinsi Sumatera Barat dan Nasional. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Gambar 2.15
Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

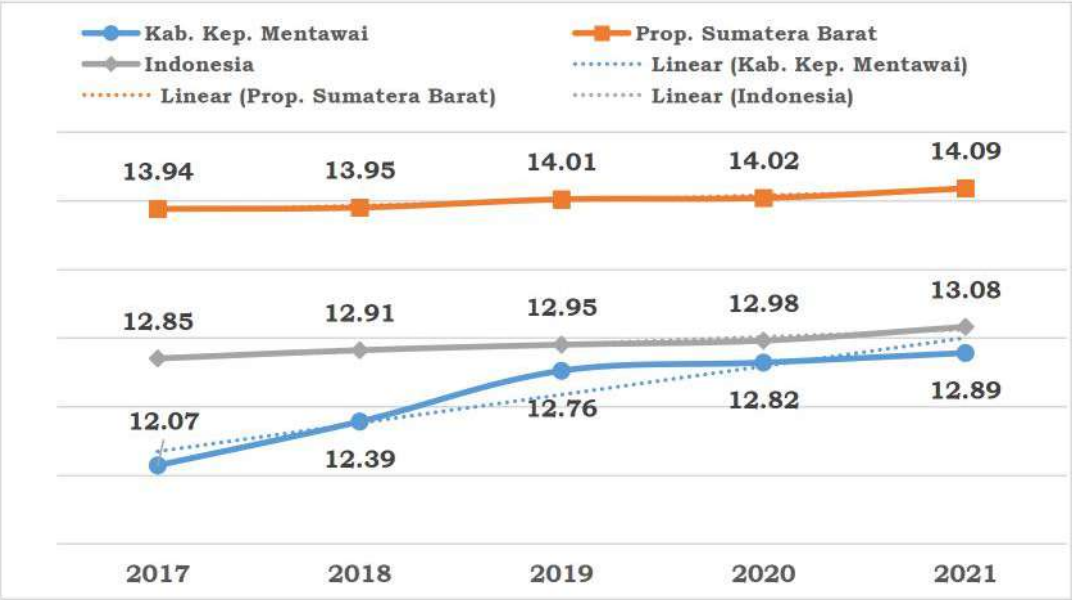

Sumber : BPS (diolah)

Pada tahun 2017 harapan lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 12,07 tahun dan setiap tahun meningkat hingga tahun 2021 menjadi sebesar 12,89 tahun atau setara dengan Diploma I atau Perguruan Tinggi (PT) semester 1. Capain Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kepulauan Mentaai masih jauh berada dibawah capaian HLS Propinsi Sumatra Barat dan secara Nasional. Namun, jika dilihat dari tren capaiannya bahwa proyeksi capaian HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan (tren menaik tajam).

4. Angka Harapan Hidup

Kebijakan pembangunan kesehatan di daerah diarahkan pada upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan daerah tertinggal yaitu dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan

pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan agar derajat kesehatan masyakarat yang diukur dengan indikator-indikator kesehatan dapat tercapai dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Angka harapan hidup didefenisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Gambar 2.16
Angka Harapan Hidup (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

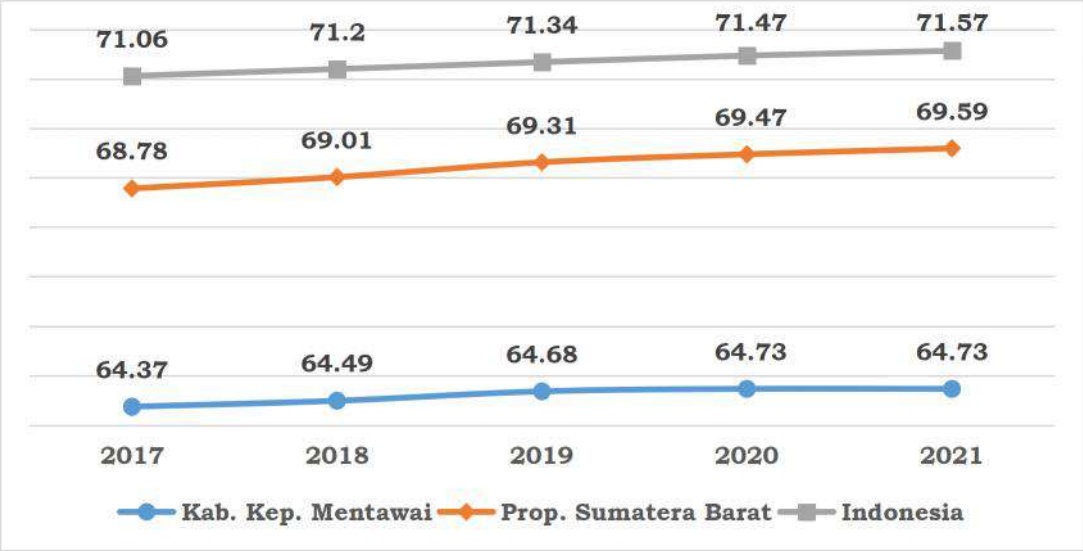

Sumber : data (diolah)

Pada Gambar 2.16 menunjukkan perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat di Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan pencapaian, ini terlihat pada tahun 2017 AHH Kepulauan Mentawai sebesar 64,37 tahun meningkat setiap

tahunnya hingga pada tahun 2021 menjadi sebesar 64,73 tahun. Jika dibandingkan capaian AHH Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan capaian AHH Propinsi Sumatera Barat dan secara Nasional, tentunya capaian AHH Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah capaian AHH Propinsi Sumatera Barat dan Nasional (Gambar 2.16). Upaya peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) sangat erat kaitannya angka kematian anak lahir, gizi yang cukup bagi ibu hamil dan bayi lahir, nutrisi dan gizi bagi anak, pola hidup sehat dan produktivitas, kualitas lingkungan, kualitas hidup bagi lanjut usia

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaan melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa dilakukan dalam upaya pelestarian tata cara/norma kehidupan bermasyarakat. Meningkatkan kepedulian dan minat masyarakat menjadi hal penting dalam menunumbuhkembangkan nilai-nilai budaya pada masyarakat

terutama kaum muda agar nilai tersebut berkelanjutan dan lestari kegenerasi berikutnya.

Tabel 2.17
Perkembangan Seni dan Budaya
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	2	8	0	0
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	5	1	1	2
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	55	55	55	55	55

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Melalui berbagai even/festival yang dilakukan juga berbagai pembangunan sarana, pelestarian objek dan warisan budaya diharapkan mampu memajukan kebudayaan daerah sehingga menjadi lestari dan dikenal dengan baik.

Tabel 2.18
Perkembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah organisasi pemuda	16	16	9	10	10
2	Jumlah organisasi olahraga	23	23	10	10	10
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	5	5	0	0
4	Jumlah kegiatan olahraga	12	12	10	3	0
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	5	5	30	0	0
6	Lapangan olahraga	209	209	267	5	5
	Total	270	270	331	28	25

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Perkembangan keolahragaan di Kepulauan Mentawai sangat identik dengan kehidupan bermasyarakat Mentawai, sejak tahun 2020 kegiatan even olahraga dan kepemudaan tidak terselenggara yang disebabkan oleh pendemi COVID-19. Beberapa sarana keolahragaan dimasing-masing desa juga beberapa dalam kondisi tidak terawat dan tidak difungsikan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan pelayanan yang secara umum dibutuhkan dan menjadi prasyarat kehidupan masyarakat yang bermartabat dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga atas suatu barang jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Pelayanan umum ini pada dasarnya terbagi 2 (dua) urusan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisa kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yaitu : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman; (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; (6) sosial.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahan tersebut antara lain kemiskinan dan pengangguran serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan manusia juga harus dapat diukur. Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat berlaku di semua wilayah. Membuka akses pelayanan pendidikan menjadi kebutuhan prioritas dalam membangun dunia pendidikan. Pembangunan unit sekolah baru maupun rehabilitasi sekolah selalu diupayakan dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Letak geografis Kepulauan Mentawai menjadi tantangan tersendiri dalam membuka akses sekolah bagi masyarakat, selain terkait alokasi anggaran peran lintas sektoral juga ikut dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Keunggulan suatu bangsa tak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi, sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan *welfare dependency* yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Secara rasional dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kualitas hidup manusia akan semakin baik, karena dengan ilmu pengetahuannya ia dapat mengelola dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh para ahli aliran klasik yang menganggap manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusianya (Smith, 1790). Pembangunan pendidikan merupakan untuk membentuk modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan ekonomi yang tidak lain merupakan investasi dalam jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan, pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk, dimana pertumbuhan produktivitas penduduk tersebut merupakan motor

penggerak (*engine of growth*) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk itu sendiri.

Tabel 2.19
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2021

Karateristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak Bersekolah lagi
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	
JENIS KELAMIN					
Laki-Laki	6,22	17,64	6,58	7,25	62,31
Perempuan	10,01	20,96	6,77	5,12	57,14
KELOMPOK PENGELUARAN					
40 Persen Terbawah	10,60	23,75	6,43	4,70	54,53
40 Persen Tengah	8,32	18,97	6,50	6,77	59,44
20 Persen Atas	NA	11,01	NA	NA	70,85
Kabupaten Kepulauan Mentawai	8,07	19,26	6,67	6,21	59,79

Sumber: SATKESRA KKM 2021

Penduduk Mentawai yang berumur 5 tahun keatas dengan status pendidikan tidak bersekolah lagi sebesar 59,79 persen dan dengan status pendidikan tidak/belum pernah bersekolah sebesar 8,07 persen. Artinya ada sekitar 67,86 persen masyarakat Mentawai yang belum pernah dan belum menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu, sehingga selain memastikan akses layanan pendidikan formal bagi masyarakat juga memfasilitasi masyarakat yang akan mengikuti pendidikan kesetaraan sehingga secara formal jenjang pendidikannya telah terpenuhi.

Tabel 2.20
Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik
dan Kemampuan Membaca dan Menulis (Persen), 2021

Karakteristik Penduduk	Huruf Latin	Lainnya
Laki-laki	98,62	10,09
Perempuan	97,73	9,57
Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah	97,95	3,47
Kelompok Pengeluaran 40% Tengah	97,58	6,26
Kelompok Pengeluaran 20% Teratas	99,69	26,24
Kepulauan Mentawai	98,20	9,85

Sumber : Satkesra KKM 2021

Jika dilihat dari karakteristik penduduk dengan kemampuan membaca menulis tampak pada Tabel 2.20 bahwa pada tahun 2021 angka melek huruf di Kepulauan Mentawai telah mencapai 98,20 persen, artinya penduduk Mentawai tinggal sekitar 1,8 persen yang tidak bisa membaca dan menulis. Dari capaian ini terdapat sebanyak 98,62 persen laki-laki dan 97,73 persen perempuan sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Begitu juga jika diperbandingkan berdasarkan tingkat pendapatan 40 persen terbawah bahwa sebanyak 97,95 persen telah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Indikator ini penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Gambar 2.17 menunjukkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan SMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2017-2022 dengan tren peningkatan. Untuk APK PAUD mengalami

pningkatan jika dilihat perkembangan caaian mulai dari tahun 2018 sebesar 6,57 persen menjadi 19,05 persen di tahun 2021.

Gambar 2.17
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

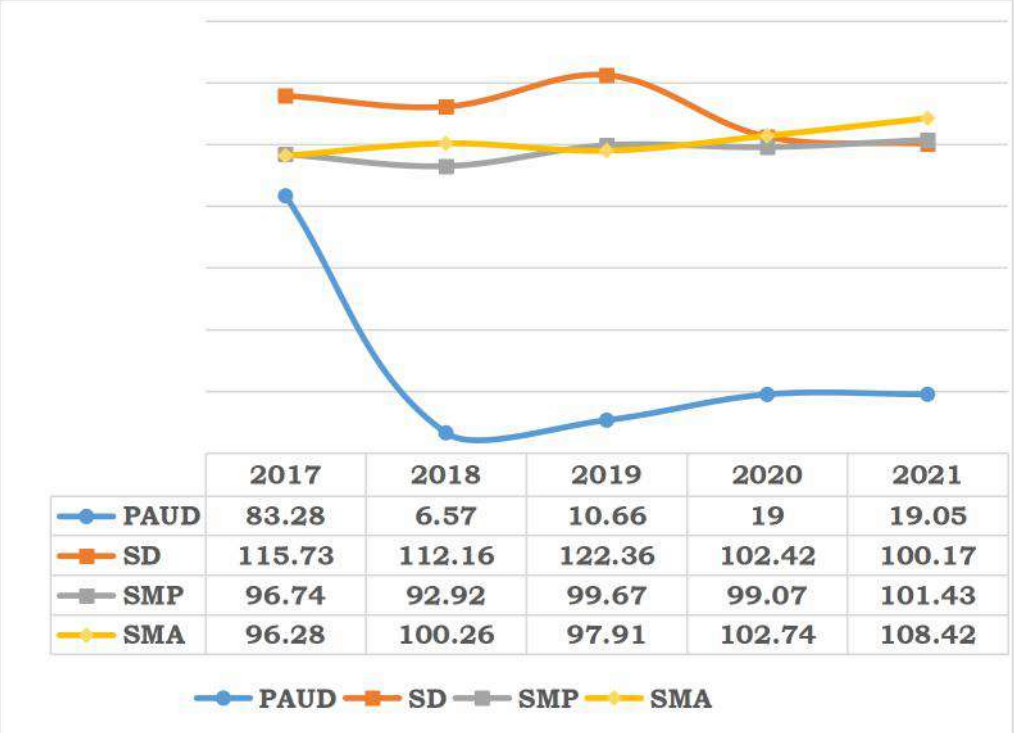

	2017	2018	2019	2020	2021
PAUD	83.28	6.57	10.66	19	19.05
SD	115.73	112.16	122.36	102.42	100.17
SMP	96.74	92.92	99.67	99.07	101.43
SMA	96.28	100.26	97.91	102.74	108.42

Sumber : https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/

Untuk jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan SD/sederajat sesuai dengan kelompok umur usia sekolah SD/sederajat hingga Tahun 2021 (APK) kurun waktu 2017-2021 sudah melebihi 100 persen, artinya bahwa jumlah peserta didik SD/sederajat sudah melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang seharusnya. Jika dilihat dari tren perkembangan APK SD/sederajat mengalami penurunan capaian, tentunya ini menjadi perhatian bagi masyarakat juga pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat terutama yang

masyarakat yang tidak berusia sekolah jenjang SD/sederajat karena terdapat 11.753 jiwa atau 24,17 persen angkatan kerja belum pernah bersekolah atau tidak menamatkan SD/sederajat. Untuk capaian APK SMP/sederajat juga mengalami penurunan. Capaian APK SMP/sederajat tahun 2017 sebesar 96,74 persen capaiannya meningkat hingga tahun 2021 menjadi sebesar 101,43 persen. Hal ini menjadi perhatian serius terkait kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak pada produktivitas. Begitu juga dengan APK SMA/sederajat, walaupun secara tren mengalami peningkatan dari 96,28 persen pada tahun 2017 menjadi 108,42 persen tahun 2021 tentu menjadi perhatian serius bagaimana meningkatkan minimal penduduk usia produktif jenjang pendidikannya tamatan SMA/sederajat, agar dari sisi kapasitas dan produktifitas dapat memadai.

Gambar 2.18 menunjukkan seberapa besar penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan tepat waktu dan pada rentang umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Untuk setiap jenjang pendidikan SD/sederajat, SMP/sederajat dan SMA/sederajat capaian APM belum mencapai 100 persen, artinya masih terdapat masyarakat pada usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu belum mendapatkan layanan pendidikan.

Gambar 2.18
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

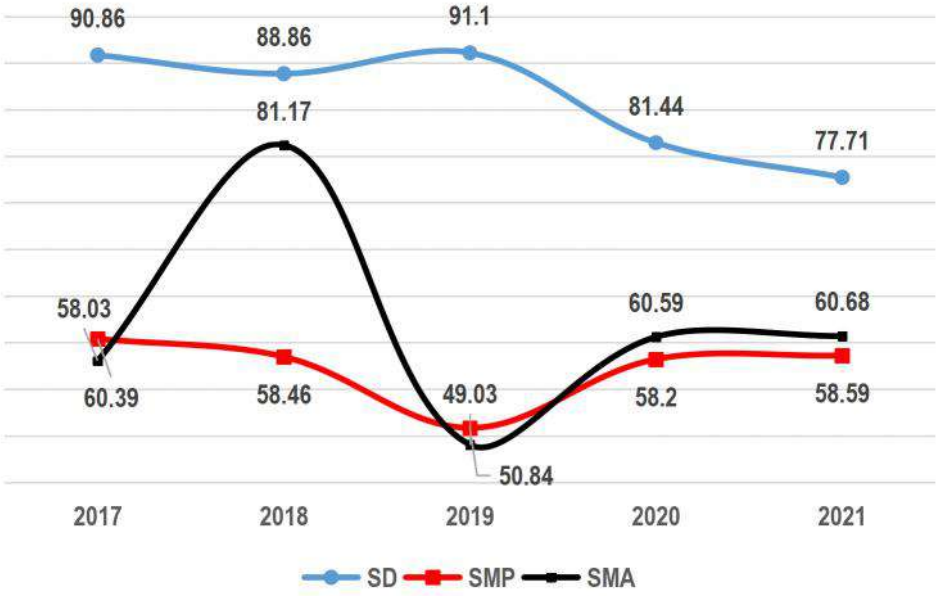

Sumber : https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/

Untuk APM SMP/sederajat pencapaiannya masih sangat rendah yaitu pada tahun 2021 sebesar 58,59 persen, sedangkan untuk jenjang SD/sederajat mengalami tren penurunan dari 90,86 persen ditahun 2017 turun menjadi sebesar 77,71 persen tahun 2021. Begitu juga capaian APM untuk jenjang sekolah SMA/sederajat, jika dilihat dari tren capaiannya menunjukkan penurunan yaitu tahun 2017 APM SMA/sederajat sebesar 58,03 persen hingga tahun 2021 menjadi 60,68 persen. Artinya ada sekitar 39,32 persen peserta didik jenjang SMA/sederajat bersekolah sesuai dengan usia dijenjang pendidikan SMA/sederajat.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan

layanan dan fasilitas pendidikan. Gambar 2.19 menunjukkan APS kelompok usia 7-12 tahun dan kelompok usia 13-15 tahun belum mencapai 100 persen tahun 2017 dan hingga tahun 2021 capaiannya mendekati 100 persen, kondisi menggambarkan bahwa hampir 100 persen penduduk berusia 7-12 tahun dan penduduk berusia 13-15 tahun sedang bersekolah dan menikmati sarana dan fasilitas pendidikan.

Gambar 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

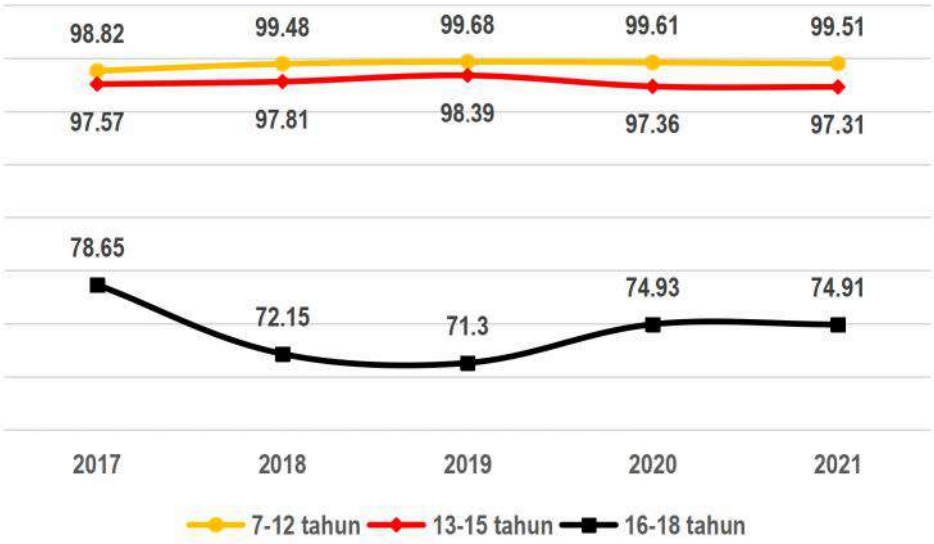

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Namun jika dilihat capaian APS untuk kelompok usia 16-18 tahun menunjukkan tren penurunan. APS kelompok usia 16-18 tahun sejak tahun 2017-2021 mengalami penurunan mulai dari 78,65 persen turun hingga menjadi 74,91 persen. Artinya hanya sekitar 74,91 persen penduduk berusia 16-18 tahun di Kepulauan Mentawai yang sedang bersekolah.

Baiknya, ada batasan jumlah tertentu di mana guru dapat membimbing peserta didiknya di setiap kelas atau rombongan belajar. Hal tersebut dapat menunjang efektivitas dan efisiensi selama proses pembelajaran. Gambar 2.20 menunjukkan perkembangan rasio guru dan siswa yang mengalami penurunan. Untuk jenjang pendidikan SD/sederajat rasio guru dan murid sebesar 1:9, untuk SMP/sederajat sebesar 1:10 dan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat sebesar 1:10.

Gambar 2.20
Perkembangan Rasio Siswa Terhadap Guru
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

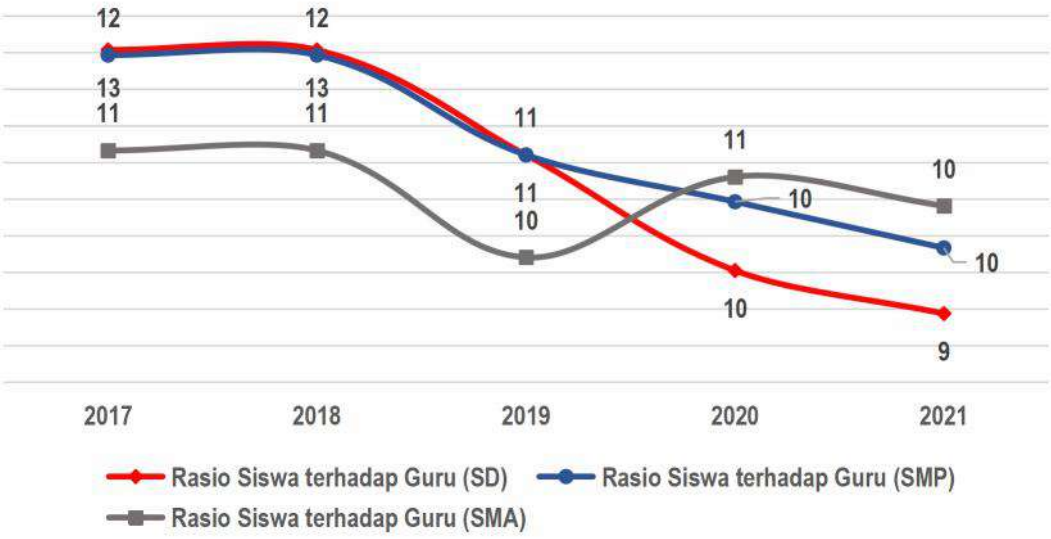

Angka ini mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru dalam sebuah sekolah, berarti semakin mengurangi efektivitas proses pembelajaran karena tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid menjadi berkurang sehingga mutu pengajaran cenderung lebih rendah. Baiknya, ada batasan jumlah

tertentu di mana guru dapat membimbing peserta didiknya di setiap kelas atau rombongan belajar. Hal tersebut dapat menunjang efektivitas dan efisiensi selama proses pembelajaran. Namun, jika capaian rasio guru dan murid dibandingkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) disetiap jenjang pendidikan tentu akan bertolak belakang, dalam artian capaian rasio guru dan murid yang samakin baik tidak sejalan dengan cakupan partisipasi sekolah di usia sekolah yang tren pencapaiannya menurun. Capaian indikator pendidikan ini tentunya ini menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah dalam memajukan sektor pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk melihat sejauhmana akses pendidikan dapat dijangkau oleh masyarakat pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Secara umum pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 mengalami peningkatan pencapaian dibandingkan pencapaian di tahun 2017 untuk setiap jenjang pendidikan kecuali di jenjang pendidikan SMA/sederajat. Kondisi ini menjadi perhatian dikarenakan secara anggaran, pengalokasian untuk sektor pendidikan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar 20 persen.

Tabel 2.21
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	APS 7-12 tahun	98,82	99,48	99,68	99,61	99,51
2	APS 13-15 tahun	97,57	97,81	98,39	97,36	97,31
3	APS 16-18 tahun	78,65	72,15	71,3	74,93	74,91

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Tabel 2.21 menunjukkan tren peningkatan pencapaian angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SD/sederajat atau 7-12 tahun, SMP/sederajat atau 13-15 tahun dan SMA/SMK/sederajat atau 16-18 tahun. Pada jenjang pendidikan SD/sederajat peningkatan capaian dimulai sejak tahun 2017 telah mendekati 100 persen. Ini artinya bahwa pada jenjang pendidikan SD/sederajat, seluruh peserta didik pada usia sekolah sudah mengenyam pendidikan SD/sederajat. Begitu juga pada jenjang pendidikan SMP/sederajat juga mengalami peningkatan pencapaian. Pada tahun 2017 mencapai 97,57 persen, hingga pada tahun 2021 pencapaian APS SMP/sederajat mencapai 97,31 persen. Namun pencapaian positif pada angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD/sederajat dan SMP/sederajat tidak sejalan dengan pencaiapan APS pada jenjang pendidikan SMA/sederajat. Pada tahun 2017 capaian APS SMA/sederajat sebesar 78,65 persen mengalami peningkatan pencapaian hingga pada tahun 2021 capaian APS SMA/sederajat sebesar 74,91 persen. Penurunan capaian ini jika dianalisis diindikasikan berbagai faktor selain faktor sosial budaya masyarakat juga disebabkan

oleh peralihan kewenangan sebagai amanat undang-undang pemerintahan daerah.

Untuk rata-rata kemampuan literasi SD sesuai assesment Nasional dan Rata-rata kemampuan literasi SMP sesuai assesment Nasional dimana masing-masing indikator literasi berada pada angka 2 artinya peserta didik telah memiliki kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).

Rata-rata kemampuan numerasi SD sesuai assesment Nasional dan rata-rata kemampuan Numerasi SMP sesuai assesment Nasional masing-masing berada pada angka 1,65 (SD) dan 1,61 (SMP), artinya peserta didik telah memiliki kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraannya, masyarakat yang yang sakit, akan terkendala untuk melakukan kegiatan yang produktif, penurunan penghasilan dan pendapatan, sehingga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kondisi fisik dan non fisik. Secara langsung kondisi fisik seseorang akan ditentukan oleh tingkat kesehatannya, sedangkan kondisi non fisik seperti tingkat

intelektual, pengendalian emosional juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan seseorang.

Kesehatan yang buruk secara langsung menurunkan potensi kognitif dan secara tidak langsung mengurangi kemampuan sekolah. Penyakit dapat membuat miskin keluarga melalui menurunnya pendapatan, menurunnya angka harapan hidup, dan menurunya kesejahteraan psikologis.

Ketimpangan dan diskriminasi dalam memberikan layanan kesehatan serta ketidaksiapan negara/ daerah dalam menanggulangi ancaman wabah/penyakit akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, seperti pada Pandemi COVID-19 yang berlangsung hingga saat ini telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Kesiapan negara dalam mengelola dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tentunya akan berbanding lurus pada pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Angka kesakitan atau morbiditas adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan disini diartikan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi.

Tabel 2.22
Angka Kesakitan Menurut Karakteristik (Persen), 2021

Karakteristik Penduduk	2020	2021
Laki-laki	16,19	14,11
Perempuan	16,88	14,61
40% Terbawah	15,30	17,25
40% Tengah	19,17	14,44
20% Teratas	NA	8,48
Kepulauan Mentawai	15,21	14,37

Sumber : SATKESRA KKM, 2021

Angka kesakitan masyarakat Kepulauan Mentawai Tahun 2021 secara keseluruhan adalah sebesar 14,37 persen. Artinya ada sekitar 14,37 persen dari total penduduk mengalami keluhan kesehatan menurun jika dibandingkan dengan angka kesakitan tahun 2020 yang sebesar 15,21 persen. Pola hidup sehat, perbaikan kualitas lingkungan dan penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan menjadi hal penting dalam uoaya pengurangan tingkat kesakitan yang dialami oleh masyarakat. Jika dilihat lagi berdasarkan jenis kelamin, bahwa tingkat kesehatan atau keluhan kesehatan lebih banyak dialami oleh perempuan yaitu sebesar 14,61 persen, sedangkan laki-laki sebesar 14,11 persen. Begitu juga, jika dilihat persentase pengeluaran masyarakat, dari Tabel 2.22 menunjukkan bahwa penduduk dengan pengasilan 40 persen berpengeluaran sedang dan rendah lebih banyak mengalami keluhan kesehatan yaitu sebesar 59,41 persen dan 53,32 persen.

Tabel 2.23
Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik Penduduk	2020	2021
Laki-laki	51,33	44,12
Perempuan	54,65	39,63
40% Terbawah	41,99	20,75
40% Tengah	59,41	57,43
20% Teratas	53,32	74,59
Kepulauan Mentawai	53,00	41,97

Sumber : SATKESRA KKM 2021

Masyarakat Kepulauan Mentawai yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 41,97 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 53,00 persen. Capaian ini tentu masih sangat rendah untuk layanan kesehatan yang diterima masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin yang berada pada rentang 40 persen pendapatan terendah yang pada angka 20,75 persen, artinya lebih setengah masyarakat miskin tidak menggunakan jaminan kesehatan dalam melakukan layanan kesehatannya.

Berbagai persoalan kemungkinan penyebab tidak maksimalnya penggunakan jaminan kesehatan daerah untuk melayani masyarakat terkhususnya masyarakat miskin dan rentan miskin di Kepulauan Mentawai. Fakta ini sangat bertolak belakang dengan kucuran iuran yang disalurkan ke BPJS kesehatan untuk memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin.

Balita yang telah mendapatkan imunisasi lengkap pada tahun 2021 masih pada angka 30,30 persen, hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah pasangan atau ibu yang memiliki kartu imunisasi yang sudah pada angka 90,61 persen.

Tabel 2.24
Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita)
yang Pernah Mendapat Imunisasi (Persen), 2021

Karakteristik Penduduk	Memiliki Kartu Imunisasi	Mendapat Imunisasi Lengkap
Laki-laki	93,22	26,28
Perempuan	86,78	36,21
40% Terbawah	81,54	27,29
40% Tengah	97,84	NA
20% Teratas	97,10	NA
Pendidikan Tertinggi KRT (SD kebawah)	84,80	27,84
Pendidikan Tertinggi KRT (SMP keatas)	95,20	32,24
Kepulauan Mentawai	90,61	30,30

Sumber : SATKESRA KKM 2021

Begitu juga dengan Keluarga yang mendapatkan imunisasi dengan pendidikan tertinggi kepala keluarga SD kebawah hanya sebesar 27,84 persen. Capaian ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam memberikan advokasi, himbauan bagi masyarakat yang memiliki balita (0-59 bulan) untuk melakukan imunisasi lengkap agar anak terpenuhi imun/daya tahan dan kekebalan tubuh anak. Kualitas kesehatan masyarakat juga sangat dipengaruhi dengan perilaku konsumsinya. Tabel 2.25 menunjukkan tingkat konsumsi rokok masyarakat Kepulauan Mentawai tahun 2021 sebesar 31,66 persen sebagaimana rata-rata konsumsi nasional sebesar 30-32 persen. Untuk persentase

perokok penduduk dengan pendidikan tertinggi SD ke bawah sebesar 32,01 persen lebih tinggi dari penduduk perokok dengan tingkat pendidikan SMP keatas yaitu sebesar 31,66 persen. Rata-rata jumlah rokok yang dikonsumsi setiap minggu adalah sebanya 147 batang, artinya dalam seminggu pengeluaran untuk kebutuhan rokok sebesar Rp.294.000.

Tabel 2.25
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok
dan Rata-rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu (Persen), 2021

Karakteristik Penduduk	2021	
	Perokok	Rata-rata Batang Rokok per Minggu
40% Terbawah	29,64	154,86
40% Tengah	33,89	135,70
20% Teratas	30,92	157,49
Pendidikan Tertinggi SD ke bawah	32,01	148,48
Pendidikan Tertinggi SMP ke atas	31,30	145,76
Kepulauan Mentawai	31,66	147,14

Sumber : SATKESRA KKM 2021

Jika dihitung dari jumlah rata-rata konsumsi rokok perbatang perhari, bahwa sebanyak 21 batang/hari atau setara dengan 1 bungkus rokok. Konsumsi rokok ini tentunya akan sangat menguras pendapatan dan menambah pengeluaran. Persentase pengeluaran penduduk pengkonsumsi rokok, bahwa mayoritas pengkonsumsi rokok terbesar adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran 40 persen tengah dan 20 persen teratas yaitu dengan persentase 33,89 persen dan 30,92 persen.

Tabel 2.26
Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Indikator Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup (tahun)	64,37	64,37	64,49	64,73	64,73
Prevalensi Stunting	31,87	31,7	25,2	19,3*	27,3
Angka Kematian Bayi (kematian/1.000 kelahiran hidup)	19	22,6	24,8	20,2	23
Angka Kematian Balita (1.000 balita)	30	27,9	28,1	3,6	3,2
Angka Kematian Ibu (kematian/100.000 kelahiran hidup)	328	332	191,3	356,3	207
Prevalensi Gizi kurang	8,20	6,3	3,6	10,1	12,7
Cakupan Desa UCI (%)	60	62,79	27,91	61,36	59,52
Kunjungan ibu hamil)%)	51,6	46,4	43,86	43,9	53,1
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	2,65	2,66	50,97	50,99	66,50
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin (%)	66,69	54,13	40,04	61,76	55,14
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	60,9	57,6	32,58	65,33	59,07
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	41,69	34,57	35,18	27,24	58,01
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	NA	NA	NA	12,74	17,74
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	2,57	30,9	37	31,71	32,71
Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	NA	4,18	0,9	8,79	84,61
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	NA	16,48	NA	15,54	48,83
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0,65	29,3	31,5	14,36	10,88
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1,8	8,46	0,81	36,04	38,91
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan standar pelayanan TBC sesuai standar (%)	19,21	38,85	53,96	30,04	18,52

Indikator Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angka kesakitan Malaria	3,92	4	2,55	0,77	0,5
Angka kesembuhan TB	84,4	85,3	86,48	28,5	64
Rasio Daya Tampung RS Rujukan (TT/100.000 penduduk)	NA	NA	48	59	71
Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD

sumber : data (diolah), * data e-PPGM

Perkembangan indikator kinerja kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2017-2021 secara umum menunjukkan capaian yang sesuai dengan target yang direncanakan dalam rencana kerja jangka menengah daerah. Pada Tabel 2.26 menunjukkan beberapa capaian indikator kesehatan daerah selama 5 tahun terakhir. Capaian penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara tren selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yaitu dari 31,87 persen di tahun 2017 menjadi 27,3 persen di tahun 2021, peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat begitu juga pemenuhan asupan gizi kepada pasangan atau ibu hamil/ 1000 hari pertama kehidupan ketika sudah diketahui ada janin, begitu juga dengan pemantauan gizi ibu hamil yang senantiasa dilakukan melalui pelayanan kesehatan. Begitu juga perbaikan sarana dan prasarana lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan berupa pembangunan toilet RT, pengelolaan limbah, drainase dan berbagai intervensi yang terpadu. Akselerasi

penanganan stunting telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gerakan Mentawai Anti Stunting dan Gizi Buruk Pedulu Anak (Masgibur Dua) dengan sasaran intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

Indikator angka kematian bayi yang diukur dari jumlah kelahiran per 1.000 kelahiran hidup capaiannya juga mengalami perbaikan. Jumlah angka kematian bayi yang dilahirkan meninggal hingga berumur 1 tahun pada tahun 2017 sebanyak 19 kasus kematian lalu kasus ini meningkat dan pada tahun 2021 tercatat ada 23 kasus kejadian kematian bayi dari 1.000 kelahiran bayi hidup. Selain itu, indikator kesehatan lain yang sangat penting adalah angka kematian ibu yang capainnya atau kasusnya masih cukup tinggi. Pada tahun 2017 angka kematian ibu melahirkan tercatat 328 kasus mengalami penurunan hingga pada tahun 2021 tercatat sebanyak 207 kasus. Angka ini masih tergolong cukup tinggi karena 1 (satu) nyawapun ibu pada saat bersalin/melahirkan harus tertolong. Begitu juga dalam upaya penanggulangan stunting dan pemberian asupan vitamin melalui imunisasi kepada balita, capaian indikator cakupan desa UCI mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 cakupan desa UCI mencapai 60 persen dan capaian relatif konstan hingga tahun 2021 cakupannya menjadi sebesar 59,52 persen. Upaya peningkatan cakupan desa UCI terus dilakukan selain secara konvensional melalui posyandu yang telah

terjadwal setiap bulannya, juga dilakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan ataupun melalui kunjungan langsung ke rumah tangga.

Persentase kunjungan ibu hamil dalam kurun 5 tahu terakhir (2017-2021) mengalami peningkatan dari 51,6 persen tahun 2017 meningkat menjadi 53,1 persen di tahun 2021 dengan harapan menurunnya risiko atau kasus kematian ibu melahirkan dan anak lahir. Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2017 sebesar 26,5 persen meningkat pada tahun 2021 menjadi 66,50 persen. Begitu juga dengan persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan persalinan pada tahun 2021 sudah mencapai 55,14 persen, dan persentase bayi baru lahir yang mendalatkan layanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2021 sebesar 59,07 persen.

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 17,74 persen. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar masih pada kisaran 20-30 persen, yaitu pada tahun 2021 sebesar 32,71 persen. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sudah mencapai 84,61 persen pada tahun 2021 tentu ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat usia lanjut dan meningkatkan

angka harapan hidup masyarakat. Cakupan layanan kesehatan bagi penderita hipertensi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yaotu pada tahun 2018 sebesar16,48 persen meningkat menjadi 48,83 persen pada tahun 2021. Cakupan layanan penderita diabete smelitus (DM) juga mengalami peningkatan yaotu dari 0,65 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 10,88 persen pada tahun 2021. Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yaitu 38,91 persen pada tahun 2021. Untuk rasio daya tampung RS rujukan setiap tahunnya mengalammi peningkatan yaitu sebesar 71 TT per 100.000 penduduk, artinya telah tersedia sebanyak sekitar 71 tempat tidur untuk melayani rujukan dan rawatan di RS, angka ini juga sebagai syarat untuk peningkatan akreditasi layanan RS dimana hingga pada tahun 2021 masih pada akreditasi D dan satu-satunya RSUD yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pembangunan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki atau yang tersedia pada daerah tersebut. Tentunya tenaga kesehatan yang tersedia sudah seharusnya memiliki standar keahlian dimasing-masing disiplin ilmunya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga kesehatan melalui beberapa saluran, antara lain penerimaan CPNS, tenaga medis kontrak, tenaga penyuluh, kemitraan dengan perdesaan/dusun, tenaga kesehatan PTT dan melalui saluran lainnya.

Tabel 2.27
Jumlah Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Tenaga Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
Dokter	17	25	17	48	38
Perawat	267	329	160	297	137
Bidan	153	239	82	250	79
Dukun Bermitra	188	181	151	NA	NA

Sumber : Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Jumlah tenaga kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021 mengalami peningkatan jumlah yaitu untuk tenaga kesehatan perawat dan bidan. Untuk penyediaan tenaga kesehatan dokter masih menjadi tugas berat dalam menyediakan jasa layanan kesehatannya terkhusus di desa-desa dan dusun.

Pembangunan kesehatan adalah bentuk pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat. Tentunya akses terhadap layanan kesehatan harus menjadi catatan penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan sarana kesehatan untuk mempermudah dalam mengatasi permasalahan kesehatannya. Penyediaan sarana kesehatan sebagai sarana bagi masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan permasalahan kesehatan baik itu preventif, kuratif dan promotif kesehatan bagi masyarakat.

Ketersediaan layanan kesehatan berupa sarana dan prasarana kesehatan adalah dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses layanan kesehatan. Pusat layanan kesehatan masyarakat harus menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat tidak bersusah payah pergi ke daerah lain untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Tabel 2.28
Jumlah Layanan Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Sarana Layanan Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	RSUD	1	1	1	1	1
2	Puskesmas	10	12	14	15	15
3	Puskesmas Pembantu (Pustu)	18	22	39	38	27
4	Poskesdes	63	71	82	82	128
5	Posyandu	255	255	255	279	279
6	Polindes	11	39	52	33	33

Sumber : Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Tabel 2.28 menunjukkan perkembangan sarana kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami perkembangan dalam hal jumlah sarana, terutama di daerah terpencil yaitu di dusun-dusun. Tentunya tidak sekedar penyediaan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat, yang lebih esensial lagi adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan promosi pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat. Rasio tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Tabel 2.29

menunjukkan masih kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.29
Rasio Jumlah Tenaga Medis dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Tenaga Medis	625	781	259	595	428
2	Jumlah Penduduk	85.292	86.981	92.021	87.623	88.389
3	Rasio	136,46	111,37	355,29	147,26	206,52

Sumber : Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Angka rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk tahun 2017-2021 masih sangat besar, ini berarti masih perlu upaya yang keras dalam menyeimbangkan ketersediaan tenaga medis dengan kebutuhan masyarakat. Rasio jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk relatif masih sangat tinggi. Tahun 2017 rasio jumlah tenaga medis dan jumlah penduduk sebesar 136,46 dan di tahun 2021 sebesar 206,52 artinya untuk 1 orang tenaga kesehatan/medis melayani sekitar 205 penduduk.

Tabel 2.30
Jumlah Bayi yang Diberi Imunisasi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Jenis Imunisasi	2017	2018	2019	2020	2021
BCG	1.290	1.455	1.547	1.763	1.525
Polio 4	1.362	1.540	2.168	1.951	1.733
Campak	1.211	1.569	1.427	1.017	1.168
DPT 1	1.916	1.448	1.480	1.959	1.480

Imunisasi merupakan upaya pencegahan yang amat bermanfaat untuk mencegah penyakit-penyakit infeksi. Tujuan dari imunisasi adalah untuk melindungi anak dari penyakit

tertentu, yang pada akhirnya mengeradikasi suatu penyakit. Kesadaran masyarakat akan kesehatan sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pemberian imunisasi adalah salah satunya.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat dalam memperlancarkan aktivitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas serta daya saing.

Pembangunan jalan menjadi hal utama dan pertama yang harus disediakan pemerintah. Ketersediaan jalan menjadi prasayarat awal dalam pembangunan yang berkelanjutan. Jalan memegang peranan penting dalam kegiatan transportasi dan mobilitas penduduk. Sebagai penopang sistem sosial dan ekonomi masyarakat, jalan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan sektor lain, terutama dalam peningkatan sektor ekonomi riil masyarakat.

Tabel 2.31 menunjukkan panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kondisi baik terus mengalami penurunan kualitas hingga tahun 2021 total panjang jalan dengan kondisi baik hanya 59,09 km dari total panjang jalan yang ada 1.130 km atau 4,96 persen, sedangkan panjang jalan dengan

mkondisi rusak sedang tahun 2021 sekitar 630,2 km atau 55,76 persen dari total panjang jalan.

Tabel 2.31
Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Tahun	Kondisi Jalan (km)			Panjang Jalan (km)
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2017	92,31	63,35	972,8	1.130,2
2018	60,95	10,70	1.058,5	1.130,2
2019	64	41,10	616,90	1.130,2
2020	64,80	43,10	616,90	1.130,2
2021	59,09	630,2	443,91	1.130,2

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, mengingat peran strategis pembangunan jalan dalam memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.32
Kondisi Jalan Trans Mentawai, 2021

Rencana Jalan TRANS MENTAWAI (393,2 km)	Total Panjang hingga saat ini (km)	Yang Belum Terbangun (km)
Trans Sipora (77 km)	69,1	7,9
Trans Pagai Utara (63 km)	40	23
Trans Pagai Selatan (66 km)	58	8
Trans Siberut (187,2 km)	187,2	0
Total	356,3	38,9

Sumber : Dinas PUPR Kab.Kepulauan Mentawai

Perkembangan jalan trans Mentawai yang dilaksanakan melalui program pembangunan jalan tahun jamak (*multi years*) hingga tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hingga tahun 2021, panjang jalan yang telah dibangun adalah sepanjang 356,3 km dengan rincian trans Sipora sepanjang 69,1

km, trans Pagai Utara sepanjang 40 km, trans Pagai Selatan sepanjang 58 km, dan trans Siberut sepanjang 187,2 km. Secara total, panjang trans Mentawai yang belum terbangun adalah sepanjang 38,9 km. ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan pembukaan jalan trans Mentawai agar wilayah mulai dari ujung utara hingga selatan Pulau Siberut sudah terhubung, begitu juga di 3 pulau lainnya.

Gambar 2.21
Perkembangan Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

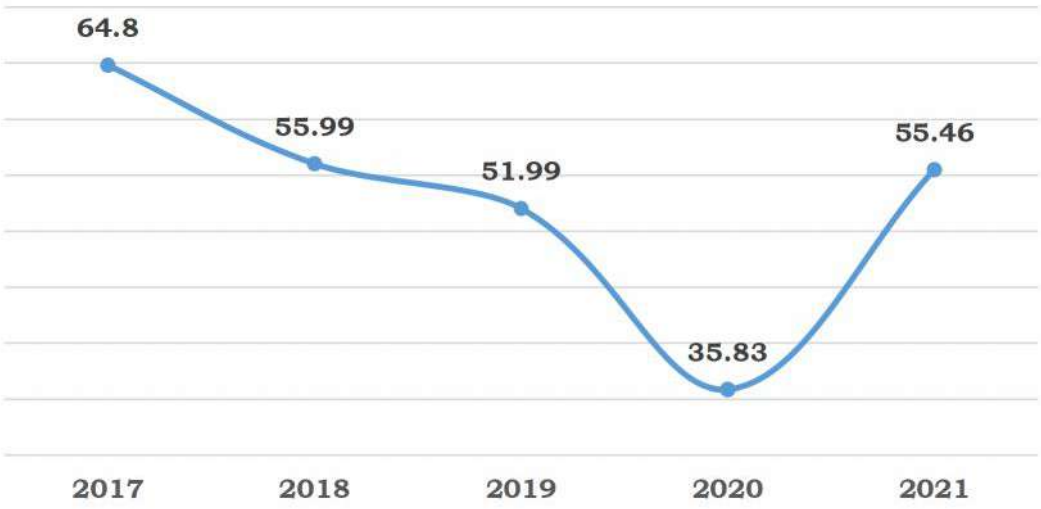

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Gambar 2.21 menunjukkan perkembangan rumah tangga dengan akses air minum layak, selama kurun waktu 2017-2021 tren pencapaiannya menurun, yaitu pada tahun 2017 persentase RT dengan akses air minum layak sebesar 64,8 persen dan capaiannya setiap tahun menurun hingga pada tahun 2021 capaiannya menjadi sebesar 55,46 persen. Capaian ini tentunya menjadi perhatian pemerintah karena intervensi capaiannya dapat

didorong dari investasi atau belanja pemerintah pada pengadaan sistem penyediaan air minum.

Gambar 2.22
Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

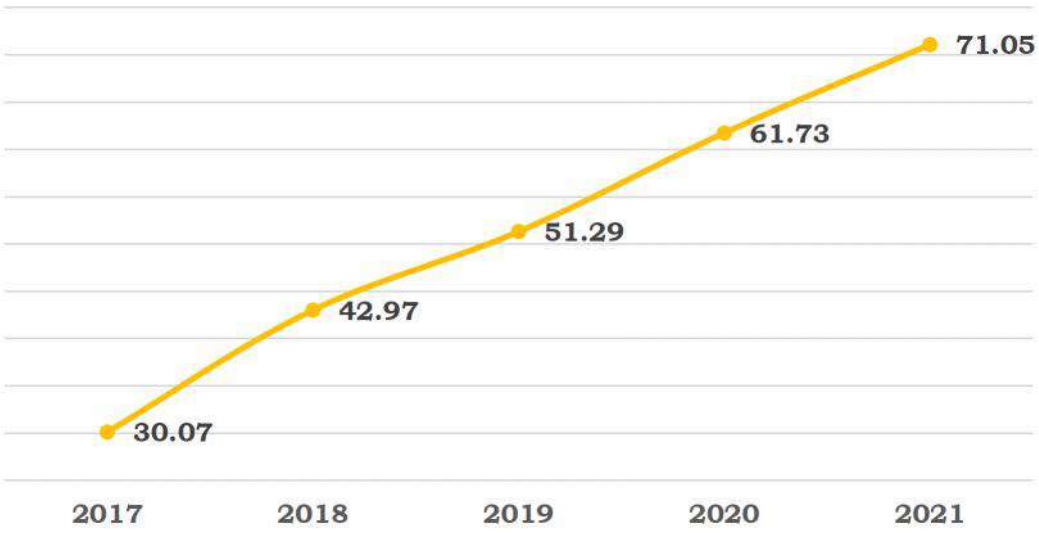

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Perkembangan capaian rumah tangga dengan sanitasi layak di Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan capaian. Pada gambar 2.22, tahun 2017 rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 30,07 persen meningkat pada tahun 2021 menjadi 71,05 persen. Capaian ini tentunya didorong oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat secara mandiri untuk menyediakan dan mengelola sanitasi layak skala rumah tangga.

Perkembangan capaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun belum menunjukkan

peningkatan yang signifikan, informasi terkait capaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diuraikan pada tabel 2.33.

Tabel 2.33
Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Uraian Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	0	0	0	0	0
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten	18,54	20,31	27,35	27,35	27,35
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	28,47	31,83	39,35	39,35	40,96
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	23,96	33,02	45,13	50,74	55,35
Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	16,60	17,68	20,35	30,82	30,82
Rasio kepatuhan IMB kota	100	63	71	66	80
Tingkat kemantapan jalan	8,33	10,13	29,44	30,74	13,19
Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	25,4	50,4	75,4	75,4	75,4
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	15	17	17	25	39

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai yang menjadi kewenangan kabupaten meningkat dari 18,54 persen tahun 2017 menjadi 27,35 persen pada tahun 2021. Luas daerah irigasi kewenangan

kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi juga mengalami peningkatan dari 28,47 persen pada tahun 2017 menjadi 40,96 persen pada tahun 2021. Begitu juga dengan persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga sebesar 23,96 persen tahun 2017 meningkat menjadi 55,35 persen di tahun 2021. Untuk capaian tingkat kemantapan jalan mengalami peningkatan capaian yaitu dari 8,33 persen tahun 2017 menjadi 13,19 persen tahun 2021. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi kemantapan jalan di Kepulauan Mentawai semakin membaik, walaupun pencapaiannya belum signifikan. Untuk Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi hingga tahun 2021 telah mencapai 75,4 persen.

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang seperti tertuang pada pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Penyelenggaraan penataan ruang tersebut meliputi aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, dimana untuk masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota atau kawasan lainnya.

Penataan ruang dan wilayah mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015-2035 menjadi acuan hukum dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat. Rencana kawasan tata ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam jangka waktu 20 tahun di bagi dalam 2 kawasan antar lain kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri:

1) Kawasan hutan lindung.

   Kawasan hutan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung darat dan kawasan hutan lindung manggrove dengan luas 13.533,86 ha.

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya antara lain adalah kawasan resapan air. Kawasan ini tersebar di setiap kecamatan di Kepulauan Mentawai.

3) Kawasan perlindungan setempat.

   Kawasan ini meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar danau, kawasan hutan mangrove dengan ketentuan daratan sepanjang tepian dengan jarak minimal 100 meter dari titik ke

arah daratan, sedangkan kawasan hutan mangrove dengan luas 13.353 ha.

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.

Kawasan ini terdiri atas kawasan suaka alam, kawasan suaka alam perairan, kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan suaka terdiri atas kawasan suaka alam dengan luas 6.019,99 ha. Kawasan suaka alam perairan terdiri atas kawasan suaka alam perairan atau dpl dengan luas 160 ha. Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Siberut seluas 190.500 hektar. Kawasan wisata alam laut yaitu Taman Wisata Laut Teluk Sarabua Saibi terdapat di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah seluas 21.200 hektar. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yaitu kawasan komunitas adat/budaya Mentawai terdapat di Dusun Terekan Hulu Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, Dusun Sirisurak Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Desa Madobag, Dusun Ongah dan Kinikdog Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan, Dusun Bolotok dan Boboakenen Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, dan benteng Peninggalan Jepang di Sioban Kecamatan Sipora Selatan.

5) Kawasan rawan bencana alam.

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan tanah longsor di wilayah perbukitan Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Kawasan rawan gelombang pasang tersebar di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan gempa dan tsunami tersebar di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan banjir tersebar di sekitar aliran dan muara Sungai Talopulai dan Sungai Makalo di Kecamatan Pagai Selatan, Sungai Silabu dan Sungai Saumanganya di Kecamatan Pagai Utara, Sungai Taikako dan Sungai Matobe di Kecamatan Sikakap, Sungai Saureinu di Kecamatan Sipora Selatan, Sungai Pogari, Sungai Berimanua dan Sungai Betumonga di Kecamatan Sipora Utara, Sungai Sagulubbek dan Sungai Taileleu di Kecamatan Siberut Barat Daya, Sungai Saibi di Kecamatan siberut tengah, Sungai Siberut di Kecamatan Siberut Selatan, Sungai Sikabaluan, Sungai Monganpoula, Sungai Sotboyak, Sungai Bojakan, Sungai Sirilanggai di Kecamatan Siberut Utara, Sungai Simalegi, Sungai Simatalu, Sungai Berisigep, dan Sungai Policoman di Kecamatan Siberut Barat.

Kawasan rawan abrasi terdapat di Pantai Muara Sikabaluan (Kecamatan Siberut Utara), Pantai Muara Siberut (Kecamatan Siberut Selatan), Pantai Mapaddegat dan Pantai Tuapejat (Kecamatan Sipora Utara), Pantai Sioban, Pantai Beriulou,

Pantai Desa Bosua, Pantai Bandara Rokot Matobe (Kecamatan Sipora Selatan), dan di Pantai Sikakap (Kecamatan Sikakap).

6) Kawasan lindung geologi.

   Kawasan lindung geologi yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas kawasan rawan gempa bumi terdapat di terdapat di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan tsunami terdapat di seluruh wilayah pesisir seluruh wilayah daerah.

7) Kawasan konservasi perairan.

   Kawasan konservasi perairan di Kepulauan Mentawai terdapat pada Kawasan Konservasi Perairan Selat Bunga Laut dengan luas total 123.746,94 hektar.

8) Kawasan lindung lainnya.

   Kawasan lindung lainnya terdiri atas kawasan terumbu karang di Pulau Siberut seluas kurang lebih 5.410,7 hektar, kawasan terumbu karang di Pulau Sipora seluas kurang lebih 5.988 hektar, kawasan terumbu karang di Pulau Pagai Utara seluas kurang lebih 733 hektar dan kawasan terumbu karang di Pulau Pagai Selatan seluas kurang lebih 1.099 hektar.

Kawasan budidaya di Kepulauan Mentawai terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 246.011,41 ha, kawasan peruntukan pertanian dengan luas 119.492,20 ha. Kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan

pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi bandar udara (bandara), pertahanan dan keamanan.

Tabel 2.34
Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

	Hutan Lindung	Suaka dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Areal Penggunaan Lainnya	Total
Penggunaan Lahan (ha)	7.217,28	183.378,9	250.971,2	50.727	108.840,62	601.135
Persentase	1,20	30,51	41,75	8,44	18,11	

Peruntukan lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai mayoritas merupakan kawasan hutan atau suaka pelestarian alam dengan luas sebesar 492294,38 ha atau sekitar 81,89 persen dari total wilayah, sedangkan untuk areal penggunaan lainnya sebesar 108.804,62 ha atau sebesar 18,11 persen.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, selain itu pemerintah daerah juga harus menjamin bahwa rumah yang ditempati masyarakat sudah sesuai dengan struktur geografis di Kepulauan Mentawai dikarenakan bahwa Kepulauan Mentawai adalah daerah rawan gempa. Sebuah rumah harus memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah yang

terdiri dari ruang tidur atau ruang serbaguna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi.

Tabel 2.35
Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio rumah layak huni (%)	65	79,8	25	30.98	38,02
2	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman didukung dengan PSU (%)	50	55	62	68	70
3	Lingkungan permukiman kumuh (%)	52,4	50	48,2	45	42,2
4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	0	0	0	0	195
5	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	0	0	0	165	69
6	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0	0	0	0	0
7	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	387	350	1.080	360	69
8	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	4.100	4.300	1.220	0	827

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Perkembangan rasio rumah layak huni di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 rasio rumah layak huni telah mencapai 65 persen lalu tahun 2021 menurun menjadi sekitar 38,02 persen dengan jumlah rumah tidak layak huni sebesar 2.917 unit. Begitu juga dengan cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU meningkat dari 50 persen di tahun 2017 menjadi 70 persen pada tahun 2021. Untuk

persentase kawasan lingkungan permukiman kumuh kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu dari 52,4 persen pada tahun 2017 menjadi 42,2 persen tahun 2021, capaian ini tentunya hasil dukungan pembangunan dari masyarakat dalam membenah kawasan permukiman masyarakat yang layak huni.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, selama periode waktu 2017-2021, berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.36 sesuai dengan indikator yang tersedia, menunjukkan terjadi peningkatan, sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 2.36
Perkembangan Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	70	72	72	85	88
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (persen)	20	25	30	35	38
Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	80	80	80	30	25
Persentase Penegakan PERDA (persen)	100	100	80	70	65
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	508	566	167	9.484	3.856

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
korban bencana					
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Perkembangan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum kondusif dan masih dalam situasi yang terkendali. Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sangat pluralis/majemuk secara prinsip memiliki potensi pada gesekan antar golongan, suku ataupun agama, namun penguatan koordinasi antar pimpinan lembaga pemerintahan dan para pemuka agama, pemuka adat dan masyarakat yang sudah terjalin dan terjaga dengan baik menjadikan hal-hal yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak terjadi atau tidak ada kasus yang serius. Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dim Kepulauan Mentawai dengan tingkat kesulitan geografis mampu diselesaikan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 88 persen. Namun pada cakupan layanan bencana kebakaran masih pada angka 38 persen di tahun 2021, hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana antisipasi kebakaran di setiap kecamatan belum ada (yang ada di Sikakap, Muara Siberut, Tuapejat) sehingga tidak dapat mencakup seluruh wilayah di Kepulauan Mentawai. Untuk respon time kejadian kebakaran sudah semakin

membaik yaitu 25 menit di tahun 2021. Untuk penegakan perda senantiasa dilakukan dengan mengutamakan sosialisasi dan ajakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan tindakan-tindakan yang mengarah pada preventif dalam upaya menjaga kondusifitas dan kenyamanan masyarakat. Untuk capaian penegakan perda pada tahun 2021 mencapai 65 persen.

Untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah menjadi hal penting dilakukan terutama dalam pengarusutamaam kebencanaan untuk setiap sektor pembangunan. Penguatan kapasitas masyarakat dalam meminimalisir risiko dan memitigasi dampak bencana bagian penting dalam tahapan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bencana. Beberapa indikator terkait kebencanaan yang mebjadi bagian dari urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dirangkum dalam tabel 2.36.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan wajib sosial, selama periode waktu 2017-2021, berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.37 sesuai dengan indikator yang tersedia, menunjukkan terjadi peningkatan pada sarana sosial yag direhabilitasi serta indikator lain, sesuai dengan tabel 2.37 dibawah ini.

Tabel 2.37
Perkembangan Indikator Sosial
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
PPKS yang memperoleh bantuan (persen)	100	100	100	100	100
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial (persen)	100	100	100	100	100
Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penanganan PPKS (persen)	100	100	100	100	100
Jumlah PPKS	24.413	24.413	30.286	24.636	24.797
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100	100	100	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sudah sangat baik, dalam artian setiap kejadian dan kebutuhan PPKS selalu difasilitasi dan dibantu. Begitu juga dengan penanganan korban bencana alam dan sosial terutama pada saat pandemi COVID-19. untuk jumlah PPKS dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak 24.413 orang dan meningkat di tahun 2019 menjadi 30.286 orang dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 24.797 orang. Untuk capaian cakupan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti serta cakupan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat

dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota telah mencapai 100 persen, artinya untuk setiap kasus yang ada telah ditangani/difasilitasi oleh dinas terkait.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Salah satu faktor utama dalam pembangunan derah adalah tersedianya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing. Penguatan sumberdaya manusia menjadi penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai tingkat pengangguran terbuka terendah di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Indikator tenaga kerja lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.38 dibawah ini.

Tabel 2.38
Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	97,73	98,04	83,10	81,65	82,57
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	2,27	1,96	2,92	3,98	2,79
Jumlah pengangguran (orang)	865	980	1.420	2.063	1.485
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	NA	0,1	NA	0,1	2
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	NA	NA	NA	NA	38
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan	NA	NA	NA	NA	NA

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	0	0	0	0	0

Sumber : BPS Kepulauan Mentawai dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir realtif konstan pada kisaran 2-3 persen. Ada peningkatan pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas sosial ekonomi masyarakat, namun pada tahun 2021 kondisinya membaik atau menurun menjadi 2,79 persen. Tingkat partisipasi angkatan sebagai bentuk gambaran ketersediaan angkatan kerja pada kelompok penduduk usia kerja yang produktif menunjukkan perkembangan yang membaik pada tahun 2021 yaitu sebesar 82,57 persen. Untuk jumlah pengangguran di Kabupaten kepulauan Mentawai tahun 2021 sebanyak 1.485 orang berkurang jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada tahun 2020 yaitu sebanyak 2.063 orang.

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator untuk melihat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai

kurun waktu 2017-2021 seperti pada gambar 2.23 menunjukkan tren penurunan.

Gambar 2.23
Produktivitas Tenaga Kerja (milliar rupiah)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

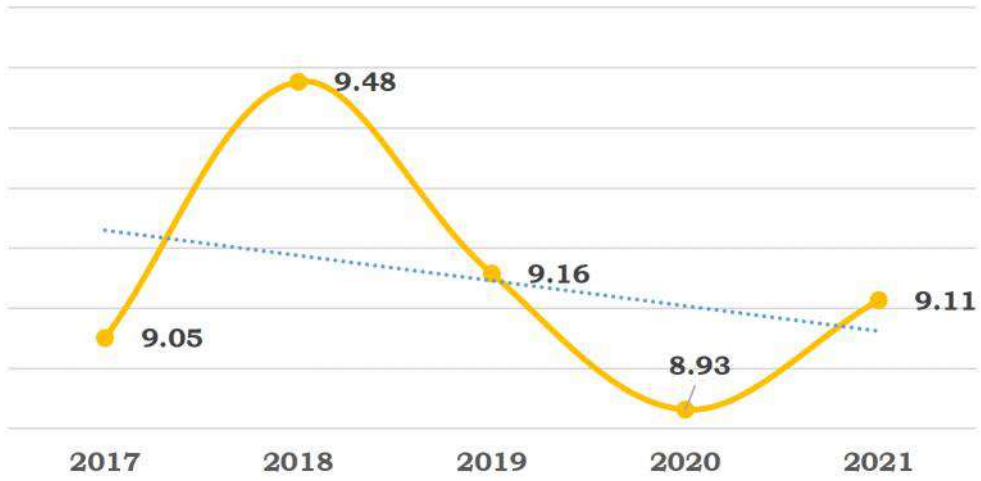

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Pada tahun 2017 nilai produktivitas tenaga kerja sebesar 9,05 miliar rupiah/tenaga kerja/tahun lalu naik pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,48 miliar rupiah/tenaga kerja/tahun, namun pada tahun 2019 sampai pada tahun 2021 menurun dan menjadi sebesar 9,11 miliar rupiah/tenaga kerja/tahun pada tahun 2021.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada periode tahun yang sama menunjukkan pesentase yang semakin bertambah, hal ini dapat menggambarkan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah cukup memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah persentase partisipasi

perempuan di lembaga pemerintah. Pembangunan gender di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif, untuk tahun 2017 capaian IPG sebesar 89,13 persen dan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2017 menjadi 89,81 persen.

Tabel 2.39
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase pemenuhan hak anak (persen)	100	100	100	100	100
Pencangan kecamatan layak Anak (kec)	NA	NA	NA	4 kec	4 kec
Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan (persen)	100	100	100	100	100
Persentase Kepala Keluarga perempuan yang sejahtera (persen)	8,06	8,22	8,6	8,75	9
Indeks Pembangunan Gender	89,13	89,45	89,33	89,59	89,81
Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (persen)	100	100	100	100	100
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	11.22	11.22	11.22	51,03	52
Partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	65.12	65.12	65.12	42,40	42,93
Persentase PNS perempuan dibanding total PNS (persen)	48.81	48.81	49.55	51,03	51,25
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	NA	NA	NA	0,13	0,11
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk pencapaian kabupaten layak anak di Kepulauan Mentawai belum tercapai, bahkan pada predikat pratama juga belum tercapai, hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk membangun komitmen dan mengintegrasikan program-

progaram pembangunan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kepulauan Mentawai. Dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, setiap kasus yang ada selalu ditangani dengan baik, koordinasi dengan forkopimda dan muspika di kecamatan sangat baik begitu juga dengan peranan pokja P2TP2A sebagai perpanjangan tangan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sangat baik sehingga dalam upaya pencegahan dan penanganan kejadian taanggap dan melibatkan berbagai pihak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pada urusan wajib pangan berbagai indikator yang terlihat pada Tabel 2.40 mengambarkan perkembangan yang cukup baik dan mengalami peningkatan pencapaian dalam kurun waktu 2017-2021, begitu juga dengan pengawasan dan pembinaan pangan.

Tabel 2.40
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ketersediaan pangan utama	65	66	67	67	68
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	48.24	48.61	48.81	48.81	52,07
lndeks Ketahanan Pangan	NA	49,92	38,86	46,67	37,67
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	69,1	76	78	80	82

Sumber :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Perkembangan capaian ketahanan pangan secara nasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat rendah yang dilihat

dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Tahun 2018 Indeks Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Mentawai sebesar 49,92 dan capaian ini terus menurun hingga tahun 2021 capaian indeks ketahanan pangan menjadi sebesar 37,67. Tentu ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam kaitan ketersediaan pangan utama sebagai konsumsi pangan lokal yang tersedia, capaiannya cukup stabil, tahun 2017 sebesar 65 persen dan hingga tahun 2021 capaiannya sebesar 68 persen.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Legalisasi aset berupa tanah sangat penting bagi pemerintah khususnya masyarakat dalam menopang tumbuh kembangnya sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penanganan sengketa tanah yang dilakukan secara mediasi (persen)	100	100	100	100	100
Persentase luas lahan bersertifikat (persen)	NA	NA	NA	NA	1,14
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan Peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	25	28	30	35	38
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	0	0	0	0
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0	0	0	1.200 ha	1.200 ha
Tersedianya Tanah Obyek	0	0	0	0	0

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee					
Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	0	0	0	0

Sengketa pertahanan/lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai selalu menjadi konflik sosial ditengah masyarakat. Tanah hak ulayat (adat) dan sengketa tanah masyarakat menjadi persoalan khususnya menyangkut hak masyarakat miskin selalu dimediasi baik melalui pemerintahan desa, di kecamatan dan bahan tingkat kabupaten melalui koordinasi pemangku kepentingan agar hak-hak kepemilikan pertanahan masyarakat terjamin. Untuk persentase luas lahan yang telah memiliki sertifikat di Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 baru mencapai 1,14 persen atau seluas 69.180.450 m^2.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Perkembangan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup selama tahun 2017-2021 ditunjukkan pada Tabel 2.42 kualitas lingkungan hidup di Kepulauan Mentawai semaksimal mungkin tetap dijaga dan dipastikan tetap pada kondisi awal/lestari. Luas kawasan yang mayoritas adalah kawasan hutan dengan persentase 82 persen tentunya sebagai indikator bahwa wilayah Kepulauan Mentawai relatif masih aman dari deforestisasi yang akan berdampak pada penurunan kualitas dan daya dukung

lingkungan/kawasan. Dalam kurun 5 tahun terakhir indeks kualitas lingkungan hidup perkembangannya mengalami perbaikan dari tahun 2017 dengan predikat cukup baik meningkat hingga pada tahun 2021 pada predikat baik.

Tabel 2.42
Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penetapan hak MHA	Tidak ada	Tidak ada	4	4	NA
Persentase penanganan sampah (persen)	6	6.2	6,84	7,38	14,35
Penanganan kasus lingkungan hidup	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik
Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota (%)	NA	30	45	50	53,4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Begitu juga respon terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah derah, melalui dukungan seluruh stakeholder, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga melalui forum pimpinan di tingkat kabupaten permasalahan pencemaran dan kasus lingkungan dapat ditangani dengan baik.untuk penanganan dan pengelolaan sampah juga capaian setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan cakupan layanan persampahan dan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Namun memang intervensi dalam pengelolaan sampah masih sebatas pada kawasan ibukota kabupaten

(Kecamatan Sipora Utara/Tuapejat dan sekitarnya) menjadi indikasi masih rendahnya persentase penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 14,35 persen pada tahun 2021.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan angka yang terlihat pada Tabel 2.43 menunjukkan berbagai indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2017-2021. Indikator pencapaian bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (persen)	45.99	44.96	45.51	64,90	67,77
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	56,54	60,25	61,44	64,25	66,28
Persentase kepemilikan akte kelahiran (persen)	67.26	70.16	63.36	77,34	77,24
Persentase pasangan berakte nikah (persen)	19.69	19.76	20.23	49,79	42,08
Rasio kepemilikan KK	57.98	68.25	74.38	89,82	85,18
Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	19.69	19.76	20.23	49,79	42,08

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian indikator perkembangan kemajuan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kepulauan

Mentawai seperti pada tabel 2.43 menunjukkan perkembangan yang baik. Dari sisi rasio penduduk berKTP per satuan penduduk telah mencapai 67,77 persen. Begitu juga dngan kepemilikan akte kelahiran yang telah mencapai 77,24 persen. Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2021 telah mencapai 85,18 persen dan pasangan/keluarga yang telah memiliki akte nikah pada tahun 2021 telah mencapai 42 persen.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dikatakan bahwa belum mengalami kemajuan yang cukup berarti hal ini terlihat dari indikator-indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seperti terlihat dari Tabel 2.44.

Tabel 2.44
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017-2021

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	341	341	559	559	559
Jumlah LPM	43	43	43	43	43
PKK aktif	43	43	43	43	43
Posyandu aktif	0	180	180	180	180
IDM (Desa Tertinggal)	NA	23 Desa	18 desa	15 Desa	12 Desa
IDM (Desa Maju)	NA	1 desa	2 desa	6 Desa	5 Desa
Persentase pengentasan desa tertinggal	NA	16	21,73	16,67	20
Persentase peningkatan status desa mandiri	NA	0	0	100	200

Sumber : Dinas PMD, dan Pengendalian Penduduk dan KB

Perkembangan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2021 dari sisi kinerja pembangunan masyarakat dan desa, indikator utama yang dapat dijadikan patokan pembangunannya adalah Indeks Desa Membangun (IDM), dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perbaikan capapaian. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada lagi status desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan predikat desa sangat tertinggal. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 untuk capaian desa dengan kategori maju mengalami penambahan dari 1 desa tahun 2018 menjadi 5 desa di tahun 2021, begitu juga dengan status desa tertinggal dari 23 desa tertinggal tahun 2018 berkurang menjadi 12 desa di tahun 2021.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengalami peningkatan walau tidak signifikan, seperti terlihat dari Tabel 2.45. Untuk jumlah rata-rata anak per keluarga relatif stabil untuk setiap tahunnya. Hingga tahun 2021 rata-rata jumlah anak perkeluarga di Kabupaten Kepulauian Mentawwai sebanyak 4 orang. Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2017-2021 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dengan capaian

sebesar 51,24 persen meningkat setiap tahun hingga tahun 2021 menjadi sebesar 58,44 persen.

Tabel 2.45
Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	6	5	4	4	4
Rasio akseptor KB	23	54	58	58	62
Cakupan peserta KB aktif (persen)	51.24	54.96	58.39	58.40	58.44
TFR (Angka Kelahiran Total)	1,56	1,82	1,90	2,20	2,35
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	10,25	11,76	13,30	21,27	24,15
Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	0,25	0,43	0,87	0,65	1,12

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian Penduduk dan KB

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang vital dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bercirikan kepulauan. Konektivitas antar pulau di Kepulauan Mentawai dan sebagai penghubung Kepulauan Mentawai dan Padang atau daerah lain di luar Mentawai urusan perhubungan mengambil bagian penting dalam menunjang dan memperlancar arus barang dan arus orang yang pergi dan menuju Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.46
Perkembangan Indikator Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan layanan transportasi (persen)	75	75,3	78,5	80	83
Persentase armada angkutan laik jalan/ layar (persen)	75	75	72	70	80
Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun (orang)	200.338	209.768	210.428	149.235	145.206
Jumlah barang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun (ton)	63.028	64.847	65.720	47.654	52.669
Rasio konektivitas Kota	46,27	46,71	47,59	51,13	52,19
V/C Ratio di jalan Kota	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Sumber : Dinas Perhubungan

Perkembangan capaian kinerja urusan perhubungan dapat dilihat dari cakupan layanan transportasi yang melayani seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tahun 2017 cakupan layanan transportasi sebesar 75 persen dan capaian ini meningkat ditahun 2021 menjadi 83 persen, hal ini didukung oleh sudah terbukanya akses transportasi di wilayah pantai barat yaitu Desa Sagulubbeg dan Desa Simalegi. Begitu juga dengan kondisi sarana dan prasarana perhubungan terutama pelabuhan laut sebanyak 7 buah dan pelabuhan penyeberangan sebanyak 3 buah dengan kondisi baik dan masih beroperasi hingga sekarang.

Sebagai bagian dari sistem konektivitas daerah, selain ketersediaan jalan sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah rencana pembangunan pelabuhan menjadi kebutuhan untuk menjawab konektivitas total antar

wilayah/antar pulau dan konektivitas regional antar kabupaten dan propinsi.

Tabel 2.47
Perkembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

No	Nama Pelabuhan	Kepemilikan Aset	Pengelola	Status	Kondisi	Ket
1	Pelabuhan Muara Siberut	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
2	Pelabuhan Sikakap	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
3	Pelabuhan Siuban	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
4	Pelabuhan Tuapejat	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
5	Pelabuhan Pasapuat	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
6	Pelabuhan Sikabaluan	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
7	Pelabuhan Labuhan Bajau	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
8	Pelabuhan Penyeberangan Tuapejat	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab. Kep. Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan
9	Pelabuhan Penyeberangan Siberut	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab. Kep. Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan
10	Pelabuhan Penyeberangan Sikakap	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab. Kep. Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan

Sumber : Dinas Perhubungan

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional bahwa rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut/ penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada 9 pelabuhan yaitu di Pulau Siberut antara lain Pelabuhan Sikabaluan, Subelen, Mabukkuk, Sirilogui. Pulau Sipora antara lain Pelabuhan Simaoumbuk, Sao, Sagitsi Pulau Pagai Utara Selatan antara lain Pelabuhan Polaga, Sinaka.

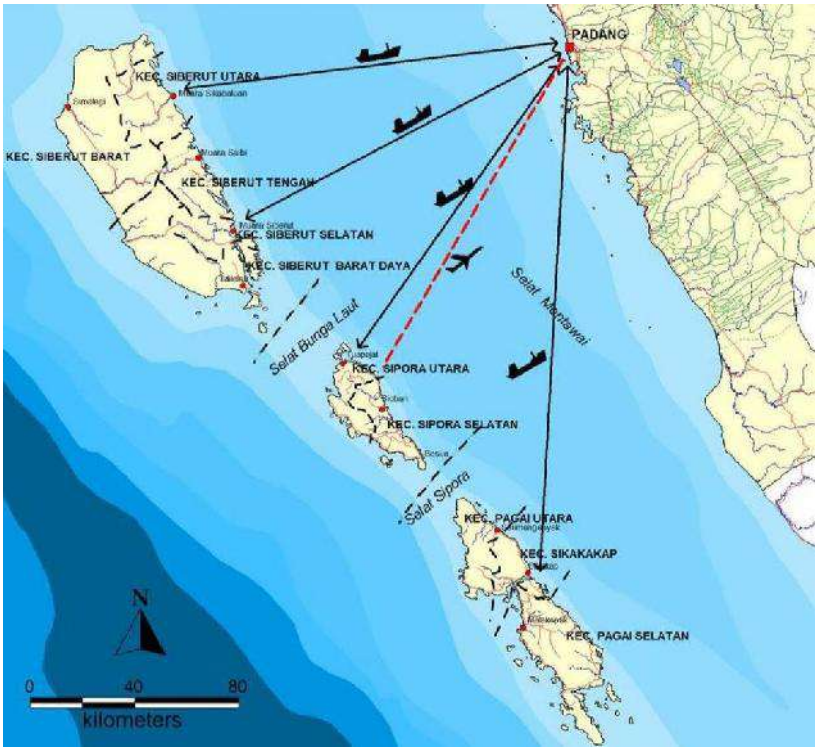

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah didukung oleh sistem teknologi informasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mempunyai website untuk publikasi dan komunikasi proses dan hasil-hasil pembangunan. Untuk mendukung pengelolaan website telah menggunakan jaringan komunikasi ASTINet (*Access Service to Internet*). Perkembangan pelaksanaan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikategorikan belum mengalami perkembangan yang signifikan, jika dilihat dari indeks SPBE bahwa pada tahun 2021 untuk SPBE di Kepulauan Mentawai tidak ada nilai oleh Kementerian PANRB dan terakhir data yang diperoleh untuk nilai SPBE yaitu tahun 2019 sebesar 1,9.

Perkembangan sistem komunikasi dan informasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Layanan Telekomunikasi	67	70	86	84,5	85
Nilai SPBE	NA	NA	1,9	NA	NA
OPD yang terhubung oleh akses internet yang disediakan Diskominfo (persen)	NA	27,7	55,5	63,8	69,4
Layanan publik yang dilayani secara Online (persen)	4,2	4,6	4,8	5	5,2
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	NA	60	70	70	70

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kepulauan Mentawai. Akses data dan komunikasi yang sangat terbatas, sarana dan prasarana yang masih minim juga sumberdaya manusia dalam upaya *maintenance* yang belum ada sehingga biaya (*cost*) menjadi sangat besar dan kendala pengembangannya.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Perkembangan indikator urusan wajib koperasi, usaha kecil dan menengah, untuk persentase koperasi aktif secara tren dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 17,91 persen

tahun 2017 menjadi 20 persen tahun 2021, indikator pelayanan koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah, seperti terlihat pada Tabel 2.49. Untuk jumlah usaha mikro dan kecil juga mengalami tren peningkatan jumlah usaha.

Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase koperasi aktif	17.91	36	59.09	25,3	20
2	Jumlah BPR/BPRS	2	2	2	3	3
3	Usaha Mikro dan Kecil					
	- Usaha Mikro	962	1061	1357	1.956	2.508
	- Usaha Kecil	100	135	217	206	240
	- Usaha Menengah dan Besar	11	19	38	41	43
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (perse)	2,50	3	3	3	3,50
	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirasausaha	4	5	5	4	6

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Tahun 2017, pada tabel 2.49 menunjukkan untuk usaha mikro sebanyak 962 usaha dan mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi sebanyak 2.381 usaha. Untuk usaha kecil juga mengalami peningkatan jumlah usaha kecil yaitu pada tahun 2017 sebanyak 100 unit usaha dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 358 usaha. Dalam upaya menciptakan wirausaha baru (enterprenuer), program kedepan yang disusun adalah pelatihan/ peningkatan kapasitas keterampilan keahlian agar memiliki skil untuk dapat terjun kedunia usaha, begitu juga dengan membangun relasi melalui

perjanjian kerjasama dengan dunia usaha (MoU) sehingga dihulunya pembangunan sumberdaya tenaga kerja yang terampil (skil) didukung dengan dihilirnya adalah terserapnya tenaga kerja sebagai modal awal untuk menjadi wirausaha baru.

Harapannya, dengan dukungan semua sektor dan pendampingan dari pemerintah daerah, untuk usaha mikro dan kecil dapat mengambangkan unit usaha/permodalan dan skala pemasaran serta legalitas sehingga mampu memberikan kontribusi pada peningakatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian pelbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Pelayanan perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diorganisir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan rata-rata pengurusan izin sekitar 5-6 hari. Perkembangan realisasi investasi tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih didorong oleh investasi skala kecil berupa resort/homestay dengan realisasinya sekitar Rp.6,48 miliar. Angka ini tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi investasi di

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan sumber daya alam yang melimpah dan proses perijinan yang sangat mudah dan cepat.

Tabel 2.50
Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase peningkatan investasi di Kota	11,99	13,09	10,78	10,63	11,9

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian indikator urusan kepemudaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada perkembangan jumlah organisasi yang masih bertahan. Pemuda yang diasosiasikan dengan paham idealisme yang dapat melihat setiap perkembangan dan isu daerah secara jernih tentunya akan mampu memberikan pemikiran dan dukungan yang utuh tanpa ada unsur kepentingan. Untuk urusan wajib kepemudaan dan olahraga dari data pada Tabel 2.49, secara umum dapat memberikan gambaran bahwa indikator menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dan terus meningkat selama periode 2017-2021. Hal ini terlihat dari Tabel 2.51 dibawah ini.

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah organisasi pemuda	16	16	9	10	8
Jumlah organisasi olahraga	23	23	10	10	10
Jumlah kegiatan kepemudaan	5	5	5	0	5

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kegiatan olahraga	12	12	10	3	10
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	5	5	30	0	0
Lapangan olahraga	209	209	267	5	5
Pertumbuhan wirausaha (enterprenuer)	11,99	10,29	27,90	14,14	21,73
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	6	8	10	14,14	14,14
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	15	15	20	25,28	25,28
Peningkatan prestasi olahraga	12	16	10	10	10

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dari tabel 2.51 perkembangan jumlah organisasi di Kepulauan Mentawai mengalami penurunan dari sisi kuantitas. Pada tahun 2017 junlah organisasi kepemudaan sebanyak 16 organisasi dan mengalami penurunan hingga pada tahun jumlah organisasi kepemudaan menjadi sebanyak 8 organisasi. Begitu juga dilihat dari kapasitas ekonomi kepemudaan yang dilihat dari pertumbuhan wirausaha mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2017 pertumbuhan wirausaha di Kab. Kepulauan Mentawai sebesar 11,99 persen dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 27,9 persen dan pada tahun 2021 mengalami perlambatan menjadi sebesar 21,73 persen.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan wajib statistik berkenaan dengan penyediaan data yang diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan, mlihat

perkembangan pembangunan dan dihilirnya sebagai baan evaluasi untuk memberikan sebuah informasi analisis pembangunan.

Tabel 2.52
Perkembangan Indikator Statistik
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Buku ”Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku ”PDRB kabupaten”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah (persen)	64,9	68,5	70	72,1	75
4	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	27,78	50,00	55,56	61,11	69,44
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	22,22	38,89	41,67	50,56	58,33

Sumber : BPS dan Bappeda

Perkembangan capaan kinerja urusan statistik erat kaitannya dengan ketersediaan data dan informasi yang digunakan oleh setiap pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah melalui perangkat daerah. Data statistik ini baik statistik dasar maupun statistik sektoral yang berasal dari perangkat daerah tentunya menjadi pedoman dalam merumuskan dan menganalisis sebuah perkembangan indikator pembangunan daerah. Selama periode 2017-2021 secara rutin telah diterbitkan buku Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai dan berbagai dokumen atau buku statistik dasar lainnya yang secara resmi dirilis melalui Badan Pusat

Statistik (BPS) seperti dilihatkan pada tabel 2.52. Begitu juga dengan data-data statistik sektoral yang dihasilkan oleh instansi atau perangkat daerah juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan khususnya dalam merumuskan indikator kinerja pemerintah daerah sehingga nantinya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan penerapan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya maksimal dilaksanakan. Integrasi sistem informasi pemerintahan masih parsial sehingga perlu dilakukan kesepahaman sistem yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan keamanan dan perlindungan data yang terjamin. Seluruh sistem informasi pembangunan baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, layanan publik harus memenuhi kaidah-kaidah tingkat keamanan dengan menyelenggarakan keamanan persandian sehingga risiko kerusakan sistem, data hilang, *hack* dapat dicegah dan ditangkal.

Tabel 2.53
Perkembangan Indikator Urusan Persandian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat keamanan informasi pemerintah	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan persandian yang telah dikukuhkan kedalam susunan struktur organisasi perangkat daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika belum memadai untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam pengamanan informasi pemerintah daerah, terutama dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang secara keahlian (sertifikasi) belum ada.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaan melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional yang sudah masuk kedalam agenda pariwisata nasioanal dalam Pesona Indonesia. Selain itu dalam kebijakannya, telah disusun pokok-pokok pikiran kebudayaan pada tahun 2020 serta telah disertifikasi 4 tenaga tim ahli cagar budaya (TACB) untuk memfasilitasi dalam penilaian warisan budaya benda yang ada di Kepulauan Mentawai. Pembangunan kebudayaan yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan, terutama tahun 2020 dan tahun 2021 selama pandemi yang dibatasi pergerakan/mobilitas dan bahkan melarang

berkumpulnya orang, sehingga even dan festival terkait kebudayaan tidak dilaksanakan. Dengan melihat dari perkembangan periode waktu 2017-2021, penyelenggaraan festival seni dan budaya, benda situs budaya yang dilestarikan sama dari tahun 2017, seperti terlihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54
Perkembanga Indikator Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	2	8	0	0
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	5	1	1	2
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	55	55	55	55	55

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja urusan wajib perpustakaan selama periode 2017-2021 diperlihatkan pada Tabel 2.55 Perkembangan indikator jumlah pengunjung memberi bukti bahwa minat masyarakat untuk memanfaatkan pustaka daerah semakin membaik terutama dalam menigkatkan minat literasi dan numerasi masyarakat.

Jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya rata-rata mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 pada masa pandemi yang mengalami penurunan dari 10.273 pengunjung menjadi sebanyak 8.988 pengunjung di tahun 2020.

Tabel 2.55
Perkembangan Indikator Perpustakaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	4.116	5.327	10.273	8.988	9.842
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	18.065	18.065	19.796	19.796	21.044
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	NA	NA	NA	11
5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (persen)	NA	NA	NA	NA	15

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Untuk pembangunan literasi Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 dengan nilai indeks 11 masih berada dibawah capaian Propinsi Sumatera Barat yang pada angka 14,17. Begitu juga dengan tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 sebesar 15 persen masih berada jauh jika dibandingkan dengan tingkat kegemaran membaca masyarakat secara keseluruhan di Propinsi Sumatera Barat dengan capaian sebesar 56 persen dan secara nasional pada angka 59,52 persen. Upaya untuk meningkatkan literasi dan minat baca di Kepulauan Mentawai seperti perlombaan menulis, bercerita, pidato, cerdas cermat antar jenjang sekolah begitu juga dilakukan program pustaka keliling untuk mempermudah jangkauan anak-anak sekolah/ peserta didik dan

juga masyarakat akan layanan perpustakaan seperti buku, buletin dan bahan pustaka lainnya.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja urusan wajib kearsipan dapat diukur dari pembinaan tata kelola arsip secara baku, persentase kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan dan indikator lainnya, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.56. Perkembangan pembangunan kearsipan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikatakan belum berkembang secara signifikan. Selain dari masih terbatasnya tenaga atau SDM kearsipan yang secara fungsional mengelola dan menata arsip juga mesih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menata arsip yang baik dan benar. Sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan dan layanan arsip setiap perangkat daerah dan pemerintah daerah tentunya urusan kearsipan sudah mulai menjadi bagian penting yang harus diintervensi sehingga pengelolaan kearsipan daerah semakin lebih baik.

Tabel 2.56
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	1	1	1	2,7	5,5
2	Persentase Kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan	NA	NA	1	1	1,5
3	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	NA	NA	NA	NA	25
4	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	NA	NA	NA	NA	5

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Selain urusan wajib, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menyelenggarakan layanan urusan pilihan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain meliputi beberapa bidang, yaitu (1) Kelautan dan Perikanan (2) Pariwisata (3) Pertanian (4) Energi dan Sumber Daya Mineral (6) Perdagangan. Adapun pencapaian indikator kinerja masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah kepulauan yang ditutupi oleh sepanjang garis pantai 1.402,66 km tentunya Kabupaten Kepulauan Mentawai dianugerahi kekayaan laut yang luar biasa. Pengembangan produksi perikanan tangkap memiliki prospek yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan potensi pengembangan perikanan sekitar Rp.1 Triliun memberikan harapan bagi nelayan untuk meningkatkan ekonomi mulai dari peningkatan kapasitas nelayan, sarana dan prasarana, budidaya perikanan, pengolahan bahkan pada pemasaran produk perikanan.

Tabel 2.57
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Jumlah Produksi	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perikanan Tangkap (ton)	6.939	7.056	7.543	7.698	8.694,5
2	Perikanan Budidaya (ton)	427,10	184,27	114,44	127,59	215,14
3	Produksi Olahan Ikan (kg)	28.145	31.042	32.538	NA	73.070

Sumber : Dinas Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap sebanyak 6.939 ton dan mengalami peningkatan setiap tahun hingga pada tahun 2021 produksi perikanan tangkap sebesar 8.694,5 ton. Jika dilihat dikonversikan kedalam penghasilan para nelayan maka penghasilan yang didapatkan masing-masing nelayan adalah

Rp.54.708.857/tahun atau sekitar Rp.4,5 juta/bulan. Untuk perikanan budidaya khususnya budidaya wilayah pesisir/terumbu karang dengan luasan lebih dari 17.636,72 ha. Potensi budidaya kawasan pesisir terumbu karang seperti kerapu, lobster dan kepiting bakau sangat menjanjikan dengan pasar kebutuhan domestik dan juga pasar nasional dan luar negeri dengan produksi rata-rata pertahun sebesar 58 ton.

Tabel 2.58
Jumlah Sarana Tangkap Nelayan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Armada Tangkap	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perahu tanpa Motor	1.431	1.390	1.081	936	555
2	Long Tail	1.087	1.150	1.231	1.642	1.315
3	Mesin Tempel	764	822	1.050	1.225	1.698
4	Kapal <5 GT	21	48	51	51	58

Sumber : Dinas Perikanan

Peningkatan kapasitas nelayan selalu diupayakan melalui memberikan sarana dan prasarana perikanan seperti alat tangkap perikanan, mesin tempel dan juga peralatan pendukung perikanan lainnya. Hingga tahun 2021 jumlah mesin yang telah disalurkan kepada nelayan sebanyak 1.698 mesin dan perlengkapan long tail sebanyak 1.315 unit. Sebagai daerah kepulauan dengan luas wilayah pesisir yang terbentang sepanjang 1.402 km dengan potensi perikanan yang besar, menjadikan sektor perikanan menjadi sumber kehidupan masyarakat walaupun rantai pasok

sektor ini masih sangat pendek dan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan masih sangat cukup besar yaitu sebanyak 1.988 nelayan yang hampir sama dengan jumlah nelayan penuh ditahun 2021 sebanyak 2.144 nelayan.

Tabel 2.59
Jumlah Nelayan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Jumlah Nelayan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nelayan Penuh	1.250	1.284	1.466	1.641	2.144
2	Nelayan Sambilan Utama	1.215	1.215	1.215	1.215	1.095
3	Nelayan Sambilan Tambahan	1.004	1.004	1.004	1.004	893
	Total	3.469	3.503	3.685	3.860	4.132

Sumber : Dinas Perikanan

Penerapan teknologi tepat guna, kemampuan dan kemauan sumber daya masyarakat yang masih terbatas merupakan kendala utama dalam pengembangan sektor kelautan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Memang disadari bahwa masih banyak potensi kelautan dan perikanan Kepulauan Mentawai yang bisa digali lebih lagi, tentunya ini perlu perhatian dan pmengembangkan strategi pembangunan dan pengembangan perikanan agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat potensial untuk mengembangkan sektor jasa melalui pengembangan sektor

pariwisata. Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai *core sector* dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sektor pariwisata memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa lainnya bahkan sektor pertanian dan industri. Pengembangan sektor ini juga sangat potensial untuk membangun ekonomi kreatif baik itu bagi ekonomi mikro juga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal. Kabupaten Kepulauan Mentawai dikenal akan potensi pariwisatanya, kabupaten ini memiliki pelbagai kawasan objek wisata yang sudah dikenal hingga penjuru dunia. Banyaknya jenis objek wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dalam tabel berikut.

Tabel 2.60
Banyaknya dan jenis Objek Wisata
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Tahun	Panorama Alam	Bahari	Sumber Air	Budaya	Jumlah
2017	22	150	9	13	194
2018	22	150	9	3	184
2019	22	150	9	3	184
2020	19	46	9	7	81
2021	19	46	9	7	81

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Jenis kawasan objek wisata yang tersebar di pelbagai tempat/pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memunculkan beberapa industri pariwisata, salah satunya berdirinya pelbagai resort, penginapan, dan wisma. Tabel 2.61 menunjukkan banyaknya resort, penginapan dan wisma yang

telah berdiri sejak tahun 2017 hingga 2021. Tahun 2021 untuk akomodasi yang telah ada di Mentawai sebanyak 91 akomodasi dengan 759 kamar dan sekitar 1.297 tempat tidur.

Tabel 2.61
Banyaknya Resort, Wisma, dan Penginapan
di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Tahun	Resort	Wisma	Penginapan	Jumlah
2017	45	8	12	65
2018	48	10	16	74
2019	50	12	18	80
2020	NA	NA	93*	94
2021	NA	NA	91*	91

*= Hotel (2), Penginapan (91)
Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.62
Perkembangan Indikator Pariwisata
di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Item	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara (orang)	9.203	9.425	9.164	1.315	3.807
Jumlah Kunjungan Wisata Domestik (orang)	898.189	957.477	994.655	122.763	391.228
Lama Kunjungan (Lama tinggal)	±10 hari	±10 hari	±10 hari	±5 hari	±5 hari
Penerimaan Retribusi Daerah	7 M	8 M	7,9 M	1,22 M	4 M
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	242	16	-13	-83	-30
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	142	76	-33	-47	161
Tingkat hunian akomodasi	70	73,58	75,24	1,25	121,43
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	70.449,00	81.821,00	70.924,00	1.226,80	8.587,00
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7.044.900.000	8.182.100.000	7.092.400.000	122.680.000	858.700.000

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Perkembangan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir trennya menunjukkan perkembangan yang positif kecuali pada tahun 2020 dan 2021 yang mengalami kontraksi dikarenakan oleh dampak pandemi COVID-19 yang tentunya membatasai aktifitas masyarakat dan juga larangan untuk melakukan even atau kegiatan yang memicu berkumpulnya masyarakat/orang. Tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 9.203 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 898.189 orang dan meningkat hingga tahun 2019 dimana wisatawan nusantara sudah mendekati 100.000 orang atau tepatnya 994.655 orang. Namun pencapaian ini menurun di tahun 2020 dengan jumlah wisatawan mancanegara menjadi berjumlah 1.315 orang dan wisatawan nusantara berjumlah 122.763 orang. Penerimaan pendapatan dari sektor pariwisata memang belum maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata sebesar 18 persen setiap tahunnya (kondisi normal), tentu strategi pengembangan pariwisata dan program pemasaran yang tepat menjadi hal penting harus diperhatikan dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Hasil pertanian dan perkebunan menjadi andalan dalam perekonomian masyarakat di Kepulauan Mentawai. Dari data BPS didapatkan bahwa dalam 5 tahun terakhir persentase kontribusi

sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah lebih dari 48 persen. Begitu juga isu strategis dalam pengembangan sektor pertanian yang tidak sekedar menjual *raw material* tapi harus mampu memberikan nilai tambah terhadap komoditi pertanian, sehingga mampu menyejahterakan para petani. Begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan lokal (ketahanan pangan), alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman/perkantoran dan alih fungsi lahan untuk komoditas pertanian lainnya (tidak konsisten) menjadi isu penting dalam mempengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Tabel 2.63 menunjukkan perkembangan produksi tanaman pertanian, perkebunan dan perkembangan ternak yang dibudidayakan oleh masyarakat. Produksi tanaman sagu, kelapa, cengkeh relatif stabil dengan masing-masing pertumbuhan produksi, sagu (17,31 persen), kelapa (35,59 persen), cengkeh (0,73 persen).

Tabel 2.63
Produksi Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Jumlah Produksi	2017	2018	2019	2020	2021
1	Keladi (kwintal)	97.730	1.155	13.260	1.152	1.041,5
2	Ubi Kayu (kwintal)	18.800	2.290	1.150	333,5	515

No	Jumlah Produksi	2017	2018	2019	2020	2021
3	Ubi Jalar (kwintal)	86.000	22.510	2.630	241,3	362,50
4	Pisang (kwintal)	11.990	22.893	19.506	75.351	139.873
5	Durian (kwintal)	56.780	54.599	20.700	57.801	117.211
6	Kelapa (ton)	9.346	15.113	15.591	13.824	13.854
7	Cengkeh (ton)	1.519	1.524	1.539	1.328	1.481
8	Cacao (ton)	2.330	2.301	133,47	210,8	147,34
9	Sagu (ton)	1.847	958	1.205,48	1.060,99	690,63
10	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	2,42	2,5	2,47	2,5	2,5
11	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	80	80	85	85	85
12	Babi (ekor) --- produksi	30.489	27.598	25.561	31.878	42.510
	Babi (kg) --- pemotongan	3.000	4.200	15.625	16.117	NA
13	Ayam Pedaging (ekor) --- pemotongan	1.900	2.700	4.371	4.457	NA

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Untuk perkembangan produksi tanaman pertanian/ perkebunan yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pisang, kepala, sagu relatif terjaga dan cenderung meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 produksi komoditi pisang sebesar 11.990 kwintal dan meningkat hingga tahun 2021 produksi komoditi pisang sebesar 139.873 kwintal, komoditi kelapa pada tahun 2017

sebanyak 9.346 ton meningkat menjadi 13.854 ton pada tahun 2021. namun pada komoditi sagu ada penurunan produksi yaitu pada tahun 2017 produksinya 1.847 ton menurun hingga tahun 2021 produksi komoditinya menjadi 690,63 ton, hal ini disebabkan karena budidaya sagu sudah mulai tidak dikembangkan dan alih fungsi lahan sagu menjadi areal perumahan atau pertanian komoditas lainnya.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai rata-rata 12,5 persen. Kontribusi sektor perdagangan trhadap PDRB kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan walaupun di tahun 2020 dan 2021 sedikit ada perlambatan. Capaian ini tergolong sangat kecil, dikarenakan belum maksimalnya pengembangan sektor perdagangan terutama pusat-pusat perdagangan seperti pasar yang berkembang. Disisi lain sektor perdagangan yang didorong yang tumbuh dari tumbuh kembangnya usaha perdagangan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama dalam legalisasi sektor usaha perdagangan.

Tabel 2.64
Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,33	12,66	12,82	12,80	12,72
2	Jumlah Koperasi	82	84	84	83	85
3	Jumlah Perdagangan (Pasar, Toko, Swalayan)	NA	NA	643	880	47
4	Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan	NA	NA	5	6	6
5	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0	0	0	1.07	1,60
6	Persentase kinerja realisasi pupuk	NA	NA	NA	0,42	0,35
7	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0	0	0	0,4	0,2

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka (diolah)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan selama 5 tahun terakhir masih sangat konstan diangka 2-2,5 persen terhadap PDRB belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 2.65
Perkembangan Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	2,80	2,68	2,34	2,43	2,57
Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten				2.07	1.25
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	0	0	0	0
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka (diolah)

Kondisi ini memang sangat berbanding terbalik pada kontribusi sektor raw material/primer dengan kontribusi dengan rata-rata 48 persen setiap tahunnya, yang seharusnya sudah mulai reformasi struktural ekonomi ke arah sektor industri/pengolahan.

Gambar 2.24
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menegah dan Besar
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

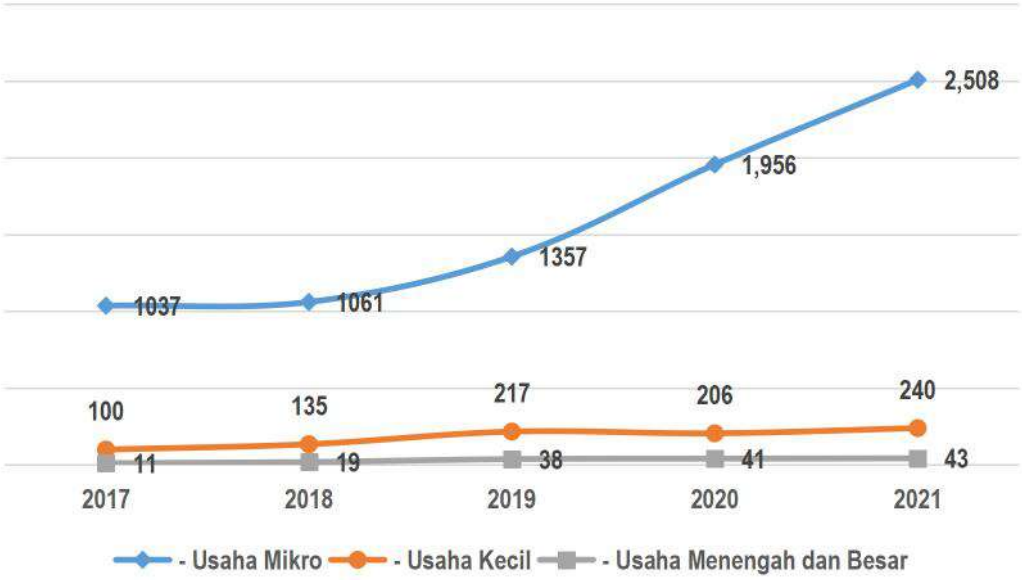

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Total Jumlah UMKM Tahun 2021 sebanyak 2.791 UMKM usaha mikro sebanyak 2.508 atau 89,86%, usaha kecil sebanyak 240 atau 8,60%, usaha menengah sebanyak 43 atau 1,54%. Gambar 2.24 menunjukkan meningkatnya jumlah usaha kecil di Kepulauan Mentawai kurun waktu 2017-2021, begitu juga dengan jenis usaha mikro yang bergerak pada sektor informal yang meningkat setiap tahun dari 1.037 usaha mikro tahun 2017 bertambah menjadi sebanyak 2.508 usaha mikro pada tahun 2021, tentunya berbagai program pendampingan dan akses permodalan yang harus dibuka bagi masyarakat agar usaha mikro dapat beralih pada usaha kecil dan memiliki legalitas usaha.

2.1.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Penunjang Perencanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down* untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner dan implementatif. Kurun waktu hingga tahun 2021, perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin baik. Hal ini terlihat dari pencapaian beberapa penghargaan yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak tahun 2018, anata lain:

1. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2018.
2. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2019.
3. Perencanaan Terbaik III se-Sumatera Barat Tahun 2019.
4. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2020.

5. Perencanaan Terbaik Harapan III se Sumatera Barat Tahun 2020.
6. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2021.
7. Perencanaan Terbaik Harapan III se Sumatera Barat Tahun 2021.

Begitu juga dengan proses dan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022, Penyusunan Rencana Kerja Pemarintah Daerah setiap tahunnya telah disusun dan batas waktu penetapannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Unsur Penunjang Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi,

akuntabilitas, dan partisipatif. Capaian target indikator kinerja penunjang pada urusan keuangan dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. APBD merupakan instrumen fiskal di daerah yang digunakan dalam membiayai membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Sejak tahun 2018 kinerja penyelenggaraan keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah pada pencapaian tertinggi yaitu dengan opini keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diperoleh pertama kali sejak kabupaten berdiri yaitu tahun 2019. Namun, pancapaian ini mengalami penurunan yatu pada tahun 2021 untuk pengelolaan keuangan tahun 2020 dengan opini keuangan dengan predikat WDP.

Tabel 2.66
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Opini Keuangan	NA	WTP	WTP	WDP	WDP
2	Realisasi PAD (persen)	80,02	96,03	47,0	62,25	69,78

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa menargetkan maksimal dalam pencapaian kinerja opini keuangan terhadap hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan setiap tahunnya dengan opini wajar tanpa pengecualian.

3. Unsur Penunjang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Suksesnya pencapaian kinerja pembangunan daerah sangat tergantung dengan kualitas sumber daya manusia yang ada. Perhatian pada unsur kepegawaian menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan, juga sebagaimana amanat Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, seluruh Pemerintah Daerah diamanahkan untuk menerapkan Sistem Merit dilingkungannya. Penerapan sistem merit sebagai salah satu strategi dalam manajemen SDM ASN tentunya bukanlah hal yang mudah. Pada perjalanannya, banyak tantangan dan inkonsistensi yang ditemui dalam pelaksanaan sistem ini. Tantangan dan inkonsistensi datang tidak hanya dari dalam ekosistem birokrasi semata, namun juga dari ekosistem di luar birokrasi yang secara tidak langsung mempengaruhi.

Sejak tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mulai penerapan dan penilaian Sistem Merit dengan indikator Nilai Penerapan Sistem Merit. Penilaian tersebut didasarkan pada aspek antara lain Perencanaan Kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengembangan Karir, Promosi dan Rotasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan Serta Sistem Informasi. Penerapan Sistem Merit akan diukur dengan Penilaian Sistem Merit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil

Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya menjadi indikator dalam urusan penunjang kepegawaian menggantikan indikator Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%. Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi pendidik masih belum dipenuhi sebagai syarat guru/pendidik dengan kisaran baru 16 persen. Begitu juga dengan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan juga dalam jabaran struktural dan fungsional yang diselenggarakan dalam upaya menyesuaikan kapasitas sumber daya dengan jabatan yang diemban sehingga mempercepat tercapainya tujuan organsasi.

4. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan urusan penunjang yang sangat vital dalam proses penyusunan perencanaan terutama dalam perumusan strategi/ kebijakan dengan penarikan kesimpulan secara ilmiah yang dijadikan pedoman dan dasar/rujukan pengambilan kebijakan.

Masih belum adanya SDM dalam bidang kelitbangan (peneliti) yang kompeten di dalam bidangnya. Selain itu juga disebabkan oleh permasalahan mengenai hasil penelitian dan pengembangan yang belum optimal sedangkan itu digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan dalam penetapan suatu kebijakan. Begitu juga dengan perkembangan inovasi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih fluktuatif, inovasi yang

diartikan sebagai pembaharuan tata kelola dan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pada tahun 2021 telah mencapai predikat inovatif walaupun ditahun 2020 mengalami penurunan pada predikat kurang inovatif. Kebijakan pengembangan inovasi belum sepenuhnya menjadi bagian capaian kinerja pemerintah daerah terlebih pada perangkat daerah.

5. Unsur Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kedudukan inspektorat daerah adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Perkembangan indikator pengawasan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan. Penguatan unsur pengawasan tidak dapat hanya berada pada unsur pengawasan atau berdasarkan temuan-temuan pemeriksaaan, yang lebih penting adalah penguatan tata kelola, tertib adminstrasi dan penguatan

sumberdaya manuasia sehingga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan tertib dan taat azas.

Tabel 2.67
Perkembangan Indikator Unsur Pengawasan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Persentase tindak lanjut temuan	65,80	69,70	77,76	86,25
2	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	88,20	96	97,25	97,58
3	Maturitas SPIP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2

Sumber: Inspektorat

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) merupakan jenis komponen pengeluaran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.68
Angka Konsumsi RT
Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Pengeluaran RT	2.066.326	2.249.953	2.484.444	2.365.148	2.473.204
Pertumbuhan pengeluaran RT (persen)		6,63	8,89	10,42	-4,80	4,57
2	Jumlah RT	21.153	21.554	21.950	20.843	21.085
3	Rata-Rata	97,68	104,39	113,19	113,47	117,30

Sumber: PDRB Kepulauan Mentawai Berdasarkan Pengeluaran 2017-2021

Tabel 2.68 menunjukkan pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan. Peningkatan konsumsi ini dipengaruhi oleh beberapa indikator ekonomi makro salah satunya adalah naiknya pendapatan masyarakat dan peningkatan konsumsi rumah tangga juga menggambarkan peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19 dimana masyarakat lebih hati-hati/menjaga dalam melakukan pengeluaran/konsumsi khususnya untuk jenis konsumsi non pangan. Pertumbuhan angka konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang positif dan dengan tren walaupun di tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup dalam diangka minus 4,80 persen dan kembali positif di tahun 2021 pada angka 4,57 persen.

b. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah RT. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.69
Rasio Angka Konsumsi RT Pangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2017-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2021
1.	Total Pengeluaran RT pangan	1.031.177	1.107.845	1.227.068	1.178.828	1.253.566
2.	Total Pengeluaran	2.066.326	2.249.953	2.484.444	2.365.148	2.473.204
Persentase		49,90	49,24	49,39	49,84	50,69

Sumber: PDRB Kepulauan Mentawai Berdasarkan Pengeluaran 2017-2021

Tabel 2.69 menunjukkan rasio konsumsi rumah tangga non pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini terlihat pada tahun 2017 persentase total pengeluaran non pangan terhadap pengeluaran rumah tangga sebesar 49,90 persen seterusnya hingga tahun 2021 sekitar menjadi 50,69 persen. Hal ini menjadi perhatian khusus, artinya tingkat konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi oleh konsumsi pangan (lebih dari 50 persen), artinya pola konsumsi masyarakat Mentawai masih sangat

konsumtif dan belum produktif. Tentu komsumsi selain pangan dapat didorong dalam meningkatka kulaitas hidup dan ekonomi masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, kualitas lingkungan dan kesehatan. Secara rinci pengeluaran konsumsi rumah tangga Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2021 dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 2.70
Angka Konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2017-2021

No	Komponen Pengeluaran Rumah Tangga	2017	2018	2019	2020	2021
1	Makanan Minuman dan Rokok	1.035.148,65	1.142.108,08	1.251.273,85	1.183.267,34	1.219.638,15
2	Pakaian dan Alas Kaki	70.641,94	77.337,88	85.391,67	79.540,35	84.332,90
3	Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan RT	151.670,37	164.170,25	176.122,87	171.355,62	176.195,79
4	Kesehatan dan Pendidikan	142.274,29	153.549,65	168.412,77	179.426,29	192.167.53
5	Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	462.519,86	494.021,37	548.440,09	501.961,02	542.810,25
6	Hotel dan Restoran	82.433,48	90.568,77	98.238,79	94.629,75	96.661,90
7	Lainnya	121.637,44	128.197,98	150.462,59	151.915,26	161.398,15

Sumber: PDRB Kepulauan Mentawai Berdasarkan Pengeluaran 2017-2021 (diolah)

c. Produktifitas Total Daerah

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator untuk melihat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2017-2021 seperti pada gambar 2.25 menunjukkan

tren penurunan. Pada tahun 2017 nilai produktivitas tenaga kerja sebesar 9,05 miliar rupiah/tenaga kerja/tahun lalu naik pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,48 miliar rupiah/tenaga kerja/tahun, namun pada tahun 2019 sampai pada tahun 2021 menurun dan menjadi sebesar 9,11 miliar rupiah/tenaga kerja/tahun pada tahun 2021.

Gambar 2.25
Produktivitas Total Daerah (milliar rupiah)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

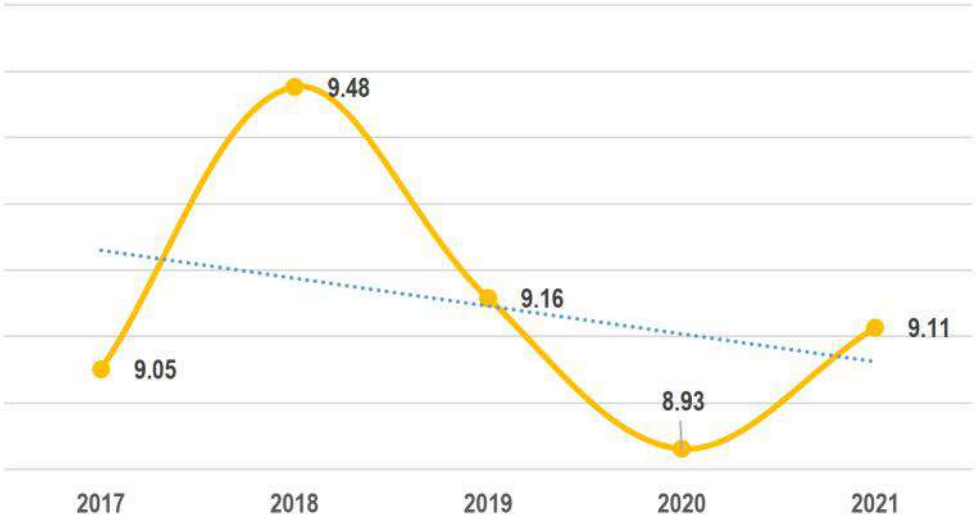

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Salah satu capaian yang dapat dijadikan ukuran dalam daya saing daerah adalah ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung kegiatan sektor rill masyarakat. Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih,

ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya.

a. Aksesibilitas

Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

a) Sarana jalan yang tersedia dalam kondisi baik sepanjang 107,9 km atau sekitar 9,54 persen dari total jalan yang tersedia, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 405,4 km atau sekitar 35,86 persen dari total panjang jalan tersedia.

b) Bandar Udara Rokot melayani penerbangan domestik Padang-Rokot (Tuapejat) dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Pelayanan penerbangan Padang-Tuapejat telah memiliki rute penerbangan tetap (2 kali seminggu) dengan kapasitas pesawat 15 s/d 20 orang.

c) Pelabuhan Laut sebanyak 5 buah, yaitu Pelabuhan Tuapejat, Pelabuhan Sioban, Pelabuhan Sikakap, Pelabuhan Sikabaluan, Pelabuhan Maileppet.

Untuk pelayaran Padang-Mentawai dapat dilalui oleh kelima pelabuhan tersebut dengan rute sudah terjadwal. Kapal ASDP yang tersedia sebanyak 3 buah (KMP Gambolo, KMP Ambu-Ambu, KMP Tanjung Burang) dan 2 unit Mentawai Fast juga melayani pelayaran rute Padang-Mentawai. Pelayaran antar pulau dalam wilayah Kepulauan Mentawai tersedia kapal

penyeberangan antar pulau antara lain KM Simasin, KM Nade, KM Beriloga, KM Simatalu, LCT Teluk Katurei, KM Bakkat Menuang dengan rute sudah terjadwal.

b. Penataan Wilayah

Penataan ruang dan wilayah mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015-2035 menjadi acuan hukum dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat. Rencana kawasan tata ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam jangka waktu 20 tahun di bagi dalam 2 kawasan antara lain kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri:

a) Kawasan hutan lindung.
b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya antara lain adalah kawasan resapan air.
c) Kawasan perlindungan setempat.
d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.
e) Kawasan rawan bencana alam.

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan gempa dan tsunami, kawasan rawan banjir, kawasan rawan abrasi.

f) Kawasan lindung geologi.

g) Kawasan konservasi perairan.

h) Kawasan lindung lainnya.

Kawasan budidaya di Kepulauan Mentawai terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 246.011,41 ha, kawasan peruntukan pertanian dengan luas 119.492,20 ha. Kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi bandar udara (bandara), pertahanan dan keamanan.

c. Air Bersih

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih secara agregat masih sekitar 55,46 persen. Hal ini menjadi perhatian serius karena kebutuhan akan air bersih akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, perlu upaya ekstra untuk memenuhi cakupan dan kualitas pelayanan air minum seperti yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengembangkan SPAM untuk kawasan di 10

kecamatan dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

d. Listrik dan Komunikasi

Rasio elektrifikasi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 masih rendah sekitar 83,72 persen. Kendala utama adalah infrastruktur jalan yang masih sangat terbatas dan juga kemampuan ekonomi masyarakat calon pelanggan yang tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik. Jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebanyak 14.717 pelanggan. Untuk 4 wilayah antara lain Tuapejat, Sioban, Sikakap, Muara Siberut, Sikabaluan telah beroperasi PLN selama 24 jam, sedangkan di daerah lain masih sekitar 10-12 jam/hari. Pengembangan sektor energi terutama energi baru dan terbarukan kedepan menjadi alternatif pilihan dalam rangka pembangunan energi yang berkelanjutan terutama dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang telah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 23% hingga tahun 2025.

Layanan surat menyurat juga sudah tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai, antara lain di Sikakap, Sioban, Tuapejat, Muara Siberut, Sikabaluan. Begitu juga untuk akses telekomunikasi sudah dapat melayani konsumen di 10 kecamatan.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk pelbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan pelbagai jenis kejahatan lainnya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.71
Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Jenis Kriminal	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kasus Narkoba	4	5	6	4	5
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	3	2	2	24	21
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	6	7	1	8	6
5.	Jumlah kasus Pencurian	19	17	12	20	13
6.	Jumlah kasus Penipuan	4	5	4	5	6
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	61	56	31	61	51
9.	Jumlah Penduduk	88.692	90.373	92.021	87.623	88.389
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	4,06	3,98	2,72	6,96	5,76

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai cenderung mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 tingkat kriminalitas sebesar 4,06 persen dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 5,76 persen. Harapannya dengan panguatan forum komunikasi pimpinan daerah dan

seluruh unsusr masyarakat menjaga ketertiban, keamanan dan keharmonisan masyarakat.

b. Layanan Perizinan

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian pelbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Pelayanan perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diorganisir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu pendekatan proses pembangunan adalah dengan peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Peningkatan sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya mewujudkan manusia yang seutuhnya dan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan

memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional.

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas kerja yang mengacu pada kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.72 menunjukkan adanya peningkatan rasio lulusan sarjana pada jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 kurun waktu 2018-2021, persentase penduduk 15 tahun keatas ijazah S1, S2, dan S3 tahun 2018 sebesar 4,79 persen dan mengalai peningkatan hingga tahun 2021 sebesar 8,53 persen.

Tabel 2.72
Jumlah Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas berijazah S1/S2/S3	2.768	3.361	3.512	5.494
Jumlah penduduk 15 tahun keatas	57.790	58.745	63.474	64 370
Persentase penduduk 15 tahun keatas berijazah S1/S2/S3 (1/2)	4,79	5,72	5,53	8,53

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai (diolah)

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan, pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah agar visi misi yang tertuang dalam RPJMD dapat tercapai. Evaluasi pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk melihat keberhasilan program dan kegiatan melalui pencapaian indikator kinerja RKPD yang sesuai/selaras dengan yang tertuang dalam RPJMD.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah terbayarnya honor ASN di lingkungan Disdikbud	300	orang	13.800.000.000	240	9.497.887.200	60	2.499.444.000	60	2.499.444.000	100,00	100,00	300	11.997.331.200	100,00	86,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja guru	3600	dok	1.500.000.000	2400	973.178.000	600	446.043.000	600	446.043.000	100,00	100,00	3000	1.419.221.000	83,33	94,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	100	jenis	1.500.000.000	75	1.009.990.350	22	409.997.350	22	409.997.350	100,00	100,00	97	1.419.987.700	97,00	94,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	55	jenis	240.000.000	40	169.999.700	10	47.397.000	10	47.397.000	100,00	100,00	50	217.396.700	90,91	90,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan ASN	6	jenis	25.000.000	2	3.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	100,00	100,00	4	15.000.000	66,67	60,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	kali	770.000.000	60	407.514.800	30	234.675.000	30	234.675.000	100,00	100,00	90	642.189.800	90,00	83,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	15	rekening	290.000.000	9	139.415.264	3	90.000.000	3	90.000.000	100,00	100,00	12	229.415.264	80,00	79,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								592.638.000									

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapainya pemeliharaan kendaraan mobil dinas operasional Tercapainya pemeliharaan kendaraan motor dinas operasional	48	unit	505.000.000	36	349.100.000	12	139.840.000	12	139.840.000	100,00	100,00	48	488.940.000	100,00	96,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	4	ruang	830.000.000	3	600.000.000	1	228.413.000	1	228.413.000	100,00	100,00	4	828.413.000	100,00	99,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan kantor	4	buah	780.000.000	2	403.893.000	1	224.385.000	1	224.385.000	100,00	100,00	3	628.278.000	75,00	80,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penataan Organisasi								2.000.000.000									
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksana Operasional AKN	3	Tahun	4.000.000.000	1	1.404.429.362	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	100,00	100,00	3	3.404.429.362	100,00	85,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terbangunnya unit sekolah baru	1	sekolah	400.000.000	0	-	1	333.790.800	1	333.790.800	100,00	100,00	1	333.790.800	100,00	83,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB yang dibangun pada sekolah dasar	6	RKB	3.215.000.000	1	466.575.000	5	2.440.532.800	5	2.440.532.800	100,00	100,00	6	2.907.107.800	100,00	90,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang dibangun pada sekolah dasar	12	sekolah	3.500.000.000	8	2.006.715.500	4	1.213.571.200	4	1.213.571.200	100,00	100,00	12	3.220.286.700	100,00	92,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang pustaka yang dibangun pada sekolah dasar	12	sekolah	2.780.000.000	5	1.243.536.616	6	1.454.638.400	6	1.454.638.400	100,00	100,00	11	2.698.175.016	91,67	97,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya jamban sekolah/WC, pagar pada sekolah dasar	14	sekolah	2.615.000.000	3	522.828.668	11	1.939.839.720	11	1.939.839.720	100,00	100,00	14	2.462.668.388	100,00	94,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas yang dibangun	5	sekolah	2.311.000.000	2	874.265.000	1	483.821.000	1	483.821.000	100,00	100,00	3	1.358.086.000	60,00	58,77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya pengadaan mobiler sekolah dasar	10	sekolah	1.030.000.000	0	-	6	526.320.000	6	526.320.000	100,00	100,00	6	526.320.000	60,00	51,10	Dinas Pendidikan dan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan pendidikan di SD	432	sekolah	53.000.000.000	270	29.296.498.884	135	17.513.066.000	135	17.513.066.000	100,00	100,00	405	46.809.564.884	93,75	88,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya ujian sekolah berstandar nasional dan try out SD	335	sekolah	700.000.000	135	366.052.000	135	203.719.300	135	203.719.300	100,00	100,00	270	569.771.300	80,60	81,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah jasa guru kontrak SD yang dibayarkan	540	sekolah	17.500.000.000	405	9.035.053.500	135	7.887.498.000	135	7.887.498.000	100,00	100,00	540	16.922.551.500	100,00	96,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya SDM bagi tenaga kependidikan	100	orang	53.000.000	0	-	100	52.228.300	100	52.228.300	100,00	100,00	100	52.228.300	100,00	98,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terkelolanya Aneka Tunjangan Guru, Pengawas, Kepala Sekolah Jenjang SD	615	orang	215.000.000	310	99.409.000	305	108.091.000	305	108.091.000	100,00	100,00	615	207.500.000	100,00	96,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terkelolanya BOS SD	540	sekolah	350.000.000	270	127.822.700	135	146.171.000	135	146.171.000	100,00	100,00	405	273.993.700	75,00	78,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
Penambahan Ruang Kelas Baru	Tersedianya ruang kelas baru	2	sekolah	1.500.000.000	0		1	859.144.200	1	859.144.200	100,00	100,00	1	859.144.200	50,00	57,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terbanguna nnya ruang guru/ TU/ Kepala sekolah	2	sekolah	500.000.000	0		1	29.250.000	1	29.250.000	100,00	100,00	1	29.250.000	50,00	5,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tersedianya ruang perpustakaan	5	sekolah	3.300.000.000	3	2.389.447.000	1	659.858.800	1	659.858.800	100,00	100,00	4	3.049.305.800	80,00	92,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Laboratorium	Tersedianya laboratorium sekolah	6	sekolah	4.300.000.000	3	2.461.917.500	3	1.672.931.200	3	1.672.931.200	100,00	100,00	6	4.134.848.700	100,00	96,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Tersedianya rumah dinas guru	10	sekolah	2.200.000.000	4	1.129.976.500	4	964.401.800	4	964.401.800	100,00	100,00	8	2.094.378.300	80,00	95,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya jamban sekolah/WC, pagar pada sekolah menengah atas	7	sekolah	900.000.000	5	420.328.000	1	292.167.600	1	292.167.600	100,00	100,00	6	712.495.600	85,71	79,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terehabnya ruang kelas	4	sekolah	1.800.000.000	0	-	4	1.796.455.600	4	1.796.455.600	100,00	100,00	4	1.796.455.600	100,00	99,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terehabnya rumah dinas kepala sekolah/ guru/ penjaga sekolah	1	sekolah	300.000.000	0	-	1	286.589.200	1	286.589.200	100,00	100,00	1	286.589.200	100,00	95,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya mebel sekolah	3	sekolah	300.000.000	0	-	2	190.597.000	2	190.597.000	100,00	100,00	2	190.597.000	66,67	63,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menengah pertama yang menerima dana BOS	136	sekolah	13.000.000.000	68	5.000.000.000	34	7.040.161.000	34	7.040.161.000	100,00	100,00	102	12.040.161.000	75,00	92,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya ujian nasional sekolah dasar	136	sekolah	600.000.000	68	290.463.000	34	212.631.000	34	212.631.000	100,00	100,00	102	503.094.000	75,00	83,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan	68	sekolah	120.000.000	0		34	83.581.000	34	83.581.000	100,00	100,00	34	83.581.000	50,00	69,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya tenaga kependidikan	580	orang	10.200.000.000	290	4.291.006.500	145	4.753.186.000	145	4.753.186.000	100,00	100,00	435	9.044.192.500	75,00	88,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya SDM pendidik dan tenaga kependidikan	200	orang	200.000.000	0	0	200	184.602.000	200	184.602.000	100,00	100,00	200	184.602.000	100,00	92,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terkelolanya Aneka Tunjangan Guru, Pengawas, Kepala Sekolah Jenjang SMP	65	orang	110.000.000			65	100.759.000	65	100.759.000	100,00	100,00	65	100.759.000	100,00	91,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terkelolanya BOS SMP	136	sekolah	918.905.000	68	367.562.000	34	183.781.000	34	183.781.000	100,00	100,00	102	551.343.000	75,00	60,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Terlaksananya tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan paud	20	lembaga	100.000.000	0	-	20	76.820.160	20	76.820.160	100,00	100,00	20	76.820.160	100,00	76,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah PTK PAUD yang mengikuti pelatihan	180	guru paud	250.000.000	0	-	180	235.049.200	180	235.049.200	100,00	100,00	180	235.049.200	100,00	94,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terselenggaranya Pembinaan Kelembaga an dan Manajemen PAUD	100	paud	250.000.000	0	-	100	160.243.740	100	160.243.740	100,00	100,00	100	160.243.740	100,00	64,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terkelolanya dana BOP PAUD	460	lembaga paud	2.916.180.000	276	1.715.400.000	92	571.800.000	92	571.800.000	100,00	100,00	368	2.287.200.000	80,00	78,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								1.324.447.196									
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terselengga ranya pbm dan ujian pendidikan non formal	60	PKBM	918.750.700	36	540.441.588	12	180.147.196	12	180.147.196	100,00	100,00	48	720.588.784	80,00	78,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terkelolanya Dana BOP sekolah nongormal/kesetaraan	60	PKBM	5.607.070.000	36	3.204.040.000	12	1.144.300.000	12	1.144.300.000	100,00	100,00	48	4.348.340.000	80,00	77,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN																	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penilaian kenaikan pangkat guru, pengawas, dan kepala sekolah	1400	orang	220.000.000	1050	86.372.000	350	99.148.000	350	99.148.000	100,00	100,00	1400	185.520.000	100,00	84,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Belanja Transfer DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daera																	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya administrasi keuangan	4.600	Orang	80.830.914.500	2.760	49.488.315.000	920	16.496.105.000	920	15.796.628.386	100,00	95,76	3680	65.284.943.386	80,00	80,77	Dinas Kesehatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	29	Jenis	109.400.000	15	60.000.000	5	5.949.800	5	5.931.000	100,00	99,68	20	65.931.000	68,97	60,27	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	153	jenis	483.825.510	90	296.219.700	30	98.739.900	30	98.739.900	100,00	100,00	120	394.959.600	78,43	81,63	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Makan Minum Pegawai																
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak	30	jenis	142.100.000	24	87.000.000	6	30.000.000	6	29.700.000	100,00	99,00	30	116.700.000	100,00	82,13	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	96	Dokumen	36.500.000	56	24.600.000	19	8.200.000	18	8.100.000	93,75	98,78	74	32.700.000	76,75	89,59	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	110	kali	1.133.100.000	72	542.454.300	24	200.909.000	20	195.367.099	83,33	97,24	92	737.821.399	83,64	65,12	Dinas Kesehatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	8	unit	179.902.800	2	87.952.480	3	39.978.400	3	39.147.273	100,00	97,92	5	127.099.753	62,50	70,65	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telekomunikasi berupa internet, informasi, sumberdaya air dan listrik	12	rekening	379.400.000	9	284.580.000	3	91.800.000	3	57.199.942	100,00	62,31	12	341.779.942	100,00	90,08	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JUmlah kendaraan dinas yang dipelihara	15	unit	102.400.000	9	64.000.000	3	20.000.000	2	15.283.000	66,67	76,42	11	79.283.000	73,33	77,42	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Pajak kendaraan	144	unit	258.000.000	86,4	165.000.000	27	50.000.000	25	45.735.000	92,59	91,47	111	210.735.000	77,36	81,68	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di pelihara	7	Unit	771.124.000	3	520.000.000	1	11.988.000	1	11.924.000	100,00	99,47	4	531.924.000	57,14	68,98	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan	Jumlah Rakit dan prasarana pendukung	3	unit	53.950.584.853			1	11.251.248.183	1	6.791.476.645	100,00	60,36	1	6.791.476.645	33,33	12,59	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Prasarana Pendukungnya	yang dibangun																
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	2	Unit	7.294.845.000			1	1.994.647.800	1	1.801.849.350	100,00	90,33	1	1.801.849.350	50,00	24,70	Dinas Kesehatan
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan yang dibangun	2	Unit	4.778.181.000			1	2.077.470.000	1	1.721.471.600	100,00	82,86	1	1.721.471.600	50,00	36,03	Dinas Kesehatan
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang di bangun	4	Unit	1.940.804.000			3	1.465.809.740	2	866.037.900	66,67	59,08	2	866.037.900	50,00	44,62	Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	4	Unit	2.200.000.000			4	2.128.390.250	4	1.556.872.000	100,00	73,15	4	1.556.872.000	100,00	70,77	Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan penunjang yang tersedia	10	Buah	11.100.000.000			5	7.213.561.620	5	6.560.802.219	100,00	90,95	5	6.560.802.219	50,00	59,11	Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat, vaksin yang tersedia	322	jenis	17.376.783.788	180	10.025.067.570	60	3.341.689.190	60	2.922.207.473	100,00	87,45	240	12.947.275.043	74,53	74,51	Dinas Kesehatan
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jenis Bahan Habis Pakai yang tersedia	322	jenis	34.775.085.522	180	20.455.932.660	60	6.818.644.220	60	6.717.503.930	100,00	98,52	240	27.173.436.590	74,53	78,14	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat penunjang medik fasilitas/pelayanan kesehatan	50	Jenis	1.490.633.100	30	906.071.100	10	292.281.000	10	145.115.900	100,00	49,65	40	1.051.187.000	80,00	70,52	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		251	kali	7.430.277.700	150	4.736.432.000	50	1.480.135.000	50	1.217.841.331	100,00	82,28	200	5.954.273.331	79,68	80,14	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		49,8	kali	249.000.000	30	155.000.000	10	50.000.000	10	48.325.000	100,00	96,65	40	203.325.000	80,32	81,66	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		49,8	kali	249.000.000	30	155.000.000	10	50.000.000	10	32.285.000	100,00	64,57	40	187.285.000	80,32	75,21	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		30	Tim	1.700.000.000	0	0	30	1.476.683.400	30	929.028.943	100,00	62,91	30	929.028.943	100,00	54,65	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		10	kali	502.000.000	6	303.000.000	2	100.000.000	2	94.563.400	100,00	94,56	8	397.563.400	80,00	79,20	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		10	kali	251.000.000	6	151.500.000	2	50.000.000	2	20.507.000	100,00	41,01	8	172.007.000	80,00	68,53	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		10	kali	376.500.000	6	227.250.000	2	75.000.000	2	63.267.692	100,00	84,36	8	290.517.692	80,00	77,16	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		10	kali	251.000.000	6	151.500.000	2	50.000.000	2	38.568.000	100,00	77,14	8	190.068.000	80,00	75,72	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		10	kali	1.004.000.000	6	606.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00	100,00	8	806.000.000	80,00	80,28	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		200	orang	3.173.346.525	120	1.963.547.750	40	633.402.500	40	444.398.670	100,00	70,16	160	2.407.946.420	80,00	75,88	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		52104	orang	18.460.887.402	31200	11.109.010.612	10400	3.690.701.200	10.400	3.538.890.200	100,00	95,89	41600	14.647.900.812	79,84	79,35	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		5	kali	301.640.000	2	217.934.900	1	75.410.000	0	3.409.000	40,00	4,52	2	221.343.900	48,00	73,38	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas		75	jenis Kegiatan	84.477.382.370	45	50.922.493.963	15	16.861.752.968	15	4.875.856.818	100,00	28,92	60	55.798.350.781	80,00	66,05	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		10	Layanan Ksehatan	3.281.848.380	6	1.967.535.000	2	655.845.000	2	460.851.541	75,00	70,27	8	2.428.386.541	75,00	73,99	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		25	puskes	3.491.736.570	15	1.995.278.040	5	712.599.300	0	514.507.700	- ,00	72,20	15	2.509.785.740	60,00	71,88	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi																	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1	SI	100.000.000	0	0	1	65.000.000	1	50.518.500	60,00	77,72	1	50.518.500	60,00	50,52	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		50		1.900.000.000	0	0	50	1.853.314.000	50	1.669.432.856	100,00	90,08	50	1.669.432.856	100,00	87,86	Dinas Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	orang	666.751.500	60	376.285.500	20	132.030.000	11	65.147.700	55,00	49,34	71	441.433.200	71,00	66,21	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		27	rekomendasi perijinan	251.301.200	14	150.180.000	5	50.060.000	5	50.056.000	100,00	99,99	19	200.236.000	70,37	79,68	Dinas Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		27	rekomendasi perijinan	490.679.398	14	293.234.700	5	97.744.900	5	36.676.280	100,00	37,52	19	329.910.980	70,37	67,24	Dinas Kesehatan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga																	
Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		27	rekomendasi perijinan	328.669.440	14	196.416.000	5	65.472.000	3	40.441.000	60,00	61,77	17	236.857.000	62,96	72,07	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		20	kali	627.260.000	10	313.630.000	6	125.452.000	4	110.810.000	66,67	88,33	14	424.440.000	70,00	67,67	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		20	kali	948.025.000	10	474.012.500	6	189.605.000	6	170.004.500	100,00	89,66	16	644.017.000	80,00	67,93	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelila kegiatan dan gaji pegawai kontrak	1010	Orang	43.250.000.000	606	25.950.000.000	202	8.141.961.048	200	7.605.180.420	99,01	93,41	806	33.555.180.420	79,80	77,58	Rumah Sakit Umum Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	150	Jenis	100.000.000	12	27.885.550	30	25.779.500	30	25.774.950	100,00	99,98	42	53.660.500	28,00	53,66	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	255	Jenis	535.908.500	51	59.737.700	57	115.481.700	57	115.367.668	100,00	99,90	108	175.105.368	42,35	32,67	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Bahan da Perlengkapan Kebersihan Kantor	110	Jenis	664.750.000	22	398.850.000	22	132.950.000	22	130.305.150	100,00	98,01	44	529.155.150	40,00	79,60	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	140	Jenis	392.200.000	28	53.968.500	2	60.000.000	2	60.000.000	100,00	100,00	30,00	113.968.500	21,43	29,06	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	225	Jenis	1.646.102.500	45	300.345.000	3	329.220.500	3	306.597.143	100,00	93,13	48,00	606.942.143	21,33	36,87	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175	Kali	720.000.000	34	142.097.950	35	143.208.000	26	107.150.918	74,29	74,82	60	249.248.868	34,29	34,62	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya rekening listrik dan air	10	Rekening	1.950.000.000	3	349.497.485	2	419.500.000	2	408.340.679	85,31	97,34	4,71	757.838.164	47,06	38,86	Rumah Sakit Umum Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarkannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50	Unit	1.590.000.000	20	236.529.643	10	317.000.000	3	296.453.470	28,00	93,52	22,80	532.983.113	45,60	33,52	Rumah Sakit Umum Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terbayarnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15	Jenis	230.000.000	9	138.000.000	3	45.100.000	3	43.773.250	100,00	97,06	12,00	181.773.250	80,00	79,03	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terbayarkannya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15	Jenis	5.504.000.000	12	3.302.400.000	1	1.100.786.000	1	1.003.592.336	100,00	91,17	13	4.305.992.336	86,67	78,23	Rumah Sakit Umum Daerah
Pengadaan Obat, Vaksin	Terbayarkan obat dan vaksin	10	Jenis	2.025.000.000	6	1.215.000.000	2	386.355.141	2	381.856.595	83,00	98,84	7,66	1.596.856.595	76,60	78,86	Rumah Sakit Umum Daerah
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terbayarkan bahan habis pakai	30	Jenis	5.425.000.000	18	3.255.000.000	6	1.100.763.762	5	1.083.812.545	91,00	98,46	23,46	4.338.812.545	78,20	79,98	Rumah Sakit Umum Daerah
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terbayarkannya Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20	Jenis	2.180.000.000	12	1.308.000.000	4	494.080.000	4	478.794.000	100,00	96,91	16	1.786.794.000	80,00	81,96	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terbayarkannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	20	yankes	858.109.790		-	20	858.109.790	20	841.893.598	100,00	98,11	20	841.893.598	100,00	98,11	Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terbayarkannya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	15	Rekening	3.615.000.000	9	2.169.000.000	3	965.655.262	2	827.966.268	55,33	85,74	10,66	2.996.966.268	71,07	82,90	Rumah Sakit Umum Daerah
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terbayarkannya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	5	Dok	1.125.000.000	3	675.000.000	1	126.500.000	1	46.214.417	100,00	36,53	4,00	721.214.417	80,00	64,11	Rumah Sakit Umum Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				-													
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terbayarkannya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	205	SDM	10.640.392.000	130	6.358.800.000	40	2.119.600.000	40	1.614.214.289	100,00	76,16	170,00	7.973.014.289	82,93	74,93	Rumah Sakit Umum Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA																	
PERENCANAAN,PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja																
Peyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokume Rencana OPD	2	Dok	35.000.000	0	0	1	31.507.500	1	31.507.500	100,00	100,00	1	31.507.500	50,00	90,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Data Pelaksanaan Kinerja	1	Dok	270.970.500			1	231.384.000	1	223.819.000	100,00	96,73	1	223.819.000	100,00	82,60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	340	Orang	30.332.245.625	204	18.211.480.273	68	6.066.449.125	68	5.972.858.683	100,00	98,46	272	24.184.338.956	80,00	79,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium pegawai Kontrak	1005	Orang	13.611.317.714	600	3.792.074.400	201	5.072.856.000	201	4.984.793.418	100,00	98,26	801	8.776.867.818	79,70	64,48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penerangan Bangunan Kantor	27	Jenis	64.436.488	12	28.114.394	5	10.040.855	5	10.037.700	100,00	99,97	17	38.152.094	62,96	59,21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Makan dan Minum																
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	155	Jenis	471.764.740	54	114.654.000	38	149.988.740	35	133.350.200	92,11	88,91	89	248.004.200	57,42	52,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah Bahan dan Peralatan kebersihan Kantor	130	Jenis		78		26		20		76,92		98		75,38		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah Makanan dan Minuman	60	kali		36		12		11		91,67		47		78,33		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	21	Jenis	203.992.750	12	133.074.500	7	44.992.750	7	42.849.500	100,00	95,24	19	175.924.000	90,48	86,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	19	Buku	75.930.000	9	29.600.000	7	20.000.000	5	15.000.000	71,43	75,00	14	44.600.000	73,68	58,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Rapat Koordiansi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi	75	Rapat	876.234.000	31	473.768.587	20	183.620.000	20	180.455.714	100,00	98,28	51	654.224.301	68,00	74,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terpenuhinya BMD Penunja																
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya Peralatan kantor (AC,PC,Printer)	30	Jenis	572.129.100	10	68.319.100	10	387.045.781	10	377.638.000	100,00	97,57	20	445.957.100	66,67	77,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening	15	Rekening	1.456.804.000	9	870.600.000	3	290.200.000	3	290.200.000	100,00	100,00	12	1.160.800.000	80,00	79,68	Dinas Pekerjaan Umum dan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Penataan Ruang
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	62	Unit	139.111.200	23	44.180.500	18	27.240.000	18	25.404.800	100,00	93,26	41	69.585.300	66,13	50,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasonal atau Lapangan	Jumlah Alat Berat dan Kendaraan Dinas yang Dipelihara	50	Unit	1.061.613.300	21	416.209.275	13	434.976.300	13	348.214.650	100,00	80,05	34	764.423.925	68,00	72,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah perizinan Kendaraan	70	Unit		45		18		16		88,89		61		87,14		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	26	Unit	194.850.000	15	119.995.000	5	24.850.000	5	21.195.000	100,00	85,29	20	141.190.000	76,92	72,46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara	3	Unit	319.755.740	1	52.220.000	1	237.791.740	1	212.300.266	100,00	89,28	2	264.520.266	66,67	82,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi																
PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Air Baku Berbagai Keperluan dan Terlindunginya Kawasan dari Abrasi Pantai,Banjir dan Longsor																
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	Dok	394.459.940	0	0	2	392.103.940	2	360.832.040	100,00	92,02	2	360.832.040	100,00	91,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir,Lahar,Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	Dok	382.919.940	0	0	2	379.833.660	2	353.968.740	100,00	93,19	2	353.968.740	100,00	92,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pantai																	
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Cakupan Layanan Irigasi																
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Irigasi yang terbangun	200	Ha	6.783.272.896	0	0	171	6.781.712.783	171	5.047.549.935	100,00	74,43	171	5.047.549.935	85,50	74,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya jaringa irigasi	15	Paket	5.437.403.526	1	1.399.358.906	10	1.444.447.560	10	1.396.018.032	100,00	96,65	11	2.795.376.938	73,33	51,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentasi Rumah Tinggal Berakses Air Minum																
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih bagi Masyrakat																
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR yang dilayani	2150	SR	9.550.446.880	1500	5.509.873.200	530	1.836.624.400	530	1.826.884.128	100,00	99,47	2030	7.336.757.328	94,42	76,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan SPAM Perpipaan Dikawasan Perkotaan	Jumlah baru SR yang dilayani	200	SR	6.283.294.800			200	6.251.582.300	200	5.691.381.801	100,00	91,04	200	5.691.381.801	100,00	90,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah UPTD PAM yang diberoperasi	50	UPT	13.008.917.894	30	8.130.573.684	10	2.710.191.228	10	2.492.969.016	100,00	91,98	40	10.623.542.700	80,00	81,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentasi Rumah Tangga Bersanitasi																
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
» Pembangunan/Penyediaan Sitem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah MCK Yang Dibangun	628	unit	9.087.036.480	350	5.679.397.800	125	1.893.132.600	120	1.840.384.192	96,00	97,21	470	7.519.781.992	74,84	82,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																	
PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DIDAERAH KAB/KOTA	Tersedianya bangunan gedung daerh siap pakai																
» Penataan Bangunan dan lingkungan	Tersedianya bangunan gedung negara (kantor camat pagai selatan) tersedianya dokumen izin mendirikan bangunan (IMB), tersedianydokumen perencanaan kawasan perkantoran	10	gedung	10.397.428.700	6	5.321.217.805	3	2.459.190.000	3	2.086.822.282	100,00	84,86	9	7.408.040.087	90,00	71,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																	
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Prosentase Meningkatnya Jaringan Jalan Kabupaten																
» Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	25	dok	4.790.820.152	15	70.503.500	5	850.834.940	5	743.114.340	100,00	87,34	20	813.617.840	80,00	16,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
» Pembangunan Jalan	Panjang jalan Yang Dibangun	91,11	km	114.310.155.116	61,0	44.013.649.619	30,5	70.434.356.841	30	59.560.941.113	98,36	84,56	91	103.574.590.732	99,88	90,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
» Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Yang Mengalami Peningkatan/Rekonstruksi	41,15	km	99.762.871.397	18,5	18.908.584.010	8,9	49.959.189.501	8	43.846.981.617	89,89	87,77	26,5	62.755.565.627	64,40	62,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
» Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Yang dipelihara	182,7	km	9.964.760.706	62	6.065.535.000	45	1.828.196.200	44	1.702.828.500	97,78	93,14	106	7.768.363.500	58,02	77,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
» Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Yang Dibangun	120	meter	3.884.735.000	84	3.000.000.000	10	8.275.000	10	8.270.000	100,00	99,94	94	3.008.270.000	78,33	77,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
» Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan Yang Dipelihara	7080	meter	2.912.422.236	1200	1.598.907.708	350	532.969.236	340	516.460.000	97,14	96,90	1540	2.115.367.708	21,75	72,63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																	
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertanganinya kasus pelanggaran tataruang																
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi Penataan Ibu Kota Tuapejat/Green Smart City (Mentawai Boulevar)	2	dok	288.687.630			2	288.130.000	2	245.148.993	100,00	85,08	2	245.148.993	100,00	84,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Permahan dan Kawasan Pemukiman																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5	Dokumen	150.000.000	3	90.000.000	1	15.000.000	1	14.956.000	100,00	99,71	4	104.956.000	80,00	69,97	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Dokumen	557.596.500	3	335.446.500	1	111.075.000	1	109.522.800	100,00	98,60	4	444.969.300	80,00	79,80	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	26	Jenis	64.548.180	12	6.000.000	6	9.992.180	6	7.103.780	100,00	71,09	18	13.103.780	69,23	20,30	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan Kantor	15	Unit	169.996.300	6	108.277.832	3	41.645.320	3	39.953.508	100,00	95,94	9	148.231.340	60,00	87,20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	325	Jenis	649.211.472	195	338.130.975	65	135.252.390	57	134.333.560	87,69	99,32	252	472.464.535	77,54	72,78	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	52000	Lembar	214.424.000	32000	122.528.000	10000	43.760.000	10000	43.743.390	100,00	99,96	42000	166.271.390	80,77	77,54	Dinas Perumahan dan Kawasan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Permukiman
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacan dan peraturan perundang-undangan	59	Surat Kabar	79.448.000	28	13.658.000	8	18.400.000	7	18.400.000	87,50	100,00	35	32.058.000	59,32	40,35	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	76	Kali	349.954.000	35	210.035.200	14	65.636.000	12	64.775.100	85,71	98,69	47	274.810.300	62,17	78,53	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Mebel	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	11	Kegiatan	220.176.362			5	120.176.362	5	120.053.200	100,00	99,90	5	120.053.200	45,45	54,53	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terseianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15	Rekening	385.923.426	9	238.200.000	3	95.280.000	2	95.047.500	80,00	99,76	11,4	333.247.500	76,00	86,35	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah																	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan	10	Unit	249.052.240	6	153.797.200	2	49.612.000	2	45.292.430	100,00	91,29	8	199.089.630	80,00	79,94	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan jasa pemeliharaan, dan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	83	Unit	26.850.000	42	0	16	18.750.000	14	18.568.200	87,50	99,03	55,6	18.568.200	66,83	69,16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5	Unit	84.948.000	3	41.854.400	1	14.948.000	1	14.906.168	100,00	99,72	4	56.760.568	80,00	66,82	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																	
Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha																	
Perbaikan Rumah Tidak layak huni	Terlaksananya rumah layak huni	373	Unit	12.433.698.000	193	6.631.305.600	69	2.072.283.000	69	2.059.974.419	100,00	99,41	262,2	8.691.280.019	70,37	69,90	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																	
Penyediaan prasarana, dan sarana dan utilitas umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian	Tersedinya perencanaan PSU untuk Perumahan	6200	Meter	2.481.699.823	0	0	4967	1.378.722.124	4967	1.128.177.821	100,00	81,83	4967	1.128.177.821	80,11	45,46	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	149	orang	15.055.542.121	86,8	9.255.456.222	31	3.085.152.074	31	2.720.083.892	100,00	88,17	117,8	11.975.540.114	79,17	79,54	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan jasa administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayarnya jasa administrasi keuangan dan honorarium tidak tetap	990	orang	24.105.897.600	606	13.057.361.200	202	5.022.062.000	200	4.328.494.736	99,01	86,19	806	17.385.855.936	81,43	72,12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	48	jenis	41.847.910	28	20.923.955	10	8.047.675	10	8.029.500	100,00	99,77	38	28.953.455	79,17	69,19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya isi ulang gas dan peralatan rumah tangga	23	jenis	65.000.000	0	-	23	63.704.828	22	50.999.000	95,65	80,06	22	50.999.000	95,65	78,46	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan bahan logistik Kantor	tersedianya atk,perabot kantor,Natura dan pakan natura dan makan minum rapat	320	jenis	428.816.648	200	257.805.600	70	85.935.200	59	84.500.200	84,29	98,33	259	342.305.800	80,94	79,83	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedinya barang cetakan dan penggandaan	48	jenis	93.015.240	25	49.863.840	8	19.178.400	8	16.933.400	100,00	88,29	33	66.797.240	68,75	71,81	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18	jenis	230.000.000	12	50.000.000	4	13.750.000	4	12.400.000	100,00	90,18	16	62.400.000	88,89	27,13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi lintas sektor	70	kali	343.441.000	36	224.288.000	15	70.090.000	15	70.025.500	100,00	99,91	51	294.313.500	72,86	85,70	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, internet, air dan telepon	4	rekening	0	0	-	4	39.000.000	4	4.848.988	100,00	12,43	4	4.848.988	100,00	#DIV/ 0!	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	22	unit	1.179.164.000	12	769.020.000	4	256.340.000	4	213.569.860	100,00	83,32	16	982.589.860	72,73	83,33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUN																	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terciptanya situasi atau kondisi suasana yang tentram dan tertib	48	kali	3.485.277.054	30	2.157.552.462	10	829.827.870	9	804.943.700	90,00	97,00	39	2.962.496.162	81,25	85,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kebakaran	14	kecamatan	44.000.000	0	-	14	40.291.700	11	34.883.000	78,57	86,58	11	34.883.000	78,57	79,28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya Honorarium PNS dan Pegawai Kontrak	308	Orang	3.744.384.000	136	1.466.215.836	64	780.080.000	64	747.674.700	100,00	95,85	200	2.213.890.536	64,94	59,13	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah																	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibutuhkan	50	Jenis	23.976.300	20	12.555.000	9	3.996.050	9	3.996.050	100,00	100,00	29	16.551.050	58,00	69,03	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah dan jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan, jumlah Pertemuan/ rapat yang diadakan	64	Bulan	323.274.640	24	186.504.600	15	62.168.200	14	60.355.528	93,33	97,08	38	246.860.128	59,38	76,36	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		172	jenis		82		33		33		40,24		115		67,02		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang dibutuhkan	12	Jenis	76.104.000	8	40.568.000	2	12.684.000	2	12.684.000	90,00	100,00	10	53.252.000	81,67	69,97	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilakukan / Dihadiri	132	kali	551.289.600	48	253.183.206	27	114.852.000	27	114.430.700	100,00	99,63	75	367.613.906	56,82	66,68	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Yang Tersedia	21	Jenis	102.000.000	7	56.000.000	10	20.000.000	8	18.000.000	80,00	90,00	15	74.000.000	71,43	72,55	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																	
Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (mobil, bodi boat)	3	unit	371.520.000	0	0	2	328.380.000	2	322.325.550	100,00	98,16	2	322.325.550	66,67	86,76	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	15	Rekening	224.840.000	9	155.944.015	3	40.150.000	3	37.526.580	100,00	93,47	12	193.470.595	80,00	86,05	Dinas Sosial Pemberdayaan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor	85	Jenis	600.000.000	46	385.597.440	16	120.499.200	16	112.499.200	100,00	93,36	62	498.096.640	73,11	83,02	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																	
Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan, kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan layak jalan	65	Unit	166.400.000	30	95.250.000	17	31.750.000	17	27.052.900	100,00	85,21	47	122.302.900	72,31	73,50	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15	unit	583.000.000	6	277.236.495	2	198.889.000	2	158.200.000	100,00	79,54	8	435.436.495	53,33	74,69	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program pemberdayaan sosial																	
Kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT)																	
Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	Fasilitasi dalam pemetaan lokasi dan pembangunan rumah KAT	150	unit	395.000.000	133	153.925.500	5	69.970.000	5	69.621.700	100,00	99,50	138	223.547.200	92,00	56,59	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota																	
Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah PSKS keluarga yang dibina	276	KPM	379.943.200	159	124.707.750	53	73.066.000	49	62.432.651	92,45	85,45	208	187.140.401	75,47	49,25	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah pengurus dan pengelola LK3 yang terbina	20	orang	50.000.000	0	0	12	29.520.000	12	28.281.700	100,00	95,81	12	28.281.700	60,00	56,56	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Anak
Program rehabilitasi sosial																	
Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat																	
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyadang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar. Serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah peserta(lansia miskin potensial) yang mendapatkan bimbingan sosial	90	Orang	60.000.000	0	0	60	37.924.300	54	29.588.000	90,00	78,02	54	29.588.000	60,00	49,31	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberian layanan rujukan	Jumlah Anak Putus Sekolah Yang dirujuk ke PSBR	50	Orang	860.583.000	25	432.068.000	20	166.180.000	19	151.360.400	95,00	91,08	44	583.428.400	88,00	67,79	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program perlindungan dan jaminan sosial																	
Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota																	
Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah data masyarakat miskin yang valid	10	kali	759.954.000	6	529.122.086	2	146.145.000	2	121.983.758	100,00	83,47	8	651.105.844	80,00	85,68	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Penerima Bantuan Jaminan Sosial	2000	Orang	1.806.000.000	1200	688.315.500	400	430.000.000	398	365.000.000	99,50	84,88	1598	1.053.315.500	79,90	58,32	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terlakasanaya pemberian PKH	5607	KPM	347.000.000	513	90.427.750	5007	221.769.236	5007	199.378.675	100,00	89,90	5520	289.806.425	98,45	83,52	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Tersedianya penerangan kepada masyarakat miskin	361	KK	757.440.000	0	0	289	603.870.942	268	538.839.250	92,73	89,23	268	538.839.250	74,19	71,14	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program penanganan bencana																	
Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota																	
Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani	1000	KK	124.479.000	200	35.300.000	594	30.701.000	594	30.108.800	100,00	98,07	794	65.408.800	79,40	52,55	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	125	Rekening	15.000.000.000	75	9.000.000.000	25	2.688.423.318	25	2.615.079.200	100,00	97,27	100	11.615.079.200	80,00	77,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelila kegiatan dan gaji pegawai kontrak	460	Orang	7.500.000.000	276	4.500.000.000	92	1.488.134.000	92	1.472.977.195	100,00	98,98	368	5.972.977.195	80,00	79,64	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	50	Jenis	75.000.000	30	45.000.000	10	12.446.500	10	9.376.708	100,00	75,34	40	54.376.708	80,00	72,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	100	Jenis	750.000.000	60	450.000.000	20	77.361.800	20	72.387.037	100,00	93,57	80	522.387.037	80,00	69,65	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	50	Macam	100.000.000	30	60.000.000	10	17.005.800	10	16.722.177	100,00	98,33	40	76.722.177	80,00	76,72	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	25	Jenis	50.000.000	15	30.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	100,00	100,00	20	35.000.000	80,00	70,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	75	Kali	1.000.000.000	45	600.000.000	15	104.560.000	15	104.464.044	100,00	99,91	60	704.464.044	80,00	70,45	Badan Penanggulangan Bencana

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	daerah																Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, internet, dan ijin stasiun radio	15	Rekening	450.000.000	9	270.000.000	3	62.000.000	3	49.834.810	83,33	80,38	12	319.834.810	76,67	71,07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		10	Unit	275.000.000	6	165.000.000	2	55.100.000	2	49.727.899	100,00	90,25	8	214.727.899	80,00	78,08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		50	Unit	1.050.000.000	30	165.000.000	10	185.541.600	8	145.644.975	82,00	78,50	38	310.644.975	76,40	29,59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		50	Unit	250.000.000	30	165.000.000	10	14.410.000	13	12.221.000	132,00	84,81	43	177.221.000	86,40	70,89	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		4	dokumen	250.000.000	2	150.000.000	1	22.958.200	1	22.291.000	100,00	97,09	3	172.291.000	75,00	68,92	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terhadap Bencana																	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		75	kejadian	1.750.000.000	45	1.050.000.000	15	148.694.000	10	140.377.450	66,67	94,41	55	1.190.377.450	73,33	68,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		3	kejadian	500.000.000	1	250.000.000	1	181.858.000	1	166.802.500	100,00	91,72	2	416.802.500	66,67	83,36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		2	kali	2.200.000.000	1	0	1	2.201.821.870	1	1.813.910.469	100,00	82,38	2	1.813.910.469	100,00	82,45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		16	jenis	6.250.000.000	8	2.500.000.000	7	2.596.868.554	6	2.523.041.335	85,71	97,16	14	5.023.041.335	87,50	80,37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran																	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		14	kecamatan	600.000.000		0	10	520.119.454	9	450.357.300	90,00	86,59	9	450.357.300	64,29	75,06	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja																
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan																
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Terlaksananya pendidkan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaterkompetensi	6	pelatihan	450.450.000	0	0	3	280.870.500	3	275.083.500	100,00	97,94	3	275.083.500	50,00	61,07	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan struktur serta sarana dan prasarana	Tersediannya struktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	10	kali	130.000.000	0	0	5	68.437.600	5	62.245.150	100,00	90,95	5	62.245.150	50,00	47,88	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
lembaga pelatihan kerja																	Pintu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan																	
Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota																	
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan PUG	10	Kali	45.000.000	0	0	2	14.579.000	2	14.114.300	100,00	96,81	2	14.114.300	20,00	31,37	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG dan termasuk PPRG	72	OPD	50.000.000	0	0	36	30.760.970	36	30.328.300	100,00	98,59	36	30.328.300	50,00	60,66	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk nPPRG	Terlaksananya sosialisasi PUG termasuk PPRG di OPD terkait	3	Kali	50.000.000	0	0	1	30.304.000	1	25.760.000	100,00	85,01	1	25.760.000	33,33	51,52	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial,dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota																	
Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi	49	Organisasi	3.709.676.000	30	1.011.190.474	4	572.974.700	4	572.690.000	100,00	99,95	34	1.583.880.474	69,39	42,70	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)																	
Kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota																	
Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga	Jumlah advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak	2	kali	50.000.000	0	0	1	22.194.600	1	21.529.300	100,00	97,00	1	21.529.300	50,00	43,06	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	dilaksanakan																dan Perlindungan Anak
Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah rakor gugus tugas KLA	7	kali	109.450.000	4	37.452.500	1	16.345.000	1	14.954.700	100,00	91,49	5	52.407.200	71,43	47,88	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota																	
Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pertemuan forum anak	3	Kali	282.225.500	0	0	1	112.544.800	1	110.600.000	100,00	98,27	1	110.600.000	33,33	39,19	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program perlindungan khusus anak																	
Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota																	
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan tehadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan	18	Kasus	650.000.000	6	294.933.000	4	111.330.000	4	105.644.200	100,00	94,89	10	400.577.200	55,56	61,63	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota																	
Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan unit layanan pengaduan masyarakat bagi anak	2	UPTD	42.000.000	0	0	1	34.845.652	1	31.179.407	100,00	89,48	1	31.179.407	50,00	74,24	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiata penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukn perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan yang dilatih (P2TP2A)	1	Lembaga	165.000.000	0	0	1	161.870.400	1	160.375.500	100,00	99,08	1	160.375.500	100,00	97,20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Cadangan Pangan Utama																
PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya jumlah stok pasikan dan harga pangan yang dipantau																
Pelaksanaan pencapaian target kosumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Meningkatnya jumlah stok pasikan dan harga pangan yang dipantau	7	lokasi	525.047.100	0	-	7	525.047.100	7	492.812.100	100,00	93,86	7	492.812.100	100,00	93,86	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												0,00	0				
Administrasi Umum Perangkat Daerah												0,00	0				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen listrik yang dibutuhkan	36	Jenis	12.742.080	21	8.494.720	7	2.654.600	7	2.654.600	100,00	100,00	28	11.149.320	77,78	87,50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di butuhkan	30	Jenis	205.695.000	13	66.089.000	13	49.059.880	13	49.042.380	100,00	99,96	26	115.131.380	86,67	55,97	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan	65	Jenis		21		21		21		100,00		42		64,62		
	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, peserta rapat dan tamu	12	Bulan		12		12		12		100,00		24		200,00		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan/surat kabar yang dibutuhkan	16	Jenis	56.800.000	6	16.050.000	4	16.800.000	4	16.700.000	100,00	99,40	10	32.750.000	62,50	57,66	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan/surat kabar yang dibutuhkan	60	Kali	300.000.000	32	93.703.852	12	118.332.000	11	90.789.006	91,67	76,72	43	184.492.858	71,67	61,50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan listrik yang dibayarkan	3	Rekening	50.000.000	1	14.670.839	1	18.000.000	1	16.166.968	100,00	89,82	2	30.837.807	66,67	61,68	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Jumlah	321	Orang	3.424.081.110	183	1.250.820.200	73	1.218.139.600	73	1.107.486.493	100,00	90,92	256	2.358.306.693	79,55	68,87	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Jenis Peralatan Kebersihan yang di Butuhkan	30	Jenis		14		8		8		100,00		22		73,33		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	50	kali/unit	113.539.900	17	42.117.545	17	18.480.000	17	15.657.000	100,00	84,72	34	57.774.545	68,00	50,88	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas yang di pelihara	55	Unit	150.000.000	17	10.796.550	17	73.600.000	17	73.185.000	100,00	99,44	34	83.981.550	61,82	55,99	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	5	Unit	109.627.500	1	42.299.340	2	7.800.000	2	7.800.000	100,00	100,00	3	50.099.340	60,00	55,99	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																	
Koordinasi Sinskronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkugan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,Air Udara dan Laut	Terlaksananya koordinasi penghentian sumber pencemaran	8	Dokumen	105.000.000	0	-	5	60.153.000	4	55.241.000	80,00	91,83	4	55.241.000	50,00	52,61	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)																	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																	
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	12	Dokumen	1.500.000.000	1	482.748.342	8	714.766.000	7	643.519.778	87,50	90,03	8	1.126.268.120	66,67	75,08	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda	200	Objek	200.000.000	159	58.203.600	106	46.510.000	106	41.870.000	100,00	90,02	265	100.073.600	132,50	50,04	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH																	
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH																	
Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan ham MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	12	Dokumen	220.000.000	4	183.277.780	5	15.401.900	5	12.435.800	100,00	80,74	9	195.713.580	75,00	88,96	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																	
Pengelolaan Sampah																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang tersedia	62	ton/hari	459.000.000	49	199.358.772	8	244.772.500	8	242.704.000	100,00	99,15	57	442.062.772	92,39	96,31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	42	Unit	659.807.901	4	580.448.136	8	5.640.000	8	5.010.000	100,00	88,83	12	585.458.136	28,57	88,73	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil																	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota																	
administrasi keuangan perangkat daerah																	
administrasi umum perangkat daerah																	
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya komponen listrik atau sarana penerangan	12	Jenis	37.750.000	2	17.750.000	7	8.235.000	6	7.235.000	85,71	87,86	8	24.985.000	66,67	66,19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor	5	unit	150.000.000			2	111.100.000	2	104.940.000	100,00	94,46	2	104.940.000	40,00	69,96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
penyediaan bahan logistik kantor	terlasaksananya atk dan makan minum pegawai	18	jenis	350.000.000	10	225.000.000	4	94.645.700	4	91.644.200	100,00	96,83	14	316.644.200	77,78	90,47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya cetak dan penggandaan	14	Jenis	86.900.000	8	46.900.000	2	14.900.000	2	14.830.000	100,00	99,53	10	61.730.000	71,43	71,04	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	7	Jenis	29.600.000	2	9.600.000	2	12.000.000	2	12.000.000	100,00	100,00	4	21.600.000	57,14	72,97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi skpd	terlaksananya rapat koordinasi antar skpd	32	kali	285.960.000	12	185.960.000	10	66.060.000	8	59.137.400	80,00	89,52	20	245.097.400	62,50	85,71	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																	
penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening air dan listrik	8	Jenis	217.600.000	3	123.600.000	2	37.200.000	2	32.562.972	100,00	87,53	5	156.162.972	62,50	71,77	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
penyediaan jasa pelayanan umum kantor	terlaksananya alat kebersihan kantor	40	Jenis	63.829.000	12	43.829.000	17	11.913.600	16	10.913.800	94,12	91,61	28	54.742.800	70,00	85,76	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah																	
penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	16	unit	164.900.000	7	51.600.000	6	48.260.000	6	45.718.500	100,00	94,73	13	97.318.500	81,25	59,02	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
pemeliharaan /rehabilitasigedung kantor dan bangunan lainnya	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1	unit	109.854.000			1	107.700.000	1	106.455.544	100,00	98,84	1	106.455.544	100,00	96,91	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk																	
pelayanan pendaftaran penduduk																	
peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	6	Jenis	1.344.181.250	2	354.181.250	2	439.032.700	2	429.157.500	100,00	97,75	4	783.338.750	66,67	58,28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
penataan pendaftaran penduduk																	
pengadaan dokumen kependudukan selain blangko ktp el formulir buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	tersedianya dokumen kependudukan	8	jenis	400.000.000	3	175.000.000	3	192.900.000	3	173.925.000	100,00	90,16	6	348.925.000	75,00	87,23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil																	
Pelayanan Pencatatan Sipil																	
peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	terlaksananya pelayanan pencattan sipil	20	jenis	2.100.000.000	7	502.281.250	7	629.569.700	7	575.783.740	100,00	91,46	14	1.078.064.990	70,00	51,34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Sipil
Penyelenggaraan pencatatan sipil																	
komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil	tersedianya komunikasi dan informasi kepada masyarakat	5	jenis	650.000.000	1	20.000.000	2	465.470.800	2	383.247.200	100,00	82,34	3	403.247.200	60,00	62,04	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/kabupaten																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	48	bln	13.397.034.367	36	9.396.101.245	12	3.490.215.674	12	3.296.769.268	100,00	94,46	48	12.692.870.513	100,00	94,74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Terbayarnya honorarium PNS dan Pegawai Kontrak	48	bln	6.518.404.000	36	4.418.790.363	12	1.832.011.000	12	1.796.656.768	100,00	98,07	48	6.215.447.131	100,00	95,35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan akan logistik kantor	48	bln	249.211.800	36	183.602.580	12	64.997.900	12	59.893.000	100,00	92,15	48	243.495.580	100,00	97,71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	50	bln	91.560.500	36	57.862.300	12	22.999.900	12	16.629.800	100,00	72,30	48	74.492.100	96,00	81,36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan bacaan peraturan dan PerUndang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan per-Undang-undangan	26	bln	17.500.000	12	12.000.000	12	5.500.000	11	4.800.000	91,67	87,27	23	16.800.000	88,46	96,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan rapat rapat koordinasi	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	48	bln	655.978.000	36	504.210.362	12	50.078.000	12	46.463.800	100,00	92,78	48	550.674.162	100,00	83,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Listrik dan Internet	50	bln	192.000.000	36	112.094.468	12	26.400.000	10	24.480.811	83,33	92,73	46	136.575.279	92,00	71,13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	48	bln	127.243.500	36	93.905.000	12	24.990.500	12	23.039.400	100,00	92,19	48	116.944.400	100,00	91,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																	
Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Operasional yang Layak Pakai	44	unit	109.170.000	33	69.047.800	4	15.000.000	4	13.000.000	100,00	86,67	37	82.047.800	84,09	75,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Administrasi Pemerintahan Desa																	
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terfasilitasinya Perencanaan Pembangunan Desa	2	kali	90.314.000	0	-	2	86.314.000	2	72.640.000	100,00	84,16	2	72.640.000	100,00	80,43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa	3	kali	113.599.800	0	-	3	113.599.800	2	96.839.958	66,67	85,25	2	96.839.958	66,67	85,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	15	kali	599.846.400	0	-	15	599.846.400	15	535.544.000	100,00	89,28	15	535.544.000	100,00	89,28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat																	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah, serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalamDaerah Kabupaten																	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya kegiatan PKK	38	kali	3.015.449.000	32	2.216.417.031	6	465.375.200	5	414.345.400	83,33	89,03	37	2.630.762.431	97,37	87,24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
Program Pembinaan Keluarga Berencana																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal																	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terbayarnya honorarium PPKBD dan Sub PPKBD	30	bln	1.133.500.000	12	299.225.000	12	765.600.000	11	680.038.200	91,67	88,82	23	979.263.200	76,67	86,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)																	
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Terbayarnya honorarium Kader	15	balai	306.400.000	0	-	10	216.719.848	9	201.719.848	90,00	93,08	9	201.719.848	60,00	65,84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk PKB/PLKB	Tersedianya Layanan KB di Balai KB	14	balai	705.913.830	0	-	10	636.133.830	9	577.710.000	90,00	90,82	9	577.710.000	64,29	81,84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten																	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terdistribusikannya Alokon Disetiap Balai KB	25	kali	97.070.000	9	35.600.000	10	18.030.000	9	17.600.000	90,00	97,62	18	53.200.000	72,00	54,81	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	4	jenis	815.094.400	1	357.564.500	3	318.973.920	3	297.544.270	100,00	93,28	4	655.108.770	100,00	80,37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Berencana
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Terfasilitasinya Pelatihan Tenaga Pelayanan KB	3	kali	182.209.900	0	-	3	170.265.900	3	142.623.400	100,00	83,77	3	142.623.400	100,00	78,27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Terlaksananya Promosi dan Konseling KB pasca Persalinan dan Keguguran	12	bln	6.550.000	0	-	12	5.775.000	12	5.500.000	100,00	95,24	12	5.500.000	100,00	83,97	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																	
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terbinanya Kampung KB secara Terpadu	22	kali	1.507.040.000	7	324.942.000	12	532.391.900	10	438.123.400	83,33	82,29	17	763.065.400	77,27	50,63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase Peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Penyusunana Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	Dok	12.000.000	0	-	2	11.365.000	2	11.024.600	100,00	97,00	2	11.024.600	100,00	91,87	Dinas Perhubungan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan																
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium dan Vakasi Non PNS	157	Peg	3.600.000.000	0	-	157	3.098.026.000	157	2.753.479.000	100,00	88,88	157	2.753.479.000	100,00	76,49	Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang yang disediakan																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85	Jenis	16.000.000	36	5.963.300	36	3.489.000	36	3.364.888	100,00	96,44	72	9.328.188	84,71	58,30	Dinas Perhubungan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15	Jenis	160.000.000	5	-	5	98.909.408	5	87.558.000	100,00	88,52	10	87.558.000	66,67	54,72	Dinas Perhubungan
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	Unit	16.000.000			5	14.300.000	5	12.600.000	100,00	88,11	5	12.600.000	62,50	78,75	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	80	Jenis	115.000.000	45	23.197.950	15	53.373.800	13	52.835.360	86,67	98,99	58	76.033.310	72,50	66,12	Dinas Perhubungan
	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	36		65.800.000	12	28.900.000	12	29.160.000	10	26.396.202	83,33	90,52	22	55.296.202	61,11	84,04	Dinas Perhubungan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	65	Jenis	60.000.000	28	23.197.950	28	20.600.000	23	17.349.792	82,14	84,22	51	40.547.742	78,46	67,58	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	14	Jenis	35.000.000	5	12.000.000	5	12.000.000	4	11.700.000	80,00	97,50	9	23.700.000	64,29	67,71	Dinas Perhubungan
Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah	45	Kali	500.000.000	19	249.140.000	27	167.970.000	25	167.606.098	92,59	99,78	44	416.746.098	97,78	83,35	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik	20	Jenis	430.000.000	8	192.000.000	8	162.000.000	7	158.682.051	87,50	97,95	15	350.682.051	75,00	81,55	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor Terpelihara Peralatan Kerja	20	Jenis	45.000.000	8	5.000.000	8	20.925.000	8	20.520.500	100,00	98,07	16	25.520.500	80,00	56,71	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi Umum																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	32	Unit	151.000.000	12	62.150.000	12	49.995.000	11	36.744.700	91,67	73,50	23	98.894.700	71,88	65,49	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	Jumlah angkutan untuk jasa angkutan orang dan/atau barang																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	antar kota dalam 1 (satu) 3 unit daerah kabupaten/kota																
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) 3 unit daerah kabupaten/kota	3	Unit	620.000.000	0	8.996.000	3	588.522.000	3	541.210.997	100,00	91,96	3	550.206.997	100,00	88,74	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAAN PELAYARAN	TERJAGANYA DAN TERKENDALINYA KEAMANAN LALU LINTAS DARAT																
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasiaan Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota																
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	10	Kali	285.000.000	0	-	10	280.641.600	8	241.241.188	80,00	85,96	8	241.241.188	80,00	84,65	Dinas Perhubungan
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasiaan untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasional Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota																
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasional Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	9	Kapal	12.350.000.000	0	192.910.000	6	9.709.839.075	6	8.220.283.648	100,00	84,66	6	8.413.193.648	66,67	68,12	Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal																
Koordinasi dan Sinronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	20	Kali	60.000.000	0	-	10	34.500.000	10	33.372.000	100,00	96,73	10	33.372.000	50,00	55,62	Dinas Perhubungan
Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pengoperasiaan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																
Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	40	Orang	150.000.000	0	-	5	52.547.000	4	51.129.000	80,00	97,30	4	51.129.000	10,00	34,09	Dinas Perhubungan
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pengoperasiaan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	2	Lokasi	80.000.000	0	-	1	63.174.800	1	56.738.800	100,00	89,81	1	56.738.800	50,00	70,92	Dinas Perhubungan
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	5	Lokasi	52.000.000	0	-	5	39.775.000	0	-	- ,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau																
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Tambatan Perahu yang dibangun	10	Unit	4.210.000.000	2	585.628.000	5	2.505.980.386	5	2.358.054.290	100,00	94,10	7	2.943.682.290	70,00	69,92	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Tugas Pokokm dan Fungsi Perangkat Daerah																
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatanya Pelayanan Administrasi Umum																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	60	Jenis	75.000.000	12	34.597.400	12	13.065.500	12	12.563.500	100,00	96,16	24	47.160.900	40,00	62,88	Dinas Komunikasi dan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	bangunan kantor																Informatika
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	285	Jenis	355.645.000	57	74.280.500	35	76.327.600	35	75.797.600	100,00	99,31	92	150.078.100	32,28	42,20	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan	55	Buah	51.054.750	24	23.361.000	14	9.020.500	14	8.165.000	100,00	90,52	38	31.526.000	69,09	61,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	Media/ Surat kabar	80.000.000	6	32.800.000	2	15.000.000	2	12.000.000	100,00	80,00	8	44.800.000	66,67	56,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	45	Kali	900.000.000	25	504.852.000	15	168.284.000	15	154.754.556	100,00	91,96	40	659.606.556	88,89	73,29	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemngadaan Barang Milik Daerah																
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	20	Set	230.000.000	8	109.188.400	4	26.958.300	3	24.729.300	75,00	91,73	11	133.917.700	55,00	58,23	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya rekening listrik,internet	14	Rekening	1.041.600.000	6	694.400.000	4	217.000.000	4	201.081.129	100,00	92,66	10	895.481.129	71,43	85,97	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Alat Pelayanan Umum	100	Jenis	125.000.000	33	64.668.000	30	24.999.000	30	24.999.000	100,00	100,00	63	89.667.000	63,00	71,73	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah																
Peyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Operasional kantor Sebanyak 1 unit kendaraan roda 4 dan roda 2	5	Unit	250.000.000	3	150.288.000	1	46.320.000	1	43.785.895	100,00	94,53	4	194.073.895	80,00	77,63	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara	5	Unit	510.000.000	3	259.797.000	1	190.110.000	1	189.690.000	100,00	99,78	4	449.487.000	80,00	88,13	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Kepuasaan Masyarakat terhadap Media Informasi																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fungsi pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemeintah Daerah																
Pengelolaan Media komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Yang Dikelola	6	Media	660.000.000	3	440.444.900	1	93.019.574	1	88.773.300	100,00	95,44	4	529.218.200	66,67	80,18	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Yang Tersedia	3	Jenis	25.000.000	0	-	1	9.117.500	1	9.117.500	100,00	100,00	1	9.117.500	33,33	36,47	Dinas Komunikasi dan Informatika
Layanan Hubungan Media	Jumlah Kerjasama Kemitraan Dengan Media Komunikasi Publik Non Pemerintah	3	Media masa	15.000.000	0	-	1	7.591.000	1	7.568.500	100,00	99,70	1	7.568.500	33,33	50,46	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Juknis Layanan Informasi Publik Yang Ditetapkan	5	Dok	55.000.000	1	31.038.800	1	8.280.500	1	8.223.000	100,00	99,31	2	39.261.800	40,00	71,39	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Forum KIM	4	Kali	40.000.000	0	-	1	10.666.000	1	9.992.500	100,00	93,69	1	9.992.500	25,00	24,98	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPBE																
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain Yang Dikelola																
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra pemerintah Daerah	Tersedinya Sistem Jaringan Internet Satu Pintu	125	OPD	10.500.000.000	78	6.289.926.279	26	2.754.461.540	26	2.655.270.477	100,00	96,40	104	8.945.196.756	83,33	85,19	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tata Kelola E-Government																
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan BTS dan Akses Internet	120	Kali	3.704.733.600	78	2.161.094.600	30	771.819.500	30	683.467.900	100,00	88,55	108	2.844.562.500	90,00	76,78	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	unit	137.640.800	0	-	2	137.640.800	2	131.580.000	100,00	95,60	2	131.580.000	100,00	95,60	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya Pelayanan Umum Kantor	62	jenis	121.164.000	45	79.020.000	15	26.340.000	15	25.409.000	100,00	96,47	60	104.429.000	96,77	86,19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian																	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopmpetensi SDM Koperasi	Terlaksananya pelatihan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	5	kali	2.060.805.600	2	1.202.136.600	1	429.334.500	1	373.384.720	100,00	86,97	3	1.575.521.320	60,00	76,45	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya gaji pegawai kontrak dan honor pegawai ASN	46	orang	2.441.812.800	24	1.395.321.600	12	581.384.000	12	572.100.000	100,00	98,40	36	1.967.421.600	78,26	80,57	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik	48	jenis	42.190.720	27	25.963.520	9	8.113.600	9	6.882.250	100,00	84,82	36	32.845.770	75,00	77,85	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Bahan logistik kantor	Terlaksananya atk dan makan minum pegawai	90	jenis	428.300.160	60	231.995.920	30	89.229.200	30	77.181.800	100,00	86,50	90	309.177.720	100,00	72,19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya cetak dan penggandaan	60	jenis	167.475.168	36	93.041.760	13	33.229.200	12	32.016.300	92,31	96,35	48	125.058.060	80,00	74,67	Dinas Koperasi Usaha Kecil

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	63	kali	355.471.200	43	236.980.800	16	84.636.000	14	74.636.000	87,50	88,18	57	311.616.800	90,48	87,66	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik dan air	10	jenis	319.680.000	6	202.464.000	2	66.600.000	2	54.648.908	100,00	82,06	8	257.112.908	80,00	80,43	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan	10	jenis	52.100.000	8	52.100.000	3	52.100.000	3	46.640.000	93,33	89,52	11	98.740.000	108,00	189,52	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal										-				-			
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rata-rata pengurusan izin investasi																
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Pelayanan Periizinan dan non Perizinan													-			
Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Periizinan dan non Perizinan kemasyarakat secara elektronik	4	Kecamatan	77.000.000			2	66.925.000	2	66.610.400	100,00	99,53	2	66.610.400	50,00	86,51	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksaanaan tugas poko dan fungsi perangkat daerah																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	105	0rg	12.927.500.000	60	6.480.749.214	20	2.341.786.920	20	2.253.634.171	100,00	96,24	80	8.734.383.385	76,19	67,56	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium aparatur DPMPTSP (honor PNS dan Pegawai Kontrak)	231	orang	3.750.000.000	137	1.738.027.541	47	636.468.000	46	605.294.955	97,87	95,10	183	2.343.322.496	79,22	62,49	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatanya Pelayanan Administrasi Umum																
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	51	jenis	64.908.000	16	27.964.720	8	9.987.400	8	9.970.750	100,00	99,83	24	37.935.470	47,06	58,44	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	63	jenis	169.943.700	28	70.057.950	13	17.989.000	13	17.979.000	100,00	99,94	41	88.036.950	65,08	51,80	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya ATK dan makanan dan minumam	200	jenis	527.524.000	132	298.218.545	45	93.054.900	45	92.517.200	100,00	99,42	177	390.735.745	88,50	74,07	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		225	org		135		46		43		93,48		178		79,11		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	30	jenis	37.500.000	18	16.275.000	6	5.425.000	5	4.800.000	83,33	88,48	23	21.075.000	76,67	56,20	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40	kali	1.250.000.000	21	506.633.264	7	138.596.000	6	135.141.300	85,71	97,51	27	641.774.564	67,50	51,34	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda																
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik, Air dan Internet	15	rekening	885.118.700	9	652.018.710	3	101.550.000	3	79.860.473	100,00	78,64	12	731.879.183	80,00	82,69	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	175	jenis	225.000.000	86	135.621.100	31	38.543.500	31	38.518.500	100,00	99,94	117	174.139.600	66,86	77,40	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah										-							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	60	unit	350.000.000	33	156.847.053	10	57.200.000	10	50.415.118	100,00	88,14	43	207.262.171	71,67	59,22	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	62	jenis	75.000.000	14	29.430.900	20	14.200.000	20	13.439.818	100,00	94,65	34	42.870.718	54,84	57,16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan/Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainya	Terpeliharanya Gedung Kantor	4	paket	563.052.035	2	493.037.404	1	11.500.000	1	11.200.000	100,00	97,39	3	504.237.404	75,00	89,55	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasaranan pendunkung kantor atau bangunan lainnya	Perlengkapan Kantor yang dipelihara	75	thn	90.000.000	36	35.939.900	15	9.150.000	15	9.150.000	100,00	100,00	51	45.089.900	68,00	50,10	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet																Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetesi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet	36	organisasi	40.830.000			17	28.166.000	16	28.166.000	94,12	100,00	16	28.166.000	44,44	68,98	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Terbentuknya Kapasitas SDM Pemuda dan Organisasi Kepemudaan																
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									0								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terbentuknya Kapasitas SDM Pemuda dana Organisasi Kepemudaan	7	organisasi	58.260.000			7	44.320.000	7	44.320.000	100,00	100,00	7	44.320.000	100,00	76,07	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN																	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								150.000.000									
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terbinanya SDM, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5	dokumen	500.000.000	3	295.985.000	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00	100,00	4	445.985.000	80,00	89,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								407.630.148									
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terbentunya tim ahli cagar budaya tingkat kabupaten	3	jenis	500.000.000	0	-	3	407.630.148	3	407.630.148	100,00	100,00	3	407.630.148	100,00	81,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								101.266.000									
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terbinanya SDM, Lembaga, dan Pranata Tradisional	24	Orang	206.582.640		-	10	101.266.000	10	101.266.000	100,00	100,00	10	101.266.000	41,67	49,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								54.368.240									

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								54.368.240									
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sumber daya kesenian tradisional	58	SDM kesenian	97.862.832		-	40	54.368.240	40	54.368.240	100,00	100,00	40	54.368.240	68,97	55,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								177.090.000									
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								177.090.000									
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tersedianya sarana dan prasarana pembinaan sejarah	3	Jenis	460.434.000		-	1	177.090.000	1	177.090.000	100,00	100,00	1	177.090.000	33,33	38,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas p[okok dan fungsi perangkat daerah																
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Terkelolanya Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan	115	Orang	13.498.862.640	67	7.559.363.078	24	2.699.772.528	24	2.699.772.528	100,00	100,00	91	10.259.135.606	79,17	76,00	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	240	Orang	3.413.710.450	127	662.271.000	49	628.644.000	49	628.644.000	100,00	100,00	176	1.290.915.000	73,47	37,82	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tersediannya Administrasi Perkantoran																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Kebutuhan Komponen instalasi listrik Kantor	72	Item	81.531.000	36	34.267.500	12	7.378.550	12	7.378.550	100,00	100,00	48	41.646.050	66,67	51,08	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor	138	item	245.649.100	60	133.066.416	28	47.523.720	28	47.028.600	100,00	98,96	88	180.095.016	64	73,31	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
	Tersediannya makanan dan minuman rapat, harian pegawai dan tamu	69	kali		45		15		15		100,00		60		86,96		Dinas Kearsipam dan Perpustakaan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan Penggandaan	56	Item	89.639.000	27	49.785.000	9	16.055.700	9	16.055.700	100,00	100,00	36	65.840.700	64	73,45	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar derah	72	kali	1.128.850.000	12	521.086.800	36	200.418.000	36	167.448.650	100,00	83,55	48	688.535.450	67	60,99	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersediannya layanan administrasi umum																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa kmunikasi sumber daya air dan listrik	12	Rekening	64.800.000	6	30.240.000	2	10.800.000	2	9.478.395	100,00	87,76	8	39.718.395	67	61,29	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peraltan kebersihan dan bahan pembersih	65	item	25.000.000	30	9.200.000	12	6.896.500	12	6.491.300	100,00	94,12	42	15.691.300	65	62,77	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersediannya layanan administrasi umum																
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya pemeliharaan mobil jabatan	6	Unit	200.000.000	3	93.620.800	1	36.008.000	1	34.520.250	100,00	95,87	4	128.141.050	67	64,07	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	11	Unit	100.000.000	0	0	9	43.000.000	9	38.291.150	100,00	89,05	9	38.291.150	82	38,29	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	28	Unit	78.000.000	12	56.600.000	6	14.150.000	6	13.690.000	100,00	96,75	18	70.290.000	64	90,12	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	10	Unit	25.000.000	0	-	10	19.999.980	10	18.900.000	100,00	94,50	10	18.900.000	100	75,60	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun																
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase terkelolanya perpustakaan tingkat daerah																
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang melaksankan inovasi dan fasilitasi didalam pengembangan	10	Unit	110.000.000	0	0	5	54.355.000	5	45.735.000	100,00	84,14	5	45.735.000	50	41,58	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	perpustakaan daerah																
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku																
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten																
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terlaksananya pembinaan / penataan serta pengawasan tata kelola kearsipan pada OPD/Desa	15	SKPD	804.540.900	2	104.238.500	3	56.346.000	3	56.191.000	100,00	99,72	5	160.429.500	33	19,94	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
Urusan Pilihan																	
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah																
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	5	dokumen	995.500.000	3	137.702.000	1	213.550.000	1	210.546.000	100,00	98,59	4	348.248.000	80,00	34,98	Dinas Perikanan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	69	ASN	20.900.000.000	43	10.002.966.748	14	3.782.928.115	14	3.718.859.559	100,00	98,31	57	13.721.826.307	82,61	65,65	Dinas Perikanan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Tenaga Kontrak	60	Pengelola Kegiatan	12.100.000.000	36	4.129.953.994	12	1.506.616.000	12	1.384.603.826	100,00	91,90	48	5.514.557.820	80,00	45,57	Dinas Perikanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningatnya Pelayananan Operasional Perkantoran																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat Listrik	15	Jenis	45.750.000	9	17.500.000	3	10.477.500	3	10.213.500	100,00	97,48	12	27.713.500	80,00	60,58	Dinas Perikanan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	5	Jenis	13.750.000			5	5.100.000	5	5.100.000	100,00	100,00	5	5.100.000	100,00	37,09	Dinas Perikanan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Kebersihan,ATK dan Makan Minun Kantor	189	Jenis	1.593.601.000	119	491.878.467	25	150.230.750	25	149.462.850	100,00	99,49	144	641.341.317	76,19	40,24	Dinas Perikanan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya baran cetak dan pengadaan	40	Jenis	263.000.000	16	65.737.900	8	45.400.000	8	45.360.000	100,00	99,91	24	111.097.900	60,00	42,24	Dinas Perikanan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	60	buku	218.800.000	36	112.483.000	12	30.000.000	12	27.900.000	100,00	93,00	48	140.383.000	80,00	64,16	Dinas Perikanan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi yang dilaksankan atau dihadiri	192	kali	1.685.000.000	88	785.789.041	40	232.896.000	40	231.199.388	100,00	99,27	128	1.016.988.429	66,67	60,36	Dinas Perikanan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lancaranya Pelayanan urusan penunjang Pemerintah daerah																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik dan air	15	rekening	1.698.145.000	9	975.309.060	3	350.500.000	3	342.318.716	100,00	97,67	12	1.317.627.776	80,00	77,59	Dinas Perikanan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	75	unit	860.800.000	44	313.255.021	17	151.652.000	17	141.210.000	100,00	93,11	61	454.465.021	81,82	52,80	Dinas Perikanan
Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terpelihara	9	unit	955.000.000	5	500.020.000	2	200.008.000	2	199.516.954	100,00	99,75	7	699.536.954	77,78	73,25	Dinas Perikanan
Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	175		261.000.000	70	175.659.000	35	54.400.000	35	44.608.200	100,00	82,00	105	220.267.200	60,00	84,39	Dinas Perikanan
Pengolahan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap																
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota																	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kelompok Nelayan	65	Kelompok nelayan	14.501.682.000	34		13	12.753.458.093	13	12.176.377.600	100,00	95,48	47	12.176.377.600	72,00	83,97	Dinas Perikanan
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																	
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Sarana /Prasarana TPI yang dibangun	5	unit	1.283.053.000	3		1	370.032.128	1	330.875.334	100,00	89,42	4	330.875.334	80,00	25,79	Dinas Perikanan
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya																
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sarana Pendukung Untuk Pembenihan dan Budidaya	66	paket	832.000.000	32		10	324.565.980	9	315.780.300	90,00	97,29	41	315.780.300	62,12	37,95	Dinas Perikanan
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Operasional BBIP	24500	Benih	2.645.450.000	13000	1.410.299.591	5000	682.402.933	4500	653.945.877	90,00	95,83	17500	2.064.245.468	71,43	78,03	Dinas Perikanan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dlam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kelompok Pembudidaya Air Payau	103		6.442.000.000			10	113.767.000	10	107.897.000	100,00	94,84	10	107.897.000	9,71	1,67	Dinas Perikanan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Perikanan																
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																	
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelatihan Kelompok pengolahan	60	Kelompok	850.000.000			20	233.950.500	18	218.412.100	90,00	93,36	18	218.412.100	30,00	25,70	Dinas Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah rekening yang dibayarkan	15	Jenis	26.716.800	9	15.180.000	3	6.072.000	3	6.072.000	100,00	100,00	12	21.252.000	80,00	79,55	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang tersedia, Makan Minum Kantor, Peraltan kebersihan kantor	83	Jenis	295.235.300	40	155.387.000	14	77.693.500	14	77.693.500	100,00	100,00	54	233.080.500	65,06	78,95	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningatnya koordinasi kepariwisataan dan olah raga	64	kali	572.746.421	30	238.644.342	12	170.000.000	11	165.000.000	91,67	97,06	41	403.644.342	64,06	70,48	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	10	rekening	379.661.700	4	120.594.802	2	103.800.000	2	96.800.000	100,00	93,26	6	217.394.802	60,00	57,26	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah Paajak Kendaraan Dinas yabg dibayarkan	18	Unit	153.400.000	5	52.468.300	11	59.000.000	10	58.000.000	90,91	98,31	15	110.468.300	83,33	72,01	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
operasional atau lapangan																	
PROGRGAM PEMASARAN PARIWISATA																	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran yang difasilitasi	4	kali	443.154.000			4	443.154.000	4	443.154.000	100,00	100,00	4	443.154.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Kunjungan Wisata																
PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN//KOTA																	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan	10	hari	85.955.000			10	85.955.000	10	85.955.000	100,00	100,00	10	85.955.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terbayarnya honoraium Aparatur PNS dan Non PNS																
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH																	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	655	orang	1.224.720.000	406	816.480.000	156	291.600.000	156	291.600.000	100,00	100,00	562	1.108.080.000	85,71	90,48	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sebagai pedoman untuk Penyusunan kebijakan retribusi daerah																
ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH																	
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen/kebijakan yang disusun	5	dokumen	259.715.000			5	211.943.000	5	202.948.000	100,00	95,76	5	202.948.000	100,00	78,14	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	34190	lembar	21.307.100			34190	21.307.100	34190	21.307.100	100,00	100,00	34190	21.307.100	100,00	100,00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan																
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH																	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	56	Buku	52.000.000	36	31.000.000	12	11.000.000	12	11.000.000	100,00	100,00	48	42.000.000	85,71	80,77	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Alat Penerangan Kantor																
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	60	buah	25.502.400	30	19.430.400	10	6.072.000	9	5.872.000	90,00	96,71	39	25.302.400	65,00	99,22	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya ATK Mamin Kantor																
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH																	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	74	kali	404.006.200	45	233.080.500	14	77.693.500	13	77.693.500	92,86	100,00	58	310.774.000	78,11	76,92	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Koordinasi Kepariwisataan Pemuda dan Olahraga																
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH																	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat konsultasi yang dilakukan	69	kali	782.000.000	39	476.000.000	14	170.000.000	13	167.000.000	92,86	98,24	52	643.000.000	76,09	82,23	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Tepat Waktu																
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Meningkatnya layanan operasional perkantoran	51	unit	271.400.000	26	165.200.000	11	59.000.000	11	57.000.000	100,00	96,61	37	222.200.000	73,91	81,87	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Operasional atau Lapangan																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dengan baik																
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya layanan operasional perkantoran																
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	24	jenis	793.680.000	14	496.050.000	6	165.350.000	5	132.041.500	83,33	79,86	19	628.091.500	80,83	79,14	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kelancaran Kegiatan Perkantoran terlaksananya kegiatan administrasi keuangan																
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kelancaran administrasi perkantoran lancarnya adinistrasi perkantoran																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Meningkatnya kesejahteraan aparatur	312	Orang	31.125.514.350	156	21.652.531.722	65	6.766.416.163	65	6.766.416.163	100,00	100,00	221	28.418.947.885	70,83	91,30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya kesejahteraan aparatur	462	Orang	11.843.597.000	336	7.209.146.000	105	2.574.695.000	105	2.574.695.000	100,00	100,00	441	9.783.841.000	95,45	82,61	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lancarnya administrasi perkantoran	15	jenis	60.000.000	9	31.998.880	3	9.999.650	3	8.112.500	100,00	81,13	12	40.111.380	80,00	66,85	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya kelancaran rapat perkantoran	49	jenis	397.895.400	22	268.146.900	10	86.499.000	10	74.067.680	100,00	85,63	32	342.214.580	65,31	86,01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	26	jenis	80.000.000	12	26.482.500	10	33.600.000	9	29.342.700	90,00	87,33	21	55.825.200	80,77	69,78	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	meningkatnya impormasi/wawasan ASN	32	jenis	50.000.000	14	16.800.000	10	15.000.000	8	12.400.000	80,00	82,67	22	29.200.000	68,75	58,40	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya koordinasi dan singronisasi program dan kegiatan antar kab./propinsi dan pemerintah pusat	62	kali	1.282.915.200	36	668.185.000	14	267.274.000	13	248.401.800	92,86	92,94	49	916.586.800	79,03	71,45	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	lancarnya administrasi perkantoran																
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	lancarnya administrasi perkantoran	15	Jumlah rekening yang dibayarkan	288.000.000	9	150.000.000	3	60.000.000	3	58.835.721	100,00	98,06	12	208.835.721	80,00	72,51	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAEARAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	lancarnya administrasi perkantoran																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terkelolanya aset kendaraan dinas operasional	60	unit	300.577.800	36	209.097.600	12	65.343.000	10	52.538.000	83,33	80,40	46	261.635.600	76,67	87,04	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendunkung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	12	unit	39.000.000	6	19.000.000	2	9.953.500	2	9.000.000	100,00	90,42	8	28.000.000	66,67	71,79	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PENATAAN ORGANISASI	menjadi pedoman penyusunan program tahun berikutnya																
Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	menjadi pedoman penyusunan program tahun berikutnya	5	Dok	1.351.313.940	3	705.033.360	1	293.763.900	1	272.326.000	100,00	92,70	4	977.359.360	80,00	72,33	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																	
PENGAWASAN PENGGUNA SARANA PERTANIAN	tersedianya sarana pertanian																
Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian	tersedianya sarana pertanian	28	lokasi	4.167.403.800	13	2.381.373.600	7	992.239.000	6	885.408.900	85,71	89,23	19	3.266.782.500	67,86	78,39	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAINNYA	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	tersedianya bibit benih sapi,kerbau,itik dan ayam	365	ekor	3.981.443.000	215	1.981.443.000	70	1.214.305.150	70	999.022.200	100,00	82,27	285	2.980.465.200	78,08	74,86	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prasarana yang dibangun																
PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	panjang irigasi yang terbangun																
Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	terbangunnya jaringan irigasi	602	Meter	4.700.000.000	320	1.259.895.000	100	2.699.660.516	97	2.676.872.129	97,00	99,16	417	3.936.767.129	69,27	83,76	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	terpeliharanya gedung kantor BPP	3	Unit	350.000.000	0	0	3	300.000.000	3	288.000.000	100,00	96,00	3	288.000.000	100,00	82,29	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainya	terbangunya jalan usaha tani	1500	Meter	2.349.785.000	450	1.349.785.000	300	753.191.667	300	743.191.667	100,00	98,67	750	2.092.976.667	50,00	89,07	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri																	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																	
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	terlaksananya Subsidi PLTBM	100	persen	1.267.962.000	100	1.267.962.000	100	1.267.962.000	97	1.266.856.570	97,00	99,91	197	2.534.818.570	197,00	199,91	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
SEKRETARIAT DAERAH																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Aparatur SETDA yang dibayar honorariumnya	966	PNS/ Non PNS	30.726.033.600	507	16.192.648.228	285	5.202.924.168	284	4.546.579.539	99,65	87,39	791	20.739.227.767	81,88	67,50	Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia	430	Jenis	1.672.502.880	30	674.404.630	15	178.135.000	15	155.103.300	100,00	87,07	45	829.507.930	10,47	49,60	Sekretariat Daerah
	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, peserta rapat dan tamu yang tersedia	132	kali	4.507.265.000	36	1.481.331.543	24	455.250.000	24	446.160.700	100,00	98,00	60	1.927.492.243	45,45	42,76	Sekretariat Daerah
	jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia	156	Jenis	637.520.500	60	439.211.950	30	93.033.200	30	83.400.000	100,00	89,65	90	522.611.950	57,69	81,98	Sekretariat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	62	Jenis	1.179.339.000	36	656.383.760	18	130.460.000	16	117.428.520	88,89	90,01	52	773.812.280	83,87	65,61	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu Sekretariat Daerah	82	kali	2.829.320.000	37	1.456.226.093	12	211.053.600	11	205.569.456	91,67	97,40	48	1.661.795.549	58,54	58,73	Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Kabag, Kasubag dan Staf	550	Kali	6.721.200.000	223	5.089.958.674	134	808.214.000	114	807.353.392	85,07	99,89	337	5.897.312.066	61,27	87,74	Sekretariat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	92	Jenis	1.215.070.000	69	774.127.985	12	132.534.101	12	122.347.500	100,00	92,31	81	896.475.485	88,04	73,78	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon seluler, listrik, air, indovision dan internet yang terbayar	52	Rekening	3.340.425.457	28	1.827.190.541	18	785.760.000	17	755.294.315	94,44	96,12	45	2.582.484.856	86,54	77,31	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala	65	Unit	2.854.026.500	34	1.154.991.898	10	298.331.200	10	293.219.679	100,00	98,29	44	1.448.211.577	67,69	50,74	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan bermotor apung terpelihara secara rutin/berkala	30	Unit	13.030.490.000	15	7.139.930.157	5	3.100.100.000	9	3.036.082.875	180,00	97,93	24	10.176.013.032	80,00	78,09	Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2,3 dana 4 yang terpelihara secara rutin/berkala	198	Unit	5.607.720.000	86	2.887.428.195	35	1.233.050.000	32	1.035.674.247	91,43	83,99	118	3.923.102.442	59,60	69,96	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	36	Unit	3.420.685.500	20	1.177.403.060	10	1.084.147.250	10	1.081.938.432	100,00	99,80	30	2.259.341.492	83,33	66,05	Sekretariat Daerah
	Jumlah rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan SEKDA secara rutin/berkala yang dipelihara	26	Jenis	3.230.080.000	10	1.315.502.468	4	750.500.000	4	634.500.000	100,00	84,54	14	1.950.002.468	53,85	60,37	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor, Jabatan/Dinas yang terpelihara	276	Jenis	1.747.210.000	108	614.510.000	8	236.190.000	8	232.502.600	100,00	98,44	116	847.012.600	42,03	48,48	Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH	10	Orang	2.802.736.053	6	1.368.954.606	2	464.019.481	2	456.318.202	100,00	98,34	8	1.825.272.808	80,00	65,12	Sekretariat Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH/WKDH tersedia	104	Stel	575.470.000	59	336.682.729	9	70.676.000	8	70.450.000	88,89	99,68	67	407.132.729	64,42	70,75	Sekretariat Daerah
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	terlaksananya penyediaan dana penunjang operasional KDH/WKDH	10	Kepala daerah	8.160.957.400	6	5.854.408.657	2	1.401.358.000	2	1.355.051.196	100,00	96,70	8	7.209.459.853	80,00	88,34	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah																	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah tersedia kebutuhan rumhatangga KDH tersedia	84	Jenis	2.516.697.500	46	1.534.965.300	12	400.782.000	12	365.274.800	100,00	91,14	58	1.900.240.100	69,05	75,51	Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah tersedia kebutuhan rumahtangga WKDH tersedia	248	Jenis	3.456.027.500	150	1.418.711.000	12	319.655.900	12	319.615.850	100,00	99,99	162	1.738.326.850	65,32	50,30	Sekretariat Daerah
Penataan Organisasi																	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perbup tentang Anjab, ABK dan Evjab	54	Dokument	2.200.000.000	36	852.727.254	6	329.416.184	5	312.542.063	83,33	94,88	41	1.165.269.317	75,93	52,97	Sekretariat Daerah
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen penetapan perjanjian kinerja	180	Dokument	336.000.000	108	209.843.420	36	60.968.848	28	59.580.960	77,78	97,72	136	269.424.380	75,56	80,19	Sekretariat Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indeks kepuasan masyarakat	5	Dokument	200.000.000	3	104.968.464	1	76.026.348	1	70.289.660	100,00	92,45	4	175.258.124	80,00	87,63	Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan																	
Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya kegiatan keprotokoleran daerah	410	Kali	726.374.400	246	471.479.896	82	160.085.000	80	156.910.000	97,56	98,02	326	628.389.896	79,51	86,51	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya komunikasi pimpinan	120	Kali	562.622.000	62	306.815.235	24	150.166.100	22	145.456.898	91,67	96,86	84	452.272.133	70,00	80,39	Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Liputan kegiatan pimpinan daerah	145	Kali	2.843.500.000	74	1.542.842.000	48	555.652.500	42	484.956.000	87,50	87,28	116	2.027.798.000	80,00	71,31	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																	
Administrasi Tata Pemerintahan																	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya peningkatan administrasi pemerintahan	22	Dokument	852.025.200	12	524.323.200	4	163.851.000	3	161.200.500	75,00	98,38	15	685.523.700	68,18	80,46	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi dalam proses penataan desa	215	Kali	1.316.385.725	129	789.831.435	43	263.277.145	39	245.277.059	90,70	93,16	168	1.035.108.494	78,14	78,63	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Melaksanakan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	32	Dokument	1.650.000.000	16	462.809.310	4	161.127.500	3	131.127.500	75,00	81,38	19	593.936.810	59,38	36,00	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan/agenda keagamaan yang terfasilitasi	64	Kali	7.636.390.080	36	3.337.533.400	12	1.735.543.200	10	1.732.491.200	83,33	99,82	46	5.070.024.600	71,88	66,39	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah terselenggaranya pembinaan dan seleksi UKS di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai	44	Kecamatan	1.047.822.300	25	798.340.800	8	249.481.500	7	228.663.400	87,50	91,66	32	1.027.004.200	72,73	98,01	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah mahasiswa penerimaan pembiayaan pendidikan Tugas Belajar Non PNS	1390	Orang	24.940.148.000	785	16.410.763.785	426	5.878.962.500	423	5.467.981.900	99,30	93,01	1208	21.878.745.685	86,91	87,73	Sekretariat Daerah
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum																	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah berupa Perda, Perbup dan keputusan yang difasilitasi	1200	Produk Hukum	1.112.000.000	620	693.180.050	240	252.472.500	231	251.148.300	96,25	99,48	851	944.328.350	70,92	84,92	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus terselesaikan	63	Kasus	4.000.000.000	45	1.674.245.850	15	513.098.900	14	494.911.300	93,33	96,46	59	2.169.157.150	93,65	54,23	Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk hukum daerah yang dapat diakses oleh masyarakat	180	Produk Hukum	550.000.000	214	382.968.800	400	176.762.500	380	159.236.250	95,00	90,08	594	542.205.050	330,00	98,58	Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Kerjasama Daerah																	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kerjasama dengan BPN dalam Sertifikasi tanah Pemerintah Daerah	115	Setifikasi	1.250.000.000	75	700.572.400	25	343.842.500	24	313.825.500	96,00	91,27	99	1.014.397.900	86,09	81,15	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	26	Kali	1.004.533.066	15	627.833.166	5	209.277.722	4	197.448.600	80,00	94,35	19	825.281.766	73,08	82,16	Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tersusunnya kebijakan, pengendalian dan distribusi perekonomian	6	Dokument	450.000.000	3	148.141.500	1	59.478.400	1	54.813.000	100,00	92,16	4	202.954.500	66,67	45,10	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan																	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan	6	Dokument	668.600.000	3	390.328.750	1	80.807.600	1	74.846.100	100,00	92,62	4	465.174.850	66,67	69,57	Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan	5	Dokument	2.195.163.000	3	1.317.097.800	1	439.032.600	1	431.889.900	100,00	98,37	4	1.748.987.700	80,00	79,67	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembanguan	5	kali	650.000.000	3	341.470.900	1	141.304.296	1	128.920.000	100,00	91,24	4	470.390.900	80,00	72,37	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan barang - barang jasa pemerintah yang dikelola	2322	Paket	4.396.807.266	1375	2.579.835.447	400	816.441.360	351	676.896.331	87,75	82,91	1726	3.256.731.778	74,33	74,07	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang masuk dalam layanan LPSE	2322	Paket	4.919.165.211	1375	2.894.931.206	400	745.331.065	322	657.119.000	80,50	88,16	1697	3.552.050.206	73,08	72,21	Sekretariat Daerah
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	120	Orang	1.150.000.000	43	395.198.838	27	216.654.600	23	185.346.600	85,19	85,55	66	580.545.438	55,00	50,48	Sekretariat Daerah
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tersedianya data energi, sumber daya alam dan air	1	Perbup/SK Bupati	68.000.000			1	64.423.000	1	62.601.500	100,00	97,17	1	62.601.500	100,00	92,06	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah																
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi perangkat daerah																
Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	meningkartnya pelayanan administrasi perkantoran	430	Org	1.601.968.000	258	1.501.444.000	86	1.553.646.000	76	1.282.636.921	88,37	82,56	334	2.784.080.921	77,67	173,79	Sekretariat DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi perangkat daerah																
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	30	Jenis	90.344.640	18	56.465.400	6	18.821.800	4	15.474.585	66,67	82,22	22	71.939.985	73,33	79,63	Sekretariat DPRD
Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	30	Jenis	288.203.846	18	180.127.404	6	60.042.468	3	54.257.900	50,00	90,37	21	234.385.304	70,00	81,33	Sekretariat DPRD
Penyedia Bahan logistik Kantor	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	30	Jenis	2.429.243.520	18	1.518.277.200	6	506.092.400	4	440.925.350	66,67	87,12	22	1.959.202.550	73,33	80,65	Sekretariat DPRD
Penyedia Barang Catakkan dan Penggadaan	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	30	Jenis	734.496.000	18	459.060.000	6	153.020.000	5	139.400.500	83,33	91,10	23	598.460.500	76,67	81,48	Sekretariat DPRD
Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	30	Jenis	600.000.000	18	375.000.000	6	125.000.000	1	123.300.000	16,67	98,64	19	498.300.000	63,33	83,05	Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	30	Tahun	2.332.262.400	18	1.457.664.000	6	485.888.000	6	442.016.151	100,00	90,97	24	1.899.680.151	80,00	81,45	Sekretariat DPRD
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	meningkatnya sarana pendukung pelaksanaan tugas																
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	5	Unit	3.557.803.200	3	2.223.627.000	1	741.209.000	1	625.394.000	100,00	84,37	4	2.849.021.000	80,00	80,08	Sekretariat DPRD
Penyedia jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	terpeliharanya barang milik daerah																
Penyedia Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	15	Rek	1.396.800.000	9	873.000.000	3	291.000.000	2	227.134.583	66,67	78,05	11	1.100.134.583	73,33	78,76	Sekretariat DPRD
Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	terpeliharanya barang milik daerah																
Penyedia Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	110	Unit	2.005.872.000	66	1.253.670.000	22	417.890.000	17	393.846.103	77,27	94,25	83	1.647.516.103	75,45	82,13	Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan																	
Pemeliharaan / Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	5	Unit	149.280.000	3	93.300.000	1	31.100.000	1	19.534.000	100,00	62,81	4	112.834.000	80,00	75,59	Sekretariat DPRD
Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya layanan administrasi DPRD																
Penyelengaraan Administrasi Keuangan DPRD	meningkatnyalayanan administrasi da kesejateraan DPRD	100	Org	43.989.706.560	60	27.493.566.600	20	9.164.522.200	16	8.891.669.537	80,00	97,02	76	36.385.236.137	76,00	82,71	Sekretariat DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Meningkatnya disiplin pimpinan dan anggota DPRD	720	Org	730.041.600	432	456.276.000	144	152.092.000	140	140.116.000	97,22	92,13	572	596.392.000	79,44	81,69	Sekretariat DPRD
Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya layanan administrasi DPRD																
Fasilitasi fraksi DPRD	meningkatnya pengelolaan administrasi DPRD	5	Kali	68.400.000	3	42.750.000	1	14.250.000	1	13.775.000	100,00	96,67	4	56.525.000	80,00	82,64	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat fraksi baleg dan paripurna																
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembentukanperda dan peraturan DPRD																
Penyusunan dam Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	adanya dokumen ranperda yang di bahas oleh DPRD	5	Perda	2.241.720.000	3	1.401.075.000	1	467.025.000	1	395.250.500	100,00	84,63	4	1.796.325.500	80,00	80,13	Sekretariat DPRD
Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	adanya dokumen ranperda yang di bahas oleh DPRD	5	Perda	3.952.516.800	3	2.470.323.000	1	823.441.000	1	662.054.300	100,00	80,40	4	3.132.377.300	80,00	79,25	Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	adanya hasil kajian ranperda yang di bahas oleh DPRD	5	Dok	922.372.800	3	576.483.000	1	192.161.000	1	167.891.000	100,00	87,37	4	744.374.000	80,00	80,70	Sekretariat DPRD
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Naskah Akademik	tersusunannya dokumen dan draf Ranperda	5	Dok	247.800.000	3	154.875.000	1	51.625.000	1	49.000.000	100,00	94,92	4	203.875.000	80,00	82,27	Sekretariat DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran																
Pembahasan KUA dan PPAS	adanya dokumen KUA dan PPAS yang di sepakati	5	Dok	232.344.000	3	145.215.000	1	48.405.000	1	40.238.700	100,00	83,13	4	185.453.700	80,00	79,82	Sekretariat DPRD
Pembahasan APBD	adanya dokumen pembahasanAPBD yang di sepakati	5	Dok	2.383.497.600	3	1.489.686.000	1	496.562.000	1	416.073.855	100,00	83,79	4	1.905.759.855	80,00	79,96	Sekretariat DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	adanya dokumen pembahasan pertanggungjawaban APBD	5	Dok	94.627.200	3	59.142.000	1	19.714.000	1	17.713.500	100,00	89,85	4	76.855.500	80,00	81,22	Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	meningkatnya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan																
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	meningkatnya pengawasan urusan bidang pemerinthan dan hukum	75	Kali	2.742.192.000	45	1.713.870.000	15	571.290.000	12	522.024.180	80,00	91,38	57	2.235.894.180	76,00	81,54	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	meningkatnya pengawasan urusan bidang kesejahteraan Rakyat	30	Kali	2.551.946.400	18	1.594.966.500	6	531.655.500	5	421.253.451	83,33	79,23	23	2.016.219.951	76,67	79,01	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	meningkatnya pengawasan urusan bidang Perekonomian	30	Kali	3.213.331.200	18	2.008.332.000	6	669.444.000	5	564.607.816	83,33	84,34	23	2.572.939.816	76,67	80,07	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumbner daya Alam	meningkatnya pengawasan urusan bidang sumber daya alam	30	Kali	2.787.516.000	18	1.742.197.500	6	580.732.500	6	572.372.800	100,00	98,56	24	2.314.570.300	80,00	83,03	Sekretariat DPRD
Pengawasan Penggunaan Anggaran	meningkatnya pengawasan urusan bidang anggaran	15	Kali	79.809.600	9	49.881.000	3	16.627.000	3	15.136.000	100,00	91,03	12	65.017.000	80,00	81,47	Sekretariat DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD	meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur																
Bimbingan Teknis DPRD	Meningkatnya Kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD	30	Kali	6.685.612.800	18	4.178.508.000	6	1.392.836.000	6	1.351.555.160	100,00	97,04	24	5.530.063.160	80,00	82,72	Sekretariat DPRD
Publikasi dan dan Dokumentasi Dewan	Tersampainya informasi dari DPRD ke Masyarakat	30	Jenis	386.880.000	18	241.800.000	6	80.600.000	5	71.500.000	83,33	88,71	23	313.300.000	76,67	80,98	Sekretariat DPRD
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	adanya kelompok pakar dan Tim Ahli	15	Org	288.000.000	9	180.000.000	3	60.000.000	2	51.000.000	80,00	85,00	11	231.000.000	76,00	80,21	Sekretariat DPRD
Penyediaan Tenaga Ahli fraksi	Adanya tenaga ahli fraksi	20	Org	1.152.000.000	12	720.000.000	4	240.000.000	4	195.000.000	100,00	81,25	16	915.000.000	80,00	79,43	Sekretariat DPRD
Penyusunan Program Kerja DPRD	Adanya jadwal kegiatan yang disepakati	5	Dok	44.640.000	3	27.900.000	1	9.300.000	1	8.076.000	100,00	86,84	4	35.976.000	80,00	80,59	Sekretariat DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyrakat	Terserapnya aspirasi Masyarakat																
Kunjungan Kerja dalam daerah	Terhimpunnya aspirasi Masyarakat melalui monev	30	Kali	11.855.904.000	18	7.409.940.000	6	2.469.980.000	6	2.367.246.000	100,00	95,84	24	9.777.186.000	80,00	82,47	Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Reses	Terhimpunnya aspirasi Masyarakat melalui Reses	15	Kali	10.754.524.800	9	6.721.578.000	3	2.240.526.000	3	2.038.525.000	100,00	90,98	12	8.760.103.000	80,00	81,46	Sekretariat DPRD
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan kode Etik																
Penyusunan kode Etik DPRD	Acuan standar dalam pelaksanaan dan	15	Org	10.754.524.80	9	6.721.578.000	3	2.240.526.000	3	2.036.517.500	100,00	90,89	12	8.758.095.500	80,00	81,44	Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pengawasan DPRD			0													
Pengasawan Kode Etik DPRD	Meningkatnya pengawasan anggota DPRD	20	Org	10.754.524.805	12	6.721.578.003	4	2.240.526.001	4	1.969.700.000	100,00	87,91	16	8.691.278.003	80,00	80,82	Sekretariat DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD																
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi alat kelengkapan DPRD	20	Kali	10.754.524.805	12	6.721.578.003	4	2.240.526.001	3	2.206.774.700	75,00	98,49	15	8.928.352.703	75,00	83,02	Sekretariat DPRD
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya laporan kinerja DPRD	25	Dok	10.754.524.810	15	6.721.578.006	5	2.240.526.002	4	2.029.607.500	80,00	90,59	19	8.751.185.506	76,00	81,37	Sekretariat DPRD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	40	Stel	36.960.000	24	23.100.000	8	7.700.000	6	6.400.000	75,00	83,12	30	29.500.000	75,00	79,82	Inspektorat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	50	Orang	362.059.200	30	226.287.000	10	75.429.000	10	48.414.500	100,00	64,19	40	274.701.500	80,00	75,87	Inspektorat
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibutuhkan	30	Jenis	33.600.000	18	21.000.000	6	7.000.000	5	6.863.200	83,33	98,05	23	27.863.200	76,67	82,93	Inspektorat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang dibutuhkan	75	Kali	1.025.000.000	45	615.000.000	15	125.758.180	15	124.649.410	100,00	99,1	60	739.649.410	80,00	72,16	Inspektorat
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan	200	Jenis		120		40		40		100,00		160		80,00		
	Jumlah pertemuan/rapat yang dilaksanakan	60	Jenis		36		12		12		100,00		48		80,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	30	Jenis	96.096.000	18	60.060.000	6	20.020.000	5	17.073.400	83,33	85,28	23	77.133.400	76,67	80,27	Inspektorat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15	Jenis	49.036.800	9	30.648.000	3	10.216.000	3	10.016.000	100,00	98,04	12	40.664.000	80,00	82,93	Inspektorat

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	yang dibutuhkan																
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan/dihadiri	60	Kali	835.144.320	36	521.965.200	12	173.988.400	9	155.553.859	75,00	89,40	45	677.519.059	75,00	81,13	Inspektorat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang dibutuhkan	15	Jenis	394.582.646	9	246.614.154	3	82.204.718	3	76.264.500	100,00	92,77	12	322.878.654	80,00	81,83	Inspektorat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan	15	Jenis	176.515.200	9	110.322.000	3	36.774.000	3	36.135.000	100,00	98,26	12	146.457.000	80,00	82,97	Inspektorat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	15	Rek	460.608.000	9	287.880.000	3	95.960.000	3	89.720.150	100,00	93,50	12	377.600.150	80,00	81,98	Inspektorat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan layak jalan	50	Unit	366.638.400	30	229.149.000	10	76.383.000	10	72.805.250	100,00	95,32	40	301.954.250	80,00	82,36	Inspektorat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	15	Jenis	94.128.000	9	58.830.000	3	19.610.000	3	18.030.000	100,00	91,94	12	76.860.000	80,00	81,65	Inspektorat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5	Unit	242.874.624	3	151.796.640	1	50.598.880	1	50.492.050	100,00	99,79	4	202.288.690	80,00	83,29	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal																	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	80	Lap	3.000.000.000	48	1.800.000.000	16	443.621.000	16	302.040.000	100,00	68,09	64	2.102.040.000	80,00	70,07	Inspektorat
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah lapran hasil pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50	Lap	3.000.000.000	30	1.800.000.000	10	361.767.000	10	320.910.000	100,00	88,71	40	2.120.910.000	80,00	70,70	Inspektorat
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Jenis reviu kinerja	60	Jenis	2.500.000.000	36	1.500.000.000	12	391.486.000	12	391.191.000	100,00	99,92	48	1.891.191.000	80,00	75,65	Inspektorat
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu	185	Lap	750.000.000	108	450.000.000	37	45.879.900	37	38.610.000	100,00	84,15	145	488.610.000	78,38	65,15	Inspektorat
Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	215	Lap	7.312.611.000	129	2.026.075.000	43	1.048.781.000	43	1.012.351.000	100,00	96,53	172	3.038.426.000	80,00	41,55	Inspektorat

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan kerjasama pengawasan internal	15	Level	1.293.043.500	2	538.409.800	3	159.550.000	3	99.471.300	100,00	62,34	5	637.881.100	33,33	49,33	Inspektorat
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan TLHP	10	Lap	1.603.802.880	6	1.002.376.800	2	334.125.600	2	315.827.800	75,00	94,52	8	1.318.204.600	75,00	82,19	Inspektorat
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	60	Lap	2.853.561.600	36	1.783.476.000	12	594.492.000	12	509.511.700	100,00	85,71	48	2.292.987.700	80,00	80,36	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan																	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dirumuskan	25	Dok	16.968.000	15	10.605.000	5	3.535.000	5	2.778.000	100,00	78,59	20	13.383.000	80,00	78,87	Inspektorat
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan pelaksanaan Bidang Fasilitasi Pengawasan	10	Lap	2.426.509.440	6	1.516.568.400	2	505.522.800	2	459.724.500	100,00	90,94	8	1.976.292.900	80,00	81,45	Inspektorat
Pendampingan dan Asistensi																	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan dan pendampingan dan asistensi yang dilakukan	20	Lap	765.141.494	12	478.213.434	4	159.404.478	4	116.589.178	100,00	73,14	16	594.802.612	80,00	77,74	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Jumlah laporan pelaksanaan ZI '- Jumlah laporan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	5	Lap	347.601.600	3	217.251.000	1	72.417.000	1	65.484.400	100,00	90,43	4	282.735.400	80,00	81,34	Inspektorat
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Jumlah laporan klinik konsultasi 2. Jumlah laporan LHKASN 3. Jumlah laporan pelaksanaan LHKPN 4. Jumlah laporan renaksi KPK 5. Jumlah laporan UPG	25	Lap	929.443.200	15	580.902.000	5	193.634.000	5	171.079.966	100,00	88,35	20	751.981.966	80,00	80,91	Inspektorat

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah																
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Lancarnya Operasional Kantor																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Listrik yang dibutuhkan	70	Jenis	114.009.600	42	71.256.000	14	23.752.000	14	23.752.000	100,00	100,00	56	95.008.000	80,00	83,33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat kebersihan yang dibutuhkan	90	Jenis	1.485.303.360	54	928.314.600	18	309.438.200	15	225.398.490	83,33	72,84	69	1.153.713.090	76,67	77,68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyedian Barang Cetak dan Penggandan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan	30	Jenis	582.367.200	18	363.979.500	6	121.326.500	6	113.375.700	100,00	93,45	24	477.355.200	80,00	81,97	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan/surat kabar yang dibutuhkan	30	Jenis	168.000.000	18	105.000.000	6	35.000.000	5	25.000.000	83,33	71,43	23	130.000.000	76,67	77,38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilakukan/dihadiri	120	Kali	1.904.208.000	72	1.190.130.000	24	396.710.000	21	365.569.977	87,50	92,15	93	1.555.699.977	77,50	81,70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Lancarnya Operasional Kantor																
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Tersedianya Mesin Boat	5	Unit	946.279.930	3	591.424.956	1	197.141.652	1	177.873.000	100,00	90,23	4	769.297.956	80,00	81,30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Lancarnya Operasional Kantor																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Bahan Bakar untuk operasional Perkantoran	60	Bulan	526.560.000	36	329.100.000	12	109.700.000	10	89.768.497	83,33	81,83	46	418.868.497	76,67	79,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	60	Bulan	522.744.000	36	326.715.000	12	108.905.000	7	99.912.300	58,33	91,74	43	426.627.300	71,67	81,61	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Kantor	5	Bulan	900.456.000	3	562.785.000	1	187.595.000	1	162.383.000	100,00	86,56	4	725.168.000	80,00	80,53	Badan Perencanaan Pembangunan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Daerah
Pemeliharaan/rehabilirasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	5	Bulan	396.491.232	3	247.807.020	1	82.602.340	1	74.760.000	100,00	90,51	4	322.567.020	80,00	81,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lancarnya Operasional Kantor																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang di Bayarkan	15	Rek	2.045.280.000	9	1.278.300.000	3	426.100.000	3	381.870.516	100,00	89,62	12	1.660.170.516	80,00	81,17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RENSTA OPD																
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pesentase Keselarasan RKPD dengan Renja OPD	5	dok	1.228.800.000	3	768.000.000	1	256.000.000									
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	50	Kali	4.240.000.000	4	413.449.218	10	361.604.000	8	289.991.100	80,00	80,20	12	703.440.318	24,00	16,59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RKPD Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2021	10	Dok	531.000.000	1	164.872.500	2	187.223.000	2	178.000.800	100,00	95,07	3	342.873.300	30,00	64,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daearh BIdang Perencanaan Pembangunan Daerah	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah																
Pembinaan dan pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terkelolanya Aplikasi Perencanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Derah	30	Aplikasi	531.000.000	1	164.872.500	6	205.775.000	5	179.517.800	83,33	87,24	6	344.390.300	20,00	64,86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah																
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring Pembangunan Daerah	180	OPD	1.000.000.000	25	280.955.500	36	376.013.200	36	357.114.700	100,00	94,97	61	638.070.200	33,89	63,81	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program Prioritas OPD Dengan Program OPD Pendukung																
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dapat dijadikan sebagai Pedoman Penyusunan Perencanaan																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan Bidang Pemerintahan																
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2022 dan Perubahan 2021	10	Dokumen	288.000.000		115.200.000	1	61.994.000	1	55.748.589	100,00	89,93	1	170.948.589	10,00	59,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2022 dan Perubahan 2021	50	Kali	192.000.000		76.000.000	12	90.335.500	12	88.317.994	100,00	97,77	12	164.317.994	24,00	85,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonoman dan SDA	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah																
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	40	Kali	320.000.000		79.876.626	4	109.411.000	3	88.507.600	75,00	80,89	3	168.384.226	7,50	52,62	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tersusunnya Dokumen Kerja Pemerintahan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	10	Dok	160.000.000	1	39.938.313	1	107.408.000	1	84.278.400	100,00	78,47	2	124.216.713	20,00	77,64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Inspratuktur dan Wilayahan	Menjadi Pedoman dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfratuktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Kebinaragaan dan Perhubungan	20	Kali	150.000.000	2	47.071.316	2	74.173.000	2	61.306.400	100,00	82,65	4	108.377.716	20,00	72,25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Cipta Karya dan Kewilayahan	40	Kali	300.000.000		94.142.633	4	74.336.000	4	71.499.419	100,00	96,18	4	165.642.052	10,00	55,21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kebijakan Inovasi yang di terapkan di Daerah																
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Menjadi Pedonan dalam Pengembangan Pertanian Pangandan Kehutanan																
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kajian Tentang Sagu,Pisang	1	Dok	450.000.000			1	449.364.100	1	430.481.554	100,00	95,80	1	430.481.554	100,00	95,66	Badan Perencanaan Pembangunan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Tersedianya Perencanaan Pengelolaan TAHURA	5	Dok	700.000.000			5	685.674.000	5	669.377.555	100,00	97,62	5	669.377.555	100,00	95,63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
KEUANGAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja																
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	2.715.396.700	1	133.478.500	1	301.937.000	1	299.517.000	100,00	99,20	2	432.995.500	40,00	15,95	Badan Keuangan Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	255	Orang	76.817.737.550	153	48.011.085.969	51	16.003.695.323	51	13.892.987.213	100,00	86,81	204	61.904.073.182	80,00	80,59	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Aparatur BKD	385	Pegawai	10.245.244.800	231	6.403.278.000	77	2.134.426.000	77	1.578.890.000	100,00	73,97	308	7.982.168.000	80,00	77,91	Badan Keuangan Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	65	Jenis	175.414.800	39	109.634.250	13	36.544.750	12	36.544.750	92,31	100,00	51	146.179.000	78,46	83,33	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	40	Jenis	1.700.432.160	24	1.062.770.100	8	354.256.700	7	353.032.760	82,61	99,65	31	1.415.802.860	76,52	83,26	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	50	Jenis	488.839.200	30	305.524.500	10	101.841.500	8	91.364.400	82,47	89,71	38	396.888.900	76,49	81,19	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10	Jenis	172.800.000	6	108.000.000	2	36.000.000	2	28.050.000	100,00	77,92	8	136.050.000	80,00	78,73	Badan Keuangan Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi	40	Kali	2.830.675.200	24	1.769.172.000	8	589.724.000	7	588.202.118	81,70	99,74	31	2.357.374.118	76,34	83,28	Badan Keuangan Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran																
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	15	Jenis	2.806.226.861	9	1.753.891.788	3	584.630.596	2	483.276.500	66,67	82,66	11	2.237.168.288	73,33	79,72	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15	Rekening	3.124.569.600	9	1.952.856.000	3	650.952.000	3	578.665.421	100,00	88,90	12	2.531.521.421	80,00	81,02	Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	15	Unit	1.202.112.000	9	751.320.000	3	250.440.000	3	230.583.900	100,00	92,07	12	981.903.900	80,00	81,68	Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	5	Tahun	845.634.816	3	528.521.760	1	176.173.920	1	159.844.355	69,95	90,73	4	688.366.115	73,99	81,40	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pedoman Pelaksanaan APBD																
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Pelaksanaan APBD																
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen KUA-PPAS	10	Dokumen	629.745.600	6	393.591.000	2	131.197.000	2	130.358.431	100,00	99,36	8	523.949.431	80,00	83,20	Badan Keuangan Daerah
Koordnasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedianya Dokumen Perubahan KUA-PPAS	10	Dokumen	578.707.200	6	361.692.000	2	120.564.000	2	118.117.510	100,00	97,97	8	479.809.510	80,00	82,91	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Perda dan Perbup tentang Penyusunan APBD	10	Dokumen	4.468.593.504	6	2.792.870.940	2	930.956.980	2	921.154.393	100,00	98,95	8	3.714.025.333	80,00	83,11	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Perda dan Perbup tentang Penyusunan Perubahan APBD	10	Dokumen	4.721.750.400	6	2.951.094.000	2	983.698.000	2	954.650.534	78,67	97,05	8	3.905.744.534	75,73	82,72	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersedianya Regulasi dan Kebijakan Anggaran	5	Dokumen	1.495.924.800	3	934.953.000	1	311.651.000	1	302.961.163	52,90	97,21	4	1.237.914.163	70,58	82,75	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah	180	OPD	1.648.865.520	108	1.030.540.950	36	343.513.650	30	318.706.500	83,33	92,78	138	1.349.247.450	76,67	81,83	Badan Keuangan Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Syarat Penyaluran DAU, DAK, dan DID																
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	20	Dokumen	1.424.865.600	12	890.541.000	4	296.847.000	3	283.793.375	82,99	95,60	15	1.174.334.375	76,60	82,42	Badan Keuangan Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SP2D yang Diproses	60	Kali	902.198.400	36	563.874.000	12	187.958.000	12	187.940.200	100,00	99,99	48	751.814.200	80,00	83,33	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	60	Kali	1.193.647.200	36	746.029.500	12	248.676.500	11	245.688.332	91,67	98,80	47	991.717.832	78,33	83,08	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	60	Kali	1.724.784.000	36	1.077.990.000	12	359.330.000	10	346.698.963	83,33	96,48	46	1.424.688.963	76,67	82,60	Badan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	60	Kali	1.213.639.200	36	758.524.500	12	252.841.500	10	231.607.950	80,37	91,60	46	990.132.450	76,07	81,58	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pedoman Pengambilan Keputusan Daerah dalam Penyusunan Anggaran dan Salah Satu Syarat Opini BKP																
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi Keuangan OPD	60	Kali	201.768.000	36	126.105.000	12	42.035.000	11	36.045.100	91,67	85,75	47	162.150.100	78,33	80,36	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Semesteran Pemerintah Daerah, Perbup Pertanggungjawaban dan LKPD	10	Dokumen	114.575.040	6	71.609.400	2	23.869.800	2	23.869.800	80,01	100,00	8	95.479.200	76,00	83,33	Badan Keuangan Daerah
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan LKPD	5	LKPD	1.238.866.080	3	774.291.300	1	258.097.100	1	246.140.796	100,00	95,37	4	1.020.432.096	80,00	82,37	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan	Tersedianya Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10	Dokumen	1.159.229.179	6	724.518.237	2	241.506.079	2	194.649.196	100,00	80,60	8	919.167.433	80,00	79,29	Badan Keuangan Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																	
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Laporan Tindaklanjut LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	Dokumen	122.553.600	3	76.596.000	1	25.532.000	1	17.748.800	100,00	69,52	4	94.344.800	80,00	76,98	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tersedianya Laporan Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5	Laporan	640.670.400	3	400.419.000	1	133.473.000	1	27.667.700	100,00	20,73	4	428.086.700	80,00	66,82	Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pedoman Laporan Keuangan	10	Dokumen	666.864.000	6	416.790.000	2	138.930.000	2	136.694.500	100,00	98,39	8	553.484.500	80,00	83,00	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi	5	Tahun	807.043.200	3	504.402.000	1	168.134.000	1	162.534.000	67,77	96,67	4	666.936.000	73,55	82,64	Badan Keuangan Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan Baik																
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang dan Jasa yang Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik																
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tercapainya Pengelolan Barang Milik Daerah (BMD) secara Baik dan Benar																
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan RKBMD dan DKPBMD	10	Kali	206.347.200	6	128.967.000	2	42.989.000	1	40.447.700	72,77	94,09	7	169.414.700	74,55	82,10	Badan Keuangan Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pencatatan dan Inventaris BMD OPD	30	Dokumen	322.346.400	18	201.466.500	6	67.155.500	5	63.416.400	83,33	94,43	23	264.882.900	76,67	82,17	Badan Keuangan Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun	5	Dokumen	443.294.400	3	277.059.000	1	92.353.000	1	81.406.800	72,84	88,15	4	358.465.800	74,57	80,86	Badan Keuangan Daerah
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan BMD	10	Kali	499.147.200	6	311.967.000	2	103.989.000	2	97.372.000	93,99	93,64	8	409.339.000	78,80	82,01	Badan Keuangan Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	30	Kali	948.585.600	18	592.866.000	6	197.622.000	5	177.650.900	79,37	89,89	23	770.516.900	75,87	81,23	Badan Keuangan Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi BMD OPD	60	Kali	272.606.400	36	170.379.000	12	56.793.000	10	50.252.900	83,33	88,48	46	220.631.900	76,67	80,93	Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD	10	Kali	108.168.000	6	67.605.000	2	22.535.000	2	20.090.100	100,00	89,15	8	87.695.100	80,00	81,07	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terlaksananya Sosialisasi, Intensifikasi dan Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi, Intensifikasi dan Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Pembayaran Pajak Daerah bagi setiap Wajib Pajak yang Belum Patuh	375	WP	106.725.600	225	66.703.500	75	22.234.500	73	19.370.000	97,33	87,12	298	86.073.500	79,47	80,65	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Intensifikasi Pajak Daerah	95	Jenis	1.185.168.000	57	740.730.000	19	246.910.000	17	242.319.100	89,47	98,14	74	983.049.100	77,89	82,95	Badan Keuangan Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kebijakan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5	Dokumen	611.039.520	3	381.899.700	1	127.299.900	1	122.234.500	96,02	96,02	4	504.134.200	79,20	82,50	Badan Keuangan Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Sistem Informasi yang Dilaksanakan	5	SI	747.340.800	3	467.088.000	1	155.696.000	1	141.149.194	100,00	90,66	4	608.237.194	80,00	81,39	Badan Keuangan Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan PBB dan Rekonsiliasi Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah	215	Desa	623.805.600	129	389.878.500	43	129.959.500	43	122.366.000	100,00	94,16	172	512.244.500	80,00	82,12	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Monitoring Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	60	Kali	2.292.024.000	36	1.432.515.000	12	477.505.000	11	437.937.518	91,67	91,71	47	1.870.452.518	78,33	81,61	Badan Keuangan Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Kegiatan Perkantoran	532															

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peneydiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor	Terwujudnya Ruang Kantor Yang Terang	66	Jenis	115.258.571	6	6.000.000	6	2.858.100	6	2.645.000	100,00	92,54	12	8.645.000	18,18	7,50	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	50	Jenis	275.255.726	45	70.937.000	41	7.822.400	41	6.142.200	100,00	78,52	86	77.079.200	172,00	28,00	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum ASN	64	Jenis	971.521.636	9	57.324.400	8	44.318.900	8	40.783.470	100,00	92,02	17	98.107.870	26,56	5,21	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Tersedianya alat tulis kantor	110	Jenis		35		30		30		100,00		65		59,09		
Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	66	Jenis	686.166.556	16	20.000.000	6	15.178.500	6	11.850.000	100,00	78,07	22	31.850.000	33,33	4,64	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pemahaman Apartur tentang peraturan perundang-undangan	62	Jenis	180.633.731	2	15.600.000	6	6.200.000	6	6.200.000	100,00	100,00	8	21.800.000	12,90	12,07	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Singkronisasi Informasi dan Pemahaman terhadap pelaksaan Kegiatan	114	Jenis	1.729.608.611	25	349.850.000	25	131.785.000	25	121.365.299	100,00	92,09	50	471.215.299	43,86	27,24	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Kegiatan Perkantoran	66	Rekening	1.569.508.477	6	90.300.000	3	97.800.000	3	84.391.634	100,00	86,29	9	174.691.634	13,64	11,13	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah																	
Penyediaan JasaPemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	3	Unit	425.005.877	12	57.050.000	12	17.120.000	12	16.105.000	100,00	94,07	24	73.155.000	800,00	17,21	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Kepegawaian Daerah																	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusuan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksaan Pengadaan ASN	Terpenuhinnya ASN sesuai dengan formasi jabatan dan analisis kebutuhan	160	PNS	1.800.000.000	160	494.200.000	160	209.096.740	160	198.679.515	100,00	95,02	320	692.879.515	200,00	38,49	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Koordinasi pelaksaan Administrasi Pemberhentian	Dapat digunakan untuk pencairan taspen dan gaji pensiun	20	PNS	920.116.000	20	79.925.000	120	30.004.000	120	29.650.300	100,00	98,82	140	109.575.300	700,00	11,91	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Data Kepegawaian	Dapat digunakan untuk kenikan pangkat dan pengurusan pensiun	2550	PNS	735.000.000	2550	81.892.500	100	38.216.900	100	37.526.593	100,00	98,19	2650	119.419.093	103,92	16,25	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Mutasi dan Promosi ASN																	
Pengelolaan Mutasi ASN	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SDM	20	PNS	4.595.250.000	20	208.595.500	50	1.202.260.300	50	1.179.042.217	100,00	98,07	70	1.387.637.717	350,00	30,20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan karir asn	300	PNS	654.098.000	300	119954000	300	64.716.000	300	63.985.700	100,00	98,87	600	183.939.700	200,00	28,12	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan Kompetensi ASN																	
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan terpenuhinya persyratan dalam penyesuian ijazah dan pindah golongan ruang ASN	378	Orang	14.380.161.263	378	1.844.477.000	400	1.136.198.500	400	1.019.331.200	100,00	89,71	778	2.863.808.200	205,82	19,91	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Indek RB, Indek Kepuasan masyarakat, Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																
PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	24	Desa	1.105.750.000	4	90.000.000	23	87.490.000	23	87.455.000	100,00	99,96	27	177.455.000	112,50	16,05	Kec. Pagel
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	28	Bulan	3.560.574.552	14	-	14	1.509.946.638	14	1.428.428.423	99,52	94,60	28	1.428.428.423	99,76	40,12	Kec. Pagel
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35	orang	4.477.047.500	1	727.298.000	12	647.133.000	11	638.246.732	91,67	98,63	12	1.365.544.732	34,29	30,50	Kec. Pagel
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Lancarnya penerangan dan aktifitas kantor	51	Jenis	67.200.000	5	4.000.000	6	8.685.800	6	8.639.000	100,00	99,46	11	12.639.000	21,57	18,81	Kec. Pagel
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pelayanan kantor Kecamatan Pagai Selatan	30	Unit	323.680.000			6	82.496.192	6	82.010.000	100,00	99,41	6	82.010.000	20,00	25,34	Kec. Pagel
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor																
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	174	jenis	182.630.000	12	10.000.000	21	15.234.700	21	15.204.700	100,00	99,80	33	25.204.700	18,97	13,80	Kec. Pagel
	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	102	item	133.000.000	10	8.000.000	17	7.281.100	17	7.281.100	100,00	100,00	27	15.281.100	26,47	11,49	Kec. Pagel
	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	138	kali	315.563.500	25	9.800.000	20	8.500.000	20	8.500.000	100,00	100,00	45	18.300.000	32,61	5,80	Kec. Pagel
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi	171	Kali	1.725.250.000	1	57.650.000	32	162.618.000	32	153.135.709	100,00	94,17	33	210.785.709	19,30	12,22	Kec. Pagel
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya Barang Milik Daerah																
Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja, Kursi Kerja Camat, Kasi, Kasubbag dan Staf dan Lemari Arsip	67	Unit	80.570.000	0	-	62	76.580.000	62	75.678.000	100,00	98,82	62	75.678.000	92,54	93,93	Kec. Pagel
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5125	liter	522.000.000	0	-	12	4.800.000	10	4.526.000	83,33	94,29	10	4.526.000	0,20	0,87	Kec. Pagel
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG	Jumlah pelayanan administrasi umum yang																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAH DAERAH	dilaksanakan																
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	114	unit	325.000.000	8	51.950.000	8	35.960.000	8	35.960.000	100,00	100,00	16	87.910.000	14,04	27,05	Kec. Pagel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	16	unit	325.000.000	0		11	7.910.000	11	7.910.000	100,00	100,00	11	7.910.000	68,75	2,43	Kec. Pagel
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
KOORDINASI PEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa								0								
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Kali	503.000.000	1	49.610.000	1	25.290.000	1	25.290.000	100,00	100,00	2	74.900.000	33,33	14,89	Kec. Pagel
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	500	persen	1.790.000.000	0	-	4	14.683.000	4	14.628.000	100,00	99,63	4	14.628.000	0,80	0,82	Kec. Pagel
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah																
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Terlaksananya Perayaan HUT RI	6	Kali	1.693.940.000	0	-	1	10.625.000	1	10.625.000	100,00	100,00	1	10.625.000	16,67	0,63	Kec. Pagel
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan masyarakat																
FASILITASI REKOMENDASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa dan Pemilihan Kepala Desa																
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuanga desa dan pendayagunaan aset desa	24	Desa	494.000.000	4	70.000.000	4	54.950.000	4	51.862.500	100,00	94,38	8	121.862.500	33,33	24,67	Kec. Pagel
Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa	3	Desa	63.943.000	0	-	3	63.943.000	3	63.740.000	100,00	99,68	3	63.740.000	100,00	99,68	Kec. Pagel
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Indek RB, Indek Kepuasan masyarakat, Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan							2.178.509.143									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	28	Bulan	3.560.574.552	14	-	14	1.568.029.143	14	1.403.167.992	100,00	89,49	28	1.403.167.992	100,00	39,41	Kec. Pagut
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35	orang	4.477.047.500	1	727.298.000	12	610.480.000	11	602.845.280	91,67	98,75	12	1.330.143.280	34,29	29,71	Kec. Pagut
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan							106.720.850									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Lancarnya penerangan dan aktifitas kantor	51	Jenis	67.200.000	5	4.000.000	6	4.050.750	6	4.010.800	100,00	99,01	11	8.010.800	21,57	11,92	Kec. Pagut
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor	74	jenis	237.784.637	8	7.730.000	3	37.677.100	3	35.026.700	100,00	92,97	11	42.756.700	14,86	17,98	Kec. Pagut
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Pelayanan kantor Kecamatan Pagai	12	Bulan	3.833.000			12	3.833.000	12	3.833.000	100,00	100,00		3.833.000	0,00	100,00	Kec. Pagut
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi	105	kali	1.470.477.274	45	56.560.000	24	61.160.000	20	51.545.000	83,33	84,28	65	108.105.000	61,90	7,35	Kec. Pagut
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya Barang Milik Daerah							68.919.000									

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	Unit	80.570.000	0	-	2	68.919.000	2	57.999.000	100,00	84,16	2	57.999.000	66,67	71,99	Kec. Pagut
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan							73.700.000									
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Alat Besar	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	114	unit	325.000.000	8	51.950.000	4	14.500.000	4	12.970.000	100,00	89,45	12	64.920.000	10,53	19,98	Kec. Pagut
Pemeliharaan Bangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Bangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							59.200.000									
KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa							16.000.000	0								
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Kali	503.000.000	1	49.610.000	1	8.500.000	1	8.500.000	100,00	100,00	2	58.110.000	33,33	11,55	Kec. Pagut
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	500	persen	1.790.000.000	0	-	4	7.500.000	3	6.375.000	75,00	85,00	3	6.375.000	0,60	0,36	Kec. Pagut
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah																
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Terlaksananya Perayaan HUT RI	6	Kali	1.693.940.000	0	-	1	8.500.000	1	8.500.000	100,00	100,00	1	8.500.000	16,67	0,50	Kec. Pagut

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa dan Pemilihan Kepala Desa																
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuanga desa dan pendayagunaan aset desa	24	Desa	494.000.000	4	70.000.000	4	24.920.000	4	21.930.000	87,50	88,00	8	91.930.000	31,25	18,61	Kec. Pagut
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3	Desa	50.790.000	0	-	12	30.000.000	11	27.730.000	91,67	92,43	11	27.730.000	366,67	54,60	Kec. Pagut
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Indek RB, Indek Kepuasan masyarakat, Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	70	ASN	10.984.003.675	42	2.522.003.130	14	2.196.800.735	14	2.126.519.939	100,00	96,80	56	4.648.523.069	80	42,32	Kec. Sikakap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45	orang	4.579.920.000	40	475.304.000	45	381.660.000	44	380.744.000	97,78	99,76	84	856.048.000	187	18,69	Kec. Sikakap
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor																
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	34	jenis	50.000.000	34	10.000.000	15	10.516.400	13	10.496.360	86,67	99,81	47	20.496.360	138	40,99	Kec. Sikakap
	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	10	jenis	107.340.000	10	21.468.000	14	3.066.900	13	2.616.900	92,86	85,33	23	24.084.900	230	22,44	Kec. Sikakap
	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	60	kali	100.000.000	12	20.000.000	12	16.420.000	10	14.295.000	83,33	87,06	22	34.295.000	37	34,30	Kec. Sikakap

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi	760	Kali	250.000.000	152	50.000.000	28	71.100.000	28	71.100.000	100,00	100,00	180	121.100.000	24	48,44	Kec. Sikakap
Pnyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bulan	165.000.000	12	36.000.000	12	33.000.000	12	26.340.561	100,00	79,82	24	62.340.561	40	37,78	Kec. Sikakap
Pmeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	9	unit	10.000.000	9	12.400.000	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00	100,00	10	14.400.000	111	144,00	Kec. Sikakap
Peeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	unit	105.210.410	1		1	21.042.082	1	21.042.082	100,00	100,00	2	21.042.082	200	20,00	Kec. Sikakap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK																	
Plaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat																	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1	kali	149.690.000	1		88	29.938.000	77	28.370.000	87,50	94,76	78	28.370.000	7800	18,95	Kec. Sikakap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa																
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Kali	185.880.000	1	37.176.000	1	20.000.500	1	19.990.500	100,00	99,95	2	57.166.500	200	30,75	Kec. Sikakap
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali	198.450.000	0	39.690.000	36	27.650.000	35	27.187.500	97,22	98,33	35	66.877.500	3500	33,70	Kec. Sikakap
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah																
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Terlaksananya Perayaan HUT RI	1	Kali	103.800.000	0	20.760.000	1	14.662.500	1	14.662.500	100,00	100,00	1	35.422.500	100	34,13	Kec. Sikakap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa dan Pemilihan Kepala Desa																
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuanga desa dan pendayagunaan aset desa	3	Desa	204.500.000	3	40.900.000	3	45.750.000	3	45.750.000	100,00	100,00	6	86.650.000	100	100	Kec. Sikakap
UNSUR KEWILAYAHAN																	
KECAMATAN SIPORA SELATAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah																
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Kegiatan														

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Kali	102.540.000	12	102.540.000	12	102.540.000	10	102.480.000	83,33	99,94	22	205.020.000	100	100	Kec. Sipora Selatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	100	Persen														
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	40	Orang	672.621.000	40	672.621.000	40	672.621.000	37	564.008.000	92,50	83,85	77	1.236.629.000	100	100	Kec. Sipora Selatan
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum	100	persen														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan	1	Jenis	5.970.000	1	5.970.000	1	5.970.000	1	4.680.000	100,00	78,39	2	10.650.000	100	100	Kec. Sipora Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang Dibutuhkan	35	Jenis	77.964.900	35	77.964.900	35	77.964.900	31	62.389.160	88,57	80,02	66	140.354.060	100	100	Kec. Sipora Selatan
	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor yang Disediakan	8	Jenis	13.005.000	8	13.005.000	8	13.005.000	7	10.549.000	87,50	81,11	15	23.554.000	100	100	Kec. Sipora Selatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	26	Kali	69.700.000	26	69.700.000	26	69.700.000	26	56.294.000	100,00	80,77	52	125.994.000	100	100	Kec. Sipora Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	1	Rekening														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Dibayar	12	Bulan	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	11	23.479.750	91,67	97,83	23	47.479.750	100	100	Kec. Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat	85	Persen														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan	100	Persen														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Perekaman e-KTP	750	Meter	63.437.696	750	63.437.696	750	63.437.696	650	53.389.300	86,67	84,16	1400	116.826.996	100	100	Kec. Sipora Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat	85	Persen														
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	7	Desa														

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	1	Kali	44.690.000	1	44.690.000	1	44.690.000	1	39.905.000	100,00	89,29	2	84.595.000	100	100	Kec. Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	persen														
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya HUT-RI	1	Kali	12.677.500	1	12.677.500	1	12.677.500	1	12.177.500	100,00	96,06	2	24.855.000	100	100	Kec. Sipora Selatan
UNSUR KEWILAYAHAN																	
KECAMATAN SIPORA UTARA																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah																
Evaluasi Kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	36	dokumen	455.000.000	6	46.137.500	6	82.395.000	6	80.360.000	100,00	97,53	12	126.497.500	33,33	27,80	Kec. Sipora Utara
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	95	Orang	7.500.000.000	19	1.554.090.011	19	1.749.842.676	18	1.666.990.086	94,74	95,27	37	3.221.080.097	38,95	42,95	Kec. Sipora Utara
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya honororium pelaksana kegiatan dan gaji pegawai kontrak	235	Orang	2.750.000.000	47	589.689.000	47	542.328.000	47	533.501.231	100,00	98,37	94	1.123.190.231	40,00	40,84	Kec. Sipora Utara
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	5	Jenis	97.905.500	15	2.990.000	5	6.984.500	5	6.904.500	100,00	98,85	20	9.894.500	400,00	10,11	Kec. Sipora Utara

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	296	jenis	364.888.500	30	59.830.500	28	53.144.500	28	53.066.950	100,00	99,85	58	112.897.450	19,59	30,94	Kec. Sipora Utara
	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	54	kali	299.720.000	9	14.532.500	300	9.625.000	150	5.005.000	50,00	52,00	159	19.537.500	294,44	6,52	Kec. Sipora Utara
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaaan yang tersedia	65	jenis	167.942.500	12	5.590.000	5	15.618.100	5	15.608.100	100,00	99,94	17	21.198.100	26,15	12,62	Kec. Sipora Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	175	kali	598.695.000	30	41.900.000	71	59.439.000	70	59.390.000	98,59	99,92	100	101.290.000	57,14	16,92	Kec. Sipora Utara
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Administrasi Umum																
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan mesin yang dibutuhkan	175	kali	-	0	-	2	22.870.422	2	22.850.000	100,00	99,91	2	22.850.000	1,14	16,92	Kec. Sipora Utara
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik	12	bulan	768.036.000	12	48.680.350	12	30.000.000	12	27.325.200	100,00	91,08	24	76.005.550	200,00	9,90	Kec. Sipora Utara
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang tersedia	183	jenis	115.110.000	38	10.054.000	13	4.688.300	13	4.681.000	100,00	99,84	51	14.735.000	27,87	12,80	Kec. Sipora Utara
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perizinannya	87	unit	720.000.000	10	40.118.300	14	55.881.000	14	53.853.500	100,00	96,37	24	93.971.800	27,59	13,05	Kec. Sipora Utara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10	unit	115.110.000	3	8.000.000	6	4.380.000	6	4.380.000	100,00	100,00	9	12.380.000	90,00	10,75	Kec. Sipora Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan																
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen perizinan yang diurus	550	berkas	233.999.500	85	23.933.000	85	18.300.000	85	17.960.000	100,00	98,14	170	41.893.000	30,91	17,90	Kec. Sipora Utara
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah penduduk yang terekam KTP-EL	1700	orang	97.905.500	300	59.915.000	100	34.435.000	100	34.335.000	100,00	99,71	400	94.250.000	23,53	96,27	Kec. Sipora Utara

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan																
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan	6	kali	346.589.500	1	29.893.000	1	16.134.800	1	16.134.800	100,00	100,00	2	46.027.800	33,33	13,28	Kec. Sipora Utara
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi PKK	46	kali	523.188.000	1	2.775.000	1	4.950.000	1	4.950.000	100,00	100,00	2	7.725.000	4,35	1,48	Kec. Sipora Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan																
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya HUT-RI	5	kali	350.000.000	0	-	1	16.952.500	1	16.952.500	100,00	100,00	1	16.952.500	20,00	4,84	Kec. Sipora Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkat Pelaksanaan APBDesa yang efektif dan efesien																
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi ADD	108	kali	905.237.000	18	58.577.500	18	29.919.000	18	29.379.000	100,00	98,20	36	87.956.500	33,33	9,72	Kec. Sipora Utara
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan desa	0		-	0	0	6	55.334.000	6	54.614.000	100,00	98,70	6	54.614.000	#DIV/0!	#DIV/ 0!	Kec. Sipora Utara

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
UNSUR KEWILAYAHAN																	
KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah																
Evaluasi Kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	36	dokumen	455.000.000	6	41.640.000	6	36.070.000	6	36.070.000	100,00	100,00	12	77.710.000	33,33	17,08	Kec. Siberut Barat Daya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan																
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya honororium pelaksana kegiatan dan gaji pegawai kontrak	141	org	424.453.000	27	448.570.500	29	421.299.000	26	396.819.573	89,66	94,19	53	845.390.073	37,59	199,17	Kec. Siberut Barat Daya
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		26	jenis	97.905.500	12	10.000.000	10	5.997.650	10	5.497.650	100,00	91,66	22	15.497.650	84,62	15,83	Kec. Siberut Barat Daya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaaan yang tersedia	65	jenis	167.942.500	12	5.590.000	5	7.000.100	5	5.997.100	100,00	85,67	17	11.587.100	26,15	6,90	Kec. Siberut Barat Daya
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	175	kali	598.695.000	12	149.775.000	40	49.950.000	35	39.760.000	87,50	79,60	47	189.535.000	26,86	31,66	Kec. Siberut Barat Daya
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Administrasi Umum																
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan mesin yang dibutuhkan	175	kali	-	0	-	2	18.000.275	2	14.870.000	100,00	82,61	2	14.870.000	1,14	100,00	Kec. Siberut Barat Daya
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasionalatau lapangan	Terlaksananya administrasi umum	100	persen		0	-	2	33.089.000									
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik	12	bulan	768.036.000	12	55.195.350	12	49.000.000	12	48.980.000	100,00	99,96	24	104.175.350	100,00	13,56	Kec. Siberut Barat Daya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perizinannya	7	unit	720.000.000	10	40.118.300	7	15.000.000	7	12.000.000	100,00	80,00	17	52.118.300	242,86	7,24	Kec. Siberut Barat Daya
Peemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunanya lainya	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan	1	unit	115.110.000	0	-	1	47.153.000	1	40.153.000	100,00	85,15	1	40.153.000	100,00	34,88	Kec. Siberut Barat Daya
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung	1	unit	100.000.000			1	26.000.000	1	19.050.000	100,00	73,27	1	19.050.000	100,00	19,05	Kec. Siberut Barat Daya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan																
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah penduduk yang terekam KTP-EL	1700	orang	97.905.500	300	20.000.000	300	30.280.000	300	29.140.000	100,00	96,24	600	49.140.000	35,29	50,19	Kec. Siberut Barat Daya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan																
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan	6	kali	346.589.500	1	20.680.000	1	23.965.000	1	20.465.000	100,00	85,40	2	41.145.000	33,33	11,87	Kec. Siberut Barat Daya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkat Pelaksanaan APBDesa yang efektif dan efesien	100	persen														
koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi ADD	108	kali	905.237.000	1	50.000.000	18	26.520.000	16	22.520.000	88,89	84,92	17	72.520.000	15,74	8,01	Kec. Siberut Barat Daya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Indek RB, Indek Kepuasan masyarakat, Persentase peningkatan pelayanan dan																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase peningatan pelayanan dan kelancaran pelkasanaan tugas pokok dan Fungsi perangkat Daerah					-											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	Kali	61.800.000	0	-	1	30.800.000	1	30.800.000	100,00	100,00	1	30.800.000	100	49,84	Kec. Sibereng
ADAMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase peningatan pelayanan dan kelancaran pelkasanaan tugas pokok dan Fungsi perangkat Daerah																
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		125	org	3.319.070.000	75	1.991.442.000	25	663.814.000	25	646.762.000	100,00	97,43	100	2.638.204.000	80,00	79,49	Kec. Sibereng
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		50	Jenis	10.002.500	30	6.001.500	1	2.000.500	1	2.000.500	100,00	100,00	31	8.002.000	62,00	80,00	Kec. Sibereng
Penyediaan Logistik	Tersedianya ATK	150	Jenis	272.504.611	25	8.434.000	25	14.083.500	21	13.976.100	84,00	99,24	46	22.410.100	30,67	8,22	Kec. Sibereng
	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	108	Jenis	442.574.098	18	1.521.000	18	1.536.700	13	1.060.700	72,22	69,02	31	2.581.700	28,70	0,58	Kec. Sibereng
	Tersedianya Makan dan Minum	21	Jenis	124.824.923	6	8.024.000	6	13.800.000	4	13.192.100	66,67	95,59	10	21.216.100	47,62	17,00	Kec. Sibereng
Penyediaan barang cetak dan penggandaan		30	Jenis	17.517.000	18	10.510.200	6	3.503.400	2	2.232.000	33,33	63,71	20	12.742.200	66,67	72,74	Kec. Sibereng
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		48	Kali	347.790.000	26	208.674.000	12	84.757.000	11	83.171.000	91,67	98,13	37	291.845.000	77,08	83,91	Kec. Sibereng
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		60	Rekening	30.000.000	36	18.000.000	12	6.000.000	1	6.000.000	8,33	100,00	37	24.000.000	61,67	80,00	Kec. Sibereng
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20	Unit	30.000.000	12	18.000.000	4	6.000.000	3	6.000.000	75,00	100,00	15	24.000.000	75,00	80,00	Kec. Sibereng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
KOORDINASI PEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa																
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		5	Kali	100.000.000	3	60.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	100,00	100,00	4	80.000.000	80,00	80,00	Kec. Sibereng
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan		5	Kali	99.999.500	3	59.999.700	1	19.999.900	1	16.329.900	100,00	81,65	4	76.329.600	80,00	76,33	Kec. Sibereng
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
FASILITASI REKOMENDASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa dan Pemilihan Kepala Desa																
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		20	Kali	382.770.000	12	229.662.000	4	76.554.000	4	74.097.000	100,00	96,79	16	303.759.000	80,00	79,36	Kec. Sibereng
Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa		1	Kali	80.000.000	0	-	1	76.171.000	1	76.144.000	100,00	99,96	1	76.144.000	100,00	95,18	Kec. Sibereng
UNSUR KEWILAYAHAN																	
KECAMATAN SIBERUT UTARA																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah																
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Laporan	127.865.000	10	127.865.000	10	127.865.000	10	127.765.500	100,00	99,92	20	255.630.500	100,00	100,00	Kec. Siberut Utara
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sierut Utara	14	bln	1.816.150.010	14	1.816.150.010	14	1.816.150.010	12	1.755.506.558	85,71	96,66	26	3.571.656.568	100,00	100,00	Kec. Siberut Utara
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	44	Orang	580.228.000	44	580.228.000	44	580.228.000	44	580.232.000	100,00	100,00	88	1.160.460.000	100,00	100,00	Kec. Siberut Utara
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Listrik Yang dibutuhkan yang Dibutuhkan	8	Jenis	1.515.100	8	1.515.100	8	1.515.100	8	1.515.100	100,00	100,00	16	3.030.200	100,00	100,00	Kec. Siberut Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Baan Logistik yang Dibutuhkan																
	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor Yang Dibutuhkan	27	jenis	19.389.100	27	19.389.100	27	19.389.100	27	19.389.100	100,00	100,00	54	38.778.200	100,00	100,00	Kec. Siberut Utara
	Jumlah dan Jenis Peralatan Kebersihan yang dibutuhkan	14	Jenis	2.657.300	14	2.657.300	14	2.657.300	14	2.657.300	100,00	100,00	28	5.314.600	101,00	101,00	Kec. Siberut Utara
	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor dan Rapat yang di butuhkan	5	jenis	12.215.000	5	12.215.000	5	12.215.000	5	12.215.000	100,00	100,00	10	24.430.000	102,00	102,00	Kec. Siberut Utara
	Jumlah Makan Minum Rapat yang dibutuhkan	2	Jenis	9.350.000	2	9.350.000	2	9.350.000	2	9.350.000	100,00	100,00	4	18.700.000	103,00	103,00	Kec. Siberut Utara
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang di butuhkan	3	Item	2.656.300	3	2.656.300	3	2.656.300	3	2.656.300	100,00	100,00	6	5.312.600	104,00	104,00	Kec. Siberut Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	8	kali	97.589.000	8	97.589.000	8	97.589.000	8	97.589.000	100,00	100,00	16	195.178.000	105,00	105,00	Kec. Siberut Utara
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang Di bayarkan	15	Rekening	26.000.000	9	26.000.000	3	26.000.000	3	22.689.093	100,00	87,27	12	48.689.093	80,00	187,27	Kec. Siberut Utara
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Operasioal perkantoran																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Mobil Jabatan yang di Service	1	Unit	27.800.000		27.800.000	2	27.800.000	2	25.800.000	100,00	92,81	2	53.600.000	100,00	100,00	Kec. Siberut Utara

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	4	unit	4.000.000		4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	100,00	100,00	4	8.000.000	100,00	100,00	Kec. Siberut Utara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6		19.720.000	2	19.720.000	2	19.720.000	2	19.720.000	100,00	100,00	2	39.440.000	100,00	100,00	Kec. Siberut Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat								0	-							
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan								0	-							
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Perekaman E-KTP	500	orang	18.191.424	500	18.191.424	500	18.191.424	500	18.191.000	100,00	100,00	1000	36.382.424	200,00	200,00	Kec. Siberut Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat								0	-							
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan								0	-							
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	34.709.000	1	34.709.000	1	34.709.000	1	32.719.000	100,00	94,27	2	67.428.000	200,00	194,27	Kec. Siberut Utara
Peningkatan EfektipitasKeegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan PKK di Wilayah Kecamatan	1	Kegiatan	48.403.000	1	48.403.000	1	48.403.000	1	48.393.000	100,00	99,98	2	96.796.000	200,00	199,98	Kec. Siberut Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat								0	-							
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan				0	-	0	-	0	-							
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Terlaksananya HUT-RI	1	Kegiatan	38.589.000	1	38.589.000	1	38.589.000	1	38.589.000	100,00	100,00	2	77.178.000	200,00	200,00	Kec. Siberut Utara

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek Kepuasan Masyarakat da Pelayanan Masyarakat																
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pengetahuan dan Kafasitas Aparatur Desa																
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Perifikasi Pemerintahan Desa	6	Desa	37.520.000	6	37.520.000	6	37.520.000	6	37.125.000	100,00	98,95	12	74.645.000	200,00	198,95	Kec. Siberut Utara
UNSUR KEWILAYAHAN																	
KECAMATAN SIBERUT BARAT																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah																
Evaluasi Kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	60	Dok	425.039.000	15	165.805.000	15	165.805.000	15	160.037.000	100,00	96,52	30	325.842.000	50,00	76,66	Kec Sibarat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan																
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya honororium pelaksana kegiatan dan gaji pegawai kontrak	104	orang	2.843.560.000	26	649.530.000	26	649.530.000	26	626.499.000	100,00	96,45	52	1.276.029.000	50,00	44,87	Kec Sibarat
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	37	Item	32.129.500	20	3.960.000	20	3.960.000	20	3.948.450	100,00	99,71	40	7.908.450	108,11	24,61	Kec Sibarat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	80	Item	94.576.100	57	18.272.100	57	18.272.100	57	16.272.100	100,00	89,05	114	34.544.200	142,50	36,53	Kec Sibarat
	Jumlah Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	94	Item	142.097.500	49	7.131.000	49	7.131.000	49	6.401.000	100,00	89,76	98	13.532.000	104,26	9,52	Kec Sibarat

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Natura dan Pakan Natura	38	item	14.540.000	38	14.540.000	38	14.540.000	34	12.540.000	89,47	86,24	72	27.080.000	189,47	186,24	Kec Sibarat
	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	1050	Bks	102.472.000	200	8.500.000	200	8.500.000	200	8.500.000	100,00	100,00	400	17.000.000	38,10	16,59	Kec Sibarat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	48	Kali	629.390.000	13	133.600.000	13	133.600.000	13	132.850.000	100,00	99,44	26	266.450.000	54,17	42,33	Kec Sibarat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik	48	bulan	216.480.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	100,00	100,00	24	48.000.000	50,00	22,17	Kec Sibarat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perizinannya	28	unit	89.725.000	6	11.000.000	6	11.000.000	5	10.000.000	83,33	90,91	11	21.000.000	39,29	23,40	Kec Sibarat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan	1300	Berkas	345.339.900	300	74.420.000	300	74.420.000	300	74.410.000	100,00	99,99	600	148.830.000	46,15	43,10	Kec Sibarat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	4	Kegiatan	217.678.000	1	41.903.000	1	41.903.000	1	41.803.000	100,00	99,76	2	83.706.000	50,00	38,45	Kec Sibarat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat																
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkat Pelaksanaan APBDesa yang efektif dan efesien	85	persen	437.608.000	85	80.438.000	85	80.438.000	75	80.220.000	88,24	99,73	160	160.658.000	188,24	36,71	Kec Sibarat
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi ADD	12	Desa	437.608.000	4	80.438.000	4	80.438.000	4	80.220.000	100,00	99,73	8	160.658.000	66,67	36,71	Kec Sibarat

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Urusan Pemerintahan Umum																	
PROGRAM PENINFKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELAUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																	
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																	
Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Terbayarnya Bantuan Partai politik	45	Kali	3.210.000.000	33	150.000.000	9	642.228.000	9	642.228.000	100,00	100,00	42	792.228.000	93,33	24,68	Kesbangpolinmas
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN																	
Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa orma, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Terawasinya ormas di Kabupaten Kepulauan Mentawai	50	kejadian	1.650.000.000	30	1.050.000.000	10	90.658.000	8	88.928.200	80,00	98,09	38	1.138.928.200	76,00	69,03	Kesbangpolinmas
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA																	
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan Budaya																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Terjaciptanya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama	20	kali	100.000.000	1	100.000.000	1	75.252.300	1	68.399.800	100,00	90,89	2	168.399.800	10,00	168,40	Kesbangpolinmas
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																	
Pelaksanaan kebijakan di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Pencegahaan dini gejolak di masyarakat	10	kecamatan	278.200.000	10	222.560.000	10	55.640.000	8	51.716.200	80,00	92,95	18	274.276.200	180,00	98,59	Kesbangpolinmas
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terkendalinya cegah dini konflik di Masyarakat	20	kecamatan	234.437.500	10	187.550.000	10	46.887.500	4	36.330.000	40,00	77,48	14	223.880.000	70,00	95,50	Kesbangpolinmas
Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terpantauanaya tenaga kerja asing	20	kecamatan	257.680.000		206.144.000	10	51.536.000	6	40.298.500	60,00	78,19	6	246.442.500	30,00	95,64	Kesbangpolinmas
										Jumlah	94,73	91,68					
										Rata-Rata Capaian Realisasi Keuangan (%)	91,68						

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat Kinerja	Sangat Timggi						

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

1. Merupakan Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24 telah menetapkan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satu-satunya kabupaten tertinggl di Propinsi Sumatera Barat.

Penetapan ini menjadi pertanda bahwa masih terbatasnya/ rendahnya capaian pembangunan terkait perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Hingga tahun 2021, berdasarkan hasil Indeks Desa Membangun (IDM) bahwa desa mandiri sudah ada 3 desa, desa maju sudah ada 5 desa, desa berkembang sebanyak 22 desa, dan desa tertinggal sebanyak 13 desa.

Indikator daerah tertinggal yang masih sangat perlu perhatian dan intervensi program pembangunan antara lain pada aksesibilitas, sarana dan prasarana, perekonomian masyarakat dan sumber daya manusia. Terkait dengan infrastruktur jalan dengan kondisi jalan Trans Mentawai sebagai bagian dari sistem transportasi daerah yang menunjang aksesibiltas tiap pulau (empat pulau besar) dengan capaian hingga saat ini dengan kondisi mantap (rabat beton) sepanjang 72,10 km atau 18,35

persen dari panjang trans Mentawai dan masih ada panjang trans Mentawai yang belum terbuka yaitu sepanjang 38,9 km atau 9,89 persen dan telah dibuka sepanjang 282 km. Sebagai koridor jalan utama maka dibutuhkan jalan penghubung Trans Mentawai dengan permukiman masyarakat yang menjadi pusat aktivitas sosial ekonomi, melalui Pembangunan Jalan Simpang II-Kantor Camat-Berkat sebagai penghubung/akses sosial ekonomi masyarakat antar desa yang selama ini masih menggunakan transportasi laut (boat). Sebagai bagian dari sistem konektivitas daerah, selain ketersediaan jalan sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah rencana pembangunan pelabuhan menjadi kebutuhan untuk menjawab konektivitas total antar wilayah/antar pulau dan konektivitas regional antar kabupaten dan propinsi sehinga nantinya memudahkan dalam aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang didukung sarana/armada tol laut dan angkutan perintis.

2. Merupakan Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang berisiko tinggi gempa dan tsunami karena terletak di lempeng *Sundaland* di sepanjang pantai barat Sumatera memanjang hingga Selat Sunda. LIPI (2012) mencatat kejadian gempa besar di Mentawai diantaranya terjadi pada tahun 1935 di Pulau Siberut dan Pulau Nias (7,7 SR), tahun 2007 diantara Pulau Sipora dan Pulau Painan (7,7 SR), dan tahun 2010 di Pagai Selatan (7,7 SR).

Namun, masih ada potensi gempa berkekuatan sekitar 8,8 SR di bagian bawah Pulau Siberut, Sipora, dan Pagai Utara, dan gempa bumi ini akan mengancam Mentawai, Kota Padang, dan Bengkulu (Chlieh, Avouac, Sieh, Natawidjaja, & Galetzka, 2008).

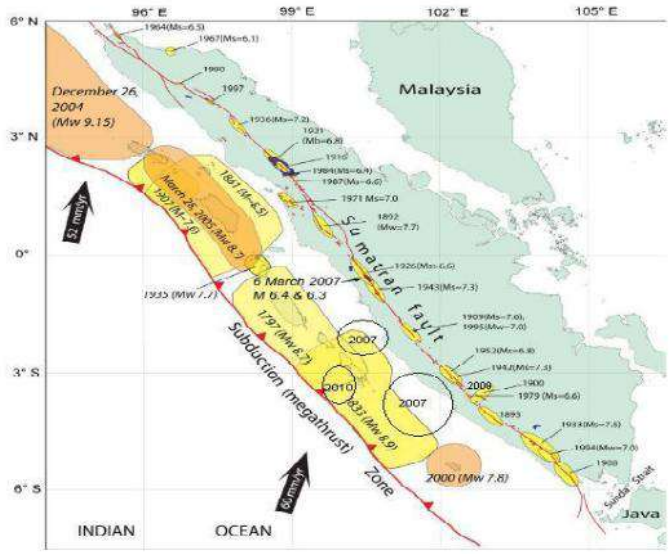

Gambar 4.1
Segmentasi Sumber Gempa di Jalur *Megathrust* Sumatra
dan Pegunungan Bukit Barisan

Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan potensi yang rawan bencana baik berupa gempa bumi (tektonik), gelombang besar tsunami, abrasi pantai dan longsor. Dari 43 desa yang ada, 33 desa diantaranya merupakan desa pesisir, yang pada kondisi saat ini kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana terhadap bahaya tsunami. Sebagaimana yang telah terjadi pada tanggal 25 Oktober 2010, bencana gempa bumi berkekuatan 7,2 SR (atau 7,5 SR menurut USGS) telah memicu terjadinya gelombang tsunami.

Jika dilihat dari analisis kecenderungan kejadian bencana yang terjadi di Kepulauan Mentawai, gempa bumi, tsunami, banjir, cuaca ekstrem, dan abrasi memiliki kecenderungan peningkatan intensitas.

Tabel 2.73
Kecenderungan Kejadian Bencana
di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	JENIS BENCANA	KECENDERUNGAN KEJADIAN
1	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Meningkat
2	Gempa Bumi	Meningkat
3	Tsunami	Meningkat
4	Banjir	Meningkat
5	Epidemi dan Wabah Penyakit	Meningkat
6	Cuaca Ekstrim	Tetap
7	Tanah Longsor	Tetap
8	Kekeringan	Tetap
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tetap

Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kecenderungan kejadian bencana yang meningkat di Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi bencana gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, banjir serta epidemi dan wabah penyakit sedangkan kecenderungan kejadian bencana yang tetap meliputi bencana cuaca ekstrim, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Analisis kecenderungan ini merupakan dasar dalam menentukan bencana prioritas yang akan berpengaruh terhadap kebijakan penanggulangannya untuk masing–masing ancaman. Begitu juga jika dilihat dari tingkat bahaya bencana yang akan terjadi bahwa tingkat bahaya bencana diperoleh berdasarkan luas terdampak bahaya (rendah, sedang dan tinggi) yang memiliki persentase luas

bahaya terdampak paling besar. Skala indeks bahaya yang digunakan dibagi kedalam beberapa 3 kategori yaitu rendah (0,0 - 0,33), sedang (>0,33 – 0,66) dan tinggi (>0,66 – 1,00).

Tabel 2.74 memperlihatkan bahwa tingkat bahaya tinggi berpotensi terjadi terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, cuaca ekstrim, tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Tingkat bahaya sedang berpotensi terhadap bencana gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan sedangkan tingkat bahaya rendah terhadap bencana epidemi dan wabah penyakit. Indeks bahaya disesuaikan dengan standar parameter yang telah ditentukan oleh BNPB dengan merujuk kepada peta bahaya setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.74
Tingkat Bahaya Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	BENCANA	TINGKAT BAHAYA
1	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi
2	Gempa Bumi	Tinggi
3	Tsunami	Tinggi
4	Cuaca Ekstrim	Tinggi
5	Tanah Longsor	Tinggi
6	Banjir	Tinggi
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tinggi
8	Kekeringan	Sedang
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi

Sumber: Indeks Risiko Bencana Nasional, 2021

Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana (IRBI) Tahun 2021 yang dirilis oleh BNPB bahwa untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih masuk pada bencana dengan kategori tinggi dengan nilai 197,.20. Penyelenggaraan penanggulangan

bencana telah diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Memastikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan hal yang sangat urgen agar masyarakat lebih *aware* terhadap kondisi, gejala dan potensi bencana yang akan dihadapi selain itu pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa melakukan pendampingan, penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat juga penyediaan infrastruktur kebencanaan baik yang didanai oleh APBD dan diluar APBD sebagai upaya untuk pencegahan dan mitigasi resiko bencana.

3. Tingkat Kemiskinan yang Tinggi

Salah satu indicator ditetapkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah tertinggal adalah karena tingkat kemiskinannya yang sangat tinggi yaitu 14,84 persen pada tahun 2021 sebagai dampak pandemik COVID-19 yang melanda seluruh daerah tak terkecuali Kepulauan Mentawai. Penanganan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya sektor sosial saja, penyelesaiannya harus terintegrasi dan terpadu (lintas sektor) dengan basis data yang akurat dan tepat sasaran. Penuntasan

atau pengurangan kemiskinan menjadi tujuan dan cita-cita pembangunan daerah, program pembangunan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya beli dan mengurangi beban hidup masyarakat miskin menjadi pilihan terbaik dalam mengentaskan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Mentawai. Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah bahkan tidak atau belum menempuh jenjang sekolah sangat rentan terhadap gejolak sosial ekonomi yang menjadikannya miskin seperti pada pandemi COVID-19 yang telah melanda seluruh negara dan daerah tak terkecuali Kepulauan Mentawai. Masyarakat Mentawai dengan lapangan pekerjaan utama didominasi pada sektor pertanian yaitu 66,45 persen atau sebanyak 31.504 jiwa sangat rentan terhadap gejolak sosial ekonomi yang terjadi terutama pada pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas orang sehingga distribusi barang/orang menjadi terganggu dan beberapa mata pencarian perorangan, usaha mikro, kecil menjadi terhenti. Oleh karena itu, melalui program pemerintah dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat untuk menjaga daya beli adalah melalui pemberian jaring pengaman sosial. Untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 telah dikucurkan bantuan langsung tunai dari Dana Desa untuk 48.000 jiwa. Begitu juga dengan program dari pemerintah pusat melalui Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako) menyasar sekitar 4.161 kepala keluarga, Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak

3.835 kepala keluarga, Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS sebanyak 2.442 kepala keluarga, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 3.604 kepala keluarga dan jaminan kesehatan daerah baik JKN, Jamkesda dengan total sekitar 44.672 jiwa. Harapannya dengan jaring pengaman sosial ini maka dapat menjaga ketahanan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam menghadapi gejolak sosial ekonomi yang terjadi khususnya pada pandemi COVID-19.

Kemiskinan akan sangat dekat kaitannya dengan rendahnya partisipasi sekolah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu kemampuan dan kemauan mayarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya ketercukupan asupan gizi menjadi hal yang akan sulit dipenuhi jika masyarakat atau keluarga tersebut dalam keadaan miskin.

Prevalensi stunting sebagai indikator untuk melihat permasalahan kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sangat rentan terjadi pada masyaraka atau keluarga miskin, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Dengan capaian prevalensi stunting Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 sebesar 27,3 persen menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan menjadi isu strategis dalam pembangunan manusia kedepan.

4. Tingginya Kesenjangan Wilayah Baik di Dalam Pulau Maupun antar Daerah Juga Kesejangan Sosial Ekonomi Seperti Pendapatan, Gender, Pengangguran serta Sarana Infrastruktur Publik

Pertumbuhan ekonomi yang diartikan sebagai peningkatan produktivitas suatu daerah yang diyakini menjadi gambaran peningkatan ekonomi daerah ternyata tidak serta merta berbanding lurus dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi menurunnya angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, dan menurunnya disparitas pendapatan begitu juga semakin bekurangnya kesenjangan sosial lainnya seperti gender, kemiskinan antar wilayah dan PMKS.

Indikator untuk melihat perkembangan capaian kinerja pembangunan gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender. Nilai IPG di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 berada pada angka 89,81 (BPS, 2022) dan menempai posisi 18 diantara 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat di atas Kabupaten Dharmasraya. Nilai ini menunjukkan Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada pencapaian yang rendah dimana deviasi antara IPM Laki-laki dan IPM Perempuan > 10%. Namun di sisi lain, nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif sama dengan kondisi di Sumatera Barat dimana pada tahun 2021. Angka IDG Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai angka 47,36 (BPS, 2022) yang

menempati posisi 19 diantara 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Begitu juga dari perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di 4 pulau besar di Kepulauan Mentawai menunjukkan belum meratanya pembangunan jalan, persentasenya antara lain di Pulau Sipora sebesar 92,20 persen, di Pulau Pagai 63,49 persen, di Pulau Pagai Selatan sebesar 87,88 persen dan di Pulau Siberut sebesar 72,75 persen.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Namun, bukan berarti pertumbuhan ekonomi menjamin kesejahteraan msyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi sendiri adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan pembangunan diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat ke arah lebih baik. Ukuran keberhasilan pembangunan idealnya harus menyejahterakan masyarakat di wilayah tersebut, bukan segelintir kelompok atau orang saja.

5. Memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum terkelola dengan (Hulu-Hilir) baik itu Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata

Masyarakat Mentawai secara sosial budaya telah menjadikan alam sebagai bagian dari kehidupan. Hasil kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan ekonomi masyarakat berasal dari pertanian, perkebunan, perikanan tanpa ada pengolahan yang

menciptakan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Produk.komoditi pertanian belum dikembangkan secara terpadu/terintegrasi bauik di hulu, hilir hingga pada pemasarannya begitu juga belum pada *market oriented*, belum lagi jika dilihat dari kapasitas penyusul dan petani yang masih sangat tradusional. Indikator ini dapat dilihat dari kontribusi industri pengolahan dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar 2,84 persen.

Pengembangan sektor jasa terutama pariwisata juga belum menunjukkan pencapaian yang berarti. Dilihat dari sarana dan prasarana, infrastruktur pariwisata yang dibangun baik dari sisi amenitas, atraksi dan aksesibilitas masih sangat rendah. Begitu juga dengan *branding* dan promosi yang masih sangat terbatas, juga terdapat kelemahan dalam pengembangan konten, kreasi dan teknologi kreatif sebagai unsur pendukung pemasaran dan pengembangan pariwisata. Hal penting lainnya adalah kelembagaan pariwisata yang belum terbentuk untuk mengelola unit usaha pariwisata yang profesional yang memberikan kontribusi pada perekonomian daerah dan masyarakat. Indikator capaian ini dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi sektor jasa dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor jasa dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar 0,77 persen.

6. Daya saing yang rendah (SDM, Infrastruktur, Inovasi, Regulasi, Tata Kelola Pemerintah, Stabilitas Sosial Ekonomi, Litbang, Tenaga Kerja Terampil, Telekomunikasi)

Peningkatan daya saing daerah tidak hanya menyangkut pembenahan infrastruktur, akan tetapi juga pembenahan pada sumber daya manusia, kelembagaan dan perilaku masyarakat dalam merespon program dan kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu peningkatan daya saing daerah perlu dirumuskan sedemikian rupa dengan mengintegrasikan dengan pembangunan bidang-bidang lainya. Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi, yang dicirikan persaingan bebas yang bersifat global, dimana suatu masyarakat hanya akan eksis atau bertahan apabila mereka mempunyai daya saing tinggi. Dilihat dari indikator makro terhadap pencapaian kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, reformasi birokrasi, perekonomian daerah, tenaga kerja terampil, kapasitas inovasi, kesiapan teknologi masih sangat rendah.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan capaian kinerja yang kemudian dilakukan telaah lebih mendalam dengan perangkat daerah pengampu urusan, berdasarkan capaian tersebut menjadi catatan terhadap permasalahan yang akan ditarik dan didentifikasi pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan selama 4 tahun kedepan.

2.3.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Rata lama sekolah yang masih sangat rendah.
2) Masih rendahnya capaian SPM urusan pendidikan.
3) Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah anak usia dini.
4) Masih rendahnya kualitas/mutu tenaga pendidik (sertifikasi).
5) Masih rendahya kualitas peserta didik (belum pernah juara tingkat propinsi bahkan nasional).
6) Belum adanya kurikulum muatan lokal sebagai pengenalan dan pengembangan budaya Menyawai.
7) Belum ada konsep pendidikan berasrama dalam upaya menjawab kondisi geografis Kepulauan Mentawai yang tersebar dengan akses layanan pendidikan yang terbatas.

8) Belum memadainya kualitas dan ketersediaan sarana layanan dan fasilitas pendidikan.
9) Masih terdapatnya lembaga pendidikan yang belum terakreditasi maupun masih terakreditasi B
10) Masih lambatnya transformasi digital dalam implementasi proses belajar mengajar dan administrasi pendidikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih tingginya kasus kematian ibu melahirkan.
2) Masih adanya kasus angka kematian bayi dan angka kematian balita.
3) Masih tingginya angka prevalensi stunting.
4) Belum adanya rumah sakit disetiap pulau besar (Siberut, Sikakap) sebagai bagian dari sistem kesehatan daerah.
5) Masih terbatasnya tenaga dokter umum, dokter spesialis dan alat-alat kesehatan hingga ke pusat-pusat layanan kesehatan di desa (Poskesdes).
6) Belum tercapainya (100 persen) Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan.
7) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kasus penyakit menular dan tidak menular.
8) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya kondisi jalan mantap (dengan spesifikasi beton/aspal)
2) Belum terbukanya akses darat (Jalan) Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan.
3) Masih rendahnya panjang jalan lingkungan yang dibangun.
4) Masih rendahnya panjang jalan koridor/jalan penghubung antar desa yang dibangun.
5) Masih rendahnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak.
6) Masih rendahnya cakupan layanan air bersih
7) Belum adanya infrastruktur persampahan (TPA, TPS)
8) Belum optimalnya pengendalian abrasi pantai pada daerah yang berada pada kawasan pantai.
9) Masih banyaknya target pada urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang belum tercapai khususnya capaian SPM.
10) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum adanya dasar hukum yang kuat untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran (RRTR yang belum dibuat dan dilegalisasi).

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum adanya adanya desa yang memiliki Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
2) Masih rendahnya kawasan permukiman yang dilengkapi dengan PSU.
3) Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh.
4) Masih banyaknya permukiman potensi bencana alam belum di relokasi.
5) Belum adanya hamparan lahan/tanah yang dikuasai pemerintah untuk kepentingan pembangunan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2) Masih belum adanya strategi mitigasi bencana kebakaran, serta minimnya sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran.
3) Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan masih terjadinya gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum.

4) Masih tingginya indeks resiko bencana Kepulauan Mentawai.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih maksimalnya pengelolaan dan updating data DTKS.
2) Masih rendahnya komitmen perangkat daearh dan stakeholder dalam penggunaan data DTKS.
3) Kurangnya penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana.
4) Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin maupun rentan melalui bantuan sosial yang tepat sasaran

2.3.2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengembangan dan pendampingan kewirausahaan (*entrepreneurship*) mulai dari hulunya pengembangan dan peningkatan kapasitas sampai pada hilirnya yaitu bisa mengembangkan usaha atau berwirausaha (mandiri).
2) Belum adanya rencana pembangunan tenaga kerja kabupaten.
3) Masih rendahnya kompetensi/skill tenaga kerja.

4) Masih terbatasnya akses pencari kerja terhadap lapangan pekerjaan.
5) Belum adanya pendampingan terhadap akses tenaga kerja dan enterprenuer ke dunia usaha, permodalan dan pasar.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2) Masih rendahnya sosialisasi dan pengawasan terhadap perlindungan anak.
3) Belumnya optimalnya pemenuhan hak-hak anak
4) Kurangnya keberdayaan ekonomi perempuan meliputi wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangakan usaha.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih tingginya ketergantungan pangan dari luar Mentawai.
2) Masih rentannya ketahanan pangan daerah.
3) Masih perlu ditingkatkannya penganekaragaman pangan dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2) Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan yang rendah masih di iukota kabupaten (tuapejat sekitarnya), sarana dan prasaraan yang belum memadai dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah.
3) Masih terbatasnya aparatur dalam melakukan pengawasan, pengujian dan penegakan lingkungan hidup.
4) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Andministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya penggunaan data kependudukan untuk perumusan kebijakan daerah.
2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kematian, Akta Perceraian dan dokumen kependudukan lainnya.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat.
2) Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Lembaga Desadalam tata kelola Pemerintahan Desa.
3) Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi desa (BUMDes) dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerjasama desa.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait informasi kependudukan.
2) Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
3) Masih kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga.
4) Masih Kurangnya sosialisasi terkait kualitas dan ketahanan keluarga.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan seperti di pelabuhan, PJU, rambu-rambu.
2) Belum terbangunnya 5 pelabuhan penyeberangan sebagai simpul konektivitas sistem transportasi daerah.
3) Belum optmialnya pengelolaan pelayaran dalam wilayah kabupaten (antar pulau).
4) Masih terbatasnya jalur/trayek pelayaran menuju Kepulauan Mentawai.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum adanya grand design pengembangan sistem informatika daerah yang mendukung penerapan SPBE.
2) Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.
3) Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet
4) Belum optimalnya pelayanan, publikasi dan penyebarluasan informasi publik berbasis elektronik.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih banyaknya lembaga koperasi yang tidak aktif.
2) Minimnya diversifikasi usaha koperasi.
3) Minimnya pelaku usaha mikro yang tumbuh menjadi wirausaha mandiri.

4) Masih rendahnya pendampingan kewirausahaan dan kepada pelaku usaha mikro.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan regulasi tentang Pemberian Kemudahan dan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal.
2) Sulitnya mengurus kerjasama atau pembebasan lahan untuk investasi disebabkan lahan berpotensi investasi pada umumnya adalah tanah adat/ulayat.
3) Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah.
4) Belum lengkapnya data kajian terkait potensi dan peluang investasi.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya SDM keolahagaan.
2) Terbatasnya ruang kreatif untuk menumbuhkan talenta pemuda pada berbagai bidang.
3) Belum optimalnya peran dan fungsi Organisasi Kepemudaan.
4) Masih minimnya event yang bermuatan kompetisi kepemudaan dan keolahragaan.
5) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga.

6) Masih rendahnya pembinaan terhadap bibit atlet potensial dan pembinaan bagi atlet.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum defenitifnya SOTK yang mengurusi statistik daerah.
2) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah.
3) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
4) Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan sebagai layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah.
2) Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah.
3) Belum adanya SDM persandian yang kompeten dalam memastikan keamanan sistem infirmasi pemerintah daerah.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Rendahnya pengenalan dan pemahaman budaya daerah oleh kalangan muda.
2) Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan sehingga belum terintegrasi dengan sektor lainnya.
3) Belum terselenggaranya event atraksi kebudayaan secara kontiniu.
4) Masih sedikitnya pengakuan dan penetapan cagar budaya.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Rendahnya indeks kegemaran membaca masyarakat.
2) Rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
3) belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat (Pengembangan perpustakaan berbasis digital/e-Book), pustaka keliling

q. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah.
2) Terbatasnya tempat penyimpanan arsip, pengelola dan keamanan penyimpanan arsip.
3) Keterbatasan ketersediaan SDM pengelola kearsipan.

2.3.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Urusan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap.
2) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya.
3) Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan usaha kelompok (KUB, kelompok nelayan).
4) Terbatatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan (TPI dan pabrik es).
5) Masih rendahnya pendampingan bagi kelompok nelayanan tangkap dan budidaya serta pendampingan pada industri pengolahan ikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optmalnya pengembangan destinasi prioritas 3M1K.
2) Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan desa wisata.
3) Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyelenggarakan even/festival.
4) Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien.

5) Belum tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif menunjang pariwisata.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.
2) Belum optimalnya peningkatan produktifitas produksi pertanian.
3) Belum optimalnya pendampingan petanin dan kelembagaan tani (kelompok tani).
4) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pertanian (jalan pertanian, irigasi), sarana prasarana, lahan, pupuk dan air.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih cukup tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
2) Belum optimalnya penggunaan pasar sebagai sarana perdagangan.
3) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan.
4) Minimnya SDM penera alat UTTP.
5) Belum Optimalnya Pengawasan Barang Beredar.

6) Rendahnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar produk dalam negeri

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana sentra IKM (revitalisasi IKM Taraet).
3) Belum optimalnya keterkaitan sektor pertanian dan perikanan dengan sektor industri pengolahan dan sektor industri lainnya.
4) Belum optimalnya pendampingan calon dan pelaku industri mikro dan kecil dalam hal bisnis proses, sertifikasi, manajemen mutu, akses pasar, permodalan.

2.3.2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang

a. Unsur Penunjang Perencanaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Regulasi pedoman penyusunan perencanaan terbit setelah RKPD mau ditetapkan sehingga seringkali tidak tepat waktu dan membutuhkan usaha lagi untuk menyelaraskan.
2) Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah;

3) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

b. Unsur Penunjang Keuangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.
2) Masih rendahnya kontribusi pendapatan daerah diluar pajak dan retribusi daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.
3) Belum teradministrasinya aset dengan baik.

c. Unsur Penunjang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN.
2) Sistem penilaian kinerja ASN yang belum akurat.
3) Rendahnya kualitas dan produktifitas kerja ASN.
4) Belum terlaksana sepenuhnya merit sistem.
5) Masih terdapatnya ASN yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi dibidangnya.
6) Masih belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan.
7) Belum dilakukannya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan kepada ASN.

d. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum tersedianya tenaga/ SDM peneliti.
2) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan.
3) Masih kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4) Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam pemanfaatan kelitbangan dan berinovasi.

e. Unsur Penunjang Pengawasan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Perlunya peningkatan kualitas SDM auditor melalui pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian temuan yang ada serta peningkatan sosialisasi kepada penyelenggaraan negara terkait tertib administrasi keuangan.
2) Masih rendahnya penguatan tata kelola pemerintah melalui pendampingan reformasi birokrasi, penerapan ZI, WBK/WBBM, SAKIP dan berbagai penilaian tata kelola pemerintah lainnya.
3) Masih rendahnya kapabilitas APIP dan maturitas SPIP.
4) Belum optimalnya peran dan layanan APIP pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah

2.3.3 Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak. Seluruh jenis pelayanan pasar dapat terlaksana dengan baik dengan pencapaian setiap Indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.75
Pencapaian SPM
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 persen	108 persen	108 persen
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat setiap tahun	<50	Dibawah kompetensi minimum
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 persen	103 persen	103 persen
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat setiap tahun	<50	Dibawah kompetensi minimum
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 persen	19,05 persen	19,05 persen
2	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	98,8 persen	98,8 persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	92,9 persen	92,9 persen
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	94,6 persen	94,6 persen
		Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	120,9 persen	120,9 persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	61 persen	61 persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	67 persen	67 persen
		Pelayanan Kesehatan	Jumlah warga negara usia lanjut yang	100 persen	322,2 persen	322,2 persen

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Pada Usia Lanjut	mendapatkan pelayanan kesehatan			
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	28,8 persen	28,8 persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	10,9 persen	10,9 persen
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara dengan terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	88 persen	88 persen
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah warga negara dengan risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	100 persen	100 persen	0 (tidak ada) kasus
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 persen	55,46 persen	55,46 persen
		Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100 persen	71,05 persen	71,05 persen
4	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 persen	65 persen	65 persen
		Fasilitasi Penyediaan Rumah yang	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program	100 persen	100 persen	Tidak ada program relokasi

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni			akibat program pemerintah
5	Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/ kota	100 persen	100 persen	100 persen
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	100 persen	100 persen	100 persen
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaa n Terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	100 persen	100 persen
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	100 persen	100 persen
	Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100 persen	100 persen	0 (tidak ada) kasus
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabiliatsi sosial di Luar Panti	100 persen	100 persen	0 (tidak ada) kasus
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100 persen	100 persen	0 (tidak ada) kasus
		Rehablitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 persen	100 persen	0 (tidak ada) kasus

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100 persen	100 persen	0 (tidak ada) kasus

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,2-5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi ditengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru COVID-19, permanent scar yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok dan krisis energi.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat dan dunia usaha yang kemudian akan dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Komponen konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 5,0-5,2 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan,perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diperkirakan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi dan alat kesehatan) serta peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Pemulihan ekonomi yang kuat disertai dengan agenda reformasi struktural pada tahun 2022 diperkirakan memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2022 tumbuh sebesar 5,01 persen, hal ini menunjukkan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I tahun 2021 pada angka minus 0,74 persen. Kondisi perekonomian masyarakat diyakini akan mendekati kondisi normal pada tahun 2022 dan menjadi pondasi kuat untuk melakukan akselerasi pencapaian target pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 menekankan pada peningkatan produktivitas untuk

transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema RKP Tahun 2023 disusun sebagai respon terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021 dan triwulan I tahun 2022. Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat tergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial dalam jangka panjang. Selain itu, pemerintah saat ini perlu meninggalkan *legacy* pembangunan sebagai landasan bagi pemerintahan berikutnya untuk lepas landas sehingga penciptaan lapangan kerja, penciptaan efek pengganda dan peningkatan produktivitas perekonomian jangka menengah-panjang tetap berkelanjutan. Memperhatikan beberapa hal tersebut, maka tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema pembangunan tersebut menekankan pada pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job* serta percepatan pembangunan pembangunan infastruktur dasar meliputi penyediaan air bersih, dan sanitasi yang layak.

Kebijakan ekonomi daerah sangat dipengaruhi kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah. Begitu juga untuk kebijakan pembangunan nasional 2023 yang menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dalam upaya transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi bagian penting Pemeraintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam merumuskan strategi pembangunan untuk tahun 2023. Percepatan pemulihan ekonomi menjadi upaya yang dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi daerah menjadi fokus pembangunan guna mendorong terbukanya lapangan pekerjaan, terciptanya wirausaha/UMK dan terwujudnya hilirisasi komoditi unggulan di Kepulauan Mentawai.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional

Pembangunan ekonomi tahun 2023 akan dilaksanakan dalam mendukung proses transformasi ekonomi setelah dua tahun terakhir dihadapkan pada upaya pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Tahun 2023 merupakan momentum untuk menciptakan horizon baru pembangunan dengan menekankan pada strategi mewujudkan sumber daya yang berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi perekonomian domestik, dan pemindahan IKN. Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3-5,9 persen pada tahun 2023. tingkat pertumbuhan tersebut akan meningkatkan nilai GNI per kapita menjadi US$ 4.720-4.840 pada tahun 2023, dan mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori *upper-middle income countries*. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0-4,0 (*yoy*), dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada 13.500-15.000 per US$.

Arah kebijakan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah panjang serta

menghadapi tantangan yang ada pasca pandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optmialisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan sehingga akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, 2023

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT (%)	5,3-6,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-8,5
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31-73,49
5	Rasio Gini (nilai)	0,375-0,378
6	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	106-107
7	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	103-105
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02

Sumber: Ranwal RKP 2023

3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Propinsi Sumatera Barat

Pemulihan ekonomi tahun 2021 terkendala masih merebaknya virus COVID-19 varian delta dan pada tahun 2022 menyebarnya varian omicron. Pelaksanaan vaksinasi yang intens dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat mengendalikan penyebaran dan menurunnya kasus kematian sehingga memberika darapan pada aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi wilayah sumatera secara agregat diperkirakan tumbuh sebesar 5,2-5,7 persen dengan memacu pertumbuhan sektor industri khususnya hilirisasi industri

berbasis komoditas unggulan dan pengembangan sektor pariwisata melalui pengembangan kawasan pariwisata berdaya saing internasional, mempercepat pemerataan pembangunan wilayah pesisir dan daerah 3T.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,60	3,29	3,40	4,57
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	30,64	31,35	32,04	33,12
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	43,75	45,29	48,29	50,6
4	TPT (%)	6,88	6,52	6,25	5,97
5	IPM - Usia Harapan Hidup (Tahun) - Harapan Lama Sekolah (Tahun) - Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) - Pengeluaran per Kapita (Rp.Ribu)	72,38 69,47 14,02 8,99 10.733	72,65 69,59 14,09 9,07 10.790	72,74 69,80 14,05 9,18 10.916	73,18 69,98 14,06 9,28 11.108
6	Kemiskinan (%)	6,56	6,63	5,70	5,37
7	Jumlah Penduduk Miskin	364,79	370,67	356,45	353,69
8	Gini Rasio	0,301	0,306	0,298	0,296

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah yang termuat pada RPJMD 2021-2026 yaitu difokuskan peningkatan produktivitas sehingga memberikan nilai tambah sektor strategis daerah yaitu pada sektor pertanian, perkebunan pertanian dengan meningkatkan kontribusi sebesar 5,86 persen, sektor industri pengolahan/manufaktur dengan meningkatkan kontribusi sebesar 12,46 persen serta sektor pariwisata dengan meningkatkan kontribusi sebesar 5,80 persen.

3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah

Pemulihan ekonomi yang dapat dilihat dari semakin membaiknya indikator ekonomi makro secara nasional dan regional yaitu pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2022 yang positif (Nasional = 5,01 persen dan Propinsi Sumatera Barat = 3,64 persen) menunjukkan semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 dengan berbagai intervensi kebijakan dan terakhir adalah dengan pelaksanaan vaksinasi yang secara masif dilaksanakan. Kebijakan pembangunan tahun 2023 yang fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting bagi daerah dalam pemulihan ekonomi selama terjadinya pandemi COVID-19. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengotimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai terkoreksi cukup dalam di tahun 2021 sebagai dampak COVID-19. sektor-sektor yang diprediksi produktif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap totalitas produktivitas daerah belum maksimal dalam membangun postur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, Namun tahun 2022 menjadi tahun akselerasi pertumbuhan ekonomi dimana aktivitasi sosial ekonomi

masyarakat sudah berjalan pulih seiring dengan semakin taat dan patuhnya masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupan normal baru terutama dengan melakukan vaksinasi.

Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh keadaan, kondisi serta kebijakan ekonomi nasional sebagai dampak penyebaran COVID-19. Muncul dan menyebarnya varian delta COVID-19 menjadi kondisi yang memberikan dampak bagi kondisi ekonomi masyarakat, dimulainya kehidupan normal baru sebagai adaptasi kebiasaan atas pandemi COVID-19 menjadi angin segar mulai berangsur pulihnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Gambar 3.1
Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, 2017-2023

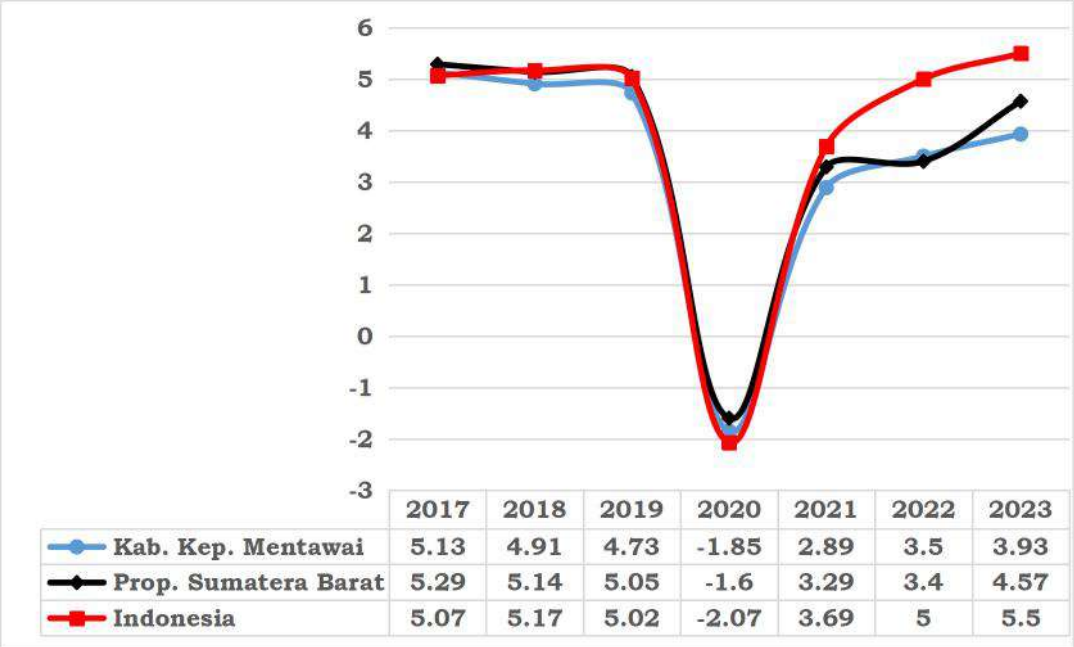

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kep. Mentawai	5.13	4.91	4.73	-1.85	2.89	3.5	3.93
Prop. Sumatera Barat	5.29	5.14	5.05	-1.6	3.29	3.4	4.57
Indonesia	5.07	5.17	5.02	-2.07	3.69	5	5.5

Gambar 3.1 menunjukkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 sebesar 2,89 persen.

Capaian ini sudah sangat baik mengingat kondisi ekonomi masih dibayang-bayangi pandemi COVID-19 baik secara nasional hingga ke daerah, terutama jika dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2020 pada posisi minus 1,85 persen. Begitu juga dengan capaian pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2021 telah bertumbuh positif yaitu pada angka 3,29 persen untuk Propinsi Sumatera Barat dan Nasional sebesar 3,69 persen.

Pengendalian penyebaran COVID-19 yang semakin baik dan pelaksanaan vaksinasi yang gencar dilaksanakan menjadi asumsi membaiknya sektor riel dan aktivitas sosial masyarakat. Akselerasi pertumbuhan ekonomi bertumpu pada kebijakan ekonomi yang mulai tampak pada tahun 2022 dan selanjutnya pada tahun 2023 sebagai kehidupan normal dan pondasi peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dan tahun 2023 diproyeksikan bertumbuh positif seiring dengan terkendalinya pandemi COVID-19 baik secara nasional juga di daerah. Tahun 2023 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tumbuh sebesar 3,93 persen, proyeksi ini didasari potret pertumbuhan ekonomi triwulan I di Propinsi Sumatera Barat sebesar 3,64 persen dan nasional sebesar 5,01 persen dengan prediksi tahun 2023 Propinsi Sumatera Barat sebesar 4,57 persen dan nasional sebesar 5,5 persen.

Gambar 3.2
Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, 2017-2023

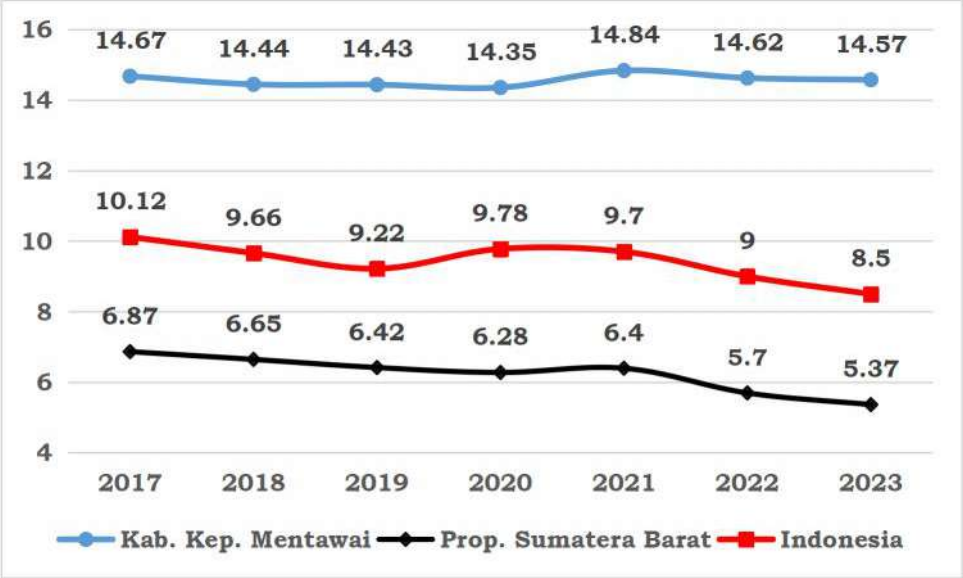

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara tren penurunan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab semakin melebarnya usaha perbaikan ekonomi masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat kemiksinan yang meningkat di tahun 2021 yaitu sebesar 14,84 persen. Arah pembangunan nasional yang menjadi perhatian bagi daerah akan menekankan integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Semakin membaiknya kondisi ekonomi dan terkendalinya penyebaran COVID-19 mulai

tahun 2022 dan 2023 membuka harapan menurunnya angka kemiskinan daerah yang diperkirakan turun pada tahun 2023, begitu juga dengan capaiannya di Propinsi Sumatera Barat dan nasional. Untuk tahun 2023 diproyeksikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,57 persen dan di Propinsi Sumatera Barat sebesar 5,37 persen dan Nasional sebesar 8,5 persen.

Secara umum, gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2023

Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	53,18	54,8	56,2	58,47
PDRB Per Kapita (Harga Konstan)	Rp (dalam Juta)	33,83	34,41	35,02	35,38
IPM	indeks	61,09	61,35	61,49	61,98
Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,85	2,89	3,5	3,93
Tingkat Kemiskinan	%	14,35	14,84	14,62	14,67
Tingkat Pengangguran	%	3,98	2,79	2,77	2,75
Gini Rasio	%	0,273	0,321	0,321	0,320

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Pengendalian terhadap penyebaran COVID-19 menjadi salah satu faktor utama dalam percepatan capaian pertumbuhan

ekonomi daerah, Tahun 2023 menjadi kunci mengejar pencapaian pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Potensi varian baru COVID-19, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan dan juga potensi isu global yang berkembang hingga saat ini terutama potensi perang rusia dan NATO. Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi dalam pembangunan tahun 2022 dan 2023 adalah:

1) Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Hal ini akan berpengaruh pada kebijakan dana transfer ke daerah yang akan mengalami penyesuaian yang ketat sedangkan sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan masih sangat terbatas.
2) Kemampuan daerah dalam meredam dan mengendalikan penyebaran COVID-19 sehingga dapat memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kepastian berusaha/investasi daerah.
3) Optimalisasi pengembangan IPTEK dan inovasi dalam mengikuti perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat.
4) Potensi pertanian, perkebunan dan perikanan yang melimpah tetapi belum memiliki nilai tambah sehingga perlu integrasi

pengembangan komoditi unggulan hulu hilir hingga pada pemasarannya.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan ekonomi daerah sangat dipengaruhi kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah. Begitu juga untuk kebijakan pembangunan nasional 2022-2023 yang menitikberatkan pada pemulihan ekonomi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan menjadi pijakan untuk reformasi struktural sebagai bentuk transfomasi ekonomi nasional dan percepatan peningaktan produktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan keuangan nasional juga memperhatikan kondisi yang tengah terjadi secara nasional dan global, namun tetap bertumpu pada keadaan fiskal yang sehat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju.

Melihat perkembangan nilai DOF Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa sedang terjadi perkembangan ekonomi yang menurun. Demikian, tingkat ketergantungan Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi dan menunjukkan tren negatif dalam aspek kemandirian. Kondisi seperti ini sebenarnya masih bisa dianggap wajar khususnya bagi daerah yang sedang berkembang yang membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan daerah.

Perkembangan DOFD Kabupaten Kepulauan Mentawai periode tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4
Derajat Otonomi Fiskal Daerah, 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	DOFD (%)	Pertumbuhan DOFD (%)
2017	67.862.676.598,42	917.793.849.299,42	7,39	
2018	45.358.184.273,56	913.545.022.458,56	4,97	(32,85)
2019	40.203.645.065,98	1.011.417.211.764,98	3,97	(19,94)
2020	34.905.673.555,51	832.886.813.996,51	4,19	5,43
2021	31.638.013.029,37	830.153.085.297,37	3,81	(9,06)
Rata-Rata			4,87	(14,11)

Sumber: Laporan Keuangan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2017-2021

Pada Tabel 3.4 tampak bahwa Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode tahun 2017-2021 rata-rata 4,87 persen. Secara keseluruhan, DOFD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang cenderung menurun dari tahun 2017 hingga 2021. DOFD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2017 sebesar 7,39 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 4,97 persen dan menurun lagi hingga tahun 2021 menjadi sebesar 3,81 persen.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Penguatan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui revisi peraturan daerah dan peraturan turunannya (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan beberapa peraturan daerah terkait dengan retribusi (Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda

Nomor 7 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 8 tentang Retribusi Tenpat Rekreasi dan Olahraga) sehingga lebih relevan, akurat dan menyesuaikan kebutuhan daerah.

2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi sistem informasi *online* bekerja sama dengan Bank Nagari, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan.
3. Melakukan pendataan obyek dan wajib pajak yang saat ini belum terdata, dan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan secara lebih detail, seperti: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Keberadaan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi wajib pajak daerah yang ada.
4. Melakukan koordinasi secara rutin lintas OPD yang terkait/ memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang

cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian *reward and punishment.*

6. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif, begitu juga dengan percepatan pengelolaan RSUD melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat memberikan kontribusi pendapatan dari layanan kesehatan.
7. Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	34.905.673.555	31.638.013.029	39.795.085.597	35.102.072.940	39.260.058.823
Pajak Daerah	3.531.794.196	3.860.497.217	6.774.251.385	6.774.251.835	7.112.963.954
Retribusi Daerah	5.976.710.358	3.033.172.955	8.976.710.358	6.283.697.251	9.425.545.876
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.591.521.757	10.684.123.854	11.589.123.854	11.589.123.854	11.927.836.423
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.805.647.244	14.060.219.003	12.455.000.000	10.455.000.000	10.793.712.569
Pendapatan Transfer	716.767.569.335	775.266.457.268	797.922.597.285	799.823.382.131	801.881.142.782
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	651.902.981.143	682.711.606.781	721.547.682.000	728.141.341.769	729.745.316.319
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.981.503.128	22.052.156.406	14.896.719.000	15.045.686.190	15.196.143.052
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	556.457.541.000	548.987.977.000	549.794.757.000	550.344.551.757	550.894.896.309
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.701.316.885	69.985.666.825	82.004.624.000	82.824.670.240	83.652.916.942
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	32.762.620.130	41.685.806.550	74.851.582.000	74.926.433.582	75.001.360.016
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000
DID	-	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
Dana Desa	57.229.421.106	60.246.587.200	44.929.317.000	45.378.610.170	45.832.396.272
Dana Desa	57.229.421.106	60.246.587.200	44.929.317.000	45.378.610.170	45.832.396.272
Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.303.430.192	32.308.263.287	31.445.598.285	26.303.430.192	26.303.430.192
Pendapatan Bagi Hasil	29.303.430.192	32.308.263.287	31.445.598.285	26.303.430.192	26.303.430.192
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.303.430.192	32.308.263.287	31.445.598.285	26.303.430.192	26.303.430.192
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	81.213.571.106	23.248.615.000	6.817.957.663	6.817.957.663	6.817.957.663
Hibah		23.248.615.000	-	-	-
Dana Darurat		-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan	81.213.571.106	-	6.817.957.663	6.817.957.663	6.817.957.663
PENDAPATAN	832.886.813.996	830.153.085.297	844.535.640.545	841.743.412.734	847.959.159.268

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

1. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
2. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
3. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
4. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai program prioritas pembangunan daerah diantaranya Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas), Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat), Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap), Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih), Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing), Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas), Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja), Kedaulatan Energi (Mentawai Terang), Pembangunan

Kebudayaan (Mentawai Beradab), Penataan Birokrasi (Mentawai Prima).

5. Melakukan koordinasi (kontrol) secara rutin dengan seluruh OPD dan *stakeholder* untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah (efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja).

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
Belanja Operasi	539.416.327.902	544.000.215.852	621.907.626.848	605.933.317.573	571.351.056.492
Belanja Pegawai	247.582.508.950	284.566.995.633	325.003.701.706	334.308.699.947	317.593.264.949
Belanja Barang dan Jasa	280.774.442.528	243.479.793.619	273.144.346.431	252.337.706.044	231.311.197.198
Belanja Bunga		-	-	-	-
Belanja Subsidi	6.734.707.000	9.585.794.613	11.000.000.000	6.000.000.000	11.000.000.000
Belanja Hibah	3.853.184.836	5.491.419.256	11.262.328.711	12.388.561.582	10.530.277.345
Belanja Bantuan Sosial	471.484.588	876.212.731	1.497.250.000	898.350.000	916.317.000
Belanja Modal	142.003.462.707	164.639.582.130	157.012.401.692	157.012.401.692	183.940.111.849
Belanja Modal Tanah	-	-	50.000.000	50.000.000	2.500.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.871.620.930	25.876.770.459	25.527.441.782	25.527.441.782	25.054.001.289
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.557.717.902	21.708.856.761	40.977.132.611	40.977.132.611	43.886.509.026

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.035.794.152	115.471.089.584	87.867.827.299	87.867.827.299	111.152.801.533
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.538.329.723	1.582.865.326	2.590.000.000	2.590.000.000	1.346.800.000
Belanja Tidak Terduga	24.195.818.997	1.587.597.109	2.220.398.523	12.485.992.060	1.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	24.195.818.997	1.587.597.109	2.220.398.523	12.485.992.060	1.000.000.000
Belanja Transfer	115.966.872.197	119.166.749.510	103.473.560.773	103.473.560.773	104.016.596.381
Belanja Bagi Hasil	1.563.200.931	2.446.929.619	1.575.096.173	1.575.096.173	1.575.096.173
Belanja Bantuan Keuangan	114.403.671.266	116.719.819.891	101.898.464.600	101.898.464.600	102.441.500.208
BELANJA DAERAH	705.615.609.606	829.394.144.601	884.613.987.836	878.905.272.098	860.307.764.721

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya semakin menurun yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah.
2. SILPA tahun berjalan dijadikan sebagai pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan anggaran (surplus/defisit). Apabila SILPA tahun berjalan yang dihasilkan positif/surpuls, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan untuk menambah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan. Sedangkan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif, maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Poyeksi/Target pada Tahun	
	2021	2021	2022	2023	2024
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.950.726.933	32.987.630.424	42.078.347.291	37.161.859.364	15.348.605.453
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.950.726.933	32.987.630.424	42.078.347.291	37.161.859.364	15.348.605.453
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.950.726.933	32.987.630.424	42.078.347.291	37.161.859.364	15.348.605.453
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	2.000.000.000	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	-	-	2.000.000.000	-	3.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Poyeksi/Target pada Tahun	
	2021	2021	2022	2023	2024
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	2.000.000.000	-	3.000.000.000
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	29.950.726.933	32.987.630.424	40.078.347.291	37.161.859.364	12.348.605.453

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tahun 2023 menjadi tahun akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional untuk mendorong transformasi ekonomi. Stabilitas ekonomi makro tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi yang secara masif terus dilakukan pada tahun 2020 diyakini dapat membentuk kekebalan komunitas (*herd immunity*) sehingga mempermudah pemerintah dalam mempersiapkan transisi ekonomi nasional.

Sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka (tahun 2045) serta mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden mengamanatkan penyusunan visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Amanat ini ditujukan untuk meneguhkan kembali tujuan pembangunan yang tercentuk pada pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi momentum awal upaya pencapaian visi Indonesia 2045 melalui pilar visi Indonesia Maju 2045 antara lain; Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemerataan ketahanan nasional dan tata kelola

pemerintahan. Pada visi Indonesia 2045 ditetapkan cita-cita untuk lepas dari jebakan *middle income trap* dan menjadi negara maju atau *high income country* sebelum tahun 2045.

Gambar 4.1
Sasaran PDB per Kapita menuju *High Income Country* Pasca COVID-19

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Sebagai wujud operasional RPJMN Tahun 2020-2024 ditetapkan 7 (tujuh) aganda pembangunan yang meliputi (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan: (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7)

Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tantangan besar masih dihadapi Indonesia dalam menjaga momentum dan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi antara lain masih terdapatnya *scars* akibat krisis COVID-19 yaitu *learning loss*, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara optimal. Oleh karena itu, sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Nasional, 2023

No	Indikator Sasaran	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT (%)	5,3-6,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-8,5
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31-73,49
5	Rasio Gini (nilai)	0,375-0,378
6	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	106-107
7	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	103-105
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02

Sumber: Ranwal RKP 2023

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2023

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan Propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD Propinsi Sumatera Barat mengemban 7 (tujuh) misi dijabarkan menjadi 7 (tujuh) tujuan dan 27 sasaran, yaitu :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (i) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (ii) menurunnya prevalensi stunting, (iii) meningkatnya kualitas Pendidikan, dan (iv) meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK).

Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari : (i) meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK, (ii) meningkatnya budaya Literasi, dan (iii)

meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Misi ketiga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sasaran yang ingin dicapai, yaitu : (i) meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan), (iii) meningkatnya pendapatan petani hutan.

Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.

Misi keempat ini bertujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Terdapat 6 Sasaran yang akan dicapai pada misi ini, yaitu : (i) Sumatera Barat Sebagai pusat perdagangan; (ii) terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera, (iii) terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor, (iv) meningkatnya pertumbuhan investasi, (v) Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah, dan (vi) meningkatnya peran ekonomi digital.

Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.

Tujuan yang diupayakan dari misi 5 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran dari misi ini meliputi : (i) meningkatnya kontribusi

pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat, (ii) meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat.

Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan yang akan dicapai dari misi 6 yaitu terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata. Misi ini diuraikan menjadi 5 sasaran,, yaitu : (i) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, (ii) meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, (iii) mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, (iv) meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, (vi) meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.

Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Misi ketujuh ini memiliki tujuan berupa terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Selanjutnya dirinci 3 sasaran yaitu : (i) terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, (ii) meningkatnya kapabilitas birokrasi, (iii) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sasaran pembangunan tahun 2023 selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah yang termuat pada RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu difokuskan peningkatan produktivitas sehingga memberikan nilai tambah sektor strategis daerah yaitu pada sektor pertanian, perkebunan pertanian dengan

meningkatkan kontribusi sebesar 5.86 persen, sektor industri pengolahan/manufaktur dengan meningkatkan kontribusi sebesar 12,46 persen serta sektor pariwisata dengan meningkatkan kontribusi sebesar 5,80 persen.

Pertumbuhan ekonomi wilayah sumatera secara agregat diperkirakan tumbuh sebesar 5,2-5,7 persen dengan memacu pertumbuhan sektor industri khususnya hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan dan pengembangan sektor pariwisata melalui pengembangan kawasan pariwisata berdaya saing internasional, mempercepat pemerataan pembangunan wilayah pesisir dan daerah 3T.

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	
		2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,40	4,65
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,04	33,58
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	48,29	48,86
4	TPT (%)	6,25	5,72
5	IPM - Usia Harapan Hidup (Tahun) - Harapan Lama Sekolah (Tahun) - Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) - Pengeluaran per Kapita (Rp.Ribu)	72,74 69,80 14,05 9,18 10.916	73,46 69,97 14,43 9,25 10.997
6	Kemiskinan (%)	5,70	5,37
7	Jumlah Penduduk Miskin	356,45	306,71
8	Gini Rasio	0,298	0,296

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 dan menjadi rentang perencanaan teknokratik dalam menjembatani perencanaan pembangunan nantinya setelah kepala daerah terpilih melalui pilkada serentak di tahun 2024.

Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 merupakan jabaran dari tujuan dan sasaran pada RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023

Tujuan		Sasaran	
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	1.1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan
		1.2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan
		1.3	Meningkatnya keterampilan hidup (*life skill*) sumber daya manusia
2	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	2.1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas
		2.2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air
		2.3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah

Tujuan		Sasaran	
		2.4	Meningkatnya penyelenggaraan transportasi
		2.5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika
		2.6	Meningkatkan ratio elektrifikasi daerah
3	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	3.1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni
		3.2	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
		3.3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana
4	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	4.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat
		4.2	Meningkatkan kesempatan kerja
		4.3	Terkendalinya inflasi daerah
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	5.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		5.2	Meningkatnya kapabilitas pemerintahan
		5.3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel
6	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa	6.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya
		6.2	Meningkatnya budaya literasi
7	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	7.1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang ramah anak dan gender

Kebijakan pembangunan tahun 2023 yang fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting bagi daerah dalam pemulihan ekonomi selama terjadinya pandemi COVID-19. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengotimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah.

Secara umum, gambaran sasaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Proyeksi	
		Tahun 2022	Tahun 2023
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	56,2	58,47
PDRB Per Kapita (Harga Konstan)	Rp (dalam Juta)	35,02	35,38
IPM	indeks	61,49	61,98
Pertumbuhan Ekonomi	%	3,5	3,93
Tingkat Kemiskinan	%	14,62	14,67
Tingkat Pengangguran	%	2,77	2,75
Gini Rasio	%	0,321	0,320

Tabel 4.5
Sasaran Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran RKP	Sasaran RKPD Propinsi Sumatera Barat	Sasaran RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3-5,9	4,65	3,93
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,5-8,5	5,37	14,67
Rasio Gini	Rasio	0,375-0,378	0,296	0,320
Indeks Pembangunan Manusia	Persen	73,31-73,49	73,46	61,98
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,3-6,0	5,72	2,75

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaiamana amanat peraturan perundang-undangan harus selaras dan mendukung sasasaran dan prioritas pembangunan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, sinergi prioritas pembangunan daerah dengan nasional dan Propinsi Sumatera Barat melalui pendekatan perencanaan THIS (tematik, holistik, integratif, dan tematik) untuk mendukung tujuan utama pembangunan.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menegah tahun 2020-2024, menetapkan Visi Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Dalam mencapai visi RPJMN 2020-2024 dituangkan dalam sembilan poin Nawacita yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;

serta (9) SInergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Arahan presiden dalam melaksanakan misi Nawacita dan upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 mencakup Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Penyusunan tema pembangunan RKP tahun 2023 mempertimbangkan arahan presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi COVID-19 dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi 2,07 persen, pertama kali sejak krisis 1998. Belajar dari pengalaman tersebut, diperlukan upaya yang kuat dan konsisten untuk mengambalikan trajektori pertumbuhan ekonomi seperti sebelum krisis. Jika upaya pemuliha yang dilakukan *business as usual* pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca COVID-19 diproyeksikan akan terus mengalami perlambatan, hal ini disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara setara dalam kurum waktu 10 tahun terakhir. Penurunan produktivitas tersebut harus segera diatasi melalui redesign transformasi ekonomi Indonesia. Urgensi redesign transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya

bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juha meningkatkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah dan jangka panjang. Setelah tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tumbuh lebih dari rata-rata 5,7 persen menjadi 6 persen sampai tahun 2045 untuk keluar dari MIT dan menjadi negara maju.

Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada peningkatan produktivitas terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Tanpa adanya intervensi kebijakan strategis, produktivitas dan daya saing Indonesia diperkirakan akan semakin menurun. Oleh karena itu, untuk mengejar gap pertumbuhan agar tetap sejalan dengan target keluar dari *middle income trap* maka transformasi ekonomi yang didorong melalui peningkatan produktivitas menjadi semakin penting.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut menekankan pentingnya produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu

Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job* serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespon tantangan-tantangan perubahan iklim yang dapat dilakukan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Gambar 4.2
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan peoduktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah dan tingkat pemerintahan, sehingga tema

RPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam menjewantahkan tema RKP Tahun 2023 disusun arah kebijakan dan strategi pembangunan yang saling memili keterkaitan sehingga fokus dalam penangan dan pemecahan permasalahan pembangunan, antara lain:

1. Arah kebijakan: Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

   Strategi : Penguatan sistem jaminan sosial, percepatan modernisasi pertanian, peningkatan pemerataan pembangunan.

2. Arah kebijakan: Peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)

   Strategi : penguatan sistem kesehatan nasional, peningkatan kualitas pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter)

3. Arah kebijakan: Penanggulangan dan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*.

   Strategi : Perluasan penyediaan lapangan usaha.

4. Arah kebijakan: Mendorong pemulihan dunia usaha.

   Strategi : Percepatan revitalisasi pariwisata, memperkuat UMKM dalam perekonomian nasional.

5. Arah kebijakan: Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

   Strategi : Percepatan revitalisasi dan hilirisasi industri, penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan.

6. Arah kebijakan: Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim).

   Strategi : Mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon, percepatan transisi energi.

7. Arah kebijakan: Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.

   Strategi : Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi, percepatan pemerataan infrastruktur digital, percepatan pemerataan infrastruktur konektivitas.

8. Arah kebijakan: Pengembangan Ibu Kota Nusantara.

   Strategi : percepatan penyediaan fasilitas dasar di IKN

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang tgerkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan serta untuk menjaga keseinambungan pembangunan dan optimalisasi efektivitas pengendalian sasaran pembangunan jangka menengah.

1. Prioritas Nasional 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

   Sasaran PN 1:

   a. Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;

   b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

Dalam mewujudkan prioritas nasional 1 disusun 9 (sembilan) major project sebagai langkah konkret pencapaian sasaran pembangunan, antara lain:

a. Akselerasi pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi.
b. *Food estate* kawasan sentra produksi pangan.
c. Jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan.
d. Revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng.
e. Integrasi pelabuhan perikanan dan *fish market* bertaraf internasional.
f. Pengelolaan terpadu UMKM.
g. Industri 4.0 di 6 sub sektor prioritas.
h. Kawasan indystri prioritas dan smelter.
i. Destinasi pariwisata prioritas.

2. Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

   Sasaran PN 2:

   a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
   b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyrakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b)

IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin (KBI)

Dalam menerapkan prioritas nasional 2 pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemeratnaan pembangunan wilayah, didukung 5 kegiatan prioritas, antara lain:

a. Pengembganan kawasan strategis.

   Meliputi kawasan strategis berbasis industri, kawasan strategis berbasis pariwisata.

b. Pengembangan sektor unggulan.

c. Pengembangan kawasan perkotaan.

d. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi.

e. Kelembagaan dan keuangan daerah.

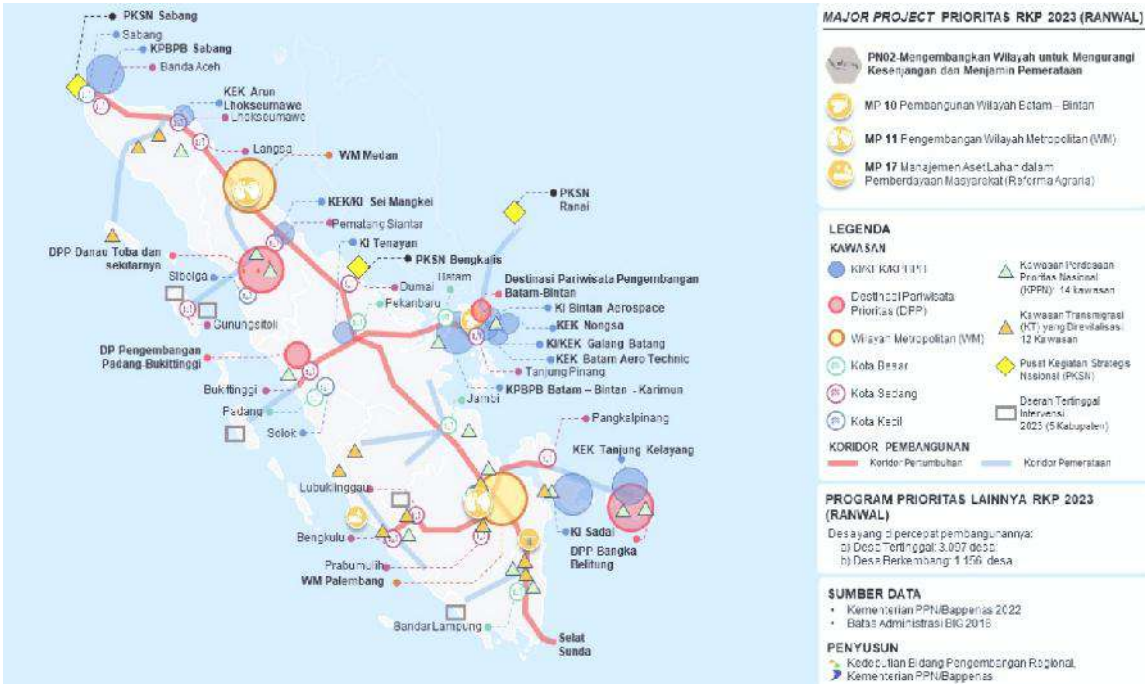

3. Prioritas Nasional 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

   Sasaran PN 3:

   a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga angka kelahiran total (total fertility rate/TFR dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

   b. Meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah.

   c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan (a) menurunkan angka kematian ibu/AKI, (b) menurunkan angka kematian bayi/AKB, (c) Menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase perokok penduduk usia 10-18 tahun, (j) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata lama sekolah

penduduk usia 15 tahun keatas, dan (k) harapan lama sekolah.

d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
e. Meningkatnya aset produktif bagi ramah tangga miskin dan rentan miskin dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif.
f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah keatas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam daftar *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index.*

Dalam menerapkan prioritas nasional 3 meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing disusun 5 (lima) langkah konkret ke dalam major project antara lain:

a. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
b. Pembangunan *science technopark.*
c. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
d. Reformasi sistem perlindungan sosial.
e. Reformasi sistem kesehatan nasional.

4. Prioritas Nasional 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

   Sasaran PN 4:

   a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan indeks capaian revolusi mental, dan (b) peningkatan indeks aktualisasi nilai-nilai pancasila;
   b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan indeks pembangunan kebudayaan;
   c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian indeks pembangunan masyarakat.
   d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan indeks kerukunan umat beragama;
   e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) indeks pembangunan keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
   f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif dengan mendorong pencapaian nilai budaya literasi.

Pencapaian sasaran prioritas nasional 4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilakukan kedalam 4 (empat) program prioritas antara lain:

a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.
b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
c. Memperkuat moderasi beragama.
d. Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

5. Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

   Sasaran PN 5:

   a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) menurunnya rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
   b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh jalan lintas utama pulau)jam/100 km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), (c) peningkatan kondisi jalur kereta api sesuai standar *track*

quality index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian on time performance (OTP) transportasi udara;

c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
d. Meningkatnkan layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kwh/kapita), dan (c) penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (juta ton);
e. Meningkatnya layanan infrastruktur telnologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pta lebar (4G).

Dalam mendukung pancapaian sasaran pada PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar maka major project yang rancang antara lain (1) rumah susun perkotaan sebanyak 1 juta unit; (2) akses air minum perpipaan untuk 10 juta sambungan rumah; (3) akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman untuk 90

persen rumah tangga; (11) jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar dan terdepan; (19) transformasi digital.

6. Prioritas Nasional 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

   Sasaran PN 6:

   a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH);
   b. Berkurangnya kerugianakibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap PDB;
   c. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

Pada PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim disusun 2 (dua) *major project* sebagai langkah konkret pencapaian sasaran, antara lain pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3, penguatan sistem peringatan dini bencana.

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

   Sasaran PN 7:

a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
b. Optimalisasi kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indek spengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
c. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;
e. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 mengacu kepada Visi Pemerintah

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan"

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, "Mewujudkan SDM Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing" terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengkedepankan karaktek berakhlak mulia sebagai perwujudan karakter yang madani, serta memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tanggu dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, "Mewujudkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat" terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling

menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu isu strategis dalam tujuan ini adalah terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, "Mewujudkan Kesejahteraan Petani" terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui penininggkatan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, "Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing" terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap goncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, "Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat" terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor

untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, "Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata" terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan penggerak ekonomi daerah, membangun ketanahan bencana serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawab kepada generasi selanjutnya.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efesien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaran pemerintahan.

Arah kebijakan pembangunan Propinsi Sumatera Barat tahun 2023 selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah yang termuat pada RPJMD Propinsi Sumatera Barat 2021-2026 yaitu difokuskan peningkatan produktivitas pada sektor strategis daerah, sehingga tema pembangunan tahun 2023 mengusung tema "Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis menuju Transformasi Ekonomi". Peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian,

sektor industri dan UMKM serta sektor pariwisata yang diarahkan pada peningkatan kontribusi sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan sebesar 5,86 persen, sektor industri pengolahan/manufaktur dengan meningkatkan kontribusi sebesar 12,46 persen serta sektor pariwisata dengan meningkatkan kontribusi sebesar 5,80 persen. Sebagai bentuk penjabaran secara detail prioritas pembangunan dalam mewujudkan tema peningkatan produktivitas sektor strategis menuju transformasi ekonomi antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing, melalui arah kebijakan:
    a. Efektifitas dan efesiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan.
    b. Percepatan Vaksinasi menuju *Herd Immunity*.
    c. Meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SLB.
    d. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial.
    e. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanan Aksi Konvergensi.
    f. Meningkatkan kualitas dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas.

g. Meningkatkan hasil penelitian yang berorientasi pada kebijakan strategis daerah.

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, melalui arah kebijakan:
   a. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar).
   b. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfataan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan.
   c. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dengan meningkatkan aktifitas keagamaan dan kebudayaan.
   d. Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masarakat.
   e. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama.
   f. Meningkatkan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
   g. Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitasi sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua.

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, melalui arah kebijakan antara lain:
    a. Alokasi anggaran sektor pertanian sebesar 10% dari APBD.
    b. Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan).
    c. Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan
    d. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan,
    e. Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam.
    f. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan.
    g. Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
    h. Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitasi produksi pangan.
    i. Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian

j. Mempertahakan produksi padi sebagai lumbung nasional.

k. Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing.

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, melalui arah kebijakan antara lain:

   a. Penciptaan iklim investasi.

   b. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian.

   c. Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif.

   d. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.

   e. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital.

5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan, melalui arah kebijakan antara lain:

   a. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan.

   b. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional.

c. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasaran pada destinasi wisata.
d. Meningkatkan atraksi seni dan budaya.
e. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestik.

6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan, melalui arah kebijakan antara lain:
   a. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
   b. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan).
   c. Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada Kawasan sentra pertanian, industri dan pariwisata.
   d. Menurunkan biaya produksi dan pemasaran komoditas pertanian dan industri melalui efisiensi biaya *logistic.*
   e. Mendukung peningkatan daya saing Kawasan wisata.
   f. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah menghadapi bencana.
   g. Meningkatkan indeks ketahanan daerah.
   h. Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitasi produksi pangan.
   i. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
   j. Mengurangi luasan Kawasan kumuh.

k. Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah.

l. Pemenuhan terhadap infrastruktur pelayanan dasar.

m. Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak bencana akibat gempa bumi Pasaman dan Pasaman Barat.

7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas, melalui arah kebijakan antara lain:

a. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat.

b. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi.

c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

d. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

e. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

f. Meningkatkan Optimalisasi pengunaan dan pengamanan aset daerah.

g. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

h. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah.
i. Peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

4.2.3.1 10 Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dirumuskan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah dan telah dirumuskan dalam 10 prioritas pembangunan yang disebut, antara lain:

1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)

   Prioritas ini diarahkan pada pembangunan pendidikan yaitu peningkatan kualitas dan akses pendidikan dengan mengalokasikan minimal 20 persen anggaran pendidikan setiap tahunnya. Pembangunan pendidikan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang meliputi pencapaian tujuan ranah afeksi, kognisi dan psikomotor yaitu pendidikan untuk mengembangkan karakter yang beriman, bertakwa dan berakhlak, berpengetahuan, cerdas secara intelektual, emosional dan sosial, serta terampil dan memiliki etos kerja dan daya saing. Dengan prioritas ini diharapkan meningkatnya

Angka Partisipasi Murni (APM) semua jenjang pendidikan, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah guru mencukupi, tidak ada yang putus sekolah, kualitas guru meningkat, beasiswa pendidikan perguruan tinggi.

Program prioritas antara lain alokasi belanja pendidikan minimal 20 persen, pembangunan USB dan ruang kelas beserta utilitas lainnya, rehabilitasi sekolah, pembangunan rumah dinas guru, pembangunan asrama dengan disertai kurikulum dan pembangunan karakter, beasiswa miskin dan berprestasi, peningkatan jenjang pendidikan tenaga pendidik PAUD, SD, SMP dari D2, D3 ke jenjang pendidikan S1, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pengembangan muatan lokal, pelaksanaan Kurikulum Merdeka, fasilitasi sertifikasi guru/tenaga pendidik.

2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)

   Prioritas ini diarahkan pada penguatan sistem kesehatan daerah terutama dalam penanggulangan penyakit/wabah, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Capaian dari prioritas ini antara lain meningkatnya angka harapan hidup, memastikan jaminan kesehatan diterima oleh masyarakat miskin, alokasi belanja kesehatan minimal 10 persen, perbaikan gizi masyarakat, pola hidup bersih dan sehat diterapkan, penanganan intensif bagi bayi balita dan ibu melahirkan, pengentasan prevalensi (stunting), *sister hospital*,

peningkatan pelayanan puskesmas, pembentukan BLUD RSUD, pembangunan RS Pratama Sikakap, pembangunan puskesmas (Desa Sagulubbeg, Desa Sinaka, Desa Silabu), distribusi tenaga dan alat kesehatan secara proporsional.

3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)

   Pengembangan jaringan jalan dan transportasi daerah merupakan program pada prioritas ini. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan Trans Mentawai dengan spesifikasi dan ruas tertentu dalam mendukung sistem transportasi daerah yang bercirikan kepulauan, pembangunan jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. pembangunan jalan pendukung kawasan strategis daerah, membangun pelabuhan penyeberangan (interkoneksi jalan trans Mentawai), fasilitasi pengembangan jaringan transportasi laut (antar pulau dan Mentawai-Padang), fasilitasi pengembangaan Bandara Rokot, fasilitasi pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet ke semua wilayah Mentawai, pembangunan jaringan irigasi, fasilitasi pembangunan TPA Berkat, pembangunan TPS kecamatan (Sipora Selatan, Sikakap, Siberut Selatan, Siberut Utara) dan penataan kawasan perkotaan dan strategis daerah, revisi RTRT dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.

4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)

   Prioritas ini diarahkan pada peningkatan kualitas pemukiman, tersedianya air bersih (Sikabaluan, Saibi, Sirilogui, Malakopa), pembangunan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus, penyediaan Bank Tanah, mendorong relokasi pemukiman kumuh dan rawan bencana, membangun drainase untuk pengendalian banjir, pembangunan sarana dan prasarana sanitasi, peningkatan kualitas kawasan permukiman, mengupayakan Area Penggunaan Lainnya (APL) lebih optimal, melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat.

5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)

   Prioritas ini diarahkan dengan pendekatan agribisnis maupun agroindustri (ekonomi kerakyatan), peningkatan nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan perikanan dan perluasan pemasaran, Pengembangan Kawasan Strategis (Komoditas Unggulan); Kelapa (Taraet, Siberut Barat Daya), Pisang (Sikabaluan, Pagai Selatan), Ikan (Bose), Cengkeh Organik (Saliguma, Sirilogui). Penguatan perdagangan melalui revitalisasi pasar prioritas (Tuapejat, Sipora Selatan, Sikakap, Sikabaluan), pengembangan Kawasan Holtikultura (Sikakap, Sipora Utara, Siberut Selatan, Siberut Utara).

6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)

   Prioritas ini diarahkan pada tujuan menjadikan Mentawai menjadi pariwisata kelas dunia melalui pembangunan dan penataan destinasi pariwisata baik dengan skema investasi maupun melalui pemberdayaan masyarakat untuk kawasan pariwisata prioritas daerah 3M1K (Muntei, Madobag, Mapadegat, Katiet), pembinaan dan pendampingan desa wisata, penguatan kelembagaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata lokal serta fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Siberut.

7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)

   Prioritas ini dilaksankan melaui pengembangan industri berbasis produk lokal dengan memanfaatkan BUMD atau BUMDes, dalam prioritas ini diharapkan munculnya wirausaha muda (enterprenuer), hilirisasi produk pertanian dan perikanan hingga pada akses pasar/pemasaran, Pendampingan UMKM dan IKM (Kelembagaan, Kapasitas SDM, Bisnis Plan/ Proses, Permodalan, Kerjasama Pasar)

8. Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)

   Prioritas ini dilakukan melalui dukungan peningkatan kapasitas produksi listrik di Kepulauan Mentawai, penguatan kinerja PLTBM, fasilitasi koordinasi dan bekerjasama dengan PLN.

9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)

   Prioritas ini dilakukan pemerintah dengan mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi pembangunan rumah ibadah, pembinaan generasi muda, pembinaan ormas, pembinaan, perlindungan perempuan dan anak, pengembangan seni budaya, pelestarian budaya, mengembangkan dialog-dialog antar umat beragama, tokoh agama. Tokoh adat/budaya, tokoh masyarakat, serta pembinaan Masyarakat Hukum Adat, penegakan perda serta penguatan Forkopimda.

10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)

    Prioritas ini dilakukan dengan menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, menata kembali struktur pemerintah, penerapan sistem merit dalam pemerintahan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, penuntasan kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewujudkan WTP atas laporan keuangan daerah, penerapan *e-Goverment*, penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan penguatan inovasi daerah dengan menerapkan setiap OPD minimal 2 Inovasi.

Tabel 4.6
Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2023

Tema RKP Tahun 2023	Tema RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Tema RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis menuju Transformasi Ekonomi	Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan SDM dan Infrastruktur Ekonomi Daerah

4.2.3.2 Arah Kebijakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 7 (tujuh) pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian.

Penguatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah haru dimulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dan saling memiliki keterkaitan/kesinambungan. Arah kebijakan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain:

a. Mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai bagian pemerintahan umum-sekretariat daerah;
b. Melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah dan provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
c. Melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
d. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
e. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
f. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan

SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

g. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
h. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah;
i. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah;
j. Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
k. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
l. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
m. Melakukan rapat secara berkala; dan
n. Melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Tabel 4.7
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Matobe	10 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Selatan	Sinaka	10 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Utara	Saumanganya	10 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Selatan	Sinaka	10 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Taikako	10 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Sikakap	Sikakap	1 SET	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Sikakap	Sikakap	1 SET	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Sikakap	50 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Sikakap	50 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Matobe	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Sikakap	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Utara	Silabu	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Bulasat	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Sinaka	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Seluruh Kecamatan	Makalo	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Utara	Saumanganya	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian	Pagai Utara	Betumonga	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			beasiswa PT bagi masyarakat					
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Malakopa	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Seluruh Kecamatan	Makalo	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Seluruh Kelurahan/Desa	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Pemeliharaan anak terlantar, pendataan fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Sikakap	Sikakap	100 ORANG	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Sikakap	100 ORANG	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Matobe	1 SET	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Sikakap	1 SET	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Matobe	1 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pagai Utara	Silabu	5 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Sikakap	10 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Matobe	15 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Taikako	5 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Sikakap	5 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Matobe	5 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Sikakap	1 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Seluruh Kelurahan/Desa	1 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pagai Utara	Silabu	5 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Taikako	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Sikakap	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi	Sikakap	Matobe	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			masyarakat					
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Sikakap	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Utara	Saumanganya	75000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Sinaka	75000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Utara	Saumanganya	12 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Sikakap	17 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Sikakap	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Sikakap	11 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Taikako	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Utara	Saumanganya	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Utara	Saumanganya	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Makalo	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Utara	Saumanganya	75000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Utara	Betumonga	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Taikako	75000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Nasdem	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah	Siberut Barat	Simatalu	2 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
23-03-2022	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Nasdem	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat	Seluruh Kelurahan/Desa	2 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Nasdem	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat	Simatalu	300000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24-03-2022	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Nasdem	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Utara	Bojakan	5 Lokal	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
24-03-2022	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Nasdem	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Siberut Barat	Simalegi	2000000000 Rupiah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
24-03-2022	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Nasdem	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	12 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Siberut Barat	Simatalu	450 watt	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Selatan	Muntei	100000000 Rp	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Selatan	Muntei	100000000 Rp	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Selatan	Muntei	75000000 Rp	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	20 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	14 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Malancan	26 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Selatan	Madobag	16 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Selatan	Madobag	16 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan	Siberut Selatan	Muntei	16 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pertanian					en/Kota
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Tengah	Saliguma	150000000 Rp	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Selatan	Muara Siberut	75000000 Rp	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Selatan	Muntei	70000000 Rp	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian,	Seluruh Kecamatan	Muntei	200 METER	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian,	Siberut Selatan	Muntei	200 METER	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian,	Sipora Utara	Tuapejat	200 METER	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Siberut Selatan	Muntei	1050 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Siberut Selatan	Muntei	50 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat Daya	Katurei	1 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Selatan	Muara Siberut	150000000 Rp	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Tengah	Saliguma	50000000 Rp	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muntei	2 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Selatan	Maileppet	58440000 Rp	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Selatan	Muntei	50000 BATANG	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimaeru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Selatan	Muara Siberut	80000 BATANG	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	Musara Kasimaeru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Selatan	Maileppet	14 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	Musara Kasimaeru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Selatan	Seluruh Kelurahan/Desa	14 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Matobe	11 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Mara	13 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Bosua	12 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Betumonga	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaa	Sipora Selatan	Nemnemleleu	52 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			n embung pertanian, pembangunan/pemeliharaa n DAM parit pertanian,					
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Saureinu	47 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Matobe	8 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Nemnemleleu	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Matobe	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Saureinu	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Matobe	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Hendri Dunand, S.	3GP	Penyediaan, Pengelolaan, Pengembangan Sistem	Sipora Selatan	Saureinu	1 unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	Diteruskan ke Musrenbang

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sos		Penyediaan Air Minum				PENATAAN RUANG	Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Sipora Selatan	Saureinu	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Sioban	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Sipora Selatan	Saureinu	1 unit	DINAS KESEHATAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sipora Selatan	Sioban	200 juta	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sipora Selatan	Saureinu	50 juta	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sipora Selatan	Sioban	50 juta	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sipora Selatan	Matobe	50 juta	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
15-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Perbaikan rumah tidak layak huni	Sipora Selatan	Bosua	25 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
15-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Perbaikan rumah tidak layak huni	Sipora Selatan	Bosua	50 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
15-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuang	Perbaikan rumah tidak layak huni	Sipora Utara	Goisooinan	50 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN	Diteruskan ke Musrenbang

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		an					PERMUKIMAN	Provinsi/Kabupaten/Kota
15-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Sipora Selatan	Mara	1000 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
15-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Penyediaan perlengkapan prasarana jalan (penerangan jalan umum, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas)	Sipora Selatan	Nemnemleleu	1 unit	DINAS PERHUBUNGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
15-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Penyediaan perlengkapan prasarana jalan (penerangan jalan umum, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas)	Sipora Utara	Goisooinan	1 unit	DINAS PERHUBUNGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
15-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Mara	200 Ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
15-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Bosua	200 Ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Perbaikan rumah tidak layak huni	Sipora Utara	Betumonga	40 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Mara	12 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Matobe	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Betumonga	12 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Beriulou	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Sioban	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Sido Makmur	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Betumonga	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Seluruh Kecamatan	Bosua	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Sioban	51 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuang	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan	Sipora Selatan	Nemnemleleu	106 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		an	pangan ternak, peralatan pertanian				PERTANIAN	
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Matobe	50 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Goisooinan	50 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Mara	100 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Seluruh Kecamatan	Matobe	30 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian,	Sipora Selatan	Matobe	2 KM	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Matobe	50000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Mara	40000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Mara	40000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Mara	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Seluruh Kecamatan	Sioban	3 Ruangan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Sipora Selatan	Sioban	190000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Sipora Utara	Betumonga	700000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Sioban	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Bosua	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pemeliharaan anak terlantar, pendataan fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Sipora Selatan	Sioban	5 Ton	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Selatan	Sinaka	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Selatan	Bulasat	13 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Matobe	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Seluruh Kecamatan	Malakopa	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Bulasat	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Malakopa	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Malakopa	20 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Malakopa	35 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Malakopa	15 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Malakopa	20 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Malakopa	25 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Bulasat	30 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Bulasat	15 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Malakopa	30 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Bulasat	15 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Bulasat	20 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Bulasat	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Taikako	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Bulasat	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pagai Selatan	Bulasat	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pagai Selatan	Bulasat	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	18 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop	3GP	Bantuan armada dan alat	Siberut Utara	Muara	10 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saguruk, SE		tangkap nelayan kecil		Sikabaluan			Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	13 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Tengah	Cimpungan	17 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Tengah	Cimpungan	17 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Seluruh Kecamatan	Muara Sikabaluan	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Utara	Sotboyak	100000000 Rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Utara	Sotboyak	1 Unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	10 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	12 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Tengah	Cimpungan	232000000 Rupiah	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Tengah	Saibi Samukop	10 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Sirilogui	10 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	220000000 Rupiah	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Penyediaan, Pengelolaan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Siberut Utara	Malancan	1000000000 Rupiah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Penyediaan, Pengelolaan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Siberut Tengah	Cimpungan	200000000 Rupiah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Seluruh Kecamatan	Malancan	180000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Siberut Utara	Sirilogui	2000000000 Rupiah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Siberut Utara	Sotboyak	1000000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Fasilitasi kemitraan kelembagaan/usaha, bantuan pendanaan/pembiayaan	Siberut Utara	Seluruh Kelurahan/Desa	500000000 Rupiah	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di kawasan Perumahan Permukiman	Siberut Tengah	Cimpungan	6740000000 Rupiah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat	Sigapokna	400000000 Rupaih	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang	Siberut Barat	Sigapokna	350000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			/berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Siberut Barat	Sigapokna	700000000 Rupiah	DINAS KESEHATAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Fasilitasi Pengelolaan tranportasi umum (angkutan darat)	Siberut Barat	Sigapokna	100000000 Rupiah	DINAS PERHUBUNGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang	Siberut Barat	Sigapokna	140000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			/berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat	Sigapokna	100000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian,	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	750000000 Rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat	Sigapokna	3500000000 Rupiah	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Barat	Simatalu	1 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Barat	Simatalu	1 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Seluruh Kecamatan	Simatalu	1 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat	Simalegi	1 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pemeliharaan anak terlantar, pendataan fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan	Siberut Barat	Simatalu	50 TON	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pengembangan ekonomi masyarakat					
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	100 UNIT	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Siberut Barat	Simatalu	100 UNIT	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Seluruh Kecamatan	Simatalu	1 UNIT	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimaeru	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Sipora Selatan	Beriulou	17000000000 Rupiah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimaeru	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Sipora Utara	Betumonga	20000000000 Rupiah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimae	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan	Sipora Utara	Seluruh Kelurahan/De	800000000 Rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ru	pangan ternak, peralatan pertanian		sa		PERTANIAN	
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Betumonga	100 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Bosua	200000000 Rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Utara	Tuapejat	300000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimae ru	Penyediaan, Pengelolaan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Sipora Selatan	Beriulou	5000000000 Rupiah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimae ru	Penyediaan, Pengelolaan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Sipora Selatan	Beriulou	3000000000 Rupiah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimae ru	Perbaikan rumah tidak layak huni	Sipora Utara	Betumonga	4000000000 Rupiah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimae ru	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani,	Sipora Selatan	Nemnemleleu	300000000 Rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian,					
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimaeru	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian,	Sipora Utara	Betumonga	300000000 Rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
20-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Tuapejat	600000000 Rupiah	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Utara	Sirilogui	1 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	1 unitlengkap	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Utara	Malancan	1 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Barat	Sigapokna	1 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	1 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Malancan	5 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Sirilogui	5 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Utara	Malancan	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Siberut Utara	Sirilogui	500 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan	Siberut Barat	Simalegi	5 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pertanian					
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Utara	Malancan	50 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Utara	Bojakan	50 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Siberut Utara	Mongan Poula	37 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Siberut Utara	Malancan	38 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Utara	Malancan	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman,	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			selasar, jalan lingkungan sekolah)					en/Kota
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Utara	Mongan Poula	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Utara	Malancan	3 lokal	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
24-03-2022	Maru, SH	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Utara	Seluruh Kelurahan/Desa	50 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Nelsen Sakerebau, S. Th	PDI - Perjuangan	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pagai Selatan	Bulasat	12 UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Nelsen Sakerebau, S. Th	PDI - Perjuangan	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Sikakap	9 UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-03-2022	Nelsen Sakerebau, S. Th	PDI - Perjuangan	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pagai Utara	Silabu	9 UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	Nelsen Sakerebau, S. Th	PDI - Perjuangan	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pagai Selatan	Makalo	2 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
18-03-2022	Nelsen Sakerebau, S. Th	PDI - Perjuangan	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pagai Selatan	Sinaka	2 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-03-2022	Nelsen Sakerebau, S. Th	PDI - Perjuangan	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pagai Selatan	Makalo	600000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pagai Selatan	Sinaka	2 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pagai Utara	Saumanganya	50 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Selatan	Sinaka	10 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Selatan	Sinaka	10 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Sikakap	Sikakap	1 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pagai Selatan	Sinaka	2 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Seluruh Kecamatan	Sinaka	2 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Pelatihan tenaga kerja	Sikakap	Sikakap	25000000 Rp	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN MODAL TERPADU SATU PINTU	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Perbaikan rumah tidak layak huni	Pagai Utara	Betumonga	62 UNIT	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Sinaka	50000000 Rp	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Salimi, A. Md	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	80 Ribu	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-03-2022	Salimi, A. Md	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	20 Ribu	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Salimi, A. Md	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	100 Juta	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Salimi, A. Md	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	100 Juta	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Salimi, A. Md	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	50 Juta	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Salimi, A. Md	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	50 Juta	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Salimi, A. Md	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	50 Juta	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Salimi, A. Md	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	3 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
24-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
24-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	3 lokal	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
24-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 Unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala	Seluruh Kecamatan	Sagulubbeg	3 Unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	3 Unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang	Siberut Barat Daya	Seluruh Kelurahan/Desa	3 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			/berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	60 rumah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Perbaikan rumah tidak layak huni	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	60 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Perbaikan rumah tidak layak huni	Seluruh Kecamatan	Maileppet	60 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Seluruh Kecamatan	Pasakiat Taileleu	3 kopel	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			/berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Siberut Barat Daya	Seluruh Kelurahan/Desa	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Siberut Selatan	Madobag	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Selatan	Madobag	3 kopel	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat Daya	Katurei	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Katurei	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Seluruh Kelurahan/Desa	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Siberut Barat Daya	Katurei	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Siberut Selatan	Madobag	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Siberut Barat Daya	Katurei	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Barat Daya	Katurei	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Katurei	4500 batang	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Katurei	3000 batang	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Fasilitasi kemitraan kelembagaan/usaha, bantuan pendanaan/pembiayaan	Siberut Selatan	Madobag	150 juta	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Katurei	3000 batang	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	15 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	15 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Katurei	4000 batang	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Seluruh Kecamatan	Katurei	10 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	15 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	20 set	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	20 set	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	4 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	2400 batang	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Seluruh Kecamatan	Sagulubbeg	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	300 kg	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	34 buah	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	120 kg	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan	Siberut Selatan	Madobag	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			sekolah)					
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	8 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Selatan	Madobag	10 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Selatan	Madobag	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan	Siberut Barat Daya	Katurei	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Perlengkapan Sekolah					
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimaeru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	14 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Tuapejat	17 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Beriulou	40 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan	Seluruh Kecamatan	Bosua	60 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pertanian					
18-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Goisooinan	36 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Tuapejat	45 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
18-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Sipora Utara	Tuapejat	250000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
18-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab	Sipora Utara	Tuapejat	300000000 Rupiah	DINAS KESEHATAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan					
18-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Utara	Tuapejat	60000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Tuapejat	36 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
24-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Tuapejat	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
20-03-2022	Syafridin	Nasdem	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Sido Makmur	10 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
20-03-2022	Syafridin	Nasdem	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Tuapejat	20 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
20-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Tuapejat	13 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Seluruh Kelurahan/Desa	20 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan	Sipora Utara	Bukit Pamewa	20 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pertanian					
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Goisooinan	30 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Matobe	30 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Seluruh Kelurahan/Desa	20 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Nemnemleleu	10 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Bosua	10 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Betumonga	35 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Betumonga	15 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Bosua	15 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Saureinu	21 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Taikako	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Sikakap	11 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Sikakap	10 set	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Taikako	10 set	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Utara	Silabu	11 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Sikakap	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Utara	Saumanganya	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Selatan	Malakopa	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Selatan	Sinaka	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Sikakap	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Taikako	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pagai Utara	Saumanganya	100 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pagai Utara	Saumanganya	50 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sikakap	Taikako	50 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Tuapejat	70 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Sikakap	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Utara	Saumanganya	50 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Sikakap	Sikakap	50 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Malakopa	50 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pemeliharaan anak terlantar, pendataan fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Pagai Utara	Saumanganya	75 Kepala Keluarga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pemeliharaan anak terlantar, pendataan fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Sikakap	Taikako	75 Kepala Keluarga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pemeliharaan anak terlantar, pendataan fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Pagai Selatan	Sinaka	75 Kepala Keluarga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pemeliharaan anak terlantar, pendataan fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan	Sikakap	Taikako	75 Kepala Keluarga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pengembangan ekonomi masyarakat					
23-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pagai Utara	Saumanganya	1 ton	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Berikut disajikan persandingan keselarasan prioritas pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

Tabel 4.8
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah, 2023

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Pembangunan Pertanian Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)
			Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Penetapan Birokrasi (Mentawai Prima)

Tabel 4.9
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah
dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2023
Tujuan 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	61,98	
Sasaran 1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Rata Lama sekolah	7,36 tahun	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)
		Harapan Lama Sekolah	13,09 tahun	
Sasaran 2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,55	Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)
		Angka Harapan Hidup	65,19 tahun	
		Prevalensi Stunting	20,00%	
Sasaran 3	Meningkatnya keterampilan hidup (*life skill*) sumber daya manusia	Persentase Penduduk Miskin	14,57%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
Tujuan 2:	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur	10%	
Sasaran 1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	15%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
Sasaran 2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	70%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2023
				Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
		Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	70%	
Sasaran 3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
Sasaran 4	Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	Cakupan Layanan Transportasi	80%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
Sasaran 5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	85%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
Sasaran 6	Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	Rasio Elektrifikasi	85%	Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)
Tujuan 3 :	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	>80	
Sasaran 1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	40%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
Sasaran 2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah Desa STBM	2 desa	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
Sasaran 3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	197	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
Tujuan 4 :	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	3,93%	
		Indek Gini	0,320	
Sasaran 1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp.58,47 jt	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2023
		Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4 ton	
Sasaran 2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Nilai Investasi	20 miliar rupiah	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,75%	
Sasaran 3	Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	3,80%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
Tujuan 5 :	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	Indek RB	B	
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	30	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Indek Kepuasan masyarakat	80	
Sasaran 2	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Indeks Profesional ASN	80	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	
		Indeks SPBE	2	
		Maturitas SPIP	Level 3	
Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	WTP	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		WBK/WBBM	2 OPD	
		Nilai SAKIP	B	
Tujuan 6 :	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Indeks Pembangunan Kebudayaan	51,5	
Sasaran 1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	Jumlah MHA yang dilestarikan	5 MHA	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
Sasaran 2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,3	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
Tujuan 7 :	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	Tingkat Kriminalitas	3,5 persen	
Sasaran 1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender	Tingkat Kabupaten layak Anak	400	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
		Indek Pembangunan Gender	89,90	

Tabel 4.10
Dukungan Program Daerah (RKPD) Tahun 2023 Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2023

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	380.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	150.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.099.289.305	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	350.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	700.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PERTANIAN		Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		
							3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	800.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
							3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
							3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
							3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	280.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		PERTANIAN
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100.000.000	DINAS PERIKANAN
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	500.000.000	DINAS PERIKANAN
							3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	100.000.000	DINAS PERIKANAN
							3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan	200.000.000	DINAS PERIKANAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pendidikan dan Pelatihan		
						3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	DINAS PERIKANAN
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS PERIKANAN
						3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	500.000.000	DINAS PERIKANAN
						3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	DINAS PERIKANAN
							3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000.000	DINAS PERIKANAN
		Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM),	Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	478.600.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan koperasi	wirausaha	USAHA KECIL, DAN MENENGAH		Kabupaten/Kota	Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	400.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	600.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
						3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	300.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
							3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	200.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
							3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	220.216.210	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Penyediaan air untuk pertanian	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3.700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan								
				2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah	50.000.000	DINAS PEMBERDAYA

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	286.878.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan	81.530.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		
						2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.02.01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	72.963.450	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	400.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	125.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	300.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	84.180.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	112.750.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	144.283.680	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	135.750.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	28.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.06.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1.06.02.2.03.03 Peningkatan	50.000.000	DINAS SOSIAL,

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan	50.000.000	DINAS SOSIAL,

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									AN ANAK
					2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas	70.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	90.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.789.600	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.02.2.01.03 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.02.2.01.10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.02.2.01.14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	147.279.800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	24.978.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.01.05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	192.335.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	171.187.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	29.970.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Lapangan oleh PKB/PLKB		MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	41.676.984	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									BERENCANA
				1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	15.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.08 Pembangunan Asrama Sekolah	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Perpustakaan Sekolah		KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.569.235.628	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	175.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.000.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	500.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.000.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan	100.000.000	DINAS KESEHATAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
						1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	650.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	70.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	70.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	50.000.000	DINAS KESEHATAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	60.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	150.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	650.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	75.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	300.000.000	DINAS KESEHATAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	60.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	75.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	600.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3.200.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan	600.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.250.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	20.193.203.448	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	600.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS KESEHATAN
						1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100.000.000	DINAS KESEHATAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	300.000.000	DINAS KESEHATAN
				2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	200.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	312.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
							4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	66.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
							4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	84.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
							4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	78.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
							4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
				5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	650.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									MANUSIA
						5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	75.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	700.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	500.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	75.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	75.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan	95.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		POLITIK
							8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85.800.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
							8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
				8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	160.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
							8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	160.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.02.2.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai		
							1.03.02.2.01.33 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							1.04.02.2.02.02 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	249.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.250.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.04.02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	150.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	250.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	3.918.838.127	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	400.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.747.117.437	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.04.05.2.01.05 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.02.2.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.02.2.01.33 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan	3.700.000.000	DINAS PEKERJAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Irigasi Permukaan		UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	990.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	510.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	70.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	430.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Implementasi SIMBG		
							1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.216.345.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	5.960.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	30.664.643.111	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala	3.517.668.000	DINAS PEKERJAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jalan		UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	2.832.150.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	6.893.527.946	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	325.532.736	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2.487.473.890	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	375.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
							2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan	55.726.947	DINAS PERHUBUNGAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Perlengkapan Jalan		
						2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	90.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
							2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
				3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		
							3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	800.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
							3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
							3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
							3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	375.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
							2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	55.726.947	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis	90.000.000	DINAS PERHUBUNGA

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		N
							2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
					2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.15.03.2.07.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.950.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	2.15.03.2.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan	120.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pengumpan Lokal	dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
				2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							2.16.02.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.060.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dan Komunikasi Pemerintah Daerah		
6	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.631.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
					2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.631.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
					2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	78.860.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		
							2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	131.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
							2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	876.289.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
						2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	2.11.11.2.03.03 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	109.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.450.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
							8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	85.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
					8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
					8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
							8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	85.800.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							serta Penanganan Konflik di Daerah		
							8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
				2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							2.16.02.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	125.491.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
						5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	61.209.200	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		
							5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	59.391.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
							5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	201.787.800	BADAN KEUANGAN DAERAH
							5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	206.211.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
							5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	122.609.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
							5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	148.186.000	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pemerintah Daerah		
				4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	312.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
							4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	66.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
							4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	84.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
							4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	78.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
							4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
				5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	75000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	75000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 4.11
Dukungan Program Daerah (RKPD) Tahun 2023 Terhadap Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat (RKPD) Tahun 2023

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	15.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pertama			
					1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.08 Pembangunan Asrama Sekolah	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.569.235.628	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	175.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
					1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.000.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	500.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.000.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	3.000.000.000	DINAS KESEHATAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	DINAS KESEHATAN
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	650.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	70.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	70.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	50.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	60.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	150.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	650.000.000	DINAS KESEHATAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	75.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	300.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	60.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	75.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	600.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3.200.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan	600.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.250.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	20.193.203.448	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	600.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS KESEHATAN
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	300.000.000	DINAS KESEHATAN
		2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda	2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	200.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.06.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN	2.08.02.2.01 Pelembagaan	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota		PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan	90.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.789.600	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.02.2.01.03 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.02.2.01.10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
							PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.02.2.01.14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	147.279.800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
							PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	24.978.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.01.05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	192.335.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	171.187.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	29.970.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					(PKB/PLKB)		
					2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	41.676.984	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – syara' Basandi Kitabullah	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	15.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.08 Pembangunan Asrama Sekolah	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.569.235.628	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,	2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	286.878.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
							KELUARGA BERENCANA
		2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	81.530.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.02.01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	72.963.450	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	312.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	66.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	84.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	78.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	650.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	75.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	700.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	500.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	75.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	75.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
					8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85.800.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
					8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
		8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	160.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
					8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	120.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
					8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	160.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	380.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	150.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.099.289.305	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	350.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	700.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	800.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	280.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman	1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung,	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		PENATAAN RUANG	(SDA)	Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dan Bangunan Penampung Air Lainnya		
					1.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.02.2.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.02.2.01.33 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3.700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
			2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.631.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100.000.000	DINAS PERIKANAN
			3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	500.000.000	DINAS PERIKANAN
					3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	100.000.000	DINAS PERIKANAN
					3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	200.000.000	DINAS PERIKANAN
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	DINAS PERIKANAN
			3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS PERIKANAN
				3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	500.000.000	DINAS PERIKANAN
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	DINAS PERIKANAN
					3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000.000	DINAS PERIKANAN
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	478.600.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
	kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	LATIHAN PERKOPERASIAN	Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	400.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	600.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	300.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	200.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	220.216.210	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					1.04.02.2.02.02 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	249.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.250.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.04.02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	150.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	250.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	3.918.838.127	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	400.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.747.117.437	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					1.04.05.2.01.05 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.02.2.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengaman Pantai		
					1.03.02.2.01.33 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3.700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	990.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	510.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			PERSAMPAHAN REGIONAL	Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota		
			1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	70.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	430.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.216.345.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	5.960.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	30.664.643.111	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	3.517.668.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	2.832.150.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	6.893.527.946	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	325.532.736	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2.487.473.890	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	800.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	375.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
					2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	55.726.947	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	90.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
					2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
			2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.15.03.2.07.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.950.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan	2.15.03.2.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	120.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			
		2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					2.16.02.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.060.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	5.450.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			POLITIK	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Daerah		
					8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	85.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
			8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
			8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
					8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85.800.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
					8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	290.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kabupaten/Kota		
		2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					2.16.02.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	375.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
					2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	55.726.947	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	90.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
					2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu)	2.15.02.2.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Daerah Kabupaten/Kota			
				2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	125.491.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	61.209.200	BADAN KEUANGAN DAERAH
					5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	59.391.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
					5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	201.787.800	BADAN KEUANGAN DAERAH
					5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	206.211.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
					5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	122.609.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
					5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	148.186.000	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	312.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	66.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	84.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	78.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	75000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	75000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	400.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	125.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	300.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	84.180.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku	112.750.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kepentingan dan Masyarakat		
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	144.283.680	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	135.750.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	28.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
			2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.631.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
			2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	78.860.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
					2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	131.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
					2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	876.289.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan	2.11.11.2.03.03 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Pelayanan Pengelolaan Sampah		
		1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	109.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4.3 Inovasi Pembangunan Daerah

Inovasi menjadi kunci dalam upaya percepatan pemecahan permasalahan pembangunan di daerah melalui pembaharuan layanan, alur, sistem kerja dan paradigma dalam menghantarkan/ *deliver* manfaat *(benefit)* dengan cepat, tepat dan terukur kepada masyarakat. Percepatan pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan metode dan cara yang lama (konvensional), diperlukan strategi yang tentunya efektif dan mengedepankan inovasi. Beberapa inovasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

1. Forum UMKM Sikereita

Didasari dengan adanya niat yang sama dari beberapa pelaku usaha di Kecamatan Sipora Selatan, khususnya Desa Sioban untuk mempermudah mendapatkan layanan bantuan modal, layanan perizinan, fasilitas pelatihan dan juga pendampingan, pengembangan usaha serta perluasan pemasaran. Yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Apalagi terjadi di masa COVID-19, jadi masyarakat banyak mengeluh tentang ekonomi usaha mereka dari berbagai bidang, di mana para pelaku usaha mengalami penurunan ekonomi.

Gambar 4.3 Pelaku usaha

Dimulai dengan adanya keluhan – keluhan dari para pelaku usaha di daerah Sioban khususnya tentang menurunnya ekonomi mereka. Maka itu kami mulai mencari solusi bagaimana keluar dari situasi paceklik tersebut. Dengan mengumpulkan beberapa pelaku usaha, kami mencoba meminta pendapat dan keinginan dari pelaku usaha tersebut, maka muncullah ide untuk membentuk kelompok kecil sebagai wadah menampung aspirasi dari pelaku usaha. Seiring berjalannya waktu maka kelompok yang awalnya kecil, mulai mencoba mengembangkan diri karena situasi yang menuntut.

Kelompok yang kecil ini pun mencoba menjangkau Pemerintah Daerah Mentawai dengan mendatangi Kantor Dinas Koperindag di Tuapejat Kab. Kep. Mentawai, dengan tujuan berdiskusi tentang kelompok kecil yang kami buat, maka atas

saran – saran dari Dinas Koperindag maka dimulailah rencana pembentukan wadah atau forum UMKM untuk daerah Sioban.

Gambar 4.4 Peresmian Forum Sikereita oleh Bupati

Pembentukan forum UMKM ini adalah sebagai perpanjangan tangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan juga sebagai wadah diskusi, tanya jawab, pemecahan masalah, serta pencairan informasi dalam pengembangan UMKM.

Gambar 4.5 Pelatihan e-commerce

Dengan adanya forum UMKM Sikereita, diharapkan adanya perubahan dan peningkatan ekonomibagi pelaku usaha, dan juga sebagai wadah diskusi. Manfaat lainnya adalah, adanya Kerjasama dengan Pemerintah dan Dinas terkait, berupa pelatihan – pelatihan kepada pelaku UMKM Sikereita. Tidak hanya itu, dengan ikutnya pelatihan UMKM, diharapkan adanya kemajuan baik secara individu, kelompok, maupun dalam Forum UMKM Sikereita sendiri. Tahun 2023, forum UMKM Sikereita akan mendeklarasikan eksistensinya untuk wilayah Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Sikakap, Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Utara, sehingga pelaku UMK dapat dibina, dimatangkan dan difasilitasi akses pasar dan finansial. Harapannya dampak UMKM SIKEREITA bisa sebagai jembatan penghubung kepada Pemerintah, swasta, badan usaha dan akses pasar.

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan prioritas merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023

Program Prioritas Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 terdiri dari program prioritas yang menunjang pencapaian tujuan pembangunan. Rincian program prioritas, dihubungkan dengan prioritas nasional tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			195,275,224,019							204,916,235,628	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	140,660,224,019						100 Persen	143,332,000,000	
1	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Telaksananya Administrai Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	138,638,224,019						100 Persen	140,350,000,000	
1	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1208 Orang/bulan	138,438,224,019	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Pegawai Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1208 Orang/bulan	140,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 orang	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Pegawai Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60 orang	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	250,000,000						100 persen	300,000,000	
1	1	1	02:05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11 Dokumen	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	11 Dokumen	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	542,000,000						100 persen	852,000,000	
1	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 paket	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	21 paket	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 Paket	40,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Dokumen	12,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	30 Laporan	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	990,000,000						12 bulan	1,470,000,000	
1	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	90,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	12 bulan	90,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	900,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten	12 Laporan	1,380,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Semua Kelurahan				Kepulauan Mentawai			
1	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	240,000,000						100 Persen	360,000,000	
1	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Unit	80,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Kendaraan	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	13 Kendaraan	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	20 Unit	60,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	90,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 unit	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	100 persen	54,315,000,000						100 persen	61,284,235,628	
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	100 persen	28,770,000,000						100 persen	32,070,000,000	
1	1	2	02:01	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (SD Fransiskus Simatalu)	1 Unit	1,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten	1 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
													Kepulauan Mentawai			
1	1	2	02:01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	1,400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	8 Ruang	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna							
1	1	2	02:01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Dibangun (SDN 27 Simatalu)	1 Ruang	700,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Ruang	700,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu							
1	1	2	02:01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	700,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Ruang	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun (SDN 29 Simatalu, SDN 17 Simatalu, SDN 26 Simalegi, SDN Matotonan	4 Unit	1,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	4 Unit	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Kab. Kepulauan Mentawai,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Siberut Selatan, Matotonan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi							
1	1	2	02:01	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	700,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Unit	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat (SDN 26 Tuapejat, SDN 11 Tuapejat)	8 ruang	1,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	8 ruang	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat							
1	1	2	02:01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	8 Paket	800,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	8 Paket	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13000 Peserta Didik	14,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	13000 Peserta Didik	15,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10 Paket	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Kecamatan, Semua Kelurahan	Khusus Fisik		Cerdas)	Kabupaten Kepulauan Mentawai			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	13000 peserta didik	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	13000 peserta didik	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	400 Guru	6,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	400 Guru	6,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah yang mengikuti pengembangan karir	50 Orang	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	50 Orang	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	134 Satuan Pendidikan	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	134 Satuan Pendidikan	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	134 Satuan Pendidikan	120,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	134 Satuan Pendidikan	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	100 Persen	21,670,000,000						100 Persen	25,089,235,628	
1	1	2	02:02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	1,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	8 Ruang	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	1	2	02:02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Ruang	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Ruang	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	600,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Ruang	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	800,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Ruang	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	8	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang akan Dibangun	2 Unit	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	800,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Unit	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	800,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	6 Unit	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	1	2	02:02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	800,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Unit	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	600,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Ruang	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Ruang	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Ruang	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Unit	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (SMPN 2 Siberut Barat)	10 paket	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 paket	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna							
1	1	2	02:02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah	6000 Peserta Didik	7,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	Dana Transfer Umum-Dana		1. Pembangunan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan	6000 Peserta Didik	8,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Pertama	Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum		(Mentawai Cerdas)	Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai			KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	350,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 Paket	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	6000 Peserta Didik	350,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	6000 Peserta Didik	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	34 Satuan Pendidikan	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	34 Satuan Pendidikan	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200 Orang	4,300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	200 Orang	4,569,235,628	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	100 Orang	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	41	Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah Sekolah Menengah	34 Satuan	120,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		1. Pembangunan	Dinas Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Manajemen Sekolah	Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Pendidikan		Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		Pendidikan (Mentawai Cerdas)	dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai			DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	34 Satuan Pendidikan	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	60 Persen	2,475,000,000						60 Persen	2,575,000,000	
1	1	2	02:03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 Paket	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 Paket	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	20 Satuan Pendidikan	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	20 Satuan Pendidikan	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	100 Orang	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	150 Orang	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:03	17	Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah PAUD yang	50 Satuan	175,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		1. Pembangunan	Dinas Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	175,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Manajemen PAUD	Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Pendidikan		Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		Pendidikan (Mentawai Cerdas)	dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai			DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	70 Satuan Pendidikan	1,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	70 Satuan Pendidikan	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kelulusan Kesetaraan	100 persen	1,400,000,000						100 persen	1,550,000,000	
1	1	2	02:04	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	11 Paket	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	11 Paket	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	0 Peserta Didik	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	4 lembaga							4 lembaga		
1	1	2	02:04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	11 Satuan Pendidikan	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	11 Satuan Pendidikan	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	55 Orang	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	55 Orang	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga	0 Orang	150,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		1. Pembangunan	Dinas Pendidikan	0 Orang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		Pendidikan (Mentawai Cerdas)	dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai			DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang							50 Orang		
1	1	2	02:04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Satuan Pendidikan	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	11 Satuan Pendidikan	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	11 Satuan Pendidikan	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	11 Satuan Pendidikan	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	2 persen	150,000,000						2 persen	150,000,000	
1	1	3	02:02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	25 Persen	150,000,000						25 Persen	150,000,000	
1	1	3	02:02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal	Jumlah Silabus Muatan Lokal	2 Dokumen	150,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		1. Pembangunan	Dinas Pendidikan	2 Dokumen	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun			Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		Pendidikan (Mentawai Cerdas)	dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai			DAN KEBUDAYAAN
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan	100 persen	150,000,000						100 persen	150,000,000	
						Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi	17 persen							17 persen		
						Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1	90 persen							90 persen		
1	1	4	02:01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	500 Dokumen	150,000,000						500 Dokumen	150,000,000	
1	1	4	02:01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	500 Dokumen	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	500 Dokumen	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			728,050,900							920,000,000	
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN	Presentase budaya Benda	60 Persen	578,050,900						60 Persen	770,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					KEBUDAYAAN	dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)										
2	22	2	02:01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Sertifikasi Tenaga Permuseuman	3 Objek	278,050,900						3 Objek	320,000,000	
2	22	2	02:01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	278,050,900	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Objek	320,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Sertifikasi Tenaga Permuseuman	2 Orang							2 Orang		
2	22	2	02:02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	300,000,000						2 Objek	450,000,000	
2	22	2	02:02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Objek	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5 Unit							5 Unit		
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah sanggar yang dibina	4 sanggar	150,000,000						4 sanggar	150,000,000	
2	22	3	02:01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan	10 Orang	150,000,000						10 Orang	150,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)										
2	22	3	02:01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Orang	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 Orang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			80,924,555,239							119,438,516,233	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	59,979,555,239						100 Persen	63,092,516,233	
1	2	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Sub Kegiatan	60,000,000						2 Sub Kegiatan	66,000,000	
1	2	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	5 Dokumen	33,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	5 Laporan	33,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Sub Kegiatan	59,234,555,239						2 Sub Kegiatan	62,019,516,233	
1	2	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	389 Orang/bulan	44,524,210,875	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai	0	389 Orang/bulan	45,083,902,373	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Tuapejat	Umum		Sehat)				
1	2	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	657 Dokumen	14,710,344,364	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	657 Dokumen	16,935,613,860	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	425,000,000						7 Sub Kegiatan	603,500,000	
1	2	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	7 Paket	16,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	50 Paket	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	15 Paket	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	36 Paket	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	10 Paket	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	12 Dokumen	22,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	24 Laporan	300,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Sub Kegiatan	80,000,000						1 Sub Kegiatan	132,000,000	
1	2	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	12 Laporan	132,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Sub Kegiatan	180,000,000						2 Sub Kegiatan	271,500,000	
1	2	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	30 Unit	71,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Unit	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah	70 persen	20,610,000,000						70 persen	55,977,500,000	
1	2	2	02:01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10 Sub Kegiatan	12,600,000,000						10 Sub Kegiatan	20,660,000,000	
1	2	2	02:01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur	1 Unit	800,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai	0	1 Unit	2,200,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			Selatan, Muara Siberut	Umum		Sehat)				
1	2	2	02:01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Pustu Saureinu dan Pustu Pukarayat)	2 Unit	800,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	2 Unit	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	2 Unit	550,000,000	DINAS KESEHATAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar						
1	2	2	02:01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Paket	5,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	15 Paket	8,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	3,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Paket	3,300,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	15 Paket	2,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	15 Paket	3,000,000,000	DINAS KESEHATAN
										DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
										Dasar						
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2	02:01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	10 Unit	110,000,000	DINAS KESEHATAN
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28 SubKegiatan	7,760,000,000						28 SubKegiatan	34,837,500,000	
						Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28 Sub Kegiatan							28 Sub Kegiatan		
						Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28 Sub Kegiatan							28 Sub Kegiatan		
1	2	2	02:02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2853 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	2853 Orang	165,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2724 Orang	650,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	2724 Orang	710,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru	Jumlah Bayi Baru Lahir yang	2724 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan	DAK Non Fisik-BOKKB-		2. Pembangunan	0	2724 Orang	165,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Lahir	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	BOK		Kesehatan (Mentawai Sehat)				
1	2	2	02:02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9922 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	9922 Orang	990,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11036 Orang	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	11036 Orang	275,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65963 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	65963 Orang	110,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5737 Orang	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	5737 Orang	77,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5551 Orang	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	5551 Orang	110,000,000	DINAS KESEHATAN
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2	02:02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	217 Orang	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Jumlah Orang yang Mendapatkan	223 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan	0	223 Orang	110,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			Sipora Utara, Tuapejat			(Mentawai Sehat)				
1	2	2	02:02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	567 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	567 Orang	110,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	575 Orang	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	575 Orang	88,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	165,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	10 Dokumen	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	10 Dokumen	880,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	82,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	2	02:02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	330,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	70,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	80,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	820,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Hibah PMI (200)	2 Dokumen	3,200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	2 Dokumen	3,500,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	1,750,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional	15 Dokumen	300,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		2. Pembangunan	0	15 Dokumen	660,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Lainnya	Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Umum-Dana Alokasi Umum		Kesehatan (Mentawai Sehat)				
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB						
1	2	2	02:02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	5 Unit	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	5 Unit	550,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Keseahtan Secara Terintegrasi	2 Sub Kegiatan	250,000,000						2 Sub Kegiatan	480,000,000	
						Terselenggaranya Sistem Informasi Keseahtan Secara Terintegrasi	2 Sub Kegiatan							2 Sub Kegiatan		
						Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2 Sub Kegiatan							2 Sub Kegiatan		
1	2	2	02:03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	150,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	5 Unit	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	5 Unit	330,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	12 Puskesmas	110,000,000						12 Puskesmas	121,000,000	
1	2	3	02:01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jum;ah Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan yang diterbitkan	2 Sub Kegiatan	60,000,000						2 Sub Kegiatan	66,000,000	
						Jumlah Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan yang diterbitkan	2 Sub Kegiatan							2 Sub Kegiatan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Tersedianya Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	2 Sub Kegiatan							2 Sub Kegiatan		
1	2	3	02:01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10 Dokumen	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	10 Dokumen	27,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	02:01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10 Dokumen	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	10 Dokumen	38,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	02:03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 Sub Kegiatan	50,000,000						1 Sub Kegiatan	55,000,000	
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 Sub Kegiatan							1 Sub Kegiatan		
1	2	3	02:03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	40 Orang	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rata-rata lama pasien dirawat	5 Hari	100,000,000						5 Hari	110,000,000	
1	2	4	02:01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	1 Sub Kegiatan	50,000,000						1 Sub Kegiatan	55,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Tradisional (UMOT)	Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Sub Kegiatan							1 Sub Kegiatan		
1	2	4	02:01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	3 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	02:03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	1 Sub Kegiatan	50,000,000						1 Sub Kegiatan	55,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Rumah Tangga										
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Sub Kegiatan							1 Sub Kegiatan		
1	2	4	02:03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	3 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah desa dengan PHBS	20 Desa	125,000,000						20 Desa	137,500,000	
1	2	5	02:02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Persen	75,000,000						100 Persen	82,500,000	
1	2	5	02:02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	75,000,000	Kab. Kepulauan	DAK Non Fisik-BOKKB-		2. Pembangunan	0	1 Dokumen	82,500,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	BOK		Kesehatan (Mentawai Sehat)				
1	2	5	02:03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen	50,000,000						100 Persen	55,000,000	
1	2	5	02:03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			29,141,956,716							37,706,698,268	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24,641,036,132							30,336,780,010	
1	2	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18,831,654,972							22,800,489,630	
1	2	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	14,783,137,402					ASN RSUD Kab Kep Mentawai	200 Orang/bulan	14,330,859,508	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4,048,517,570					ASN RSUD Kab Kep Mentawai	1 Dokumen	8,469,630,122	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			762,381,160							1,066,654,380	
1	2	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			37,227,160					Penerima Layanan Kesehatan dan Pemberi		31,586,800	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
													Layanan Kesheatan			
1	2	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	600,000,000					Penerima Layanan Kesehatan dan Pemberi Layanan Kesheatan	10 Paket	859,851,980	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			125,154,000					Penerima Layanan Kesehatan dan Pemberi Layanan Kesheatan		175,215,600	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,460,500,000							5,644,700,000	
1	2	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			460,500,000					Penerima dan Pemberi Layanan Kesehatan		644,700,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4,000,000,000					Penerima dan Pemberi Layanan Kesehatan		5,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			586,500,000							824,936,000	
1	2	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			286,500,000					Penerima dan Pemberi Layanan Kesehatan		401,100,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	300,000,000					Penerima dan Pemberi Layanan Kesehatan	5 Unit	423,836,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			4,500,920,584							7,369,918,258	
1	2	2	02:01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah			3,926,820,584							6,378,482,258	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Kabupaten/Kota											
1	2	2	02:01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan	1 Unit	1,400,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	1,682,882,326	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan	0 Unit	1,400,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:01	16	Pengadaan Obat, Vaksin			862,420,915					Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan		992,420,915	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			620,157,343					Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan		820,157,343	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			261,360,000					Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan		365,904,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			574,100,000							991,436,000	
1	2	2	02:02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			374,100,000					Penerima dan Pemberi Layanan Kesehatan		523,740,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	200,000,000					Penerima dan Pemberi Layanan Kesehatan	1 Unit	467,696,000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN			1,808,683,106							2,200,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					BIDANG KESEHATAN											
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,808,683,106							2,200,000,000	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,808,683,106							2,200,000,000	
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,808,683,106	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Betumonga	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	2,200,000,000	DINAS KESEHATAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Bukit Pamewa							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,970,805,106							1,970,805,106	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,970,805,106							1,970,805,106	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,970,805,106							1,970,805,106	
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,970,805,106	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemnemleleu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	1,970,805,106	DINAS KESEHATAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN			884,859,441							884,859,441	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					BIDANG KESEHATAN											
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			884,859,441							884,859,441	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			884,859,441							884,859,441	
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	884,859,441	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	884,859,441	DINAS KESEHATAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Beriulou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,827,003,106							1,827,003,106	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,827,003,106							1,827,003,106	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,827,003,106							1,827,003,106	
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	5 Dokumen	1,827,003,106	Kab. Kepulauan Mentawai,	Pendapatan Dana Kapitasi JKN		2. Pembangunan Kesehatan		5 Dokumen	1,827,003,106	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Puskesmas			Siberut Selatan, Muara Siberut	pada FKTP		(Mentawai Sehat)				
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,278,599,954							1,278,599,954	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,278,599,954							1,278,599,954	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,278,599,954							1,278,599,954	
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,278,599,954	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Katurei	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	1,278,599,954	DINAS KESEHATAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Sagulubbeg	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Daya, Pasakiat Taileleu							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,259,963,106							1,500,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,259,963,106							1,500,000,000	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,259,963,106							1,500,000,000	
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1,259,963,106		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1,500,000,000	DINAS KESEHATAN
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,837,716,061							2,000,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,837,716,061							2,000,000,000	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,837,716,061							2,000,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,837,716,061	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Bojakan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sotboyak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Mongan Poula	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Malancan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,240,183,106							1,300,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,240,183,106							1,300,000,000	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,240,183,106							1,300,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,240,183,106	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	1,300,000,000	DINAS KESEHATAN
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,816,403,106							2,000,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,816,403,106							2,000,000,000	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,816,403,106							2,000,000,000	
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,816,403,106	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Matobe	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,199,903,106							1,500,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,199,903,106							1,500,000,000	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,199,903,106							1,500,000,000	
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,199,903,106	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	1,500,000,000	DINAS KESEHATAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,112,047,106							1,300,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,112,047,106							1,300,000,000	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,112,047,106							1,300,000,000	
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	5 Dokumen	1,112,047,106		Pendapatan Dana		2. Pembangunan		5 Dokumen	1,300,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Pelayanan Puskesmas				Kapitasi JKN pada FKTP		Kesehatan (Mentawai Sehat)				
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,021,153,733							1,300,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,021,153,733							1,300,000,000	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,021,153,733							1,300,000,000	
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,021,153,733	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	1,300,000,000	DINAS KESEHATAN
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			967,525,170							1,000,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			967,525,170							1,000,000,000	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			967,525,170							1,000,000,000	
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	967,525,170	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
										Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			933,835,125							1,000,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			933,835,125							1,000,000,000	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			933,835,125							1,000,000,000	
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	933,835,125	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,034,523,106							1,100,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,034,523,106							1,100,000,000	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,034,523,106							1,100,000,000	
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,034,523,106	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	1,100,000,000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,034,523,106							1,200,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,034,523,106							1,200,000,000	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah			1,034,523,106							1,200,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Kabupaten/Kota											
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,034,523,106	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Betumonga	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	1,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			68,469,062,463							100,548,394,210	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	12,723,821,757						100 Persen	16,289,000,000	
1	3	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Tahapan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi	7 Dokumen	50,000,000						7 Dokumen	130,000,000	
1	3	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Aparatur Sipil Negara	4 Dokumen	130,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	3	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	11,665,421,757						100 Persen	13,970,000,000	
1	3	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	7,165,421,757	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Aparatur Sipil Negara	72 Orang/bulan	8,690,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	293 Orang	4,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Aparatur Sipil Negara	293 Orang	5,280,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 Persen	550,000,000						100 Persen	924,000,000	
1	3	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3 Paket	330,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	3	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	165,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10 Dokumen	44,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Laporan	330,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya operasional penunjang kegiatan	100 Persen	98,400,000						100 Persen	108,240,000	
1	3	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	98,400,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Laporan	108,240,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100 Persen	360,000,000						100 Persen	1,156,760,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	3	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umu dan Penataan Ruang	4 Unit	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umu dan Penataan Ruang	18 Unit	606,760,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umu dan Penataan Ruang	30 Unit	110,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umu dan Penataan Ruang	1 Unit	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Jaringan Irigasi	23 HA	1,400,000,000						23 HA	8,800,000,000	
						Persentase Kurangnya Wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	7,30 Persen							7,30 Persen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	3	2	02:01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir, abrasi, erosi, dan ekresi yang terlindungi	2 Km	500,000,000						2 Km	3,025,000,000	
1	3	2	02:01	33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0.8 KM	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0.8 KM	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	02:02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	49.31 Persen	900,000,000						49.31 Persen	5,775,000,000	
1	3	2	02:02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3.5 KM	900,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3.5 KM	1,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemnemleleu							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu							
									Kab. Kepulauan Mentawai,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Sipora Utara, Goisooinan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Matobe							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa							
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	45 persen	8,350,000,000						45 persen	11,050,000,000	
1	3	3	02:01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SR Penuna Air Bersih	1800 SR	8,350,000,000						1800 SR	11,050,000,000	
1	3	3	02:01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	3 Dokumen	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Dokumen	561,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop							
									Kab. Kepulauan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat							
1	3	3	02:01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	40 Liter/Detik	1,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	40 Liter/Detik	2,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	3	02:01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	180 SR	700,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Betumonga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	180 SR	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu							
1	3	3	02:01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	200 SR	5,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	200 SR	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop							
1	3	3	02:01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	10 Unit	1,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 Unit	1,650,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase kawasan permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	50 persen	340,000,000						50 persen	550,000,000	
1	3	4	02:01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya acuan pendukung pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	1 Dokumen	340,000,000						1 Dokumen	550,000,000	
1	3	4	02:01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	4 Dokumen	340,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	4 Dokumen	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan							
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem	30 persen	500,000,000						30 persen	550,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						pengelolaan air limbah										
1	3	5	02:01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah tangga yang memiliki tangki septik	15 Persen	500,000,000						15 Persen	550,000,000	
1	3	5	02:01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	50 Rumah Tangga	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	50 Rumah Tangga	440,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	5	02:01	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	18 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	18 Orang	110,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Berkurangnya titik genangan air	70 persen	500,000,000						70 persen	550,000,000	
1	3	6	02:01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Drainase sesuai kebutuhan	0 Meter	500,000,000						0 Meter	550,000,000	
1	3	6	02:01	10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	1 Dokumen	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	77,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	6	02:01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase	300 M	430,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		3. Pembangunan	Kabupaten Kepulauan	300 M	473,000,000	DINAS PEKERJAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Lingkungan yang Dibangun			Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka	Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Mentawai			UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	75 Persen	3,700,000,000						75 Persen	4,220,000,000	
1	3	8	02:01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah IMB yang diterbitlkan	2 Dokumen	3,700,000,000						2 Dokumen	4,220,000,000	
1	3	8	02:01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	8	02:01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Dokumen	4,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Bukit Pamewa							
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Kawasan Stategis Yang Ditata bangunan dan Lingkungan	1 Kawasan	500,000,000						1 Kawasan	550,000,000	
1	3	9	02:01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Tersediana acuan kawasan penataan bangunan dan lingkungannya	2 Dokumen	500,000,000						2 Dokumen	550,000,000	
1	3	9	02:01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Mantap	10 Persen	39,805,240,706						10 Persen	55,094,394,210	
1	3	10	02:01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jaringan Jalan Kabupaten	5.48 Km	39,805,240,706						5.48 Km	55,094,394,210	
1	3	10	02:01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2.5 KM	3,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	2.5 KM	6,556,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Sirilogui							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo							
1	3	10	02:01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	5.15 KM	26,636,180,024		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	5.15 KM	33,731,107,422	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	02:01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	6 KM	1,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	6 KM	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	02:01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 KM	1,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 KM	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	02:01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	160 M	4,693,527,946	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	160 M	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Sipora Utara, Sido Makmur							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako							
1	3	10	02:01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	708 M	325,532,736	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	708 M	358,086,009	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kelurahan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kelurahan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kelurahan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kelurahan							
1	3	10	02:01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	0.5 KM	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	0.5 KM	165,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	02:01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	7 Dokumen	2,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	7 Dokumen	2,736,221,279	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Tengah, Semua Kelurahan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan							
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW	100 Persen	650,000,000						100 Persen	2,565,000,000	
1	3	12	02:01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RTRR Kabupaten yang ditetapkan dan disosialisasikan	3 Dokumen	250,000,000						3 Dokumen	260,000,000	
1	3	12	02:01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	02:01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	02:01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	2 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Dokumen	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan							
1	3	12	02:03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	2 Dokumen	300,000,000						2 Dokumen	495,000,000	
1	3	12	02:03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawaii	1 Dokumen	385,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	02:03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawaii	1 Dokumen	110,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	02:04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah	4 Dokumen	100,000,000						4 Dokumen	110,000,000	
1	3	12	02:04	3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	2 Kasus	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Kasus	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	02:04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Semua Kelurahan			Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			700,000,000							770,000,000	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	700,000,000						100 Persen	770,000,000	
1	3	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100 Persen	700,000,000						100 Persen	770,000,000	
1	3	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	700,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Aparatur Sipil Negara	18 Unit	770,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			9,297,394,855							600,000,000	
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran	100 persen	4,347,394,855						100 persen	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					KABUPATEN/KOTA	pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah										
1	4	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Kegiatan	30,000,000						2 Kegiatan	0	
1	4	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	2 Jenis	2,948,796,355						2 Jenis	0	
1	4	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2,845,836,355	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25 Orang/bulan	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	102,960,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6 Kegiatan	290,000,000						6 Kegiatan	0	
1	4	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	1 Paket	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	4	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	2 Paket	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	3 Paket	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	4 Paket	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	20 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	1 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya pengadaan barang milik daerah	1 Kegiatan	88,258,500						1 Kegiatan	0	
1	4	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	10 Unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												(Mentawai Bersih)				
1	4	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38,258,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	1 Paket	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Kegiatan	808,364,000						1 Kegiatan	0	
1	4	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	95,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	3 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	713,364,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	0 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Terbayarnya honorarium pegawai kontrak	32 orang							32 orang		
1	4	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 Kegiatan	181,976,000						4 Kegiatan	0	
1	4	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5 Unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	4	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	18,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5 Unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13 Unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	83,976,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase lingkungan permukiman kumuh	50 persen	400,000,000						50 persen	0	
1	4	2	02:02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	terlaksananya kegiatan sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	100,000,000						2 Kegiatan	0	
1	4	2	02:02	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	0 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	mayarakat KKM	0 Orang	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	20 Orang							20 Orang		
1	4	2	02:04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	terlaksananya pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	200,000,000						1 Kegiatan	0	
1	4	2	02:04	2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat KKM	2 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2	02:06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase lingkungan permukiman kumuh	30 persen	100,000,000						30 persen	0	
1	4	2	02:06	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	kab.kep.mentawai	1 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	55 persen	3,900,000,000						55 persen	0	
1	4	3	02:02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman	600 unit	150,000,000						600 unit	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	4	3	02:02	8	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevie w/Terlegalisasi	1 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Kab. kep.mentawai	1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	02:03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Kegiatan peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	2 Kegiatan	3,750,000,000						2 Kegiatan	0	
1	4	3	02:03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	600,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Mayarakat KKM	50 Unit Rumah	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo							
1	4	3	02:03	3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Mayarakat KKM	1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	02:03	7	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terferivikasi	1 dokumen	250,000,000				4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Mayarakat KKM	1 dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	02:03	8	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	jumlah rumah baru layak huni yang dibangun	87 Unit	2,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Mongan Poula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan	Mayarakat KKM	87 Unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Permukiman (Mentawai Bersih)				
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka							
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persenntase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman	70 persen	650,000,000						70 persen	600,000,000	
1	4	5	02:01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan PSU Perumahan	1 Kegiatan	650,000,000						1 Kegiatan	600,000,000	
1	4	5	02:01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	450,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Malancan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat KKM	2 Lokasi	600,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi							
1	4	5	02:01	5	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat KKM	1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN			9,303,267,238							9,351,758,186	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	8,462,552,746						100 Persen	8,489,123,186	
1	5	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100 persen	3,383,711,168						100 persen	3,384,711,168	
1	5	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3,242,711,168	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Satpol PP dan Damkar	31 Orang/bulan	3,242,711,168	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	141,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Satpol PP dan Damkar	1 Dokumen	142,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	12 Bulan	310,662,010						12 Bulan	312,672,450	
1	5	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 jenis	7,997,450	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Satpol PP dan Damkar	14 jenis	7,997,450	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	5	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5,175,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Satpol PP dan Damkar	2 Paket	5,175,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	88,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Satpol PP dan Damkar	5 Paket	88,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39,489,560	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Satpol PP dan Damkar	2 Paket	41,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 kali	170,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Satpol PP dan Damkar	15 kali	170,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Unit Kendaraan	6 unit	263,092,000						6 unit	263,092,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Urusan Pemerintah Daerah	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan										
1	5	1	02:07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	163,092,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	SATPOL PP DAN DAMKAR	6 Unit	163,092,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 paket	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	SATPOL PP DAN DAMKAR	4 paket	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	1 Tahun	4,206,487,568						1 Tahun	4,206,487,568	
1	5	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 rekening	62,527,568	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Satpol PP dan Damkar	2 rekening	62,527,568	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	4,143,960,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat				Satpol PP dan Damkar	1 Tahun	4,143,960,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase kepatuhan	1 Tahun	298,600,000						1 Tahun	322,160,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Urusan Pemerintahan Daerah	penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah										
1	5	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	SATPOL PP DAN DAMKAR	1 Unit	33,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	235,600,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	SATPOL PP DAN DAMKAR	8 Unit	259,160,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diservice	7 unit	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	SATPOL PP DAN DAMKAR	7 unit	25,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	SATPOL PP DAN DAMKAR	1 Unit	5,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	85 Persen	249,637,000						85 Persen	249,637,000	
1	5	2	02:01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya suasana aman dan tentram bagi	43 persen	174,637,000						43 persen	174,637,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	masyarakat										
1	5	2	02:01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2 Kasus	89,637,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	SATPOL PP DAN DAMKAR	2 Kasus	89,637,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	2	02:01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Kasus	85,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	SATPOL PP DAN DAMKAR	2 Kasus	85,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	2	02:03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PPNS	2 orang	75,000,000						2 orang	75,000,000	
1	5	2	02:03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Meningkatnya pengetahuan aparatur	2 orang	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SATPOL PP DAN DAMKAR	2 orang	75,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100 persen	591,077,492						100 persen	612,998,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	5	4	02:01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan pencegahan kebaran dari bahan bahaya dan beracun	20 persen	205,000,000						20 persen	205,000,000	
1	5	4	02:01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	55,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	SATPOL PP DAN DAMKAR	3 Dokumen	55,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	4	02:01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	55,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	SATPOL PP DAN DAMKAR	2 Laporan	55,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap							
1	5	4	02:01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2 Dokumen	55,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	SATPOL PP DAN DAMKAR	2 Dokumen	55,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap							
1	5	4	02:01	4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian	1 Dokumen	40,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		4. Pembagunan Kawasan Perumahan	SATPOL PP DAN DAMKAR	1 Dokumen	40,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Kabupaten/Kota	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota			Selatan, Sioban	Umum		dan Permukiman (Mentawai Bersih)				PEMADAM KEBAKARAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat							
1	5	4	02:02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah alat proteksi kebakaran	180 Tabung	66,499,000						180 Tabung	66,499,000	
1	5	4	02:02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	66,499,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	SATPOL PP DAN DAMKAR	1 Dokumen	66,499,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap							
1	5	4	02:03		Investigasi Kejadian Kebakaran			178,079,492							200,000,000	
1	5	4	02:03	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	178,079,492	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	4	02:04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya kepedulian keikutsertaan masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran	20 persen	141,499,000						20 persen	141,499,000	
1	5	4	02:04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Jumlah Warga Masyarakat yang	20 Orang	75,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		4. Pembagunan	SATPOL PP DAN DAMKAR	20 Orang	75,000,000	SATUAN POLISI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Umum-Dana Alokasi Umum		Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)				PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap							
1	5	4	02:04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	66,499,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	SATPOL PP DAN DAMKAR	2 Desa/Kelurahan	66,499,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6,565,739,390						11,232,000,000	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,615,739,390						7,032,000,000	
1	5	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan			25,000,000						30,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
1	5	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			30,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,485,208,649							4,600,000,000	
1	5	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3,335,208,649		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		27 Orang/bulan	2,900,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Dokumen	1,700,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			267,530,741							394,000,000	
1	5	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		5 Paket	8,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		4 Paket	90,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	25,030,741	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		5 Paket	26,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		3 Dokumen	20,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Laporan	250,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	5	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,523,000,000							1,573,000,000	
1	5	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Laporan	73,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Laporan	1,500,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			315,000,000							435,000,000	
1	5	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		2 Unit	60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		16 Unit	250,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		2 Unit	25,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit							10 Unit		
1	5	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Unit	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN			950,000,000							2,400,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					BENCANA											
1	5	3	02:01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			150,000,000							500,000,000	
1	5	3	02:01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	80 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)		80 Orang	500,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	02:02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			500,000,000							1,000,000,000	
1	5	3	02:02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)		100 Orang	350,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	02:02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)		12 Dokumen	300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	02:02	7	Penanganan Pascabencana		0	150,000,000		Dana Transfer		3. Pembangunan		0	350,000,000	BADAN PENANGGULA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Kabupaten/Kota					Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				NGAN BENCANA DAERAH
						Telaksananya pelatihan jitu pasna	100 Orang							100 Orang		
1	5	3	02:03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			300,000,000							900,000,000	
1	5	3	02:03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 Orang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)		500 Orang	400,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	02:03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)		1000 Orang	350,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			7,118,156,306							8,247,897,216	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan Tupoksi	100 %	4,071,336,306						100 %	4,645,062,196	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	6	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penempatan ASN sesuai dengan Anjab ABK	100 %	2,860,231,726						100 %	3,363,938,795	
1	6	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	2,780,231,726	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	31 Orang/bulan	3,273,938,795	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	1 Dokumen	90,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	80 %	361,741,427						80 %	367,015,585	
1	6	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,089,750	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	1 Paket	10,200,737	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	78,298,880	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	5 Paket	79,160,168	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	78,370,997	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	4 Paket	79,233,078	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	6	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14,999,800	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	2 Paket	16,459,800	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	179,982,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	1 Laporan	181,961,802	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang dan jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	80 %	602,890,000						80 %	664,923,458	
1	6	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	49,950,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	1 Laporan	50,499,450	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	552,940,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	1 Laporan	559,022,340	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang dan jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	80 %	246,473,153						80 %	249,184,358	
1	6	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	29,998,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	1 Unit	30,327,978	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	6	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	23,180,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	17 Unit	23,434,980	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	16,880,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	14 Unit	17,065,680	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	176,415,153	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	3 Unit	178,355,720	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang diberdayakan	39.2 %	250,000,000						39.2 %	252,750,000	
1	6	2	02:01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase PPKS yang diberdayakan	100 KK	50,000,000						100 KK	50,550,000	
1	6	2	02:01	2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Keluarga	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat KAT	75 Keluarga	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
												9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)				
1	6	2	02:03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dilatih	137 0rang/lembaga	200,000,000						137 0rang/lembaga	202,200,000	
1	6	2	02:03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan	43 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	9. Pembangunan Kebudayaan	Potensi Sumber Kesejahteraan	43 Orang	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Sipora Utara, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	(Mentawai Beradab)	Sosial			AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
												9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)				
1	6	2	02:03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	10 Keluarga	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
												9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)				
1	6	2	02:03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	4 Lembaga	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
												9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)				
1	6	2	02:03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Sertifikat	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	40 Sertifikat	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	100 %	246,820,000						100 %	249,535,020	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						tepat sasaran										
1	6	4	02:01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan bantuan	430 orang	246,820,000						430 orang	249,535,020	
1	6	4	02:01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Pemerlu Permasalahan Kesejahteraan Sosial	300 Orang	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	4	02:01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Pemerlu Permasalahan Kesejahteraan Sosial	10 Orang	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	4	02:01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	46,820,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Pemerlu Permasalahan Kesejahteraan Sosial	100 Orang	47,335,020	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	4	02:01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	10 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai	Pemerlu Permasalahan Kesejahteraan Sosial	10 Orang	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum		Beradab)				PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	4	02:01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Pemerlu Permasalahan Kesejahteraan Sosial	20 Orang	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS menerima jaminan sosial	82.39 %	2,400,000,000						82.39 %	2,950,000,000	
1	6	5	02:02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang valid	100 %	2,400,000,000						100 %	2,950,000,000	
1	6	5	02:02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	200 Keluarga	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	200 Keluarga	450,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	5	02:02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5006 Keluarga	2,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	5006 Keluarga	2,500,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Panyaluran Bantuan Tepat Sasaran	100 %	150,000,000						100 %	150,550,000	
1	6	6	02:01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana mendapatkan bantuan	20 orang	50,000,000						20 orang	50,550,000	
1	6	6	02:01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	20 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat korban bencana	20 Orang	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Kewenangan Kabupaten/Kota			Kelurahan							PERLINDUNGAN ANAK
1	6	6	02:02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang diberdayakan	20 orang	100,000,000						20 orang	100,000,000	
1	6	6	02:02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	PSKS	20 Orang	100,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			845,789,600							1,026,963,338	
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD dengan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender	20 Persen	295,000,000						20 Persen	298,245,000	
2	8	2	02:01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pelembagan PUG	18 OPD	100,000,000						18 OPD	101,100,000	
2	8	2	02:01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	OPD	1 Dokumen	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2	02:01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah Perangkat Daerah yang	18 Perangka	50,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer	Revolusi Mental dan	9. Pembangunan	OPD	18 Perangkat Daerah	50,550,000	DINAS SOSIAL,

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	t Daerah		Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Umum-Dana Alokasi Umum	Pembangunan Kebudayaan	Kebudayaan (Mentawai Beradab)				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan							
2	8	2	02:02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, dan sosial	1 Dokumen	70,000,000						1 Dokumen	70,770,000	
						Jumlah organisasi yang mendapatkan pemberdayaan perempuan bidang pilitik, hukum, sosial dan ekonomi	3 Organisasi							3 Organisasi		
2	8	2	02:02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Organisasi perempuan	1 Dokumen	35,385,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2	02:02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat	3 Organisasi	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai	Organisasi perempuan	3 Organisasi	35,385,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Hukum, Sosial dan Ekonomi	Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			Daya, Semua Kelurahan	Umum		Beradab)				PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2	02:03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (IKE)	3 Lembaga	125,000,000						3 Lembaga	126,375,000	
						Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengebangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	3 Lembaga							3 Lembaga		
2	8	2	02:03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	90 Orang	101,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2	02:03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	25,275,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	cakupan perempuan korban kekerasan yang	100 %	100,000,000						100 %	136,485,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu										
2	8	3	02:01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	5 Kegiatan	100,000,000						5 Kegiatan	101,100,000	
2	8	3	02:01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat	1 Dokumen	30,330,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	3	02:01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat	2 Perangkat Daerah	70,770,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kelurahan							
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Selarasnya data base gender dan anak dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender pada OPD	26 %	50,000,000						26 %	50,550,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	8	5	02:01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data anak dan gender yang dianalisis	1 Dokumen	50,000,000						1 Dokumen	50,550,000	
2	8	5	02:01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat	1 Dokumen	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Pencanangan kecamatan layak anak	3 Kecamatan	215,000,000						3 Kecamatan	217,365,000	
2	8	6	02:01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapatkan pelmbagaan PHA	4 Lembaga	110,000,000						4 Lembaga	111,210,000	
2	8	6	02:01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	4 Organisasi	75,825,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	6	02:01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	1 Dokumen	35,385,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	8	6	02:02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapatkan pelmbagaan PHA	2 Lembaga	105,000,000						2 Lembaga	106,155,000	
2	8	6	02:02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	30 Orang	70,770,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	6	02:02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	2 Dokumen	35,385,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100 %	185,789,600						100 %	324,318,338	
2	8	7	02:01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	5 Kegiatan	90,000,000						5 Kegiatan	90,990,000	
2	8	7	02:01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	90,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat	10 Perangkat Daerah	90,990,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Kab. Kepulauan Mentawai,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Siberut Utara, Semua Kelurahan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kelurahan							
2	8	7	02:03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus penguatan dan pengembangan tingkat daerah	2 Lembaga	95,789,600						2 Lembaga	96,843,338	
2	8	7	02:03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	95,789,600	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga penyedia layanan anak	1 Dokumen	96,843,338	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			170,000,000							171,870,000	
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			35,000,000							35,385,000	
2	8	3	02:02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi			35,000,000							35,385,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Kewenangan Kabupaten/Kota											
2	8	3	02:02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)		1 Layanan	35,385,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			135,000,000							136,485,000	
2	8	7	02:02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			135,000,000							136,485,000	
2	8	7	02:02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)		15 Orang	35,385,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	7	02:02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)		1 Layanan	101,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			8,708,843,659							3,652,825,928	
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan non ASN	105 Orang	8,708,843,659						105 Orang	2,602,825,928	
						Peningkatan Pelayanan Tugas ASN	89 Orang							89 Orang		
2	9	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	13 bulan	8,376,843,659						13 bulan	766,825,928	
2	9	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	8,376,843,659	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Negeri (ASN) dan Pegawai NON (ASN)	89 Orang/bulan	766,825,928	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						Terlaksananya Administrasi Keuagan	12 bulan							12 bulan		
2	9	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	248,000,000						12 bulan	551,000,000	
2	9	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100 persen	84,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100 persen	85,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	9	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100 persen	14,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100 persen	16,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	9	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi pelayanan perangkat daerah	12 laporan	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12 laporan	450,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	9	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84,000,000							85,000,000	
2	9	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Administrasi	100 parsen	84,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai		100 parsen	85,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Umum			Sipora Utara, Tuapejat	Alokasi Umum		Prima)				PERTANIAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			10,702,999,000							6,107,500,000	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	3,152,999,000						100 Persen	457,500,000	
3	27	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksannya monitoring kegiatan tahun berjalan	1 tahun	50,000,000						1 tahun	315,000,000	
3	27	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	meningkatnya pelayanan perencanaan dan evaluasi kinerja	2 jenis	50,000,000				5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2 jenis	15,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	13 bulan	2,879,999,000						13 bulan	0	
3	27	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terlaksananya administrasi keuangan	14 bulan	2,879,999,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Negeri (ASN) dan Pegawai NON (ASN)	14 bulan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	141,000,000						12 bulan	0	
3	27	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	93,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100 persen							100 persen		
3	27	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	48,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						terlaksnanya Kegiatan Administrasi Umum	100 persen							100 persen		
3	27	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi Baik	1 paket	82,000,000						1 paket	82,500,000	
3	27	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0 Unit	75,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						terpeliharanya aset kendaraan dinas operasional	100 persen							100 persen		
3	27	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	7,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9 Unit	7,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cengkeh	1580 ton	5,750,000,000						1580 ton	2,600,000,000	
						kelapa	15500 ton							15500 ton		
						Produktivitas Pertanian dan Peternakan (pisang)	14000 kwintal							14000 kwintal		
3	27	2	02:01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	75 persen	2,950,000,000						75 persen	1,100,000,000	
3	27	2	02:01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	30 kali	2,950,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan	Kelompok Tani	30 kali	1,100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Pertanian					Berkualitas dan Berkeadilan	Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)				
3	27	2	02:05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mutu Produk Perternakan	80 persen	300,000,000						80 persen	500,000,000	
3	27	2	02:05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terbelinya bibit ternak	150 ekor	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Peternak	150 ekor	500,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	2	02:06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya hijauan pakan ternak	50 ha	2,500,000,000						50 ha	1,000,000,000	
3	27	2	02:06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatnya populasi ternak sapi dan kerbau	40 ekor	2,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Peternak	40 ekor	1,000,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Persentase Kawasan	85 persen	1,350,000,000						85 persen	2,100,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertanian yang dilengkapi dangan Utilitas Pertanian										
3	27	3	02:01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersusunya Peta L P2B dan Masterplan Pertanian	2 Peta	200,000,000						2 Peta	1,300,000,000	
3	27	3	02:01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B yang Dikelola	1 Dokumen	200,000,000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 Dokumen	450,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	3	02:02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian	85 persen	1,150,000,000						85 persen	800,000,000	
3	27	3	02:02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	1 paket	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Tani	1 paket	400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	3	02:02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangunnya jalan usaha tani	1 meter	1,050,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	1 meter	400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei							
									Kab. Kepulauan Mentawai,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Siberut Utara, Malancan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat							
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penyakit Hewan Yang Tertangani	100 persen	150,000,000						100 persen	300,000,000	
3	27	4	02:04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terdampinginya atau Tercegahnya Penyakit Menular ternak	60 Persen	150,000,000						60 Persen	300,000,000	
3	27	4	02:04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12 Laporan	300,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase bencana pertanian yang tertangani	100 persen	100,000,000						100 persen	200,000,000	
3	27	5	02:01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	100 persen	100,000,000						100 persen	200,000,000	
3	27	5	02:01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3 Ha	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai	Kelompok Tani	3 Ha	200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Berdaya Saing)				
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Bina Kelompok tani yang produktif	40 persen	200,000,000						40 persen	450,000,000	
3	27	7	02:01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya SDM Penyuluh dan Petani	40 persen	200,000,000						40 persen	450,000,000	
3	27	7	02:01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pelatihan Penyuluh PNS dan Non PNS	2 paket	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Penyuluh Pertanian lapangan PNS, CPNS dan kolompok Tani	2 paket	450,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						Terlaksananya diklat penyuluh	31 Orang							31 Orang		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			7,401,326,828							8,652,533,738	
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	5,254,798,658						100 Persen	6,039,004,665	
2	11	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	32 Orang	3,158,237,598						32 Orang	3,100,082,158	
2	11	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3,075,242,598				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	26 Orang/bulan	3,008,787,658	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	10 Dokumen	82,995,000		Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai	DLHK	10 Dokumen	91,294,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Pelaksanaan Tugas ASN				Alokasi Umum		Prima)				KEBERSIHAN
2	11	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	79 Paket	659,738,220						79 Paket	823,289,355	
2	11	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	4,731,000				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	7 Paket	5,788,310	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	5 Paket	385,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	232,506,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	47 Paket	240,506,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	7,860,000				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	13 Paket	8,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	23,994,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	7 Dokumen	29,284,445	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	140,646,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	50 Laporan	154,710,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah untuk Menunjang Urusan Pemerintahan	1 Jenis	83,200,000						1 Jenis	524,032,000	
2	11	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	83,200,000				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	8 Unit	84,032,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya Jasa Penunjang	21 Laporan	1,062,665,640						21 Laporan	1,275,592,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah										
2	11	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	49,000,000				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	1 Laporan	60,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	1,013,665,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	11 Laporan	1,215,092,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21 Laporan	290,957,200						21 Laporan	316,009,152	
2	11	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	79,380,000				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	16 Unit	80,173,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	189,995,200				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	10 Unit	212,095,152	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	21,582,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	5 Unit	23,740,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pembangunan sesuai dengan daya dukung ruang	100 persen	600,000,000						100 persen	500,000,000	
2	11	2	02:02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KLHS Kabupaten	1 Dokumen	600,000,000						1 Dokumen	500,000,000	
2	11	2	02:02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS	2 Dokumen	600,000,000				4. Pembagunan	DLHK	2 Dokumen	500,000,000	DINAS LINGKUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					RPJPD/RPJMD	RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun						Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)				HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang tindak lanjuti	100 persen	116,631,000						100 persen	217,294,100	
2	11	6	02:01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1 Laporan	116,631,000						1 Laporan	217,294,100	
2	11	6	02:01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	116,631,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	DLHK	1 Laporan	217,294,100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	5 MHA	154,493,950						5 MHA	284,343,345	
2	11	7	02:01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak	Terlaksananya Pengakuan Keberadaan Masyarakat	5 MHA	81,530,500						5 MHA	94,083,550	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					MHA yang Terkait dengan PPLH	Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH										
2	11	7	02:01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	6 Dokumen	81,530,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	6 Dokumen	94,083,550	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	7	02:02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	5 MHA	72,963,450						5 MHA	190,259,795	
2	11	7	02:02	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	6 Dokumen	72,963,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	6 Dokumen	190,259,795	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase sampah yang dikelola	7 persen	1,275,403,220						7 persen	1,238,493,900	
2	11	11	02:01		Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	36 Ton	1,225,403,220						36 Ton	1,128,493,900	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	11	11	02:01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	139,254,220		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	0	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	11	02:01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	36 Ton	78,860,000				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	36 Ton	79,576,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	11	02:01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	131,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	0	3 Kelompok	165,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	11	02:01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	6 Unit	876,289,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	6 Unit	883,917,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	11	02:03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	4 Lokasi	50,000,000						4 Lokasi	110,000,000	
2	11	11	02:03	3	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1 Laporan	50,000,000		Dana Transfer		10. Penataan Birokrasi	0	1 Laporan	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				Umum-Dana Alokasi Umum		(Mentawai Prima)				HIDUP DAN KEBERSIHAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			6,170,492,280							7,843,800,000	
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,683,361,600							5,668,800,000	
2	12	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000							60,000,000	
2	12	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		0 Dokumen	60,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen							6 Dokumen		
2	12	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,329,524,856							4,055,000,000	
2	12	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3,279,124,856	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		23 Orang/bulan	4,000,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	50,400,000				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		3 Dokumen	55,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	12	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			392,806,744							613,800,000	
2	12	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	57,158,636		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		7 Paket	7,800,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		8 Paket	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	108,991,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		4 Paket	110,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	26,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		3 Paket	30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	14,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	16,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	171,016,708		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Laporan	300,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			888,270,000							875,000,000	
2	12	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	62,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		2 Laporan	40,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	825,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Laporan	835,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	12	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47,760,000							65,000,000	
2	12	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	47,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		6 Unit	65,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			675,000,000							1,195,000,000	
2	12	2	02:01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			525,000,000							625,000,000	
2	12	2	02:01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	43 Laporan	525,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		43 Laporan	425,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	02:03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			150,000,000							365,000,000	
2	12	2	02:03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Laporan	200,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			306,967,000							300,000,000	
2	12	3	02:01		Pelayanan Pencatatan Sipil			306,967,000							300,000,000	
2	12	3	02:01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	43 Layanan	306,967,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		43 Layanan	300,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			341,213,680							450,000,000	
2	12	4	02:03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			196,930,000							200,000,000	
2	12	4	02:03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data	6 Dokumen	84,180,000		Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai		6 Dokumen	85,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Kependudukan				Alokasi Umum		Prima)				PENCATATAN SIPIL
2	12	4	02:03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3 Laporan	112,750,000				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		3 Laporan	115,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	02:04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			144,283,680							250,000,000	
2	12	4	02:04	1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	144,283,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		2 Laporan	250,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			163,950,000							230,000,000	
2	12	5	02:01		Penyusunan Profil Kependudukan			163,950,000							230,000,000	
2	12	5	02:01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	135,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		0 Dokumen	200,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	5 Dokumen							5 Dokumen		
2	12	5	02:01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	28,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			8,007,793,567							6,665,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,662,793,567							4,975,000,000	
2	13	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,644,755,753							3,500,000,000	
2	13	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3,461,695,753	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Bukit Pamewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		34 Orang/bulan	3,500,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	183,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			660,500,000							675,000,000	
2	13	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Paket	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		20 Paket	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
																PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		4 Paket	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 jenis	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25 jenis	160,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			45,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	80 eksemplar	15,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		80 eksemplar	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
2	13	1	02:06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Paket	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
2	13	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			350,000,000							400,000,000	
2	13	1	02:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Unit	250,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		100 Unit	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
										Umum						DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,692,537,814							105,000,000	
2	13	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		24 Laporan	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Laporan	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,587,537,814		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			285,000,000							295,000,000	
2	13	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	5 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai		5 Unit	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Alokasi Umum		Prima)				MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		32 Unit	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		15 Unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Unit	175,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:13		Penataan Organisasi			30,000,000							0	
2	13	1	02:13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
																PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			748,122,000							810,000,000	
2	13	4	02:01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			748,122,000							810,000,000	
2	13	4	02:01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		5 Dokumen	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		2 Dokumen	80,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	43 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		43 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan	86 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		86 Orang	60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Kapasitas										PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	43 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		43 Dokumen	85,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	43 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		43 Dokumen	85,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	15,000,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen	178,122,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Bukit Pamewa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		2 Dokumen	180,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
										Perangkat Desa						BERENCANA
2	13	4	02:01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	92 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		92 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	92 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		92 Orang	60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	12 Desa	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Desa	60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			596,878,000							700,000,000	
2	13	5	02:01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta			596,878,000							700,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota											
2	13	5	02:01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	40,000,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	5	02:01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga	120,000,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		20 Lembaga	130,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	5	02:01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	50,000,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		5 Laporan	70,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	5	02:01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Laporan	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
																AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	5	02:01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	286,878,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		4 Dokumen	350,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1,657,747,753							1,909,834,800	
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			392,279,800							377,279,800	
2	14	2	02:01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			225,000,000							210,000,000	
2	14	2	02:01	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	0 Dokumen	40,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		0 Dokumen	70,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan	1 Dokumen							1 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))										
2	14	2	02:01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	90,000,000		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	02:01	3	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	35,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	02:01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	0 Dokumen	20,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		0 Dokumen	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan	1 Laporan							1 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Formal dan Nonformal										
2	14	2	02:01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Laporan	20,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Laporan	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	02:01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	20,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Laporan	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	02:02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			167,279,800							167,279,800	
2	14	2	02:02	2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	02:02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
																BERENCANA
2	14	2	02:02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	147,279,800		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	147,279,800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			1,265,467,953							1,532,555,000	
2	14	3	02:01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			565,467,953							682,555,000	
2	14	3	02:01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	8 Organisasi	30,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		8 Organisasi	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	02:01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	43 Dokumen	25,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		43 Dokumen	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	14	3	02:01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Unit	30,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		5 Unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	02:01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	24,978,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	02:01	5	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media edukasi	4 jenis	15,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		4 jenis	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	02:01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	1 Laporan	192,335,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Laporan	192,555,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)										
2	14	3	02:01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	171,187,500				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		10 Laporan	200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	02:01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	76,967,453		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Laporan	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	02:02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			700,000,000							850,000,000	
2	14	3	02:02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2 Organisasi	300,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		2 Organisasi	350,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	02:02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	10 Unit	90,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		10 Unit	120,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
																DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	02:02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	43 Laporan	60,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		43 Laporan	80,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	02:02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	30 Orang	250,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		30 Orang	300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			20,585,831,389							22,168,129,929	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	12,522,603,478						100 Persen	13,177,402,982	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	15	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tesusunya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	50,000,000						2 dokumen	125,000,000	
2	15	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Adm. Keuangan	2 Sub Kegiatan	5,913,264,428						2 Sub Kegiatan	6,011,063,932	
2	15	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	5,776,500,428	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	58 Orang/bulan	5,874,299,932	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	136,764,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	2 Dokumen	136,764,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	3 Kantor	418,026,103						3 Kantor	410,026,103	
2	15	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	28,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai	OPD	5 Paket	28,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Mantap)				
2	15	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	53 Paket	130,026,103	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	53 Paket	130,026,103	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	20 Paket	40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	10 Dokumen	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	12 Laporan	192,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas	1 unit	150,000,000						1 unit	640,000,000	
2	15	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan yang disediakan	15 unit	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan	OPD	15 unit	160,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum		Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				
2	15	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	63 ASN	5,931,312,947						63 ASN	5,931,312,947	
2	15	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	125,726,947	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	1 Laporan	125,726,947	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,805,586,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	1 Laporan	5,805,586,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya opersional perkantoran	1 tahun	60,000,000						1 tahun	60,000,000	
2	15	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	0 Unit	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 Unit							1 Unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						dan dibayarkan Pajaknya										
						jumlah kendaraan roda 2	8 unit							8 unit		
2	15	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	0 Unit	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit							8 Unit		
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase armada angkutan laut jalan/layar	85 Persen	993,227,911						85 Persen	1,920,726,947	
2	15	2	02:01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Analisis Penyusunan Rencana Induk	3 Dokumen	375,000,000						3 Dokumen	375,000,000	
2	15	2	02:01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	375,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kab. Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	375,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02:02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya rambu-rambu petunjuk jalan	100 unit	128,227,911						100 unit	1,055,726,947	
2	15	2	02:02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	128,227,911	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kab. Kepulauan Mentawai	100 Unit	55,726,947	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	15	2	02:05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya sarana dan prasarana serta kapasitas sumber daya manusia	100 persen	140,000,000						100 persen	140,000,000	
2	15	2	02:05	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat kab. kepulauan mentawai	1 Laporan	90,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02:05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat kab. kepulauan mentawai	1 Laporan	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02:11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya rencana umum trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 dokumen	100,000,000						1 dokumen	100,000,000	
2	15	2	02:11	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat kab. kepulauan mentawai	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02:12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya peraturan tentang rencana tentang izin angkutan	1 laporan	75,000,000						1 laporan	75,000,000	
2	15	2	02:12	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan	1 Dokumen	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan	Masyarakat Kab. Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota			Semua Kelurahan	Umum		Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				
2	15	2	02:16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya peraturan tentang tarif kelas ekonomi	1 laporan	175,000,000						1 laporan	175,000,000	
2	15	2	02:16	1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat kab.kepulauan mentawai	3 Dokumen	175,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah barang melalui dermaga/pelabuhan per tahun	702302 ton	7,070,000,000						702302 ton	7,070,000,000	
						Jumlah Orang melalui dermaga/pelabuhan pertahun	319272 Orang							319272 Orang		
2	15	3	02:07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lancarnya transportasi angkutan laut	1 laporan	6,950,000,000						1 laporan	6,950,000,000	
2	15	3	02:07	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan	1 Laporan	6,950,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat kab.kepulauan mentawai	1 Laporan	6,950,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2	15	3	02:12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terpenuhinya pelayanan dinas perhubungan	1 Dokumen	120,000,000						1 Dokumen	120,000,000	
2	15	3	02:12	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kab. Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	120,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			9,232,176,637							1,000,000,000	
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	4,422,176,637						100 Persen	0	
2	16	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	10 Dokumen	40,000,000						10 Dokumen	0	
2	16	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	40,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	6 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya	100 Persen	2,541,220,616						100 Persen	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Administrasi keuangan Perangkat Daerah										
2	16	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2,461,220,616	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	23 Orang/bulan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	35 Dokumen	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	35 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen							0 Dokumen		
2	16	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	370,065,500						100 Persen	0	
2	16	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,065,500	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	85,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan	0	4 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Konektivitas (Mentawai Mantap)				
2	16	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	65,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	4 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	2 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	205,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	30 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Jenis	71,370,000						6 Jenis	0	
2	16	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai	0	3 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Mantap)				
2	16	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	36,370,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	4 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	100 Persen	1,204,520,521						100 Persen	0	
2	16	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	120,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	3 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,084,520,521		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 Persen	195,000,000						100 Persen	0	
2	16	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	65,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas	0	1 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												(Mentawai Mantap)				
2	16	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	0 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit							17 Unit		
2	16	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	1 gedung	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	1 gedung	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	5 Persen	1,250,000,000						5 Persen	1,000,000,000	
2	16	2	02:01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	65 Persen	1,250,000,000						65 Persen	1,000,000,000	
2	16	2	02:01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas	0	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												(Mentawai Mantap)				
2	16	2	02:01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	650,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	3 Layanan	700,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	02:01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (HIBAH PWI /150)	3 Dokumen	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	3 Dokumen	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	02:01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	2 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	70 Persen	3,560,000,000						70 Persen	0	
2	16	3	02:01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain Yang Dikelola	3 Domain	3,060,000,000						3 Domain	0	
2	16	3	02:01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	36 Unit	3,060,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan	0	36 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Tuapejat	Umum		Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				
2	16	3	02:02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks SPBE	2 indeks	500,000,000						2 indeks	0	
2	16	3	02:02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	02:02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0 Dokumen	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	0 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen						1 Dokumen		
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			40,000,000							0	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah	90 Persen	40,000,000						90 Persen	0	
2	20	2	02:01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang	10 Perangkat Daerah	40,000,000						10 Perangkat Daerah	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Kabupaten/Kota	Menyediakan Data Statistik Sektoral										
2	20	2	02:01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	40,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			5,715,230,034							5,397,000,000	
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	3,265,230,034						100 Persen	3,897,000,000	
2	17	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	22 orang	2,855,489,016						22 orang	3,070,000,000	
2	17	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	2,785,489,016	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	ASN pada dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	46 Orang/bulan	3,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	ASN pada dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0 Dokumen	70,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
																N
						terbayarnya honorarium ASN	7 orang							7 orang		
2	17	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12 buah	294,741,018						12 buah	157,000,000	
						tersedianya alat listrik	12 buah							12 buah		
2	17	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	7,660,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	tersedianya komponen listrik	0 Paket	10,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						persentase peningkatan layanan operasional perkantoran	4 kelompok							4 kelompok		
2	17	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	92,081,018	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	tersedianya komponen listrik	0 Paket	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						tesedianya jumlah dan jenis alat kebersihan kantor yang dibutuhkan	30 jenis							30 jenis		
2	17	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis dan jumlah yang dicetak dan digandakan	13 jenis	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	tersedianya komponen listrik	13 jenis	27,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Barang Cetakan	0 Paket							0 Paket		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						dan Penggandaan yang Disediakan										
2	17	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 jenis	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	tersedianya komponen listrik	4 jenis	20,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	tersedianya komponen listrik	0 Laporan	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						jumlah menghadiri undangan rakor luar daerah	14 kali							14 kali		
2	17	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa pelayanan Kantor	55 Persen	70,000,000						55 Persen	75,000,000	
2	17	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 rekening	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Koordinasi pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	4 rekening	75,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	50 Persen	45,000,000						50 Persen	45,000,000	
2	17	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 jenis	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	terpeliharanya kendaraan dinas	13 jenis	45,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi sehat	10 Persen	200,000,000						10 Persen	500,000,000	
2	17	5	02:01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus/pengawas/anggota yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	86 Persen	200,000,000						86 Persen	500,000,000	
2	17	5	02:01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	meningkatnya kualitas sdm usaha mikro	150 orang	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	pelatihan pengurus koperasi	150 orang	500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume usaha Koperasi	2 persen	200,000,000						2 persen	300,000,000	
2	17	6	02:01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang sehat	30 Persen	200,000,000						30 Persen	300,000,000	
2	17	6	02:01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kelompok usaha bidang pertanian, perikanan dan pariwisata yang mendapatkan penyuluhan koperasi	5 kelompok	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	peningkatan pemberdayaan akses pasar	5 kelompok	300,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						jumlah koperasi yang difasilitasi perubahan akta koperasinya	10 kecamatan					7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)		10 kecamatan		
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai	0 Unit Usaha							0 Unit Usaha		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota										
						koperasi pengelola pasar rakyat yang mendapatkan pendampingan manajemen	1 koperasi							1 koperasi		
						tersedianya jumlah ranperda tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan umkm	1 dokumen							1 dokumen		
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	5 persen	450,000,000						5 persen	700,000,000	
2	17	7	02:01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan Bina Kelompok UKM Produktif (Modal diatas Rp. 50Jt)	5 Persen	450,000,000						5 Persen	700,000,000	
2	17	7	02:01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0 Dokumen	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	kelompok koperasi	0 Dokumen	200,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						tersedianya data UMKM	500 umkm							500 umkm		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	17	7	02:01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	tersedianya data UMKM yang memenuhi syarat SIKP	120 umkm	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	kelompok koperasi	120 umkm	500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kelurahan							
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			1,600,000,000							0	
2	17	8	02:01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			1,600,000,000							0	
2	17	8	02:01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	meningkatnya produksi umkm	17 UMK	1,600,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)		17 UMK	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			400,000,000							600,000,000	
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan omset Pedagang pagar yang direvitalisasi	8 persen	400,000,000						8 persen	600,000,000	
3	30	3	02:01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan	30 Persen	400,000,000						30 Persen	600,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						tugas pokok dan fungsi perangkat daerah										
3	30	3	02:01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	pedagang pasar yang ada di kabupaten kepulauan mentawai	1 Unit	500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	3	02:01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	80 persen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	pedagang pasar yang ada di kabupaten kepulauan mentawai	80 persen	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1,551,392,462							400,000,000	
3	31	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	360,580,000						100 Persen	400,000,000	
3	31	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa pelayanan Kantor	55 Persen	360,580,000						55 Persen	400,000,000	
3	31	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	360,580,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Koordinasi pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	0 Laporan	400,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						terbayarnya Honor Non ASN	20 Orang							20 Orang		
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			1,190,812,462							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	31	2	02:01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			1,190,812,462							0	
3	31	2	02:01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah hibah daerah	10 kecamatan	1,190,812,462	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Betumonga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)		10 kecamatan	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						jumlah ikm yang diberikan pembinaan	4 kecamatan							4 kecamatan		
						jumlah ikm yang di revitalisasi	10 kecamatan							10 kecamatan		
						jumlah ikm yang di verifikasi paktual	10 kecamatann							10 kecamatann		
						jumlah produk kerja industri kerajinan bambu	1 produk							1 produk		
						jumlah produk kerja pengolahan sagu	1 produk							1 produk		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			1,170,000,000							765,000,000	
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80 persen	300,000,000						80 persen	100,000,000	
2	7	2	02:01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rencana Tenaga Kerja makro dan rencana Tenga kerja mikro yang ditetapkan	1 dokumen	300,000,000						1 dokumen	100,000,000	
2	7	2	02:01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga	1 Dokumen	300,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan	7. Pembangunan	Tenaga kerja	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PENANAMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Kerja Makro			Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Umum-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)				MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	20 persen	650,000,000						20 persen	430,000,000	
2	7	3	02:01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan	60 persen	650,000,000						60 persen	430,000,000	
2	7	3	02:01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 Orang	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Tenaga kerja	60 Orang	365,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
												7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)				
2	7	3	02:01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya rutin kantor BLK Mini	20 jenis	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Tenaga kerja	20 jenis	65,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartif struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	40 persen	220,000,000						40 persen	235,000,000	
2	7	5	02:01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang	Jumlah pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran	40 persen	220,000,000						40 persen	235,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	perjanjian kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota										
2	7	5	02:01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	30 dokumen	220,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Tenaga Kerja	30 dokumen	235,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5,394,553,792							6,213,000,000	
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	4,342,453,792						100 Persen	5,393,000,000	
2	18	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	30,000,000						100 persen	35,000,000	
2	18	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	5 Dokumen	35,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	100 persen	3,010,593,792						100 persen	3,100,000,000	
2	18	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang	2,941,393,792	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Pegawai DPMPTSP	24 orang	3,000,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)				
2	18	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 orang	69,200,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Pegawai DPMPTSP	7 orang	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumberdaya manusia terlatih	100 persen	36,200,000						100 persen	75,000,000	
2	18	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 stel	11,200,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Aparatur DPMPTSP	14 stel	25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 kali	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Aparatur DPMPTSP	6 kali	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100 persen	362,500,000						100 persen	566,000,000	
2	18	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	13,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Aparatur DPMPTSP	15 Jenis	15,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	118,500,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Aparatur DPMPTSP	3 Paket	245,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 jenis	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai	Aparatur DPMPTSP	15 jenis	25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Kerja)				SATU PINTU
2	18	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Aparatur DPMPTSP	6 Dokumen	6,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Aparatur DPMPTSP	36 Laporan	275,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanaya Administrasi Umum	100 persen	25,000,000						100 persen	685,000,000	
2	18	1	02:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	3 Unit	35,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana Kegiatan Administrasi Umum	100 persen	653,160,000						100 persen	665,000,000	
2	18	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 rekening	115,200,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	3 rekening	125,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 orang	537,960,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	26 orang	540,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100 persen	225,000,000						100 persen	267,000,000	
2	18	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	10 Unit	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah	DPMPTSP	10 Unit	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Tuapejat	Umum		(Mentawai Kerja)				TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 jenis	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	3 jenis	22,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	120,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	1 paket	130,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	10 Unit	15,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)	80 persen	690,000,000						80 persen	300,000,000	
2	18	2	02:01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi investasi kab/kota	80 persen	240,000,000						80 persen	0	
2	18	2	02:01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	240,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
												7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Kerja)				
2	18	2	02:02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi investasi kab/kota	1 dokumen	450,000,000						1 dokumen	300,000,000	
2	18	2	02:02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	450,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	85 Persen	201,600,000						85 Persen	250,000,000	
2	18	4	02:01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu	5 kecamatan	201,600,000						5 kecamatan	250,000,000	
2	18	4	02:01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Kecamatan	201,600,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Masyarakat/pelaku usaha	5 Kecamatan	250,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	2 persen	160,500,000						2 persen	270,000,000	
2	18	5	02:01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi investasi kab/kota	50 persen	160,500,000						50 persen	270,000,000	
2	18	5	02:01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan	10 Pelaku Usaha	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah	Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Penanaman Modal	Pelaksanaan Penanaman Modal			Tuapejat	Khusus Non Fisik		(Mentawai Kerja)				TERPADU SATU PINTU
2	18	5	02:01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	10 Pelaku Usaha	60,500,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	120,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			13,971,100,993							15,232,300,000	
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	3,671,100,993						100 Persen	3,897,300,000	
2	23	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	100 Persen	30,000,000						100 Persen	31,000,000	
2	23	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2 Dokumen	31,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kesejahteraan ASN	100 Persen	2,810,567,513						100 Persen	3,000,000,000	
2	23	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	2,617,917,513		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	23 Orang	2,800,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	192,650,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 dokumen	200,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kwalitas	90 Persen	268,263,480						90 Persen	276,300,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Administrasi Perkantoran										
2	23	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	20 Paket	11,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistikk kantor yang disediakan	3 Paket	51,263,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	3 Paket	51,300,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	17,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	13 Paket	18,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	2 Dokumen	16,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	36 Laporan	180,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	90 Persen	38,000,000						90 Persen	39,000,000	
2	23	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	38,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Unit	39,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90 Persen	454,270,000						90 Persen	475,000,000	
2	23	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3 Rekening	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	3 Rekening	15,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Disediakan										
2	23	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	439,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	11 Laporan	460,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya barang milik daerah dalam kondisi baik	90 Persen	70,000,000						90 Persen	76,000,000	
2	23	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Unit	16,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10 Unit	55,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15 Unit	5,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	20 Persen	10,300,000,000						20 Persen	11,335,000,000	
2	23	2	02:01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Sesuai SNP	20 Persen	150,000,000						20 Persen	175,000,000	
2	23	2	02:01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	10 Persen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Sekolah, Masyarakat, OPD	10 Persen	60,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	2	02:01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai	Persentase perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	1 Persen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Sekolah, Masyarakat, OPD	1 Persen	55,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					dengan Standar Nasional Perpustakaan											
2	23	2	02:01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Persen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Sekolah, Masyarakat, OPD	1 Persen	60,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	2	02:02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat	22 Persen	10,150,000,000						22 Persen	11,160,000,000	
2	23	2	02:02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	10 persen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, Sekolah, Masyarakat	10 persen	160,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	2	02:02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	10,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD, Sekolah, Masyarakat	1 Perpustakaan	11,000,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			235,050,000							235,050,000	
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	30 Persen	235,050,000						30 Persen	235,050,000	
2	24	2	02:01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daftar arsip aktif yang telah dibuat daftar	15 Persen	170,000,000						15 Persen	170,000,000	
2	24	2	02:01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terlaksananya Pembnaan/Penataan serta Pengawasan tata kelola kearsipan pada OPD/Desa	10 OPD/Desa	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD/ Desa	10 OPD/Desa	170,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	2	02:03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten	15 Persen	65,050,000						15 Persen	65,050,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	24	2	02:03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Orang	65,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Orang	65,050,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			21,514,682,289							8,677,500,000	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	6,832,574,872						100 Persen	6,972,500,000	
3	25	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	50,000,000						2 Dokumen	180,500,000	
						Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen							3 Dokumen		
						Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan LAPORAN hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen							2 Dokumen		
						Tersedianya Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan	23 Dokumen							23 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Dokumen RKA-SKPD										
						Tersedianya Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaina kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	3 Dokumen							3 Dokumen		
						Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan							4 Laporan		
3	25	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	4 Dokumen	25,500,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	5,772,324,872						41 Orang	5,500,000,000	
						Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen							12 Dokumen		
						Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen							50 Dokumen		
						Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen							2 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	16 Dokumen							16 Dokumen		
						Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen							2 Dokumen		
						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen							2 Dokumen		
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	48 Dokumen							48 Dokumen		
3	25	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	4,333,070,615	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	42 Orang/bulan	4,000,000,000	DINAS PERIKANAN
												5. Pembangunan Pertanian				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)				
3	25	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,439,254,257	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	1 Dokumen	1,500,000,000	DINAS PERIKANAN
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)				
3	25	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	317,500,000						3 Dokumen	387,000,000	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan							5 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	40 Laporan							40 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan	5 Paket							5 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan	6 Paket							6 Paket		
						Tersediannya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Paket							11 Paket		
						Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen							2 Dokumen		
						Tersedianya Jumah Paket Bahan Logistik Kantor	32 Paket							32 Paket		
						Tersedianya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket							6 Paket		
3	25	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	6 Paket	18,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	85,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		5. Pembangunan Pertanian Terpadu,	Dinas Perikanan	32 Paket	86,000,000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum		Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)				
3	25	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	37,500,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	5 Paket	38,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	2 Dokumen	35,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	40 Laporan	210,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Unit Kendaraan	1 unit	75,000,000						1 unit	75,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Urusan Pemerintah Daerah	Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit							10 unit		
						Tersedianya Jumlah Paket Mebel	0 unit							0 unit		
						Tersedianya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	2 unit							2 unit		
3	25	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	50 Unit	75,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	400,000,000						12 Laporan	450,000,000	
						Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan							2 Laporan		
3	25	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai	Dinas Perikanan	1 Laporan	450,000,000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Berdaya Saing)				
3	25	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitas	4 unit	217,750,000						4 unit	380,000,000	
						Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 unit							1 unit		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharan/Direhabilitasi	3 unit							3 unit		
						Terbayarnya Kendaraan DInas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perizinannya	14 unit							14 unit		
						Terbayarnya Pemeliharaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit							5 unit		
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap dan Lainnya	5 unit							5 unit		
3	25	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	1 Unit	30,000,000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	25	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	120,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	13 Unit	125,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	67,750,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	30 Unit	75,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Kecil	9000 ton	13,800,000,000						9000 ton	110,000,000	
3	25	3	02:02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang di Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	20 Kelompok	13,700,000,000						20 Kelompok	0	
						Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	950 Orang							950 Orang		
						Tersedianya Unit Usaha yang di Fasilitasi Penyaluran Bantuan Ppendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3 Unit Usaha							3 Unit Usaha		
3	25	3	02:02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah prasarana nelayanan yang diadakan	604 Unit	13,700,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	Dana Transfer Umum-Dana		5. Pembangunan Pertanian	Kelompok Nelayan	604 Unit	0	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum		Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)				
3	25	3	02:03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	1 Dokumen	100,000,000						1 Dokumen	110,000,000	
						Tersedianya Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	2 Layanan							2 Layanan		
3	25	3	02:03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Nelayan	1 Layanan	110,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan kelompok nelayan budidaya	250 ton	550,000,000						250 ton	910,000,000	
3	25	4	02:02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tersedianya Jumlah Kelompok Usaha Yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan	10 kelompok	550,000,000						10 kelompok	910,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						pendidikan dan pelatihan										
						Tersedianya Kelompok Pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	4 kelompok							4 kelompok		
						Tersedianya Kelompok Pembudidaya ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok							10 Kelompok		
3	25	4	02:02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pembudidaya Ikan	10 Kelompok	550,000,000	DINAS PERIKANAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kelurahan							
3	25	4	02:02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Kelembangaan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	4 Kelompok	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pembudidaya Ikan	4 Kelompok	110,000,000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kelurahan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan							
3	25	4	02:02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	10 Kelompok	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Matotonan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pembudidaya Ikan	10 Kelompok	250,000,000	DINAS PERIKANAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan							
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Kelompok/usaha kecil pengelolaan perikaka yang produktif	17 persen	332,107,417						17 persen	685,000,000	
3	25	6	02:01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko	1 Dokumen	57,107,417						1 Dokumen	55,000,000	
3	25	6	02:01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	1 Dokumen	57,107,417	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		5. Pembangunan Pertanian Terpadu,	Kelompok Pengolahan Perikanan	1 Dokumen	55,000,000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum		Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)				
3	25	6	02:02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terkendalinya Mutu Ikan	44 unit	200,000,000						44 unit	550,000,000	
3	25	6	02:02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pengolahan Perikanan	2 Unit Usaha	550,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	6	02:03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93 Ton	75,000,000						93 Ton	80,000,000	
						Tersedianya Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 unit							2 unit		
3	25	6	02:03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi	93 Ton	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		5. Pembangunan Pertanian Terpadu,	Kelompok Pengolahan Perikanan	93 Ton	80,000,000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum		Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			400,000,000							750,000,000	
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			400,000,000							750,000,000	
3	25	4	02:04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			400,000,000							750,000,000	
3	25	4	02:04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)		1 Unit	750,000,000	DINAS PERIKANAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			600,000,000							900,000,000	
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			400,000,000							700,000,000	
2	19	2	02:02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi			400,000,000							450,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
2	19	2	02:02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terbayarnya hibah untuk organisasi kepemudaan (KONI dan Pramuka)	2 Organisasi	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)		2 Organisasi	450,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			200,000,000							200,000,000	
2	19	3	02:05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			200,000,000							200,000,000	
2	19	3	02:05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)		0 Dokumen	200,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						Terfasilitasinya tournament olahraga tradisional/rekreasi (Laju Sampan)	1 Paket							1 Paket		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			12,415,431,448							11,260,216,210	
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,144,726,998							8,140,000,000	
3	26	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50,000,000							75,000,000	
3	26	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, laporan keuangan, dan lakip yang terbuat	4 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)		4 Dokumen	75,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Semua Kelurahan							
						Jumlah musrenbang tingkat kecamatan yang dihadiri	10 Kali					6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)		10 Kali		
3	26	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,303,403,498							6,350,000,000	
3	26	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	4,453,453,498	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				46 Orang/bulan	4,500,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	1,849,950,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	1,850,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						Lancarnya operasional Perkantoran	43 Orang							43 Orang		
						Terbayarnya honorarium ASN	43 Orang							43 Orang		
						Terbayarnya honorarium Non ASN	53 Orang							53 Orang		
3	26	1	02:04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			50,000,000							360,000,000	
3	26	1	02:04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)		12 Dokumen	60,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			468,323,500							420,000,000	
3	26	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	23,323,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)		0 Paket	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terbayarnya ATK	1 tahun	175,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 tahun	100,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Sipora Utara, Tuapejat							OLAHRAGA
						tersedianya alat kebersihan kantor	1 tahun							1 tahun		
						Tersedianya alat makan minum	4 kali							4 kali		
3	26	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)		0 Paket	50,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)		0 Dokumen	20,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)		12 Laporan	250,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			113,000,000							105,000,000	
3	26	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	113,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)		0 Laporan	105,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						terbayarnya listrik dan air	1 tahun							1 tahun		
3	26	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			160,000,000							180,000,000	
3	26	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	100,000,000						2 Unit	80,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	100,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Tuapejat							
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			4,750,000,000							1,250,000,000	
3	26	2	02:01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			330,000,000							400,000,000	
3	26	2	02:01	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	7 Dokumen	330,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)		7 Dokumen	400,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	2	02:02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			400,000,000							600,000,000	
3	26	2	02:02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung dilokasi kawasan wisata	7 Unit/Jenis/Paket	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)		7 Unit/Jenis/Paket	600,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						terbangunnya dermaga/jetty	1 Paket							1 Paket		
						Terbangunnya gapura/identitas gerbang	1 Paket							1 Paket		
						Terbangunnya ikon selamat datang dibumi sikerei	1 Paket							1 Paket		
						Terbangunnya pos pengawas pantai	1 Paket							1 Paket		
						Terbangunnya talud pantai mapadegat dan katiet	1 Paket							1 Paket		
						Terpeliharanya bangunan uma/panggung kesenian di mapadegat dan kulukubuk	2 Unit							2 Unit		
						Terpeliharanya gazebo di lokasi wisata mapadegat dan kulukubuk	6 Unit							6 Unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Terpeliharanya jalan pendestrian dikulukubuk dan mapadegat	500 Meter							500 Meter		
						Terpeliharanya kafetaria mapadegat dan kulukubuk	2 Unit							2 Unit		
						Terpeliharanya kantor TIC	3 Unit							3 Unit		
						Terpeliharanya toilet dan ruang bilas di lokasi wisata mapadegat dan kulukubuk	2 Unit							2 Unit		
						Tertatanya daerah aliran sungai kulukubuk	1 Paket							1 Paket		
						Tertatanya halaman homestay katiet	1 Paket							1 Paket		
3	26	2	02:03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			4,020,000,000							250,000,000	
3	26	2	02:03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Berkembannya desa muntei menjadi kampung wisata berbasis budaya/adat	1 Paket	4,020,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)		1 Paket	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						Berkembannya desa saibi samukop sebagai kawasan ekowisata	1 Paket							1 Paket		
						Tersediannya dokumen perencanaan kawasan wisata sakaladat siberut barat	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Tersediannya dokumen perencanaan penataan kawasan wisata pantai sikabaluan	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Tersediannya dokumen perencanaan pengembangan air	1 Dokumen							1 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						terjun mattobat di desa bulasat										
						Tersedianya Dokumen perencanaan kawasan wisata pantai mabolak sikakap	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Terselenggaranya mentawai gathering drone	1 Kali							1 Kali		
						Tertatanya kawasan pariwisata mapadegat	1 Paket							1 Paket		
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			100,000,000							1,450,000,000	
3	26	3	02:01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			100,000,000							1,450,000,000	
3	26	3	02:01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)		6 Dokumen	200,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			420,704,450							420,216,210	
3	26	5	02:01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			420,704,450							420,216,210	
3	26	5	02:01	4	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	tersediannya tenaga kerja pariwisata yang bersertifikat	30 Orang	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)		30 Orang	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	5	02:01	6	Fasilitasi Pengembangan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif	0 Orang	220,704,450		PENDAPATAN ASLI		6. Pembangunan		0 Orang	220,216,210	DINAS PARIWISATA,

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				DAERAH (PAD)		Pariwisata (Mentawai Emas)				PEMUDA DAN OLAHRAGA
						Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif	40 Orang							40 Orang		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			49,085,726,481							41,033,434,220	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	34,463,506,431						100 Persen	24,943,434,220	
4	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, Laporan Keuangan, LAKIP SKPD	20 dokumen	50,000,000						20 dokumen	100,000,000	
4	1	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	10 Dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi keuangan	2 layanan	11,766,219,358						2 layanan	372,000,000	
4	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/bulan	11,412,219,358	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	99 Orang/bulan	12,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	354,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Dokumen	360,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya aneka alat tulis kantor	12 Bulan	2,833,936,300						12 Bulan	3,054,998,130	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	699,998,300	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	4 Paket	824,998,130	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	167,678,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Paket	220,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	700,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	710,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,266,260,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	1,300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	8 Jenis	3,657,105,905						8 Jenis	3,900,000,000	
4	1	1	02:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 Unit	3,300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	11 Unit	3,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	82,105,905		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	10 Unit	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	275,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Unit	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan internet, listrik, air besih dan telefon seluler (Pimpnan Daerah)	12 Bulan	4,305,851,668						12 Bulan	4,598,140,000	
4	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	498,450,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	598,140,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						dan Listrik yang Disediakan			Tuapejat	Umum						
4	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	3,807,401,668	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	24 Laporan	4,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	8,647,541,900						12 Bulan	9,867,296,090	
4	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	8 Unit	440,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	6,547,550,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	25 Unit	7,552,305,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	10 Unit	25,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	180,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	4 Unit	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1,499,991,900	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	4 Unit	1,649,991,090	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH	2 Otang	1,460,000,000						2 Otang	1,121,000,000	
4	1	1	02:11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala	1 Orang/Bulan	350,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Orang/Bulan	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Tuapejat	Umum						
												10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
4	1	1	02:11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	28 Paket	110,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	28 Paket	121,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	1,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Orang/Bulan	650,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
												10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
4	1	1	02:12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terselenggaranya kebutuhan harian rumah tangga pimpinan daerah	12 Bulan	449,996,000						12 Bulan	500,000,000	
4	1	1	02:12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	449,996,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Paket	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
												10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
												10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
												10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
4	1	1	02:13		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	1 Dokumen	600,000,000						1 Dokumen	660,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Persentase LAKIP OPD kategori baik	65 Dokumen							65 Dokumen		
4	1	1	02:13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	36 Dokumen	312,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	36 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	66,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Laporan	70,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	36 Dokumen	84,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	36 Dokumen	90,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	78,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Dokumen	85,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	65,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi keprotokolan yang terfasilitasi	24 Kali	692,855,300						24 Kali	770,000,000	
4	1	1	02:14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	348,490,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	104,994,800	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	120,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	239,370,500	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Persentase jumlah produk hukum	2 Persen	12,535,501,300						2 Persen	13,850,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					KESEJAHTERAAN RAKYAT	yang digugat atau bermasalah										
						Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	100 Persen							100 Persen		
						Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi	88 Persen							88 Persen		
4	1	2	02:01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	85 Persen	563,860,000						85 Persen	670,000,000	
4	1	2	02:01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	220,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Terlaksananya Peningkatan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Terlaksananya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1 Dokumen							1 Dokumen		
4	1	2	02:01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Forum Komunikasi Kecamatan	10 Kecamatan	222,320,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	10 Kecamatan	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Inventarisasi Permasalahan di Kecamatan dan Solusinya	10 Kecamatan							10 Kecamatan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Terlaksananya Pembinaan terhadap Kecamatan	10 Kecamatan							10 Kecamatan		
						Terlaksananya Penyusunan Pedoman Teknis Penataan Wilayah Kecamatan	1 Dokumen							1 Dokumen		
4	1	2	02:01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Proses Administrasi Pergantian Antar Waktu Pimpinan dan Anggota Legislatif	1 Dokumen	191,540,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Menyusun Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Menyusun Bahan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj)	1 Dokumen							1 Dokumen		
4	1	2	02:02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	95 Persen	8,868,345,000						95 Persen	9,700,000,000	
4	1	2	02:02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 Dokumen	4,200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	2 Dokumen	4,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
4	1	2	02:02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	168,345,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	2 Dokumen	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	02:02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	4,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	3 Dokumen	5,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	02:03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	95 Persen	820,296,300						95 Persen	980,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	1	2	02:03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	15 Dokumen	220,333,300	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat & ASN	15 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	02:03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Pemda yang ditangani dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin	5 Kasus	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat & ASN	5 Kasus	620,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	02:03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan disebarluaskan	4 Dokumen	99,963,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat & ASN	4 Dokumen	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	02:04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	85 Persen	2,283,000,000						85 Persen	2,500,000,000	
4	1	2	02:04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Melakukan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Instansi Lainnya	1 Dokumen	2,283,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	masyarakat, OPD	1 Dokumen	2,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti	80 Persen	2,086,718,750						80 Persen	2,240,000,000	
4	1	3	02:01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik	30 Persen	457,924,500						30 Persen	475,000,000	
4	1	3	02:01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dewan Pengawas Defenitif	3 Orang	291,325,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	3 Orang	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Regulasi BUMD dan BLUD	2 Regulasi							2 Regulasi		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	1	3	02:01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen ETPD	2 Dokumen	166,599,500	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	2 Dokumen	175,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen koordinasi Tim Percepatan TPAKD	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Pengendalian Inflasi	6 Dokumen							6 Dokumen		
						Standarisasi satuan harga barang dan jasa (SSHBJ)	1 Dokumen							1 Dokumen		
4	1	3	02:02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	80 Persen	600,000,000						80 Persen	700,000,000	
4	1	3	02:02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	175,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	175,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	02:02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	175,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Laporan	175,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	02:02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Laporan	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	02:03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu	90 Persen	939,152,250						90 Persen	970,000,000	
						tersedianya layanan pengadaan barang dan jasa	1 Layanan							1 Layanan		
4	1	3	02:03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	341,337,400	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	masyarakat, OPD	12 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	1	3	02:03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	521,460,850	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	masyarakat, OPD	12 Dokumen	530,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	02:03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah PNS peserta sosialisasi peraturan Kebijakan pengadaan barang dan jasa	80 orang	76,354,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	masyarakat, OPD	80 orang	90,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	02:04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	30 Persen	89,642,000						30 Persen	95,000,000	
						Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik	30 Persen							30 Persen		
						Tersedianya layanan kebijaka SDA	1 Layanan							1 Layanan		
4	1	3	02:04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	89,642,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	95,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	2				SEKRETARIAT DPRD			33,485,122,252							30,419,470,976	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN			16,933,010,039							13,926,138,840	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
4	2	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,726,271,199							669,400,000	
4	2	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3,456,871,199	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		33 Orang/bulan	400,000,000	SEKRETARIAT DPRD
												10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
4	2	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 DOK	269,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 DOK	269,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,000,000							100,000,000	
4	2	1	02:05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Orang	100,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyedian Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	1,013,984,640						3 Jenis	1,063,984,640	
4	2	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS	8 Jenis	35,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	3 Paket	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS	3 Paket	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS	3 Jenis	50,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai	PNS	1 Paket	350,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
										Alokasi Umum		Prima)				
4	2	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS	1 Paket	100,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dok	78,984,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS	1 Dok	78,984,640	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS	6 Laporan	250,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			200,000,000							200,000,000	
4	2	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		0 Unit	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
						Tersedianya Mabel	2 Paket							2 Paket		
4	2	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,576,072,000							1,576,072,000	
4	2	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Rek	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		3 Rek	300,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Pegawai Kontrak	59 Orang	1,276,072,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		59 Orang	1,276,072,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			625,000,000							625,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	2	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendarran peorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	275,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		8 Unit	275,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	22 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		22 Unit	150,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Unit	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02:15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			9,591,682,200							9,591,682,200	
4	2	1	02:15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	20 Orang/Bulan	9,426,682,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		20 Orang/Bulan	9,426,682,200	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02:15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	164 Stel	165,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		164 Stel	165,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02:16		Layanan Administrasi DPRD			100,000,000							100,000,000	
4	2	1	02:16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	0 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		0 Laporan	100,000,000	SEKRETARIAT DPRD
						Terlasananya Fasilitasi Fraksi DPRD	4 Laporan							4 Laporan		
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			16,552,112,213							16,493,332,136	
4	2	2	02:01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			1,655,832,136							1,655,832,136	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	2	2	02:01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	265,832,136		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	265,832,136	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	16 Dokumen	1,100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		16 Dokumen	1,100,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1 Dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	40,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			1,015,000,000							1,015,000,000	
4	2	2	02:02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	32,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	32,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	32,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	32,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:02	3	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	1 Dokumen	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	2	2	02:03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			3,200,000,000							3,200,000,000	
4	2	2	02:03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	650,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		4 Laporan	650,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		4 Laporan	550,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	650,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		4 Laporan	650,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		4 Laporan	500,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		4 Laporan	350,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:04		Peningkatan Kapasitas DPRD			2,600,000,000							2,600,000,000	
4	2	2	02:04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman	6 Dokumen	1,900,000,000		Dana Transfer		10. Penataan Birokrasi		6 Dokumen	1,900,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Tugas DPRD				Umum-Dana Alokasi Umum		(Mentawai Prima)				
4	2	2	02:04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6 Dokumen	270,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		6 Dokumen	270,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		3 Orang	180,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	4 Orang	240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		4 Orang	240,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusun Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	10,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			5,431,280,077							5,500,000,000	
4	2	2	02:05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan	2,131,280,077		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Laporan	2,200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:05	3	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	3 Dokumen	3,300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		3 Dokumen	3,300,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:08		Fasilitasi Tugas DPRD			2,650,000,000							2,522,500,000	
4	2	2	02:08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6 Dokumen	2,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		6 Dokumen	2,500,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	0 Laporan	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		0 Laporan	22,500,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Kelurahan							
						Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	3 Dokumen							3 Dokumen		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	1				PERENCANAAN			9,637,779,747							10,496,900,000	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	6,373,779,747						100 Persen	6,768,900,000	
5	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	2 Layanan	4,465,919,747						2 Layanan	4,700,000,000	
5	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4,315,919,747	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	30 Orang/bulan	4,500,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 orang	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 orang	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangakat Daerah	5 Layanan	639,000,000						5 Layanan	710,000,000	
5	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Paket	25,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	160,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Paket	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	85,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	6 Paket	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	25,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	350,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	36 Laporan	360,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya layanan pengadaan Barang Milik Daerah	3 layanan	155,000,000						3 layanan	170,000,000	
5	1	1	02:07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Unit	85,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Unit	65,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Unit	20,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan penunjang perangkat daerah	2 layanan	776,860,000						2 layanan	786,900,000	
5	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	340,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		10. Penataan Birokrasi	OPD	12 Laporan	350,000,000	BADAN PERENCANAA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Umum-Dana Alokasi Umum		(Mentawai Prima)				N PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	436,860,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	436,900,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan pemeliharaan BMD perangkat daerah	4 layanan	337,000,000						4 layanan	402,000,000	
5	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	140,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	2 Unit	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	17,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	2 Unit	17,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Unit	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Unit	85,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	konsistensi program RPJMD Kedalam RKPD	100 persen	1,914,000,000						100 persen	1,550,000,000	
5	1	2	02:01		Penyusunan Perencanaan dan	jumlah tahapan penyusunan	3 tahapan	1,250,000,000						3 tahapan	1,110,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Pendanaan	dokumen perencanaan daerah										
5	1	2	02:01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	2 Berita Acara	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	02:01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota	2 berita acara	350,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	2 berita acara	360,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	02:01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	600,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Dokumen	550,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	02:02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Layanan Data dan Informasi Bidang Perencanaan	4 Dokumen	350,000,000						4 Dokumen	120,000,000	
5	1	2	02:02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	02:02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	78 Orang	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	78 Orang	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
									Kab. Kepulauan	Dana Transfer		10. Penataan Birokrasi				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Umum-Dana Alokasi Umum		(Mentawai Prima)				
5	1	2	02:03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah koordinasi pengendalian dan monitoring pembangunan	10 kali	314,000,000						10 kali	320,000,000	
5	1	2	02:03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	314,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Laporan	320,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan	85 Persen	1,350,000,000						85 Persen	2,178,000,000	
5	1	3	02:01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya Layanan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	4 layanan	450,000,000						4 layanan	1,127,500,000	
5	1	3	02:01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Laporan	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	20 Laporan	82,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	02:01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	18 Laporan	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	18 Laporan	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	02:01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan	25 Laporan	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai	OPD	25 Laporan	110,000,000	BADAN PERENCANAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum		Prima)				PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	02:01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	190,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	4 Laporan	210,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	02:02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersedianya layanan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	5 layanan	450,000,000						5 layanan	550,500,000	
5	1	3	02:02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	140,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	OPD	1 Dokumen	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	02:02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	OPD	1 Laporan	80,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	02:02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	1 Laporan	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan	OPD	1 Laporan	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Perekonomian						Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)				
5	1	3	02:02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	140,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	OPD	1 Dokumen	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	02:02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	OPD	1 Laporan	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	02:03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersedianya layanan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	4 layanan	450,000,000						4 layanan	500,000,000	
5	1	3	02:03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	180,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	2 Dokumen	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	1	3	02:03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	5 Laporan	70,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	02:03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10 Laporan	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	10 Laporan	110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	02:03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	10 Laporan	110,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	10 Laporan	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			750,000,000							950,000,000	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			750,000,000							950,000,000	
5	5	2	02:01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			300,000,000							400,000,000	
5	5	2	02:01	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	1 Laporan	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Laporan	400,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Otonomi Daerah										
5	5	2	02:02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	2 penelitian	450,000,000						2 penelitian	550,000,000	
5	5	2	02:02	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan OPD	1 Dokumen	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	5	2	02:02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan OPD	1 Dokumen	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	2				KEUANGAN			160,411,410,994							158,259,208,039	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	38,304,773,156						100 Persen	23,449,444,727	
5	2	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran	2 Layanan	254,736,000						2 Layanan	280,209,600	
5	2	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	254,736,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	3 Laporan	280,209,600	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran	2 Dokumen	34,768,367,656						2 Dokumen	20,085,207,427	
5	2	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	33,667,027,656	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	51 Orang/bulan	18,873,733,427	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Semua Kelurahan							
5	2	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	1,101,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	3 Dokumen	1,211,474,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2 Dokumen	100,000,000						2 Dokumen	110,000,000	
5	2	1	02:04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Laporan	110,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran	7 Layanan	799,589,500						7 Layanan	588,858,100	
5	2	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Paket	40,198,400	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	2 Paket	165,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	260,726,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Paket	290,900,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	68,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Paket	75,163,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,997,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Dokumen	17,596,700	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1 Laporan	254,736,000		Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai	0	1 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						dan Konsultasi SKPD				Alokasi Umum		Prima)				
5	2	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran	2 Layanan	328,000,000						2 Layanan	360,800,000	
5	2	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	328,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Unit	360,800,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran	1 Layanan	1,469,336,000						1 Layanan	1,528,269,600	
5	2	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	782,156,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	2 Laporan	772,371,600	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	687,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Laporan	755,898,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran	3 Layanan	584,744,000						3 Layanan	496,100,000	
5	2	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	128,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	3 Unit	140,800,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	209,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	3 Unit	229,900,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	247,744,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Unit	125,400,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Umum						
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	90 Persen	120,604,491,838						90 Persen	133,139,409,412	
5	2	2	02:01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	2,547,915,805						6 Dokumen	3,123,184,246	
5	2	2	02:01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	101,309,305		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	2 Dokumen	205,015,036	BADAN KEUANGAN DAERAH
												10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
5	2	2	02:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	77,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	2 Dokumen	132,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	842,109,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	2 Dokumen	926,320,010	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	839,018,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	2 Dokumen	1,031,820,350	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	216,897,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	2 Dokumen	238,586,700	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah	72 Orang	471,132,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	72 Orang	589,442,150	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Pemerintah Kabupaten/Kota										
5	2	2	02:02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Syarat Penyaluran DAU, DAK dan DID	5 Dokumen	957,893,700						5 Dokumen	1,053,674,600	
5	2	2	02:02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	308,514,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	4 Dokumen	339,365,950	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3 Dokumen	183,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	3 Dokumen	202,301,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	3 Dokumen	116,965,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	3 Dokumen	128,652,700	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	12 Laporan	223,013,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	12 Laporan	245,314,300	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)										
5	2	2	02:02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	9 Dokumen	125,491,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	9 Dokumen	138,040,650	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pedoman Pengambilan Keputusan Daerah dalam Penyusunan Anggaran dan Salah Satu Syarat Opini BPK	7 Dokumen	1,139,129,500						7 Dokumen	1,407,042,450	
5	2	2	02:03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	41 Dokumen	61,209,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	41 Dokumen	67,330,120	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	59,391,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	18 Laporan	65,330,100	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	37 Laporan	201,787,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	37 Laporan	287,966,580	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	2 Dokumen	206,211,000		Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai	0	2 Dokumen	314,832,100	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				Alokasi Umum		Prima)				
5	2	2	02:03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	122,609,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	2 Dokumen	134,869,900	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	148,186,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	2 Dokumen	163,004,600	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	72 Orang	339,735,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	72 Orang	373,709,050	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan Baik	2 Dokumen	115,959,552,833						2 Dokumen	127,555,508,116	
5	2	2	02:04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	12,485,992,060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Laporan	13,734,591,266	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	103,473,560,773	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Laporan	113,820,916,850	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum						
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	80 Persen	418,873,000						80 Persen	429,385,050	
5	2	3	02:01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara Baik dan Benar	6 Dokumen	418,873,000						6 Dokumen	429,385,050	
5	2	3	02:01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	36,645,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	4 Dokumen	48,310,050	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3	02:01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36 Laporan	92,353,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	36 Laporan	108,028,800	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3	02:01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Laporan	76,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	10 Laporan	83,875,550	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3	02:01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	121,297,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	30 Dokumen	133,427,250	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3	02:01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	56,793,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	2 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3	02:01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang	2 Laporan	35,535,000		Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai	0	2 Laporan	55,743,400	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Disusun				Alokasi Umum		Prima)				
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap total pendapatan	8.5 Persen	1,083,273,000						8.5 Persen	1,240,968,850	
5	2	4	02:01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi, Itensifikasi dan Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	6 Dokumen	1,083,273,000						6 Dokumen	1,240,968,850	
5	2	4	02:01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	186,692,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Laporan	95,361,200	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	4	02:01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Unit	182,588,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	4 Unit	90,847,350	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	4	02:01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1 Obyek Pajak	127,299,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Obyek Pajak	272,686,700	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	4	02:01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	99,983,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Dokumen	109,981,850	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	4	02:01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	129,595,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Dokumen	279,265,250	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	4	02:01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	357,115,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	4 Laporan	392,826,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	3				KEPEGAWAIAN			8,050,079,408							9,491,000,000	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	5,100,079,408						100 Persen	6,497,000,000	
5	3	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100 Persen	3,781,756,826						100 Persen	5,003,000,000	
5	3	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	3,631,756,826	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	55 Orang/bulan	4,500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	1 Dokumen	451,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	1 Dokumen	26,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	2 Laporan	26,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	3	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran pelaksanan tugas dan fungsi perangkat daerah	100 Persen	365,000,000						100 Persen	380,000,000	
5	3	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	pegawai BKPSDM	5 Paket	16,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	pegawai BKPSDM	1 Paket	51,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	pegawai BKPSDM	3 Paket	71,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	pegawai BKPSDM	3 Paket	16,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	pegawai BKPSDM	5 Dokumen	16,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	pegawai BKPSDM	20 Laporan	210,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	3	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanana tugas dan fungsi perangkat Daerah	12 Laporan	700,000,000						12 Laporan	760,000,000	
5	3	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	3 Laporan	260,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tebaga Kontrak yg di bayarkan	18 Orang	450,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	18 Orang	500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TerlaksananyaKegiatan Perkantoran	5 Unit	253,322,582						5 Unit	354,000,000	
5	3	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	3 Unit	31,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	6 Unit	21,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	0 Unit	51,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5 Unit							5 Unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Dipelihara										
5	3	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	153,322,582	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	1 Unit	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	200 indek	2,950,000,000						200 indek	2,994,000,000	
5	3	2	02:01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya Pemberhentian dan Informasi ASN	60 Persen	375,000,000						60 Persen	396,000,000	
5	3	2	02:01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN di Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	210,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	02:01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN di Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	76,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	02:01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN di Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	110,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	02:02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN Sesuai Anjab dan ABK	60 Persen	725,000,000						60 Persen	736,000,000	
5	3	2	02:02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	650,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN di Kabupaten kepulauan Mentawai	1 Dokumen	660,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	3	2	02:02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	300 Dokumen	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN di Kabupaten kepulauan Mentawai	300 Dokumen	76,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	02:03		Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya Kapasitas Kinerja ASN	60 Persen	1,700,000,000						60 Persen	1,710,000,000	
5	3	2	02:03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20 Orang	700,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN di Kabupaten Kepulauan Mentawai	20 Orang	710,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	02:03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN di Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	1,000,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	02:04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya Disiplin ASN	60 Persen	150,000,000						60 Persen	152,000,000	
5	3	2	02:04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	1 Dokumen	76,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	02:04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	10 Orang	76,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			3,100,000,000							2,338,615,000	
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi	10 Persen	3,100,000,000						10 Persen	2,338,615,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	4	2	02:01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksanannya Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan	20 Persen	800,000,000						20 Persen	638,615,000	
5	4	2	02:01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5 Orang	800,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN Kabupaten Kepulauan Mentawai	5 Orang	638,615,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen							1 Dokumen		
5	4	2	02:02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Peningkatan dan pengembangan Kopetensi Manajerial dan Fungsional	25 Persen	2,300,000,000						25 Persen	1,700,000,000	
5	4	2	02:02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	2,300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Laporan	1,700,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6	1				INSPEKTORAT DAERAH			9,790,307,543							12,105,000,000	
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas	100 Persen	6,458,516,270						100 Persen	7,045,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						perangkat daerah										
6	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5,139,055,743						100 Persen	4,500,000,000	
6	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4,989,055,743		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	37 Orang/bulan	4,300,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	12 Dokumen	200,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	81,617,104						100 Persen	150,000,000	
						Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen							100 Persen		
6	1	1	02:05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	81,617,104		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 Orang	150,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	398,000,000						100 Persen	675,000,000	
6	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	13,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Gedung Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	11 Paket	30,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	6 Paket	10,000,000		Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	1. Pembangunan	Gedung Kantor dan	6 Paket	20,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Tangga yang Disediakan				Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendidikan (Mentawai Cerdas)	ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai			
6	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	120,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Gedung Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Paket	300,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Gedung Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Paket	50,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Gedung Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Dokumen	25,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Gedung Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	12 Laporan	250,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	100 Persen	244,245,423						100 Persen	820,000,000	
6	1	1	02:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas	1 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai	Kantor dan ASN dilingkungan	1 Unit	450,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				Alokasi Umum		Prima)	Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai			
6	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	72,663,423		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	5 Unit	120,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket software yang disediakan	1 Paket	71,582,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Paket	250,000,000	INSPEKTORAT
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit							0 Unit		
6	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	449,598,000						100 Persen	600,000,000	
6	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	137,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	36 Laporan	150,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	312,598,000				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	11 Laporan	450,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	146,000,000						100 Persen	300,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
6	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	60,000,000				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Sarana Kantor dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Unit	100,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	56,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Sarana Kantor dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	6 Unit	150,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Jenis	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Sarana Kantor dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	5 Jenis	50,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP	level 3 level	2,705,000,000						level 3 level	3,800,000,000	
						Persentase tindak lanjut temuan	80 Persen							80 Persen		
6	1	2	02:01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Internal	100 Persen	2,213,000,000						100 Persen	3,120,000,000	
6	1	2	02:01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20 Laporan	423,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	20 Laporan	500,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2	02:01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	330,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	12 Laporan	420,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2	02:01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	108 Laporan	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan	108 Laporan	500,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
													Mentawai			
6	1	2	02:01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	37 Laporan	200,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2	02:01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	16 Laporan	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	16 Laporan	800,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2	02:01	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Kesepakatan	350,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2	02:01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Dokumen	350,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2	02:02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	100 Persen	492,000,000						100 Persen	680,000,000	
6	1	2	02:02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	95,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD, Aparatur Desa, Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Laporan	180,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2	02:02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	397,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD, Aparatur Desa, Masyarakat	12 Laporan	500,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
										Umum			dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai			
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	85 Persen	626,791,273						85 Persen	1,260,000,000	
6	1	3	02:01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 Persen	206,791,273						100 Persen	330,000,000	
6	1	3	02:01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Rekomendasi	30,000,000	INSPEKTORAT
6	1	3	02:01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi	194,791,273		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	0 Rekomendasi	300,000,000	INSPEKTORAT
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi							2 Rekomendasi		
6	1	3	02:02		Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	420,000,000						100 Persen	930,000,000	
						Terlaksananya Zona Integritas	100 Persen							100 Persen		
6	1	3	02:02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	4 perangkat daerah	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD dan Aparatur Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan	4 perangkat daerah	300,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Daerah							Mentawai			
6	1	3	02:02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	9 perangkat daerah	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD dan Aparatur Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	9 perangkat daerah	180,000,000	INSPEKTORAT
6	1	3	02:02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD dan Aparatur Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	5 Kegiatan	300,000,000	INSPEKTORAT
6	1	3	02:02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD dan Aparatur Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 perangkat daerah	150,000,000	INSPEKTORAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			6,818,195,941							7,666,800,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,641,304,441							7,331,800,000	
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80,000,000							82,500,000	
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		8 Laporan	82,500,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,606,744,341							3,105,200,000	
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	23 orang/bulan	2,354,333,618		Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai		23 orang/bulan	2,360,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Tunjangan ASN				Alokasi Umum		Prima)				
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	252,410,723		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Dokumen	745,200,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			120,050,100							186,100,000	
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	2,500,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		10 Jenis	3,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Paket	45,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2,550,000				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		10 Paket	3,100,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	95,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		26 Laporan	135,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3,580,000,000							3,635,000,000	
7	1	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		100 Unit	135,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	3,500,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			215,750,000							230,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	24,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		0 Laporan	30,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	191,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Laporan	200,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38,760,000							93,000,000	
7	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		3 Unit	65,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		4 Unit	7,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14,260,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		10 Unit	21,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7,200,000							25,000,000	
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7,200,000							25,000,000	
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	7,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		0 Laporan	25,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain	12 Laporan							12 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						yang Dilimpahkan										
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			59,709,000							115,000,000	
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			59,709,000							115,000,000	
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	34,709,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		0 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Laporan	75,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			74,982,500							130,000,000	
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			74,982,500							130,000,000	
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	100 Orang	23,982,500				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		100 Orang	75,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Kesatuan Republik Indonesia	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	51,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24 Dokumen	55,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			35,000,000							65,000,000	
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			35,000,000							65,000,000	
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Dokumen	65,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			2,462,239,078							2,399,037,870	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B Indek	2,239,475,678						B Indek	2,171,790,470	
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Desa yang di Evaluasi	3 Desa	30,000,000						3 Desa	34,996,000	
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pelaksanaan Pembangunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3 Laporan	34,996,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
											Pelayanan Dasar					
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan adminsitasi umum yang dilaksanakan	11 Kegiatan	1,652,749,178						11 Kegiatan	1,568,527,129	
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	1,502,749,178		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan	11 Orang/bulan	1,312,867,129	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan	12 Dokumen	255,660,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan yang dilaksankan	11 Layanan	108,966,500						11 Layanan	108,966,500	
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,023,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur pemerintahan Kecamatan	1 Paket	5,023,700	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	29,406,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur pemerintahan Kecamatan	4 Paket	29,406,200	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5,011,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur pemerintahan Kecamatan	2 Paket	5,011,600	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	69,525,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur pemerintahan Kecamatan	6 Laporan	69,525,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana diadakan	5 Jenis	73,000,000						5 Jenis	78,500,000	
7	1	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur pemerintahan Kecamatan	20 Unit	18,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur pemerintahan Kecamatan	3 Unit	35,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur pemerintahan Kecamatan	1 Unit	25,500,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan adminsitasi umum yang dilaksanakan	12 Bulan	336,000,000						12 Bulan	336,000,000	
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintah Kecamatan	12 Laporan	12,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	324,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintah Kecamatan	16 Laporan	324,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang dan aset yang dipelihara	2 Jenis	38,760,000						2 Jenis	44,800,841	
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	2 Unit	2,760,000		Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk	10. Penataan Birokrasi (Mentawai	Aset barang milik daerah yang dikelola	2 Unit	2,760,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Alokasi Umum	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prima)	oleh Kecamatan Siberut Tengah			
7	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aset barang milik daerah yang dikelola oleh Kecamatan Siberut Tengah	6 Unit	6,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aset barang milik daerah yang dikelola oleh Kecamatan Siberut Tengah	1 Unit	36,040,841	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B Indek	23,911,000						B Indek	23,911,000	
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan Kepada Camat	1 Kegiatan	23,911,000						1 Kegiatan	23,911,000	
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	23,911,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat kecamatan Siberut Tengah	1 Laporan	23,911,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B Indek	39,999,900						B Indek	39,999,900	
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	3 Desa	39,999,900						3 Desa	39,999,900	
						Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 kali							1 kali		
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan			20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur,Pemerintahan, Masyarakat dan TP-PKK		20,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Pembangunan di Desa				Tengah, Semua Kelurahan	Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	19,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur,Pemerintahan, Masyarakat dan TP-PKK	1 Laporan	19,999,900	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B indeks	82,298,500						B indeks	86,782,500	
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kecamatan sesuai penugasan kepala daerah	1 Kegiatan	82,298,500						1 Kegiatan	86,782,500	
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	18,782,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat kecamatan Siberut Tengah	100 Orang	18,782,500	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	63,516,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat kecamatan Siberut Tengah	12 Dokumen	68,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B Indek	76,554,000						B Indek	76,554,000	
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasiltasi ADD yang dilaksanakan	4 kali	76,554,000						4 kali	76,554,000	
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	76,554,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Desa	3 Dokumen	76,554,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			2,380,087,572							2,744,766,163	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	2,130,485,363						100 Persen	2,463,944,000	
						Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen							100 Persen		
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 Persen	80,770,000						90 Persen	110,000,000	
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	80,770,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Pedesaan di wilayah Kecamatan	4 Laporan	110,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
											Pelayanan Dasar					
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunya Pelaporan Administrasi Keuangan	90 Persen	1,522,644,061						90 Persen	1,750,000,000	
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima Gaji dan tunjangan daerah	11 0rang	1,322,644,061	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Lingkungan Pegawai Kecamatan Siberut Barat	11 0rang	1,400,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Lingkungan Pegawai Kecamatan Siberut Barat	14 Dokumen	350,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Perangkat Daerah	90 Persen	128,516,443						90 Persen	168,800,000	
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8,000,000					Pegawai OPD Kecamatan Siberut Barat		8,800,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	38,016,443	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai OPD Kecamatan Siberut Barat	3 Paket	45,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 buku	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai OPD Kecamatan Siberut Barat	12 buku	5,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai OPD Kecamatan Siberut Barat	10 Laporan	110,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75,000,000							85,000,000	
7	1	1	02:07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Unit	85,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Honorarium Jasa Pelayanan Umum Kantor	90 Persen	259,200,000						90 Persen	280,144,000	
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	12 Laporan	30,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	235,200,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	12 Laporan	250,144,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pembayaran Pajak dan Jasa Pemeliharaan Barang Inventaris	90 Persen	64,354,859						90 Persen	70,000,000	
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	34,354,859		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan Siberut Barat	2 Unit	35,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan Siberut Barat	2 Unit	35,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Barat	B Indek	51,960,000						B Indek	85,000,000	
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tersedianya Dokumen Kependudukan Masyarakat	90 Persen	51,960,000						90 Persen	85,000,000	
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	51,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	6 Laporan	85,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Kelurahan		Pelayanan Publik					
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan	62 persen	55,725,709						62 persen	15,822,163	
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 Persen	55,725,709						90 Persen	15,822,163	
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			41,903,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		0	KECAMATAN SIBERUT BARAT
												10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	13,822,709	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	2 Laporan	15,822,163	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Perayaan HUT RI	100 Persen	76,846,500						100 Persen	103,000,000	
						Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diseles aikan	100 Persen							100 Persen		
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Perayaan HUT RI	90 Persen	76,846,500						90 Persen	103,000,000	
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	100 Orang	21,485,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	asyarakat Wilayah Kecamatan Siberut Barat	100 Orang	38,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pelayanan Publik				
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Laporan	55,361,500	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	asyarakat Wilayah Kecamatan Siberut Barat	3 Laporan	65,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Persen	65,070,000						100 Persen	77,000,000	
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pemerintahan yang bebas KKN	90 Persen	65,070,000						90 Persen	77,000,000	
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dokumen	65,070,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Pemerintahan Desa Wilayah Kecamatan Siberut Barat	4 Dokumen	77,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			2,516,836,691							3,214,200,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,354,836,691							2,874,200,000	
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan			49,995,000							60,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	49,995,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)		8 Laporan	60,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
												3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,769,005,000							2,100,000,000	
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1,364,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		14 Orang/bulan	1,600,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	405,005,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Dokumen	500,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			179,036,691							225,000,000	
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)		12 Paket	20,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	32 Paket	99,036,691	Kab. Kepulauan Mentawai,	Dana Transfer Umum-Dana		1. Pembangunan Pendidikan		32 Paket	110,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Disediakan			Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Alokasi Umum		(Mentawai Cerdas)				
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		4 Paket	15,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Laporan	80,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90,000,000							135,000,000	
7	1	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		12 Unit	60,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		6 Unit	50,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	1	02:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		3 Unit	25,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			266,800,000							354,200,000	
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Laporan	50,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Disediakan										
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	226,800,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)		12 Laporan	304,200,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7,000,000							60,000,000	
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7,000,000							60,000,000	
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)		12 Laporan	60,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			55,000,000							90,000,000	
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			55,000,000							90,000,000	
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			40,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)		6 Laporan	50,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN			60,000,000							140,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					UMUM											
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			60,000,000							140,000,000	
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)		150 Orang	90,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	50,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen							0 Dokumen		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			40,000,000							50,000,000	
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan			40,000,000							50,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Pengawasan Pemerintahan Desa											
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	40,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		3 Dokumen	50,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			3,234,634,966							4,583,000,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	2,922,685,966						100 Persen	4,045,000,000	
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya layanan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja	1 layanan	139,998,000						1 layanan	190,000,000	
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	139,998,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Laporan	190,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya layanan administrasi keuangan	2 layanan	2,171,429,783						2 layanan	2,850,000,000	
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,041,429,783	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	19 Orang/bulan	2,500,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	350,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI UMUM	4 LAYANAN	157,863,183						4 LAYANAN	210,000,000	
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,812,800	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Paket	12,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	41,050,383	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Paket	75,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Paket	13,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	110,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya layanan penunjang urusan pemerintah	2 layanan	251,700,000						2 layanan	465,000,000	
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening penyediaan jasa komunikasi air dan listrik yang terbayarkan	1 Rekening	12,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Rekening	15,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	239,700,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		10. Penataan Birokrasi	OPD	12 Laporan	450,000,000	KECAMATAN SIBERUT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Umum-Dana Alokasi Umum		(Mentawai Prima)				SELATAN
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya layanan pemeliharaan BMD	1 layanan	201,695,000						1 layanan	330,000,000	
7	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	90,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	5 Unit	100,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,135,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Unit	100,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	1	02:09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	86,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Unit	130,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Selatan	B Indek	61,215,000						B Indek	78,000,000	
7	1	2	02:01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	teresdianya layanan penyelenggaraan kegiatan tingkat kecamatan	1 layanan	26,215,000						1 layanan	40,000,000	
7	1	2	02:01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	26,215,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	5 Dokumen	40,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	tersedianya layanan urusan pe,merintahan yang dilimpahkan	1 layanan	35,000,000						1 layanan	38,000,000	
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Laporan	38,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan	62 persen	50,734,000						62 persen	100,000,000	
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	tersedianya layanan pemberdayaan Desa	2 layanan	50,734,000						2 layanan	100,000,000	
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	24,519,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	26,215,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	1 Laporan	60,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diseles aikan	100 Persen	100,000,000						100 Persen	175,000,000	
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	tersedianya layanan urusan pemerintahan umum	2 layanan	100,000,000						2 layanan	175,000,000	
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti	50 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		10. Penataan Birokrasi	masyarakat	50 Orang	75,000,000	KECAMATAN SIBERUT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		(Mentawai Prima)				SELATAN
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu	85 Persen	100,000,000						85 Persen	185,000,000	
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	tersedianya layanan fasilitasi dan koordinasi desa	2 layanan	100,000,000						2 layanan	185,000,000	
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	1 Dokumen	125,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	6	02:01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi	5 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan			10. Penataan Birokrasi	Desa	5 Dokumen	60,000,000	KECAMATAN SIBERUT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan			(Mentawai Prima)				SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			2,972,673,930							3,361,494,800	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	2,713,159,130						100 Persen	3,027,126,000	
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	80 Persen	21,940,452						80 Persen	38,750,000	
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	21,940,452	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Desa di Kecamatan Sipora Utara	6 Laporan	38,750,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya KegiatanAdministrasi Keuangan	100 Persen	1,924,481,828						100 Persen	2,032,200,000	
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1,896,081,828	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN OPD Kecamatan Sipora Utara	14 Orang/bulan	2,000,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Ketersediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	28,400,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN OPD Kecamatan Sipora Utara	12 bulan	32,200,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Daerah	100 Persen	112,960,850						100 Persen	185,450,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	4 Jenis	4,960,850	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Staf Kecamatan Sipora Utara	4 Jenis	5,500,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor yang tersedia	13 Jenis	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Staf Kecamatan Sipora Utara	13 Jenis	88,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
						Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	25 Jenis							25 Jenis		
						Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang tersedia	559 kotak							559 kotak		
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang tersedia	6 Jenis	8,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Staf Kecamatan Sipora Utara	6 Jenis	11,750,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Staf Kecamatan Sipora Utara	12 Laporan	80,200,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik	75 Persen	60,000,000						75 Persen	93,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Daerah	Daerah Penunjang Ueusan Pemerintah Daerah										
7	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Staf Kantor Camat Sipora Utara	5 Unit	93,500,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urrusan Pemerintah Daerah	100 Persen	508,776,000						100 Persen	511,776,000	
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	24,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kantor Camat dan Pegawai Kontrak Kantor Camat Sipora Utara	12 bulan	27,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	28 Orang	484,776,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kantor Camat dan Pegawai Kontrak Kantor Camat Sipora Utara	28 Orang	484,776,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80 Persen	85,000,000						80 Persen	165,450,000	
7	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan	1 Unit	25,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		10. Penataan Birokrasi	Staf kantor Camat Sipora	1 Unit	33,000,000	KECAMATAN SIPORA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Umum-Dana Alokasi Umum		(Mentawai Prima)	Utara			UTARA
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staf kantor Camat Sipora Utara	6 Unit	65,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	10,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staf kantor Camat Sipora Utara	14 Unit	17,450,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Staf kantor Camat Sipora Utara	1 Unit	50,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Utara	B Indek	53,000,000						B Indek	77,000,000	
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat	2 Urusan	53,000,000						2 Urusan	77,000,000	
7	1	2	02:04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan terhadap masyarakat	150 Dokumen	28,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Sipora Utara	150 Dokumen	38,500,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Julah Penduduk yang terekam KTP-EL	100 Orang	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Sipora Utara	100 Orang	38,500,000	KECAMATAN SIPORA UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan							12 Laporan		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan	62 persen	47,794,800						62 persen	60,000,000	
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65 Persen	47,794,800						65 Persen	60,000,000	
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 kali	22,794,800	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kelembagaan Masyarkat di Kecamatan Sipora Utara	1 kali	30,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
												3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				
												3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	6 Laporan	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan	Kelembagaan Masyarkat di Kecamatan Sipora Utara	6 Laporan	30,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kelurahan			Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diseles aikan	100 Persen	113,720,000						100 Persen	145,000,000	
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	113,720,000						100 Persen	145,000,000	
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	33,720,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat di Kecamatan Sipora Utara	400 Orang	50,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat di Kecamatan Sipora Utara	6 Dokumen	95,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Laporan	85 Persen	45,000,000						85 Persen	52,368,800	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					PEMERINTAHAN DESA	Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu										
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi, mendapat rekomendasi dan terawasi	80 Persen	45,000,000						80 Persen	52,368,800	
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang TerfasilitasiPengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa	6 Desa	45,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Aparatur Desa di Kecamatan Sipora Utara	6 Desa	52,368,800	KECAMATAN SIPORA UTARA
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen							6 Dokumen		
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			3,475,642,107							4,073,640,622	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	3,261,642,107						100 Persen	3,747,640,622	
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	100 Persen	80,000,000						100 Persen	150,000,000	
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Kali	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Sipora Selatan	12 Kali	150,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjanang ASN	100 Persen	2,604,440,507						100 Persen	2,905,640,622	
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2,504,440,507	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sipora Selatan	23 Orang/bulan	2,785,640,622	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	23 Orang	120,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Paket yang tersedia	100 Persen	180,000,000						100 Persen	270,000,000	
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 jenis	5,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan sipora Selatan	6 jenis	15,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan sipora Selatan	2 Paket	25,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan sipora Selatan	3 Paket	65,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan sipora Selatan	2 Paket	15,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Kecamatan sipora Selatan	24 Laporan	150,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Sioban		Pelayanan Publik					
7	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	100 Persen	58,000,000						100 Persen	65,000,000	
7	1	1	02:07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	38,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Sipora Selatan	1 Unit	39,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	1 Unit	26,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	100 Persen	316,000,000						100 Persen	317,000,000	
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	3 Rekening enis	24,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	3 Rekeningenis	24,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Orang	292,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	20 Orang	293,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100 Persen	23,201,600						100 Persen	40,000,000	
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	13,201,600	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	4 Unit	25,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	2 jenis	10,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		10. Penataan Birokrasi	Kecamatan Sipora Selatan	2 jenis	15,000,000	KECAMATAN SIPORA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Lainnya yang Dipelihara			Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Umum-Dana Alokasi Umum		(Mentawai Prima)				SELATAN
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepatuhan Teknis Peraturan Perizinan	100 Persen	55,000,000						100 Persen	90,000,000	
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Kepatuhan Teknis Peraturan Pelayanan Perizinan	100 Persen	55,000,000						100 Persen	90,000,000	
7	1	2	02:04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	10 Laporan	30,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Kecamatan Sipora Selatan	12 Laporan	60,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam Forum Pembangunan	100 Persen	70,000,000						100 Persen	85,000,000	
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peksanaan Forum Pembangunan Tk,Kecamatan	100 Persen	50,000,000						100 Persen	60,000,000	
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan		35,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Konektivitas (Mentawai Mantap)				
												10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
												3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	7 Laporan	25,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	3	02:06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penumbuhan Karakter Kesadaran dalam Pemangamalan Pancasila	100 Persen	20,000,000						100 Persen	25,000,000	
7	1	3	02:06	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Keluarga	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)	Kecamatan Sipora Selatan	1 Keluarga	25,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionaldalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pelestarian bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kali							1 Kali		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Nilai-Nilai Bhinnekam Tunggal Ika	100 Persen	59,000,000						100 Persen	66,000,000	
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika	100 Persen	59,000,000						100 Persen	66,000,000	
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	100 Orang	24,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	100 Orang	30,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Indonesia	1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Laporan	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	1 Laporan	36,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penataan Dokumen Aset di Tk.Kecamatan	100 Persen	30,000,000						100 Persen	85,000,000	
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penataan Dokumen dan Pengawasa Aset Desa di Tk.Kecamatan	100 Persen	30,000,000						100 Persen	85,000,000	
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Desa	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	7 Desa	85,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			2,688,703,015							3,070,703,339	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,424,479,015							2,686,917,339	
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,819,104,231							2,009,405,355	
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1,711,871,815	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16 Orang/bulan	1,783,405,355	KECAMATAN PAGAI UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	107,232,416	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	226,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			227,092,784							273,811,984	
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	12,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	13,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
						penerangan Kantor Tercukupi disetiap Bulan	4 Jenis							4 Jenis		
7	1	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop Komputer dan Printer	7 Paket	77,092,784	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Paket	77,092,784	KECAMATAN PAGAI UTARA
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Serta Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor	51 Jenis	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				51 Jenis	60,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	8,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	8,800,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	15 Jenis							15 Jenis		
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	114,919,200	KECAMATAN PAGAI UTARA
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			348,782,000							372,000,000	
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	0 Laporan	12,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	12,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Disediakan										
						Tersedianya Jasa Sumber daya Listrik	24 bulan							24 bulan		
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	336,782,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	360,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
						Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum	12 Bulan							12 Bulan		
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29,500,000							31,700,000	
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	17,500,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8 Unit	18,500,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
7	1	1	02:09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	12,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan					0 Unit	13,200,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 Unit							7 Unit		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			87,224,000							109,996,000	
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			87,224,000							109,996,000	
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terciptanya perencanaan yang berkeadilan dan berkelanjutan	1 kali	57,224,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 kali	62,946,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	3 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana				3 Laporan	47,050,000	KECAMATAN PAGAI UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Alokasi Umum						
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			92,000,000							141,800,000	
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			92,000,000							141,800,000	
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Orang	96,800,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	42,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Dokumen	45,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			85,000,000							131,990,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			85,000,000							131,990,000	
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	47,240,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
7	1	6	02:01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	fungsi kontrol dan fungsi evaluasi serta pelaporan dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	3 Desa	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Desa	84,750,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			2,783,557,434							3,190,249,510	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	2,512,230,434						100 Persen	2,889,070,990	
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100 Persen	68,038,000						100 Persen	75,522,180	
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan	68,038,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat				4 Desa di Kecamatan Pagai Selatan	28 Laporan	75,522,180	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100 Persen	1,778,530,388						100 Persen	2,074,663,939	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1,556,427,004	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS dan Tenaga Kontrak	16 Orang/bulan	1,785,231,439	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	222,103,384	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS dan Tenaga Kontrak	12 Dokumen	289,432,500	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	323,442,046						100 persen	359,020,671	
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Pagai Selatan	1 Paket	5,550,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	92,161,790	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Pagai Selatan	6 Unit	102,299,587	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	68,431,700	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Pagai Selatan	4 Paket	75,959,187	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Pagai Selatan	1 Paket	5,550,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	152,848,556	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Pagai Selatan	28 Laporan	169,661,897	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase peningkatan	100 persen	294,050,000						100 persen	326,395,500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Pemerintahan Daerah	pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah										
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4,800,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS dan Tenaga Kontrak	12 Laporan	5,328,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	289,250,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS dan Tenaga Kontrak	12 Laporan	321,067,500	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	48,170,000						100 persen	53,468,700	
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	35,960,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Barang Milik Daerah di Kantor Kecamatan Pagai Selatan	8 Unit	39,915,600	KECAMATAN PAGAI SELATAN
												10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
7	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	12,210,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Barang Milik Daerah di Kantor Kecamatan Pagai Selatan	16 Unit	13,553,100	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	100 persen	41,332,000						100 persen	45,878,520	
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah masyarakat, LPM dan desa yang terbina	95 Persen	41,332,000						95 Persen	45,878,520	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga	25,290,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat, LPM, Desa	7 Lembaga	28,071,900	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	16,042,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat, LPM, Desa	4 Laporan	17,806,620	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100 persen	80,775,000						100 persen	89,665,800	
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan HUT RI	1 Kegiatan	80,775,000						1 Kegiatan	89,665,800	
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	100 Orang	30,775,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat di Kecamatan Pagai Selatan	100 Orang	34,165,800	KECAMATAN PAGAI SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat di Kecamatan Pagai Selatan	12 Dokumen	55,500,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu	85 Persen	149,220,000						85 Persen	165,634,200	
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4 Desa	149,220,000						4 Desa	165,634,200	
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27 Dokumen	149,220,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pemerintahan Desa	27 Dokumen	165,634,200	KECAMATAN PAGAI SELATAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo							
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			3,464,878,408							4,168,970,562	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			3,288,307,158							3,789,315,130	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,000,000							55,000,000	
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	55,000,000	KECAMATAN SIKAKAP
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,842,507,158							3,114,432,405	
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2,792,507,158		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26 Orang/bulan	2,900,000,000	KECAMATAN SIKAKAP
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	214,432,405	KECAMATAN SIKAKAP
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			148,000,000							270,302,725	
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9 Paket	8,800,000	KECAMATAN SIKAKAP
7	1	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Paket	99,000,000	KECAMATAN SIKAKAP
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Paket	53,382,725	KECAMATAN SIKAKAP
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	Dana Transfer Umum-Dana				12 Laporan	109,120,000	KECAMATAN SIKAKAP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						dan Konsultasi SKPD			Sikakap, Semua Kelurahan	Alokasi Umum						
7	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			28,000,000							85,800,000	
7	1	1	02:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	28,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	85,800,000	KECAMATAN SIKAKAP
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			218,800,000							240,680,000	
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	33,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	36,300,000	KECAMATAN SIKAKAP
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	185,800,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	204,380,000	KECAMATAN SIKAKAP
						Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 Orang							15 Orang		
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21,000,000							23,100,000	
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	21,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8 Unit	23,100,000	KECAMATAN SIKAKAP
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			20,000,000							22,000,000	
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada			20,000,000							22,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Camat											
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		0 Laporan	22,000,000	KECAMATAN SIKAKAP
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan							12 Laporan		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			60,000,000							124,180,982	
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			60,000,000							124,180,982	
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 desa	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 desa	62,855,982	KECAMATAN SIKAKAP
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 desa	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 desa	61,325,000	KECAMATAN SIKAKAP
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			66,571,250							156,474,450	
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			66,571,250							156,474,450	
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	100 Orang	36,571,250	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Orang	59,674,450	KECAMATAN SIKAKAP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Kelurahan						
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		6 Dokumen	96,800,000	KECAMATAN SIKAKAP
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			30,000,000							77,000,000	
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			30,000,000							77,000,000	
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9 Dokumen	77,000,000	KECAMATAN SIKAKAP
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			7,190,344,236							3,953,000,000	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1,789,544,236							2,163,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					DAERAH KABUPATEN/KOTA											
8	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,317,554,237							1,450,000,000	
8	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1,180,106,236		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Orang/bulan	1,300,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	137,448,001		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Dokumen	150,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			125,049,999							330,000,000	
8	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5,049,999	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Paket	6,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		6 Paket	90,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		6 Paket	16,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9 Dokumen	18,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
8	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	200,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50,000,000							60,000,000	
8	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		4 Unit	60,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			271,940,000							286,000,000	
8	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Laporan	26,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	246,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14 Laporan	260,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25,000,000							37,000,000	
8	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Unit	25,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	12 Unit	5,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai		12 Unit	12,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA,

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Dipelihara			Sipora Utara, Tuapejat	Alokasi Umum		Prima)				POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			4,550,000,000							730,000,000	
8	1	3	02:01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			4,550,000,000							730,000,000	
8	1	3	02:01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9 Dokumen	4,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)		9 Dokumen	650,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	3	02:01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring,	3 Laporan	50,000,000		Dana Transfer		9. Pembangunan		3 Laporan	80,000,000	KANTOR KESATUAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				Umum-Dana Alokasi Umum		Kebudayaan (Mentawai Beradab)				BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			50,000,000							110,000,000	
8	1	4	02:01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			50,000,000							110,000,000	
8	1	4	02:01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)		3 Laporan	110,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			330,000,000							430,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
8	1	5	02:01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			330,000,000							430,000,000	
8	1	5	02:01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)		1 Dokumen	150,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	5	02:01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)		150 Orang	160,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	5	02:01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	50 Orang	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)		50 Orang	120,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
						Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			470,800,000							400,000,000	
8	1	6	02:01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			470,800,000							400,000,000	
8	1	6	02:01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Orang	95,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)		20 Orang	100,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	1	6	02:01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	2 Laporan	85,800,000				9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)		2 Laporan	100,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
8	1	6	02:01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	290,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)		4 Dokumen	200,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TOTAL								878.905.272.098							934,240,782,392	

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Indikator kinerja menunjukkan kinerja yang akan dicapai setiap perangkat daerah dalam tahun rencana sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPD 2023-2026.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan IKU dan target capaian pada Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama

NO	IKU	Target Kinerja	
		2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	61,98	62,48
2	Rata Lama sekolah	7,36 tahun	7,45 tahun
3	Harapan Lama Sekolah	13,09 tahun	13,18 tahun
4	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,55	0,58
5	Angka Harapan Hidup	65,19 tahun	65,34 tahun
6	Prevalensi Stunting	20,00%	17,00%
7	Persentase Penduduk Miskin	14,57%	14,44%
8	Indeks Kinerja Infrastruktur	10%	12%
9	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	15%	17%
10	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	70%	72%
11	Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	70%	75%
12	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%	100%

NO	IKU	Target Kinerja	
		2023	2024
13	Cakupan Layanan Transportasi	80%	83%
14	Cakupan layanan telekomunikasi	85%	88%
15	Rasio Elektrifikasi	85%	86%
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	>80	>80
17	Persentase Rumah Layak Huni	40%	43%
18	Jumlah Desa STBM	2 desa	3 desa
19	Indeks Resiko Bencana	197	190
20	Pertumbuhan ekonomi	3,93%	4,27%
21	Indek Gini	0,320	0,316
22	Pendapatan Perkapita	Rp.58,47 jt	Rp.61,82 jt
23	Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	15%
24	Nilai Investasi	20 miliar rupiah	30 miliar rupiah
25	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,75%	2,70%
26	Tingkat Inflasi	3,80%	3,50%
27	Indek RB	B	B
28	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	30	35
29	Indek Kepuasan masyarakat	80	82
30	Indeks Profesional ASN	80	82
31	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
32	Indeks SPBE	2	2,2
33	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
34	Opini BPK	WTP	WTP
35	WBK/WBBM	2 OPD	3 OPD
36	Nilai SAKIP	B	B
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan	51,5	51,55
38	Jumlah MHA yang dilestarikan	5 MHA	7 MHA
39	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,3	11,5
40	Tingkat Kriminalitas	3,5 persen	3,5 persen
41	Tingkat Kabupaten layak Anak	400	500 (pratama)
42	Indek Pembangunan Gender	89,90	89,95

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pada akhir penyelengaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan ekonomi	BPS	2,89%	3,93%	4,27%
2	Indek Gini	BPS	0,321	0,320	0,316
3	Pendapatan Perkapita	BPS	Rp.54,80 jt	Rp.58,47 jt	Rp.61,82 jt
4	Persentase Penduduk Miskin	BPS	14,84%	14,57%	14,44%
5	Indeks Pembangunan Manusia	BPS	61,35	61,98	62,48
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS	2,79%	2,75%	2,70%
7	Rata Lama sekolah	BPS	7,20 tahun	7,36 tahun	7,45 tahun
8	Angka Harapan Hidup	BPS	64,73 tahun	65,19 tahun	65,34 tahun
9	Prevalensi Stunting	SGGI	27,3%	20,00%	17,00%
10	Indeks Pembangunan Gender	BPS	89,81	89,90	89,95
ASPEK PELAYANAN UMUM					
I.	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.	Urusan Pendidikan				
	a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	19,05%	22%	25%
	b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-	Dinas Pendidika dan	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	12tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Kebudayaan			
	c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	100%	100%	100%
	d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	100%	100%	100%
2.	URUSAN KESEHATAN				
	a. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Dinas Kesehatan	70/ 100.000 Penduduk	80/ 100.000 Penduduk	85/ 100.000 penduduk
	b. Persentase RS rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	0	1 RSUD	1 RSUD
	c. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Dinas Kesehatan	60%	70%	75%
	d. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalilnan	Dinas Kesehatan	60%	70%	75%
	e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dinas Kesehatan	60%	70%	75%
	f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dinas Kesehatan	60%	70%	75%
	g. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	70%	75%	80%
	h. Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	75%	80%	82%
	i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	70%	75%	78%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	j. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	73%	80%	82%
	k. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	76%	80%	82%
	l. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinas Kesehatan	75%	83%	85%
	m. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Dinas Kesehatan	76%	80%	82%
	n. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Dinas Kesehatan	80%	83%	85%
3.	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,20%	5%	5,20%
	b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4%	4,70%	5%
	c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20ha	23ha	25ha
	d. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40%	45%	47%
	e. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26%	30%	31%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	f. Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68%	75%	78%
	g. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7%	10%	11%
	h. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2%	3%	5%
	i. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	NA	85%	88%
4.	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8%	10%	13%
	b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	NA	2%	2%
	c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5%	10%	12%
	d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tangga Layak Huni)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6500 unit	5000 unit	4500 unit
	e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 kawasan permukiman	1 kawasan permukiman	1 kawasan permukiman
5.	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	a. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%
	b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	80%	85%	88%
	c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	60	65%	68%
	d. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelematan dan evakuasi korban	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	bencana				
	e. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%
	f. Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	20 menit	15 menit	15 menit
6.	URUSAN SOSIAL				
	a. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	100%	100%
	b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan stelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	100%	100%
II	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.	URUSAN TENAGA KERJA				
	a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70%	80%	85%
	b. Persentase tenaga kerja bersetifikat kompetensi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2%	3%	5%
	c. Tingkat produktivitas tenaga kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16%	20%	22%
	d. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35%	40%	42%
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0%	0,1%	0,15%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
2.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	20%	25%	42%
	b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	100%	100%
	c. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	100%	100%
3.	URUSAN PANGAN				
	a. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37,67	50	52
4.	URUSAN PERTANAHAN				
	Penanganan sengketa tanah yang dilakukan secara mediasi (persen)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	100	100
	Persentase luas lahan bersertifikat (persen)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,14	1,2	1,25
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan Peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	38	40	42
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0,02	0,1
	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.200 ha	1.200 ha	1.200 ha
	Tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
5.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
	a. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	>80	>80	>80
	b. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5%	7%	7%
	c. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	75%	80%	85%
6.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	a. Perekaman KTP elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95%	99,20%	99,25%
	b. Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70%	75%	78%
	c. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32%	40%	50%
	d. Persentase kepemilikan akte kelahiran (persen)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77,24%	78%	80%
7.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	a. Persentase pengentasan desa tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35%	30%	26%
	b. Persentase peningkatan status desa mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11%	12%	12%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
8.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA				
	a. TFR (Angka Kelahiran Total)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	b. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	62%	65%	68%
	c. Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,12%	1,10%	1,05%
9.	URUSAN PERHUBUNGAN				
	a. Rasio konektivitas kabupaten/kota	Dinas Perhubungan	75%	80%	82%
	b. V/C Ratio di jalan Kota	Dinas Perhubungan	0,18	0,19	0,20
10.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	a. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	64%	70%	80%
	b. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,20%	10%	20%
	c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,20%	5%	7%
11.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	a. Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	44%	50%	55%
	b. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	1,20%	2%	2%
12.	URUSAN PENANAMAN MODAL				
	a. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,20%	2	2,10%
13.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8%	10%	15%
	b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	45%	50%	55%
	c. Peningkatan prestasi olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	NA	2%	5%
14.	URUSAN STATISTIK				
	a. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	70%	75%	78%
	b. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	70%	75%	78%
15.	URUSAN PERSANDIAN				
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika	NA	Tingkat kematangan I	Tingkat kematangan II
16.	URUSAN KEBUDAYAAN				
	a. Terlestarikannya cagar budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55%	60%	63%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
17.	PERPUSTAKAAN				
	a. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	15%	20%	25%
	b. Indeks pembangunan literasi masyarakat	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	11	11,3	11,5
18.	URUSAN KEARSIPAN				
	a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10%	30%	35%
	b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	NA	10%	15%
III	URUSAN PILIHAN				
1.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	a. Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Dinas Perikanan	8.694 ton	9.000 ton	9.500 ton
2.	URUSAN PARIWISATA				
	a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	10%	11%	13%
	b. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang kekabupaten/kota	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	12%	15%	18%
	c. Konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	0,76%	0,80%	1%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	14%	15%	16%
3.	URUSAN PERTANIAN				
	a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7000 ton	7000 ton	7000 ton
	b. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100%	100%	100%
4.	URUSAN PERDAGANGAN				
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	15%	20%	30%
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	63%	70%	75%
	Persentase kinerja realisasi pupuk	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0,35%	0,5%	1%
	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0,2%	0,25%	0,32%
5.	URUSAN PERINDUSTRIAN				
	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	1.25	3 IKM	5 IKM
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0	0,5%	1%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0	1,2%	1,5%
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0	1,2%	1,5%
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0	1,2%	1,5%
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	ada	ada	ada
IV	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1.	URUSAN KEPEGAWAIAN				
	a. Nilai Sistem Merit	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	NA	200	220
	b. Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,20%	10%	12%
2.	URUSAN MANAJEMEN KEUANGAN				
	a.Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	Badan Keuangan Daerah	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	b. Persentase PAD terhadap total pendapatan	Badan Keuangan Daerah	5,24	8,50%	8,70%
	c.Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	Badan Keuangan Daerah	80%	90%	95%
	d.Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	Badan Keuangan Daerah	72%	80%	81%
3.	URUSAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK				
	a. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	8%	20%	30%
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Tingkat Kriminalitas	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	6 persen	3,5 persen	3,5 persen
2	Rasio Ketergantungan (%)	BPS	62,78	62,40%	62,35%
3	Pengeluaran Perkapita	BPS	6.321 rb rupiah/orang/ tahun	6.442 rb rupiah/orang/ tahun	6.536 rb rupiah/orang/ tahun

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB VII

PENUTUP

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Pemulihan ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat terutama pada hilirisasi komoditas pertanian menjadi fokus pembangunan daerah tahun 2023 dan menjadi bagian agregasi pijakan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Tahun 2045. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan lembaga pemerintah lainnya bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia usaha perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun

2023 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Bupati dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 2

Penjabaran APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp.959.090.757.280,00 *(Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)*, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		Rp.918.000.787.449,00 (Sembilan Ratus Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)
b. Belanja Daerah		Rp.959.090.757.280,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
	Defisit/ Surplus	Rp.41.089.969.831,00 (Empat Puluh Satu Miliar

	Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.41.089.969.831,00 (Empat Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.0,00 (Nol Rupiah)
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.41.089.969.831,00 (Empat Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.0,00 (Nol Rupiah)

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut urusan Pemerintahan Daearah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan

		Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;;
9.	Lampiran IX	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
10.	Lampiran X	Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
11.	Lampiran XI	Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
12.	Lampiran XII	Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah;
13.	Lampiran XIII	Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada Tanggal 26 Desember 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 26 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

RINALDI

PERATURAN BUPATI

Daftar Isi ..... i-ii

Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis , Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 1-12

Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13-43
Dinas Kesehatan 44-66
Rumah Sakit Umum Daerah 67-71
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 72-97
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 98-109
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 110-117
Badan Penanggula Bencana Daerah 118-123
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempun dan perlindungan Anak 124-136
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 137-141
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 142-147
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 148-152
Dinas Pemberdayaa Masy. dan Desa, Pengendaliaan penduduk & KB 153-163
Dinas Perhubungan 164-171
Dinas Komunikasi dan Informatika 172-178
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 179-285
Dinas Penaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 186-191
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 192-199
Dinas Perikanan 200-206
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 207-213
Sekretariat Daerah 214-232
Sekretariat DPRD 233-244
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 245-252
Badan Keuangan Daerah 253-264
Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber daya Manusia 265-270
Inspektorat 271-379
Kecamatan Siberut Utara 280-385
Kecamatan Siberut Tengah 286-391
Kecamatan Siberut Barat 292-397
Kecamatan Siberut Barat Daya 298-302
Kecamatan Siberut Selatan 303-309
Kecamatan Sipora Utara 310-317
Kecamatan Sipora Selatan 318-324
Kecamatan Pagai Utara 325-329
Kecamatan Pagai Selatan 330-334
Kecamatan Sikakap 335-339
Kantor Satuan Bangsa dan Politik 340-348

Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah 349-356

Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial 357-358

Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan

	Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan	359-360
Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah	361-362
Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.....	363
Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi.....	364
Lampiran IX	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara	365
Lampiran X	Rekapitulasi dan asainkronisasi Perkada Penjabaran APBD Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana.....	366-378
Lampiran XI	Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi Per FKTP.....	379
Lampiran XII	Daftar Alokasi Anggaran Dana Bos Per Sekolah.....	380-383
Lampiran XIII	Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barnag dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)……	384

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**50.360.638.686**
4.1.01	Pajak Daerah	6.066.362.757
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.355.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.205.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.205.000.000
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	150.000.000
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	150.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.258.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	938.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	938.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	120.000.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	120.000.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	200.000.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	200.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	50.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	50.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	50.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	18.391.725
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	18.391.725
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	18.391.725
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.914.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.914.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.914.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.020.971.032
4.1.01.15.01	PBBP2	1.020.971.032
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.020.971.032
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	300.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	300.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	21.110.275.929
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	11.864.650.202
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.625.798.730
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	39.993.000
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	11.585.805.730
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	238.851.472
4.1.02.01.10.0001	Retribusi Rumah Tangga	238.851.472
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	9.195.625.727
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	229.536.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	229.536.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	16.575.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	16.575.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	76.288.300
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	76.288.300
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.525.800.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.525.800.000
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	152.241.027
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	152.241.027
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	195.185.400
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	65.635.400

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	129.550.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.099.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	14.099.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	14.099.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	14.099.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.085.000.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.135.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.575.000.000
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	1.575.000.000
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	560.000.000
4.1.04.01.05.0004	Hasil Penjualan Biota Perairan	560.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	450.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	450.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	450.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	3.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	2.500.000.000
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	2.500.000.000
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	2.500.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000
4.1.04.15.07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1.000.000.000
4.1.04.15.07.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1.000.000.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**859.822.191.100**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	824.412.254.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	779.519.163.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	18.095.324.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.470.845.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.326.287.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	198.141.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	835.653.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.094.066.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	7.170.332.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	569.037.573.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	569.037.573.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106.880.270.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	901.424.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.383.337.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.751.475.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	11.000.000.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	9.881.928.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.663.434.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	402.575.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	141.093.000
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.708.151.000
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.000.000.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	52.410.064.000
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.634.694.000
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	2.479.595.000
4.2.01.01.03.0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan	522.500.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	85.505.996.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	21.198.870.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	815.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	18.253.556.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.281.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	16.952.637.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.055.520.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.558.710.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17.604.769.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	932.399.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	480.000.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.514.365.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.000.000.000
4.2.01.05	Dana Desa	44.893.091.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	44.893.091.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	44.893.091.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.409.937.100
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	35.409.937.100
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35.409.937.100
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.654.134.173
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.650.862.544
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.061.957.706
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	88.675.237
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.954.307.440
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.817.957.663**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.817.957.663
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.817.957.663
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.817.957.663
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.817.957.663
	Jumlah Pendapatan	**918.000.787.449**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**635.681.054.019**
5.1.01	Belanja Pegawai	319.567.764.046
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	204.382.533.099
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	144.639.627.679
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	125.485.414.774
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	19.154.212.905
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.026.081.753
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13.827.800.363
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.198.281.390
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.672.507.915
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.672.507.915
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.905.157.478
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.544.471.728
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.360.685.750
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.397.943.114
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.814.883.114
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	583.060.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.647.290.047
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.628.808.727
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.018.481.320
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	638.049.719
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	625.470.434
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	12.579.285
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	63.277.870
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	63.033.944

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	243.926
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.020.690.260
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.492.543.382
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.528.146.878
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.700.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.360.000.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	340.000.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.740.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.500.000.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	240.000.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	931.907.264
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	853.871.840
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	78.035.424
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	64.093.668.617
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	32.719.827.419
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	31.201.147.043
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.518.680.376
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.149.946.943
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.149.946.943
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	455.875.926
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	455.875.926
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	29.768.018.329
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	28.298.072.836
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.469.945.493
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.960.513.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	18.253.556.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	18.253.556.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	16.952.637.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	16.952.637.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.281.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.281.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.944.820.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.572.670.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.298.600.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	73.550.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	528.500.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	74.400.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	454.100.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.409.937.930
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.180.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.180.600
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	83.848.800
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	83.848.800
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	87.178.350
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	87.178.350
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	50.973.300
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	50.973.300
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	49.000.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	49.000.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	350.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	350.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.883.617.380
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	155.905.380
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	22.152.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	53.400.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.652.160.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.856.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.856.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	35.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	35.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	219.511.400
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.775.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.775.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.563.320
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.563.320
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	225.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	225.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	30.724.800
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	30.724.800
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	5.630.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	5.630.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	7.630.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	7.630.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	501.600.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.255.928.253
5.1.02.01	Belanja Barang	64.366.556.033
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	64.366.556.033
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	32.060.141
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	181.455.570
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.887.612.400
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	15.120.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	115.465.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.140.225.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	49.197.459
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12.765.980
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	5.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.961.774.240
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.021.832.925
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.514.067.450
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	216.549.980
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.543.720
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.033.049.650
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	727.568.500
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	277.510.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	103.653.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	191.760.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	248.050.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.025.150.773
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.730.782.708
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	25.513.339.290
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	175.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.135.464.527
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	114.711.320
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	41.946.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.733.777.900
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	149.463.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	222.875.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	891.325.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	111.000.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	220.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.240.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	165.644.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	7.500.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.000.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	334.575.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	131.267.348.728
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	88.204.313.914
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.910.450.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.197.530.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	178.500.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.104.444.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	27.400.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	84.800.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	15.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	515.080.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	615.600.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.468.948.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	31.332.196.198
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	375.125.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	292.870.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	845.148.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	390.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	27.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	114.320.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	298.092.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	46.200.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	120.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.034.638.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	192.700.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	756.400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.185.193.816
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.934.100.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.476.460.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.390.950.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	93.100.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	66.565.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	685.900.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	65.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	76.350.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	288.200.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	75.100.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	453.654.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	20.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	517.250.000
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	1.474.298.900
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	45.600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	174.320.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.542.400.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	536.465.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.886.526.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	215.160.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	140.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	517.280.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	384.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.103.022.767
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.036.732.567
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.066.290.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.350.000.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.650.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.153.795.000
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	200.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	184.650.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	30.000.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	8.624.357.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	64.788.000
5.1.02.02.04.0464	Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan	25.000.000
5.1.02.02.04.0484	Belanja Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	25.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	868.750.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	220.000.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	28.050.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	374.000.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	74.200.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	172.500.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	7.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.369.533.106
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	841.500.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	15.500.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	11.700.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	369.912.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.320.000.002
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.535.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	550.000.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.400.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	99.999.999
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	800.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	10.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.018.289.300
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.472.631.805
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.050.000.000
5.1.02.02.08.0031	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	200.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	775.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	900.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.373.358.941
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	400.000.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	350.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	257.540.450
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	345.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	5.920.818.491
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	537.600.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	289.600.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	248.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.649.975.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.064.125.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	321.600.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	264.250.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14.888.742.092
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.752.820.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	174.500.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.510.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.900.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	17.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	172.000.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	18.000.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	185.000.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.774.000.000
5.1.02.03.02.0067	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	32.890.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	40.000.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	270.840.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	28.600.000
5.1.02.03.02.0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	2.000.000
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	40.000.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	60.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	297.840.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	89.750.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.325.827.576
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.660.620.690
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	298.343.500
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	288.956.450
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	42.906.936
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	35.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.810.094.516
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	308.400.000
5.1.02.03.04.0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	2.479.594.516
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	890.000.000
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	406.050.000
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	396.050.000
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	200.000.000
5.1.02.03.04.0121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	130.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	50.508.931.400
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.508.931.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.277.328.400
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.282.510.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.621.227.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	133.766.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	194.100.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.800.360.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.300.610.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	452.850.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	47.550.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	3.980.210.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	14.820.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	499.750.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	499.750.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.423.990.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.423.990.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.423.990.000
5.1.04	Belanja Subsidi	5.700.000.000
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	5.700.000.000
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	5.700.000.000
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	5.700.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	13.463.361.720
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.500.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.500.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.500.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.336.133.720
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.837.150.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.837.150.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.000.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.000.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.498.983.720
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.708.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.790.983.720
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	627.228.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	627.228.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	627.228.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.694.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	711.500.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	189.750.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	189.750.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	521.750.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	521.750.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	982.500.000
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	982.500.000
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	982.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**239.607.613.815**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.006.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.006.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	6.000.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.000.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2.000.000
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	800.000.000
5.2.01.01.02.0008	Belanja Modal Tanah Pertambangan	800.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	200.000.000
5.2.01.01.03.0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya	200.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.684.648.564
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	30.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	30.000.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	12.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	18.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.514.703.600
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.784.703.600
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.037.400.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	457.712.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	142.566.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	520.476.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	80.952.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	545.597.600
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	2.730.000.000
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.730.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	199.500.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	50.000.000
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	50.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	149.500.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	149.500.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	141.209.700
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	141.209.700
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	14.000.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	127.209.700
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.508.667.577
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	810.068.227
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	5.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	805.068.227
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.553.599.350
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	892.584.350
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	319.000.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	51.150.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	260.025.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	30.840.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	145.000.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	135.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.141.954.435
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	913.247.527
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	330.265.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	164.760.527
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	409.416.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	8.806.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	158.706.908
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	34.909.908
5.2.02.06.02.0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	23.000.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	100.797.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	70.000.000
5.2.02.06.03.0034	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	70.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.199.427.002
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	8.199.427.002
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.401.299.552
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	5.433.750
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	140.000.000
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	1.652.693.700
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.410.262.550
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	70.262.550
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	54.494.550
5.2.02.08.01.0051	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	15.768.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.340.000.000
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	1.340.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.949.043.700
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.842.904.900
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	3.965.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.423.187.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	415.752.900
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	106.138.800
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	82.861.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	19.786.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.491.800
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.589.880.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.589.880.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.589.880.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.582.098.774
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	106.582.098.774
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	106.379.103.774
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	93.616.830.970
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	700.000.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	9.999.999.804
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.892.273.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	170.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	202.995.000
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	202.995.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.129.466.477
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	84.967.874.277
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	80.760.274.777
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	77.031.074.777
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	3.729.200.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	4.207.599.500
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.600.000.000
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	1.607.599.500
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.309.152.200
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.600.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.600.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.709.152.200
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.709.152.200
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	766.750.000
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	766.750.000
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	766.750.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	12.085.690.000
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	12.085.690.000
5.2.04.04.04.0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	12.085.690.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	205.400.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	200.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	200.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	5.400.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	5.400.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	5.400.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.497.167.877**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.497.167.877
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.497.167.877
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.497.167.877
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.497.167.877
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**79.304.921.569**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.717.663.869
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	606.636.276
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	606.636.276
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	606.636.276
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.111.027.593
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.111.027.593
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.111.027.593

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	76.587.257.700
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	76.587.257.700
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	76.087.257.700
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	76.087.257.700
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	500.000.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	500.000.000
	Jumlah Belanja	**959.090.757.280**
	Total Surplus/(Defisit)	**(41.089.969.831)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**41.089.969.831**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.089.969.831
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	30.860.215.772
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.860.215.772
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.860.215.772
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	10.229.754.060
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	5.097.942.601
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	5.097.942.601
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	5.131.811.459
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	5.131.811.459
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**41.089.969.831**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**
	Pembiayaan Netto	**41.089.969.831**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Martinus D.

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**266.954.558.900**		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**122.365.935.480**		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**72.427.648.875**		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01						Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	5.563.522.330		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	324.543.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	01			Belanja Pegawai	40.800.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.800.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	40.800.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	283.743.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	8.268.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.268.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	162.475.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	162.475.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	113.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	113.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	2				BELANJA MODAL	5.238.978.530		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.238.978.530		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	5.238.978.530		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.238.978.530		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02						Penambahan Ruang Kelas Baru	8.276.013.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	460.467.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	01			Belanja Pegawai	126.400.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	126.400.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	126.400.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	334.067.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	17.575.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	17.575.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	199.850.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	199.850.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	116.642.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	116.642.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2				BELANJA MODAL	7.815.546.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.815.546.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	7.815.546.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.815.546.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4.093.218.924		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	217.082.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	01			Belanja Pegawai	56.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	56.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	56.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	160.882.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	10.667.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.667.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	80.515.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	80.515.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	69.700.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.700.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2				BELANJA MODAL	3.876.136.924		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.876.136.924		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	3.876.136.924		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.876.136.924		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.292.795.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	101.621.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	01			Belanja Pegawai	12.240.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.240.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	12.240.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	89.381.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	01		Belanja Barang	4.667.200		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.667.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	43.114.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	43.114.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	41.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	2				BELANJA MODAL	1.191.174.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.191.174.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	1.191.174.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.191.174.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	979.738.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1				BELANJA OPERASI	102.964.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	01			Belanja Pegawai	16.680.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.680.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	16.680.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	86.284.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	01		Belanja Barang	3.352.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.352.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	02		Belanja Jasa	44.432.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	44.432.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	38.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	2				BELANJA MODAL	876.774.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	876.774.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	876.774.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	876.774.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.975.372.890		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1				BELANJA OPERASI	228.913.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	01			Belanja Pegawai	43.260.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.260.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	43.260.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	185.653.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02	01		Belanja Barang	12.128.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.128.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	92.225.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	92.225.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	81.300.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.300.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	2				BELANJA MODAL	3.746.459.490		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.746.459.490		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	3.746.459.490		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.746.459.490		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	6.986.842.700		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	375.842.700		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	01			Belanja Pegawai	89.920.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	89.920.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	89.920.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	285.922.700		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	14.043.700		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.043.700		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	02	02		Belanja Jasa	205.729.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	205.729.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	66.150.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.150.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	2				BELANJA MODAL	6.611.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.611.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	6.611.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.611.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	9.042.408.960		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1				BELANJA OPERASI	416.867.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	01			Belanja Pegawai	117.880.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	117.880.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	117.880.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	298.987.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	02	01		Belanja Barang	24.082.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	24.082.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	02	02		Belanja Jasa	201.905.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	201.905.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	73.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	73.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2				BELANJA MODAL	8.625.541.160		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.625.541.160		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	8.625.541.160		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.625.541.160		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	168.171.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1				BELANJA OPERASI	3.974.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	01			Belanja Pegawai	2.890.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.890.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.890.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.084.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	02	01		Belanja Barang	1.084.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.084.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	2				BELANJA MODAL	164.197.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.197.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	164.197.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	164.197.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	168.146.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1				BELANJA OPERASI	3.949.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1	01			Belanja Pegawai	2.790.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.790.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.790.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.159.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1	02	01		Belanja Barang	1.159.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.159.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	2				BELANJA MODAL	164.197.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.197.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	164.197.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	164.197.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14						Pengadaan Mebel Sekolah	2.747.402.121		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1				BELANJA OPERASI	148.571.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	01			Belanja Pegawai	14.960.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14.960.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	14.960.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	133.611.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	02	01		Belanja Barang	10.193.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.193.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	02	02		Belanja Jasa	78.168.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	78.168.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	45.250.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.250.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2				BELANJA MODAL	2.598.831.121		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	9.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2	02	10	02	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.589.231.121		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	2.589.231.121		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.589.231.121		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	14.589.880.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21	5	1				BELANJA OPERASI	9.500.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	9.500.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21	5	1	02	88		Belanja Barang dan Jasa BOS	9.500.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21	5	1	02	88	88	Belanja Barang dan Jasa BOS	9.500.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21	5	2				BELANJA MODAL	5.089.880.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.089.880.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21	5	2	02	88		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.089.880.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21	5	2	02	88	88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.089.880.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.179.212.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	1				BELANJA OPERASI	54.212.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	54.212.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	1	02	01		Belanja Barang	3.529.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.529.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	1	02	02		Belanja Jasa	21.183.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.183.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	2				BELANJA MODAL	1.125.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.125.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	1.125.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	1.125.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	720.571.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	1				BELANJA OPERASI	700.021.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	700.021.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	1	02	01		Belanja Barang	120.476.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	120.476.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	1	02	02		Belanja Jasa	338.305.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	168.950.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	146.855.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	22.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	241.240.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	241.240.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	2				BELANJA MODAL	20.550.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.550.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	20.550.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	13.350.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	2	02	10	02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	26						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.090.825.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	26	5	1				BELANJA OPERASI	7.090.825.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	26	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	7.090.825.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	26	5	1	02	01		Belanja Barang	67.568.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	26	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	67.568.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	26	5	1	02	02		Belanja Jasa	6.820.666.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	26	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	6.716.756.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	26	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	103.910.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	26	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	202.591.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	26	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	202.591.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	891.294.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1				BELANJA OPERASI	891.294.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	891.294.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1	02	01		Belanja Barang	246.247.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	246.247.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1	02	02		Belanja Jasa	371.075.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	338.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.075.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	22.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	273.972.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	273.972.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	350.460.800		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1				BELANJA OPERASI	317.560.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	317.560.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1	02	01		Belanja Barang	47.877.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	47.877.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1	02	02		Belanja Jasa	72.035.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	20.400.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	47.135.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	197.648.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	197.648.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	2				BELANJA MODAL	32.900.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.900.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	32.900.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	32.900.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	367.320.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1				BELANJA OPERASI	349.995.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	349.995.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	02	01		Belanja Barang	35.505.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	35.505.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	02	02		Belanja Jasa	99.530.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	84.530.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	214.960.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	214.960.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	2				BELANJA MODAL	17.325.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.325.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	17.325.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	13.725.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	2	02	10	02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31						Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.944.449.350		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	1				BELANJA OPERASI	260.017.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	1	01			Belanja Pegawai	63.410.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	63.410.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	63.410.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	196.607.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	1	02	01		Belanja Barang	8.587.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.587.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	1	02	02		Belanja Jasa	138.720.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	138.720.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	49.300.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.300.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	2				BELANJA MODAL	3.684.431.950		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.684.431.950		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	3.684.431.950		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.684.431.950		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**44.552.070.205**		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02						Penambahan Ruang Kelas Baru	10.718.825.100		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	338.784.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	95.400.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	95.400.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	95.400.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	243.384.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	12.159.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.159.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	64.400.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	64.400.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	166.825.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	166.825.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2				BELANJA MODAL	10.380.041.100		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.380.041.100		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	10.380.041.100		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.380.041.100		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5.648.935.760		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1				BELANJA OPERASI	331.133.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	01			Belanja Pegawai	49.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	49.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	49.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	281.633.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	01		Belanja Barang	3.433.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.433.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	142.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	142.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	135.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	2				BELANJA MODAL	5.317.802.160		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.317.802.160		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	5.317.802.160		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.317.802.160		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.478.674.720		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1				BELANJA OPERASI	678.587.520		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	01			Belanja Pegawai	31.120.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.120.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	31.120.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.908.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	01		Belanja Barang	2.208.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.208.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	20.700.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.700.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	78.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	05			Belanja Hibah	546.558.720		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	05	05		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	546.558.720		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	05	05	03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	546.558.720		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2				BELANJA MODAL	800.087.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	800.087.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	800.087.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	800.087.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06						Pembangunan Laboratorium	3.903.592.810		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1				BELANJA OPERASI	1.453.689.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	01			Belanja Pegawai	38.900.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.900.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	38.900.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	114.789.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	02	01		Belanja Barang	2.089.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.089.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	20.700.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.700.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	92.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	92.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	05			Belanja Hibah	1.300.000.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	05	05		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.300.000.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	05	05	03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.300.000.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	2				BELANJA MODAL	2.449.903.610		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.449.903.610		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	2.449.903.610		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.449.903.610		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08						Pembangunan Asrama Sekolah	5.540.508.720		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1				BELANJA OPERASI	180.166.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	01			Belanja Pegawai	36.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	36.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	143.666.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	02	01		Belanja Barang	2.811.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.811.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	02	02		Belanja Jasa	30.225.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.225.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	110.630.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	110.630.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	2				BELANJA MODAL	5.360.342.120		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.360.342.120		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	5.360.342.120		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.360.342.120		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.922.023.440		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1				BELANJA OPERASI	171.956.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	01			Belanja Pegawai	29.700.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	29.700.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	29.700.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	142.256.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	02	01		Belanja Barang	2.294.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.294.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	02	02		Belanja Jasa	31.050.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	31.050.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	108.912.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108.912.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	2				BELANJA MODAL	1.750.067.440		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.750.067.440		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	1.750.067.440		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.750.067.440		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	964.616.280		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1				BELANJA OPERASI	83.456.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	01			Belanja Pegawai	12.580.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.580.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	12.580.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	70.876.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	02	01		Belanja Barang	2.076.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.076.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	02	02		Belanja Jasa	13.800.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.800.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	2				BELANJA MODAL	881.160.280		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	881.160.280		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	881.160.280		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	881.160.280		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.124.221.300		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1				BELANJA OPERASI	76.876.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1	01			Belanja Pegawai	14.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	14.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	62.676.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1	02	01		Belanja Barang	2.076.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.076.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	60.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2				BELANJA MODAL	1.047.345.300		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.047.345.300		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	1.047.345.300		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.047.345.300		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	664.056.500		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1				BELANJA OPERASI	64.056.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1	01			Belanja Pegawai	7.780.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.780.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	7.780.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	56.276.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1	02	01		Belanja Barang	2.076.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.076.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	54.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	2				BELANJA MODAL	600.000.500		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	600.000.500		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	600.000.500		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.500		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25						Pengadaan Mebel Sekolah	192.040.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1				BELANJA OPERASI	49.260.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1	01			Belanja Pegawai	2.560.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.560.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.560.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	46.700.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1	02	02		Belanja Jasa	13.800.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.800.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	32.900.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.900.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	2				BELANJA MODAL	142.780.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.780.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	142.780.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	142.780.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	32						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	7.423.990.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	32	5	1				BELANJA OPERASI	4.923.990.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	32	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	4.923.990.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	32	5	1	02	88		Belanja Barang dan Jasa BOS	4.923.990.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	32	5	1	02	88	88	Belanja Barang dan Jasa BOS	4.923.990.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	32	5	2				BELANJA MODAL	2.500.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	32	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	32	5	2	02	88		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.500.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	32	5	2	02	88	88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.500.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	195.794.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1				BELANJA OPERASI	40.769.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1	01			Belanja Pegawai	1.360.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.360.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	1.360.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	39.409.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1	02	01		Belanja Barang	2.089.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.089.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	37.320.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.320.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	2				BELANJA MODAL	155.025.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.025.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	155.025.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	155.025.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	423.947.975		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1				BELANJA OPERASI	423.947.975		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	423.947.975		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02	01		Belanja Barang	55.491.975		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	55.491.975		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02	02		Belanja Jasa	213.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	75.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	154.956.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	154.956.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	37						Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	190.501.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1				BELANJA OPERASI	190.501.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	190.501.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1	02	01		Belanja Barang	5.056.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.056.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1	02	02		Belanja Jasa	126.465.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	93.765.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	58.980.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.980.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	39						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.326.387.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	39	5	1				BELANJA OPERASI	3.326.387.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	39	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	3.326.387.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	39	5	1	02	01		Belanja Barang	17.167.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	39	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	17.167.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	39	5	1	02	02		Belanja Jasa	3.219.460.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	39	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	3.198.960.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	39	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	39	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	89.760.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	39	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.760.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	479.508.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1				BELANJA OPERASI	469.618.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	469.618.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1	02	01		Belanja Barang	108.698.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	108.698.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1	02	02		Belanja Jasa	170.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	126.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	24.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	190.420.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	190.420.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	2				BELANJA MODAL	9.890.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.890.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	9.890.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	9.890.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	229.831.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1				BELANJA OPERASI	214.853.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	214.853.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1	02	01		Belanja Barang	15.301.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.301.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1	02	02		Belanja Jasa	77.854.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	19.300.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	55.554.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	121.698.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	121.698.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	2				BELANJA MODAL	14.978.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.978.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	14.978.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	14.978.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	42						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	124.615.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1				BELANJA OPERASI	124.615.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	124.615.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1	02	01		Belanja Barang	3.450.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.450.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1	02	02		Belanja Jasa	41.545.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	7.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	33.945.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	79.620.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.620.000		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**						**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**2.996.964.200**		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01						Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	370.878.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1				BELANJA OPERASI	370.878.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.110.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.110.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.110.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	14.803.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02	01		Belanja Barang	14.803.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.803.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	05			Belanja Hibah	353.964.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	05	05		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	353.964.600		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	05	05	03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	353.964.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	704.897.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1				BELANJA OPERASI	704.897.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	01			Belanja Pegawai	11.540.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.540.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	11.540.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	102.897.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	02	01		Belanja Barang	20.517.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.517.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	82.380.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	82.380.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	05			Belanja Hibah	590.460.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	05	05		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	590.460.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	05	05	03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	590.460.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14						Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	100.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14	5	1				BELANJA OPERASI	100.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14	5	1	02	01		Belanja Barang	6.320.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.320.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14	5	1	02	02		Belanja Jasa	25.100.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	25.100.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	68.580.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.580.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	15						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	149.996.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	15	5	1				BELANJA OPERASI	149.996.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	15	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	149.996.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	15	5	1	02	01		Belanja Barang	30.250.800		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	15	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	30.250.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	15	5	1	02	02		Belanja Jasa	40.850.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	15	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	23.650.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	15	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.800.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	15	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.400.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	15	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	78.896.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	15	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.896.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	260.269.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1				BELANJA OPERASI	260.269.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	260.269.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1	02	01		Belanja Barang	36.815.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	36.815.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1	02	02		Belanja Jasa	49.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	30.700.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.800.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	174.454.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.454.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	130.059.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1				BELANJA OPERASI	130.059.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	130.059.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1	02	01		Belanja Barang	15.254.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.254.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1	02	02		Belanja Jasa	52.425.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	7.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	45.225.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	62.380.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.380.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18						Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.280.861.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1				BELANJA OPERASI	1.280.861.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	225.341.900		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1	02	01		Belanja Barang	23.498.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	23.498.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1	02	02		Belanja Jasa	85.275.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	85.275.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	116.568.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	116.568.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1	05			Belanja Hibah	1.055.520.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1	05	05		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.055.520.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1	05	05	01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.055.520.000		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.04**	**00**						**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**2.389.252.200**		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	12						Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	155.779.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	12	5	1				BELANJA OPERASI	155.779.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	12	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	155.779.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	12	5	1	02	01		Belanja Barang	25.358.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	12	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	25.358.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	12	5	1	02	02		Belanja Jasa	27.725.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	12	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	12	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.225.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	12	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	12	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	102.696.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	12	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	102.696.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	13						Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	104.080.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	13	5	1				BELANJA OPERASI	104.080.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	13	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	104.080.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	13	5	1	02	01		Belanja Barang	16.540.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	13	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	16.540.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	13	5	1	02	02		Belanja Jasa	4.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	13	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	13	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	82.940.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	13	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	82.940.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	14						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	14	5	1				BELANJA OPERASI	150.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	14	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	150.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	14	5	1	02	01		Belanja Barang	560.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	14	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	560.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	14	5	1	02	02		Belanja Jasa	109.650.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	14	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	97.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	14	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.650.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	14	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	39.790.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	14	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.790.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	15						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	149.995.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	15	5	1				BELANJA OPERASI	149.995.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	15	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	149.995.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	15	5	1	02	01		Belanja Barang	18.983.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	15	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.983.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	15	5	1	02	02		Belanja Jasa	23.250.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	15	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	14.100.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	15	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.750.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	15	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.400.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	15	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	107.762.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	15	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	107.762.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	16						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	154.820.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	16	5	1				BELANJA OPERASI	154.820.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	16	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	154.820.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	16	5	1	02	01		Belanja Barang	31.900.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	16	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	31.900.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	16	5	1	02	02		Belanja Jasa	26.750.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	16	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.750.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	16	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	96.170.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	16	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	96.170.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.674.577.300		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1				BELANJA OPERASI	1.674.577.300		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	115.947.300		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	02	01		Belanja Barang	9.417.300		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.417.300		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	02	02		Belanja Jasa	24.150.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.150.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	82.380.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	82.380.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	05			Belanja Hibah	1.558.630.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	05	05		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.558.630.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	05	05	01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.558.630.000		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**140.538.900**		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**						**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**140.538.900**		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.02	02						Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	140.538.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	140.538.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	140.538.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	25.452.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	25.452.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	31.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	28.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	84.086.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.086.000		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**140.658.600**		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**						**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**140.658.600**		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	01						Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	140.658.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	140.658.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	140.658.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	10.347.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.347.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	52.931.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	31.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.931.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	77.380.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	77.380.000		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**144.307.425.920**		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**135.259.289.204**		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	134.997.709.204		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	134.997.709.204		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	134.997.709.204		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	84.457.346.387		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	66.120.863.138		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	6.715.829.096		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	282.390.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.666.294.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.626.058.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	4.544.424.120		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	188.189.593		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.699.369		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	311.598.271		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	14.053.169.817		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.507.721.097		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.806.987		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	6.537.641.733		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.487.193.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	03	03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	18.253.556.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	03	04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	16.952.637.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	03	05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.281.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	261.580.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	261.580.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	198.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	198.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	158.400.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	39.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	63.580.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	1.180.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.180.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	62.400.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	62.400.000		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.05**	**00**						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**316.820.000**		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.05	05						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	316.820.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.05	05	5	1				BELANJA OPERASI	316.820.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.05	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	316.820.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.05	05	5	1	02	01		Belanja Barang	5.129.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.05	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.129.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.05	05	5	1	02	02		Belanja Jasa	126.626.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.05	05	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	126.626.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.05	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	185.065.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.05	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	185.065.000		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.719.224.000**		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.558.453.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	509.063.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	01			Belanja Pegawai	1.260.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.260.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	1.260.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	507.803.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	447.803.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	447.803.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	60.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	60.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2				BELANJA MODAL	1.049.389.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.049.389.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan	391.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2	02	02	01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	391.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	379.649.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2	02	05	01	Belanja Modal Alat Kantor	40.365.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	194.284.900		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2	02	05	03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	145.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	177.980.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	177.980.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	100.159.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	100.159.900		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.741.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	42.741.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	42.741.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	42.741.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	42.741.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	18.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	18.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	18.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.030.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	100.030.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.030.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	100.030.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.030.000		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**751.555.716**		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	84.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	84.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	84.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	84.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	667.555.716		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	667.555.716		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	667.555.716		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	667.555.716		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	667.555.716		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.260.537.000**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.750.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	76.750.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	76.750.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	42.750.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	42.750.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	4.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	30.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.960.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	39.960.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	39.960.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	12.960.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.960.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	9.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	18.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	07						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	29.250.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	07	5	1				BELANJA OPERASI	29.250.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	29.250.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	07	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	29.250.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	07	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.250.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.114.577.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1				BELANJA OPERASI	1.323.577.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	01			Belanja Pegawai	12.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	12.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.311.577.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	01		Belanja Barang	11.577.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.577.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	02		Belanja Jasa	250.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	250.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	1.050.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.050.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	2				BELANJA MODAL	4.791.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.791.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	4.791.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.791.000.000		
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**1.238.076.300**		
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**871.881.300**		
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**571.881.300**		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	571.881.300		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	571.881.300		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	571.881.300		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	37.234.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	37.234.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	232.780.300		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	208.155.300		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.125.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.500.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	290.867.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	290.867.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	05		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.000.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	05	01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**300.000.000**		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	300.000.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	300.000.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	300.000.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	01		Belanja Barang	26.865.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	26.865.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	61.500.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	41.000.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.500.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	211.635.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	211.635.000		
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**366.195.000**		
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**366.195.000**		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.01	01						Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	366.195.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	366.195.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	366.195.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	63.686.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	63.686.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	88.800.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	76.800.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	213.709.000		
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	213.709.000		
											Jumlah Belanja	**268.192.635.200**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(268.192.635.200)**		
0	**00**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**					**PENDAPATAN DAERAH**			
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**				**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**39.993.000**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02			Retribusi Daerah	39.993.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02	01		Retribusi Jasa Umum	39.993.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	39.993.000		
											Jumlah Pendapatan	**39.993.000**		
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**100.171.177.147**		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**54.984.324.062**		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**15.140.901.274**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01						Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	785.196.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	212.298.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	210.298.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	8.215.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.215.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	52.482.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	52.482.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	149.601.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	149.601.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	2				BELANJA MODAL	572.897.600		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	572.897.600		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	2	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan	545.597.600		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	2	02	02	01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	545.597.600		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	27.300.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	20.100.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	2	02	10	02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.200.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03						Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.148.622.100		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	655.735.640		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	01			Belanja Pegawai	15.610.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.610.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	15.610.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	640.125.640		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	9.668.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.668.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	294.558.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	67.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	227.058.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	250.059.640		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.059.640		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	85.840.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.840.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2				BELANJA MODAL	4.492.886.460		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.693.575		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	33.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	33.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14.400.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	14.400.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2	02	07		Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.046.175		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2	02	07	01	Belanja Modal Alat Kedokteran	23.046.175		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	110.247.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	108.141.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2	02	10	02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.106.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.312.192.885		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	4.312.192.885		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.312.192.885		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12						Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	452.185.350		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1				BELANJA OPERASI	81.552.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	81.552.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1	02	01		Belanja Barang	3.982.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.982.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1	02	02		Belanja Jasa	20.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	57.070.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.070.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	2				BELANJA MODAL	370.632.650		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.942.650		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	2	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan	75.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	2	02	02	03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	75.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	59.942.650		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	59.942.650		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.690.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	2	04	04		Belanja Modal Jaringan	235.690.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	2	04	04	04	Belanja Modal Jaringan Gas	235.690.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.593.976.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1				BELANJA OPERASI	250.175.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1	01			Belanja Pegawai	4.080.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.080.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	4.080.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	246.095.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1	02	01		Belanja Barang	6.977.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.977.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1	02	02		Belanja Jasa	138.816.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	138.816.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	100.302.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.302.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	2				BELANJA MODAL	6.343.801.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.343.801.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	2	02	07		Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.343.801.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	2	02	07	01	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.343.801.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	16						Pengadaan Obat, Vaksin	1.303.834.977		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	16	5	1				BELANJA OPERASI	1.303.834.977		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	16	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	16	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	16	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	16	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.303.154.977		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	16	5	1	02	01		Belanja Barang	1.259.916.977		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	16	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.259.916.977		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	16	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	43.238.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	16	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.238.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17						Pengadaan Bahan Habis Pakai	757.086.847		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17	5	1				BELANJA OPERASI	757.086.847		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17	5	1	01			Belanja Pegawai	2.120.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.120.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.120.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	754.966.847		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17	5	1	02	01		Belanja Barang	650.074.847		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	650.074.847		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17	5	1	02	02		Belanja Jasa	32.356.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	32.356.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	72.536.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.536.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20	5	1				BELANJA OPERASI	100.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20	5	1	01			Belanja Pegawai	40.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	40.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	60.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20	5	1	02	01		Belanja Barang	2.645.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.645.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20	5	1	02	02		Belanja Jasa	14.421.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.421.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	42.934.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.934.000		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**39.697.612.788**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	815.039.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	815.039.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	815.039.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1	02	01		Belanja Barang	33.251.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	33.251.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	645.214.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	627.344.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.070.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.800.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	136.574.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	136.574.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.129.699.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	1.129.699.800		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.059.949.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	301.989.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	301.989.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	601.710.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	400.200.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	76.510.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	125.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	156.250.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	156.250.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1	06			Belanja Bantuan Sosial	69.750.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1	06	01		Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	69.750.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1	06	01	01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	69.750.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.166.040.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	1				BELANJA OPERASI	1.166.040.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.166.040.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	1	02	01		Belanja Barang	34.580.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	34.580.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	988.900.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	981.100.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.800.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	142.560.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	142.560.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	04						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	711.040.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	04	5	1				BELANJA OPERASI	711.040.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	711.040.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	04	5	1	02	01		Belanja Barang	22.524.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	22.524.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	574.400.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	552.800.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	04	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.800.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	04	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	04	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.800.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	114.116.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	114.116.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	05						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	470.525.460		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	05	5	1				BELANJA OPERASI	470.525.460		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	470.525.460		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	05	5	1	02	01		Belanja Barang	6.758.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.758.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	05	5	1	02	02		Belanja Jasa	430.911.060		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	05	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	189.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	05	5	1	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	211.641.060		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	05	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.270.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	32.856.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.856.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.029.647.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06	5	1				BELANJA OPERASI	1.029.647.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.029.647.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06	5	1	02	01		Belanja Barang	27.345.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	27.345.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	886.400.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	886.400.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	115.902.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	115.902.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	07						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.117.926.798		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	07	5	1				BELANJA OPERASI	1.117.926.798		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.117.926.798		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	07	5	1	02	01		Belanja Barang	91.756.798		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	91.756.798		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	07	5	1	02	02		Belanja Jasa	976.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	07	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	976.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	49.670.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.670.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	08						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	517.319.623		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	08	5	1				BELANJA OPERASI	517.319.623		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	517.319.623		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	08	5	1	02	01		Belanja Barang	307.658.623		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	307.658.623		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	08	5	1	02	02		Belanja Jasa	34.995.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	08	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	21.950.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	08	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.045.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	08	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	174.666.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.666.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	273.087.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	5	1				BELANJA OPERASI	273.087.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	273.087.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	5	1	02	01		Belanja Barang	1.578.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.578.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	5	1	02	02		Belanja Jasa	247.123.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	234.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.123.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	24.386.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.386.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	614.849.900		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10	5	1				BELANJA OPERASI	614.849.900		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	614.849.900		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10	5	1	02	01		Belanja Barang	6.723.900		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.723.900		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10	5	1	02	02		Belanja Jasa	564.090.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	555.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.090.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	44.036.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.036.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.140.898.950		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11	5	1				BELANJA OPERASI	1.140.898.950		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.140.898.950		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11	5	1	02	01		Belanja Barang	540.713.950		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	540.713.950		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11	5	1	02	02		Belanja Jasa	388.045.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	357.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.545.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	212.140.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	212.140.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	12						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.390.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	12	5	1				BELANJA OPERASI	1.390.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	12	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.390.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	12	5	1	02	01		Belanja Barang	4.494.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	12	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.494.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	12	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.345.210.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	12	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	1.320.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	12	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	25.210.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	12	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	40.296.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	12	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.296.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	13						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	149.887.900		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	13	5	1				BELANJA OPERASI	149.887.900		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	13	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	149.887.900		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	13	5	1	02	01		Belanja Barang	1.503.900		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	13	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.503.900		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	13	5	1	02	02		Belanja Jasa	79.444.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	13	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	79.444.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	13	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	68.940.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	13	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.940.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.016.220.307		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14	5	1				BELANJA OPERASI	1.016.220.307		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14	5	1	01			Belanja Pegawai	4.020.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.020.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	4.020.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.012.200.307		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14	5	1	02	01		Belanja Barang	293.702.307		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	293.702.307		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14	5	1	02	02		Belanja Jasa	315.076.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	92.800.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	222.276.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	403.422.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	403.422.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	15						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	150.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	15	5	1				BELANJA OPERASI	150.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	15	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	150.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	15	5	1	02	01		Belanja Barang	7.380.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	15	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.380.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	15	5	1	02	02		Belanja Jasa	52.750.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	15	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	48.250.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	15	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	15	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	89.870.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	15	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.870.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	16						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	16	5	1				BELANJA OPERASI	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	16	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	16	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	16	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	17						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.112.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	17	5	1				BELANJA OPERASI	50.112.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	17	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	50.112.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	17	5	1	02	02		Belanja Jasa	29.132.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	17	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	29.132.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	17	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	20.980.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	17	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.980.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	18						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	200.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	18	5	1				BELANJA OPERASI	200.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	18	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	200.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	18	5	1	02	01		Belanja Barang	39.360.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	18	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	39.360.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	18	5	1	02	02		Belanja Jasa	68.620.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	18	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	32.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	18	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	36.620.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	18	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	92.020.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	18	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	92.020.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	19						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	49.999.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	19	5	1				BELANJA OPERASI	49.999.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	19	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	49.999.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	19	5	1	02	01		Belanja Barang	8.618.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	19	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.618.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	19	5	1	02	02		Belanja Jasa	14.105.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	19	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.105.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	19	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	27.276.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	19	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.276.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	20						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	128.146.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	20	5	1				BELANJA OPERASI	128.146.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	20	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	128.146.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	20	5	1	02	01		Belanja Barang	13.212.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	20	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	13.212.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	20	5	1	02	02		Belanja Jasa	55.168.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	20	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	36.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	20	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.168.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	20	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	59.766.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	20	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.766.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	25						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	884.423.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	25	5	1				BELANJA OPERASI	884.423.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	25	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	884.423.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	25	5	1	02	01		Belanja Barang	320.844.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	25	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	320.844.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	25	5	1	02	02		Belanja Jasa	195.679.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	25	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	21.650.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	25	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	166.029.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	25	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	25	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	367.900.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	25	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	367.900.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.689.339.524		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26	5	1				BELANJA OPERASI	2.689.339.524		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	2.489.339.524		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26	5	1	02	01		Belanja Barang	13.444.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	13.444.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26	5	1	02	02		Belanja Jasa	2.352.198.724		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26	5	1	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.352.198.724		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	123.696.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	123.696.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26	5	1	05			Belanja Hibah	200.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26	5	1	05	05		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26	5	1	05	05	01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	29						Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	29	5	1				BELANJA OPERASI	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	29	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	29	5	1	02	01		Belanja Barang	4.295.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	29	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.295.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	29	5	1	02	02		Belanja Jasa	10.075.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	29	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.075.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	29	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	35.630.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	29	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.630.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32						Operasional Pelayanan Rumah Sakit	999.999.650		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1				BELANJA OPERASI	776.994.650		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	776.994.650		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1	02	01		Belanja Barang	185.855.650		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	185.855.650		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1	02	02		Belanja Jasa	406.009.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	306.680.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	99.329.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	124.880.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	107.880.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	60.250.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.250.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2				BELANJA MODAL	223.005.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.010.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	02	01		Belanja Modal Alat Besar	6.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	02	01	03	Belanja Modal Alat Bantu	6.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.475.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.475.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	7.535.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	7.535.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	202.995.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	202.995.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	03	01	02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	202.995.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33						Operasional Pelayanan Puskesmas	21.710.405.276		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1				BELANJA OPERASI	20.897.261.072		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1	01			Belanja Pegawai	3.680.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.680.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	3.680.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	20.893.581.072		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1	02	01		Belanja Barang	4.267.392.874		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.267.392.874		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1	02	02		Belanja Jasa	15.228.334.198		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	15.228.334.198		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	348.008.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	193.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	155.008.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	1.049.846.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.049.846.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2				BELANJA MODAL	813.144.204		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	813.144.204		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	01		Belanja Modal Alat Besar	16.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	01	03	Belanja Modal Alat Bantu	16.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan	90.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	02	03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	90.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	03		Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	03	03	Belanja Modal Alat Ukur	9.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	04		Belanja Modal Alat Pertanian	29.209.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	04	01	Belanja Modal Alat Pengolahan	29.209.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	104.397.500		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	05	01	Belanja Modal Alat Kantor	15.200.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	89.196.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	107.766.527		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	107.766.527		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	07		Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	39.886.127		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	07	01	Belanja Modal Alat Kedokteran	39.886.127		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	08		Belanja Modal Alat Laboratorium	70.262.550		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	08	01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	70.262.550		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	346.121.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	330.030.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	10	02	Belanja Modal Peralatan Komputer	16.091.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	34						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	427.153.500		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	34	5	1				BELANJA OPERASI	427.153.500		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	34	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	427.153.500		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	34	5	1	02	01		Belanja Barang	19.701.500		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	34	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	19.701.500		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	34	5	1	02	02		Belanja Jasa	280.202.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	34	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	74.140.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	34	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	206.062.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	34	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	127.250.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	34	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	127.250.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	35						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	765.851.500		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	35	5	1				BELANJA OPERASI	765.851.500		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	35	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	765.851.500		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	35	5	1	02	01		Belanja Barang	86.108.500		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	35	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	86.108.500		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	35	5	1	02	02		Belanja Jasa	406.789.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	35	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	162.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	35	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	231.289.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	35	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	35	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	272.954.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	35	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	272.954.000		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**2.03**	**00**						**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**145.810.000**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	02						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	1				BELANJA OPERASI	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	1	02	01		Belanja Barang	2.900.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.900.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	47.100.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.100.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03						Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	95.810.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	1				BELANJA OPERASI	75.150.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	75.150.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	1	02	01		Belanja Barang	3.400.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.400.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	71.750.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	71.750.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	2				BELANJA MODAL	20.660.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.660.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.960.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	3.960.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	16.700.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	16.700.000		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**181.700.000**		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**60.000.000**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01						Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	25.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	25.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	25.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	1.910.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.910.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	23.090.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.090.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02						Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	35.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	35.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	35.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	9.970.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.970.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	11.750.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	11.750.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	13.280.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.280.000		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**2.03**	**00**						**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**121.700.000**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	01						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	121.700.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	01	5	1				BELANJA OPERASI	121.700.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	121.700.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	90.600.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	90.600.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	31.100.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.100.000		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**04**	**0.00**	**00**						**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**100.000.000**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**04**	**2.01**	**00**						**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**50.000.000**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	1.859.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.859.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	21.931.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.931.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	26.210.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.210.000		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**04**	**2.03**	**00**						**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**50.000.000**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.03	01						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.03	01	5	1				BELANJA OPERASI	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.03	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.03	01	5	1	02	01		Belanja Barang	2.789.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.03	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.789.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.03	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	21.931.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.03	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.931.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.03	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	25.280.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.03	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.280.000		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**173.577.000**		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**05**	**2.02**	**00**						**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**75.000.000**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.02	01						Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	75.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	75.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.02	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	75.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.02	01	5	1	02	01		Belanja Barang	54.700.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.02	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	54.700.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.02	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	19.300.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.02	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	19.300.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.02	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.02	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**05**	**2.03**	**00**						**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**98.577.000**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.03	01						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	98.577.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.03	01	5	1				BELANJA OPERASI	98.577.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.03	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	98.577.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.03	01	5	1	02	01		Belanja Barang	12.270.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.03	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.270.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.03	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	66.427.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.03	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	41.950.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.03	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.477.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.03	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	19.880.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.03	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.880.000		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**44.731.576.085**		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.01**	**00**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60.000.000**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	30.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	30.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	15.250.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.250.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	2.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.750.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	30.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	30.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	8.260.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.260.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	21.740.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.740.000		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**44.055.544.935**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.465.512.829		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	36.465.512.829		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	36.465.512.829		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	26.263.251.382		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	20.070.531.105		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.912.970.401		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	395.137.715		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.305.858.346		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	496.866.066		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.938.070.658		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	42.160.300		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	604.135		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	101.052.656		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.202.261.447		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.589.397.003		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	80.708.765		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.532.155.679		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.590.032.106		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	7.590.032.106		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	254.100.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	254.100.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	166.800.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	87.300.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	7.335.932.106		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	7.335.932.106		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	7.116.044.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	02	5	1	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	219.888.106		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**356.034.850**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.995.750		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	14.995.750		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	14.995.750		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	14.995.750		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.995.750		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.017.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	2				BELANJA MODAL	81.017.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.017.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	41.250.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	41.250.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	28.767.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	27.817.400		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	2	02	10	02	Belanja Modal Peralatan Komputer	950.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.999.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1				BELANJA OPERASI	34.999.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	34.999.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1	02	01		Belanja Barang	34.999.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	34.999.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.996.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	59.996.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	59.996.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	53.096.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	53.096.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	6.900.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.900.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	15.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	15.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	15.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.026.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	100.026.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.026.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	100.026.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.026.000		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80.000.000**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	80.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	80.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	80.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	80.000.000		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**179.996.300**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.996.500		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	79.996.500		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	79.996.500		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	31.496.500		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	31.496.500		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	33.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	33.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	15.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.999.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1				BELANJA OPERASI	99.999.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	99.999.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	99.999.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.999.800		
											Jumlah Belanja	**100.171.177.147**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(100.131.184.147)**		
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**00**	**0.00**	**00**	**4**					**PENDAPATAN DAERAH**			
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**				**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**11.585.805.730**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	00	0.00	00	4	1	02			Retribusi Daerah	11.585.805.730		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	00	0.00	00	4	1	02	01		Retribusi Jasa Umum	11.585.805.730		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	00	0.00	00	4	1	02	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.585.805.730		
											Jumlah Pendapatan	**11.585.805.730**		
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**27.322.485.477**		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**4.183.463.788**		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**02**	**2.01**	**00**						**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.542.723.788**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12						Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.705.211.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12	5	1				BELANJA OPERASI	52.518.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	52.518.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12	5	1	02	01		Belanja Barang	940.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	940.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	51.578.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.578.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12	5	2				BELANJA MODAL	1.652.693.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.652.693.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12	5	2	02	07		Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.652.693.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12	5	2	02	07	01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.652.693.700		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	16						Pengadaan Obat, Vaksin	707.420.908		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	16	5	1				BELANJA OPERASI	707.420.908		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	16	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	707.420.908		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	16	5	1	02	01		Belanja Barang	677.420.908		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	16	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	677.420.908		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	16	5	1	02	02		Belanja Jasa	30.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	16	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	17						Pengadaan Bahan Habis Pakai	868.731.180		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	17	5	1				BELANJA OPERASI	868.731.180		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	17	5	1	01			Belanja Pegawai	2.040.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	17	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.040.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	17	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.040.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	17	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	866.691.180		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	17	5	1	02	01		Belanja Barang	866.691.180		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	17	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	866.691.180		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	20						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	261.360.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	20	5	1				BELANJA OPERASI	261.360.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	20	5	1	01			Belanja Pegawai	1.360.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	20	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.360.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	20	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	1.360.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	20	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	260.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	20	5	1	02	02		Belanja Jasa	200.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	20	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	200.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	20	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	60.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	20	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.000.000		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**02**	**2.02**	**00**						**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**640.740.000**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.02	32						Operasional Pelayanan Rumah Sakit	640.740.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.02	32	5	1				BELANJA OPERASI	640.740.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.02	32	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	640.740.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.02	32	5	1	02	02		Belanja Jasa	480.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.02	32	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	25.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.02	32	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.02	32	5	1	02	02	09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	345.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.02	32	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	65.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.02	32	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	160.740.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.02	32	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	160.740.000		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**23.139.021.689**		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19.625.730.029**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.451.079.029		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1					BELANJA OPERASI	12.451.079.029		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01				Belanja Pegawai	12.451.079.029		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.671.692.280		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01	01	01		Belanja Gaji Pokok ASN	5.766.913.913		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	607.203.215		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	48.856.522		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	590.111.632		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	205.851.900		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN	404.191.613		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.194.245		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	436.116		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01	01	12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	33.933.124		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.779.386.749		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.052.536.673		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01	02	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	477.334.110		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01	02	04		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	286.400.466		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01	02	05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.963.115.500		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	02							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.174.651.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	02	5	1					BELANJA OPERASI	7.174.651.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	02	5	1	01				Belanja Pegawai	81.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	02	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	81.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	02	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	50.400.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	30.600.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	7.093.651.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	7.093.651.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	7.093.651.000		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**777.653.400**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.552.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	22.552.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	22.552.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	22.552.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	22.552.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	630.829.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	630.829.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	630.829.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	630.829.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	630.829.400		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.272.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	124.272.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	124.272.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	124.272.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	124.272.000		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.962.543.260**		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	426.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	426.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	426.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	426.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	426.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.536.043.260		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	1.536.043.260		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.536.043.260		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.536.043.260		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	1.405.008.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	04	5	1	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	131.035.260		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**773.095.000**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	302.075.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	302.075.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	302.075.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	132.075.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	132.075.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	20.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	150.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	471.020.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	471.020.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	01			Belanja Pegawai	2.720.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.720.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.720.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	468.300.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	73.200.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	73.200.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	395.100.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.100.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02	03	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	310.000.000		
											Jumlah Belanja	**27.322.485.477**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(15.736.679.747)**		
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**					**PENDAPATAN DAERAH**			
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**				**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**518.387.472**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	02			Retribusi Daerah	518.387.472		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	02	01		Retribusi Jasa Umum	238.851.472		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	02	01	10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	238.851.472		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	02	02		Retribusi Jasa Usaha	229.536.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	229.536.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	02	03		Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	02	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000		
											Jumlah Pendapatan	**518.387.472**		
0	**00**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**150.658.436.808**		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**7.425.241.102**		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**4.173.918.102**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	932.914.002		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	919.315.002		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1	01			Belanja Pegawai	5.950.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.950.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	5.950.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	913.365.002		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	6.480.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.480.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	819.057.002		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.057.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	800.000.002		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	87.828.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	87.828.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	2				BELANJA MODAL	13.599.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.599.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	13.599.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	2	02	06	02	Belanja Modal Alat Komunikasi	13.599.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	133.055.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	118.055.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	117.375.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	2.585.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.585.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	100.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	14.790.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.790.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	2				BELANJA MODAL	15.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.800.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	4.800.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	10.200.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	10.200.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18						Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	3.107.949.100		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	1				BELANJA OPERASI	349.396.900		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	1	01			Belanja Pegawai	9.900.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.900.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	9.900.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	339.496.900		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	1	02	01		Belanja Barang	7.704.900		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.704.900		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	1	02	02		Belanja Jasa	250.150.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.150.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	230.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	81.642.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.642.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	2				BELANJA MODAL	2.758.552.200		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.400.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	49.400.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	49.400.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.709.152.200		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	2	04	02		Belanja Modal Bangunan Air	2.709.152.200		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	2	04	02	04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.709.152.200		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**3.251.323.000**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	246.844.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	246.844.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	1.360.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.360.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	1.360.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	245.484.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	02	01		Belanja Barang	2.229.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.229.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	210.075.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.075.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	33.180.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.180.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02						Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.796.327.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	196.327.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	4.490.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.490.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	4.490.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	191.837.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	6.515.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.515.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	140.150.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.150.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	120.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	45.172.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.172.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	2				BELANJA MODAL	1.600.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.600.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	2	04	02		Belanja Modal Bangunan Air	1.600.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	2	04	02	01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.600.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.208.152.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1				BELANJA OPERASI	1.208.152.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1	01			Belanja Pegawai	6.800.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.800.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	6.800.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.201.352.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1	02	01		Belanja Barang	6.617.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.617.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1	02	02		Belanja Jasa	150.375.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	50.375.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	890.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1	02	03	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	890.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	154.360.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	154.360.000		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**16.384.562.658**		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**16.384.562.658**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.193.975.700		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	1.166.725.700		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1	01			Belanja Pegawai	16.580.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.580.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	16.580.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.150.145.700		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	5.867.700		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.867.700		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.044.416.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.916.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.020.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	99.862.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.862.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	2				BELANJA MODAL	27.250.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.250.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	27.250.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	22.550.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	2	02	10	02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.700.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02						Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	788.889.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	788.889.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1	01			Belanja Pegawai	4.320.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.320.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	4.320.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	784.569.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	8.311.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.311.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	719.916.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.916.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	700.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	56.342.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.342.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.989.620.400		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	139.620.400		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1	01			Belanja Pegawai	10.260.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.260.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	10.260.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	129.360.400		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	9.212.400		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.212.400		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	23.712.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.712.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	96.436.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	96.436.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	2					BELANJA MODAL	2.850.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	2	04				Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.850.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	2	04	04			Belanja Modal Jaringan	2.850.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	2	04	04	04		Belanja Modal Jaringan Gas	2.850.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	723.363.850		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	1					BELANJA OPERASI	223.363.850		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	223.363.850		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	1	02	01			Belanja Barang	107.730.850		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	107.730.850		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	1	02	02			Belanja Jasa	25.203.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	3.600.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.603.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	90.430.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.430.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	2					BELANJA MODAL	500.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	2	04				Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	2	04	04			Belanja Modal Jaringan	500.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	2	04	04	04		Belanja Modal Jaringan Gas	500.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07							Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	8.525.394.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	1					BELANJA OPERASI	125.394.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	1	01				Belanja Pegawai	15.480.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.480.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	15.480.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	109.914.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	1	02	01			Belanja Barang	9.746.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	9.746.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	1	02	02			Belanja Jasa	8.060.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.060.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	92.108.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	92.108.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	2				BELANJA MODAL	8.400.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.400.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	2	04	04		Belanja Modal Jaringan	8.400.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	2	04	04	04	Belanja Modal Jaringan Gas	8.400.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15						Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	2.163.319.708		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1				BELANJA OPERASI	1.857.818.800		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1	01			Belanja Pegawai	4.760.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.760.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	4.760.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.853.058.800		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1	02	01		Belanja Barang	242.361.800		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	242.361.800		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.252.305.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	1.172.400.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	79.905.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	230.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1	02	03	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	130.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	128.392.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	128.392.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2				BELANJA MODAL	305.500.908		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.500.908		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan	128.876.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2	02	02	01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	128.876.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2	02	03		Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2	02	03	03	Belanja Modal Alat Ukur	15.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.350.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.350.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	34.909.908		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2	02	06	02	Belanja Modal Alat Komunikasi	34.909.908		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	20.365.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	20.365.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2	04	04		Belanja Modal Jaringan	100.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2	04	04	04	Belanja Modal Jaringan Gas	100.000.000		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**04**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**614.119.600**		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**04**	**2.01**	**00**						**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**614.119.600**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	614.119.600		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	614.119.600		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	01			Belanja Pegawai	8.400.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.400.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	8.400.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	605.719.600		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	5.723.600		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.723.600		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	550.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	550.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	49.996.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.996.000		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**1.929.949.900**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**05**	**2.01**	**00**						**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.929.949.900**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	914.925.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	914.925.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	01			Belanja Pegawai	7.200.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.200.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	7.200.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	907.725.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	3.793.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.793.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	849.600.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	8.600.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	41.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	800.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	54.332.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.332.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06						Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.015.024.900		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	1				BELANJA OPERASI	248.274.900		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	248.274.900		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	1	02	01		Belanja Barang	11.317.900		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.317.900		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	105.159.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	48.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	57.159.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	131.798.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	131.798.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	2				BELANJA MODAL	766.750.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	766.750.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	2	04	03		Belanja Modal Instalasi	766.750.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	2	04	03	02		Belanja Modal Instalasi Air Kotor	766.750.000		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**08**	**0.00**	**00**							**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**15.451.612.600**		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**08**	**2.01**	**00**							**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**15.451.612.600**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02							Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	15.451.612.600		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1					BELANJA OPERASI	4.083.573.600		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	01				Belanja Pegawai	360.770.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	360.770.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	360.770.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	3.722.803.600		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	02	01			Belanja Barang	8.692.600		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	8.692.600		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	02	02			Belanja Jasa	3.136.679.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	131.700.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.979.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	02	02	08		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.880.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	77.432.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	77.432.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	02	05			Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	500.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	02	05	01		Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	300.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	02	05	02		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	200.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	2					BELANJA MODAL	11.368.039.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	2	01				Belanja Modal Tanah	4.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	2	01	01		Belanja Modal Tanah	4.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	2	01	01	01	Belanja Modal Tanah Persil	4.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.599.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	13.599.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	2	02	06	02	Belanja Modal Alat Komunikasi	13.599.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.350.440.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	11.350.440.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.350.440.000		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**10**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**95.750.229.053**		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**10**	**2.01**	**00**						**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**95.750.229.053**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23						Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3.677.370.785		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23	5	1				BELANJA OPERASI	3.677.370.785		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23	5	1	01			Belanja Pegawai	12.240.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.240.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	12.240.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	3.665.130.785		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23	5	1	02	01		Belanja Barang	4.064.980		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.064.980		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23	5	1	02	02		Belanja Jasa	3.600.105.805		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	127.474.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.472.631.805		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	60.960.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.960.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01						Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	7.042.563.491		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	7.042.563.491		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	01			Belanja Pegawai	22.240.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	22.240.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	22.240.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	6.997.323.491		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	8.083.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.083.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	6.509.238.491		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	113.420.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.035.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	02	02	09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.360.818.491		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	480.002.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.002.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	05			Belanja Hibah	23.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	05	05		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	23.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	05	05	01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04						Survey Kondisi Jalan/Jembatan	814.236.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	814.236.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04	5	1	01			Belanja Pegawai	4.320.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.320.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	4.320.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	809.916.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04	5	1	02	01		Belanja Barang	2.516.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.516.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	760.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04	5	1	02	02	09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	760.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	47.400.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.400.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05						Pembangunan Jalan	18.314.065.191		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	1				BELANJA OPERASI	388.655.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	1	01			Belanja Pegawai	41.160.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.160.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	41.160.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	347.495.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	1	02	01		Belanja Barang	7.570.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.570.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	1	02	02		Belanja Jasa	76.153.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	76.153.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	263.772.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	263.772.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	2				BELANJA MODAL	17.925.410.191		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	2	01			Belanja Modal Tanah	802.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	2	01	01		Belanja Modal Tanah	802.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	2	01	01	01	Belanja Modal Tanah Persil	2.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	2	01	01	02	Belanja Modal Tanah Non Persil	800.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.123.410.191		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	2	04	01		Belanja Modal Jalan dan Jembatan	17.123.410.191		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	2	04	01	01	Belanja Modal Jalan	17.123.410.191		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08						Rekonstruksi Jalan	60.475.600.586		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	1				BELANJA OPERASI	771.596.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	1	01			Belanja Pegawai	37.710.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.710.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	37.710.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	733.886.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	1	02	01		Belanja Barang	12.931.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.931.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	1	02	02		Belanja Jasa	121.389.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	73.200.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	48.189.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	599.566.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	599.566.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2				BELANJA MODAL	59.704.004.586		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.340.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2	02	03		Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	125.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2	02	03	03	Belanja Modal Alat Ukur	125.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2	02	05	01	Belanja Modal Alat Kantor	1.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	32.500.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	12.500.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2	02	06	02	Belanja Modal Alat Komunikasi	20.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	37.840.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	37.840.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.507.664.586		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2	04	01		Belanja Modal Jalan dan Jembatan	59.507.664.586		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2	04	01	01	Belanja Modal Jalan	59.507.664.586		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10						Pemeliharaan Berkala Jalan	526.848.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	1				BELANJA OPERASI	126.848.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	1	01			Belanja Pegawai	2.040.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.040.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.040.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	124.808.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	1	02	01		Belanja Barang	7.736.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.736.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	1	02	02		Belanja Jasa	29.132.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	29.132.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	87.940.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	87.940.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	2				BELANJA MODAL	400.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	2	04	01		Belanja Modal Jalan dan Jembatan	400.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	2	04	01	01	Belanja Modal Jalan	400.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11						Pemeliharaan Rutin Jalan	456.536.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	5	1				BELANJA OPERASI	456.536.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	5	1	01			Belanja Pegawai	8.180.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.180.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	8.180.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	448.356.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	5	1	02	01		Belanja Barang	7.824.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.824.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	5	1	02	02		Belanja Jasa	29.132.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	29.132.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	308.400.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	5	1	02	03	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	308.400.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	103.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12						Pembangunan Jembatan	4.443.009.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	1				BELANJA OPERASI	235.409.500		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	1	01			Belanja Pegawai	29.820.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	29.820.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	29.820.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	205.589.500		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	1	02	01		Belanja Barang	6.435.500		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.435.500		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	1	02	02		Belanja Jasa	91.672.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	91.672.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	107.482.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	107.482.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	2					BELANJA MODAL	4.207.599.500		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	2	04				Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.207.599.500		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	2	04	01			Belanja Modal Jalan dan Jembatan	4.207.599.500		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	2	04	01	02		Belanja Modal Jembatan	4.207.599.500		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**11**	**0.00**	**00**							**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**125.041.000**		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**11**	**2.01**	**00**							**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**125.041.000**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11	2.01	07							Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	125.041.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11	2.01	07	5	1					BELANJA OPERASI	125.041.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11	2.01	07	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	125.041.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11	2.01	07	5	1	02	01			Belanja Barang	22.193.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11	2.01	07	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	22.193.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11	2.01	07	5	1	02	02			Belanja Jasa	36.900.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11	2.01	07	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	33.900.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11	2.01	07	5	1	02	02	05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11	2.01	07	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	65.948.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11	2.01	07	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.948.000		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**12**	**0.00**	**00**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**2.037.972.919**		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**12**	**2.01**	**00**							**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**395.474.000**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01							Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	274.503.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01	5	1					BELANJA OPERASI	274.503.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01	5	1	01				Belanja Pegawai	450.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	450.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	274.053.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	16.731.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	16.731.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	131.700.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	131.700.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	125.622.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	125.622.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	03						Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	63.688.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	63.688.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	63.688.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	10.592.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.592.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	38.720.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	38.720.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	14.376.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.376.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	04						Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	57.283.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	57.283.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	57.283.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	04	5	1	02	01		Belanja Barang	21.933.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	21.933.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	8.950.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	8.950.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.400.000		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**12**	**2.02**	**00**						**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**1.142.802.859**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.142.802.859		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	1.089.923.859		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	3.520.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.520.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	3.520.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.086.403.859		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	21.996.860		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	21.996.860		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.026.150.999		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	18.950.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.201.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	999.999.999		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	38.256.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.256.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	2				BELANJA MODAL	52.879.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.879.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14.879.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	1.280.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	2	02	06	02	Belanja Modal Alat Komunikasi	13.599.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	38.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	38.000.000		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**12**	**2.03**	**00**						**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**439.198.060**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	281.916.400		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	1				BELANJA OPERASI	216.916.400		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	1	01			Belanja Pegawai	760.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	760.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	760.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	216.156.400		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	1	02	01		Belanja Barang	12.719.400		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.719.400		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	105.989.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	66.500.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	39.489.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	97.448.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	97.448.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	2					BELANJA MODAL	65.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	65.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio	65.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02							Sistem Informasi Penataan Ruang	157.281.660		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	1					BELANJA OPERASI	106.629.660		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	1	01				Belanja Pegawai	900.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	900.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	900.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	105.729.660		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	1	02	01			Belanja Barang	5.729.660		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.729.660		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	1	02	02			Belanja Jasa	100.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	2					BELANJA MODAL	50.652.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.652.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.800.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio	4.800.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	45.852.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	38.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer	7.852.000		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**12**	**2.04**	**00**							**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**60.498.000**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.04	04							Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	60.498.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.04	04	5	1					BELANJA OPERASI	60.498.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.04	04	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	60.498.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.04	04	5	1	02	01			Belanja Barang	5.357.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.04	04	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.357.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.04	04	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	55.141.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.04	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.141.000		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.939.707.976**		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.01**	**00**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**229.066.500**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	229.066.500		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	164.556.500		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.280.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.280.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.280.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	162.276.500		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	18.546.500		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.546.500		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	100.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	02	02	09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	43.730.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.730.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	2				BELANJA MODAL	64.510.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.510.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	52.160.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	12.160.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	2	02	06	02	Belanja Modal Alat Komunikasi	40.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	12.350.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	12.350.000		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.872.532.956**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.251.184.956		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	6.251.184.956		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	6.251.184.956		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.280.274.154		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.287.538.636		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	303.875.792		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	217.990.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	189.690.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	254.800.600		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.412.152		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	529.281		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	16.437.693		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.970.910.802		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	999.910.802		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	9.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	962.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.621.348.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	2.621.348.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	254.700.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	254.700.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	234.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	20.700.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	2.366.648.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	6.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	2.360.648.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	2.360.648.000		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**579.105.220**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.900.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	32.900.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	32.900.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	32.900.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	32.900.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	215.405.220		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	213.915.220		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1	01			Belanja Pegawai	3.040.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.040.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	3.040.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	210.875.220		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	210.875.220		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	210.875.220		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	2				BELANJA MODAL	1.490.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.490.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.490.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.490.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95.660.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	95.660.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	01			Belanja Pegawai	760.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	760.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	760.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	94.900.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	94.900.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	94.900.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	135.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	135.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	135.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	135.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	135.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.140.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	100.140.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.140.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	100.140.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.140.000		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**101.600.000**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.600.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	101.600.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	101.600.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	101.600.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	101.600.000		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.157.403.300**		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168.740.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	168.740.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	168.740.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	27.300.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	27.300.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	31.500.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	31.500.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	70.540.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.540.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	39.400.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.400.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	702.669.600		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	652.669.600		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	01			Belanja Pegawai	3.800.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.800.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	3.800.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	648.869.600		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	02	01			Belanja Barang	231.359.600		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	231.359.600		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	02	02			Belanja Jasa	283.650.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	19.400.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	219.250.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	45.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	88.860.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88.860.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	2					BELANJA MODAL	50.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	2	02	03			Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	50.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	2	02	03	01		Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	50.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.080.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	5	1					BELANJA OPERASI	50.080.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	50.080.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	50.080.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.080.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.913.700		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1					BELANJA OPERASI	190.206.500		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	01				Belanja Pegawai	2.200.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.200.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	2.200.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	188.006.500		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	02	01			Belanja Barang	15.986.500		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	15.986.500		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	02	02			Belanja Jasa	10.220.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	02	02	08		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.220.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	161.800.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	161.800.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	2					BELANJA MODAL	45.707.200		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.707.200		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	2	02	03			Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	2	02	03	03		Belanja Modal Alat Ukur	500.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.735.200		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga	40.735.200		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	4.472.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer	4.472.000		
												Jumlah Belanja	**150.658.436.808**		
												Total Surplus/(Defisit)	**(150.140.049.336)**		
0	**00**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**						**PEMBIAYAAN**			
												Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
												Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**27.695.668.897**		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**8.786.343.700**		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**85.324.900**		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.01	01						Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	85.324.900		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	85.324.900		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	85.324.900		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	15.089.900		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.089.900		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	22.495.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.01	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22.495.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	47.740.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.740.000		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**96.334.000**		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.02	01						Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	96.334.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	96.334.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.02	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	96.334.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.02	01	5	1	02	01		Belanja Barang	10.539.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.02	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.539.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.02	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	22.495.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22.495.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.02	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	63.300.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.02	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.300.000		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**02**	**2.03**	**00**						**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**8.446.072.000**		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	355.523.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	5	1				BELANJA OPERASI	355.523.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	5	1	01			Belanja Pegawai	32.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	32.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	32.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	323.523.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	5	1	02	01			Belanja Barang	1.603.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.603.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	5	1	02	02			Belanja Jasa	8.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	5	1	02	02	05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	53.920.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.920.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	5	1	02	05			Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	260.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	5	1	02	05	01		Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	260.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	02							Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	33.560.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	02	5	1					BELANJA OPERASI	33.560.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	33.560.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	02	5	1	02	01			Belanja Barang	110.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	02	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	110.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	02	5	1	02	02			Belanja Jasa	20.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	02	5	1	02	02	08		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	02	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	13.450.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	02	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.450.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04							Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	7.473.584.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1					BELANJA OPERASI	7.087.784.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1	01				Belanja Pegawai	152.250.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	152.250.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	152.250.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	6.935.534.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1	02	01			Belanja Barang	61.901.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	61.901.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	624.144.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	284.144.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	399.489.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	399.489.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1	02	05		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.850.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1	02	05	01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.850.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	2				BELANJA MODAL	385.800.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	9.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	376.800.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	2	04	01		Belanja Modal Jalan dan Jembatan	376.800.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	2	04	01	01	Belanja Modal Jalan	376.800.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	583.405.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	5	1				BELANJA OPERASI	574.405.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	574.405.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	5	1	02	01		Belanja Barang	35.573.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	35.573.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	88.832.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88.832.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	5	1	02	05		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	450.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	5	1	02	05	01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	450.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	5	2				BELANJA MODAL	9.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	9.000.000		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**02**	**2.04**	**00**						**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**86.560.000**		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.04	02						Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	86.560.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.04	02	5	1				BELANJA OPERASI	86.560.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.04	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	86.560.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.04	02	5	1	02	01		Belanja Barang	7.295.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.04	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.295.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.04	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	17.655.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.04	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.655.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.04	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	61.610.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.04	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.610.000		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**02**	**2.06**	**00**						**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**72.052.800**		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.06	03						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	72.052.800		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.06	03	5	1				BELANJA OPERASI	72.052.800		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.06	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	72.052.800		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.06	03	5	1	02	01		Belanja Barang	4.688.800		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.06	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.688.800		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.06	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	67.364.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.06	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.364.000		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**10.330.873.900**		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**03**	**2.02**	**00**						**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**394.999.400**		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08						Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	394.999.400		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1				BELANJA OPERASI	394.999.400		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	01			Belanja Pegawai	480.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	480.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	480.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	394.519.400		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	02	01		Belanja Barang	15.359.400		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.359.400		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	02	02		Belanja Jasa	279.300.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	74.800.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.500.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	200.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	99.860.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.860.000		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**03**	**2.03**	**00**						**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**9.935.874.500**		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	9.455.824.100		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1				BELANJA OPERASI	9.455.824.100		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	01			Belanja Pegawai	263.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	263.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	263.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	9.192.824.100		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	02	01		Belanja Barang	117.240.100		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	117.240.100		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	314.064.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	250.064.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	64.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	501.520.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	501.520.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	02	05		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.260.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	02	05	01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.260.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03						Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	295.640.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1				BELANJA OPERASI	291.140.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1	01			Belanja Pegawai	76.250.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	76.250.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	76.250.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	214.890.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1	02	01		Belanja Barang	35.014.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	35.014.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	15.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	164.876.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	164.876.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	2				BELANJA MODAL	4.500.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.500.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	4.500.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07						Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	184.410.400		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	5	1				BELANJA OPERASI	175.410.400		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	175.410.400		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	5	1	02	01		Belanja Barang	7.298.400		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.298.400		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	5	1	02	02		Belanja Jasa	33.715.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	33.715.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	134.397.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	134.397.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	5	2				BELANJA MODAL	9.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	9.000.000		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**4.536.061.000**		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**05**	**2.01**	**00**						**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**4.536.061.000**		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.477.448.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	670.274.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	1	01			Belanja Pegawai	36.060.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.060.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	36.060.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	634.214.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	22.131.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	22.131.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	128.600.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	128.600.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	483.483.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	483.483.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2				BELANJA MODAL	3.807.174.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.776.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	49.500.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	49.500.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	16.276.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	12.500.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2	02	10	02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.776.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	945.798.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	945.798.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	945.798.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.795.600.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2	04	01		Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.795.600.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2	04	01	01	Belanja Modal Jalan	2.795.600.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	05						Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	58.613.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	05	5	1				BELANJA OPERASI	58.613.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	58.613.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	05	5	1	02	01		Belanja Barang	2.639.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.639.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	55.974.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.974.000		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.042.390.297**		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**01**	**2.01**	**00**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**38.988.000**		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.01	01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.988.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	38.988.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1	01			Belanja Pegawai	8.250.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.250.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	8.250.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	30.738.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	30.738.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	30.738.000		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.907.061.697**		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.822.101.697		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	2.822.101.697		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.822.101.697		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.728.967.445		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.300.519.804		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	158.420.220		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	157.850.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.850.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	40.926.028		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.015.248		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	187.238		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.198.907		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.093.134.252		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	547.689.648		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	10.409.316		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	535.035.288		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.960.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	84.960.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	84.960.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	84.960.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	60.960.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	24.000.000		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**281.499.600**		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	20.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	20.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	20.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.384.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	1				BELANJA OPERASI	33.384.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	33.384.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	1	02	01		Belanja Barang	33.384.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	33.384.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.063.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	75.063.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	75.063.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	75.063.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	75.063.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.115.600		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	33.115.600		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	33.115.600		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	33.115.600		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	33.115.600		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.995.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	19.995.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	19.995.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	19.995.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	19.995.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.942.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	99.942.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	99.942.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	99.942.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.942.000		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**01**	**2.07**	**00**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**110.155.000**		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	05						Pengadaan Mebel	49.300.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	05	5	2				BELANJA MODAL	49.300.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	05	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.300.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	05	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.300.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	05	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	49.300.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.855.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	1				BELANJA OPERASI	2.040.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	1	01			Belanja Pegawai	2.040.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.040.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.040.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2				BELANJA MODAL	58.815.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.815.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	22.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	26.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	26.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	10.815.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	02	10	02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.815.000		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**540.980.000**		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	93.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	93.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	93.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	93.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	447.980.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	447.980.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	447.980.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	447.980.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	447.980.000		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**163.706.000**		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.180.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	58.180.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	58.180.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	6.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	36.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.000.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	16.180.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.180.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.228.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	49.228.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	49.228.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	36.658.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	36.658.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	4.500.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	8.070.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.070.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.950.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	29.950.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	29.950.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	29.950.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.950.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.348.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	1				BELANJA OPERASI	26.348.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	26.348.000		
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	26.348.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.348.000		
											Jumlah Belanja	**27.695.668.897**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(27.695.668.897)**		
0	**00**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**5.171.477.301**		
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**109.131.800**		
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**66.003.800**		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	28.339.800		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	28.339.800		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	28.339.800		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	4.313.800		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.313.800		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	24.026.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.026.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	02						Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	37.664.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	37.664.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	37.664.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	1.428.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.428.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	36.236.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.236.000		
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**02**	**2.03**	**00**						**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**43.128.000**		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.03	01						Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	43.128.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.03	01	5	1				BELANJA OPERASI	43.128.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.03	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	43.128.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.03	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	21.375.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.03	01	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	21.375.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.03	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	21.753.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.03	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.753.000		
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**04**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**295.136.500**		
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**04**	**2.01**	**00**						**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**86.084.000**		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01						Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.486.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	14.486.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	14.486.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	1.286.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.286.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	12.200.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.200.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02						Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.040.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	4.420.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	4.420.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	130.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	130.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	4.290.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.290.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02	5	2				BELANJA MODAL	10.620.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.620.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.620.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.620.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	03						Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	21.270.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	21.270.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	21.270.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	2.350.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.350.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	18.920.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.920.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04						Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.288.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	15.068.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	1	01			Belanja Pegawai	450.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	450.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	14.618.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	1	02	01		Belanja Barang	449.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	449.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	14.169.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.169.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	2				BELANJA MODAL	20.220.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.220.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.220.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20.220.000		
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**04**	**2.02**	**00**						**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**14.543.500**		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.02	01						Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	14.543.500		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	14.543.500		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.02	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	14.543.500		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.02	01	5	1	02	01		Belanja Barang	2.023.500		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.02	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.023.500		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.02	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	12.520.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.02	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.520.000		
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**04**	**2.03**	**00**						**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**92.465.000**		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.03	01						Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	92.465.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.03	01	5	1				BELANJA OPERASI	92.465.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.03	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	92.465.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.03	01	5	1	02	01		Belanja Barang	451.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.03	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	451.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.03	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	42.750.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.03	01	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	42.750.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.03	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	49.264.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.03	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.264.000		
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**04**	**2.04**	**00**						**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**102.044.000**		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	01						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	47.676.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	01	5	1				BELANJA OPERASI	47.676.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	47.676.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	01	5	1	02	01		Belanja Barang	3.226.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.226.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	44.450.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.450.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	02						Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	54.368.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	02	5	1				BELANJA OPERASI	54.368.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	54.368.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	02	5	1	02	01		Belanja Barang	3.428.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.428.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	8.500.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	02	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	500.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	42.440.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.440.000		
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.767.209.001**		
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.169.226.401**		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.120.026.401		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	3.120.026.401		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	3.120.026.401		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.134.495.348		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.624.900.800		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	178.988.796		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	156.356.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	53.997.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	99.990.840		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.279.150		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	858.257		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.124.505		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	985.531.053		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	494.267.573		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.806.987		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	483.456.493		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.200.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	49.200.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	49.200.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	49.200.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	20.400.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	28.800.000		
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**96.551.600**		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.911.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	7.911.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	7.911.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	7.911.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.911.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	03						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	03	5	1				BELANJA OPERASI	1.500.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.500.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	03	5	1	02	01		Belanja Barang	1.500.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.064.600		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	48.064.600		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	48.064.600		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	48.064.600		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	48.064.600		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	13.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	13.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	13.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	13.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.076.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	26.076.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	26.076.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	26.076.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.076.000		
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.341.536.000**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.800.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	83.800.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	83.800.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	83.800.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	83.800.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.257.736.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	1.257.736.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.257.736.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.257.736.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	1.257.736.000		
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**159.895.000**		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.600.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	20.600.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	20.600.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	5.600.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.600.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	15.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.405.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	133.405.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	133.405.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	43.065.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	43.065.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	12.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	77.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	1.340.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.340.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.890.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	5.890.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.890.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	5.890.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.890.000		
											Jumlah Belanja	**5.171.477.301**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(5.171.477.301)**		
0	**00**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.1.06.0.00.05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**4.520.953.893**		
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**766.313.050**		
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**84.698.100**		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.01	02						Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	84.698.100		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	84.698.100		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	84.698.100		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	22.246.100		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	22.246.100		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	17.150.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.01	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	10.650.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.01	02	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.01	02	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	45.302.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.302.000		
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**03**	**2.02**	**00**						**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**346.044.950**		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	02						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	84.252.350		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	84.252.350		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	84.252.350		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	23.280.350		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	23.280.350		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	26.550.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	16.050.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.1.06.0.00.05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	34.422.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.422.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	189.139.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1				BELANJA OPERASI	119.139.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	119.139.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1	02	01		Belanja Barang	33.687.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	33.687.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	17.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	17.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	68.452.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.452.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	2				BELANJA MODAL	70.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	70.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	2	02	06	03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	70.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07						Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	72.653.600		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	5	1				BELANJA OPERASI	72.653.600		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	71.973.600		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	5	1	02	01		Belanja Barang	24.161.600		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	24.161.600		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	5	1	02	02		Belanja Jasa	15.650.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	8.650.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.1.06.0.00.05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	32.162.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.162.000		
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**03**	**2.03**	**00**						**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**335.570.000**		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	03						Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	220.865.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	03	5	1				BELANJA OPERASI	220.865.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	220.865.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	03	5	1	02	01		Belanja Barang	61.287.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	61.287.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	10.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	149.578.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	149.578.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	04						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	114.705.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	04	5	1				BELANJA OPERASI	114.705.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	114.705.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	04	5	1	02	01		Belanja Barang	74.313.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	74.313.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	7.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	7.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	33.392.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.392.000		
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.754.640.843**		
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.753.259.243**		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.753.259.243		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	2.753.259.243		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.753.259.243		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.921.049.532		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.423.639.250		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.1.06.0.00.05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	177.243.620		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155.270.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.720.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN	112.818.280		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.006.252		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	233.933		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.118.197		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	832.209.711		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	417.724.426		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	12.138.552		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	402.346.733		
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**01**	**2.06**	**00**							**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**121.471.600**		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	04							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.014.600		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1					BELANJA OPERASI	41.014.600		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	41.014.600		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1	02	01			Belanja Barang	41.014.600		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	41.014.600		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	05							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.875.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1					BELANJA OPERASI	5.875.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	5.875.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1	02	01			Belanja Barang	5.875.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.875.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	06							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.990.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	06	5	1					BELANJA OPERASI	9.990.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.1.06.0.00.05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	9.990.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	9.990.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	9.990.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.592.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	64.592.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	64.592.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	64.592.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.592.000		
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**607.624.000**		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	58.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	58.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	58.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	58.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	549.624.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	549.624.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	549.624.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	549.624.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	549.624.000		
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**272.286.000**		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.406.250		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	45.406.250		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	45.406.250		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	11.406.250		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.406.250		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	4.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	30.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.1.06.0.00.05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.629.750		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	180.629.750		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	180.629.750		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	36.789.750		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	36.789.750		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	22.500.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	22.500.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	115.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115.000.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	6.340.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.340.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.490.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	16.490.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	16.490.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	16.490.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.490.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.760.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	1				BELANJA OPERASI	29.760.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	29.760.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	29.760.000		
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.760.000		
											Jumlah Belanja	**4.520.953.893**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(4.520.953.893)**		
0	**00**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**6.883.809.237**		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**103.880.100**		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**45.026.300**		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02						Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	45.026.300		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	45.026.300		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	45.026.300		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	17.003.300		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	17.003.300		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	28.023.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.023.000		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**2.03**	**00**						**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**58.853.800**		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	01						Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	58.853.800		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	01	5	1				BELANJA OPERASI	58.853.800		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	58.853.800		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	01	5	1	02	01		Belanja Barang	16.080.800		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	16.080.800		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	18.300.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	10.800.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	01	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	01	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.500.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	24.473.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.473.000		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**04**	**0.00**	**00**						**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.363.992.600**		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**04**	**2.01**	**00**						**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**1.363.992.600**		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	01						Penyediaan Permakanan	1.119.795.100		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	1.119.795.100		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	598.045.100		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	530.195.100		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	530.195.100		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	67.850.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.850.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	01	5	1	06			Belanja Bantuan Sosial	521.750.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	01	5	1	06	01		Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	521.750.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	01	5	1	06	01	02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	521.750.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	05						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	143.544.900		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	05	5	1				BELANJA OPERASI	143.544.900		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	143.544.900		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	05	5	1	02	01		Belanja Barang	20.225.900		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.225.900		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	05	5	1	02	02		Belanja Jasa	25.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	05	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	25.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	98.319.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	98.319.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	12						Pemberian Layanan Rujukan	100.652.600		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	12	5	1				BELANJA OPERASI	100.652.600		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	12	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.652.600		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	12	5	1	02	01		Belanja Barang	8.903.600		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	12	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.903.600		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	12	5	1	02	02		Belanja Jasa	34.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	12	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	12	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	12	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	57.749.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	12	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.749.000		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**431.029.400**		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**05**	**2.02**	**00**						**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**431.029.400**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	02						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	317.374.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	317.374.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	317.374.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	85.944.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	85.944.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	95.600.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	95.600.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	135.830.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.830.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	03						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	113.655.400		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	03	5	1				BELANJA OPERASI	113.655.400		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	113.655.400		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	03	5	1	02	01		Belanja Barang	47.943.400		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	47.943.400		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	6.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	59.712.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.712.000		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**06**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**1.119.140.550**		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**06**	**2.01**	**00**						**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**897.258.550**		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	897.258.550		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	197.258.550		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	197.258.550		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	1	02	01		Belanja Barang	54.677.550		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	54.677.550		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	73.600.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	23.600.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	68.981.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.981.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	2				BELANJA MODAL	700.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	700.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	700.000.000		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**06**	**2.02**	**00**						**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**221.882.000**		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	221.882.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	171.882.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	171.882.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	21.436.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	21.436.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	107.800.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	19.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	88.800.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	42.646.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.646.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	2				BELANJA MODAL	50.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	50.000.000		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.865.766.587**		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.290.892.087**		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.277.092.087		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	3.277.092.087		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	3.277.092.087		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.358.516.042		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.564.942.288		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	181.662.856		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	197.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	77.760.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	134.496.420		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	53.167.842		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	51.239.524		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	98.247.112		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	918.576.045		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	460.104.786		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.822.521		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	450.648.738		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.800.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	13.800.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	13.800.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.800.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	13.800.000		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**117.187.900**		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	5.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	5.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	02	5	2				BELANJA MODAL	18.500.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.500.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	02	5	2	02	01		Belanja Modal Alat Besar	1.500.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	02	5	2	02	01	03	Belanja Modal Alat Bantu	1.500.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	02	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	02	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.872.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	38.132.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	38.132.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	38.132.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	38.132.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	2				BELANJA MODAL	2.740.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.740.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.740.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.740.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.025.900		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	7.025.900		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	7.025.900		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	7.025.900		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.025.900		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.790.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	45.790.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	45.790.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	45.790.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.790.000		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**275.550.000**		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.900.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	47.900.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	47.900.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	47.900.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	47.900.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.650.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	227.650.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	227.650.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	227.650.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	227.650.000		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**182.136.600**		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.497.250		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	23.497.250		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	23.497.250		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	6.497.250		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.497.250		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	2.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	15.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.841.600		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	29.841.600		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	29.841.600		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	8.341.600		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.341.600		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	4.500.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	17.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.000.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.080.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	30.080.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	30.080.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	30.080.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.080.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.717.750		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	09	5	1				BELANJA OPERASI	98.717.750		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	98.717.750		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	09	5	1	02	02		Belanja Jasa	53.050.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	09	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	53.050.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	45.667.750		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.667.750		
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**1.487.560.650**		
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**656.424.000**		
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**86.437.000**		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	27.218.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	27.218.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	27.218.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	4.556.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.556.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	6.700.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	6.700.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	15.962.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.962.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	03						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	59.219.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	59.219.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	59.219.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	23.469.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	23.469.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	17.050.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	14.050.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	03	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	18.700.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.700.000		
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**2.03**	**00**						**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**569.987.000**		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	02						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	569.987.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	02	5	1				BELANJA OPERASI	569.987.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	569.987.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	02	5	1	02	01		Belanja Barang	48.237.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	48.237.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	221.250.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	100.350.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	120.900.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	300.500.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.500.000		
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**147.892.500**		
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**59.292.500**		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.01	01						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.292.500		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	59.292.500		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	59.292.500		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	28.302.500		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	28.302.500		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	20.000.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	14.000.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	10.990.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.01	01	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.990.000		
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**03**	**2.02**	**00**							**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**88.600.000**		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.02	02							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	88.600.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	1					BELANJA OPERASI	88.600.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	88.600.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	1	02	01			Belanja Barang	36.097.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	36.097.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	52.503.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.503.000		
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**06**	**0.00**	**00**							**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**118.124.750**		
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**06**	**2.01**	**00**							**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**118.124.750**		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	01							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100.473.750		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	01	5	1					BELANJA OPERASI	100.473.750		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	100.473.750		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	01	5	1	02	01			Belanja Barang	31.140.750		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	31.140.750		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	01	5	1	02	02			Belanja Jasa	42.600.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	01	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	29.100.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	01	5	1	02	02	12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.500.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	01	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	26.733.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	01	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.733.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	02							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.651.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	17.651.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	17.651.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	2.805.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.805.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	4.900.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	4.900.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	9.946.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.946.000		
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**07**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**565.119.400**		
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**07**	**2.01**	**00**						**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**165.389.900**		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	01						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	71.455.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	71.455.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	71.455.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	24.305.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	24.305.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	22.200.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	13.200.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	01	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.000.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	24.950.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.950.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	02						Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	93.934.900		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	93.934.900		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	93.934.900		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	47.501.900		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	47.501.900		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	29.000.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	23.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	02	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	17.433.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.433.000		
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**07**	**2.02**	**00**						**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**297.333.500**		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.02	02						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	297.333.500		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	297.333.500		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	297.333.500		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	132.267.500		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	132.267.500		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	165.066.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	165.066.000		
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**07**	**2.03**	**00**						**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**102.396.000**		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02						Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.396.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02	5	1				BELANJA OPERASI	86.946.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	86.946.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02	5	1	02	01		Belanja Barang	19.956.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	19.956.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	9.300.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	9.300.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	57.690.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.690.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02	5	2				BELANJA MODAL	15.450.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.450.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	15.450.000		
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02	5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	15.450.000		
												Jumlah Belanja	**8.371.369.887**		
												Total Surplus/(Defisit)	**(8.371.369.887)**		
0	**00**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**						**PEMBIAYAAN**			
												Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
												Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.3.27.0.00.09 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
	Jumlah Pendapatan	**0**		
0 00 2.09.3.27.0.00.09.0000 00 0.00 00 5	**BELANJA**			
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**7.732.875.069**		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 0.00 00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.732.875.069**		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.482.331.069**		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.482.331.069		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	7.482.331.069		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	7.482.331.069		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.135.843.088		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.855.487.876		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	457.446.306		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	187.630.000		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	122.020.000		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	163.150.000		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	312.330.560		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.182.408		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	317.800		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	25.278.138		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.346.487.981		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.221.257.894		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	9.541.874		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.115.688.213		
2 09 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.06 00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**173.044.000**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.3.27.0.00.09 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.998.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	83.998.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	83.998.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	83.998.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	83.998.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	14.000.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	14.000.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	06	5	1	02	01		Belanja Barang	5.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	13.995.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	13.995.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.046.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	75.046.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	75.046.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	75.046.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.046.000		
2	**09**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**77.500.000**		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.500.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	77.500.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	77.500.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	77.500.000		
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	77.500.000		
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**7.736.854.900**		
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**5.991.176.100**		
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**3.705.920.000**		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.705.920.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	3.705.920.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02	5	1	01			Belanja Pegawai	6.800.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.800.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.3.27.0.00.09 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	6.800.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	3.699.120.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	3.620.300.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.620.300.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	19.270.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.270.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	59.550.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.550.000		
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**02**	**2.06**	**00**						**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**2.285.256.100**		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01						Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.285.256.100		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	2.285.256.100		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.250.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.250.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.250.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	2.283.006.100		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	2.184.399.100		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.184.399.100		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	26.931.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.931.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	71.676.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	71.676.000		
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**620.909.800**		
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**03**	**2.02**	**00**						**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**620.909.800**		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	620.909.800		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	1				BELANJA OPERASI	64.109.800		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.3.27.0.00.09 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	1	01			Belanja Pegawai	2.550.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.550.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.550.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	61.559.800		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	1	02	01		Belanja Barang	1.797.800		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.797.800		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	14.402.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.402.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	45.360.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.360.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	2				BELANJA MODAL	556.800.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	556.800.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	2	04	01		Belanja Modal Jalan dan Jembatan	556.800.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	2	04	01	01	Belanja Modal Jalan	556.800.000		
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.124.769.000**		
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**974.456.000**		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	974.456.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	974.456.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	19.700.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19.700.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	12.500.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.200.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	954.756.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	954.756.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	954.756.000		
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**89.933.000**		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.933.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	65.933.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	65.933.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	65.933.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.3.27.0.00.09 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	65.933.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.000.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	24.000.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	24.000.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	24.000.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	24.000.000		
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60.380.000**		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.380.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	53.380.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	53.380.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	26.700.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	26.700.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	10.500.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	10.500.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	16.180.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.180.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	7.000.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	7.000.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	06	5	1	02	01		Belanja Barang	170.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	170.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	6.830.000		
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.830.000		
											Jumlah Belanja	**15.469.729.969**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(15.469.729.969)**		
0	**00**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**5.802.442.030**		
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**218.917.500**		
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**218.917.500**		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	218.917.500		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	218.917.500		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	218.917.500		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	18.533.500		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.533.500		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	166.700.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	146.700.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	33.684.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.684.000		
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1.406.468.500**		
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**1.406.468.500**		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.406.468.500		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	66.468.500		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.760.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.760.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.760.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	63.708.500		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	1.954.500		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.954.500		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	61.754.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.754.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	2				BELANJA MODAL	1.340.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.340.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	2	02	08		Belanja Modal Alat Laboratorium	1.340.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	2	02	08	07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.340.000.000		
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**06**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**139.896.000**		
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**06**	**2.01**	**00**						**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**139.896.000**		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	03						Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	139.896.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	139.896.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	139.896.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	4.039.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.039.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	26.545.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	03	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.545.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	109.312.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	109.312.000		
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**11**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**388.423.800**		
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**11**	**2.01**	**00**						**Pengelolaan Sampah**	**388.423.800**		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03						Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	144.711.500		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	144.711.500		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03	5	1	01			Belanja Pegawai	480.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	480.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	480.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	144.231.500		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	28.013.500		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	28.013.500		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	75.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	75.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	41.218.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.218.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	243.712.300		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	20.194.300		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	1	01			Belanja Pegawai	1.360.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.360.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	1.360.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	18.834.300		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	1.421.300		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.421.300		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	17.413.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.413.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	2				BELANJA MODAL	223.518.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.518.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	2	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan	223.518.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	2	02	02	01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	223.518.000		
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.648.736.230**		
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.703.223.406**		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.703.223.406		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	2.703.223.406		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.703.223.406		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.879.482.995		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.392.437.855		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	171.803.508		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155.890.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	38.895.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	99.366.280		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.911.912		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	216.250		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.962.190		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	823.740.411		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	411.868.769		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.227.413		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	404.644.229		
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**298.547.900**		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.840.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	11.840.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	11.840.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	11.840.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.840.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.039.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	165.039.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	165.039.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	159.989.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	159.989.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	5.050.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.050.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.804.900		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	4.804.900		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	4.804.900		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	4.804.900		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.804.900		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.990.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	18.990.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	18.990.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	18.990.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	18.990.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.874.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	97.874.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	97.874.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	97.874.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	97.874.000		
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**396.696.000**		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	48.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	48.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	48.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	48.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348.696.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	348.696.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	348.696.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	348.696.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	348.696.000		
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**250.268.924**		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.130.717		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	53.130.717		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	53.130.717		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	32.520.717		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	32.520.717		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	2.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	15.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	3.610.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.610.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.028.207		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	187.028.207		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	187.028.207		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	128.028.207		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	128.028.207		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	59.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.110.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	10.110.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	10.110.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	10.110.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.110.000		
											Jumlah Belanja	**5.802.442.030**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(5.802.442.030)**		
0	**00**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**4.880.115.497**		
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**258.284.200**		
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**258.284.200**		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	04						Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	258.284.200		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	258.284.200		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	258.284.200		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	04	5	1	02	01		Belanja Barang	157.281.200		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	157.281.200		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	101.003.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	101.003.000		
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**131.506.900**		
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**131.506.900**		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	03	2.01	02						Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	131.506.900		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	03	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	131.506.900		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	03	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	131.506.900		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	03	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	24.821.900		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	03	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	24.821.900		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	03	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	106.685.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	03	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	106.685.000		
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**04**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**127.201.750**		
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**04**	**2.03**	**00**						**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**127.201.750**		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	04	2.03	07						Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	127.201.750		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	04	2.03	07	5	1				BELANJA OPERASI	127.201.750		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	04	2.03	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	127.201.750		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	04	2.03	07	5	1	02	01		Belanja Barang	36.876.750		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	04	2.03	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	36.876.750		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	04	2.03	07	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	22.190.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	04	2.03	07	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.190.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	04	2.03	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	68.135.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	04	2.03	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.135.000		
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**3.301.000**		
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**05**	**2.01**	**00**						**Penyusunan Profil Kependudukan**	**3.301.000**		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	05	2.01	02						Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	3.301.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	05	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	3.301.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	05	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	3.301.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	05	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	3.301.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	05	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.301.000		
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.359.821.647**		
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.941.299.847**		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.905.299.847		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	2.905.299.847		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.905.299.847		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.955.800.738		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.460.304.906		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	170.647.792		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	170.850.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.690.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	99.388.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.479.504		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	139.011		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.301.525		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	949.499.109		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	474.753.321		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.806.987		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	466.938.801		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.000.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	36.000.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	36.000.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.000.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	19.200.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	16.800.000		
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**831.489.800**		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	70.000.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	70.000.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	70.000.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	70.000.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	499.710.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	1				BELANJA OPERASI	1.210.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	1	01			Belanja Pegawai	1.210.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.210.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	1.210.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	2				BELANJA MODAL	498.500.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	498.500.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	224.850.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	2	02	05	01	Belanja Modal Alat Kantor	224.850.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	164.750.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	164.750.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	108.900.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	108.900.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.764.200		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	120.764.200		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	04	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	120.084.200		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	120.084.200		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	120.084.200		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.109.600		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	26.109.600		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	26.109.600		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	26.109.600		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	26.109.600		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	14.400.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	14.400.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	14.400.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	14.400.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.506.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	100.506.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.506.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	100.506.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.506.000		
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**538.372.000**		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.800.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	73.800.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	73.800.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	73.800.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	73.800.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	464.572.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	464.572.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	464.572.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	464.572.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	464.572.000		
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48.660.000**		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.660.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	48.660.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	48.660.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	33.660.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	33.660.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	15.000.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000		
											Jumlah Belanja	**4.880.115.497**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(4.880.115.497)**		
0	**00**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**5.215.898.408**		
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENATAAN DESA**	**231.886.100**		
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**231.886.100**		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	03						Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	231.886.100		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	231.886.100		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	231.886.100		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	15.032.100		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.032.100		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	85.426.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	03	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	85.426.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	131.428.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	131.428.000		
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**04**	**0.00**	**00**						**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**195.840.000**		
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**04**	**2.01**	**00**						**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**195.840.000**		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	13						Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	45.840.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	13	5	1				BELANJA OPERASI	45.840.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	13	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	45.840.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	13	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	45.840.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	13	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.840.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	15						Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	150.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	15	5	1				BELANJA OPERASI	150.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	15	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	150.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	15	5	1	02	01		Belanja Barang	13.711.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	15	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	13.711.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	15	5	1	02	02		Belanja Jasa	54.569.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	15	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	54.569.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	15	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	81.720.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	15	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.720.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**526.345.000**		
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**05**	**2.01**	**00**						**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**526.345.000**		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	05	2.01	09						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	526.345.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	05	2.01	09	5	1				BELANJA OPERASI	526.345.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	05	2.01	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	526.345.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	05	2.01	09	5	1	02	01		Belanja Barang	150.019.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	05	2.01	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	150.019.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	05	2.01	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	376.326.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	05	2.01	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	376.326.000		
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.261.827.308**		
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.185.256.308**		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.155.656.308		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	3.155.656.308		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	3.155.656.308		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.124.170.457		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.609.770.305		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	168.793.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	173.959.500		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.673.200		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	111.021.400		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.875.500		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.700		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.048.852		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.031.485.851		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	525.951.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.807.140		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	497.727.711		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.600.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	29.600.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	29.600.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	29.600.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	18.400.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	11.200.000		
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**174.967.000**		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	6.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	6.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	6.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.378.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	02	5	2				BELANJA MODAL	11.378.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.378.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	02	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	828.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	02	5	2	02	05	01	Belanja Modal Alat Kantor	828.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	02	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	10.550.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	02	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	10.550.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.319.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	50.319.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	50.319.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	50.319.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	50.319.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.170.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	16.170.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	16.170.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	16.170.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	16.170.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.100.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	91.100.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	91.100.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	91.100.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	91.100.000		
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**811.944.000**		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	72.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	72.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	72.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	72.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	739.944.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	739.944.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	739.944.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	739.944.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	739.944.000		
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**44.000.000**		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	15.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	15.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	15.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	29.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	29.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	16.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	16.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	13.000.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	13.000.000		
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**01**	**2.13**	**00**						**Penataan Organisasi**	**45.660.000**		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.13	04						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	45.660.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.13	04	5	1				BELANJA OPERASI	45.660.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.13	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	45.660.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.13	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	45.660.000		
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.13	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.660.000		
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**2.927.799.400**		
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**267.729.000**		
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**172.094.000**		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	02						Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	100.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	20.784.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.784.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	37.500.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	37.500.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	41.716.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.716.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	15						Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	72.094.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	15	5	1				BELANJA OPERASI	72.094.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	15	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	72.094.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	15	5	1	02	01		Belanja Barang	9.494.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	15	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.494.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	15	5	1	02	02		Belanja Jasa	62.600.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	15	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	62.600.000		
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**95.635.000**		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.02	13						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	95.635.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.02	13	5	1				BELANJA OPERASI	95.635.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.02	13	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	95.635.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.02	13	5	1	02	01		Belanja Barang	7.845.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.02	13	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.845.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.02	13	5	1	02	02		Belanja Jasa	15.500.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.02	13	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	2.700.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.02	13	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.800.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.02	13	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	72.290.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.02	13	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.290.000		
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**1.722.472.400**		
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**828.154.000**		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	04						Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	149.992.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	149.992.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	149.992.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	04	5	1	02	01		Belanja Barang	60.872.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	60.872.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	36.400.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	26.400.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	04	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	30.720.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.720.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	04	5	1	02	05		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	04	5	1	02	05	01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	06						Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	130.010.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	06	5	1				BELANJA OPERASI	130.010.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	130.010.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	06	5	1	02	01		Belanja Barang	35.010.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	35.010.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	95.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	40.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	06	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	55.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	07						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	480.302.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	480.302.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	480.302.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	69.102.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	69.102.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	07	5	1	02	02		Belanja Jasa	411.200.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	07	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	245.800.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	07	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	165.400.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	08						Pengendalian Program KKBPK	67.850.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	08	5	1				BELANJA OPERASI	67.850.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	67.850.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	08	5	1	02	01		Belanja Barang	10.250.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.250.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	08	5	1	02	02		Belanja Jasa	57.600.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	08	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	08	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	47.600.000		
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**03**	**2.02**	**00**						**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**92.619.000**		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.02	04						Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	92.619.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.02	04	5	1				BELANJA OPERASI	92.619.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.02	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	92.619.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.02	04	5	1	02	01		Belanja Barang	22.919.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.02	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	22.919.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.02	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	69.700.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.02	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	35.700.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.02	04	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	34.000.000		
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**03**	**2.03**	**00**						**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**417.199.400**		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	01						Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.600.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	01	5	1				BELANJA OPERASI	12.600.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	12.600.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	12.600.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	12.600.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	03						Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	228.854.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	03	5	1				BELANJA OPERASI	228.854.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	228.854.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	03	5	1	02	01		Belanja Barang	41.754.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	41.754.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	187.100.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	187.100.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06						Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	148.455.400		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	5	1				BELANJA OPERASI	8.455.400		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	5	1	01			Belanja Pegawai	2.040.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.040.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.040.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	6.415.400		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	5	1	02	01		Belanja Barang	6.415.400		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.415.400		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	5	2				BELANJA MODAL	140.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	5	2	02	07		Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	140.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	5	2	02	07	01	Belanja Modal Alat Kedokteran	140.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	08						Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.290.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	08	5	1				BELANJA OPERASI	27.290.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	27.290.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	08	5	1	02	01		Belanja Barang	5.290.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.290.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	08	5	1	02	02		Belanja Jasa	22.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	08	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	22.000.000		
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**03**	**2.04**	**00**						**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**384.500.000**		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.04	03						Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	384.500.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.04	03	5	1				BELANJA OPERASI	384.500.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.04	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	384.500.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.04	03	5	1	02	01		Belanja Barang	325.500.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.04	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	325.500.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.04	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	9.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.04	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.04	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.04	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.000.000		
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**04**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**937.598.000**		
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**04**	**2.01**	**00**						**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**937.598.000**		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	02						Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	360.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	360.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	360.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	04						Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	249.998.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	249.998.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	249.998.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	04	5	1	02	01		Belanja Barang	34.773.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	34.773.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	78.795.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	04	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.395.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	04	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	62.400.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	136.430.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	136.430.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	05						Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	327.600.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	05	5	1				BELANJA OPERASI	327.600.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	327.600.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	05	5	1	02	02		Belanja Jasa	327.600.000		
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	05	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	327.600.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
	Jumlah Belanja	**8.143.697.808**		
	Total Surplus/(Defisit)	**(8.143.697.808)**		
0 00 2.13.2.14.0.00.13.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**					**PENDAPATAN DAERAH**			
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**				**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**228.529.327**		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00	4	1	02			Retribusi Daerah	228.529.327		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00	4	1	02	02		Retribusi Jasa Usaha	228.529.327		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	76.288.300		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	10	Retribusi Penyeberangan di Air	152.241.027		
											Jumlah Pendapatan	**228.529.327**		
0	**00**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**17.678.763.844**		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**1.157.158.336**		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**333.878.200**		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	333.878.200		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	333.878.200		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.280.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.280.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.280.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	331.598.200		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	11.678.200		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.678.200		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	300.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1	02	02	09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	300.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	19.920.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.920.000		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**55.260.336**		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	55.260.336		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04	5	1				BELANJA OPERASI	55.260.336		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	54.580.336		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04	5	1	02	01		Belanja Barang	2.073.400		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.073.400		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	42.906.936		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.906.936		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.600.000		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**02**	**2.09**	**00**						**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**541.409.800**		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	541.409.800		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	83.697.800		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.550.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.550.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.550.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	81.147.800		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	163.800		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	163.800		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	68.288.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	3.500.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	64.788.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	12.696.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.696.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	2				BELANJA MODAL	457.712.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	457.712.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	2	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan	457.712.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	2	02	02	01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	457.712.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**02**	**2.12**	**00**						**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**67.510.600**		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.12	02						Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.510.600		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.12	02	5	1				BELANJA OPERASI	67.510.600		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.12	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	67.510.600		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.12	02	5	1	02	01		Belanja Barang	16.810.600		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.12	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	16.810.600		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.12	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	10.200.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.12	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	10.200.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.12	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.12	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.500.000		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**02**	**2.16**	**00**						**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**159.099.400**		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.16	01						Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	159.099.400		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.16	01	5	1				BELANJA OPERASI	159.099.400		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.16	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	159.099.400		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.16	01	5	1	02	01		Belanja Barang	5.173.400		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.16	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.173.400		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.16	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	100.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.16	01	5	1	02	02	09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.16	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	53.926.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.16	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.926.000		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**9.763.358.099**		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**03**	**2.07**	**00**						**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**7.060.822.283**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02						Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.060.822.283		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	5	1				BELANJA OPERASI	7.060.822.283		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.360.822.283		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	5	1	02	01		Belanja Barang	1.230.296.283		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.230.296.283		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	37.080.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	37.080.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	70.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	23.446.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.446.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	5	1	04			Belanja Subsidi	5.700.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	5	1	04	03		Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	5.700.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	5	1	04	03	01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	5.700.000.000		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**03**	**2.12**	**00**						**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**2.702.535.816**		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	01						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	104.840.500		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	01	5	1				BELANJA OPERASI	104.840.500		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	104.840.500		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	01	5	1	02	01		Belanja Barang	8.050.500		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.050.500		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	96.790.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	96.790.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03						Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.597.695.316		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	5	1				BELANJA OPERASI	2.597.695.316		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	5	1	01			Belanja Pegawai	8.520.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.520.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	8.520.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	2.589.175.316		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	5	1	02	01		Belanja Barang	1.624.800		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.624.800		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	100.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	2.479.594.516		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	5	1	02	03	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.479.594.516		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	7.956.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.956.000		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.758.247.409**		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.113.097.625**		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.021.397.625		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	5.021.397.625		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	5.021.397.625		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.400.411.873		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.589.361.588		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	300.301.402		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	146.950.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	136.300.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	200.817.640		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.558.820		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	175.616		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	15.946.807		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.620.985.752		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	827.154.660		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	10.409.316		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	783.421.776		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.700.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	91.700.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	76.700.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	76.700.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	64.800.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	11.900.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	15.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	15.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**234.001.810**		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.063.210		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	21.063.210		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	21.063.210		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	21.063.210		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	21.063.210		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.010.600		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	75.010.600		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	75.010.600		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	75.010.600		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	75.010.600		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.079.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	18.079.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	18.079.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	18.079.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.079.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.995.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	19.995.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	19.995.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	19.995.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	19.995.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.854.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	99.854.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	99.854.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	99.854.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.854.000		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.345.218.974**		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	132.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	132.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	132.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	132.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.213.218.974		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	1.213.218.974		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.213.218.974		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.213.218.974		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	1.200.600.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.618.974		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.929.000**		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	10.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	10.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.929.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	55.929.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	55.929.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	06	5	1	02	01		Belanja Barang	49.839.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	49.839.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	6.090.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.090.000		
											Jumlah Belanja	**17.678.763.844**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(17.450.234.517)**		
0	**00**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**7.372.127.566**		
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**592.106.200**		
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**592.106.200**		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	06						Pelayanan Informasi Publik	76.032.400		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	06	5	1				BELANJA OPERASI	76.032.400		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	76.032.400		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	06	5	1	02	01		Belanja Barang	21.034.400		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	21.034.400		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	28.800.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	28.800.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	06	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	26.198.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	06	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.198.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07						Layanan Hubungan Media	327.054.200		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	304.253.500		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	304.253.500		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	18.253.500		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.253.500		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07	5	1	02	02		Belanja Jasa	286.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	286.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07	5	2				BELANJA MODAL	22.800.700		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.800.700		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	22.800.700		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	22.800.700		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	12						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	36.872.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	12	5	1				BELANJA OPERASI	36.872.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	12	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	36.872.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	12	5	1	02	01		Belanja Barang	13.702.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	12	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	13.702.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	12	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	23.170.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	12	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.170.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13						Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	152.147.600		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	1				BELANJA OPERASI	76.341.600		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	1	01			Belanja Pegawai	2.880.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.880.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.880.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	73.461.600		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	1	02	01		Belanja Barang	1.389.600		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.389.600		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	1	02	02		Belanja Jasa	6.100.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	6.100.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	65.972.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.400.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.572.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	2				BELANJA MODAL	75.806.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.806.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.806.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	8.806.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	67.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	67.000.000		
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**3.445.833.800**		
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**3.205.200.000**		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.01	03						Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.205.200.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	3.205.200.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.01	03	5	1	01			Belanja Pegawai	450.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.01	03	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.01	03	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	450.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	3.204.750.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	3.204.750.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	3.154.750.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.01	03	5	1	02	02	09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000		
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**03**	**2.02**	**00**						**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**240.633.800**		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10						Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	240.633.800		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10	5	1				BELANJA OPERASI	240.633.800		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10	5	1	01			Belanja Pegawai	760.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	760.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	760.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	239.873.800		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10	5	1	02	01		Belanja Barang	7.227.800		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.227.800		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10	5	1	02	02		Belanja Jasa	64.892.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	7.200.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	57.692.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	167.754.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	167.754.000		
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.334.187.566**		
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**01**	**2.01**	**00**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40.000.000**		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.01	01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	40.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	40.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	17.750.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	17.750.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	22.250.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.250.000		
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.267.940.966**		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.231.940.966		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	2.231.940.966		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.231.940.966		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.511.091.816		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.140.832.730		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	120.099.954		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	130.635.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.730.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	71.818.920		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.191.048		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	80.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.704.164		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	720.849.150		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	362.162.817		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.806.987		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	350.879.346		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	36.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	36.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	27.600.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	8.400.000		
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**304.644.000**		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.060.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	13.060.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	13.060.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	13.060.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	13.060.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	110.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	110.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	110.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	110.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	65.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	65.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	65.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	65.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.990.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	15.990.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	15.990.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	15.990.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	15.990.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.594.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	100.594.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.594.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	100.594.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.594.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**01**	**2.07**	**00**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**34.970.000**		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05						Pengadaan Mebel	34.970.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	5	1				BELANJA OPERASI	2.010.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.330.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	5	1	02	01		Belanja Barang	1.330.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.330.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	5	2				BELANJA MODAL	32.960.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.960.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	32.960.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	32.960.000		
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**457.716.000**		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	96.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	96.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	96.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	96.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.716.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	361.716.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	361.716.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	361.716.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	361.716.000		
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**228.916.600**		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.994.600		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	98.994.600		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	98.994.600		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	70.994.600		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	70.994.600		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	8.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	8.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	20.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.930.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	49.930.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	49.930.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	49.930.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49.930.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.992.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1				BELANJA OPERASI	79.992.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	79.312.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	02	01		Belanja Barang	324.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	324.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	78.988.000		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	78.988.000		
											Jumlah Belanja	**7.372.127.566**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(7.372.127.566)**		
0	**00**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**					**PENDAPATAN DAERAH**			
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**				**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**16.575.000**		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	00	0.00	00	4	1	02			Retribusi Daerah	16.575.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	00	0.00	00	4	1	02	02		Retribusi Jasa Usaha	16.575.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	16.575.000		
											Jumlah Pendapatan	**16.575.000**		
0	**00**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**6.095.057.249**		
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**478.525.300**		
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**05**	**2.01**	**00**						**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**478.525.300**		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01	01						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	478.525.300		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	478.525.300		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	478.525.300		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	51.817.300		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	51.817.300		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	235.600.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	143.800.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.050.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.650.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	83.100.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	191.108.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	191.108.000		
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**06**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**149.862.800**		
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**06**	**2.01**	**00**						**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**149.862.800**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	06	2.01	01						Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	149.862.800		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	06	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	149.862.800		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	06	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	149.862.800		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	06	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	18.410.800		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	06	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.410.800		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	06	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	41.650.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	06	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	41.650.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	06	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	89.802.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	06	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.802.000		
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**07**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**92.213.600**		
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**07**	**2.01**	**00**						**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**92.213.600**		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07	2.01	05						Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	92.213.600		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07	2.01	05	5	1				BELANJA OPERASI	92.213.600		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07	2.01	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	92.213.600		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07	2.01	05	5	1	02	01		Belanja Barang	17.317.600		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07	2.01	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	17.317.600		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07	2.01	05	5	1	02	02		Belanja Jasa	44.450.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07	2.01	05	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	18.650.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07	2.01	05	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.700.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07	2.01	05	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	24.100.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07	2.01	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	30.446.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07	2.01	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.446.000		
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**08**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**2.499.693.400**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**08**	**2.01**	**00**						**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**2.499.693.400**		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01						Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2.499.693.400		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	2.499.693.400		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	01			Belanja Pegawai	13.430.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.430.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	13.430.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	2.486.263.400		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	2.031.669.400		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.031.669.400		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	115.700.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21.700.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	54.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	321.144.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	321.144.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	02	05		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.750.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	02	05	01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.750.000		
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.874.762.149**		
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.609.027.949**		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.555.627.949		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	2.555.627.949		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.555.627.949		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.764.270.621		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.301.271.650		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	160.552.906		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	150.910.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.350.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	90.558.800		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.992.895		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	128.011		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.506.359		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	791.357.328		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	396.520.578		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.806.987		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	387.029.763		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.400.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	53.400.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	53.400.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.400.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	34.200.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	19.200.000		
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**176.734.200**		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.638.200		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	52.638.200		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	52.638.200		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	52.638.200		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	52.638.200		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.020.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	14.020.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	14.020.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	14.020.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.020.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	15.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	15.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	15.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.076.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	95.076.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	95.076.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	95.076.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	95.076.000		
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**54.000.000**		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	54.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	54.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	54.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	54.000.000		
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**35.000.000**		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	35.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	35.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	10.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	4.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	4.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.09	01	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	21.000.000		
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.000.000		
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**00**	**0.00**	**00**							**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**167.914.900**		
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**03**	**0.00**	**00**							**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**167.914.900**		
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**03**	**2.01**	**00**							**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**167.914.900**		
3	30	2.17.3.30.3.31.17.0000	03	2.01	02							Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	167.914.900		
3	30	2.17.3.30.3.31.17.0000	03	2.01	02	5	1					BELANJA OPERASI	167.914.900		
3	30	2.17.3.30.3.31.17.0000	03	2.01	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	167.914.900		
3	30	2.17.3.30.3.31.17.0000	03	2.01	02	5	1	02	01			Belanja Barang	4.666.900		
3	30	2.17.3.30.3.31.17.0000	03	2.01	02	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.666.900		
3	30	2.17.3.30.3.31.17.0000	03	2.01	02	5	1	02	02			Belanja Jasa	59.982.000		
3	30	2.17.3.30.3.31.17.0000	03	2.01	02	5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	59.982.000		
3	30	2.17.3.30.3.31.17.0000	03	2.01	02	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	103.266.000		
3	30	2.17.3.30.3.31.17.0000	03	2.01	02	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.266.000		
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**00**	**0.00**	**00**							**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**4.067.538.500**		
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**02**	**0.00**	**00**							**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**3.917.358.500**		
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**02**	**2.01**	**00**							**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**3.917.358.500**		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.917.358.500		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1					BELANJA OPERASI	3.917.358.500		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	01				Belanja Pegawai	9.670.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.670.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	9.670.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	3.907.688.500		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	01			Belanja Barang	352.733.500		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	352.733.500		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	02			Belanja Jasa	1.382.501.550		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	979.500.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	78.094.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.500.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	116.407.550		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	200.000.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	1.622.743.450		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	930.643.450		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	03	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	692.100.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	549.710.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	549.710.000		
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**150.180.000**		
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**150.180.000**		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.180.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	150.180.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	150.180.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	150.180.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	150.180.000		
											Jumlah Belanja	**10.330.510.649**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(10.313.935.649)**		
0	**00**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.2.07.0.00.18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
2	**07**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**83.363.200**		
2	**07**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**36.664.600**		
2	**07**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**36.664.600**		
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	02	2.01	01						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	36.664.600		
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	02	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	36.664.600		
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	02	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	36.664.600		
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	02	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	8.388.600		
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	02	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.388.600		
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	02	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	28.276.000		
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	02	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.276.000		
2	**07**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**46.698.600**		
2	**07**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**46.698.600**		
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	03	2.01	02						Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	46.698.600		
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	03	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	46.698.600		
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	03	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	46.698.600		
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	03	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	12.008.600		
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	03	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.008.600		
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	03	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	12.000.000		
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	03	2.01	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000		
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	03	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	22.690.000		
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	03	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.690.000		
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**3.867.833.790**		
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**04**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**76.813.000**		
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**04**	**2.01**	**00**						**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**76.813.000**		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	04	2.01	01						Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	76.813.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.2.07.0.00.18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	04	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	76.813.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	04	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	76.813.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	04	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	500.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	04	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	04	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	6.045.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	04	2.01	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.045.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	04	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	70.268.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	04	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	70.268.000		
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**480.000.000**		
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**05**	**2.01**	**00**						**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**480.000.000**		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	02						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	263.310.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	263.310.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	263.310.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	25.968.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	25.968.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	150.922.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	22.200.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	41.222.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	02	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.500.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	02	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	80.000.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	86.420.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.420.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	03						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	216.690.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	216.690.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	216.690.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	897.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	897.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	85.043.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.2.07.0.00.18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	03	5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	85.043.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	03	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	130.750.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	03	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	130.750.000		
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**01**	**0.00**	**00**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.311.020.790**		
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**01**	**2.02**	**00**							**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.669.516.030**		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.634.716.030		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1					BELANJA OPERASI	2.634.716.030		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1	01				Belanja Pegawai	2.634.716.030		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.720.969.589		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01		Belanja Gaji Pokok ASN	1.278.855.200		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	139.409.968		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162.590.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.710.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN	81.269.120		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.286.008		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	455.016		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6.394.277		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	913.746.441		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	458.364.284		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.674.430		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	446.707.727		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	02							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.800.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	02	5	1					BELANJA OPERASI	34.800.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.2.07.0.00.18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	34.800.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.800.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	26.400.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	8.400.000		
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**01**	**2.05**	**00**						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**11.244.000**		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.05	02						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.244.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.05	02	5	1				BELANJA OPERASI	11.244.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.05	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	11.244.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.05	02	5	1	02	01		Belanja Barang	11.244.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.05	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.244.000		
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**276.056.200**		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.717.500		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	5.717.500		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.717.500		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	5.717.500		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.717.500		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.493.200		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	148.493.200		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	04	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	147.813.200		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	147.813.200		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	147.813.200		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.801.500		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	18.801.500		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	18.801.500		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	18.801.500		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.801.500		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.2.07.0.00.18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	3.000.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	3.000.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	3.000.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.044.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	100.044.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.044.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	100.044.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.044.000		
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**291.367.060**		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.800.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	100.800.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.800.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	100.800.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	100.800.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.567.060		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	190.567.060		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	190.567.060		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	190.567.060		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	177.650.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.917.060		
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.837.500**		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.487.500		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	47.487.500		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	47.487.500		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	18.487.500		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.487.500		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	6.000.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	23.000.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.2.07.0.00.18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.350.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	15.350.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	15.350.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	15.350.000		
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.350.000		
											Jumlah Belanja	**3.951.196.990**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(3.951.196.990)**		
0	**00**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**15.171.502.146**		
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**12.337.064.124**		
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.319.854.520**		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01						Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	303.930.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	3.930.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1	01			Belanja Pegawai	3.930.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.930.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	3.930.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	2				BELANJA MODAL	300.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	300.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	300.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02						Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	543.854.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	43.854.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	5	1	01			Belanja Pegawai	3.630.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.630.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	3.630.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	40.224.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	40.224.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.224.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	5	2				BELANJA MODAL	500.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	5	2	02	05	01	Belanja Modal Alat Kantor	500.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	04						Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	50.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	50.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	04	5	1	02	01		Belanja Barang	1.555.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.555.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	12.840.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	04	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.840.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	35.605.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.605.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	06						Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	219.790.520		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	06	5	1				BELANJA OPERASI	219.790.520		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	219.790.520		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	06	5	1	02	01		Belanja Barang	54.940.520		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	54.940.520		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	52.300.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	47.800.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	06	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.500.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	06	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	112.550.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	06	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	112.550.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	09						Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	202.280.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	09	5	1				BELANJA OPERASI	2.280.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	09	5	1	01			Belanja Pegawai	2.280.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	09	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.280.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	09	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.280.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	09	5	2				BELANJA MODAL	200.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	09	5	2	05			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	09	5	2	05	01		Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	09	5	2	05	01	01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	200.000.000		
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**11.017.209.604**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	01						Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	224.205.800		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	224.205.800		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	224.205.800		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	01	5	1	02	01		Belanja Barang	68.055.800		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	68.055.800		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	55.350.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	52.350.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	61.400.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.400.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	01	5	1	02	05		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	39.400.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	01	5	1	02	05	01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	39.400.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02						Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.793.003.804		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	593.004.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	14.790.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14.790.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	14.790.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	578.214.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	4.860.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.860.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	491.300.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	42.300.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	449.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	82.054.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	82.054.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	2				BELANJA MODAL	10.199.999.804		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	2	01			Belanja Modal Tanah	200.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	2	01	01		Belanja Modal Tanah	200.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	2	01	01	03	Belanja Modal Lapangan	200.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.999.999.804		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	9.999.999.804		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.999.999.804		
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.834.438.022**		
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**01**	**2.01**	**00**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.573.000**		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.01	01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.573.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	21.573.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	21.573.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	4.208.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.208.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	17.365.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.365.000		
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.350.409.022**		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.294.609.022		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	2.294.609.022		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.294.609.022		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.537.209.943		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.130.220.140		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	98.500.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	140.110.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.400.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	54.828.702		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	83.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.500.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.651.101		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	757.399.079		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	376.654.019		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.708.734		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	372.036.326		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.800.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	55.800.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	55.800.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.800.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	39.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	16.800.000		
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**182.416.000**		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	10.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	10.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.286.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	40.286.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	40.286.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	40.286.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	40.286.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.695.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	10.695.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	10.695.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	10.695.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.695.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.005.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	10.005.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	10.005.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	10.005.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	10.005.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.430.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	111.430.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	111.430.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	111.430.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	111.430.000		
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**01**	**2.07**	**00**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17.710.000**		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.07	06						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.710.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.07	06	5	2				BELANJA MODAL	17.710.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.07	06	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.710.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.07	06	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	17.710.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.07	06	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	13.750.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.07	06	5	2	02	10	02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.960.000		
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**184.010.000**		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.800.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	11.800.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	11.800.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	11.800.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	11.800.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.210.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	172.210.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	172.210.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	172.210.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	172.210.000		
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78.320.000**		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	15.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	15.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	15.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.250.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	58.250.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	58.250.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	12.750.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.750.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	9.500.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	9.500.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	36.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.000.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.070.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	5.070.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.070.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	5.070.000		
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.070.000		
2	**24**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**167.576.700**		
2	**24**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**167.576.700**		
2	**24**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**135.236.700**		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01						Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	135.236.700		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	135.236.700		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	135.236.700		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	23.768.700		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	23.768.700		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	22.170.000		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	9.300.000		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.870.000		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	89.298.000		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.298.000		
2	**24**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**02**	**2.03**	**00**						**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**32.340.000**		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.03	02						Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	32.340.000		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.03	02	5	1				BELANJA OPERASI	32.340.000		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.03	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	32.340.000		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.03	02	5	1	02	01		Belanja Barang	922.000		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.03	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	922.000		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.03	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	10.000.000		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.03	02	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.03	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	21.418.000		
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.03	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.418.000		
											Jumlah Belanja	**15.339.078.846**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(15.339.078.846)**		
0	**00**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**					**PENDAPATAN DAERAH**			
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**				**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**195.185.400**		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	00	0.00	00	4	1	02			Retribusi Daerah	195.185.400		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	00	0.00	00	4	1	02	02		Retribusi Jasa Usaha	195.185.400		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	195.185.400		
											Jumlah Pendapatan	**195.185.400**		
0	**00**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**24.227.200.375**		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**18.772.729.250**		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**03**	**2.02**	**00**						**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**18.684.489.400**		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01						Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	18.684.489.400		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	18.684.489.400		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	11.100.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.100.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	11.100.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	18.673.389.400		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01	5	1	02	01		Belanja Barang	18.089.199.400		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.089.199.400		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	175.930.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	175.930.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	408.260.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	408.260.000		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**03**	**2.03**	**00**						**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**88.239.850**		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.03	02						Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	88.239.850		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.03	02	5	1				BELANJA OPERASI	88.239.850		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.03	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	88.239.850		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.03	02	5	1	02	01		Belanja Barang	43.589.850		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.03	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	43.589.850		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.03	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	32.890.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.03	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.890.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.03	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	11.760.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.03	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.760.000		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**04**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**492.056.760**		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**04**	**2.02**	**00**						**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**216.616.840**		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04						Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	216.616.840		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	5	1				BELANJA OPERASI	216.616.840		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	215.936.840		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	5	1	02	01		Belanja Barang	57.115.840		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	57.115.840		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	60.821.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	13.500.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.321.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	24.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	98.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	98.000.000		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**04**	**2.04**	**00**						**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**275.439.920**		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02						Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	275.439.920		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	1				BELANJA OPERASI	148.439.920		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	1	01			Belanja Pegawai	480.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	480.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	480.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	147.959.920		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	1	02	01		Belanja Barang	126.229.920		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	126.229.920		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	6.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	15.730.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.730.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	2				BELANJA MODAL	127.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	2	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan	15.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	2	02	02	03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	15.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	2	02	04		Belanja Modal Alat Pertanian	112.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	2	02	04	01	Belanja Modal Alat Pengolahan	112.000.000		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**06**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**229.904.000**		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**06**	**2.01**	**00**						**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**29.999.900**		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.01	01						Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.999.900		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	29.999.900		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	29.999.900		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	2.949.900		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.949.900		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	27.050.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.050.000		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**06**	**2.02**	**00**						**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**99.914.900**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.02	01						Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	99.914.900		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	99.914.900		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.02	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	99.914.900		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.02	01	5	1	02	01		Belanja Barang	6.488.900		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.02	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.488.900		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.02	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	70.506.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.02	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	7.200.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.02	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	59.306.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.02	01	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.02	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	22.920.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.02	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.920.000		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**06**	**2.03**	**00**						**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**99.989.200**		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.03	01						Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.989.200		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.03	01	5	1				BELANJA OPERASI	99.989.200		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.03	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	99.989.200		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.03	01	5	1	02	01		Belanja Barang	19.468.200		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.03	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	19.468.200		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.03	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	29.057.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.03	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.03	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.057.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.03	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	51.464.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.03	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.464.000		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.732.510.365**		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.134.548.865**		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.708.671.365		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	3.708.671.365		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	3.708.671.365		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.556.113.355		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.950.047.088		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	195.904.709		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	160.590.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	90.186.967		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	140.933.080		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.567.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	157.181		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.727.330		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.152.558.010		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	578.686.291		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.939.544		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	566.932.175		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	425.877.500		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	425.877.500		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	17.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	17.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	408.877.500		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	408.877.500		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	408.877.500		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**163.261.500**		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.750.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	9.750.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	9.750.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	9.750.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.750.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.329.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	29.329.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	29.329.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	29.329.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	29.329.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.486.500		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	9.486.500		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	9.486.500		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	9.486.500		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.486.500		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	15.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	15.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	15.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.696.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	99.696.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	99.696.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	99.696.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.696.000		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**348.000.000**		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	348.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	348.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	348.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	348.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**86.700.000**		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	75.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	75.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	30.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	45.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.000.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.700.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	10	5	1				BELANJA OPERASI	11.700.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	11.700.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	10	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	11.700.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.700.000		
											Jumlah Belanja	**24.227.200.375**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(24.032.014.975)**		
0	**00**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.2.19.0.00.26 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**					**PENDAPATAN DAERAH**			
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**				**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**8.525.800.000**		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	00	0.00	00	4	1	02			Retribusi Daerah	8.525.800.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	00	0.00	00	4	1	02	02		Retribusi Jasa Usaha	8.525.800.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.525.800.000		
											Jumlah Pendapatan	**8.525.800.000**		
0	**00**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
2	**19**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**703.643.550**		
2	**19**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**500.000.000**		
2	**19**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**500.000.000**		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02						Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	500.000.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	485.000.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	450.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	450.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	484.550.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	174.347.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	174.347.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	179.303.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	147.700.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.603.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.000.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	108.200.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108.200.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1	02	05		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.700.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1	02	05	01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.700.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	2				BELANJA MODAL	15.000.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.000.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.000.000		
2	**19**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**203.643.550**		
2	**19**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**03**	**2.05**	**00**						**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**203.643.550**		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.05	01						Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	203.643.550		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.2.19.0.00.26 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.05	01	5	1				BELANJA OPERASI	203.643.550		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.05	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	203.643.550		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.05	01	5	1	02	01		Belanja Barang	97.070.550		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.05	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	97.070.550		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.05	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	71.857.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.05	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.857.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.05	01	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.05	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	34.716.000		
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.05	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.716.000		
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**7.448.632.006**		
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**1.282.394.050**		
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**1.150.000.150**		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.050.000.150		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	1				BELANJA OPERASI	103.525.150		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	1	01			Belanja Pegawai	3.740.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.740.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	3.740.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	99.785.150		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	1	02	01		Belanja Barang	11.115.400		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.115.400		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	47.323.750		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	47.323.750		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	41.346.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.346.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	2				BELANJA MODAL	946.475.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	946.475.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	946.475.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	946.475.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	05						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	05	5	1				BELANJA OPERASI	100.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	05	5	1	02	01		Belanja Barang	7.240.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.240.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	05	5	1	02	02		Belanja Jasa	36.210.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	05	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	36.210.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	56.550.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.2.19.0.00.26 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.550.000		
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**02**	**2.03**	**00**						**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**132.393.900**		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03	03						Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	132.393.900		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03	03	5	1				BELANJA OPERASI	132.393.900		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	132.393.900		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03	03	5	1	02	01		Belanja Barang	42.197.900		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	42.197.900		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	53.200.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	33.200.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03	03	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.500.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03	03	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.500.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03	03	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	36.996.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.996.000		
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**167.710.000**		
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**167.710.000**		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	01						Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	67.710.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	67.710.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	67.710.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	67.710.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	67.710.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	02						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	100.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	2.587.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.587.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	27.201.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.201.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	70.212.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	70.212.000		
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**630.833.000**		
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**05**	**2.01**	**00**						**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**630.833.000**		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	01						Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	192.020.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.2.19.0.00.26 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	192.020.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	192.020.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	62.023.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	62.023.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	87.901.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	60.200.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.201.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.500.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	42.096.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.096.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	02						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	339.580.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	339.580.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	339.580.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	101.044.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	101.044.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	115.404.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	49.600.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	31.804.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	02	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	02	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	28.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	123.132.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	123.132.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	06						Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	99.233.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	06	5	1				BELANJA OPERASI	99.233.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	99.233.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	06	5	1	02	01		Belanja Barang	6.345.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.345.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	26.623.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	06	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.623.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	06	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	66.265.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	06	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.265.000		
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.367.694.956**		
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**01**	**2.01**	**00**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**18.460.000**		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.01	01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.460.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.2.19.0.00.26 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	18.460.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	18.460.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	2.640.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.640.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	15.820.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.820.000		
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.972.921.356**		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.406.221.356		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	4.406.221.356		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	4.406.221.356		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.802.683.880		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.090.430.780		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	250.376.785		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	187.530.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	86.195.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	165.748.880		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.828.227		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	175.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.399.208		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.603.537.476		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	808.225.212		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.249.304		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	787.062.960		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	566.700.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	566.700.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	566.700.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	566.700.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	566.700.000		
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**01**	**2.04**	**00**						**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**24.334.000**		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.04	07						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24.334.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.04	07	5	1				BELANJA OPERASI	24.334.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.04	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	24.334.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.04	07	5	1	02	01		Belanja Barang	2.650.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.04	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.650.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.04	07	5	1	02	02		Belanja Jasa	7.201.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.2.19.0.00.26 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.04	07	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.201.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.04	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	14.483.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.04	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.483.000		
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**184.589.600**		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.149.600		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	94.149.600		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	94.149.600		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	94.149.600		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	94.149.600		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.440.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	20.440.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	20.440.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	20.440.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.440.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	70.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	70.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	09	5	1	02	01		Belanja Barang	204.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	204.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	69.796.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.796.000		
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**84.000.000**		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	84.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	84.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	84.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	84.000.000		
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83.390.000**		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.790.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	45.790.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	45.790.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	23.350.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	23.350.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	3.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	15.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	4.440.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.440.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.2.19.0.00.26 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.600.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	37.600.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	37.600.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	06	5	1	02	01		Belanja Barang	24.800.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	24.800.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	12.800.000		
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.800.000		
											Jumlah Belanja	**8.152.275.556**		
											Total Surplus/(Defisit)	**373.524.444**		
0	**00**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**SEKRETARIAT DAERAH**	**47.073.835.745**		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**14.000.303.400**		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Administrasi Tata Pemerintahan**	**515.471.800**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	01						Penataan Administrasi Pemerintahan	152.266.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	152.266.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	152.266.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	17.314.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	17.314.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	17.625.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.625.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	117.327.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	117.327.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	02						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	115.665.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	115.665.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	115.665.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	24.011.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	24.011.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	91.654.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	91.654.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	03						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	247.539.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	247.539.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	247.539.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	62.059.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	62.059.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	56.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	56.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	129.480.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	129.480.000		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**10.131.584.600**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01						Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.498.370.400		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	1.498.370.400		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.498.370.400		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01	5	1	02	01		Belanja Barang	621.428.400		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	621.428.400		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	304.200.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	83.200.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	45.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	161.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	525.192.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	525.192.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01	5	1	02	05		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	47.550.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01	5	1	02	05	01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	47.550.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4.301.258.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	4.301.258.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	593.258.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	284.454.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	284.454.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	27.250.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	12.700.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.550.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	281.554.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	281.554.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	5	1	05			Belanja Hibah	3.708.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	5	1	05	05		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.708.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	5	1	05	05	03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.708.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.331.956.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03	5	1				BELANJA OPERASI	4.331.956.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	4.211.956.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03	5	1	02	01		Belanja Barang	58.476.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	58.476.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	173.270.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	173.270.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03	5	1	02	05		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.980.210.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03	5	1	02	05	01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.980.210.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03	5	1	06			Belanja Bantuan Sosial	120.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03	5	1	06	01		Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	120.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03	5	1	06	01	01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	120.000.000		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**02**	**2.03**	**00**						**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**1.070.247.000**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	01						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	220.333.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	01	5	1				BELANJA OPERASI	220.333.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	220.333.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	01	5	1	02	01		Belanja Barang	31.107.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	31.107.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	17.050.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	17.050.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	172.176.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	172.176.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	02						Fasilitasi Bantuan Hukum	694.873.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	02	5	1				BELANJA OPERASI	694.873.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	694.873.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	02	5	1	02	01		Belanja Barang	19.505.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	19.505.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	178.500.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	178.500.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	197.118.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	197.118.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	02	5	1	02	05		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	299.750.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	02	5	1	02	05	02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	299.750.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	03						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	155.040.800		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	03	5	1				BELANJA OPERASI	155.040.800		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	155.040.800		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	03	5	1	02	01		Belanja Barang	8.556.800		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.556.800		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	18.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	03	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	10.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	03	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	118.484.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	118.484.000		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**02**	**2.04**	**00**						**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**2.283.000.000**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.04	01						Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2.283.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.04	01	5	1				BELANJA OPERASI	2.283.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.04	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	283.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.04	01	5	1	02	01		Belanja Barang	41.270.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.04	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	41.270.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.04	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	241.730.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.04	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	241.730.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.04	01	5	1	05			Belanja Hibah	2.000.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.04	01	5	1	05	05		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.000.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.04	01	5	1	05	05	02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.000.000.000		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**3.969.229.700**		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**690.425.800**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	01						Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	407.457.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	407.457.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	407.457.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	41.931.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	41.931.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	225.840.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	209.840.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	139.686.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	139.686.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	02						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	282.968.800		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	282.968.800		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	282.968.800		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	30.202.800		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	30.202.800		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	104.640.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	88.640.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	148.126.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	148.126.000		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**03**	**2.02**	**00**						**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**803.099.900**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	01						Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	175.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	175.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	175.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	01	5	1	02	01		Belanja Barang	6.332.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.332.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	168.668.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	168.668.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	02						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	220.499.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	220.499.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	220.499.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	61.951.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	61.951.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	16.700.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	16.700.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	141.848.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	141.848.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	03						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	407.600.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	03	5	1				BELANJA OPERASI	407.600.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	407.600.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	03	5	1	02	01		Belanja Barang	10.543.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.543.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	159.477.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	57.600.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	03	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	101.877.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	237.580.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	237.580.000		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**03**	**2.03**	**00**						**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.103.405.600**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	01						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	358.505.400		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	01	5	1				BELANJA OPERASI	358.505.400		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	358.505.400		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	01	5	1	02	01		Belanja Barang	75.447.400		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	75.447.400		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	146.820.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	146.820.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	3.650.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	01	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.650.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	01	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	132.588.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	01	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	132.588.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	02							Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	509.264.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	02	5	1					BELANJA OPERASI	509.264.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	509.264.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	02	5	1	02	01			Belanja Barang	47.074.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	02	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	47.074.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	02	5	1	02	02			Belanja Jasa	309.800.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	02	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	269.800.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	02	5	1	02	02	12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	40.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	02	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	22.850.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	02	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.850.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	02	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	129.540.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	02	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	129.540.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	03							Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	235.636.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	03	5	1					BELANJA OPERASI	235.636.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	03	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	235.636.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	03	5	1	02	01			Belanja Barang	4.600.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	03	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.600.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	03	5	1	02	02			Belanja Jasa	50.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	03	5	1	02	02	12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	03	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	181.036.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	03	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	181.036.000		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**03**	**2.04**	**00**							**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**1.372.298.400**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03							Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1.372.298.400		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03	5	1					BELANJA OPERASI	1.372.298.400		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	389.798.400		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03	5	1	02	01		Belanja Barang	3.359.400		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.359.400		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	288.423.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	88.423.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	200.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	98.016.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	98.016.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03	5	1	06			Belanja Bantuan Sosial	982.500.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03	5	1	06	02		Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	982.500.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03	5	1	06	02	02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	982.500.000		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**29.104.302.645**		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.01**	**00**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.700.000**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.01	01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.700.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	10.700.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	10.700.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	3.500.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	7.200.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	7.200.000		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.284.730.293**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.158.730.293		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	10.158.730.293		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	10.158.730.293		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.146.382.708		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.568.310.796		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	400.569.550		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	570.920.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	55.812.700		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	150.415.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	299.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	40.788.124		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.325.600		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	59.240.938		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.012.347.585		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.828.643.217		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	208.640.940		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	169.475.460		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.805.587.968		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	126.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	125.400.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	125.400.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	72.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	53.400.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	600.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	600.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.544.793.600**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	471.331.600		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	471.331.600		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	04	5	1	01			Belanja Pegawai	2.460.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.460.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	2.460.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	468.871.600		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	463.351.600		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	463.351.600		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	5.520.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.520.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	108.470.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	108.470.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	108.470.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	108.470.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	108.470.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	08						Fasilitasi Kunjungan Tamu	457.887.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	08	5	1				BELANJA OPERASI	457.887.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	457.887.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	08	5	1	02	01		Belanja Barang	282.580.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	282.580.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	08	5	1	02	02		Belanja Jasa	113.500.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	08	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	12.500.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	08	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	101.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	61.807.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.807.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	507.105.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	507.105.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	507.105.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	507.105.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	507.105.000		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.07**	**00**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.331.061.600**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.848.309.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	1				BELANJA OPERASI	23.309.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	1	01			Belanja Pegawai	1.360.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.360.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	1.360.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	21.949.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	1	02	01		Belanja Barang	120.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	21.829.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.829.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	2				BELANJA MODAL	2.825.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.825.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	2	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan	2.825.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	2	02	02	01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	2	02	02	03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	2.325.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05						Pengadaan Mebel	64.246.600		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	1				BELANJA OPERASI	19.465.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	1	01			Belanja Pegawai	1.180.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.180.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	1.180.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	18.285.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	1	02	01		Belanja Barang	120.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	18.165.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.165.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	2				BELANJA MODAL	44.781.600		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.781.600		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.781.600		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	44.781.600		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	418.506.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	1				BELANJA OPERASI	125.710.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	1	01			Belanja Pegawai	1.360.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.360.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	1.360.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	124.350.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	1	02	01		Belanja Barang	124.350.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	124.350.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	2				BELANJA MODAL	292.796.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	287.396.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	114.236.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	2	02	05	01	Belanja Modal Alat Kantor	4.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	110.236.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	23.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	2	02	06	02	Belanja Modal Alat Komunikasi	23.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	150.160.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	144.200.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	2	02	10	02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.960.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	2	05			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.400.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	2	05	08		Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	5.400.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	2	05	08	01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	5.400.000		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.873.419.478**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	498.450.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	498.450.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	498.450.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	02	5	1	02	01		Belanja Barang	1.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	497.450.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	497.450.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.374.969.478		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	1.374.969.478		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.374.969.478		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	04	5	1	02	01		Belanja Barang	1.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.373.969.478		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	1.312.464.400		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	61.505.078		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.753.689.900**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	399.999.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	399.999.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	399.999.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	193.529.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	193.529.900		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	45.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	32.500.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.500.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	90.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	71.470.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	71.470.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.193.150.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	6.193.150.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1	01			Belanja Pegawai	5.340.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.340.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	5.340.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	6.187.810.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	3.956.100.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.956.100.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	246.800.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	234.200.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.600.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	1.918.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.918.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	66.910.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.910.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	05							Pemeliharaan Mebel	20.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	05	5	1					BELANJA OPERASI	20.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	05	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	20.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	05	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	20.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	05	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	06							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.980.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	06	5	1					BELANJA OPERASI	179.980.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	06	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	179.980.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	06	5	1	02	01			Belanja Barang	200.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	06	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	200.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	06	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	179.780.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	179.780.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.960.560.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09	5	1					BELANJA OPERASI	1.960.560.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09	5	1	01				Belanja Pegawai	4.720.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.720.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	4.720.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	1.955.840.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09	5	1	02	01			Belanja Barang	170.146.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	170.146.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09	5	1	02	02			Belanja Jasa	102.100.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09	5	1	02	02	08		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	102.100.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	1.683.594.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.683.594.000		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.11**	**00**						**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**1.511.073.104**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	478.446.104		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01	5	1				BELANJA OPERASI	478.446.104		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01	5	1	01			Belanja Pegawai	478.446.104		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.919.504		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.919.504		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01	5	1	01	05		Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	175.526.600		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01	5	1	01	05	01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01	5	1	01	05	02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.775.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01	5	1	01	05	03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01	5	1	01	05	04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01	5	1	01	05	05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.563.320		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01	5	1	01	05	06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	225.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01	5	1	01	06		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	300.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01	5	1	01	06	02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	02						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	111.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	02	5	1				BELANJA OPERASI	111.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	111.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	02	5	1	02	01		Belanja Barang	111.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	111.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	04						Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	921.627.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	04	5	1				BELANJA OPERASI	921.627.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	921.627.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	462.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	462.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	459.627.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	459.627.000		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.12**	**00**						**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**348.845.550**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.12	01						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	348.845.550		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.12	01	5	1				BELANJA OPERASI	348.845.550		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.12	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	348.845.550		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.12	01	5	1	02	01		Belanja Barang	348.845.550		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.12	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	348.845.550		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.13**	**00**						**Penataan Organisasi**	**627.189.320**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	01						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	201.243.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	01	5	1				BELANJA OPERASI	201.243.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	201.243.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	01	5	1	02	01		Belanja Barang	28.669.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	28.669.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	78.900.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	78.900.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	93.674.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	93.674.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	02						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	107.143.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	02	5	1				BELANJA OPERASI	107.143.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	107.143.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	02	5	1	02	01		Belanja Barang	11.593.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.593.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	64.500.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	57.500.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	02	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	31.050.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	02	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.050.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	03							Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	161.849.120		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	03	5	1					BELANJA OPERASI	161.849.120		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	03	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	161.849.120		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	03	5	1	02	01			Belanja Barang	36.905.120		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	03	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	36.905.120		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	03	5	1	02	02			Belanja Jasa	101.700.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	03	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	49.200.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	03	5	1	02	02	12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	52.500.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	03	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	23.244.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	03	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.244.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	04							Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	39.694.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	04	5	1					BELANJA OPERASI	39.694.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	04	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	39.694.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	04	5	1	02	01			Belanja Barang	12.628.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	04	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	12.628.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	04	5	1	02	02			Belanja Jasa	8.100.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	04	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	4.100.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	04	5	1	02	02	12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	04	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	18.966.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	04	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.966.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	05							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	117.260.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	05	5	1					BELANJA OPERASI	117.260.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	05	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	117.260.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	05	5	1	02	01			Belanja Barang	11.110.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	05	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	11.110.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	05	5	1	02	02			Belanja Jasa	75.250.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	05	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	68.250.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	05	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	30.900.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.900.000		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.14**	**00**						**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**818.799.800**		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	01						Fasilitasi Keprotokolan	255.729.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	01	5	1				BELANJA OPERASI	255.729.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	255.729.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	01	5	1	02	01		Belanja Barang	44.558.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	44.558.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	67.300.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	67.300.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	143.871.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	143.871.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	02						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	308.568.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	02	5	1				BELANJA OPERASI	308.568.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	308.568.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	02	5	1	02	01		Belanja Barang	25.101.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	25.101.200		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	197.900.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	179.900.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	02	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	85.567.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.567.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	03						Pendokumentasian Tugas Pimpinan	254.502.600		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	03	5	1				BELANJA OPERASI	254.502.600		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	254.502.600		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	03	5	1	02	01		Belanja Barang	1.359.600		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.359.600		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	150.000.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	150.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	03	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	103.143.000		
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	03	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.143.000		
												Jumlah Belanja	**47.073.835.745**		
												Total Surplus/(Defisit)	**(47.073.835.745)**		
0	**00**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**						**PEMBIAYAAN**			
												Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
												Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**SEKRETARIAT DPRD**	**28.802.448.081**		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**12.616.738.400**		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**1.587.580.000**		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	01						Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	290.948.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	290.948.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	290.948.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	290.948.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	290.948.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	02						Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	984.244.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	984.244.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	984.244.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	984.244.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	984.244.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	03						Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	280.888.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	280.888.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	280.888.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	280.888.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	280.888.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	04						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	31.500.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	31.500.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	04	5	1	01			Belanja Pegawai	31.500.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.500.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	31.500.000		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**694.448.000**		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	01						Pembahasan KUA dan PPAS	24.767.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	24.767.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	24.767.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	01	5	1	02	01		Belanja Barang	24.767.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	24.767.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	02						Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24.547.800		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	24.547.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	24.547.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	24.547.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	24.547.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	03						Pembahasan APBD	209.453.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	03	5	1				BELANJA OPERASI	209.453.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	209.453.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	03	5	1	02	01		Belanja Barang	1.479.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.479.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	207.974.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	207.974.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	04						Pembahasan APBD Perubahan	222.257.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	04	5	1				BELANJA OPERASI	222.257.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	222.257.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	04	5	1	02	01		Belanja Barang	1.485.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.485.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	220.772.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	220.772.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	06						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	213.420.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	06	5	1				BELANJA OPERASI	213.420.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	213.420.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	06	5	1	02	01		Belanja Barang	23.235.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	23.235.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	16.060.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	06	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.060.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	06	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	174.125.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	06	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.125.000		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**02**	**2.03**	**00**						**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**3.417.339.600**		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	01						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	707.746.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	01	5	1				BELANJA OPERASI	707.746.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	707.746.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	707.746.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	707.746.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	02						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	612.608.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	02	5	1				BELANJA OPERASI	612.608.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	612.608.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	612.608.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	612.608.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	03						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	757.964.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	03	5	1				BELANJA OPERASI	757.964.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	757.964.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	757.964.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	757.964.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	04						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	482.460.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	04	5	1				BELANJA OPERASI	482.460.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	482.460.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	482.460.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	482.460.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	05						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	430.376.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	05	5	1				BELANJA OPERASI	430.376.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	430.376.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	430.376.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	430.376.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	07						Pengawasan Penggunaan Anggaran	187.730.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	07	5	1				BELANJA OPERASI	187.730.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	187.730.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	07	5	1	02	01		Belanja Barang	16.445.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	16.445.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	07	5	1	02	02		Belanja Jasa	16.060.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	07	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.060.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	155.225.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	155.225.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	08						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	238.454.800		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	08	5	1				BELANJA OPERASI	238.454.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	238.454.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	08	5	1	02	01		Belanja Barang	23.970.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	23.970.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	214.484.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	214.484.000		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**02**	**2.04**	**00**						**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**2.115.509.800**		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	02						Pendalaman Tugas DPRD	1.544.664.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	02	5	1				BELANJA OPERASI	1.544.664.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.544.664.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	560.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	02	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	560.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	984.664.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	984.664.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	03						Publikasi dan Dokumentasi Dewan	201.250.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	03	5	1				BELANJA OPERASI	201.250.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	201.250.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	03	5	1	02	01		Belanja Barang	115.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	115.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	86.250.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	86.250.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	04						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	120.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	04	5	1				BELANJA OPERASI	120.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	120.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	120.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	120.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	05						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	240.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	05	5	1				BELANJA OPERASI	240.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	240.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	05	5	1	02	02		Belanja Jasa	240.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	05	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	240.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	07						Penyusunan Program Kerja DPRD	9.595.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	07	5	1				BELANJA OPERASI	9.595.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	9.595.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	07	5	1	02	01		Belanja Barang	9.595.800		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.595.800		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**02**	**2.05**	**00**						**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**3.283.028.600**		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	01						Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.082.585.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	01	5	1				BELANJA OPERASI	1.082.585.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.082.585.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	56.210.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	56.210.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	1.026.375.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.026.375.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	03						Pelaksanaan Reses	2.200.443.600		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	03	5	1				BELANJA OPERASI	2.200.443.600		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	2.200.443.600		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	03	5	1	02	01		Belanja Barang	1.034.031.600		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.034.031.600		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	618.632.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	03	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	558.632.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	03	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	60.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	547.780.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	547.780.000		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**02**	**2.08**	**00**						**Fasilitasi Tugas DPRD**	**1.518.832.400**		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	01						Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.490.570.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	01	5	1				BELANJA OPERASI	1.490.570.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.490.570.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	1.490.570.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.490.570.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	02						Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	28.262.400		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	28.262.400		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	28.262.400		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	02	5	1	02	01		Belanja Barang	28.262.400		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	28.262.400		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.185.709.681**		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.110.346.604**		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.026.346.604		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	3.026.346.604		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	3.026.346.604		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.023.495.114		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.567.452.208		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	130.016.903		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	130.358.400		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	67.756.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	100.930.522		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.689.581		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	238.374		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.052.326		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.002.851.490		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	498.491.790		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.674.430		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	495.685.270		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	84.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	84.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	84.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	66.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	18.000.000		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**2.05**	**00**						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**79.368.000**		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.05	11						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	79.368.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.05	11	5	1				BELANJA OPERASI	79.368.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.05	11	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	79.368.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.05	11	5	1	02	02		Belanja Jasa	31.500.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.05	11	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	31.500.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.05	11	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	47.868.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.05	11	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.868.000		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.278.034.427**		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.224.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	23.224.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	23.224.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	23.224.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	23.224.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	307.648.927		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	1				BELANJA OPERASI	110.600.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	110.600.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	1	02	01		Belanja Barang	44.450.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	44.450.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	50.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	50.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	16.150.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.150.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	2				BELANJA MODAL	197.048.927		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.048.927		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	197.048.927		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	2	02	05	01	Belanja Modal Alat Kantor	15.682.527		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	181.366.400		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	03						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	411.195.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	03	5	1				BELANJA OPERASI	352.195.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	352.195.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	03	5	1	02	01		Belanja Barang	352.195.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	352.195.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	03	5	2				BELANJA MODAL	59.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	03	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	03	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	59.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	03	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	59.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	283.778.200		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	283.778.200		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	04	5	1	01			Belanja Pegawai	1.180.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.180.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	1.180.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	282.598.200		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	282.598.200		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	282.598.200		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.980.500		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	72.980.500		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	05	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	05	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	05	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	72.300.500		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	72.300.500		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	72.300.500		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	78.975.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	78.975.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	78.975.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	78.975.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	78.975.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.232.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	100.232.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.232.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	100.232.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.232.000		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**2.07**	**00**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**333.122.500**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05						Pengadaan Mebel	333.122.500		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	5	1				BELANJA OPERASI	2.610.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.930.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	1.930.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.930.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	5	2				BELANJA MODAL	330.512.500		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	330.512.500		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	330.512.500		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	330.512.500		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**905.416.000**		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.500.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	264.500.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	264.500.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	264.500.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	264.500.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	640.916.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	640.916.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	640.916.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	04	5	1	02	01		Belanja Barang	1.500.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	639.416.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	639.416.000		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**786.200.000**		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	269.200.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	269.200.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	269.200.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	141.600.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	141.600.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	14.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	14.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	100.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.600.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.710.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	109.710.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	109.710.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	20.320.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.320.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	10.700.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	10.700.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	73.250.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.250.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	5.440.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.440.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	407.290.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	09	5	1				BELANJA OPERASI	407.290.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	09	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	09	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	09	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	406.610.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	09	5	1	02	02		Belanja Jasa	20.610.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	09	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.610.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	386.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	386.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**2.15**	**00**						**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**9.603.990.550**		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01						Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.380.080.550		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1				BELANJA OPERASI	9.380.080.550		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01			Belanja Pegawai	9.380.080.550		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	04		Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.178.480.550		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	04	01	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	04	02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.180.600		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	04	03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	83.848.800		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	04	04	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	04	05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	04	06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	87.178.350		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	04	07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	50.973.300		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	04	08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	04	09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	04	10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	49.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	04	11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	350.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	04	12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.652.160.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	04	13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.856.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	04	14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	35.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	06		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	201.600.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	06	01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	02						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	223.910.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	02	5	1				BELANJA OPERASI	223.910.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	02	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	223.230.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	02	5	1	02	01		Belanja Barang	220.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	220.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	3.230.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.230.000		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**2.16**	**00**						**Layanan Administrasi DPRD**	**89.231.600**		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02						Fasilitasi Fraksi DPRD	89.231.600		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02	5	1				BELANJA OPERASI	89.231.600		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	89.231.600		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02	5	1	02	01		Belanja Barang	89.231.600		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	89.231.600		
											Jumlah Belanja	**28.802.448.081**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(28.802.448.081)**		
0	**00**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**PERENCANAAN**	**7.147.161.662**		
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.462.695.200**		
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1.056.450.800**		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	03						Pelaksanaan Konsultasi Publik	104.179.400		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	104.179.400		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	104.179.400		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	29.053.400		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	29.053.400		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	53.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	45.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	03	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	22.126.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.126.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	05						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	386.769.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	05	5	1				BELANJA OPERASI	386.769.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	386.769.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	05	5	1	02	01		Belanja Barang	125.887.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	125.887.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	05	5	1	02	02		Belanja Jasa	101.500.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	05	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	91.500.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	05	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	159.382.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	159.382.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	07						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	565.502.400		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	565.502.400		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	565.502.400		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	110.918.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	110.918.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	07	5	1	02	02		Belanja Jasa	356.840.400		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	07	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	356.840.400		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	97.744.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	97.744.000		
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**126.287.200**		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	02						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	126.287.200		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	126.287.200		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	126.287.200		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	60.741.200		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	60.741.200		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	22.900.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	22.900.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	42.646.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.646.000		
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**02**	**2.03**	**00**						**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**279.957.200**		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.03	03						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	279.957.200		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.03	03	5	1				BELANJA OPERASI	279.957.200		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.03	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	279.957.200		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.03	03	5	1	02	01		Belanja Barang	156.145.200		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.03	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	156.145.200		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.03	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	123.812.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.03	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	123.812.000		
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**700.000.000**		
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**300.000.000**		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	04						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	100.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	04	5	1	02	01		Belanja Barang	8.264.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.264.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	7.600.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	7.600.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	84.136.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.136.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	08						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	200.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	08	5	1				BELANJA OPERASI	200.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	200.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	08	5	1	02	01		Belanja Barang	28.682.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	28.682.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	08	5	1	02	02		Belanja Jasa	24.500.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	08	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	24.500.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	146.818.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	146.818.000		
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**03**	**2.02**	**00**						**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**200.000.000**		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	04						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	100.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	04	5	1				BELANJA OPERASI	100.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	04	5	1	02	01		Belanja Barang	11.346.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.346.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	88.654.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88.654.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	08						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	100.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	08	5	1				BELANJA OPERASI	100.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	08	5	1	02	01		Belanja Barang	12.292.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.292.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	87.708.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	87.708.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**03**	**2.03**	**00**						**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**200.000.000**		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	04						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	119.995.300		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	04	5	1				BELANJA OPERASI	119.995.300		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	119.995.300		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	04	5	1	02	01		Belanja Barang	12.429.300		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.429.300		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	107.566.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	107.566.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	08						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	80.004.700		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	08	5	1				BELANJA OPERASI	80.004.700		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	80.004.700		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	08	5	1	02	01		Belanja Barang	6.464.700		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.464.700		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	73.540.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	73.540.000		
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.984.466.462**		
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.810.245.440**		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.763.645.440		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	3.763.645.440		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	3.763.645.440		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.417.240.352		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.763.886.250		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	188.761.645		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	251.310.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	58.900.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	120.345.460		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.181.155		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	49.992		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	25.805.850		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.346.405.088		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	689.263.600		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	10.409.316		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	646.732.172		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.600.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	46.600.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	45.600.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	45.600.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	27.600.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	18.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	1.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000		
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**202.535.500**		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.001.500		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	7.001.500		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	7.001.500		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	7.001.500		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.001.500		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.276.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	73.276.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	73.276.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	73.276.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	73.276.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.040.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	10.040.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	10.040.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	10.040.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.040.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.150.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	12.150.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	12.150.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	12.150.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	12.150.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.068.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	100.068.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.068.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	100.068.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.068.000		
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**01**	**2.07**	**00**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**426.372.022**		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	426.372.022		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	1				BELANJA OPERASI	7.672.022		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	6.992.022		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	1	02	01		Belanja Barang	692.022		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	692.022		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.300.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	2				BELANJA MODAL	418.700.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	418.700.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	2	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan	418.700.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	2	02	02	01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	268.700.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	2	02	02	03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	150.000.000		
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**464.436.000**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.600.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	297.600.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	297.600.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	297.600.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	297.600.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.836.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	166.836.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	166.836.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	166.836.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	166.836.000		
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80.877.500**		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.877.500		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	76.877.500		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	76.877.500		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	35.187.500		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	35.187.500		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	7.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	7.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	30.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	4.690.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.690.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	4.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	4.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	4.000.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000		
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**545.793.500**		
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**545.793.500**		
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**545.793.500**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	03						Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	295.260.500		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	03	5	1				BELANJA OPERASI	295.260.500		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	295.260.500		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	03	5	1	02	01		Belanja Barang	69.540.300		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	69.540.300		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	118.770.200		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	113.770.200		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	03	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	106.950.000		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	106.950.000		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	10						Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	250.533.000		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	10	5	1				BELANJA OPERASI	250.533.000		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	250.533.000		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	10	5	1	02	01		Belanja Barang	58.456.800		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	10	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	58.456.800		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	10	5	1	02	02		Belanja Jasa	109.270.200		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	10	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	109.270.200		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	10	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	82.806.000		
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	10	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	82.806.000		
											Jumlah Belanja	**7.692.955.162**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(7.692.955.162)**		
0	**00**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**					**PENDAPATAN DAERAH**			
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**				**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**29.250.362.757**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01			Pajak Daerah	6.066.362.757		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	06		Pajak Hotel	1.355.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	06	01	Pajak Hotel	1.205.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	06	07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	150.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	07		Pajak Restoran	1.258.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	07	02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	938.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	07	03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	120.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	07	05	Pajak Warung dan Sejenisnya	200.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	08		Pajak Hiburan	50.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	08	09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	50.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	09		Pajak Reklame	18.391.725		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	09	01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	18.391.725		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	10		Pajak Penerangan Jalan	1.914.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	10	01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.914.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	13		Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	13	01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	14	37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	15		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.020.971.032		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	15	01	PBBP2	1.020.971.032		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	16	01	BPHTB-Pemindahan Hak	300.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	03			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.099.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	03	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	14.099.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	03	02	01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	14.099.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	04			Lain-lain PAD yang Sah	9.085.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	04	01		Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.135.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	04	01	02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.575.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	04	01	05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	560.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	04	03		Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	450.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	04	03	01	Hasil Sewa BMD	450.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	04	05		Jasa Giro	3.000.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	04	05	01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	04	14		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	2.500.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	04	14	01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	2.500.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	04	15		Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	04	15	07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1.000.000.000		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**2**				**PENDAPATAN TRANSFER**	**859.822.191.100**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	2	01			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	824.412.254.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	2	01	01		Dana Perimbangan	779.519.163.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	2	01	01	01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	18.095.324.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	2	01	01	02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	569.037.573.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	2	01	01	03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106.880.270.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	2	01	01	04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	85.505.996.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	2	01	05		Dana Desa	44.893.091.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	2	01	05	01	Dana Desa	44.893.091.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	2	02			Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.409.937.100		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	2	02	01		Pendapatan Bagi Hasil	35.409.937.100		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	2	02	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35.409.937.100		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**3**				**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.817.957.663**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	3	03			Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.817.957.663		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	3	03	02		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.817.957.663		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	3	03	02	01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.817.957.663		
											Jumlah Pendapatan	**896.890.511.520**		
0	**00**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**KEUANGAN**	**116.255.165.281**		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**86.100.869.446**		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.225.919.000**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	01						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	53.004.200		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	53.004.200		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	53.004.200		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	30.604.200		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	30.604.200		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	22.400.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	22.400.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	02						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	44.419.200		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	44.419.200		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	44.419.200		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	30.119.200		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	30.119.200		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	14.300.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	14.300.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	07						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	477.692.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	477.692.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	477.692.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	54.687.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	54.687.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	07	5	1	02	02		Belanja Jasa	317.700.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	07	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	317.700.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	105.305.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	105.305.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	08						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	489.969.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	08	5	1				BELANJA OPERASI	489.969.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	489.969.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	08	5	1	02	01		Belanja Barang	53.426.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	53.426.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	08	5	1	02	02		Belanja Jasa	317.700.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	08	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	317.700.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	118.843.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	118.843.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	09						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	61.985.800		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	09	5	1				BELANJA OPERASI	61.985.800		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	61.985.800		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	09	5	1	02	01		Belanja Barang	27.824.800		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	27.824.800		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	09	5	1	02	02		Belanja Jasa	14.900.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	09	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	14.900.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	19.261.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.261.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	13						Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	98.848.800		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	13	5	1				BELANJA OPERASI	98.848.800		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	13	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	98.848.800		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	13	5	1	02	01		Belanja Barang	12.794.800		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	13	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.794.800		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	13	5	1	02	02		Belanja Jasa	43.500.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	13	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	43.500.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	13	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	42.554.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	13	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.554.000		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**617.536.600**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	325.345.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	325.345.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	324.665.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01	5	1	02	01		Belanja Barang	206.335.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	206.335.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	50.250.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	50.250.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	68.080.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.080.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	03						Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	76.476.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	03	5	1				BELANJA OPERASI	76.476.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	76.476.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	03	5	1	02	01		Belanja Barang	21.314.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	21.314.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	55.162.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.162.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	06						Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	70.180.400		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	06	5	1				BELANJA OPERASI	70.180.400		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	70.180.400		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	06	5	1	02	01		Belanja Barang	16.602.400		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	16.602.400		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	06	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	53.578.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	06	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.578.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	07						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	71.979.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	07	5	1				BELANJA OPERASI	71.979.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	71.979.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	07	5	1	02	01		Belanja Barang	10.687.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.687.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	61.292.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.292.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	09						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	73.555.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	09	5	1				BELANJA OPERASI	73.555.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	73.555.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	09	5	1	02	01		Belanja Barang	52.813.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	52.813.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	20.742.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.742.000		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**02**	**2.03**	**00**						**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**455.324.400**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	04						Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	127.240.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	04	5	1				BELANJA OPERASI	127.240.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	127.240.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	04	5	1	02	01		Belanja Barang	10.114.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.114.600		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	60.800.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	53.800.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	04	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	56.326.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.326.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	05						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	52.217.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	05	5	1				BELANJA OPERASI	52.217.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	52.217.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	05	5	1	02	01		Belanja Barang	13.441.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	13.441.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	38.776.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.776.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	07						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	104.441.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	07	5	1				BELANJA OPERASI	104.441.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	104.441.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	07	5	1	02	01		Belanja Barang	9.241.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.241.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	07	5	1	02	02		Belanja Jasa	95.200.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	07	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	95.200.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	11						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	171.424.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	11	5	1				BELANJA OPERASI	171.424.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	11	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	171.424.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	11	5	1	02	01		Belanja Barang	8.828.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	11	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.828.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	11	5	1	02	02		Belanja Jasa	83.450.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	11	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	76.550.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	11	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.900.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	11	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	79.146.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	11	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.146.000		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**02**	**2.04**	**00**						**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**83.802.089.446**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	09						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.497.167.877		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	09	5	3				BELANJA TIDAK TERDUGA	4.497.167.877		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	09	5	3	01			Belanja Tidak Terduga	4.497.167.877		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	09	5	3	01	01		Belanja Tidak Terduga	4.497.167.877		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	09	5	3	01	01	01	Belanja Tidak Terduga	4.497.167.877		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	10						Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	79.304.921.569		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	10	5	4				BELANJA TRANSFER	79.304.921.569		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	10	5	4	01			Belanja Bagi Hasil	2.717.663.869		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	10	5	4	01	01		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	606.636.276		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	10	5	4	01	01	03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	606.636.276		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	10	5	4	01	02		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.111.027.593		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	10	5	4	01	02	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.111.027.593		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	10	5	4	02			Belanja Bantuan Keuangan	76.587.257.700		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	10	5	4	02	05		Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	76.587.257.700		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	10	5	4	02	05	01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	76.087.257.700		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	10	5	4	02	05	02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	500.000.000		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**447.537.300**		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**447.537.300**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	03						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	24.497.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	24.497.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	24.497.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	2.125.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.125.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	22.372.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.372.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	06						Inventarisasi Barang Milik Daerah	62.383.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	06	5	1				BELANJA OPERASI	62.383.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	62.383.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	06	5	1	02	01		Belanja Barang	2.106.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.106.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	13.123.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	06	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.123.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	06	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	47.154.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	06	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.154.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	09						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	157.759.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	09	5	1				BELANJA OPERASI	157.759.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	157.759.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	09	5	1	02	01		Belanja Barang	15.511.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.511.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	09	5	1	02	02		Belanja Jasa	109.856.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	09	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	98.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	09	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.856.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	32.392.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.392.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	10						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	115.162.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	10	5	1				BELANJA OPERASI	115.162.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	115.162.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	10	5	1	02	01		Belanja Barang	11.763.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	10	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.763.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	10	5	1	02	02		Belanja Jasa	53.501.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	10	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	46.300.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	10	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.201.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	10	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	49.898.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	10	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.898.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	11						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	56.741.500		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	11	5	1				BELANJA OPERASI	56.741.500		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	11	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	56.741.500		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	11	5	1	02	01		Belanja Barang	13.731.500		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	11	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	13.731.500		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	11	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	43.010.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	11	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.010.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	12						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30.993.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	12	5	1				BELANJA OPERASI	30.993.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	12	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	30.993.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	12	5	1	02	01		Belanja Barang	3.701.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	12	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.701.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	12	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	27.292.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	12	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.292.000		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**04**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.240.594.450**		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**04**	**2.01**	**00**						**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1.240.594.450**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	03						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	236.460.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	236.460.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	236.460.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	118.910.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	118.910.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	117.550.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	95.050.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	03	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	22.500.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	04						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	114.294.400		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	101.794.400		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	101.794.400		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	04	5	1	02	01		Belanja Barang	101.794.400		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	101.794.400		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	04	5	2				BELANJA MODAL	12.500.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	04	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	04	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	12.500.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	04	5	2	02	10	02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.500.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	07						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	307.190.050		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	307.190.050		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	307.190.050		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	2.824.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.824.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	07	5	1	02	02		Belanja Jasa	267.165.450		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	07	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.625.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	07	5	1	02	02	09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	257.540.450		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	37.200.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.200.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	11						Penagihan Pajak Daerah	81.364.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	11	5	1				BELANJA OPERASI	81.364.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	11	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	81.364.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	11	5	1	02	01		Belanja Barang	4.374.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	11	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.374.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	11	5	1	02	02		Belanja Jasa	49.410.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	11	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	35.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	11	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.410.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	11	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	27.580.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	11	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.580.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	13						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	97.016.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	13	5	1				BELANJA OPERASI	97.016.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	13	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	97.016.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	13	5	1	02	01		Belanja Barang	5.562.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	13	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.562.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	13	5	1	02	02		Belanja Jasa	16.120.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	13	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.120.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	13	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	75.334.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	13	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.334.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	14						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	404.270.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	14	5	1				BELANJA OPERASI	404.270.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	14	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	404.270.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	14	5	1	02	01		Belanja Barang	99.332.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	14	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	99.332.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	14	5	1	02	02		Belanja Jasa	138.780.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	14	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	72.250.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	14	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	66.530.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	14	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	166.158.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	14	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	166.158.000		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**28.466.164.085**		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26.197.655.609**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.011.295.609		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1					BELANJA OPERASI	26.011.295.609		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01				Belanja Pegawai	21.974.563.042		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	19.495.225.078		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01		Belanja Gaji Pokok ASN	3.053.589.652		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	358.565.216		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	290.950.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	95.130.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN	175.540.040		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.504.962		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	987.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.020.690.260		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.700.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.740.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	38.267.948		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.203.895.784		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.119.554.220		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	10.409.316		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.073.932.248		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	04			Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	231.457.380		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	04	12		Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	231.457.380		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	05			Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	43.984.800		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	05	07		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	30.724.800		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	05	08		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	5.630.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	05	09		Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	7.630.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	4.036.732.567		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	02	02			Belanja Jasa	4.036.732.567		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	02	02	02		Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.036.732.567		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	02							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	186.360.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	02	5	1					BELANJA OPERASI	186.360.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	02	5	1	01				Belanja Pegawai	186.360.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	02	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	186.360.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	168.360.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	18.000.000		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**01**	**2.04**	**00**						**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**125.272.000**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.04	03						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	125.272.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.04	03	5	1				BELANJA OPERASI	125.272.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.04	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	125.272.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.04	03	5	1	02	01		Belanja Barang	58.772.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.04	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	58.772.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.04	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	46.500.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.04	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	44.500.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.04	03	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.04	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.04	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.000.000		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**402.617.000**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.550.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	45.550.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	45.550.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	45.550.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	45.550.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.392.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	02	5	1				BELANJA OPERASI	80.392.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	80.392.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	02	5	1	02	01		Belanja Barang	80.392.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	80.392.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.577.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	125.577.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	04	5	1	01			Belanja Pegawai	1.230.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.230.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	1.230.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	124.347.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	124.347.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	124.347.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.100.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	35.100.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	35.100.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	26.100.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	26.100.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	05	5	1	02	02		Belanja Jasa	9.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	05	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.990.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	15.990.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	15.990.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	15.990.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	15.990.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.008.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	100.008.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.008.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	100.008.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.008.000		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**01**	**2.07**	**00**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**119.261.500**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.261.500		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	1				BELANJA OPERASI	43.242.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	1	01			Belanja Pegawai	1.360.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.360.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	1.360.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	41.882.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	1	02	01		Belanja Barang	17.210.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	17.210.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	24.672.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.672.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	2				BELANJA MODAL	76.019.500		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.019.500		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	2	02	01		Belanja Modal Alat Besar	6.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	2	02	01	03	Belanja Modal Alat Bantu	6.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	70.019.500		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	70.019.500		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.278.293.976**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	729.456.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	729.456.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	729.456.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	729.456.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	729.456.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.837.976		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	548.837.976		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	548.837.976		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	548.837.976		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	514.260.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	34.577.976		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**343.064.000**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.204.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	228.204.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	228.204.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	113.628.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	113.628.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	22.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	22.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	70.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.000.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	22.576.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.576.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.860.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	10	5	1				BELANJA OPERASI	114.860.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	114.860.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	10	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	114.860.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114.860.000		
											Jumlah Belanja	**116.255.165.281**		
											Total Surplus/(Defisit)	**780.635.346.239**		
0	**00**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**	**1**				**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**41.089.969.831**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	6	1	01			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.089.969.831		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	6	1	01	07		Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	30.860.215.772		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	6	1	01	07	01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.860.215.772		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	6	1	01	08		Sisa Belanja Lainnya	10.229.754.060		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	6	1	01	08	02	Sisa Dana BOS	5.097.942.601		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	6	1	01	08	03	Sisa Dana Kapitasi	5.131.811.459		
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**41.089.969.831**		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	6	1	01	07	01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.860.215.772		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	6	1	01	08	02	Sisa Dana BOS	5.097.942.601		
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	6	1	01	08	03	Sisa Dana Kapitasi	5.131.811.459		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.53 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**KEPEGAWAIAN**	**5.641.588.919**		
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.890.395.600**		
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**266.997.000**		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	03						Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	192.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	192.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	192.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	23.987.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	23.987.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	2.900.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	2.900.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	165.113.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	165.113.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	06						Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	74.997.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	06	5	1				BELANJA OPERASI	74.997.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	74.997.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	06	5	1	02	01		Belanja Barang	4.975.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.975.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	06	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	70.022.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	06	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	70.022.000		
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Mutasi dan Promosi ASN**	**736.605.000**		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	01						Pengelolaan Mutasi ASN	661.625.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	661.625.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	661.625.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	01	5	1	02	01		Belanja Barang	44.254.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	44.254.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	456.352.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	421.500.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.652.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	01	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.200.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	161.019.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	161.019.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	02						Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	74.980.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	74.980.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.53 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	74.980.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	7.580.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.580.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	67.400.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.400.000		
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**02**	**2.03**	**00**						**Pengembangan Kompetensi ASN**	**682.039.600**		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.03	04						Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	682.039.600		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.03	04	5	1				BELANJA OPERASI	682.039.600		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.03	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	682.039.600		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.03	04	5	1	02	01		Belanja Barang	12.971.600		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.03	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.971.600		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.03	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	572.600.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.03	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	35.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.03	04	5	1	02	02	11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	537.600.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.03	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	96.468.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.03	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	96.468.000		
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**02**	**2.04**	**00**						**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**204.754.000**		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.04	07						Pembinaan Disiplin ASN	204.754.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.04	07	5	1				BELANJA OPERASI	204.754.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.04	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	204.754.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.04	07	5	1	02	01		Belanja Barang	74.180.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.04	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	74.180.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.04	07	5	1	02	02		Belanja Jasa	95.250.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.04	07	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	95.250.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.04	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	35.324.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.04	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.324.000		
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.751.193.319**		
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.089.151.467**		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.053.251.467		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	3.053.251.467		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	3.053.251.467		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.095.734.556		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.574.179.238		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	172.589.404		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.53 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	140.729.528		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.980.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	69.055.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	104.346.360		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.865.864		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	118.266		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.870.896		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	957.516.911		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	474.854.962		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.806.987		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	474.854.962		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.900.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	35.900.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	35.900.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	35.900.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	35.900.000		
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**210.294.594**		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.509.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	8.509.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	8.509.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	8.509.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.509.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.799.594		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	70.629.594		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.53 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	69.949.594		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	69.949.594		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	69.949.594		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	5	2				BELANJA MODAL	1.170.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.170.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.170.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.170.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.061.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	15.061.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	15.061.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	15.061.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.061.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	15.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	15.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	15.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.925.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	99.925.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	99.925.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	99.925.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.925.000		
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**381.830.458**		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	234.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	234.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	234.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	234.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.830.458		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	147.830.458		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.53 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	147.830.458		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	147.830.458		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	137.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.830.458		
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69.916.800**		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.696.800		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	39.696.800		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	39.696.800		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	21.696.800		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	21.696.800		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	18.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.220.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	30.220.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	30.220.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	12.500.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	12.500.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	15.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	2.720.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.720.000		
5	**04**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**688.891.400**		
5	**04**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**688.891.400**		
5	**04**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**688.891.400**		
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	688.891.400		
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07	5	1				BELANJA OPERASI	688.891.400		
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	688.891.400		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.53 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07	5	1	02	01		Belanja Barang	10.123.400		
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.123.400		
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07	5	1	02	02		Belanja Jasa	489.180.000		
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	489.180.000		
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	189.588.000		
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	189.588.000		
											Jumlah Belanja	**6.330.480.319**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(6.330.480.319)**		
0	**00**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.61 INSPEKTORAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**INSPEKTORAT DAERAH**	**9.588.312.877**		
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**2.993.694.600**		
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**2.701.398.500**		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	01						Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	267.970.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	267.970.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	267.970.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	3.870.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.870.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	108.500.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	108.500.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	155.600.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	155.600.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	02						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	432.175.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	432.175.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	432.175.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	10.450.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.450.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	160.675.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	112.650.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	48.025.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	261.050.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	261.050.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	03						Reviu Laporan Kinerja	671.197.900		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	671.197.900		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	671.197.900		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	2.197.900		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.197.900		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	441.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	441.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	228.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	228.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	04						Reviu Laporan Keuangan	117.760.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	117.760.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	117.760.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.61 INSPEKTORAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	04	5	1	02	01		Belanja Barang	4.994.800		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.994.800		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	62.650.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	62.650.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	50.115.200		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.115.200		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	05						Pengawasan Desa	634.375.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	05	5	1				BELANJA OPERASI	634.375.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	634.375.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	05	5	1	02	01		Belanja Barang	8.834.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.834.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	05	5	1	02	02		Belanja Jasa	127.641.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	05	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	56.800.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	05	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	70.841.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	497.900.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	497.900.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	06						Kerja Sama Pengawasan Internal	429.703.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	06	5	1				BELANJA OPERASI	429.703.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	429.703.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	06	5	1	02	01		Belanja Barang	29.620.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	29.620.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	187.900.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	187.900.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	06	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	212.183.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	06	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	212.183.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	07						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	148.217.600		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	148.217.600		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	148.217.600		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	12.314.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.314.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	135.903.600		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.903.600		
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**02**	**2.02**	**00**						**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**292.296.100**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.61 INSPEKTORAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.02	02						Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	292.296.100		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	292.296.100		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	292.296.100		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	6.811.100		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.811.100		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	205.325.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	189.800.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.02	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.525.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	80.160.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.160.000		
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**576.157.800**		
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**221.424.000**		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.01	02						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	221.424.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	221.424.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	221.424.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	33.565.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	33.565.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	173.700.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.01	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	173.700.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	14.159.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.159.000		
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**03**	**2.02**	**00**						**Pendampingan dan Asistensi**	**354.733.800**		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	01						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	100.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	01	5	1	02	01		Belanja Barang	8.853.600		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.853.600		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	21.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	21.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	70.146.400		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	70.146.400		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	02						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	49.129.800		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	49.129.800		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.61 INSPEKTORAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	49.129.800		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	11.859.800		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.859.800		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	23.700.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	23.700.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	13.570.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.570.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	03						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	139.842.400		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	03	5	1				BELANJA OPERASI	139.842.400		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	139.842.400		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	03	5	1	02	01		Belanja Barang	8.460.400		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.460.400		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	81.050.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	81.050.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	50.332.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.332.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	04						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	65.761.600		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	04	5	1				BELANJA OPERASI	65.761.600		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	65.761.600		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	04	5	1	02	01		Belanja Barang	23.330.600		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	23.330.600		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	31.450.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	31.450.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	10.981.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.981.000		
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.018.460.477**		
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.380.175.873**		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.342.135.873		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	4.342.135.873		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	4.342.135.873		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.646.239.395		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.868.634.670		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	234.130.794		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.61 INSPEKTORAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	159.670.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	141.680.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	65.730.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	135.859.920		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.779.348		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	205.193		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	21.549.470		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.695.896.478		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	747.948.239		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	200.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	747.948.239		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.040.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	38.040.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	34.800.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.800.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	27.600.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.200.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	3.240.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	3.240.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.240.000		
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**01**	**2.05**	**00**						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**149.068.400**		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.05	09						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	149.068.400		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.05	09	5	1				BELANJA OPERASI	149.068.400		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.61 INSPEKTORAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.05	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	149.068.400		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.05	09	5	1	02	02		Belanja Jasa	68.250.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.05	09	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	68.250.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.05	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	80.818.400		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.05	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.818.400		
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**874.731.800**		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	13.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	13.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	13.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	13.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	03						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.890.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	03	5	1				BELANJA OPERASI	1.890.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.890.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	03	5	1	02	01		Belanja Barang	1.890.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.890.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	03	5	2				BELANJA MODAL	8.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	03	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	03	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	03	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.794.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	187.794.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	04	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	187.114.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	187.114.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	187.114.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	44.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	44.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.61 INSPEKTORAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	44.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	44.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	20.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	20.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	20.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.047.800		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	600.047.800		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	600.047.800		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	600.047.800		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.047.800		
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**01**	**2.07**	**00**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**157.699.000**		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.535.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06	5	1				BELANJA OPERASI	455.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	455.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06	5	1	02	01		Belanja Barang	455.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	455.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06	5	2				BELANJA MODAL	57.080.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.080.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	44.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	13.080.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	13.080.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08						Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.164.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	1				BELANJA OPERASI	79.830.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	79.830.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	1	02	01		Belanja Barang	250.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	1	02	02		Belanja Jasa	76.350.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	76.350.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	3.230.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.230.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.61 INSPEKTORAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	2				BELANJA MODAL	20.334.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.334.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	20.334.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	14.978.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	2	02	10	02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.356.000		
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**287.680.404**		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.820.900		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	134.820.900		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	134.820.900		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	02	5	1	02	01		Belanja Barang	420.900		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	420.900		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	134.400.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	134.400.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.859.504		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	152.859.504		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	152.859.504		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	04	5	1	02	01		Belanja Barang	1.374.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.374.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	151.485.504		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	132.408.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.077.504		
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**169.105.000**		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.750.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	76.750.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	76.750.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	24.500.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	24.500.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	5.500.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	5.500.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	41.180.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.180.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	5.570.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.61 INSPEKTORAT

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	01	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.570.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	02							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.820.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	02	5	1					BELANJA OPERASI	56.820.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	56.820.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	02	5	1	02	01			Belanja Barang	22.320.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	22.320.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	02	5	1	02	02			Belanja Jasa	8.500.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	8.500.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	02	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	26.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.000.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	06							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.535.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	06	5	1					BELANJA OPERASI	35.535.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	06	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	35.535.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	06	5	1	02	01			Belanja Barang	455.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	06	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	455.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	06	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	35.080.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.080.000		
												Jumlah Belanja	**9.588.312.877**		
												Total Surplus/(Defisit)	**(9.588.312.877)**		
0	**00**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**						**PEMBIAYAAN**			
												Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
												Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.71 KECAMATAN SIBERUT UTARA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**KECAMATAN**	**2.925.878.185**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**90.452.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**02**	**2.04**	**00**						**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**90.452.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	90.452.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03	5	1				BELANJA OPERASI	75.002.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	75.002.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03	5	1	02	01		Belanja Barang	9.642.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.642.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	65.360.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.360.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03	5	2				BELANJA MODAL	15.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	15.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	15.450.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**52.193.200**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**52.193.200**		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	01						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	31.528.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	31.528.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	31.528.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	16.128.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	16.128.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.800.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	03						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.665.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	20.665.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	20.665.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.71 KECAMATAN SIBERUT UTARA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	10.105.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.105.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	10.560.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.560.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**134.389.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**05**	**2.01**	**00**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**134.389.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	01						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.044.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	100.044.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.044.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	61.644.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	61.644.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	18.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	18.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	01	5	1	02	05		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	01	5	1	02	05	01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	08						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.345.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	08	5	1				BELANJA OPERASI	34.345.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	34.345.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	08	5	1	02	01		Belanja Barang	14.685.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.685.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	08	5	1	02	02		Belanja Jasa	8.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	08	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	8.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	11.460.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.460.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.71 KECAMATAN SIBERUT UTARA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**06**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**75.005.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**06**	**2.01**	**00**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**75.005.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	06	2.01	03						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75.005.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	06	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	75.005.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	06	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	75.005.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	06	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	4.565.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	06	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.565.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	06	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	34.350.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	06	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	34.350.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	06	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	36.090.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	06	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.090.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.573.838.985**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**01**	**2.01**	**00**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**57.080.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.01	07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.080.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	57.080.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	57.080.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	6.090.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.090.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.01	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	50.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.990.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.271.786.185**		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.056.531.185		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	2.056.531.185		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.056.531.185		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.489.121.839		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.169.184.199		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	115.270.400		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.995.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.71 KECAMATAN SIBERUT UTARA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	74.013.240		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.273.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	105.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.521.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	567.409.346		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	291.378.696		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	276.030.650		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	215.255.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	215.255.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	26.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	26.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	18.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	8.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	188.855.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	65.415.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	65.415.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	123.440.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	123.440.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**91.562.800**		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.155.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	2.155.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	2.155.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	2.155.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.155.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.517.300		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.71 KECAMATAN SIBERUT UTARA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	21.517.300		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	21.517.300		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	19.717.300		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	19.717.300		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.800.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	2.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	2.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	2.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.440.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	65.440.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	65.440.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	09	5	1	02	01		Belanja Barang	29.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	29.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	36.440.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.440.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**114.000.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	90.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	90.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	90.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	90.000.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.410.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	19.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	19.450.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.71 KECAMATAN SIBERUT UTARA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	2.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	2.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	15.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	4.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	4.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	3.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.460.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	15.460.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	15.460.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	15.460.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.460.000		
											Jumlah Belanja	**2.925.878.185**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(2.925.878.185)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.72 KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**KECAMATAN**	**2.084.485.428**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**36.690.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**02**	**2.04**	**00**						**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**36.690.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	02	2.04	03						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36.690.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	02	2.04	03	5	1				BELANJA OPERASI	36.690.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	02	2.04	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	36.690.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	02	2.04	03	5	1	02	01		Belanja Barang	11.280.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	02	2.04	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.280.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	02	2.04	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	25.410.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	02	2.04	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.410.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**33.474.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**33.474.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	01						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.516.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	13.516.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	13.516.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	9.916.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.916.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	3.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	3.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	03						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.958.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	19.958.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	19.958.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	9.208.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.208.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	10.750.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.750.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**78.661.200**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.72 KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**05**	**2.01**	**00**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**78.661.200**		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	01						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	59.758.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	59.758.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	59.758.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	42.108.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	42.108.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	17.650.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	17.650.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	08						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.903.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	08	5	1				BELANJA OPERASI	18.903.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	18.903.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	08	5	1	02	01		Belanja Barang	18.903.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.903.200		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**06**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**90.634.750**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**06**	**2.01**	**00**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**90.634.750**		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	06	2.01	03						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	90.634.750		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	06	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	90.634.750		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	06	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	90.634.750		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	06	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	20.654.750		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	06	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.654.750		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	06	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	30.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	06	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	06	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	39.380.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	06	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.380.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.845.025.478**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.72 KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**01**	**2.01**	**00**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51.680.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.01	07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	51.680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	51.680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	18.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.01	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	33.680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.680.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.486.992.178**		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.374.312.178		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	1.374.312.178		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	1.374.312.178		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	878.082.577		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	600.994.933		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	95.235.820		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	70.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.640.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	70.096.840		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.393.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	106.809		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.114.975		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	496.229.601		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	262.009.875		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	234.219.726		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.72 KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	112.680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	112.680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	27.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	27.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	14.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	85.080.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	49.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	49.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	36.080.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.080.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**83.650.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.729.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	2.729.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	2.729.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	2.729.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.729.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.642.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	21.642.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	21.642.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	21.642.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	21.642.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.009.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	5.009.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.009.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	5.009.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.009.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.270.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	54.270.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	54.270.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	09	5	1	02	01		Belanja Barang	22.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	22.500.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.72 KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	31.770.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.770.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**01**	**2.07**	**00**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**47.703.300**		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	05						Pengadaan Mebel	18.098.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	05	5	2				BELANJA MODAL	18.098.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	05	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.098.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	05	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.098.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	05	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.098.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	06						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.604.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	06	5	2				BELANJA MODAL	9.604.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	06	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.604.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	06	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.110.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	06	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	2.110.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	06	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	7.494.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	06	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	7.494.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	11						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	11	5	2				BELANJA MODAL	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	11	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	11	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	11	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**133.500.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	6.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	6.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	6.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	127.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	127.500.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.72 KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	127.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	127.500.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**41.500.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	6.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	6.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	6.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10	5	1				BELANJA OPERASI	35.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	35.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	35.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000		
											Jumlah Belanja	**2.084.485.428**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(2.084.485.428)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.73 KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**KECAMATAN**	**2.054.933.417**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**75.000.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**02**	**2.04**	**00**						**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**75.000.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	02	2.04	03						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	75.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	02	2.04	03	5	1				BELANJA OPERASI	75.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	02	2.04	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	75.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	02	2.04	03	5	1	02	01		Belanja Barang	18.720.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	02	2.04	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.720.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	02	2.04	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	56.280.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	02	2.04	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.280.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**27.055.500**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**27.055.500**		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	01						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.060.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	18.060.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	18.060.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	8.010.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.010.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	2.550.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	2.550.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	03						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.995.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	8.995.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	8.995.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	3.395.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.395.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.73 KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.600.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**122.255.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**05**	**2.01**	**00**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**122.255.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	01						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.995.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	99.995.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	99.995.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	80.125.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	80.125.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	10.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	10.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	9.670.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.670.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	08						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.260.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	08	5	1				BELANJA OPERASI	22.260.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	22.260.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	08	5	1	02	01		Belanja Barang	7.440.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.440.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	14.820.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.820.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**06**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100.000.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**06**	**2.01**	**00**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100.000.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	06	2.01	03						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	06	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	100.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.73 KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	06	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	06	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	12.390.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	06	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.390.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	06	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	9.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	06	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	9.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	06	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	78.410.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	06	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.410.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.730.622.917**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**01**	**2.01**	**00**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55.440.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.01	07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.440.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	55.440.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	55.440.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	12.250.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.250.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.01	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	43.190.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.190.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.316.951.717**		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.092.606.717		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	1.092.606.717		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	1.092.606.717		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	735.276.143		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	530.746.309		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	69.538.720		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	60.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.780.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	45.045.240		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.225.056		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	40.094		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.73 KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.700.724		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	357.330.574		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	182.633.451		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	174.697.123		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	224.345.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	224.345.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	25.800.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	25.800.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	17.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	8.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	198.545.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	96.625.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	96.625.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	101.920.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	101.920.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**119.159.200**		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.844.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	5.844.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.844.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	5.844.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.844.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.010.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	38.010.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	38.010.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	38.010.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	38.010.200		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.73 KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.925.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	1.925.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.925.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	1.925.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.925.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.380.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	73.380.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	73.380.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	09	5	1	02	01		Belanja Barang	24.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	24.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	48.880.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.880.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**01**	**2.07**	**00**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75.000.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.07	02						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.07	02	5	2				BELANJA MODAL	75.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.07	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.07	02	5	2	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan	75.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.07	02	5	2	02	02	03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	75.000.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**141.072.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.072.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	117.072.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	117.072.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	117.072.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	117.072.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.000.000**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.73 KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	13.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	13.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10	5	1				BELANJA OPERASI	10.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	10.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000		
											Jumlah Belanja	**2.054.933.417**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(2.054.933.417)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.74 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**KECAMATAN**	**2.164.530.313**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**39.380.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**02**	**2.04**	**00**						**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**39.380.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	02	2.04	03						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	39.380.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	02	2.04	03	5	1				BELANJA OPERASI	39.380.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	02	2.04	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	39.380.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	02	2.04	03	5	1	02	01		Belanja Barang	5.900.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	02	2.04	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.900.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	02	2.04	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	33.480.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	02	2.04	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.480.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**34.823.200**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**34.823.200**		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	01						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.886.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	25.886.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	25.886.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	12.486.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.486.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	8.300.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	8.300.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	03						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.937.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	8.937.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	8.937.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	5.337.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.337.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	750.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	750.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.74 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.850.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**79.005.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**05**	**2.01**	**00**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**79.005.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	01						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	67.970.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	67.970.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	67.970.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	43.350.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	43.350.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	4.620.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.620.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	01	5	1	02	05		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	01	5	1	02	05	01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	08						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.035.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	08	5	1				BELANJA OPERASI	11.035.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	11.035.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	08	5	1	02	01		Belanja Barang	4.315.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.315.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	6.720.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.720.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**06**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**96.330.000**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.74 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**06**	**2.01**	**00**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**96.330.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	06	2.01	03						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	96.330.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	06	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	96.330.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	06	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	96.330.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	06	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	19.780.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	06	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	19.780.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	06	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	76.550.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	06	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	76.550.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.914.992.113**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**01**	**2.01**	**00**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**35.890.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.01	07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.890.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	35.890.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	35.890.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	10.970.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.970.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.01	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	24.920.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.920.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.606.466.613**		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.308.126.613		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	1.308.126.613		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	1.308.126.613		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	862.523.265		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	630.573.033		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	78.576.607		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	75.352.250		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.964.125		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	50.780.300		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.921.515		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.74 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	31.729		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.323.706		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	445.603.348		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	302.195.655		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	143.407.693		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	298.340.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	298.340.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	25.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	25.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	16.800.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	8.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	273.140.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	84.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	84.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	188.640.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	188.640.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**135.499.500**		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.057.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	4.057.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	4.057.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	4.057.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.057.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.830.700		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	51.830.700		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	51.830.700		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	51.830.700		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	51.830.700		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.74 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.551.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	2.551.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	2.551.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	2.551.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.551.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.060.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	77.060.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	77.060.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	09	5	1	02	01		Belanja Barang	17.700.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	17.700.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	59.360.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.360.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**137.136.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.136.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	113.136.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	113.136.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	113.136.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	113.136.000		
											Jumlah Belanja	**2.164.530.313**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(2.164.530.313)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.75 KECAMATAN SIBERUT SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**KECAMATAN**	**2.440.286.280**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**45.435.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**15.440.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.01	02						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.440.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	15.440.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	15.440.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	3.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	11.840.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.840.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**02**	**2.04**	**00**						**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**29.995.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.04	03						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29.995.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.04	03	5	1				BELANJA OPERASI	29.995.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.04	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	29.995.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.04	03	5	1	02	01		Belanja Barang	8.165.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.04	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.165.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.04	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	21.830.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.04	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.830.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**42.109.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**42.109.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	01						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.749.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	20.749.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	20.749.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	8.149.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.149.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	2.400.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.75 KECAMATAN SIBERUT SELATAN

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	900.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	01	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	01	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	03							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.360.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	03	5	1					BELANJA OPERASI	21.360.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	03	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	21.360.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	03	5	1	02	01			Belanja Barang	3.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	03	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	03	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	17.760.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	03	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.760.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**05**	**0.00**	**00**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**125.090.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**05**	**2.01**	**00**							**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**125.090.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	01							Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	95.590.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	01	5	1					BELANJA OPERASI	95.590.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	95.590.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	01	5	1	02	01			Belanja Barang	78.390.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	78.390.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	01	5	1	02	02			Belanja Jasa	17.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	17.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	08							Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	08	5	1					BELANJA OPERASI	29.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	08	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	29.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	08	5	1	02	01			Belanja Barang	4.360.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.75 KECAMATAN SIBERUT SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.360.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	25.140.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.140.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**06**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**92.643.500**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**06**	**2.01**	**00**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**92.643.500**		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	03						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	70.817.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	70.817.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	70.817.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	8.487.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.487.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	13.250.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	13.250.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	49.080.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.080.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	09						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21.826.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	09	5	1				BELANJA OPERASI	21.826.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	21.826.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	09	5	1	02	01		Belanja Barang	3.846.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.846.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	17.980.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.980.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.135.008.780**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**01**	**2.01**	**00**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**36.105.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.01	07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.105.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	36.105.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	36.105.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	2.955.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.75 KECAMATAN SIBERUT SELATAN

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.01	07	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.955.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.01	07	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	33.150.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.01	07	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.150.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**01**	**2.02**	**00**							**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.809.099.039**		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.710.969.039		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	5	1					BELANJA OPERASI	1.710.969.039		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	5	1	01				Belanja Pegawai	1.710.969.039		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.235.612.656		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01		Belanja Gaji Pokok ASN	921.662.098		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	105.212.958		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	71.220.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	53.480.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN	70.515.360		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.188.352		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	135.075		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.198.813		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	475.356.383		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	247.178.192		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	228.178.191		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	02							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.130.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	02	5	1					BELANJA OPERASI	98.130.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	02	5	1	01				Belanja Pegawai	17.900.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.75 KECAMATAN SIBERUT SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.900.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	16.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	80.230.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	17.650.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	17.650.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	62.580.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.580.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**87.683.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.210.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	5.210.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.210.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	5.210.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.210.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.763.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	30.763.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	30.763.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	30.763.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	30.763.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	4.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	4.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	4.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.720.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	46.720.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	46.720.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	09	5	1	02	01		Belanja Barang	3.060.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.060.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	43.660.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.75 KECAMATAN SIBERUT SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.660.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**107.700.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.700.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	95.700.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	95.700.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	95.700.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	95.700.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**94.421.741**		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	37.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	37.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.850.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	09	5	1				BELANJA OPERASI	20.850.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	20.850.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	09	5	1	02	02		Belanja Jasa	2.250.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	09	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	2.250.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	18.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.600.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.75 KECAMATAN SIBERUT SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	11						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.071.741		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	11	5	1				BELANJA OPERASI	36.071.741		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	11	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	36.071.741		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	11	5	1	02	01		Belanja Barang	31.571.741		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	11	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	31.571.741		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	11	5	1	02	02		Belanja Jasa	4.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	11	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000		
											Jumlah Belanja	**2.440.286.280**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(2.440.286.280)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.76 KECAMATAN SIPORA UTARA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**KECAMATAN**	**2.536.637.650**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**87.924.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**02**	**2.04**	**00**						**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**87.924.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	02						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	37.924.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	02	5	1				BELANJA OPERASI	37.924.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	37.924.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	02	5	1	02	01		Belanja Barang	189.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	189.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	8.045.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.045.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	29.690.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.690.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	03						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	03	5	1				BELANJA OPERASI	50.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	03	5	1	02	01		Belanja Barang	1.110.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.110.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	16.090.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	03	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.090.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	32.800.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.800.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**43.478.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**43.478.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	01						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.868.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	15.868.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	15.868.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	7.868.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.76 KECAMATAN SIPORA UTARA

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	7.868.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	01	5	1	02	02			Belanja Jasa	8.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	8.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	03							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.610.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	03	5	1					BELANJA OPERASI	27.610.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	03	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	27.610.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	03	5	1	02	01			Belanja Barang	9.775.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	03	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	9.775.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	03	5	1	02	02			Belanja Jasa	6.045.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	03	5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.045.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	03	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	11.790.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	03	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.790.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**05**	**0.00**	**00**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**84.115.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**05**	**2.01**	**00**							**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**84.115.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	01							Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	64.115.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	01	5	1					BELANJA OPERASI	64.115.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	64.115.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	01	5	1	02	01			Belanja Barang	57.815.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	57.815.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	01	5	1	02	02			Belanja Jasa	6.300.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	6.300.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	08							Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	08	5	1					BELANJA OPERASI	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	08	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	08	5	1	02	01			Belanja Barang	2.110.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.76 KECAMATAN SIPORA UTARA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.110.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	08	5	1	02	02		Belanja Jasa	7.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	08	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	5.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	08	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	10.390.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.390.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**06**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**41.731.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**06**	**2.01**	**00**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**41.731.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	06	2.01	03						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	41.731.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	06	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	41.731.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	06	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	41.731.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	06	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	246.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	06	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	246.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	06	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	26.145.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	06	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	20.100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	06	2.01	03	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.045.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	06	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	15.340.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	06	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.340.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.279.389.650**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**01**	**2.01**	**00**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**75.000.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.01	07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	75.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	75.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	1.325.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.325.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.01	07	5	1	02	02		Belanja Jasa	42.315.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.01	07	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	42.315.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.01	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	31.360.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.76 KECAMATAN SIPORA UTARA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.360.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.576.744.250**		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.543.144.250		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	1.543.144.250		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	1.543.144.250		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.051.543.454		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	800.826.688		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	70.258.248		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	70.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	42.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	60.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.514.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	740.384		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.004.134		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	491.600.796		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	245.800.398		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	245.800.398		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	33.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	33.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	24.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.76 KECAMATAN SIPORA UTARA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.600.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**132.191.600**		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.925.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	4.925.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	4.925.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	4.925.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.925.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.937.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	49.937.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	04	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	49.257.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	49.257.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	49.257.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.504.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	7.504.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	7.504.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	7.504.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.504.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.824.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	69.824.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	69.824.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	69.824.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.824.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**01**	**2.07**	**00**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.055.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.055.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	5	1				BELANJA OPERASI	855.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.76 KECAMATAN SIPORA UTARA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	175.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	5	1	02	01		Belanja Barang	175.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	175.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	5	2				BELANJA MODAL	19.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	19.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio	19.200.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**215.388.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.388.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	191.388.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	191.388.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	191.388.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	191.388.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**260.010.800**		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	29.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	29.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	12.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.450.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	2.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	15.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.76 KECAMATAN SIPORA UTARA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.650.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	28.650.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	28.650.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	5.650.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.650.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	2.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	21.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	3.650.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	3.650.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	3.650.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.650.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.260.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1				BELANJA OPERASI	198.260.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	197.580.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	01		Belanja Barang	1.580.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.580.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	02		Belanja Jasa	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	176.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.76 KECAMATAN SIPORA UTARA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	176.000.000		
											Jumlah Belanja	**2.536.637.650**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(2.536.637.650)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Martinus D.

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.77 KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**KECAMATAN**	**3.249.397.722**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**38.156.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**02**	**2.04**	**00**						**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**38.156.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	02						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	02	5	1				BELANJA OPERASI	10.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	02	5	1	02	01		Belanja Barang	4.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	03						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	28.156.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	03	5	1				BELANJA OPERASI	28.156.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	28.156.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	03	5	1	02	01		Belanja Barang	5.056.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.056.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	23.100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.100.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**67.622.400**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**47.632.400**		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	01						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27.632.400		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	27.632.400		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	27.632.400		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	16.532.400		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	16.532.400		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.100.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.77 KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	03						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	8.370.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.370.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	11.630.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.630.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**03**	**2.06**	**00**						**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**19.990.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.06	01						Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	19.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	19.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	19.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	8.510.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.510.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.06	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	11.480.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.06	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.480.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**103.522.900**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**05**	**2.01**	**00**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**103.522.900**		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	01						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	81.522.900		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	81.522.900		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.77 KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	81.522.900		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	59.522.900		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	59.522.900		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	22.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	22.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	08						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	08	5	1				BELANJA OPERASI	22.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	22.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	08	5	1	02	01		Belanja Barang	9.930.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.930.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	12.070.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.070.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**06**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**73.725.200**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**06**	**2.01**	**00**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**73.725.200**		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	06	2.01	03						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	73.725.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	06	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	73.725.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	06	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	73.725.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	06	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	8.525.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	06	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.525.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	06	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	20.100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	06	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	20.100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	06	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	45.100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	06	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.100.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.966.371.222**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**01**	**2.01**	**00**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**39.840.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.01	07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.840.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	39.840.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	39.840.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.01	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	39.840.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.77 KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.840.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.288.965.622**		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.225.095.622		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	2.225.095.622		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.225.095.622		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.572.147.223		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.202.583.660		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	137.596.654		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	72.880.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	57.870.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	90.138.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.904.644		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	160.546		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.012.919		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	652.948.399		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	376.241.808		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	276.706.591		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.870.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	63.870.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	36.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	20.400.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.77 KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	15.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	27.870.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	27.870.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.870.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**151.009.600**		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	4.995.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	4.995.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	4.995.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.995.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	03						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	03	5	2				BELANJA MODAL	24.100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	03	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	03	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	03	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	24.100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.214.600		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	63.214.600		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	63.214.600		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	63.214.600		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	63.214.600		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	5.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	5.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.700.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	53.700.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	53.700.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	53.700.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.77 KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.700.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**01**	**2.07**	**00**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**295.612.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	5	1				BELANJA OPERASI	6.980.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	6.300.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.300.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	5	2				BELANJA MODAL	268.700.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	268.700.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	5	2	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan	268.700.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	5	2	02	02	01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	268.700.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	06						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.932.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	06	5	2				BELANJA MODAL	19.932.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	06	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.932.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	06	5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.142.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	06	5	2	02	05	01	Belanja Modal Alat Kantor	8.142.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	06	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	11.790.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	06	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	11.790.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**187.944.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	24.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.77 KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.944.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	163.944.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	163.944.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	163.944.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	163.944.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.000.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	3.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	3.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	60.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	60.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	2.440.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.440.000		
											Jumlah Belanja	**3.249.397.722**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(3.249.397.722)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.78 KECAMATAN PAGAI UTARA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**KECAMATAN**	**2.288.278.583**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**120.832.500**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**120.832.500**		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	01						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	47.977.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	47.977.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	47.977.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	23.427.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	23.427.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	24.550.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.550.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	03						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.855.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	72.855.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	72.855.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	10.585.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.585.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	62.270.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.270.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**109.475.750**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**05**	**2.01**	**00**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**109.475.750**		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	01						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	74.961.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	74.961.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.78 KECAMATAN PAGAI UTARA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	74.961.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	66.661.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	66.661.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	8.300.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	8.300.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	08						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.514.750		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	08	5	1				BELANJA OPERASI	34.514.750		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	34.514.750		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	08	5	1	02	01		Belanja Barang	8.184.750		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.184.750		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	26.330.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.330.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**06**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**123.730.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**06**	**2.01**	**00**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**123.730.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	03						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	74.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	74.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	74.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	15.900.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	15.900.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	59.090.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.090.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	18						Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	48.740.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	18	5	1				BELANJA OPERASI	48.740.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	18	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	48.740.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	18	5	1	02	01		Belanja Barang	3.140.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	18	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.140.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	18	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	45.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	18	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.600.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.78 KECAMATAN PAGAI UTARA

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.934.240.333**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.579.645.933**		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.427.725.933		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	1.427.725.933		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	1.427.725.933		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.017.347.201		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	750.033.695		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	94.606.417		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	76.203.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.188.125		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	61.536.726		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.608.654		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	79.697		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.090.887		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	410.378.732		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	209.293.153		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	201.085.579		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.920.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	151.920.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	18.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	18.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	133.920.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.78 KECAMATAN PAGAI UTARA

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	02	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	133.920.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	02	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	133.920.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**01**	**2.06**	**00**							**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**173.478.400**		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	01							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.647.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	01	5	1					BELANJA OPERASI	9.647.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	9.647.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	01	5	1	02	01			Belanja Barang	9.647.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	9.647.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	02							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.810.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	02	5	2					BELANJA MODAL	22.810.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	02	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.810.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	02	5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.460.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	02	5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio	10.460.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	02	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	12.350.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	02	5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	12.350.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	04							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.681.400		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	04	5	1					BELANJA OPERASI	46.681.400		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	04	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	46.681.400		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	04	5	1	02	01			Belanja Barang	46.681.400		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	46.681.400		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	05							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	05	5	1					BELANJA OPERASI	5.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	05	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	5.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	05	5	1	02	01			Belanja Barang	5.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	09							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.940.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	09	5	1					BELANJA OPERASI	88.940.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	09	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	88.940.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	09	5	1	02	01			Belanja Barang	10.630.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	09	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.630.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	09	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	78.310.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.78 KECAMATAN PAGAI UTARA

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.310.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**01**	**2.08**	**00**							**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**169.116.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	02							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	02	5	1					BELANJA OPERASI	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	02	5	1	02	02			Belanja Jasa	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.116.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04	5	1					BELANJA OPERASI	157.116.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	157.116.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04	5	1	02	02			Belanja Jasa	157.116.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	157.116.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**01**	**2.09**	**00**							**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.000.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02	5	1					BELANJA OPERASI	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000		
												Jumlah Belanja	**2.288.278.583**		
												Total Surplus/(Defisit)	**(2.288.278.583)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**						**PEMBIAYAAN**			
												Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
												Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.79 KECAMATAN PAGAI SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**KECAMATAN**	**2.219.453.111**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**95.809.200**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**95.809.200**		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	01						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.434.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	20.434.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	20.434.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	14.434.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.434.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	6.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	03						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.375.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	75.375.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	75.375.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	20.365.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.365.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	55.010.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.010.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**94.729.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**05**	**2.01**	**00**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**94.729.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	01						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	75.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	75.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	69.900.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	69.900.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.79 KECAMATAN PAGAI SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	5.100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	5.100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	08						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.729.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	08	5	1				BELANJA OPERASI	19.729.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	19.729.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	08	5	1	02	01		Belanja Barang	7.849.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.849.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	08	5	1	02	02		Belanja Jasa	3.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	08	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	3.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	08	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	8.280.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	08	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.280.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**06**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100.000.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**06**	**2.01**	**00**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100.000.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	06	2.01	03						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	06	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	100.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	06	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	06	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	18.340.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	06	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.340.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	06	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	13.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	06	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	13.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	06	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	68.260.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	06	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.260.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.928.914.911**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**01**	**2.01**	**00**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60.795.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.01	07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.795.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	60.795.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	60.795.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	9.425.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.425.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.01	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	51.370.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.79 KECAMATAN PAGAI SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.370.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.537.306.711**		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.379.186.711		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	1.379.186.711		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	1.379.186.711		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	956.878.487		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	726.258.300		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	65.043.571		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	74.320.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.850.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	56.942.560		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.559.425		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	61.090		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.843.541		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	422.308.224		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	221.654.112		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	200.654.112		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.120.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	158.120.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	21.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	21.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	14.400.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.79 KECAMATAN PAGAI SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	136.520.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	2.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	133.920.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	133.920.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**123.167.200**		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.260.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	1.260.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.260.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	1.260.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.260.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.225.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	34.225.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	34.225.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	34.225.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	34.225.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.030.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	2.030.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	2.030.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	2.030.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.030.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.652.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	85.652.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	85.652.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	85.652.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.652.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**169.716.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	4.800.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.79 KECAMATAN PAGAI SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	4.800.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	4.800.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	4.800.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.916.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	164.916.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	164.916.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	164.916.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	164.916.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**37.930.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.250.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	32.250.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	32.250.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	12.250.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.250.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	5.680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	5.680.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.680.000		
											Jumlah Belanja	**2.219.453.111**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(2.219.453.111)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.80 KECAMATAN SIKAKAP

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**KECAMATAN**	**3.145.126.982**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**39.994.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**02**	**2.04**	**00**						**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**39.994.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	02	2.04	03						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	39.994.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	02	2.04	03	5	1				BELANJA OPERASI	39.994.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	02	2.04	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	39.994.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	02	2.04	03	5	1	02	01		Belanja Barang	1.814.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	02	2.04	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.814.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	02	2.04	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	38.180.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	02	2.04	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.180.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**59.988.050**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**59.988.050**		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	01						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.994.050		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	34.994.050		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	34.994.050		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	11.794.050		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.794.050		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	03						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.994.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	24.994.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	24.994.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	10.724.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.724.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	14.270.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.80 KECAMATAN SIKAKAP

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.270.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**05**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**96.534.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**05**	**2.01**	**00**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**96.534.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	01						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	66.541.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	66.541.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	66.541.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	59.941.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	59.941.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	6.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	6.600.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	08						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29.993.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	08	5	1				BELANJA OPERASI	29.993.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	08	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	29.993.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	08	5	1	02	01		Belanja Barang	17.993.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	08	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	17.993.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	08	5	1	02	02		Belanja Jasa	12.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	08	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**06**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**49.990.000**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**06**	**2.01**	**00**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**49.990.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	06	2.01	03						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	49.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	06	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	49.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	06	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	49.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	06	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	910.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	06	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	910.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	06	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	10.200.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.80 KECAMATAN SIKAKAP

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	06	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	10.200.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	06	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	38.880.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	06	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.880.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.898.620.932**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**01**	**2.01**	**00**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**29.990.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.01	07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.01	07	5	1				BELANJA OPERASI	29.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.01	07	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	29.990.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.01	07	5	1	02	01		Belanja Barang	1.470.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.470.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.01	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	28.520.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.520.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.617.469.332**		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.474.799.332		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	2.474.799.332		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	2.474.799.332		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.799.306.006		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.400.974.258		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	158.698.224		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	71.320.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	59.150.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	97.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.581.652		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	77.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.004.872		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.80 KECAMATAN SIKAKAP

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	675.493.326		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	344.409.818		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	331.083.508		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	142.670.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	142.670.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	18.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	18.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	124.670.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	02	5	1	02	01		Belanja Barang	550.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	550.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	124.120.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	124.120.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**125.025.600**		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.995.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	7.995.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	7.995.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	7.995.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.995.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.790.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	02	5	2				BELANJA MODAL	11.790.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	02	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.790.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	02	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	11.790.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	02	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	11.790.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.600		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	30.000.600		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	30.000.600		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	30.000.600		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.600		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.80 KECAMATAN SIKAKAP

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.240.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	75.240.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	75.240.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	75.240.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.240.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**116.136.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	30.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	30.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	30.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	30.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.136.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	86.136.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	86.136.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	86.136.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	86.136.000		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.000.000**		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	10.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	10.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000		
											Jumlah Belanja	**3.145.126.982**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(3.145.126.982)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
											Jumlah Pendapatan	**0**		
0	**00**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**4.787.208.404**		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**650.071.900**		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**650.071.900**		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	03						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	650.071.900		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	650.071.900		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	650.071.900		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	495.271.900		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	495.271.900		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	154.800.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	14.800.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	03	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	140.000.000		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**03**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**2.237.314.000**		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**03**	**2.01**	**00**						**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**2.237.314.000**		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.209.907.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1				BELANJA OPERASI	2.209.907.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	82.679.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1	02	01		Belanja Barang	8.361.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.361.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	44.175.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	22.150.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.625.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.400.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	30.143.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.143.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1	05			Belanja Hibah	2.127.228.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1	05	01		Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.500.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1	05	01	01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.500.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1	05	07		Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	627.228.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1	05	07	01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	627.228.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	05						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	27.407.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	05	5	1				BELANJA OPERASI	27.407.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	27.407.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	05	5	1	02	01		Belanja Barang	724.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	724.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	05	5	1	02	02		Belanja Jasa	8.800.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	05	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.800.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	17.883.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	05	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.883.000		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**04**	**0.00**	**00**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**27.037.800**		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**04**	**2.01**	**00**							**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**27.037.800**		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	05							Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	27.037.800		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	05	5	1					BELANJA OPERASI	27.037.800		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	05	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	27.037.800		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	05	5	1	02	01			Belanja Barang	2.091.800		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	05	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.091.800		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	05	5	1	02	02			Belanja Jasa	8.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	05	5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	05	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	16.946.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	05	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.946.000		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**05**	**0.00**	**00**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**271.553.600**		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**05**	**2.01**	**00**							**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**271.553.600**		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	02							Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	129.030.600		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	02	5	1					BELANJA OPERASI	129.030.600		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	129.030.600		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	02	5	1	02	01			Belanja Barang	9.302.600		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	02	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	9.302.600		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	02	5	1	02	02			Belanja Jasa	69.057.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	02	5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.057.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	02	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	02	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	50.671.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.671.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	03						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	64.136.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	64.136.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	64.136.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	03	5	1	02	01		Belanja Barang	6.055.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.055.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	25.375.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	15.300.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	03	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.075.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	03	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	32.706.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.706.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	04						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	78.387.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	78.387.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	78.387.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	04	5	1	02	01		Belanja Barang	2.196.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.196.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	23.860.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	7.800.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	04	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.060.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	52.331.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.331.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**06**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**191.701.900**		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**06**	**2.01**	**00**						**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**191.701.900**		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	04						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	36.058.500		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	36.058.500		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	36.058.500		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	04	5	1	02	01		Belanja Barang	3.350.500		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.350.500		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	16.475.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	6.850.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	04	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.625.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	16.233.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.233.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	37.164.400		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05	5	1				BELANJA OPERASI	37.164.400		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	37.164.400		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05	5	1	02	01		Belanja Barang	3.525.400		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.525.400		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05	5	1	02	02		Belanja Jasa	11.856.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.856.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	21.783.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.783.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06						Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	118.479.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06	5	1				BELANJA OPERASI	118.479.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	118.479.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06	5	1	02	01		Belanja Barang	7.641.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.641.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	47.156.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	35.300.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.856.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	63.682.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.682.000		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.409.529.204**		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.02**	**00**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.123.086.704**		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.087.086.704		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1				BELANJA OPERASI	1.087.086.704		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	1.087.086.704		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	753.816.616		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	550.868.640		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	81.380.296		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	40.320.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.537.229		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	48.527.440		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.273.083		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	155.583		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.754.345		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	333.270.088		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	167.325.380		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	165.944.708		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	02	5	1				BELANJA OPERASI	36.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	02	5	1	01			Belanja Pegawai	36.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	02	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	25.200.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	02	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	10.800.000		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.06**	**00**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**130.058.100**		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.047.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	5	1				BELANJA OPERASI	5.047.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.047.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	5	1	02	01		Belanja Barang	5.047.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.047.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.001.200		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	04	5	1				BELANJA OPERASI	35.001.200		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	35.001.200		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	04	5	1	02	01		Belanja Barang	35.001.200		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	35.001.200		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.005.900		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	5	1				BELANJA OPERASI	5.005.900		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.005.900		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	5	1	02	01		Belanja Barang	5.005.900		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.005.900		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.990.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	06	5	1				BELANJA OPERASI	9.990.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	9.990.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	9.990.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	9.990.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.014.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	5	1				BELANJA OPERASI	75.014.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	75.014.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	75.014.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.014.000		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.07**	**00**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**11.790.000**		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	06						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.790.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	06	5	2				BELANJA MODAL	11.790.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	06	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.790.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	06	5	2	02	10		Belanja Modal Komputer	11.790.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	06	5	2	02	10	01	Belanja Modal Komputer Unit	11.790.000		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**119.472.000**		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	24.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	24.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	24.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.472.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	95.472.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	95.472.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	95.472.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	95.472.000		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.122.400**		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.002.400		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	20.002.400		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	20.002.400		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	18.002.400		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.002.400		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	2.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000		

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.120.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	5.120.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.120.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	5.120.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.120.000		
											Jumlah Belanja	**4.787.208.404**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(4.787.208.404)**		
0	**00**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Martinus D.

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD		
	[#] hibah uang		
	KB CHARIS NUSA MENTAWAI	PASAKIAT TAILELEU	12.240.000
	KB DARMAWANITA GOTAB	Gotap Desa saliguma Kec. Siberut Tengah	8.640.000
	KB DARMAWANITA GOTAB	Gotap Desa saliguma Kec. Siberut Tengah	8.640.000
	PAUD BUMI SIKEREI	DUSUN SAUMANGANYA DESA SAUMANGANYA	10.800.000
	PAUD KRISTEN SIMAKIRISAU TERPADU	DUSUN SILAOINAN DESA SAUREINU	9.360.000
	TK AISYIYAH BUSTANULATHFALL	DUSUN SAGITSI DESA NEMNEMLELEU	9.360.000
	TK ANAK NUSANTARA CEMPUNGAN	Dusun Cempungan Desa Matobe	11.520.000
	TK ANAK NUSANTARA POLAGA	DUSUN POLAGA	15.120.000
	TK ANAK NUSANTARA RUA MONGA	DESA TAIKAKO	8.640.000
	TK ANUGERAH PEMULIHAN	JL. RAYA TUAPEJAT KM.5	101.520.000
	TK BINTANG MULIA 02	DUSUN SEAI LAMA	8.640.000
	TK BINTANG MULIA 03	DUSUN PINATEKTEK DESA SIKAKAP	10.800.000
	TK BUKIT MORIA	DUSUN MONGANSIBAGAU DESA MARA	14.400.000
	TK BUKIT MORIA NEMNEMLELEU	DUSUN NEMNEMLELEU DESA NEMNEMLELEU	10.800.000
	TK BUKIT MORIA SAGITSI	DUSUN SAGITSI DESA NEMNEMLELEU	16.560.000
	TK BUKIT MORIA SAGITSI	DUSUN SAGITSI DESA NEMNEMLELEU	8.640.000
	TK CALVARY	DESA BETUMONGA	7.200.000
	TK CHARIS NUSA MENTAWAI	PASAKIAT TAILELEU	10.080.000
	TK DARMAWANITA SALIGUMA	DESA SALIGUMA	12.240.000
	TK GILGAL TERPADU	DUSUN TAKKUMAN DESA SIOBAN	14.400.000
	TK HANANEEL SHALOM	DUSUN CAM	8.640.000
	TK HARAPAN TERPADU	DUSUN SIRITENGAH	7.920.000
	TK IMANUEL	DUSUN MANGANJO DESA SAUMANGANYA	9.360.000
	TK ISLAM BAKTI 44	DESA SALIGUMA	9.360.000
	TK KARUNIA PEMULIHAN	DUSUN BOLELEU DESA SIDO MAKMUR	7.200.000
	TK KASIH BUNDA	DESA SIKABALUAN	8.640.000
	TK KASIH BUNDA SAUMANGANYA	DESA SAUMANGANYA	8.640.000
	TK KASIH IBU	JL. RAYA TUAPEJAT KM. 6	45.360.000
	TK KASIH PEMULIHAN	DUSUN POGARI DESA GOISO OINAN	7.200.000
	TK KERET BAGA REBANA	DUSUN MAKUKUET DESA MATOBE	10.800.000
	TK KRISTEN ANUGRAH TERPADU	DUSUN TUNANG DESA MATOBE	10.800.000
	TK KRISTEN EFATA TERPADU	BOLOTOK	14.400.000
	TK KRISTEN MENAHEM TERPADU	DUSUN MARA TIMUR DESA MARA	9.360.000
	TK KRISTEN NUSANTARA BERSINAR	DUSUN LELEU BUKKU DESA TAIKAKO	8.640.000
	TK KRISTEN PEMULIHAN MALILIMOK	DUSUN MALILIMOK DESA KATUREI	10.080.000
	TK KRISTEN PEMULIHAN SIRISURAK	DUSUN SIRISURAK	10.080.000
	TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU	DUSUN SAWAHAN DESA SAUREINU	9.360.000
	TK KRISTEN TERANG BERSINAR SIRILANGGAI	DUSUN POKAI	8.640.000
	TK KRISTEN TERPADU SIMOILAKLAK	DESA SIMOILAKLAK	7.200.000
	TK LIGHT KIDS	JL. RAYA TUAPEJAT KM.2	13.680.000
	TK MARANATHA	MUARA SIBERUT	7.920.000
	TK MARGARETHA MALANCAN	DESA MALANCAN	9.360.000
	TK MARGARETHA MASI	SAGULUBEK	9.360.000
	TK MARGARETHA MATOTONAN	MATOTONAN	7.920.000
	TK MARGARETHA SAGULUBBEG	Desa Sagulubbek	32.400.000
	TK MARGARETHA SIKABALUAN	DESA MUARA SIKABALUAN	12.960.000
	TK MARGARETTA PASAKIAT TAILELEU	PASAKIAT TAILELEU	7.920.000
	TK MARGARETTA PURO	DUSUN PURO	8.640.000
	TK MARGARETTA ROGDOK	DUSUN ROGDOK DESA MADOBAG	8.640.000
	TK MARGARETTA SALIGUMA	DUSUN SALIGUMA	10.800.000
	TK MARTURIA TERPADU	DUSUN SUA	8.640.000

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	TK MAWAR SARON	DUSUN MONGANBOSUA DESA BOSUA	10.800.000
	TK MUSARA SITA	DUSUN SABEUGUKGUNG DESA BETUMONGA	8.640.000
	TK MUTIARA PEMULIHAN	DUSUN GOISO OINAN DESA GOISO OINAN	10.800.000
	TK OGOK RAFLESIA	DUSUN SARERE DESA MATOBE	17.280.000
	TK OINAN PURUPUGAT	DUSUN MAKALO DESA MAKALO	9.360.000
	TK PAIDIA GKPM	KOMPLEK KANTOR PUSAT GKPM	11.520.000
	TK PAKEREKAT	DUSUN MANGAUNGAU DESA MATOBE	10.080.000
	TK PAUD TPA AILEPPET	Desa Saibi Samukop	7.920.000
	TK PEMULIHAN	DUSUN MAPADEGAT DESA TUAPEJAT	12.960.000
	TK PEMULIHAN MARA	DUSUN MARA TIMUR DESA MARA	8.640.000
	TK PEMULIHAN TEITEI SINABAK		24.480.000
	TK PNIEL TUNAS BARU PUKARAYAT	DUSUN PUKARAYAT DESA TUAPEJAT	12.960.000
	TK POLAK SIKEREI	DUSUN BUBUAKAT DESA MATOBE	10.080.000
	TK PPK YBTI	dusun seppungan	12.240.000
	TK PURIMANUAIJAT TERPADU	DUSUN SAIBI SAMUKOP	12.240.000
	TK REAL POKAI	POKAI	11.520.000
	TK RIMATA	DUSUN SIMOILAKLAK	10.080.000
	TK RORO SIBAU	DUSUN MAPINANG	10.080.000
	TK SAHAJA	Dusun Pasapuat	8.640.000
	TK SANTO YOSEF	JL. PASTORAN DESA SIOBAN	7.920.000
	TK SASARAINA	DUSUN BERKAT BARU	9.360.000
	TK SINAR PEMULIHAN MATOBE	DESA MATOBE	10.800.000
	TK ST. PETRUS	JL. RAYA TUAPEJAT KM. 5.5	12.240.000
	TK SURAT BAGA TERPADU	DUSUN ROKOT DESA MATOBE	20.160.000
	TK TANGAN PENGHARAPAN MUNTEI	MUNTEI	7.200.000
	TK TERATAI MUARA SIBERUT	SIBERUT SELATAN	10.800.000
	TK TERATAI SIKAKAP	DUSUN SIKAKAP TIMUR DESA SIKAKAP	14.400.000
	TK TUNAS BAKTI BANGSA	DUSUN BUTTUI	9.360.000
	TK YBTI	DUSUN SOTBOYAK	9.360.000
	TK YBTI POKAI	DUSUN POKAI	10.800.000
	TK YBTI SARAUSAU	SARAUSAU DESA KATUREI	8.640.000
	TK YBTIU	DUSUN MONGAN POULA	13.680.000
	TK YBTI UNIVERSAL	dusun labuhan bajo	6.480.000
	TK YBTIU SIMATORO		13.680.000
	TK YBTIU SIRILOGUI	DESA SIRILOGUI	10.800.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**1.055.520.000**
	1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
	[#] paket A setara SD		
	PKBM BUGGEI SIMALIO	Desa Sagulubbek	66.650.000
	PKBM KARONANTA		65.100.000
	PKBM PUSURAKAT	Desa Betumonga	60.450.000
	PKBM ROROI BAGA	Desa Nemnemleleu	54.250.000
	[#] paket B setara SMP		
	PKBM ALITO	Desa Saibi Samukop	59.070.000
	PKBM BUGGEI SIMALIO	Desa Sagulubbek	62.650.000
	PKBM GELAIAKE	MAKALO	80.550.000
	PKBM KARONANTA		80.550.000
	PKBM MANAI OBUK	MADOBAG	66.230.000
	PKBM NEST TRANFORMASI SIPORA	SIOBAN	62.650.000
	PKBM NYIUR MELAMBAI	PEIPEI	73.390.000
	PKBM PUAGAIJAT TORO PURIMANUAIJAT	Desa Muara Sikabaluan	44.750.000
	PKBM PUSURAKAT	Desa Betumonga	80.550.000
	PKBM ROROI BAGA	Desa Nemnemleleu	60.860.000
	PKBM SIBERUT UTARA	MALANCAN	41.170.000

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	PKBM SILIBET SIBAU	Desa Muara Sikabaluan	42.960.000
	PKBM SURA	SAUMANGANYA	53.700.000
	[#] paket C setara SMA		
	PKBM ALITO	Desa Saibi Samukop	64.500.000
	PKBM BUGGEI SIMALIO	Desa Sagulubbek	86.000.000
	PKBM KARONANTA		64.500.000
	PKBM NYIUR MELAMBAI	PEIPEI	75.250.000
	PKBM PUSURAKAT	Desa Betumonga	75.250.000
	PKBM SILIBET SIBAU	Desa Muara Sikabaluan	75.250.000
	PKBM SURA	SAUMANGANYA	62.350.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**1.558.630.000**
		Jumlah Hibah Pada SKPD	**2.614.150.000**
	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
	[#] [#] Hibah PMI		
	PMI Cabang Mentawai	Tuapejat	200.000.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**200.000.000**
		Jumlah Hibah Pada SKPD	**200.000.000**
	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		
	[#] Kerja sama Kehutanan (BKSDA Sumatera Barat)		
		[?]	5.000.000
		[?]	18.000.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**23.000.000**
		Jumlah Hibah Pada SKPD	**23.000.000**
	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		
	[#] Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan		
	GBI Sola Gracia Cabang Tuapejat		40.000.000
	Gereja GBI Mara Desa Mara	Desa Mara	28.000.000
	Gereja GBI Sotboyak	Desa Sotboyak	100.000.000
	Gereja GKLI (Galilea) Matobe Desa Matobe Kec Sipora Selatan	Desa Matobe Kec Sipora Selatan	40.000.000
	Gereja GKPM Episkopos Pukaraijat Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara	Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara	50.000.000
	Gereja GPDI Sirilangai Desa Malancan Kec Siberut Utara	Dusun Sirilangai Desa Malancan Kec Siberut Utara	35.000.000
	Gereja Katholik Matotonan Desa Matotonan Kec Siberut Selatan	Desa Matotonan Kec Siberut Selatan	80.000.000
	Gereja Katholik Santo Andreas Stasi Rokdog Desa Madobag Kec Siberut Selatan	Desa Madobag Kec Siberut Selatan	140.000.000
	Gereja Katolik Belekraksok Desa Malakopa Kec Pagai Selatan	Desa Malakopa Kec Pagai Selatan	50.000.000
	Gereja Katolik Dusun Masi Desa Sagulubbeg Kec Siberut Barat Daya	Dusun Masi Desa Sagulubbeg Kec Siberut Barat Daya	40.000.000
	Gereja Katolik Dusun Puro II Desa Muara Siberut Kec Siberut Selatan	Dusun Puro II Desa Muara Siberut Kec Siberut Selatan	80.000.000
	Gereja Katolik Limu Desa Bulasat Kec Pagai Selatan	Desa Bulasat Kec Pagai Selatan	50.000.000
	Gereja Katolik Muntei Desa Muntei Kec Siberut Selatan	Desa Muntei Kec Siberut Selatan	50.000.000
	Gereja Katolik Peipei Desa Pasakiat Taileleu Kec Siberut Barat Daya	Desa Pasakiat Taileleu Kec Siberut Barat Daya	100.000.000
	Gereja Katolik Stasi Santo Yohanes Desa Mara Kec Sipora Selatan	Desa Mara Kec Sipora Selatan	40.000.000
	Gereja Katolik ST Petrus Stasi Limau Desa Simatalu Kec Siberut Barat	Desa Simatalu Kec Siberut Barat	300.000.000

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Gereja Katolik Toloulaggok Desa Katurei Kec Siberut Barat Daya	Dusun Toloulaggok Desa Katurei Kec Siberut Barat Daya	60.000.000
	Gereja Pimpinan Rohul Kudus Dusun Peipei Desa Pasakiat Taileleu	Dusun Peipei Desa Pasakiat Taileleu	60.000.000
	Gereja Protestan Desa Pasakiat Taileleu Kec Siberut Barat Daya	Desa Pasakiat Taileleu Kec Siberut Barat Daya	50.000.000
	Gereja Protestan Dusun Peipei Desa Pasakiat Taileleu Kec Siberut Barat Daya	Dusun Peipei Desa Pasakiat Taileleu Kec Siberut Barat Daya	50.000.000
	Gereja Protestan Dusun Pusaregat Desa Sagulubbeg Kec Siberut Barat Daya	Pusaregat Desa Sagulubbeg Kec Siberut Barat Daya	40.000.000
	Gereja Santo Dionisius Dusun Lumago Desa Sagulubbeg	Desa Sagulubbeg	40.000.000
	Gereja Santo Paulus Dusun Suruan Desa Simatalu Kec Siberut Barat	Dusun Suruan Desa Simatalu Kec Siberut Barat	150.000.000
	GKPM Bake Desa Bulasat Kec Pagai Selatan	Desa Bulasat Kec Pagai Selatan	50.000.000
	GKPM Betaet Resort Simalegi Kec. Siberut Barat	Dusun Simalegi Utara Desa Simalegi Kec. Siberut Barat	50.000.000
	GKPM Betesda Rokot Desa Matobe Kec Sipora Selatan	Rokot Desa Matobe Kec Sipora Selatan	40.000.000
	GKPM Bubuget Desa Sinaka Kec Pagai Selatan	Dusun Bubuget Desa Sinaka Kec Pagai Selatan	55.000.000
	GKPM Bukkuk Monga Desa Taikako Kec Sikakap	Dusun Bukkuk Monga Desa Taikako Kec Sikakap	70.000.000
	GKPM Bulak Monga Desa Taikako Kec Sikakap	Desa Taikako Kec Sikakap	50.000.000
	GKPM Desa Sirilogui Kec Siberut Utara	Sirilogui Kec Siberut Utara	200.000.000
	GKPM Dusun Manganjo Desa Saumanganya Kec Pagai Utara	Dusun Manganjo Desa Saumanganya Kec Pagai Utara	50.000.000
	GKPM Eruk Paraboat Desa Malakopa Kec Pagai Selatan	Desa Malakopa Kec Pagai Selatan	45.000.000
	GKPM Jemaat Betlehem Silaoinan Dusun Bailo Desa Saureinui Kec. Sipora Selatan	Dusun Bailo Desa Saureinu Kec. Sipora Selatan	55.000.000
	GKPM Jemaat Invokatik Dusun Berkat desa Tuapejat Kec Sipora Utara	Dusun Berkat desa Tuapejat Kec Sipora Utara	40.000.000
	GKPM Jemaat Mandiri Padarai Sioban	Desa Sioban	60.000.000
	GKPM Jemaat Mapinang Utara Dusun Mapinang Desa Saumanganya Kec Pagai Utara	Dusun Mapinang Desa Saumanganya Kec Pagai Utara	40.000.000
	GKPM Jemaat Parak Batu Dusun Parak Batu Desa Sinaka Kec.Pagai Selatan	Dusun Parak Batu Desa Sinaka Kec.Pagai Selatan	50.000.000
	GKPM Jemaat Sagitcik Desa Nemnemleleu Kec Sipora Selatan	Desa Nemnemleleu Kec Sipora Selatan	50.000.000
	GKPM Kaisearea Dusun Maguiru Barat Desa Silabu Kec Pagai Utara	Dusun Maguiru Barat Desa Silabu Kec Pagai Utara	50.000.000
	GKPM Kinumbuk Desa Bulasat Kec Pagai Selatan	Desa Bulasat Kec Pagai Selatan	40.000.000
	GKPM Mazmur Matobe Desa Matobe Kec Sipora Selatan	Desa Matobe Kec Sipora Selatan	35.000.000
	GKPM Muntei Besar Desa Malakopa Kec Pagai Selatan	Desa Malakopa Kec Pagai Selatan	50.000.000
	GKPM Patutukat Desa Saumangayak	Desa Saumanganyak	75.000.000
	GKPM Sabbiret Dusun Sabbiret Desa Malakopa Kec Pagai Selatan	Dusun Sabbiret Desa Malakopa Kec Pagai Selatan	50.000.000
	GKPM Saureinu Desa Saureinu Kec Sipora Selatan	Desa Saureinu Kec Sipora Selatan	30.000.000
	GPDI Jemaat Nafiri Dusun Boleleu Desa Sido Makmur Kec. Sipora Utara	Dusun Boleleu Desa Sido Makmur Kec. Sipora Utara	50.000.000
	Hibah Gereja Dusun Tiop Desa Katurei Kec Siberut Barat Daya	Dusun Tiop Desa Katurei Kec Siberut Barat Daya	40.000.000
	Hibah GKPM Jemaat Wilayah III Sioban Desa Sioban Kec Sipora Selatan	Desa Sioban Kec Sipora Selatan	50.000.000
	ISKA (Ikatakan sarjana Katholik)	Tuapejat	70.000.000
	Mesjid Dusun Kirip Desa Pasakiat Taileleu Kec Siberut Barat Daya	Dusun Kirip Desa Pasakiat Taileleu Kec Siberut Barat Daya	50.000.000
	Mushalla As Sa''adah Dusun Karya Bakti Desa Sipora Jaya Kec Sipora Utara	Dusun Karya Bakti Desa Sipora Jaya Kec Sipora Utara	40.000.000
	MUSHALLA DARUL ULUM	DUSUN MARUIBAGA	40.000.000
	Musholla An-Nur Duisun Kaleak Desa Sagulubbek Kec. Siberut Barat Daya	Dusun kaleak Desa Sagulubbek Kec.Siberut Barat Daya	40.000.000

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara	70.000.000
	Pembangunan Gedung Resort Sipora Utara	Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara	50.000.000
	Pembangunan GKPM Makalo Desa Makalo Kec Pagai Selatan	Desa Makalo Kec Pagai Selatan	200.000.000
	PIKI (Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia)	Tuapejat	100.000.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**3.708.000.000**
	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		
	[#] Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
	PDD RINTISAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI MENTAWAI	Km. 09 Desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai	2.000.000.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**2.000.000.000**
		Jumlah Hibah Pada SKPD	**5.708.000.000**
	8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
	8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
	[#] Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		
	Partai Amanat Nasional (PAN)	Jl. Raya Tuapejat km-2. Sipora Utara	42.966.000
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Jl. Raya Tuapejat Km-6 . Sipora Utara	112.840.000
	Partai Demokrat	Jl. Raya Tuapejat Km-2. Sipora Utara	52.206.000
	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Jl. Raya Tuapejat Km-0. Sipora Utara	38.458.000
	PARTAI GERINDRA (Gerakan Indonesia Raya)	Jl. Raya Tuapejat Km-3. Sipora Utara	54.348.000
	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Jl. Raya tuapejat Km - 7. Sipora Utara	96.362.000
	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Jl. Raya Tuapejat Km-3,5. Sipora Utara	76.412.000
	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	Jl. Raya Tuapejat km-3. Sipora Utara	76.048.000
	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Jl. Raya Tuapejat Km-2 .Sipora Utara	77.588.000
	[#] Belanja Hibah kepada Penyelenggara Pemilu		
	BADAN PENGAWAS PEMILU	JL RAYA TUAPEJAT KM-7	500.000.000
	KOMISI PEMILIHAN UMUM	KM. 7 TUAPEJAT	1.000.000.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**2.127.228.000**
		Jumlah Hibah Pada SKPD	**2.127.228.000**
		Jumlah Total	**10.672.378.000**

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
	SMP Swasta GKPM Sikakap	Sikakap	Bangunan Kesehatan Spesifikasi : Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya	346.666.720
	SMP Swasta GKPM Sikakap	Sikakap	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi : Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana	99.946.000
	SMP Swasta GKPM Sikakap	Sikakap	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana	99.946.000
			Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**546.558.720**
	1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium			
	SMP Swasta GKPM Sikakap	Sikakap	Bangunan Gedung Laboratorium Spesifikasi : Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya di SMP Swasta GKPM Sikakap	650.000.100
	SMP Swasta GKPM Sikakap	Sikakap	Bangunan Gedung Laboratorium Spesifikasi : Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta perabotnya di SMP Swasta GKPM Sikakap	650.000.100
			Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**1.300.000.200**
	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			
	TK ANUGERAH PEMULIHAN	JL. RAYA TUAPEJAT KM.5	Bangunan Kesehatan Spesifikasi : Pembangunan Ruang Kelas UKS TK Anugerah Pemulihan Sipora Utara	160.108.300
	TK ANUGERAH PEMULIHAN	JL. RAYA TUAPEJAT KM.5	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi : Perencanaan Pembangunan Ruang UKS TK ANUGERAH PEMULIHAN Sipora Utara	8.437.000
	TK ANUGERAH PEMULIHAN	JL. RAYA TUAPEJAT KM.5	Bangunan Kesehatan Spesifikasi : Pembangunan Ruang UKS TK Kasih Ibu Sipora Utara	160.108.300
	TK ANUGERAH PEMULIHAN	JL. RAYA TUAPEJAT KM.5	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan Ruang UKS TK Anugerah Pemulihan Sipora Utara	8.437.000

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
	TK KASIH IBU	JL. RAYA TUAPEJAT KM. 6	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan Ruang UKS TK Kasih Ibu Sipora Utara	8.437.000
	TK KASIH IBU	JL. RAYA TUAPEJAT KM. 6	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi : Perencanaan Pembangunan Ruang UKS TK Kasih Ibu Sipora Utara	8.437.000
			Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**353.964.600**
	1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
	TK ANUGERAH PEMULIHAN	JL. RAYA TUAPEJAT KM.5	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya TK ANUGERAH PEMULIHAN Sipora Utara	222.607.000
	TK ANUGERAH PEMULIHAN	JL. RAYA TUAPEJAT KM.5	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi : Perencanaan Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK ANUGERAH PEMULIHAN Sipora Utara	8.242.300
	TK ANUGERAH PEMULIHAN	JL. RAYA TUAPEJAT KM.5	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Spesifikasi : Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK ANUGERAH PEMULIHAN Sipora Utara	155.760.000
	TK ANUGERAH PEMULIHAN	JL. RAYA TUAPEJAT KM.5	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi : Perencanaan Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya TK ANUGERAH PEMULIHAN Sipora Utara	11.682.000
	TK ANUGERAH PEMULIHAN	JL. RAYA TUAPEJAT KM.5	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK ANUGERAH PEMULIHAN Sipora Utara	8.242.300
	TK ANUGERAH PEMULIHAN	JL. RAYA TUAPEJAT KM.5	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya TK ANUGERAH PEMULIHAN Sipora Utara	11.682.000

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
	TK KASIH IBU	JL. RAYA TUAPEJAT KM. 6	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Spesifikasi : Pembangunan Areal Bermain Beserta APE luar ruangan TK Kasih Ibu Sipora Utara	155.760.000
	TK KASIH IBU	JL. RAYA TUAPEJAT KM. 6	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan Areal Bermain beserta APE Luar TK Kasih Ibu SIpora Utara	8.242.300
	TK KASIH IBU	JL. RAYA TUAPEJAT KM. 6	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi : Perencanaa Pembangunan Areal Bermain Beserta PE Luar TK Kasih Ibu Sipora Utara	8.242.300
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			**590.460.200**
	Jumlah Hibah Pada SKPD			**2.790.983.720**
	Jumlah Total			**2.790.983.720**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Martinus D.

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
		[?]	69.750.000
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	**69.750.000**
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	**69.750.000**
	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		
	Bantuan Sosial (Bantuan Pendidikan) Uang yang direncanakan pada Individu	Kabupaten Kepulauan Mentawai	60.000.000
	Bantuan Insentif Untuk Rohaniawan	Kec Pagai utara, Kec Sikakap, Kec Pagai Selatan	60.000.000
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	**120.000.000**
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	**120.000.000**
		Jumlah Total	**189.750.000**

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan			
		[?]	Penyediaan Permakanan bagi Lansia terlantar Spesifikasi : Permakanan bagi Lansia terlantar	346.750.000
		[?]	Penyediaan Permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar Spesifikasi : Permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar	175.000.000
			Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	**521.750.000**
			Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	**521.750.000**
	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH			
	4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			
	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai Yang Membutuhkan DKK	[?]	Belanja Meteran Listrik Spesifikasi : 450 watt	982.500.000
			Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	**982.500.000**
			Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	**982.500.000**
			Jumlah Total	**1.504.250.000**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Martinus D.

Lampiran V : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

1) UMUM

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH		
	5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
	Tuapejat	Kelurahan/Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara	44.893.091.000
	Tuapejat	Kelurahan/Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara	31.194.166.700
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		**76.087.257.700**
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		**76.087.257.700**
	Jumlah Total		**76.087.257.700**

Lampiran V : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH		
	5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
	Tuapejat	Kelurahan/Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara	500.000.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		**500.000.000**
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		**500.000.000**
	Jumlah Total		**76.087.257.700**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Martinus D.

Lampiran VI : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
		Jumlah Total	**0**

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
		Jumlah Total	**0**

Lampiran VI : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH		
	5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
	Tuapejat	Kelurahan/Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara	606.636.276
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan		**606.636.276**
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD		**606.636.276**
	Jumlah Total		**606.636.276**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Martinus D.

Lampiran VII : Rancangan Peraturan Bupati
Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi

Kode Rekening										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1										2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										NIHIL		

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran VIII : Rancangan Peraturan Bupati
Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/ TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi

Kode Rekening										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1										2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										NIHIL		

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran IX : Rancangan Peraturan Bupati
Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi

Kode Rekening										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1										2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

N I H I L

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran X : Rancangan Peraturan Bupati
Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERKADA PENJABARAN APBD
YANG DISAJIKAN BERDASARKAN SUMBER DANA
TAHUN ANGGARAN 2023

SUMBER DANA	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DAK Non Fisik-TPG	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.253.556.000,00
DAK Non Fisik-TKG	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.952.637.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.281.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98.772.096.204,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	316.820.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.719.224.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751.555.716,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.260.537.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	72.427.648.875,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	44.552.070.205,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.996.964.200,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.389.252.200,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	140.538.900,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	140.658.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.055.544.935,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.034.850,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.996.300,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.140.901.274,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.987.207.512,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	145.810.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	60.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	121.700.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	50.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98.577.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.625.730.029,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	777.653.400,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.962.543.260,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773.095.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.542.723.788,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	640.740.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.417.238.500,00

SUMBER DANA	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.338.778.817,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	866.756.287,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.728.003.100,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.410.504.497,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.606.578.566,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.993.889.439,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.129.831.213,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.188.751.375,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.282.191.349,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.104.179.623,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	891.434.800,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	729.403.910,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	694.565.550,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.328.298.250,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	229.066.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.872.532.956,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	579.105.220,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.600.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.733.700,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.173.918.102,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.251.323.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	16.384.562.658,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	614.119.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.929.949.900,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	15.451.612.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	95.750.229.053,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	125.041.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	395.474.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.142.802.859,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	439.198.060,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	60.498.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	702.669.600,00

SUMBER DANA	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.988.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.907.061.697,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	281.499.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.155.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540.980.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.706.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	85.324.900,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	96.334.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	8.446.072.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	86.560.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	72.052.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	394.999.400,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	9.935.874.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	4.536.061.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.169.226.401,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.551.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.341.536.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.895.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.003.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	43.128.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	86.084.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	14.543.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran	92.465.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	102.044.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.1.06.0.00.05.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.1.06.0.00.05.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.753.259.243,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.1.06.0.00.05.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.471.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.1.06.0.00.05.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	607.624.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.1.06.0.00.05.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.286.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.1.06.0.00.05.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	84.698.100,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.1.06.0.00.05.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	346.044.950,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.1.06.0.00.05.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	335.570.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.05.1.06.0.00.05.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.290.892.087,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.187.900,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.550.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.136.600,00

SUMBER DANA	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	45.026.300,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	58.853.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.363.992.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	431.029.400,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	897.258.550,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	221.882.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	571.881.300,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	366.195.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	86.437.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	569.987.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.292.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	118.124.750,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	165.389.900,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	88.600.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	297.333.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.396.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.482.331.069,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.044.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.500.000,00
	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

SUMBER DANA	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.703.223.406,00
	2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.547.900,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.696.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.268.924,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	218.917.500,00
	2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.406.468.500,00
	2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
	2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	139.896.000,00
	2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
Dana Alokasi Khusus Fisik	2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
	2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	388.423.800,00
	2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.941.299.847,00
	2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	831.489.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	538.372.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.660.000,00
	2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	258.284.200,00
	2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	
	2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	131.506.900,00
	2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	127.201.750,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	3.301.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.185.256.308,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.967.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	811.944.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.13 Penataan Organisasi	45.660.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	231.886.100,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	195.840.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	526.345.000,00

SUMBER DANA	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	172.094.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	95.635.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	828.154.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	92.619.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	417.199.400,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	384.500.000,00
	2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	937.598.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.113.097.625,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.001.810,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.345.218.974,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.929.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	333.878.200,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	55.260.336,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
Dana Alokasi Khusus Fisik	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	541.409.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	67.510.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	159.099.400,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.060.822.283,00
	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.702.535.816,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.267.940.966,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.644.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.970.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.716.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.916.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	592.106.200,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.205.200.000,00
	2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	240.633.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.609.027.949,00

SUMBER DANA	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.734.200,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.000.000,00
	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	478.525.300,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.2.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.862.800,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	92.213.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.499.693.400,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	36.664.600,00
	2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	46.698.600,00
	2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.669.516.030,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.244.000,00
	2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.056.200,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.367.060,00
	2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.837.500,00
	2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	76.813.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	480.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.24.2.23.0.00.23.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.573.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.24.2.23.0.00.23.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.350.409.022,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.24.2.23.0.00.23.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.416.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.24.2.23.0.00.23.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.710.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.24.2.23.0.00.23.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.010.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	2.24.2.23.0.00.23.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.320.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	2.24.2.23.0.00.23.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.319.854.520,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.24.2.23.0.00.23.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.017.209.604,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.24.2.23.0.00.23.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	135.236.700,00
	2.24.2.23.0.00.23.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	32.340.000,00
	2.24.2.23.0.00.23.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
Dana Alokasi Khusus Fisik	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00

SUMBER DANA	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	203.643.550,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	974.456.000,00
	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.933.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.380.000,00
	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.705.920.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.285.256.100,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	
	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	620.909.800,00
	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
	2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	167.914.900,00
	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
Dana Alokasi Khusus Fisik	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.180.000,00
	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.917.358.500,00
	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.134.548.865,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.261.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.700.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.684.489.400,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	88.239.850,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	216.616.840,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	29.999.900,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	99.914.900,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	99.989.200,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	275.439.920,00

SUMBER DANA	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.460.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.972.921.356,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	24.334.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.589.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.000.000,00
	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.390.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.150.000.150,00
	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	132.393.900,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	167.710.000,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	630.833.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.700.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.284.730.293,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.544.793.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.331.061.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.873.419.478,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.753.689.900,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.511.073.104,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	348.845.550,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	627.189.320,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	818.799.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	515.471.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10.131.584.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.070.247.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	2.283.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	690.425.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	803.099.900,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.103.405.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.372.298.400,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.02.0.00.0.00.42.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.110.346.604,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.02.0.00.0.00.42.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.368.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.02.0.00.0.00.42.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.278.034.427,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.02.0.00.0.00.42.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	333.122.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.02.0.00.0.00.42.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	905.416.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.02.0.00.0.00.42.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.200.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.02.0.00.0.00.42.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	9.603.990.550,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.02.0.00.0.00.42.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	89.231.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.02.0.00.0.00.42.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.587.580.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.02.0.00.0.00.42.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	694.448.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.02.0.00.0.00.42.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.417.339.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.02.0.00.0.00.42.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	2.115.509.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.02.0.00.0.00.42.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.283.028.600,00

SUMBER DANA	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.02.0.00.0.00.42.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	1.518.832.400,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.810.245.440,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.535.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	426.372.022,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.436.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.877.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.056.450.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	126.287.200,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	279.957.200,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	300.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	200.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	200.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	545.793.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.197.655.609,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	125.272.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.617.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.261.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.278.293.976,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.064.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.225.919.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	617.536.600,00
Dana Desa	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	455.324.400,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	83.802.089.446,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	447.537.300,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.240.594.450,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.03.5.04.0.00.53.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.089.151.467,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.03.5.04.0.00.53.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.294.594,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.03.5.04.0.00.53.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.830.458,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.03.5.04.0.00.53.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.916.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.03.5.04.0.00.53.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	266.997.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.03.5.04.0.00.53.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	736.605.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.03.5.04.0.00.53.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	682.039.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.03.5.04.0.00.53.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	204.754.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.03.5.04.0.00.53.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.03.5.04.0.00.53.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	688.891.400,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.01.0.00.0.00.61.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.380.175.873,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.01.0.00.0.00.61.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.068.400,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.01.0.00.0.00.61.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	874.731.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.01.0.00.0.00.61.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.699.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.01.0.00.0.00.61.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.680.404,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.01.0.00.0.00.61.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.105.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.01.0.00.0.00.61.0000 INSPEKTORAT	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.701.398.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.01.0.00.0.00.61.0000 INSPEKTORAT	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	292.296.100,00

SUMBER DANA	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.01.0.00.0.00.61.0000 INSPEKTORAT	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	221.424.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.01.0.00.0.00.61.0000 INSPEKTORAT	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	354.733.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.71.0000 KECAMATAN SIBERUT UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.080.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.71.0000 KECAMATAN SIBERUT UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.271.786.185,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.71.0000 KECAMATAN SIBERUT UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.562.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.71.0000 KECAMATAN SIBERUT UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.71.0000 KECAMATAN SIBERUT UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.71.0000 KECAMATAN SIBERUT UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.410.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.71.0000 KECAMATAN SIBERUT UTARA	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90.452.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.71.0000 KECAMATAN SIBERUT UTARA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52.193.200,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.71.0000 KECAMATAN SIBERUT UTARA	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	134.389.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.71.0000 KECAMATAN SIBERUT UTARA	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75.005.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.72.0000 KECAMATAN SIBERUT TENGAH	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.680.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.72.0000 KECAMATAN SIBERUT TENGAH	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.486.992.178,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.72.0000 KECAMATAN SIBERUT TENGAH	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.650.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.72.0000 KECAMATAN SIBERUT TENGAH	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.703.300,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.72.0000 KECAMATAN SIBERUT TENGAH	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.500.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.72.0000 KECAMATAN SIBERUT TENGAH	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.500.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.72.0000 KECAMATAN SIBERUT TENGAH	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	36.690.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.72.0000 KECAMATAN SIBERUT TENGAH	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.474.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.72.0000 KECAMATAN SIBERUT TENGAH	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	78.661.200,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.72.0000 KECAMATAN SIBERUT TENGAH	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90.634.750,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.73.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.440.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.73.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.316.951.717,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.73.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.159.200,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.73.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.73.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.072.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.73.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.73.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	75.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.73.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.055.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.73.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	122.255.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.73.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.74.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.890.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.74.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.606.466.613,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.74.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.499.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.74.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.74.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.136.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.74.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	39.380.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.74.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.823.200,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.74.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	79.005.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.74.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	96.330.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.75.0000 KECAMATAN SIBERUT SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.105.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.75.0000 KECAMATAN SIBERUT SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.809.099.039,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.75.0000 KECAMATAN SIBERUT SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.683.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.75.0000 KECAMATAN SIBERUT SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.700.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.75.0000 KECAMATAN SIBERUT SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.421.741,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.75.0000 KECAMATAN SIBERUT SELATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.440.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.75.0000 KECAMATAN SIBERUT SELATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29.995.000,00

SUMBER DANA	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.75.0000 KECAMATAN SIBERUT SELATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.109.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.75.0000 KECAMATAN SIBERUT SELATAN	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	125.090.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.75.0000 KECAMATAN SIBERUT SELATAN	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	92.643.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.76.0000 KECAMATAN SIPORA UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.76.0000 KECAMATAN SIPORA UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.576.744.250,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.76.0000 KECAMATAN SIPORA UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.191.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.76.0000 KECAMATAN SIPORA UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.055.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.76.0000 KECAMATAN SIPORA UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.388.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.76.0000 KECAMATAN SIPORA UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.010.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.76.0000 KECAMATAN SIPORA UTARA	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	87.924.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.76.0000 KECAMATAN SIPORA UTARA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43.478.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.76.0000 KECAMATAN SIPORA UTARA	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	84.115.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.76.0000 KECAMATAN SIPORA UTARA	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.731.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.77.0000 KECAMATAN SIPORA SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.840.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.77.0000 KECAMATAN SIPORA SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.288.965.622,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.77.0000 KECAMATAN SIPORA SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.009.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.77.0000 KECAMATAN SIPORA SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	295.612.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.77.0000 KECAMATAN SIPORA SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.944.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.77.0000 KECAMATAN SIPORA SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.77.0000 KECAMATAN SIPORA SELATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	38.156.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.77.0000 KECAMATAN SIPORA SELATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.632.400,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.77.0000 KECAMATAN SIPORA SELATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	19.990.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.77.0000 KECAMATAN SIPORA SELATAN	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	103.522.900,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.77.0000 KECAMATAN SIPORA SELATAN	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	73.725.200,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.78.0000 KECAMATAN PAGAI UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.579.645.933,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.78.0000 KECAMATAN PAGAI UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.478.400,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.78.0000 KECAMATAN PAGAI UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.116.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.78.0000 KECAMATAN PAGAI UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.78.0000 KECAMATAN PAGAI UTARA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	120.832.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.78.0000 KECAMATAN PAGAI UTARA	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	109.475.750,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.78.0000 KECAMATAN PAGAI UTARA	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	123.730.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.795.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.537.306.711,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.167.200,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.716.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.930.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	95.809.200,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	94.729.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.80.0000 KECAMATAN SIKAKAP	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.990.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.80.0000 KECAMATAN SIKAKAP	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.617.469.332,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.80.0000 KECAMATAN SIKAKAP	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.025.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.80.0000 KECAMATAN SIKAKAP	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.80.0000 KECAMATAN SIKAKAP	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.136.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.80.0000 KECAMATAN SIKAKAP	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.80.0000 KECAMATAN SIKAKAP	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	39.994.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.80.0000 KECAMATAN SIKAKAP	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	59.988.050,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.80.0000 KECAMATAN SIKAKAP	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	96.534.000,00

SUMBER DANA	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.01.0.00.0.00.80.0000 KECAMATAN SIKAKAP	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	49.990.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.123.086.704,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.058.100,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.790.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.472.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.122.400,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	650.071.900,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.237.314.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	27.037.800,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	271.553.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	191.701.900,00
			JUMLAH TOTAL	**959.090.757.280,00**

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XI : Rancangan Peraturan Bupati
Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA KAPITASI PER FKTP
TAHUN ANGGARAN 2023

REKENING					PUSKESMAS	KAPITASI / JASA PELAYANAN	JASA OPERASIONAL 30-40%	TOTAL
1					2	3	4	5=3+4
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN	459.000.000,00	306.000.000,00	765.000.000,00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SIGAPOKNA	40.244.400,00	17.247.600,00	57.492.000,00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS BETAET	299.880.000,00	128.520.000,00	428.400.000,00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SIMATALU	18.421.200,00	7.894.800,00	26.316.000,00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS PEIPEI	408.979.200,00	175.276.800,00	584.256.000,00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SAREREIKET	103.908.000,00	44.532.000,00	148.440.000,00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SIBERUT	394.272.000,00	262.848.000,00	657.120.000,00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP	486.444.000,00	208.476.000,00	694.920.000,00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS MAPADEGAT	668.292.998,00	445.528.665,00	1.113.821.663,00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SIOBAN	550.008.000,00	366.672.000,00	916.680.000,00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS BOSUA	117.062.400,00	50.169.600,00	167.232.000,00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SAUMANGANYA	315.840.000,00	135.360.000,00	451.200.000,00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SIKAKAP	613.656.000,00	409.104.000,00	1.022.760.000,00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS MALAKOPA	356.916.000,00	152.964.000,00	509.880.000,00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS BULASAT	192.108.000,00	82.332.000,00	274.440.000,00
					JUMLAH TOTAL	**5.025.032.198,00**	**2.792.925.465,00**	**7.817.957.663,00**

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XII : Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA BOS PER SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	DANA BOS REGULER 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	SEKOLAH DASAR				
1	SD Negeri 01 Sikakap	Kecamatan Sikakap	218	304.160.000,00	-
2	SD Negeri 02 Taikako	Kecamatan Sikakap	28	31.360.000,00	-
3	SD Negeri 03 Taikako	Kecamatan Sikakap	43	48.160.000,00	-
4	SD Negeri 07 Matobe	Kecamatan Sikakap	81	90.720.000,00	-
5	SD Negeri 15 Sikakap	Kecamatan Sikakap	135	151.200.000,00	-
6	SD Negeri 17 Taikako	Kecamatan Sikakap	70	78.400.000,00	-
7	SD Negeri 21 Makalo	Kecamatan Sikakap	155	218.600.000,00	-
8	SD Negeri 26 Taikako	Kecamatan Sikakap	127	142.240.000,00	-
9	SD Negeri 32 Matobe	Kecamatan Sikakap	32	35.840.000,00	-
10	SD Negeri 35 Matobe	Kecamatan Sikakap	40	44.800.000,00	-
11	SD Negeri 36 Taikako	Kecamatan Sikakap	41	45.920.000,00	-
12	SD Negeri 38 Sikakap	Kecamatan Sikakap	55	61.600.000,00	-
13	SD Swasta Vincentius	Kecamatan Sikakap	171	-	-
14	SD Negeri 06 Sinaka	Kecamatan Pagai Selatan	75	84.000.000,00	-
15	SD Negeri 08 Makalo	Kecamatan Pagai Selatan	72	80.640.000,00	-
16	SD Negeri 09 Makalo	Kecamatan Pagai Selatan	79	88.480.000,00	-
17	SD Negeri 12 Malakopa	Kecamatan Pagai Selatan	58	64.960.000,00	-
18	SD Negeri 13 Bulasat	Kecamatan Pagai Selatan	94	105.280.000,00	-
19	SD Negeri 14 Malakopa	Kecamatan Pagai Selatan	65	72.800.000,00	-
20	SD Negeri 16 Makalo	Kecamatan Pagai Selatan	72	80.640.000,00	-
21	SD Negeri 22 Makalo	Kecamatan Pagai Selatan	60	67.200.000,00	-
22	SD Negeri 23 Sinaka	Kecamatan Pagai Selatan	60	67.200.000,00	-
23	SD Negeri 24 Malakopa	Kecamatan Pagai Selatan	79	88.480.000,00	-
24	SD Negeri 25 Malakopa	Kecamatan Pagai Selatan	147	209.640.000,00	-
25	SD Negeri 28 Makalo	Kecamatan Pagai Selatan	60	67.200.000,00	-
26	SD Negeri 29 Sinaka	Kecamatan Pagai Selatan	60	67.200.000,00	-
27	SD Negeri 30 Sinaka	Kecamatan Pagai Selatan	60	67.200.000,00	-
28	SD Negeri 31 Bulasat	Kecamatan Pagai Selatan	63	70.560.000,00	-
29	SD Negeri 34 Sinaka	Kecamatan Pagai Selatan	60	67.200.000,00	-
30	SD Negeri 39 Malakopa	Kecamatan Pagai Selatan	41	45.920.000,00	-
31	SD Negeri 40 Bulasat	Kecamatan Pagai Selatan	60	67.200.000,00	-
32	SD Negeri 41 Bulasat	Kecamatan Pagai Selatan	75	84.000.000,00	-
33	SD Negeri 42 Sinaka	Kecamatan Pagai Selatan	60	67.200.000,00	-
34	SD Negeri 04 Betumonga	Kecamatan Pagai Utara	156	219.720.000,00	-
35	SD Negeri 05 Silabu	Kecamatan Pagai Utara	84	94.080.000,00	-
36	SD Negeri 10 Saumanganya	Kecamatan Pagai Utara	60	67.200.000,00	-
37	SD Negeri 11 Saumanganya	Kecamatan Pagai Utara	98	109.760.000,00	-
38	SD Negeri 18 Saumanganya	Kecamatan Pagai Utara	148	210.760.000,00	-
39	SD Negeri 19 Saumanganya	Kecamatan Pagai Utara	60	67.200.000,00	-
40	SD Negeri 20 Saumanganya	Kecamatan Pagai Utara	68	76.160.000,00	-
41	SD Negeri 27 Silabu	Kecamatan Pagai Utara	60	67.200.000,00	-
42	SD Negeri 33 Betumonga	Kecamatan Pagai Utara	64	71.680.000,00	-
43	SD Negeri 37 Saumanganya	Kecamatan Pagai Utara	60	67.200.000,00	-
44	SD Negeri 43 Silabu	Kecamatan Pagai Utara	60	67.200.000,00	-
45	SD Negeri 01 Sioban	Kecamatan Sipora Selatan	135	196.200.000,00	-
46	SD Negeri 02 Nemnemleleu	Kecamatan Sipora Selatan	70	78.400.000,00	-
47	SD Negeri 03 Beriulou	Kecamatan Sipora Selatan	70	78.400.000,00	-
48	SD Negeri 04 Bosua	Kecamatan Sipora Selatan	60	67.200.000,00	-

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	DANA BOS REGULER 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
49	SD Negeri 06 Saureinu	Kecamatan Sipora Selatan	44	49.280.000,00	-
50	SD Negeri 07 Nemnemleleu	Kecamatan Sipora Selatan	60	67.200.000,00	-
51	SD Negeri 08 Matobe	Kecamatan Sipora Selatan	78	87.360.000,00	-
52	SD Negeri 09 Saureinu	Kecamatan Sipora Selatan	86	96.320.000,00	-
53	SD Negeri 10 Mara	Kecamatan Sipora Selatan	44	49.280.000,00	-
54	SD Negeri 14 Bosua	Kecamatan Sipora Selatan	67	75.040.000,00	-
55	SD Negeri 19 Matobe	Kecamatan Sipora Selatan	45	50.400.000,00	-
56	SD Negeri 20 Mara	Kecamatan Sipora Selatan	22	24.640.000,00	-
57	SD Negeri 25 Bosua	Kecamatan Sipora Selatan	69	77.280.000,00	-
58	SD Negeri 27 Beriulou	Kecamatan Sipora Selatan	60	67.200.000,00	-
59	SD Swasta Santo Yosef	Kecamatan Sipora Selatan	105	117.600.000,00	-
60	SD Negeri 05 Goisooinan	Kecamatan Sipora Utara	44	49.280.000,00	-
61	SD Negeri 11 Tuapejat	Kecamatan Sipora Utara	21	23.520.000,00	-
62	SD Negeri 12 Betumonga	Kecamatan Sipora Utara	60	67.200.000,00	-
63	SD Negeri 13 Tuapejat	Kecamatan Sipora Utara	220	291.400.000,00	-
64	SD Negeri 15 Betumonga	Kecamatan Sipora Utara	60	67.200.000,00	-
65	SD Negeri 16 Tuapejat	Kecamatan Sipora Utara	263	354.560.000,00	-
66	SD Negeri 17 Tuapejat	Kecamatan Sipora Utara	281	359.720.000,00	-
67	SD Negeri 18 Tuapejat	Kecamatan Sipora Utara	76	85.120.000,00	-
68	SD Negeri 21 Goisooinan	Kecamatan Sipora Utara	63	70.560.000,00	-
69	SD Negeri 22 Tuapejat	Kecamatan Sipora Utara	93	104.160.000,00	-
70	SD Negeri 23 Tuapejat	Kecamatan Sipora Utara	151	169.120.000,00	-
71	SD Negeri 24 Betumonga	Kecamatan Sipora Utara	60	67.200.000,00	-
72	SD Negeri 26 Tuapejat	Kecamatan Sipora Utara	37	41.440.000,00	-
73	SD Swasta Santo Petrus	Kecamatan Sipora Utara	197	220.640.000,00	-
74	SD Kristen Cahaya Bangsa	Kecamatan Sipora Utara	146	163.520.000,00	-
75	SD Negeri 02 Matotonan	Kecamatan Siberut Selatan	220	291.400.000,00	-
76	SD Negeri 06 Madobag	Kecamatan Siberut Selatan	105	117.600.000,00	-
77	SD Negeri 07 Madobag	Kecamatan Siberut Selatan	111	124.320.000,00	-
78	SD Negeri 09 Muara Siberut	Kecamatan Siberut Selatan	114	127.680.000,00	-
79	SD Negeri 12 Muntei	Kecamatan Siberut Selatan	91	101.920.000,00	-
80	SD Negeri 13 Muara Siberut	Kecamatan Siberut Selatan	275	353.000.000,00	-
81	SD Negeri 15 Simalepet	Kecamatan Siberut Selatan	125	140.000.000,00	-
82	SD Negeri 21 Madobag	Kecamatan Siberut Selatan	100	112.000.000,00	-
83	SD Negeri 23 Muntei	Kecamatan Siberut Selatan	81	90.720.000,00	-
84	SD Negeri 24 Madobag	Kecamatan Siberut Selatan	67	75.040.000,00	-
85	SD Swasta Santa Maria	Kecamatan Siberut Selatan	153	171.360.000,00	-
86	SD Swasta Lentera Harapan	Kecamatan Siberut Selatan	61	68.320.000,00	-
87	SD Negeri 01 Saibi Samukop	Kecamatan Siberut Tengah	286	380.320.000,00	-
88	SD Negeri 03 Saibi Samukop	Kecamatan Siberut Tengah	115	128.800.000,00	-
89	SD Negeri 10 Cimpungan	Kecamatan Siberut Tengah	101	113.120.000,00	-
90	SD Negeri 10 Saliguma	Kecamatan Siberut Tengah	60	67.200.000,00	-
91	SD Negeri 13 Cimpungan	Kecamatan Siberut Tengah	60	67.200.000,00	-
92	SD Negeri 16 Saliguma	Kecamatan Siberut Tengah	233	310.960.000,00	-
93	SD Negeri 20 Saibi Samukop	Kecamatan Siberut Tengah	103	115.360.000,00	-
94	SD Negeri 22 Saliguma	Kecamatan Siberut Tengah	117	131.040.000,00	-
95	SD Negeri 04 Katurai	Kecamatan Siberut Barat Daya	67	75.040.000,00	-
96	SD Negeri 05 Katurai	Kecamatan Siberut Barat Daya	92	103.040.000,00	-
97	SD Negeri 08 Sagulubbeg	Kecamatan Siberut Barat Daya	120	134.400.000,00	-
98	SD Negeri 11 Pasakiat Taileleu	Kecamatan Siberut Barat Daya	95	106.400.000,00	-
99	SD Negeri 14 Pasakiat Taileleu	Kecamatan Siberut Barat Daya	240	313.800.000,00	-
100	SD Negeri 17 Muntei	Kecamatan Siberut Barat Daya	83	92.960.000,00	-
101	SD Negeri 18 Pasakiat Taileleu	Kecamatan Siberut Barat Daya	132	192.840.000,00	-
102	SD Negeri 19 Katurai	Kecamatan Siberut Barat Daya	62	69.440.000,00	-
103	SD Negeri 25 Pasakiat Taileleu	Kecamatan Siberut Barat Daya	60	67.200.000,00	-
104	SD Negeri 26 Sagulubbeg	Kecamatan Siberut Barat Daya	60	67.200.000,00	-
105	SD Negeri 27 Sagulubbeg	Kecamatan Siberut Barat Daya	60	67.200.000,00	-
106	SD Negeri 28 Sagulubbeg	Kecamatan Siberut Barat Daya	99	110.880.000,00	-

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	DANA BOS REGULER 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
107	SD Negeri 02 Sigapokna	Kecamatan Siberut Barat	114	127.680.000,00	-
108	SD Negeri 05 Simatalu	Kecamatan Siberut Barat	97	108.640.000,00	-
109	SD Negeri 11 Simalegi	Kecamatan Siberut Barat	66	73.920.000,00	-
110	SD Negeri 14 Simalegi	Kecamatan Siberut Barat	60	67.200.000,00	-
111	SD Negeri 16 Sigapokna	Kecamatan Siberut Barat	77	86.240.000,00	-
112	SD Negeri 17 Simatalu	Kecamatan Siberut Barat	60	67.200.000,00	-
113	SD Negeri 18 Simalegi	Kecamatan Siberut Barat	146	208.520.000,00	-
114	SD Negeri 19 Sigapokna	Kecamatan Siberut Barat	63	70.560.000,00	-
115	SD Negeri 22 Simatalu	Kecamatan Siberut Barat	198	221.760.000,00	-
116	SD Negeri 24 Sigapokna	Kecamatan Siberut Barat	77	86.240.000,00	-
117	SD Negeri 25 Simatalu	Kecamatan Siberut Barat	104	116.480.000,00	-
118	SD Negeri 26 Simalegi	Kecamatan Siberut Barat	47	52.640.000,00	-
119	SD Negeri 27 Simatalu	Kecamatan Siberut Barat	91	101.920.000,00	-
120	SD Negeri 28 Simatalu	Kecamatan Siberut Barat	79	88.480.000,00	-
121	SD Negeri 29 Simatalu	Kecamatan Siberut Barat	65	72.800.000,00	-
122	SD Negeri 01 Malancan	Kecamatan Siberut Utara	69	77.280.000,00	-
123	SD Negeri 03 Sotboyak	Kecamatan Siberut Utara	57	63.840.000,00	-
124	SD Negeri 04 Muara Sikabaluan	Kecamatan Siberut Utara	15	16.800.000,00	-
125	SD Negeri 06 Malancan	Kecamatan Siberut Utara	104	116.480.000,00	-
126	SD Negeri 07 Sirilogui	Kecamatan Siberut Utara	139	155.680.000,00	-
127	SD Negeri 08 Muara Sikabaluan	Kecamatan Siberut Utara	79	88.480.000,00	-
128	SD Negeri 09 Muara Sikabaluan	Kecamatan Siberut Utara	113	171.560.000,00	-
129	SD Negeri 12 Mongan Poula	Kecamatan Siberut Utara	73	81.760.000,00	-
130	SD Negeri 15 Bojakan	Kecamatan Siberut Utara	60	67.200.000,00	-
131	SD Negeri 20 Malancan	Kecamatan Siberut Utara	30	33.600.000,00	-
132	SD Negeri 21 Muara Sikabaluan	Kecamatan Siberut Utara	14	15.680.000,00	-
133	SD Negeri 23 Bojakan	Kecamatan Siberut Utara	68	76.160.000,00	-
134	SD Swasta Santo Fransiskus	Kecamatan Siberut Utara	256	286.720.000,00	-
		Jumlah Total SD	**12470**	**14.589.880.000,00**	**-**
	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA				
1	SMP NEGERI 1 PAGAI SELATAN	Pagai Selatan	66	91.740.000,00	-
2	SMP NEGERI 2 PAGAI SELATAN	Pagai Selatan	249	346.110.000,00	-
3	SMP NEGERI 3 PAGAI SELATAN	Pagai Selatan	47	65.330.000,00	
4	SMP NEGERI 4 PAGAI SELATAN	Pagai Selatan	59	82.010.000,00	
5	SMP NEGERI 1 PAGAI UTARA	Pagai Utara	215	298.850.000,00	
6	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	124	172.360.000,00	
7	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	60	83.400.000,00	
8	SMP NEGERI 3 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	221	307.190.000,00	
9	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	184	255.760.000,00	
10	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	116	161.240.000,00	
11	SMP NEGERI 3 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	62	86.180.000,00	
12	SMP NEGERI 1 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	409	568.510.000,00	
13	SMP NEGERI 2 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	137	190.430.000,00	
14	SMP LENTERA HARAPAN SIBERUT SELATAN	Muara Siberut	110	152.900.000,00	
15	SMPS YOS SUDARSO 2	Muara Siberut	251	348.890.000,00	
16	SMP NEGERI 1 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	311	432.290.000,00	
17	SMP NEGERI 2 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	138	191.820.000,00	
18	SMP NEGERI 1 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	366	508.740.000,00	
19	SMP NEGERI 2 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	91	126.490.000,00	
20	SMP NEGERI 3 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	33	45.870.000,00	
21	SMP NEGERI 4 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	75	104.250.000,00	
22	SMP NEGERI 1 PAGAI UTARA SELATAN	Sikakap	591	821.490.000,00	
23	SMP NEGERI 2 SIKAKAP	Sikakap	178	247.420.000,00	
24	SMP NEGERI 3 SIKAKAP	Sikakap	137	190.430.000,00	
25	SMP SWASTA GKPM SIKAKAP	Sikakap	45	62.550.000,00	
26	SMP NEGERI 1 SIPORA	Sipora Selatan	256	355.840.000,00	

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	DANA BOS REGULER 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
27	SMP NEGERI 2 SIPORA SELATAN	Sipora Selatan	128	177.920.000,00	-
28	SMP NEGERI 3 SIPORA SELATAN	Sipora Selatan	54	75.060.000,00	-
29	SMP NEGERI 1 SIPORA UTARA	Sipora Utara	84	116.760.000,00	-
30	SMP NEGERI 2 SIPORA	Sipora Utara	412	572.680.000,00	-
31	SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH MENTAWAI	Sipora Utara	24	33.360.000,00	
32	SMP KRISTEN CAHAYA BANGSA TUAPEJAT	Sipora Utara	41	56.990.000,00	-
33	SMP SANTO PETRUS TUAPEJAT	Sipora Utara	67	93.130.000,00	-
		Jumlah Total SMP	**5341**	**7.423.990.000,00**	**-**
		JUMLAH TOTAL SD DAN SMP	**17811**	**22.013.870.000,00**	**-**

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XIII : Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
FORMULIR KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH
MENGANGGARKAN BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL BERUPA
PRODUK DALAM NEGERI (PDN), TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING	AKUN	ANGGARAN	TKDN	NILAI TKDN
5.1.02.01	Belanja Barang	64.366.556.033	**95%**	61.148.228.231,35
5.1.02.02	Belanja Jasa	131.267.348.728	**100%**	131.267.348.728,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.006.000.000	**100%**	1.006.000.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	30.000.000	**65%**	19.500.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	199.500.000	**50%**	99.750.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	141.209.700	**60%**	84.725.820,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.508.667.577	**50%**	1.254.333.788,50
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.141.954.435	**30%**	342.586.330,50
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.949.043.700	**30%**	884.713.110,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.589.880.000	**30%**	2.276.964.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	106.582.098.774	**100%**	106.582.098.774,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	4.207.599.500	**100%**	4.207.599.500,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.309.152.200	**100%**	4.309.152.200,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	766.750.000	**100%**	766.750.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	12.085.690.000	**100%**	12.085.690.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200.000.000	**85%**	170.000.000,00
		339.351.450.647	**75%**	**326.505.440.482,35**
	TOTAL BELANJA BARANG, JASA DAN MODAL	**435.241.518.576**		
	PERSENTASE TKDN	**75,02%**		

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 10 Agustus 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
dan
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Bupati dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.959.090.757.280,00 *(Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp.918.000.787.449,00 (*Sembilan Ratus Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)*
b. Belanja Daerah Rp. 959.090.757.280,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah)*

Defisit Rp.41.089.969.831,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)*

c. Pembiayaan Daerah
   1. Penerimaan Rp. 41.089.969.831,00 (Empat Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
   2. Pengeluaran Rp.0,00 (Nol Rupiah)

Pembiayaan Netto Rp. 41.089.969.831,00 *Empat Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00 (Nol Rupiah)

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 918.000.787.449,00 (*Sembilan Ratus Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)* yang bersumber dari :
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.50.360.638.686,00 *(Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)*, yang terdiri atas :
   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.066.362.757,00 *(Enam Miliar Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).*

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.110.275.929,00 *(Dua Puluh Satu Miliar Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).*

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.099.000.000,00 *(Empat Belas Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).*

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.085.000.000,00 *(Sembilan Miliar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).*

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.859.822.191.100,00 *(Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah),* yang terdiri atas:
   a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.824.412.254.000,00 *(Delapan Ratus Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).*

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.409.937.100,00 *(Tiga Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Rupiah Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah).*

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.817.957.663,00 *(Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah),* yang terdiri atas:
   a. Pendapatan hibah;
   b. Dana darurat;
   c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00. (Nol Rupiah)

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00. (Nol Rupiah)

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.817.957.663,00 *(Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).*

Pasal 7

d. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 959.090.757.280,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah),* yang terdiri atas :
   a. Belanja Operasi;
   b. Belanja Modal;
   c. Belanja Tidak Terduga; dan
   d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.635.681.054.019,00 *(Enam Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Belas Rupiah),* yang terdiri atas:
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja Bunga;
   d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.319.567.764.046,00 *(Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Enam Rupiah).*

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.295.255.928.253,00 *(Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).*

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00. (Nol Rupiah)

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.700.000.000,00 *(Lima Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).*

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.463.361.720,00 *(Tiga Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).*

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.694.000.000,00 *(Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).*

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp239.607.613.815,00 *(Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah Delapan Ratus Lima Belas Rupiah)* yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah.
b. Belanja modal peralatan dan mesin.
c. Belanja modal bangunan dan gedung.
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.006.000.000,00 *(Satu Miliar Enam Juta Rupiah).*

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.684.648.564,00 *(Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah.).*

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.106.582.098.774,00 *(Lima Ratus Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).*

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.102.129.466.477,00 *(Seratus Dua Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).*

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.205.400.000,00 (*Dua Ratus Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).*

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.4.497.167.877,00 *(Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)*, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.79.304.921.569,00 *(Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. Belanja bagi hasil; dan
   b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.717.663.869,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).*

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.106.380.700,00 *(Seratus Empat Miliar Seratus Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).*

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.41.089.969.831,00 *(Empat Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang* terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.089.969.831,00 *(Empat Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)*, yang terdiri atas :
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. Pencairan dana cadangan;
   c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. Penerimaan pinjaman daerah;
   e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
   f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 41.089.969.831,00 *(Empat Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).*

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pembentukan dana cadangan;
   b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00. (Nol Rupiah)
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00. (Nol Rupiah)
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00. (Nol Rupiah)
(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00. (Nol Rupiah)
(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00. (Nol Rupiah)

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(41.089.969.831,00 *(Empat Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)*).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 41.089.969.831,00 *(Empat Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)*.

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9.	Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.	Lampiran X	Sinkronisasi Major Project Dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
11.	Lampiran XI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
12.	Lampiran XII	Daftar Piutang Daerah;
13.	Lampiran XIII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
14.	Lampiran XIV	Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
15.	Lampiran XV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
16.	Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan; dan
17.	Lampiran XVII	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 26 Desember 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal, 26 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

RINALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH

Daftar Isi ..... i-ii

Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan..... 1

Lampiran II Ringkasan APBD YANG Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 2-5

Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6-12
Dinas Kesehatan..... 13-17
Rumah Sakit Umum Daerah 18-19
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20-25
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 26-29
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran..... 30-32
Badan Penanggula Bencana Daerah 33-34
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempun dan perlindungan Anak 35-38
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 39-40
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan..... 41-42
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 43-44
Dinas Pemberdayaa Masy. dan Desa, Pengendaliaan penduduk & KB 45-48
Dinas Perhubungan 49-51
Dinas Komunikasi dan Informatika 52-53
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 54-55
Dinas Penaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 56-57
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan..... 58-60
Dinas Perikanan 61-62
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga..... 63-65
Sekretariat Daerah 66-69
Sekretariat DPRD..... 70-73
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 74-76
Badan Keuangan Daerah..... 77-80
Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber daya Manusia 81-82
Inspektorat 83-85
Kecamatan Siberut Utara..... 86-87
Kecamatan Siberut Tengah 88-89
Kecamatan Siberut Barat 90-91
Kecamatan Siberut Barat Daya 92-93
Kecamatan Siberut Selatan..... 94-95
Kecamatan Sipora Utara 96-97
Kecamatan Sipora Selatan 98-100
Kecamatan Pagai Utara..... 101-102
Kecamatan Pagai Selatan..... 103-104
Kecamatan Sikakap 105-106
Kantor Satuan Bangsa dan Politik 107-109

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 110-170

Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara	171-172
Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM	173-176
Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD	177-180
Lampiran VIII	Sinkronisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	181-255
Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah	256-258
Lampiran X	Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah	259-264
Lampiran XI	Daftar Jumlah Kepegawaian Per Golongan dan Per Jabatan	265
Lampiran XII	Daftar Piutang Daerah	266
Lampiran XIII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya	267
Lampiran XIV A	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap	268
Lampiran XIV B	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainilainnya	269
Lampiran XV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan	270
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan	271
Lampiran XVII	Daftar Pinjaman Daerah	272

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**50.360.638.686**
4.1.01	Pajak Daerah	6.066.362.757
4.1.02	Retribusi Daerah	21.110.275.929
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.099.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.085.000.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**859.822.191.100**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	824.412.254.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.409.937.100
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.817.957.663**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.817.957.663
	Jumlah Pendapatan	**918.000.787.449**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**635.681.054.019**
5.1.01	Belanja Pegawai	319.567.764.046
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.255.928.253
5.1.04	Belanja Subsidi	5.700.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	13.463.361.720
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.694.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**239.607.613.815**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.006.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.684.648.564
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.582.098.774
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.129.466.477
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	205.400.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.497.167.877**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.497.167.877
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**79.304.921.569**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.717.663.869
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	76.587.257.700
	Jumlah Belanja	**959.090.757.280**
	Total Surplus/(Defisit)	**(41.089.969.831)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**41.089.969.831**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.089.969.831
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**41.089.969.831**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**
	Pembiayaan Netto	**41.089.969.831**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Martinus D.

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**12.144.186.202**	**370.311.481.176**	**219.067.086.484**	**0**	**0**	**589.378.567.660**
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**0**	**178.825.823.015**	**88.128.735.885**	**0**	**0**	**266.954.558.900**
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	178.825.823.015	88.128.735.885	0	0	266.954.558.900
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**11.625.798.730**	**112.922.924.610**	**14.570.738.014**	**0**	**0**	**127.493.662.624**
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	39.993.000	66.355.871.761	12.104.900.110	0	0	78.460.771.871
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11.585.805.730	25.669.791.777	1.652.693.700	0	0	27.322.485.477
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0002	PUSKESMAS MAPADDEGAT	0	2.365.606.548	51.631.952	0	0	2.417.238.500
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0003	PUSKESMAS SIOBAN	0	2.230.527.990	108.250.827	0	0	2.338.778.817
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0004	PUSKESMAS BOSUA	0	866.756.287	0	0	0	866.756.287
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0005	PUSKESMAS MUARA SIBERUT	0	1.728.003.100	0	0	0	1.728.003.100
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0006	PUSKESMAS PEIPEI	0	1.352.400.097	58.104.400	0	0	1.410.504.497
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0007	PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP	0	1.529.271.766	77.306.800	0	0	1.606.578.566
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0008	PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN	0	1.872.591.239	121.298.200	0	0	1.993.889.439
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0009	PUSKESMAS BETAET	0	1.086.761.738	43.069.475	0	0	1.129.831.213
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0010	PUSKESMAS SAUMANGANYA	0	0	0	0	0	0
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0011	PUSKESMAS SIKAKAP	0	2.077.301.375	111.450.000	0	0	2.188.751.375
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0012	PUSKESMAS MALAKOPA	0	1.207.530.699	74.660.650	0	0	1.282.191.349
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0013	PUSKESMAS BULASAT	0	1.071.111.823	33.067.800	0	0	1.104.179.623
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0014	PUSKESMAS SAREREIKET	0	832.874.800	58.560.000	0	0	891.434.800
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0015	PUSKESMAS SIMATALU	0	717.375.810	12.028.100	0	0	729.403.910
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0016	PUSKESMAS SIGAPOKNA	0	658.449.550	36.116.000	0	0	694.565.550
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0017	PUSKESMAS SAUMANGANYA	0	1.300.698.250	27.600.000	0	0	1.328.298.250
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**518.387.472**	**39.486.493.223**	**111.171.943.585**	**0**	**0**	**150.658.436.808**
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	518.387.472	38.833.823.623	111.121.943.585	0	0	149.955.767.208
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0001	UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT	0	652.669.600	50.000.000	0	0	702.669.600
1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**0**	**23.372.079.897**	**4.323.589.000**	**0**	**0**	**27.695.668.897**
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	23.372.079.897	4.323.589.000	0	0	27.695.668.897
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**0**	**9.591.591.194**	**100.840.000**	**0**	**0**	**9.692.431.194**
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0	5.140.637.301	30.840.000	0	0	5.171.477.301
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	4.450.953.893	70.000.000	0	0	4.520.953.893
1	**06**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**0**	**6.112.569.237**	**771.240.000**	**0**	**0**	**6.883.809.237**
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	6.112.569.237	771.240.000	0	0	6.883.809.237
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**245.104.327**	**66.373.800.895**	**14.050.834.504**	**0**	**0**	**80.424.635.399**

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	**07**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**0**	**83.363.200**	**0**	**0**	**0**	**83.363.200**
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	83.363.200	0	0	0	83.363.200
2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**0**	**1.472.110.650**	**15.450.000**	**0**	**0**	**1.487.560.650**
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	999.231.150	0	0	0	999.231.150
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0001	UPTD PPA	0	472.879.500	15.450.000	0	0	488.329.500
2	**09**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**0**	**7.732.875.069**	**0**	**0**	**0**	**7.732.875.069**
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0	7.732.875.069	0	0	0	7.732.875.069
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**0**	**4.238.924.030**	**1.563.518.000**	**0**	**0**	**5.802.442.030**
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	0	4.238.924.030	1.563.518.000	0	0	5.802.442.030
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**0**	**4.381.615.497**	**498.500.000**	**0**	**0**	**4.880.115.497**
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	4.381.615.497	498.500.000	0	0	4.880.115.497
2	**13**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**0**	**5.204.520.408**	**11.378.000**	**0**	**0**	**5.215.898.408**
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	5.204.520.408	11.378.000	0	0	5.215.898.408
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**0**	**2.787.799.400**	**140.000.000**	**0**	**0**	**2.927.799.400**
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	2.787.799.400	140.000.000	0	0	2.927.799.400
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**228.529.327**	**17.221.051.844**	**457.712.000**	**0**	**0**	**17.678.763.844**
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	DINAS PERHUBUNGAN	228.529.327	17.221.051.844	457.712.000	0	0	17.678.763.844
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**0**	**7.240.560.866**	**131.566.700**	**0**	**0**	**7.372.127.566**
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	7.240.560.866	131.566.700	0	0	7.372.127.566
2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**16.575.000**	**6.095.057.249**	**0**	**0**	**0**	**6.095.057.249**
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16.575.000	6.095.057.249	0	0	0	6.095.057.249
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**0**	**3.867.833.790**	**0**	**0**	**0**	**3.867.833.790**
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	3.867.833.790	0	0	0	3.867.833.790

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**0**	**688.643.550**	**15.000.000**	**0**	**0**	**703.643.550**
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	688.643.550	15.000.000	0	0	703.643.550
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	20	2.16.2.21.2.20.16.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0	0	0
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**0**	**1.238.076.300**	**0**	**0**	**0**	**1.238.076.300**
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	1.238.076.300	0	0	0	1.238.076.300
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**0**	**3.953.792.342**	**11.217.709.804**	**0**	**0**	**15.171.502.146**
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	3.953.792.342	11.217.709.804	0	0	15.171.502.146
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**0**	**167.576.700**	**0**	**0**	**0**	**167.576.700**
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	167.576.700	0	0	0	167.576.700
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**8.720.985.400**	**42.017.865.681**	**1.630.275.000**	**0**	**0**	**43.648.140.681**
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**195.185.400**	**24.100.200.375**	**127.000.000**	**0**	**0**	**24.227.200.375**
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	DINAS PERIKANAN	195.185.400	23.951.760.455	0	0	0	23.951.760.455
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0001	BBIP SIKAKAP	0	148.439.920	127.000.000	0	0	275.439.920
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**8.525.800.000**	**6.502.157.006**	**946.475.000**	**0**	**0**	**7.448.632.006**
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	8.525.800.000	6.502.157.006	946.475.000	0	0	7.448.632.006
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**0**	**7.180.054.900**	**556.800.000**	**0**	**0**	**7.736.854.900**
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0	7.180.054.900	556.800.000	0	0	7.736.854.900
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**0**	**167.914.900**	**0**	**0**	**0**	**167.914.900**
3	30	2.17.3.30.3.31.17.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	167.914.900	0	0	0	167.914.900
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**0**	**4.067.538.500**	**0**	**0**	**0**	**4.067.538.500**
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	4.067.538.500	0	0	0	4.067.538.500
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**0**	**72.127.144.799**	**3.749.139.027**	**0**	**0**	**75.876.283.826**
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**	**0**	**43.911.258.145**	**3.162.577.600**	**0**	**0**	**47.073.835.745**
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	SEKRETARIAT DAERAH	0	43.911.258.145	3.162.577.600	0	0	47.073.835.745
4	**02**		**SEKRETARIAT DPRD**	**0**	**28.215.886.654**	**586.561.427**	**0**	**0**	**28.802.448.081**
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	SEKRETARIAT DPRD	0	28.215.886.654	586.561.427	0	0	28.802.448.081
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**896.890.511.520**	**45.968.121.816**	**508.389.500**	**4.497.167.877**	**79.304.921.569**	**130.278.600.762**
5	**01**		**PERENCANAAN**	**0**	**6.728.461.662**	**418.700.000**	**0**	**0**	**7.147.161.662**
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	6.728.461.662	418.700.000	0	0	7.147.161.662
5	**02**		**KEUANGAN**	**896.890.511.520**	**32.364.556.335**	**88.519.500**	**4.497.167.877**	**79.304.921.569**	**116.255.165.281**
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	BADAN KEUANGAN DAERAH	896.890.511.520	32.364.556.335	88.519.500	4.497.167.877	79.304.921.569	116.255.165.281

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**	**0**	**5.640.418.919**	**1.170.000**	**0**	**0**	**5.641.588.919**
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	5.640.418.919	1.170.000	0	0	5.641.588.919
5	**04**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**0**	**688.891.400**	**0**	**0**	**0**	**688.891.400**
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	688.891.400	0	0	0	688.891.400
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**0**	**545.793.500**	**0**	**0**	**0**	**545.793.500**
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	545.793.500	0	0	0	545.793.500
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**0**	**9.502.898.877**	**85.414.000**	**0**	**0**	**9.588.312.877**
6	**01**		**INSPEKTORAT DAERAH**	**0**	**9.502.898.877**	**85.414.000**	**0**	**0**	**9.588.312.877**
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	INSPEKTORAT	0	9.502.898.877	85.414.000	0	0	9.588.312.877
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**	**0**	**24.604.322.371**	**504.685.300**	**0**	**0**	**25.109.007.671**
7	**01**		**KECAMATAN**	**0**	**24.604.322.371**	**504.685.300**	**0**	**0**	**25.109.007.671**
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	KECAMATAN SIBERUT UTARA	0	2.910.428.185	15.450.000	0	0	2.925.878.185
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH	0	2.036.782.128	47.703.300	0	0	2.084.485.428
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	KECAMATAN SIBERUT BARAT	0	1.979.933.417	75.000.000	0	0	2.054.933.417
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	0	2.164.530.313	0	0	0	2.164.530.313
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	0	2.440.286.280	0	0	0	2.440.286.280
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	KECAMATAN SIPORA UTARA	0	2.517.437.650	19.200.000	0	0	2.536.637.650
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	KECAMATAN SIPORA SELATAN	0	2.936.665.722	312.732.000	0	0	3.249.397.722
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	KECAMATAN PAGAI UTARA	0	2.265.468.583	22.810.000	0	0	2.288.278.583
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	KECAMATAN PAGAI SELATAN	0	2.219.453.111	0	0	0	2.219.453.111
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	KECAMATAN SIKAKAP	0	3.133.336.982	11.790.000	0	0	3.145.126.982
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**0**	**4.775.418.404**	**11.790.000**	**0**	**0**	**4.787.208.404**
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**0**	**4.775.418.404**	**11.790.000**	**0**	**0**	**4.787.208.404**
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	4.775.418.404	11.790.000	0	0	4.787.208.404
			TOTAL	**918.000.787.449**	**635.681.054.019**	**239.607.613.815**	**4.497.167.877**	**79.304.921.569**	**959.090.757.280**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Martinus D.

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**266.954.558.900**	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**122.365.935.480**	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**72.427.648.875**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	5.563.522.330	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	324.543.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	40.800.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	283.743.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	5.238.978.530	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.238.978.530	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02				Penambahan Ruang Kelas Baru	8.276.013.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	460.467.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	126.400.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	334.067.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	7.815.546.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.815.546.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4.093.218.924	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	217.082.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	01	Belanja Pegawai	56.200.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	160.882.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2		BELANJA MODAL	3.876.136.924	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.876.136.924	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.292.795.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	101.621.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	01	Belanja Pegawai	12.240.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	89.381.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	2		BELANJA MODAL	1.191.174.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.191.174.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	979.738.400	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	102.964.400	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	01	Belanja Pegawai	16.680.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	86.284.400	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	2		BELANJA MODAL	876.774.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	876.774.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.975.372.890	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	228.913.400	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	01	Belanja Pegawai	43.260.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	185.653.400	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	2		BELANJA MODAL	3.746.459.490	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.746.459.490	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	6.986.842.700	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	375.842.700	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	01	Belanja Pegawai	89.920.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	285.922.700	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	2		BELANJA MODAL	6.611.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.611.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	9.042.408.960	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	416.867.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	01	Belanja Pegawai	117.880.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	298.987.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2		BELANJA MODAL	8.625.541.160	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.625.541.160	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	168.171.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	3.974.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	01	Belanja Pegawai	2.890.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.084.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	2		BELANJA MODAL	164.197.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.197.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	168.146.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	3.949.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1	01	Belanja Pegawai	2.790.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.159.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	2		BELANJA MODAL	164.197.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.197.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14				Pengadaan Mebel Sekolah	2.747.402.121	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1		BELANJA OPERASI	148.571.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	01	Belanja Pegawai	14.960.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	133.611.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2		BELANJA MODAL	2.598.831.121	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.600.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.589.231.121	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	14.589.880.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21	5	1		BELANJA OPERASI	9.500.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21	5	2		BELANJA MODAL	5.089.880.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.089.880.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.179.212.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	1		BELANJA OPERASI	54.212.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.212.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	2		BELANJA MODAL	1.125.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.125.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	720.571.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	1		BELANJA OPERASI	700.021.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	700.021.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	2		BELANJA MODAL	20.550.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.550.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	26				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.090.825.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	26	5	1		BELANJA OPERASI	7.090.825.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	26	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.090.825.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	891.294.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1		BELANJA OPERASI	891.294.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	891.294.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	350.460.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1		BELANJA OPERASI	317.560.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	317.560.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	2		BELANJA MODAL	32.900.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.900.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	367.320.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1		BELANJA OPERASI	349.995.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	349.995.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	2		BELANJA MODAL	17.325.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.325.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.944.449.350	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	1		BELANJA OPERASI	260.017.400	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	1	01	Belanja Pegawai	63.410.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	196.607.400	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	2		BELANJA MODAL	3.684.431.950	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.684.431.950	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**44.552.070.205**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02				Penambahan Ruang Kelas Baru	10.718.825.100	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	338.784.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	95.400.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	243.384.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	10.380.041.100	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.380.041.100	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5.648.935.760	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	331.133.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	49.500.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	281.633.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	2		BELANJA MODAL	5.317.802.160	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.317.802.160	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.478.674.720	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	678.587.520	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	01	Belanja Pegawai	31.120.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.908.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	05	Belanja Hibah	546.558.720	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2		BELANJA MODAL	800.087.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	800.087.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06				Pembangunan Laboratorium	3.903.592.810	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.453.689.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	01	Belanja Pegawai	38.900.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	114.789.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	05	Belanja Hibah	1.300.000.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	2		BELANJA MODAL	2.449.903.610	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.449.903.610	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08				Pembangunan Asrama Sekolah	5.540.508.720	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	180.166.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	01	Belanja Pegawai	36.500.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	143.666.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	2		BELANJA MODAL	5.360.342.120	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.360.342.120	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.922.023.440	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	171.956.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	01	Belanja Pegawai	29.700.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	142.256.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	2		BELANJA MODAL	1.750.067.440	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.750.067.440	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	964.616.280	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1		BELANJA OPERASI	83.456.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	01	Belanja Pegawai	12.580.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	70.876.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	2		BELANJA MODAL	881.160.280	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	881.160.280	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.124.221.300	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1		BELANJA OPERASI	76.876.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1	01	Belanja Pegawai	14.200.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	62.676.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2		BELANJA MODAL	1.047.345.300	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.047.345.300	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	664.056.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1		BELANJA OPERASI	64.056.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1	01	Belanja Pegawai	7.780.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	56.276.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	2		BELANJA MODAL	600.000.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	600.000.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25				Pengadaan Mebel Sekolah	192.040.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1		BELANJA OPERASI	49.260.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1	01	Belanja Pegawai	2.560.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	46.700.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	2		BELANJA MODAL	142.780.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.780.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	32				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	7.423.990.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	32	5	1		BELANJA OPERASI	4.923.990.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	32	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.923.990.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	32	5	2		BELANJA MODAL	2.500.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	32	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	195.794.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1		BELANJA OPERASI	40.769.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1	01	Belanja Pegawai	1.360.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.409.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	2		BELANJA MODAL	155.025.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.025.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	423.947.975	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1		BELANJA OPERASI	423.947.975	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	423.947.975	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	37				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	190.501.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1		BELANJA OPERASI	190.501.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	190.501.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	39				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.326.387.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	39	5	1		BELANJA OPERASI	3.326.387.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	39	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.326.387.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	479.508.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1		BELANJA OPERASI	469.618.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	469.618.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	2		BELANJA MODAL	9.890.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.890.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	229.831.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1		BELANJA OPERASI	214.853.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	214.853.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	2		BELANJA MODAL	14.978.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.978.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	42				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	124.615.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1		BELANJA OPERASI	124.615.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	124.615.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**2.996.964.200**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	370.878.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	370.878.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.110.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.803.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	05	Belanja Hibah	353.964.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	704.897.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	704.897.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	01	Belanja Pegawai	11.540.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	102.897.400	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	05	Belanja Hibah	590.460.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	100.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	15				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	149.996.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	15	5	1		BELANJA OPERASI	149.996.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	15	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.996.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	260.269.900	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1		BELANJA OPERASI	260.269.900	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	260.269.900	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	130.059.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1		BELANJA OPERASI	130.059.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	130.059.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18				Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.280.861.900	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1		BELANJA OPERASI	1.280.861.900	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	225.341.900	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1	05	Belanja Hibah	1.055.520.000	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**2.389.252.200**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	12				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	155.779.900	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	12	5	1		BELANJA OPERASI	155.779.900	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	155.779.900	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	13				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	104.080.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	13	5	1		BELANJA OPERASI	104.080.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	104.080.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	14				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	14	5	1		BELANJA OPERASI	150.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	15				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	149.995.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	15	5	1		BELANJA OPERASI	149.995.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	15	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.995.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	16				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	154.820.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	16	5	1		BELANJA OPERASI	154.820.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	16	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	154.820.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.674.577.300	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1		BELANJA OPERASI	1.674.577.300	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	115.947.300	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	05	Belanja Hibah	1.558.630.000	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**140.538.900**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**140.538.900**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.02	02				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	140.538.900	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	140.538.900	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	140.538.900	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**140.658.600**	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**140.658.600**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	01				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	140.658.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	140.658.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	140.658.600	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**144.307.425.920**	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**135.259.289.204**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	134.997.709.204	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	134.997.709.204	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	134.997.709.204	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	261.580.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	261.580.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	198.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.580.000	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**316.820.000**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.05	05				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	316.820.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.05	05	5	1		BELANJA OPERASI	316.820.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.05	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	316.820.000	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.719.224.000**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.558.453.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	509.063.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	01	Belanja Pegawai	1.260.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	507.803.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2		BELANJA MODAL	1.049.389.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.049.389.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.741.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	42.741.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.741.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	18.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.030.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	100.030.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.030.000	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**751.555.716**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	84.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	667.555.716	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	667.555.716	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	667.555.716	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.260.537.000**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.750.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	76.750.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	76.750.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.960.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	39.960.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	39.960.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	29.250.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	07	5	1			BELANJA OPERASI	29.250.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	29.250.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.114.577.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1			BELANJA OPERASI	1.323.577.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	01		Belanja Pegawai	12.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.311.577.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	2			BELANJA MODAL	4.791.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.791.000.000	
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**1.238.076.300**	
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**871.881.300**	
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**571.881.300**	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	571.881.300	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	571.881.300	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	571.881.300	
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**					**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**300.000.000**	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	300.000.000	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	300.000.000	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**366.195.000**	
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**366.195.000**	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.01	01					Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	366.195.000	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	366.195.000	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	366.195.000	
										Jumlah Belanja	**268.192.635.200**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(268.192.635.200)**	
0	**00**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**		
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**39.993.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	39.993.000	
									Jumlah Pendapatan	**39.993.000**	
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**100.171.177.147**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**54.984.324.062**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**15.140.901.274**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	785.196.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	212.298.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	210.298.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	572.897.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	572.897.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.148.622.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	655.735.640	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	01	Belanja Pegawai	15.610.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	640.125.640	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2		BELANJA MODAL	4.492.886.460	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.693.575	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.312.192.885	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	452.185.350	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	81.552.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	81.552.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	2		BELANJA MODAL	370.632.650	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.942.650	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.690.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.593.976.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1		BELANJA OPERASI	250.175.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1	01	Belanja Pegawai	4.080.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	246.095.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	2		BELANJA MODAL	6.343.801.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.343.801.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	16				Pengadaan Obat, Vaksin	1.303.834.977	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	16	5	1		BELANJA OPERASI	1.303.834.977	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	16	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	16	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.303.154.977	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17				Pengadaan Bahan Habis Pakai	757.086.847	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17	5	1		BELANJA OPERASI	757.086.847	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17	5	1	01	Belanja Pegawai	2.120.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	754.966.847	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20	5	1	01	Belanja Pegawai	40.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**39.697.612.788**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	815.039.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	815.039.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	815.039.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.129.699.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.129.699.800	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.059.949.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	69.750.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.166.040.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.166.040.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.166.040.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	04				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	711.040.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	711.040.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	711.040.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	05				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	470.525.460	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	470.525.460	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	470.525.460	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.029.647.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.029.647.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.029.647.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.117.926.798	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	1.117.926.798	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.117.926.798	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	08				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	517.319.623	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	517.319.623	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	517.319.623	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	273.087.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	273.087.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	273.087.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	614.849.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	614.849.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	614.849.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.140.898.950	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11	5	1		BELANJA OPERASI	1.140.898.950	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.898.950	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.390.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	12	5	1		BELANJA OPERASI	1.390.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.390.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	13				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	149.887.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	13	5	1		BELANJA OPERASI	149.887.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.887.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.016.220.307	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14	5	1		BELANJA OPERASI	1.016.220.307	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14	5	1	01	Belanja Pegawai	4.020.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.012.200.307	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	15	5	1		BELANJA OPERASI	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	15	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	16				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	16	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	16	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.112.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	17	5	1		BELANJA OPERASI	50.112.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.112.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	18				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	200.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	18	5	1		BELANJA OPERASI	200.000.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	18	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	19				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	49.999.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	19	5	1		BELANJA OPERASI	49.999.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	19	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	128.146.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	20	5	1		BELANJA OPERASI	128.146.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	20	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	128.146.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	884.423.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	25	5	1		BELANJA OPERASI	884.423.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	25	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	884.423.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.689.339.524	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26	5	1		BELANJA OPERASI	2.689.339.524	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.489.339.524	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26	5	1	05	Belanja Hibah	200.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	29				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	29	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	29	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	999.999.650	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1		BELANJA OPERASI	776.994.650	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	776.994.650	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2		BELANJA MODAL	223.005.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.010.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	202.995.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33				Operasional Pelayanan Puskesmas	21.710.405.276	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1		BELANJA OPERASI	20.897.261.072	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1	01	Belanja Pegawai	3.680.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.893.581.072	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2		BELANJA MODAL	813.144.204	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	33	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	813.144.204	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	34				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	427.153.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	34	5	1		BELANJA OPERASI	427.153.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	34	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	427.153.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	35				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	765.851.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	35	5	1		BELANJA OPERASI	765.851.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	35	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	765.851.500	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**145.810.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	02				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03				Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	95.810.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	75.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	2		BELANJA MODAL	20.660.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.660.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**181.700.000**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**60.000.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	25.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	25.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02				Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	35.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	35.000.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**121.700.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	01				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	121.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	121.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	121.700.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**100.000.000**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**50.000.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**04**	**2.03**	**00**				**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**50.000.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.03	01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**173.577.000**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**05**	**2.02**	**00**				**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**75.000.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.02	01				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	75.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	75.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**05**	**2.03**	**00**				**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**98.577.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.03	01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	98.577.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	98.577.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	98.577.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**44.731.576.085**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60.000.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**44.055.544.935**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.465.512.829	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	36.465.512.829	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	36.465.512.829	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.590.032.106	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.590.032.106	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	254.100.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.335.932.106	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**356.034.850**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.995.750	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.995.750	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.995.750	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.017.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	2		BELANJA MODAL	81.017.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.017.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.999.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	34.999.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.996.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	59.996.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.996.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.026.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	100.026.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.026.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80.000.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	80.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**179.996.300**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.996.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	79.996.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.996.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.999.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	99.999.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.800	
									Jumlah Belanja	**100.171.177.147**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(100.131.184.147)**	
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**11.585.805.730**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	11.585.805.730	
									Jumlah Pendapatan	**11.585.805.730**	
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**27.322.485.477**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**4.183.463.788**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**02**	**2.01**	**00**				**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.542.723.788**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.705.211.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	52.518.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.518.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12	5	2		BELANJA MODAL	1.652.693.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.652.693.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	16				Pengadaan Obat, Vaksin	707.420.908	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	16	5	1		BELANJA OPERASI	707.420.908	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	16	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	707.420.908	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	17				Pengadaan Bahan Habis Pakai	868.731.180	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	17	5	1		BELANJA OPERASI	868.731.180	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	17	5	1	01	Belanja Pegawai	2.040.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	866.691.180	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	20				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	261.360.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	20	5	1		BELANJA OPERASI	261.360.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	20	5	1	01	Belanja Pegawai	1.360.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	20	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**02**	**2.02**	**00**				**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**640.740.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.02	32				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	640.740.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.02	32	5	1		BELANJA OPERASI	640.740.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.02	32	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	640.740.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**23.139.021.689**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19.625.730.029**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.451.079.029	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.451.079.029	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	12.451.079.029	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.174.651.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.174.651.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	81.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.093.651.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**777.653.400**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.552.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	22.552.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.552.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	630.829.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	630.829.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	630.829.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.272.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	124.272.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	124.272.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.962.543.260**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	426.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	426.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	426.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.536.043.260	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.536.043.260	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.536.043.260	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**773.095.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	302.075.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	302.075.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	302.075.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	471.020.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	471.020.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	01	Belanja Pegawai	2.720.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	468.300.000	
									Jumlah Belanja	**27.322.485.477**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(15.736.679.747)**	
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**518.387.472**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	518.387.472	
									Jumlah Pendapatan	**518.387.472**	
0	**00**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**150.658.436.808**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**7.425.241.102**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**4.173.918.102**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	932.914.002	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	919.315.002	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	5.950.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	913.365.002	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	13.599.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.599.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	133.055.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	118.055.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.375.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	2		BELANJA MODAL	15.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18				Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	3.107.949.100	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	1		BELANJA OPERASI	349.396.900	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	1	01	Belanja Pegawai	9.900.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	339.496.900	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	2		BELANJA MODAL	2.758.552.200	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.400.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.709.152.200	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**3.251.323.000**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	246.844.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	246.844.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.360.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	245.484.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.796.327.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	196.327.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	4.490.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	191.837.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	1.600.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.600.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.208.152.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1		BELANJA OPERASI	1.208.152.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1	01	Belanja Pegawai	6.800.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.201.352.000	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**16.384.562.658**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**16.384.562.658**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.193.975.700	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.166.725.700	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	16.580.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.145.700	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	27.250.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.250.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02				Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	788.889.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	788.889.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	4.320.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	784.569.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.989.620.400	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	139.620.400	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1	01	Belanja Pegawai	10.260.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	129.360.400	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	2		BELANJA MODAL	2.850.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.850.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	723.363.850	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	223.363.850	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	223.363.850	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	2		BELANJA MODAL	500.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	8.525.394.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	125.394.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	1	01	Belanja Pegawai	15.480.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	109.914.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	2		BELANJA MODAL	8.400.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.400.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15				Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	2.163.319.708	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1		BELANJA OPERASI	1.857.818.800	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1	01	Belanja Pegawai	4.760.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.853.058.800	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2		BELANJA MODAL	305.500.908	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.500.908	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**614.119.600**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**614.119.600**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	614.119.600	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	614.119.600	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	8.400.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	605.719.600	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**1.929.949.900**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.929.949.900**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	914.925.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	914.925.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	7.200.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	907.725.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.015.024.900	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	248.274.900	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	248.274.900	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	2		BELANJA MODAL	766.750.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	766.750.000	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**08**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**15.451.612.600**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**08**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**15.451.612.600**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	15.451.612.600	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.083.573.600	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	360.770.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.722.803.600	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	11.368.039.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	2	01	Belanja Modal Tanah	4.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.599.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.350.440.000	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**10**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**95.750.229.053**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**10**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**95.750.229.053**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23				Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3.677.370.785	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23	5	1		BELANJA OPERASI	3.677.370.785	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23	5	1	01	Belanja Pegawai	12.240.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.665.130.785	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	7.042.563.491	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.042.563.491	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	22.240.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.997.323.491	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	23.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	814.236.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	814.236.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04	5	1	01	Belanja Pegawai	4.320.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	809.916.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05				Pembangunan Jalan	18.314.065.191	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	388.655.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	1	01	Belanja Pegawai	41.160.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	347.495.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	2		BELANJA MODAL	17.925.410.191	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	2	01	Belanja Modal Tanah	802.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.123.410.191	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08				Rekonstruksi Jalan	60.475.600.586	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	771.596.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	1	01	Belanja Pegawai	37.710.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	733.886.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2		BELANJA MODAL	59.704.004.586	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.340.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.507.664.586	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10				Pemeliharaan Berkala Jalan	526.848.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	126.848.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	1	01	Belanja Pegawai	2.040.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	124.808.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	2		BELANJA MODAL	400.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11				Pemeliharaan Rutin Jalan	456.536.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	456.536.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	5	1	01	Belanja Pegawai	8.180.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	448.356.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12				Pembangunan Jembatan	4.443.009.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	235.409.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	1	01	Belanja Pegawai	29.820.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	205.589.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	2		BELANJA MODAL	4.207.599.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.207.599.500	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**11**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**125.041.000**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**11**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**125.041.000**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11	2.01	07				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	125.041.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	125.041.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	125.041.000	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**12**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**2.037.972.919**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**12**	**2.01**	**00**				**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**395.474.000**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	274.503.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	274.503.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	450.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	274.053.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	03				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	63.688.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	63.688.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.688.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	04				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	57.283.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	57.283.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.283.000	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**12**	**2.02**	**00**				**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**1.142.802.859**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.142.802.859	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.089.923.859	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	3.520.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.086.403.859	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	52.879.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.879.000	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**12**	**2.03**	**00**				**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**439.198.060**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	281.916.400	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	216.916.400	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	1	01	Belanja Pegawai	760.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	216.156.400	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	2		BELANJA MODAL	65.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02				Sistem Informasi Penataan Ruang	157.281.660	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	106.629.660	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	1	01	Belanja Pegawai	900.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	105.729.660	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	2		BELANJA MODAL	50.652.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.652.000	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**12**	**2.04**	**00**				**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**60.498.000**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.04	04				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	60.498.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	60.498.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.498.000	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.939.707.976**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**229.066.500**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	229.066.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	164.556.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.280.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	162.276.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	64.510.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.510.000	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.872.532.956**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.251.184.956	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.251.184.956	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	6.251.184.956	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.621.348.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.621.348.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	254.700.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.366.648.000	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**579.105.220**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.900.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	32.900.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.900.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	215.405.220	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	213.915.220	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1	01	Belanja Pegawai	3.040.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	210.875.220	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	2		BELANJA MODAL	1.490.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.490.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95.660.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	95.660.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	01	Belanja Pegawai	760.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	94.900.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	135.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	135.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.140.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	100.140.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.140.000	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**101.600.000**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.600.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	101.600.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	101.600.000	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.157.403.300**	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168.740.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	168.740.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	168.740.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	702.669.600	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	652.669.600	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	01	Belanja Pegawai	3.800.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	648.869.600	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	2		BELANJA MODAL	50.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.080.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	50.080.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.080.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.913.700	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	190.206.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	01	Belanja Pegawai	2.200.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	188.006.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	45.707.200	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.707.200	
									Jumlah Belanja	**150.658.436.808**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(150.140.049.336)**	
0	**00**	**1.03.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**27.695.668.897**	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**8.786.343.700**	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**85.324.900**	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.01	01				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	85.324.900	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	85.324.900	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.324.900	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**96.334.000**	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.02	01				Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	96.334.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	96.334.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	96.334.000	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**8.446.072.000**	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	355.523.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	355.523.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	5	1	01	Belanja Pegawai	32.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	323.523.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	02				Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	33.560.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	33.560.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.560.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	7.473.584.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	7.087.784.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1	01	Belanja Pegawai	152.250.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.935.534.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	2		BELANJA MODAL	385.800.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	376.800.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	583.405.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	574.405.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	574.405.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	5	2		BELANJA MODAL	9.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**86.560.000**	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.04	02				Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	86.560.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	86.560.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	86.560.000	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**02**	**2.06**	**00**				**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**72.052.800**	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.06	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	72.052.800	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	72.052.800	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.052.800	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**10.330.873.900**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**394.999.400**	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08				Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	394.999.400	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	394.999.400	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	01	Belanja Pegawai	480.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	394.519.400	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**9.935.874.500**	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	9.455.824.100	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	9.455.824.100	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	01	Belanja Pegawai	263.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.192.824.100	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03				Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	295.640.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	291.140.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1	01	Belanja Pegawai	76.250.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	214.890.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	2		BELANJA MODAL	4.500.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	184.410.400	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	5	1		BELANJA OPERASI	175.410.400	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	175.410.400	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	5	2		BELANJA MODAL	9.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**4.536.061.000**	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**4.536.061.000**	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.477.448.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	670.274.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	36.060.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	634.214.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	3.807.174.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.776.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	945.798.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.795.600.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	05				Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	58.613.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	58.613.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	58.613.000	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.042.390.297**	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**38.988.000**	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.988.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	38.988.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	8.250.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.738.000	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.907.061.697**	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.822.101.697	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.822.101.697	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.822.101.697	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.960.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	84.960.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	84.960.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**281.499.600**	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.384.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	33.384.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.384.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.063.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	75.063.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.063.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.115.600	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	33.115.600	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.115.600	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.995.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	19.995.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.995.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.942.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	99.942.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.942.000	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**110.155.000**	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	49.300.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	49.300.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.300.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.855.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.040.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	2.040.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	58.815.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.815.000	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**540.980.000**	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	93.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	447.980.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	447.980.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	447.980.000	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**163.706.000**	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.180.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	58.180.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	58.180.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.228.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	49.228.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.228.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.950.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	29.950.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.950.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.348.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	26.348.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	26.348.000	
										Jumlah Belanja	**27.695.668.897**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(27.695.668.897)**	
0	**00**	**1.04.2.10.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**		
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**5.171.477.301**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**109.131.800**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**66.003.800**	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	28.339.800	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	28.339.800	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.339.800	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	02				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	37.664.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	37.664.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.664.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**43.128.000**	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.03	01				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	43.128.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	43.128.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.128.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**295.136.500**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**86.084.000**	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.486.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.486.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.486.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.040.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.420.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	10.620.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.620.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	03				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	21.270.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	21.270.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.270.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04				Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.288.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	15.068.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	1	01	Belanja Pegawai	450.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.618.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	2		BELANJA MODAL	20.220.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.220.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**04**	**2.02**	**00**				**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**14.543.500**	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.02	01				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	14.543.500	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.543.500	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.543.500	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**04**	**2.03**	**00**				**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**92.465.000**	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.03	01				Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	92.465.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	92.465.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	92.465.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**04**	**2.04**	**00**				**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**102.044.000**	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	01				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	47.676.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	47.676.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.676.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	02				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	54.368.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	54.368.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.368.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.767.209.001**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.169.226.401**	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.120.026.401	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.120.026.401	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.120.026.401	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.200.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	49.200.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	49.200.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**96.551.600**	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.911.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.911.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.911.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.064.600	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	48.064.600	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.064.600	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	13.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.076.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	26.076.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.076.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.341.536.000**	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.800.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	83.800.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	83.800.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.257.736.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.257.736.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.257.736.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**159.895.000**	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.600.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.600.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.405.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	133.405.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	133.405.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.890.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.890.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.890.000	
									Jumlah Belanja	**5.171.477.301**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(5.171.477.301)**	
0	**00**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.1.06.0.00.05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**4.520.953.893**	
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**766.313.050**	
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**84.698.100**	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.01	02				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	84.698.100	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	84.698.100	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	84.698.100	
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**346.044.950**	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	02				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	84.252.350	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	84.252.350	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	84.252.350	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	189.139.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	119.139.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	119.139.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	2		BELANJA MODAL	70.000.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	72.653.600	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	72.653.600	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	71.973.600	
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**335.570.000**	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	03				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	220.865.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	220.865.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	220.865.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	04				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	114.705.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	114.705.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	114.705.000	
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.754.640.843**	
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.753.259.243**	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.753.259.243	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.753.259.243	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.753.259.243	
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**121.471.600**	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.014.600	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	41.014.600	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	41.014.600	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.875.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.875.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.875.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.990.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	9.990.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.592.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	64.592.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.1.06.0.00.05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	64.592.000	
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**607.624.000**	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.000.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	58.000.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	549.624.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	549.624.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	549.624.000	
1	**05**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**272.286.000**	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.406.250	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	45.406.250	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.406.250	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.629.750	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	180.629.750	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	180.629.750	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.490.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	16.490.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.490.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.760.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	29.760.000	
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.760.000	
									Jumlah Belanja	**4.520.953.893**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(4.520.953.893)**	
0	**00**	**1.05.1.06.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**6.883.809.237**	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**103.880.100**	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**45.026.300**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02				Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	45.026.300	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	45.026.300	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.026.300	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**58.853.800**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	01				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	58.853.800	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	58.853.800	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	58.853.800	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.363.992.600**	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**1.363.992.600**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	01				Penyediaan Permakanan	1.119.795.100	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.119.795.100	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	598.045.100	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	01	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	521.750.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	05				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	143.544.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	143.544.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	143.544.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	12				Pemberian Layanan Rujukan	100.652.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	100.652.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.652.600	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**431.029.400**	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**05**	**2.02**	**00**				**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**431.029.400**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	02				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	317.374.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	317.374.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	317.374.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	03				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	113.655.400	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	113.655.400	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	113.655.400	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**1.119.140.550**	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**897.258.550**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	897.258.550	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	197.258.550	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	197.258.550	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	2		BELANJA MODAL	700.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000.000	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**06**	**2.02**	**00**				**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**221.882.000**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	221.882.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	171.882.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	171.882.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	50.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.865.766.587**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.290.892.087**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.277.092.087	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.277.092.087	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.277.092.087	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.800.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	13.800.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	13.800.000	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**117.187.900**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	02	5	2		BELANJA MODAL	18.500.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.500.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.872.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	38.132.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.132.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	2		BELANJA MODAL	2.740.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.740.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.025.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	7.025.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.025.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.790.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	45.790.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.790.000	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**275.550.000**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.900.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	47.900.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.900.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.650.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	227.650.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	227.650.000	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**182.136.600**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.497.250	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	23.497.250	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.497.250	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.841.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	29.841.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.841.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.080.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	30.080.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.080.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.717.750	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	98.717.750	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	98.717.750	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**1.487.560.650**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**656.424.000**	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**86.437.000**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	27.218.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	27.218.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.218.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	03				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	59.219.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	59.219.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.219.000	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**569.987.000**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	02				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	569.987.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	569.987.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	569.987.000	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**147.892.500**	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**59.292.500**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.01	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.292.500	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	59.292.500	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.292.500	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**88.600.000**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.02	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	88.600.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	88.600.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	88.600.000	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**118.124.750**	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**118.124.750**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	01				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100.473.750	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	100.473.750	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.473.750	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.651.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	17.651.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.651.000	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**07**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**565.119.400**	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**07**	**2.01**	**00**				**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**165.389.900**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	01				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	71.455.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	71.455.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	71.455.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	93.934.900	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	93.934.900	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	93.934.900	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**07**	**2.02**	**00**				**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**297.333.500**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.02	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	297.333.500	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	297.333.500	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	297.333.500	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**07**	**2.03**	**00**				**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**102.396.000**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.396.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	86.946.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	86.946.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02	5	2		BELANJA MODAL	15.450.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.03	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.450.000	
									Jumlah Belanja	**8.371.369.887**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(8.371.369.887)**	
0	**00**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.3.27.0.00.09 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**09**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**7.732.875.069**	
2	**09**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.732.875.069**	
2	**09**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.482.331.069**	
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.482.331.069	
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.482.331.069	
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	7.482.331.069	
2	**09**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**173.044.000**	
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.998.000	
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	83.998.000	
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	83.998.000	
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000	
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	14.000.000	
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000	
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.046.000	
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	75.046.000	
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.046.000	
2	**09**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**77.500.000**	
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.500.000	
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	77.500.000	
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000	
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**7.736.854.900**	
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**5.991.176.100**	
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**3.705.920.000**	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.705.920.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.705.920.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	6.800.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.699.120.000	
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**02**	**2.06**	**00**				**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**2.285.256.100**	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01				Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.285.256.100	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.285.256.100	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.250.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.283.006.100	
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**620.909.800**	
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**620.909.800**	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	620.909.800	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	64.109.800	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	2.550.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	61.559.800	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	2		BELANJA MODAL	556.800.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	556.800.000	
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.124.769.000**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.3.27.0.00.09 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**974.456.000**	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	974.456.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	974.456.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	19.700.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	954.756.000	
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**89.933.000**	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.933.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	65.933.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	65.933.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.000.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	24.000.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60.380.000**	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.380.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	53.380.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.380.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.000.000	
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	
									Jumlah Belanja	**15.469.729.969**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(15.469.729.969)**	
0	**00**	**2.09.3.27.0.00.09.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**5.802.442.030**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**218.917.500**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**218.917.500**	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	218.917.500	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	218.917.500	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	218.917.500	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1.406.468.500**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**1.406.468.500**	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.406.468.500	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	66.468.500	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.760.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.708.500	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	1.340.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.340.000.000	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**139.896.000**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**139.896.000**	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	03				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	139.896.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	139.896.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	139.896.000	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**11**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**388.423.800**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**11**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Sampah**	**388.423.800**	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	144.711.500	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	144.711.500	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03	5	1	01	Belanja Pegawai	480.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	144.231.500	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	243.712.300	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	20.194.300	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	1	01	Belanja Pegawai	1.360.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.834.300	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	2		BELANJA MODAL	223.518.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.518.000	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.648.736.230**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.703.223.406**	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.703.223.406	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.703.223.406	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.703.223.406	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**298.547.900**	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.840.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.840.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.840.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.039.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	165.039.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	165.039.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.804.900	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.804.900	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.804.900	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.990.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	18.990.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.990.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.874.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	97.874.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	97.874.000	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**396.696.000**	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	48.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348.696.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	348.696.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	348.696.000	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**250.268.924**	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.130.717	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	53.130.717	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.130.717	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.028.207	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	187.028.207	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	187.028.207	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.110.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	10.110.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.110.000	
									Jumlah Belanja	**5.802.442.030**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(5.802.442.030)**	
0	**00**	**2.11.0.00.0.00.11.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**4.880.115.497**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**258.284.200**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**258.284.200**	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	04				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	258.284.200	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	258.284.200	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	258.284.200	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**131.506.900**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**131.506.900**	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	03	2.01	02				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	131.506.900	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	131.506.900	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	131.506.900	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**127.201.750**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**04**	**2.03**	**00**				**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**127.201.750**	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	04	2.03	07				Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	127.201.750	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	04	2.03	07	5	1		BELANJA OPERASI	127.201.750	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	04	2.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	127.201.750	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**3.301.000**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyusunan Profil Kependudukan**	**3.301.000**	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	05	2.01	02				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	3.301.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.301.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.301.000	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.359.821.647**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.941.299.847**	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.905.299.847	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.905.299.847	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.905.299.847	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.000.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	36.000.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	36.000.000	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**831.489.800**	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	70.000.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	499.710.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.210.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	1	01	Belanja Pegawai	1.210.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	2		BELANJA MODAL	498.500.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	498.500.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.764.200	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	120.764.200	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	04	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	120.084.200	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.109.600	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	26.109.600	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.109.600	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	06	5	1			BELANJA OPERASI	14.400.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	14.400.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.506.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	100.506.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	100.506.000	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**538.372.000**	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.800.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	73.800.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	73.800.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	464.572.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	464.572.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	464.572.000	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48.660.000**	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.660.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	48.660.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	48.660.000	
										Jumlah Belanja	**4.880.115.497**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(4.880.115.497)**	
0	**00**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**		
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**5.215.898.408**	
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENATAAN DESA**	**231.886.100**	
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**231.886.100**	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	03				Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	231.886.100	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	231.886.100	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	231.886.100	
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**195.840.000**	
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**195.840.000**	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	13				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	45.840.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	13	5	1		BELANJA OPERASI	45.840.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.840.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	15				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	150.000.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	15	5	1		BELANJA OPERASI	150.000.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	15	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**526.345.000**	
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**526.345.000**	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	05	2.01	09				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	526.345.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	05	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	526.345.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	05	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	526.345.000	
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.261.827.308**	
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.185.256.308**	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.155.656.308	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.155.656.308	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.155.656.308	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.600.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	29.600.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	29.600.000	
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**174.967.000**	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.000.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.378.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	02	5	2		BELANJA MODAL	11.378.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.378.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.319.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	50.319.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.319.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.170.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	16.170.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.170.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.100.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	91.100.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	91.100.000	
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**811.944.000**	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	72.000.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	739.944.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	739.944.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	739.944.000	
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**44.000.000**	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.000.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	29.000.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000	
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**01**	**2.13**	**00**				**Penataan Organisasi**	**45.660.000**	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.13	04				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	45.660.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.13	04	5	1		BELANJA OPERASI	45.660.000	
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.13	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.660.000	
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**2.927.799.400**	
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**267.729.000**	
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**172.094.000**	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	02				Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	15				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	72.094.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	15	5	1		BELANJA OPERASI	72.094.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	15	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.094.000	
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**95.635.000**	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.02	13				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	95.635.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.02	13	5	1		BELANJA OPERASI	95.635.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.02	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	95.635.000	
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**1.722.472.400**	
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**828.154.000**	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	04				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	149.992.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	149.992.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.992.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	06				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	130.010.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	130.010.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	130.010.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	07				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	480.302.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	480.302.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	480.302.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	08				Pengendalian Program KKBPK	67.850.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	67.850.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	67.850.000	
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**92.619.000**	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.02	04				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	92.619.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	92.619.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	92.619.000	
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**417.199.400**	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	01				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.600.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.600.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	03				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	228.854.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	228.854.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	228.854.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	148.455.400	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	8.455.400	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	5	1	01	Belanja Pegawai	2.040.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.415.400	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	5	2		BELANJA MODAL	140.000.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.000.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	08				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.290.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	08	5	1		BELANJA OPERASI	27.290.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.290.000	
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**03**	**2.04**	**00**				**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**384.500.000**	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.04	03				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	384.500.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	384.500.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	384.500.000	
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**937.598.000**	
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**937.598.000**	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	02				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	360.000.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	04				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	249.998.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	249.998.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	249.998.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	05				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	327.600.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	327.600.000	
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	327.600.000	
									Jumlah Belanja	**8.143.697.808**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(8.143.697.808)**	
0	**00**	**2.13.2.14.0.00.13.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**228.529.327**	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	228.529.327	
									Jumlah Pendapatan	**228.529.327**	
0	**00**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**17.678.763.844**	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**1.157.158.336**	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**333.878.200**	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	333.878.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	333.878.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.280.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	331.598.200	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**55.260.336**	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	55.260.336	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	55.260.336	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.580.336	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**02**	**2.09**	**00**				**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**541.409.800**	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	541.409.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	83.697.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.550.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	81.147.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	2		BELANJA MODAL	457.712.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	457.712.000	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**02**	**2.12**	**00**				**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**67.510.600**	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.12	02				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.510.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.12	02	5	1		BELANJA OPERASI	67.510.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.12	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	67.510.600	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**02**	**2.16**	**00**				**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**159.099.400**	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.16	01				Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	159.099.400	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.16	01	5	1		BELANJA OPERASI	159.099.400	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.16	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	159.099.400	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**9.763.358.099**	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**03**	**2.07**	**00**				**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**7.060.822.283**	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.060.822.283	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.060.822.283	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.822.283	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	5	1	04	Belanja Subsidi	5.700.000.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**03**	**2.12**	**00**				**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**2.702.535.816**	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	01				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	104.840.500	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	01	5	1		BELANJA OPERASI	104.840.500	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	104.840.500	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.597.695.316	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.597.695.316	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	5	1	01	Belanja Pegawai	8.520.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.589.175.316	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.758.247.409**	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.113.097.625**	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.021.397.625	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.021.397.625	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	5.021.397.625	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.700.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	91.700.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	76.700.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**234.001.810**	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.063.210	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	21.063.210	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.063.210	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.010.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	75.010.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.010.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.079.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	18.079.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.079.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.995.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	19.995.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.995.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.854.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	99.854.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.854.000	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.345.218.974**	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	132.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.213.218.974	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.213.218.974	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.213.218.974	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.929.000**	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.929.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	55.929.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.929.000	
									Jumlah Belanja	**17.678.763.844**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(17.450.234.517)**	
0	**00**	**2.15.0.00.0.00.15.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**		
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**7.372.127.566**	
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**592.106.200**	
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**592.106.200**	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	06					Pelayanan Informasi Publik	76.032.400	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	76.032.400	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	76.032.400	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07					Layanan Hubungan Media	327.054.200	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	304.253.500	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	304.253.500	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07	5	2			BELANJA MODAL	22.800.700	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.800.700	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	12					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	36.872.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	12	5	1			BELANJA OPERASI	36.872.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	12	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	36.872.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13					Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	152.147.600	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	1			BELANJA OPERASI	76.341.600	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	1	01		Belanja Pegawai	2.880.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	73.461.600	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	2			BELANJA MODAL	75.806.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.806.000	
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**3.445.833.800**	
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**3.205.200.000**	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.01	03					Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.205.200.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	3.205.200.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.01	03	5	1	01		Belanja Pegawai	450.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.204.750.000	
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**03**	**2.02**	**00**					**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**240.633.800**	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10					Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	240.633.800	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10	5	1			BELANJA OPERASI	240.633.800	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10	5	1	01		Belanja Pegawai	760.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	239.873.800	
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.334.187.566**	
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**01**	**2.01**	**00**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40.000.000**	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	40.000.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.267.940.966**	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.231.940.966	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.231.940.966	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	2.231.940.966	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.000.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	36.000.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	02	5	1	01		Belanja Pegawai	36.000.000	
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**304.644.000**	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.060.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.060.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.060.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.000.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	110.000.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.000.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	65.000.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.990.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	15.990.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.990.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.594.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	100.594.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.594.000	
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**34.970.000**	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	34.970.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.010.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.330.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	32.960.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.960.000	
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**457.716.000**	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	96.000.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.716.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	361.716.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	361.716.000	
2	**16**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**228.916.600**	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.994.600	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	98.994.600	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	98.994.600	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.930.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	49.930.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.930.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.992.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	79.992.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.312.000	
									Jumlah Belanja	**7.372.127.566**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(7.372.127.566)**	
0	**00**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**16.575.000**	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	16.575.000	
									Jumlah Pendapatan	**16.575.000**	
0	**00**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**6.095.057.249**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**478.525.300**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**478.525.300**	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01	01				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	478.525.300	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	478.525.300	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	478.525.300	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**149.862.800**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**149.862.800**	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	06	2.01	01				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	149.862.800	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	06	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	149.862.800	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.862.800	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**07**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**92.213.600**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**07**	**2.01**	**00**				**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**92.213.600**	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07	2.01	05				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	92.213.600	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	92.213.600	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	92.213.600	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**08**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**2.499.693.400**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**08**	**2.01**	**00**				**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**2.499.693.400**	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2.499.693.400	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.499.693.400	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	13.430.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.486.263.400	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.874.762.149**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.609.027.949**	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.555.627.949	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.555.627.949	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.555.627.949	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.400.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	53.400.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	53.400.000	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**176.734.200**	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.638.200	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	52.638.200	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.638.200	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.020.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	14.020.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.020.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.076.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	95.076.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	95.076.000	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**54.000.000**	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	54.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**35.000.000**	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	35.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**167.914.900**	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**167.914.900**	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**167.914.900**	
3	30	2.17.3.30.3.31.17.0000	03	2.01	02				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	167.914.900	
3	30	2.17.3.30.3.31.17.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	167.914.900	
3	30	2.17.3.30.3.31.17.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	167.914.900	
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**4.067.538.500**	
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**3.917.358.500**	
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**3.917.358.500**	
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.917.358.500	
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.917.358.500	
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	01	Belanja Pegawai	9.670.000	
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.907.688.500	
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**150.180.000**	
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**150.180.000**	
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.180.000	
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	150.180.000	
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.180.000	
									Jumlah Belanja	**10.330.510.649**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(10.313.935.649)**	
0	**00**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.2.07.0.00.18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**07**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**83.363.200**	
2	**07**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**36.664.600**	
2	**07**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**36.664.600**	
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	02	2.01	01				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	36.664.600	
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	36.664.600	
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.664.600	
2	**07**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**46.698.600**	
2	**07**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**46.698.600**	
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	03	2.01	02				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	46.698.600	
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	46.698.600	
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	46.698.600	
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**3.867.833.790**	
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**76.813.000**	
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**76.813.000**	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	04	2.01	01				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	76.813.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	76.813.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.813.000	
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**480.000.000**	
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**480.000.000**	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	263.310.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	263.310.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	263.310.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	216.690.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	216.690.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	216.690.000	
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.311.020.790**	
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.669.516.030**	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.634.716.030	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.634.716.030	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.634.716.030	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.800.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	34.800.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	34.800.000	
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**01**	**2.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**11.244.000**	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.05	02				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.244.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	11.244.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.244.000	
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**276.056.200**	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.717.500	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.717.500	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.717.500	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.2.07.0.00.18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.493.200	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	148.493.200	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	04	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	147.813.200	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.801.500	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	18.801.500	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.801.500	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.044.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	100.044.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.044.000	
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**291.367.060**	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.800.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	100.800.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.800.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.567.060	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	190.567.060	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	190.567.060	
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.837.500**	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.487.500	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	47.487.500	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.487.500	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.350.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	15.350.000	
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.350.000	
									Jumlah Belanja	**3.951.196.990**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(3.951.196.990)**	
0	**00**	**2.18.2.07.0.00.18.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**15.171.502.146**	
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**12.337.064.124**	
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.319.854.520**	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	303.930.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.930.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.930.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	300.000.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	543.854.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	43.854.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	3.630.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.224.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	500.000.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	04				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	50.000.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	06				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	219.790.520	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	219.790.520	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	219.790.520	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	09				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	202.280.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	2.280.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	09	5	1	01	Belanja Pegawai	2.280.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	09	5	2		BELANJA MODAL	200.000.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	09	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000	
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**11.017.209.604**	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	01				Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	224.205.800	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	224.205.800	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	224.205.800	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.793.003.804	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	593.004.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	14.790.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	578.214.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	10.199.999.804	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	2	01	Belanja Modal Tanah	200.000.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.999.999.804	
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.834.438.022**	
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.573.000**	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.573.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	21.573.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.573.000	
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.350.409.022**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.294.609.022	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.294.609.022	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.294.609.022	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.800.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	55.800.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	55.800.000	
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**182.416.000**	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.286.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	40.286.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.286.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.695.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	10.695.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.695.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.005.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	10.005.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.005.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.430.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	111.430.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	111.430.000	
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17.710.000**	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.710.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	17.710.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.710.000	
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**184.010.000**	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.800.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	11.800.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.210.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	172.210.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	172.210.000	
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78.320.000**	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.250.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	58.250.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	58.250.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.070.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.070.000	
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.070.000	
2	**24**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**167.576.700**	
2	**24**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**167.576.700**	
2	**24**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**135.236.700**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	135.236.700	
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	135.236.700	
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	135.236.700	
2	**24**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**32.340.000**	
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.03	02				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	32.340.000	
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	32.340.000	
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.340.000	
									Jumlah Belanja	**15.339.078.846**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(15.339.078.846)**	
0	**00**	**2.24.2.23.0.00.23.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**195.185.400**	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	195.185.400	
									Jumlah Pendapatan	**195.185.400**	
0	**00**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**24.227.200.375**	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**18.772.729.250**	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**18.684.489.400**	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	18.684.489.400	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	18.684.489.400	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	11.100.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.673.389.400	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**88.239.850**	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.03	02				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	88.239.850	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	88.239.850	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	88.239.850	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**492.056.760**	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**04**	**2.02**	**00**				**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**216.616.840**	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04				Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	216.616.840	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	216.616.840	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	215.936.840	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**04**	**2.04**	**00**				**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**275.439.920**	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	275.439.920	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	148.439.920	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	1	01	Belanja Pegawai	480.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	147.959.920	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	2		BELANJA MODAL	127.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.04	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.000.000	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**229.904.000**	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**29.999.900**	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.01	01				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.999.900	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	29.999.900	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.900	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**06**	**2.02**	**00**				**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**99.914.900**	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.02	01				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	99.914.900	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	99.914.900	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.914.900	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**06**	**2.03**	**00**				**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**99.989.200**	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.03	01				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.989.200	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	99.989.200	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.989.200	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.732.510.365**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.134.548.865**	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.708.671.365	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.708.671.365	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.708.671.365	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	425.877.500	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	425.877.500	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	17.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	408.877.500	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**163.261.500**	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.750.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.750.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.329.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	29.329.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.329.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.486.500	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	9.486.500	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.486.500	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.696.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	99.696.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.696.000	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**348.000.000**	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	348.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	348.000.000	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**86.700.000**	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	75.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.700.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	11.700.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000	
									Jumlah Belanja	**24.227.200.375**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(24.032.014.975)**	
0	**00**	**3.25.0.00.0.00.25.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.2.19.0.00.26 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**8.525.800.000**	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	8.525.800.000	
									Jumlah Pendapatan	**8.525.800.000**	
0	**00**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**19**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**703.643.550**	
2	**19**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**500.000.000**	
2	**19**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**500.000.000**	
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	500.000.000	
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	485.000.000	
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	450.000	
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	484.550.000	
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	15.000.000	
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	
2	**19**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**203.643.550**	
2	**19**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**03**	**2.05**	**00**				**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**203.643.550**	
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.05	01				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	203.643.550	
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.05	01	5	1		BELANJA OPERASI	203.643.550	
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	203.643.550	
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**7.448.632.006**	
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**1.282.394.050**	
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**1.150.000.150**	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.050.000.150	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	103.525.150	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	1	01	Belanja Pegawai	3.740.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.785.150	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	2		BELANJA MODAL	946.475.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	946.475.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	05				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**132.393.900**	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03	03				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	132.393.900	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	132.393.900	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	132.393.900	
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**167.710.000**	
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**167.710.000**	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	01				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	67.710.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	67.710.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	67.710.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	02				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.2.19.0.00.26 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**630.833.000**	
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**630.833.000**	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	01				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	192.020.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	192.020.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	192.020.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	02				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	339.580.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	339.580.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	339.580.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	06				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	99.233.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	99.233.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.233.000	
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.367.694.956**	
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**18.460.000**	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.460.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	18.460.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.460.000	
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.972.921.356**	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.406.221.356	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.406.221.356	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	4.406.221.356	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	566.700.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	566.700.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	566.700.000	
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**01**	**2.04**	**00**				**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**24.334.000**	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.04	07				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24.334.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.04	07	5	1		BELANJA OPERASI	24.334.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.04	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.334.000	
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**184.589.600**	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.149.600	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	94.149.600	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	94.149.600	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.440.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	20.440.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.440.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	70.000.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**84.000.000**	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	84.000.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000	
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83.390.000**	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.790.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.2.19.0.00.26 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	45.790.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.790.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.600.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	37.600.000	
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000	
									Jumlah Belanja	**8.152.275.556**	
									Total Surplus/(Defisit)	**373.524.444**	
0	**00**	**3.26.2.19.0.00.26.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**SEKRETARIAT DAERAH**	**47.073.835.745**	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**14.000.303.400**	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Administrasi Tata Pemerintahan**	**515.471.800**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	01				Penataan Administrasi Pemerintahan	152.266.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	152.266.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	152.266.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	02				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	115.665.900	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	115.665.900	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	115.665.900	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	03				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	247.539.900	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	247.539.900	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	247.539.900	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**10.131.584.600**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.498.370.400	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.498.370.400	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.498.370.400	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4.301.258.200	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.301.258.200	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	593.258.200	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	5	1	05	Belanja Hibah	3.708.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.331.956.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	4.331.956.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.211.956.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	120.000.000	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**1.070.247.000**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	01				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	220.333.200	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	220.333.200	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	220.333.200	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	02				Fasilitasi Bantuan Hukum	694.873.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	694.873.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	694.873.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	03				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	155.040.800	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	155.040.800	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	155.040.800	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**2.283.000.000**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.04	01				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2.283.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.283.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	283.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.04	01	5	1	05	Belanja Hibah	2.000.000.000	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**3.969.229.700**	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**690.425.800**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	01				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	407.457.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	407.457.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	407.457.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	02				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	282.968.800	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	282.968.800	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	282.968.800	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**803.099.900**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	01				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	175.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	175.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	02				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	220.499.900	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	220.499.900	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	220.499.900	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	03				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	407.600.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	407.600.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	407.600.000	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.103.405.600**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	01				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	358.505.400	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	358.505.400	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	358.505.400	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	02				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	509.264.200	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	509.264.200	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	509.264.200	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	03				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	235.636.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	235.636.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	235.636.000	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**03**	**2.04**	**00**				**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**1.372.298.400**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1.372.298.400	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.372.298.400	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	389.798.400	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	982.500.000	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**29.104.302.645**	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.700.000**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.700.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.700.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.284.730.293**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.158.730.293	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.158.730.293	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	10.158.730.293	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	126.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	125.400.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	600.000	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.544.793.600**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	471.331.600	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	471.331.600	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	04	5	1	01	Belanja Pegawai	2.460.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	468.871.600	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	108.470.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	108.470.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	108.470.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	457.887.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	457.887.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	457.887.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	507.105.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	507.105.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	507.105.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.331.061.600**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.848.309.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	1		BELANJA OPERASI	23.309.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.360.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.949.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	2		BELANJA MODAL	2.825.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.825.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	64.246.600	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	1		BELANJA OPERASI	19.465.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	1	01	Belanja Pegawai	1.180.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.285.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	44.781.600	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.781.600	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	418.506.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	125.710.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	1.360.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	124.350.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	292.796.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	287.396.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.400.000	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.873.419.478**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	498.450.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	498.450.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	498.450.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.374.969.478	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.374.969.478	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.374.969.478	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.753.689.900**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	399.999.900	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	399.999.900	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	399.999.900	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.193.150.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	6.193.150.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1	01	Belanja Pegawai	5.340.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.187.810.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	05				Pemeliharaan Mebel	20.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	05	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.980.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	179.980.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	179.980.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.960.560.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.960.560.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09	5	1	01	Belanja Pegawai	4.720.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.955.840.000	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.11**	**00**				**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**1.511.073.104**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	478.446.104	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01	5	1		BELANJA OPERASI	478.446.104	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01	5	1	01	Belanja Pegawai	478.446.104	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	02				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	111.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	02	5	1		BELANJA OPERASI	111.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	111.000.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	04				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	921.627.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	04	5	1		BELANJA OPERASI	921.627.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	921.627.000	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.12**	**00**				**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**348.845.550**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.12	01				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	348.845.550	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.12	01	5	1		BELANJA OPERASI	348.845.550	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.12	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	348.845.550	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.13**	**00**				**Penataan Organisasi**	**627.189.320**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	01				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	201.243.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	01	5	1		BELANJA OPERASI	201.243.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	201.243.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	02				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	107.143.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	02	5	1		BELANJA OPERASI	107.143.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	107.143.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	03				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	161.849.120	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	03	5	1		BELANJA OPERASI	161.849.120	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	161.849.120	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	04				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	39.694.200	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	04	5	1		BELANJA OPERASI	39.694.200	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.694.200	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	117.260.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	05	5	1		BELANJA OPERASI	117.260.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.260.000	
4	**01**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**01**	**2.14**	**00**				**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**818.799.800**	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	01				Fasilitasi Keprotokolan	255.729.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	01	5	1		BELANJA OPERASI	255.729.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	255.729.000	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	02				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	308.568.200	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	02	5	1		BELANJA OPERASI	308.568.200	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	308.568.200	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	03				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	254.502.600	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	03	5	1		BELANJA OPERASI	254.502.600	
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	254.502.600	
									Jumlah Belanja	**47.073.835.745**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(47.073.835.745)**	
0	**00**	**4.01.3.29.2.10.41.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**SEKRETARIAT DPRD**	**28.802.448.081**	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**12.616.738.400**	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**1.587.580.000**	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	01				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	290.948.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	290.948.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	290.948.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	02				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	984.244.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	984.244.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	984.244.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	03				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	280.888.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	280.888.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	280.888.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	04				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	31.500.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	31.500.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	04	5	1	01	Belanja Pegawai	31.500.000	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**694.448.000**	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	01				Pembahasan KUA dan PPAS	24.767.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	24.767.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.767.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	02				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24.547.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	24.547.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.547.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	03				Pembahasan APBD	209.453.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	209.453.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	209.453.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	04				Pembahasan APBD Perubahan	222.257.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	222.257.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	222.257.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	06				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	213.420.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	213.420.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	213.420.800	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**3.417.339.600**	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	01				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	707.746.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	707.746.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	707.746.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	02				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	612.608.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	612.608.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	612.608.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	03				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	757.964.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	757.964.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	757.964.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	04				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	482.460.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	482.460.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	482.460.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	05				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	430.376.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	430.376.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	430.376.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	07				Pengawasan Penggunaan Anggaran	187.730.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	07	5	1		BELANJA OPERASI	187.730.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	187.730.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	08				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	238.454.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	08	5	1		BELANJA OPERASI	238.454.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	238.454.800	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**2.115.509.800**	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	02				Pendalaman Tugas DPRD	1.544.664.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.544.664.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.544.664.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	03				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	201.250.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	201.250.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	201.250.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	04				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	120.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	120.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	05				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	240.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	240.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	07				Penyusunan Program Kerja DPRD	9.595.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	07	5	1		BELANJA OPERASI	9.595.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.595.800	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**02**	**2.05**	**00**				**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**3.283.028.600**	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	01				Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.082.585.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.082.585.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.082.585.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	03				Pelaksanaan Reses	2.200.443.600	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.200.443.600	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.443.600	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**02**	**2.08**	**00**				**Fasilitasi Tugas DPRD**	**1.518.832.400**	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	01				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.490.570.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.490.570.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.490.570.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	02				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	28.262.400	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	28.262.400	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.262.400	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.185.709.681**	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.110.346.604**	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.026.346.604	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.026.346.604	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.026.346.604	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	84.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	84.000.000	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**2.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**79.368.000**	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.05	11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	79.368.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.05	11	5	1		BELANJA OPERASI	79.368.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.05	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.368.000	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.278.034.427**	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.224.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	23.224.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.224.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	307.648.927	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	110.600.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	110.600.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	2		BELANJA MODAL	197.048.927	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.048.927	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	411.195.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	352.195.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	352.195.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	03	5	2		BELANJA MODAL	59.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	283.778.200	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	283.778.200	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	04	5	1	01	Belanja Pegawai	1.180.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	282.598.200	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.980.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	72.980.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	05	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.300.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	78.975.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	78.975.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	78.975.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.232.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	100.232.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.232.000	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**333.122.500**	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	333.122.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.610.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.930.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	330.512.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	330.512.500	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**905.416.000**	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.500.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	264.500.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	264.500.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	640.916.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	640.916.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	640.916.000	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**786.200.000**	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	269.200.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	269.200.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	269.200.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.710.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	109.710.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	109.710.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	407.290.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	407.290.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	09	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	406.610.000	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**2.15**	**00**				**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**9.603.990.550**	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.380.080.550	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.380.080.550	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	5	1	01	Belanja Pegawai	9.380.080.550	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	02				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	223.910.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	02	5	1		BELANJA OPERASI	223.910.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	02	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	223.230.000	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**01**	**2.16**	**00**				**Layanan Administrasi DPRD**	**89.231.600**	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02				Fasilitasi Fraksi DPRD	89.231.600	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02	5	1		BELANJA OPERASI	89.231.600	
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	89.231.600	
									Jumlah Belanja	**28.802.448.081**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(28.802.448.081)**	
0	**00**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**PERENCANAAN**	**7.147.161.662**	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.462.695.200**	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1.056.450.800**	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	03				Pelaksanaan Konsultasi Publik	104.179.400	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	104.179.400	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	104.179.400	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	05				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	386.769.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	386.769.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	386.769.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	07				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	565.502.400	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	565.502.400	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	565.502.400	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**126.287.200**	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	02				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	126.287.200	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	126.287.200	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	126.287.200	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**279.957.200**	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.03	03				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	279.957.200	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	279.957.200	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	279.957.200	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**700.000.000**	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**300.000.000**	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	200.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	200.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**200.000.000**	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	100.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	100.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**200.000.000**	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	119.995.300	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	119.995.300	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	119.995.300	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	80.004.700	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	08	5	1		BELANJA OPERASI	80.004.700	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.004.700	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.984.466.462**	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.810.245.440**	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.763.645.440	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.763.645.440	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.763.645.440	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.600.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	46.600.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	45.600.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**202.535.500**	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.001.500	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.001.500	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.001.500	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.276.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	73.276.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.276.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.040.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	10.040.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.040.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.150.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	12.150.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.068.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	100.068.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.068.000	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**426.372.022**	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	426.372.022	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.672.022	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.992.022	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	2		BELANJA MODAL	418.700.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	418.700.000	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**464.436.000**	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.600.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	297.600.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	297.600.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.836.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	166.836.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	166.836.000	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80.877.500**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.877.500	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	76.877.500	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.877.500	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**545.793.500**	
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**545.793.500**	
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**545.793.500**	
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	03				Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	295.260.500	
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	295.260.500	
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	295.260.500	
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	10				Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	250.533.000	
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	250.533.000	
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	250.533.000	
									Jumlah Belanja	**7.692.955.162**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(7.692.955.162)**	
0	**00**	**5.01.5.05.0.00.51.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**29.250.362.757**	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	01	Pajak Daerah	6.066.362.757	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.099.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	9.085.000.000	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**2**		**PENDAPATAN TRANSFER**	**859.822.191.100**	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	824.412.254.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	2	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.409.937.100	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**3**		**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.817.957.663**	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	4	3	03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.817.957.663	
									Jumlah Pendapatan	**896.890.511.520**	
0	**00**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KEUANGAN**	**116.255.165.281**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**86.100.869.446**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.225.919.000**	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	01				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	53.004.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	53.004.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.004.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	44.419.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	44.419.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.419.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	07				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	477.692.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	477.692.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	477.692.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	08				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	489.969.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	489.969.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	489.969.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	09				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	61.985.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	61.985.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	61.985.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	13				Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	98.848.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	13	5	1		BELANJA OPERASI	98.848.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	98.848.800	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**617.536.600**	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	325.345.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	325.345.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	324.665.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	03				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	76.476.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	76.476.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.476.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	06				Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	70.180.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	70.180.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	70.180.400	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	71.979.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	71.979.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	71.979.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	09				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	73.555.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	73.555.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.555.600	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**455.324.400**	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	04				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	127.240.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	127.240.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	127.240.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	05				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	52.217.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	52.217.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.217.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	07				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	104.441.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	07	5	1		BELANJA OPERASI	104.441.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	104.441.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	11				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	171.424.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	11	5	1		BELANJA OPERASI	171.424.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	171.424.600	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**83.802.089.446**	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	09				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.497.167.877	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	09	5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	4.497.167.877	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	09	5	3	01	Belanja Tidak Terduga	4.497.167.877	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	10				Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	79.304.921.569	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	10	5	4		BELANJA TRANSFER	79.304.921.569	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	10	5	4	01	Belanja Bagi Hasil	2.717.663.869	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	10	5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	76.587.257.700	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**447.537.300**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**447.537.300**	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	03				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	24.497.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	24.497.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.497.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	06				Inventarisasi Barang Milik Daerah	62.383.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	62.383.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	62.383.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	09				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	157.759.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	157.759.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	157.759.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	10				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	115.162.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	115.162.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	115.162.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	11				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	56.741.500	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	56.741.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	56.741.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	12				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30.993.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	30.993.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.993.000	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.240.594.450**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1.240.594.450**	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	03				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	236.460.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	236.460.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	236.460.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	04				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	114.294.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	101.794.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	101.794.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	04	5	2		BELANJA MODAL	12.500.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	07				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	307.190.050	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	307.190.050	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	307.190.050	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	11				Penagihan Pajak Daerah	81.364.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	81.364.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	81.364.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	13				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	97.016.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	13	5	1		BELANJA OPERASI	97.016.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	97.016.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	14				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	404.270.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	14	5	1		BELANJA OPERASI	404.270.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	404.270.000	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**28.466.164.085**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26.197.655.609**	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.011.295.609	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	26.011.295.609	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	21.974.563.042	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.036.732.567	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	186.360.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	186.360.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	186.360.000	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**01**	**2.04**	**00**				**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**125.272.000**	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.04	03				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	125.272.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	125.272.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	125.272.000	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**402.617.000**	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.550.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	45.550.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.550.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.392.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	80.392.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.392.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.577.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	125.577.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	04	5	1	01	Belanja Pegawai	1.230.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	124.347.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.100.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	35.100.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.990.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	15.990.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.990.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.008.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	100.008.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.008.000	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**119.261.500**	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.261.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	43.242.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	1	01	Belanja Pegawai	1.360.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	41.882.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	2		BELANJA MODAL	76.019.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.019.500	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.278.293.976**	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	729.456.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	729.456.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	729.456.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.837.976	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	548.837.976	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	548.837.976	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**343.064.000**	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.204.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	228.204.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	228.204.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.860.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	114.860.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	114.860.000	
									Jumlah Belanja	**116.255.165.281**	
									Total Surplus/(Defisit)	**780.635.346.239**	
0	**00**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.52.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**	**1**		**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**41.089.969.831**	
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	00	0.00	00	6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.089.969.831	
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**41.089.969.831**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.53 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**		
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**KEPEGAWAIAN**	**5.641.588.919**	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.890.395.600**	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**266.997.000**	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	03					Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	192.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	192.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	192.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	06					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	74.997.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	74.997.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	74.997.000	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**02**	**2.02**	**00**					**Mutasi dan Promosi ASN**	**736.605.000**	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	01					Pengelolaan Mutasi ASN	661.625.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	661.625.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	661.625.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	02					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	74.980.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	74.980.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	74.980.000	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**02**	**2.03**	**00**					**Pengembangan Kompetensi ASN**	**682.039.600**	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.03	04					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	682.039.600	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.03	04	5	1			BELANJA OPERASI	682.039.600	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.03	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	682.039.600	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**02**	**2.04**	**00**					**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**204.754.000**	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.04	07					Pembinaan Disiplin ASN	204.754.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.04	07	5	1			BELANJA OPERASI	204.754.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.04	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	204.754.000	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.751.193.319**	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.089.151.467**	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.053.251.467	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.053.251.467	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	3.053.251.467	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.900.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	35.900.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	02	5	1	01		Belanja Pegawai	35.900.000	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**210.294.594**	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.509.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	8.509.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.509.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.799.594	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	70.629.594	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	5	1	01		Belanja Pegawai	680.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	69.949.594	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	5	2			BELANJA MODAL	1.170.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.170.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.061.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	15.061.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.061.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	06	5	1			BELANJA OPERASI	15.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.53 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.925.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	99.925.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.925.000	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**381.830.458**	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	234.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	234.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.830.458	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	147.830.458	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	147.830.458	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69.916.800**	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.696.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	39.696.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.696.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.220.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	30.220.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.220.000	
5	**04**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**688.891.400**	
5	**04**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**688.891.400**	
5	**04**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**688.891.400**	
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	688.891.400	
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	688.891.400	
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	688.891.400	
									Jumlah Belanja	**6.330.480.319**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(6.330.480.319)**	
0	**00**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.61 INSPEKTORAT

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**INSPEKTORAT DAERAH**	**9.588.312.877**	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**2.993.694.600**	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**2.701.398.500**	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	01				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	267.970.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	267.970.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	267.970.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	02				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	432.175.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	432.175.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	432.175.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	03				Reviu Laporan Kinerja	671.197.900	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	671.197.900	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	671.197.900	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	04				Reviu Laporan Keuangan	117.760.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	117.760.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.760.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	05				Pengawasan Desa	634.375.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	634.375.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	634.375.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	06				Kerja Sama Pengawasan Internal	429.703.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	429.703.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	429.703.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	07				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	148.217.600	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	148.217.600	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	148.217.600	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**292.296.100**	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.02	02				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	292.296.100	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	292.296.100	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	292.296.100	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**576.157.800**	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**221.424.000**	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.01	02				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	221.424.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	221.424.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	221.424.000	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pendampingan dan Asistensi**	**354.733.800**	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	01				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	02				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	49.129.800	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	49.129.800	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.129.800	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	03				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	139.842.400	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	139.842.400	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	139.842.400	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	04				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	65.761.600	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	65.761.600	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.61 INSPEKTORAT

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	65.761.600	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.018.460.477**	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.380.175.873**	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.342.135.873	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.342.135.873	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	4.342.135.873	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.040.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	38.040.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	34.800.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**01**	**2.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**149.068.400**	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.05	09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	149.068.400	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.05	09	5	1		BELANJA OPERASI	149.068.400	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.05	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.068.400	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**874.731.800**	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.890.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.890.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	03	5	2		BELANJA MODAL	8.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.794.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	187.794.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	04	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	187.114.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	44.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.047.800	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	600.047.800	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	600.047.800	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**157.699.000**	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.535.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	455.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	455.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	57.080.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.080.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08				Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.164.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	1		BELANJA OPERASI	79.830.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.830.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	2		BELANJA MODAL	20.334.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.334.000	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**287.680.404**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.61 INSPEKTORAT

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.820.900	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	134.820.900	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	134.820.900	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.859.504	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	152.859.504	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	152.859.504	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**169.105.000**	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.750.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	76.750.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.750.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.820.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	56.820.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	56.820.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.535.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	35.535.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.535.000	
									Jumlah Belanja	**9.588.312.877**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(9.588.312.877)**	
0	**00**	**6.01.0.00.0.00.61.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.71 KECAMATAN SIBERUT UTARA

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**2.925.878.185**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**90.452.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**90.452.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	90.452.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	75.002.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.002.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03	5	2		BELANJA MODAL	15.450.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.450.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**52.193.200**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**52.193.200**	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	31.528.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	31.528.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.528.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.665.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	20.665.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.665.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**134.389.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**134.389.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.044.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	100.044.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.044.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.345.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	34.345.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.345.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**75.005.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**75.005.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	06	2.01	03				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75.005.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	75.005.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.005.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.573.838.985**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**57.080.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.080.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	57.080.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.080.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.271.786.185**	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.056.531.185	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.056.531.185	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.056.531.185	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.71 KECAMATAN SIBERUT UTARA

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	215.255.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	215.255.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	26.400.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	188.855.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**91.562.800**	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.155.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.155.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.155.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.517.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	21.517.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.517.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.450.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.450.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.440.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	65.440.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	65.440.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**114.000.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	90.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.410.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.450.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	19.450.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.450.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.460.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	15.460.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.460.000	
									Jumlah Belanja	**2.925.878.185**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(2.925.878.185)**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.71.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.72 KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**2.084.485.428**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**36.690.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**36.690.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	02	2.04	03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36.690.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	02	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	36.690.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	02	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.690.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**33.474.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**33.474.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.516.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.516.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.516.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.958.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	19.958.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.958.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**78.661.200**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**78.661.200**	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	59.758.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	59.758.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.758.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.903.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	18.903.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.903.200	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**90.634.750**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**90.634.750**	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	06	2.01	03				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	90.634.750	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	90.634.750	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	90.634.750	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.845.025.478**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51.680.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.680.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	51.680.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.680.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.486.992.178**	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.374.312.178	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.374.312.178	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.374.312.178	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	112.680.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	112.680.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	27.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.080.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**83.650.000**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.72 KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.729.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.729.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.729.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.642.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	21.642.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.642.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.009.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.009.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.009.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.270.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	54.270.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.270.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**47.703.300**	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	18.098.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	18.098.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.098.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.604.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	9.604.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.604.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	11	5	2		BELANJA MODAL	20.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	11	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**133.500.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	6.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	127.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	127.500.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**41.500.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	6.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	35.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	
									Jumlah Belanja	**2.084.485.428**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(2.084.485.428)**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.73 KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**2.054.933.417**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**75.000.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**75.000.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	02	2.04	03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	75.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	02	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	75.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	02	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**27.055.500**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**27.055.500**	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.060.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	18.060.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.060.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.995.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	8.995.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.995.500	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**122.255.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**122.255.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.995.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	99.995.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.995.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.260.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	22.260.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.260.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100.000.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100.000.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	06	2.01	03				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.730.622.917**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55.440.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.440.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	55.440.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.440.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.316.951.717**	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.092.606.717	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.092.606.717	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.092.606.717	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	224.345.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	224.345.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	25.800.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	198.545.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**119.159.200**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.73 KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.844.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	5.844.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.844.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.010.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	38.010.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	38.010.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.925.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	1.925.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.925.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.380.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	73.380.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	73.380.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75.000.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.07	02					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.07	02	5	2			BELANJA MODAL	75.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.07	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**141.072.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.072.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	117.072.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	117.072.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.000.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	13.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	10.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
										Jumlah Belanja	**2.054.933.417**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(2.054.933.417)**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**		
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.74 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**KECAMATAN**	**2.164.530.313**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**39.380.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**02**	**2.04**	**00**					**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**39.380.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	02	2.04	03					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	39.380.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	02	2.04	03	5	1			BELANJA OPERASI	39.380.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	02	2.04	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	39.380.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**34.823.200**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**34.823.200**	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.886.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	25.886.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	25.886.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.937.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	8.937.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.937.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**05**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**79.005.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**05**	**2.01**	**00**					**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**79.005.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	01					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	67.970.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	67.970.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	67.970.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	08					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.035.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	08	5	1			BELANJA OPERASI	11.035.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	11.035.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**06**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**96.330.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**06**	**2.01**	**00**					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**96.330.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	06	2.01	03					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	96.330.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	06	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	96.330.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	06	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	96.330.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.914.992.113**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**01**	**2.01**	**00**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**35.890.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.890.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	35.890.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	35.890.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.606.466.613**	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.308.126.613	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.308.126.613	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	1.308.126.613	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	298.340.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	298.340.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	02	5	1	01		Belanja Pegawai	25.200.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	273.140.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**135.499.500**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.74 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.057.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.057.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.057.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.830.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	51.830.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	51.830.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.551.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	2.551.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.551.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.060.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	77.060.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	77.060.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**137.136.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.136.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	113.136.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	113.136.000	
										Jumlah Belanja	**2.164.530.313**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(2.164.530.313)**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.74.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**		
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.75 KECAMATAN SIBERUT SELATAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**2.440.286.280**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**45.435.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**15.440.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.01	02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.440.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	15.440.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.440.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**29.995.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.04	03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29.995.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	29.995.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.995.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**42.109.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**42.109.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.749.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.749.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.749.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.360.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	21.360.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.360.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**125.090.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**125.090.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	95.590.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	95.590.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	95.590.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	29.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**92.643.500**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**92.643.500**	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	03				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	70.817.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	70.817.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	70.817.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	09				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21.826.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	21.826.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.826.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.135.008.780**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**36.105.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.105.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	36.105.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.105.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.75 KECAMATAN SIBERUT SELATAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.809.099.039**	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.710.969.039	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.710.969.039	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.710.969.039	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.130.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	98.130.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	17.900.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.230.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**87.683.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.210.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.210.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.210.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.763.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	30.763.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.763.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.990.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.990.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.720.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	46.720.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	46.720.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**107.700.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	12.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.700.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	95.700.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	95.700.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**94.421.741**	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	37.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.850.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	20.850.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.850.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.071.741	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	36.071.741	
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.071.741	
									Jumlah Belanja	**2.440.286.280**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(2.440.286.280)**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.75.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.76 KECAMATAN SIPORA UTARA

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**2.536.637.650**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**87.924.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**87.924.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	37.924.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	37.924.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.924.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**43.478.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**43.478.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.868.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	15.868.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.868.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.610.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	27.610.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.610.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**84.115.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**84.115.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	64.115.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	64.115.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	64.115.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**41.731.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**41.731.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	06	2.01	03				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	41.731.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	41.731.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	41.731.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.279.389.650**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**75.000.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	75.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.576.744.250**	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.543.144.250	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.543.144.250	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.543.144.250	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	33.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	33.600.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**132.191.600**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.76 KECAMATAN SIPORA UTARA

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.925.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.925.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.937.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	49.937.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	04	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.257.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.504.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	7.504.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.504.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.824.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	69.824.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	69.824.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.055.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.055.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	855.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	175.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	19.200.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.200.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**215.388.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.388.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	191.388.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	191.388.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**260.010.800**	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.450.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	29.450.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.450.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.650.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	28.650.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.650.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	3.650.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.260.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	198.260.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	197.580.800	
									Jumlah Belanja	**2.536.637.650**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(2.536.637.650)**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.77 KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**3.249.397.722**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**38.156.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**38.156.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	28.156.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	28.156.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.156.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**67.622.400**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**47.632.400**	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27.632.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	27.632.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.632.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**03**	**2.06**	**00**				**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**19.990.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.06	01				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	19.990.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	19.990.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.990.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**103.522.900**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**103.522.900**	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	81.522.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	81.522.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	81.522.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	22.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**73.725.200**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**73.725.200**	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	06	2.01	03				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	73.725.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	73.725.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.725.200	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.77 KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.966.371.222**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**39.840.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.840.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	39.840.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.840.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.288.965.622**	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.225.095.622	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.225.095.622	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.225.095.622	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.870.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	63.870.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	36.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.870.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**151.009.600**	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.995.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.100.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	03	5	2		BELANJA MODAL	24.100.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.100.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.214.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	63.214.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.214.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.700.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	53.700.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.700.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**295.612.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.680.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	5	1		BELANJA OPERASI	6.980.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	5	1	01	Belanja Pegawai	680.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	5	2		BELANJA MODAL	268.700.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	268.700.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.932.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	19.932.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.932.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**187.944.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.944.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	163.944.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	163.944.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.000.000**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.77 KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
									Jumlah Belanja	**3.249.397.722**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(3.249.397.722)**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.77.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.78 KECAMATAN PAGAI UTARA

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**2.288.278.583**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**120.832.500**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**120.832.500**	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	47.977.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	47.977.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.977.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.855.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	72.855.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.855.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**109.475.750**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**109.475.750**	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	74.961.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	74.961.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.961.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.514.750	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	34.514.750	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.514.750	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**123.730.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**123.730.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	03				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	74.990.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	74.990.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.990.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	18				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	48.740.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	18	5	1		BELANJA OPERASI	48.740.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	18	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.740.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.934.240.333**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.579.645.933**	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.427.725.933	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.427.725.933	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.427.725.933	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.920.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	151.920.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	18.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	133.920.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**173.478.400**	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.647.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.647.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.647.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.810.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.78 KECAMATAN PAGAI UTARA

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	02	5	2		BELANJA MODAL	22.810.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.810.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.681.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	46.681.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	46.681.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.400.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.400.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.940.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	88.940.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	88.940.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**169.116.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	12.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.116.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	157.116.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	157.116.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.000.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	12.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	
									Jumlah Belanja	**2.288.278.583**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(2.288.278.583)**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.79 KECAMATAN PAGAI SELATAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**2.219.453.111**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**95.809.200**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**95.809.200**	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.434.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.434.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.434.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.375.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	75.375.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.375.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**94.729.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**94.729.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	75.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.729.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	19.729.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.729.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100.000.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100.000.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	06	2.01	03				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.928.914.911**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60.795.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.795.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	60.795.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.795.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.537.306.711**	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.379.186.711	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.379.186.711	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.379.186.711	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.120.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	158.120.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	21.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	136.520.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**123.167.200**	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.260.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.260.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.79 KECAMATAN PAGAI SELATAN

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.225.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	34.225.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.225.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.030.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.030.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.030.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.652.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	85.652.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.652.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**169.716.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.800.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.916.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	164.916.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	164.916.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**37.930.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.250.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	32.250.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.250.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.680.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000	
									Jumlah Belanja	**2.219.453.111**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(2.219.453.111)**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.80 KECAMATAN SIKAKAP

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**3.145.126.982**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**39.994.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**39.994.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	02	2.04	03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	39.994.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	02	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	39.994.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	02	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.994.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**59.988.050**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**59.988.050**	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.994.050	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	34.994.050	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.994.050	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.994.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	24.994.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.994.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**96.534.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**96.534.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	66.541.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	66.541.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	66.541.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29.993.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	29.993.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.993.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**49.990.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**49.990.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	06	2.01	03				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	49.990.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	49.990.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.990.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.898.620.932**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**29.990.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.990.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	29.990.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.990.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.617.469.332**	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.474.799.332	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.474.799.332	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.474.799.332	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	142.670.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	142.670.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.80 KECAMATAN SIKAKAP

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	18.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	124.670.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**125.025.600**	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.995.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.995.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.995.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.790.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	02	5	2		BELANJA MODAL	11.790.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.790.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.240.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	75.240.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.240.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**116.136.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.136.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	86.136.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	86.136.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.000.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
									Jumlah Belanja	**3.145.126.982**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(3.145.126.982)**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**4.787.208.404**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**650.071.900**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**650.071.900**	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	650.071.900	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	650.071.900	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	650.071.900	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**2.237.314.000**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**2.237.314.000**	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.209.907.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.209.907.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	82.679.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	2.127.228.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	05				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	27.407.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	27.407.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.407.000	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**27.037.800**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**27.037.800**	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	05				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	27.037.800	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	27.037.800	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.037.800	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**271.553.600**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**271.553.600**	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	02				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	129.030.600	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	129.030.600	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	129.030.600	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	64.136.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	64.136.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	64.136.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	78.387.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	78.387.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	78.387.000	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**191.701.900**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**191.701.900**	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	36.058.500	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	36.058.500	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.058.500	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	37.164.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	37.164.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.164.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	118.479.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	118.479.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	118.479.000	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.409.529.204**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.123.086.704**	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.087.086.704	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.087.086.704	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.087.086.704	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	36.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	36.000.000	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**130.058.100**	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.047.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.047.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.047.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.001.200	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	35.001.200	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.001.200	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.005.900	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.005.900	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.005.900	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.990.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	9.990.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.014.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	75.014.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.014.000	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**11.790.000**	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.790.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	11.790.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.790.000	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**119.472.000**	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	24.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.472.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	95.472.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	95.472.000	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.122.400**	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.002.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.002.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.002.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.120.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.120.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000	
									Jumlah Belanja	**4.787.208.404**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(4.787.208.404)**	
0	**00**	**8.01.0.00.0.00.08.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Martinus D.

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**370.311.481.176**	**219.067.086.484**	**0**	**0**	**589.378.567.660**
1	**01**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**178.825.823.015**	**88.128.735.885**	**0**	**0**	**266.954.558.900**
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	178.825.823.015	88.128.735.885	0	0	266.954.558.900
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	138.467.036.120	5.840.389.800	0	0	144.307.425.920
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	135.259.289.204	0	0	0	135.259.289.204
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	134.997.709.204	0	0	0	134.997.709.204
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	261.580.000	0	0	0	261.580.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	316.820.000	0	0	0	316.820.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	316.820.000	0	0	0	316.820.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	669.834.200	1.049.389.800	0	0	1.719.224.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	509.063.200	1.049.389.800	0	0	1.558.453.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.741.000	0	0	0	42.741.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	0	0	0	18.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.030.000	0	0	0	100.030.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751.555.716	0	0	0	751.555.716
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000	0	0	0	84.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	667.555.716	0	0	0	667.555.716
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.469.537.000	4.791.000.000	0	0	6.260.537.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.750.000	0	0	0	76.750.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.960.000	0	0	0	39.960.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	29.250.000	0	0	0	29.250.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.323.577.000	4.791.000.000	0	0	6.114.577.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.077.589.395	82.288.346.085	0	0	122.365.935.480
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	21.548.725.500	50.878.923.375	0	0	72.427.648.875
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	324.543.800	5.238.978.530	0	0	5.563.522.330
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	460.467.000	7.815.546.600	0	0	8.276.013.600
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	217.082.000	3.876.136.924	0	0	4.093.218.924
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	101.621.200	1.191.174.600	0	0	1.292.795.800
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	102.964.400	876.774.000	0	0	979.738.400
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	228.913.400	3.746.459.490	0	0	3.975.372.890
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	375.842.700	6.611.000.000	0	0	6.986.842.700
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	416.867.800	8.625.541.160	0	0	9.042.408.960

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.974.800	164.197.000	0	0	168.171.800
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	3.949.800	164.197.000	0	0	168.146.800
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	148.571.000	2.598.831.121	0	0	2.747.402.121
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	9.500.000.000	5.089.880.000	0	0	14.589.880.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	54.212.200	1.125.000.000	0	0	1.179.212.200
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	700.021.600	20.550.000	0	0	720.571.600
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.090.825.000	0	0	0	7.090.825.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	891.294.800	0	0	0	891.294.800
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	317.560.800	32.900.000	0	0	350.460.800
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	349.995.800	17.325.000	0	0	367.320.800
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	260.017.400	3.684.431.950	0	0	3.944.449.350
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.142.647.495	31.409.422.710	0	0	44.552.070.205
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	338.784.000	10.380.041.100	0	0	10.718.825.100
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	331.133.600	5.317.802.160	0	0	5.648.935.760
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	678.587.520	800.087.200	0	0	1.478.674.720
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	1.453.689.200	2.449.903.610	0	0	3.903.592.810
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	08	Pembangunan Asrama Sekolah	180.166.600	5.360.342.120	0	0	5.540.508.720
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	171.956.000	1.750.067.440	0	0	1.922.023.440
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	83.456.000	881.160.280	0	0	964.616.280
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	76.876.000	1.047.345.300	0	0	1.124.221.300
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	64.056.000	600.000.500	0	0	664.056.500
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	49.260.000	142.780.000	0	0	192.040.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	4.923.990.000	2.500.000.000	0	0	7.423.990.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	40.769.600	155.025.000	0	0	195.794.600
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	423.947.975	0	0	0	423.947.975
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	190.501.000	0	0	0	190.501.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.326.387.000	0	0	0	3.326.387.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	469.618.800	9.890.000	0	0	479.508.800
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	214.853.200	14.978.000	0	0	229.831.200
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	124.615.000	0	0	0	124.615.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.996.964.200	0	0	0	2.996.964.200

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	370.878.200	0	0	0	370.878.200
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	704.897.600	0	0	0	704.897.600
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	100.000.000	0	0	0	100.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	149.996.800	0	0	0	149.996.800
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	260.269.900	0	0	0	260.269.900
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	130.059.800	0	0	0	130.059.800
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.280.861.900	0	0	0	1.280.861.900
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.389.252.200	0	0	0	2.389.252.200
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	155.779.900	0	0	0	155.779.900
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	104.080.000	0	0	0	104.080.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	0	0	0	150.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	149.995.000	0	0	0	149.995.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	154.820.000	0	0	0	154.820.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.674.577.300	0	0	0	1.674.577.300
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	140.538.900	0	0	0	140.538.900
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	140.538.900	0	0	0	140.538.900
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	140.538.900	0	0	0	140.538.900
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	140.658.600	0	0	0	140.658.600
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	140.658.600	0	0	0	140.658.600
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	140.658.600	0	0	0	140.658.600
1	**02**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**112.922.924.610**	**14.570.738.014**	**0**	**0**	**127.493.662.624**
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000				DINAS KESEHATAN	66.355.871.761	12.104.900.110	0	0	78.460.771.871
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.650.558.685	81.017.400	0	0	44.731.576.085
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	0	0	0	60.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	0	0	0	30.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	0	0	0	30.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.055.544.935	0	0	0	44.055.544.935
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.465.512.829	0	0	0	36.465.512.829

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.590.032.106	0	0	0	7.590.032.106
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.017.450	81.017.400	0	0	356.034.850
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.995.750	0	0	0	14.995.750
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	81.017.400	0	0	81.017.400
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.999.000	0	0	0	34.999.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.996.700	0	0	0	59.996.700
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	0	0	0	50.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	0	0	0	15.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.026.000	0	0	0	100.026.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000	0	0	0	80.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	0	0	0	80.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.996.300	0	0	0	179.996.300
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.996.500	0	0	0	79.996.500
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.999.800	0	0	0	99.999.800
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	21.250.036.076	12.023.882.710	0	0	33.273.918.786
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.360.683.564	11.780.217.710	0	0	15.140.901.274
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	212.298.400	572.897.600	0	0	785.196.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	655.735.640	4.492.886.460	0	0	5.148.622.100
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	81.552.700	370.632.650	0	0	452.185.350
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250.175.000	6.343.801.000	0	0	6.593.976.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.303.834.977	0	0	0	1.303.834.977
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	757.086.847	0	0	0	757.086.847
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	0	0	0	100.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.764.202.512	223.005.000	0	0	17.987.207.512
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	815.039.000	0	0	0	815.039.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.129.699.800	0	0	0	1.129.699.800
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.166.040.000	0	0	0	1.166.040.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	711.040.000	0	0	0	711.040.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	470.525.460	0	0	0	470.525.460

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.029.647.800	0	0	0	1.029.647.800
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.117.926.798	0	0	0	1.117.926.798
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	517.319.623	0	0	0	517.319.623
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	273.087.000	0	0	0	273.087.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	614.849.900	0	0	0	614.849.900
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.140.898.950	0	0	0	1.140.898.950
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.390.000.000	0	0	0	1.390.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	149.887.900	0	0	0	149.887.900
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.016.220.307	0	0	0	1.016.220.307
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	150.000.000	0	0	0	150.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000	0	0	0	50.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.112.000	0	0	0	50.112.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	200.000.000	0	0	0	200.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	49.999.800	0	0	0	49.999.800
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	128.146.000	0	0	0	128.146.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	884.423.000	0	0	0	884.423.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.689.339.524	0	0	0	2.689.339.524
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.000.000	0	0	0	50.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	776.994.650	223.005.000	0	0	999.999.650
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	427.153.500	0	0	0	427.153.500
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	765.851.500	0	0	0	765.851.500
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	125.150.000	20.660.000	0	0	145.810.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50.000.000	0	0	0	50.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	75.150.000	20.660.000	0	0	95.810.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	181.700.000	0	0	0	181.700.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	60.000.000	0	0	0	60.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	25.000.000	0	0	0	25.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	35.000.000	0	0	0	35.000.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	121.700.000	0	0	0	121.700.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	121.700.000	0	0	0	121.700.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100.000.000	0	0	0	100.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000	0	0	0	50.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000	0	0	0	50.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	50.000.000	0	0	0	50.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	50.000.000	0	0	0	50.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	173.577.000	0	0	0	173.577.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	0	0	0	75.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	75.000.000	0	0	0	75.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98.577.000	0	0	0	98.577.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	98.577.000	0	0	0	98.577.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	25.669.791.777	1.652.693.700	0	0	27.322.485.477
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.139.021.689	0	0	0	23.139.021.689
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.625.730.029	0	0	0	19.625.730.029
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.451.079.029	0	0	0	12.451.079.029
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.174.651.000	0	0	0	7.174.651.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	777.653.400	0	0	0	777.653.400
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.552.000	0	0	0	22.552.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	630.829.400	0	0	0	630.829.400
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.272.000	0	0	0	124.272.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.962.543.260	0	0	0	1.962.543.260
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	426.500.000	0	0	0	426.500.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.536.043.260	0	0	0	1.536.043.260
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773.095.000	0	0	0	773.095.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	302.075.000	0	0	0	302.075.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	471.020.000	0	0	0	471.020.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.530.770.088	1.652.693.700	0	0	4.183.463.788
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.890.030.088	1.652.693.700	0	0	3.542.723.788
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	52.518.000	1.652.693.700	0	0	1.705.211.700
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	707.420.908	0	0	0	707.420.908
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	868.731.180	0	0	0	868.731.180
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	261.360.000	0	0	0	261.360.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	640.740.000	0	0	0	640.740.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	640.740.000	0	0	0	640.740.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0002				PUSKESMAS MAPADDEGAT	2.365.606.548	51.631.952	0	0	2.417.238.500
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0002	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.365.606.548	51.631.952	0	0	2.417.238.500
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0002	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.365.606.548	51.631.952	0	0	2.417.238.500
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0002	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.365.606.548	51.631.952	0	0	2.417.238.500
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0003				PUSKESMAS SIOBAN	2.230.527.990	108.250.827	0	0	2.338.778.817
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0003	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.230.527.990	108.250.827	0	0	2.338.778.817
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0003	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.230.527.990	108.250.827	0	0	2.338.778.817
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0003	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.230.527.990	108.250.827	0	0	2.338.778.817
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0004				PUSKESMAS BOSUA	866.756.287	0	0	0	866.756.287
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0004	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	866.756.287	0	0	0	866.756.287
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0004	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	866.756.287	0	0	0	866.756.287
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0004	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	866.756.287	0	0	0	866.756.287
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0005				PUSKESMAS MUARA SIBERUT	1.728.003.100	0	0	0	1.728.003.100
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0005	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.728.003.100	0	0	0	1.728.003.100
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0005	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.728.003.100	0	0	0	1.728.003.100
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0005	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.728.003.100	0	0	0	1.728.003.100
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0006				PUSKESMAS PEIPEI	1.352.400.097	58.104.400	0	0	1.410.504.497

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0006	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.352.400.097	58.104.400	0	0	1.410.504.497
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0006	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.352.400.097	58.104.400	0	0	1.410.504.497
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0006	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.352.400.097	58.104.400	0	0	1.410.504.497
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0007				PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP	1.529.271.766	77.306.800	0	0	1.606.578.566
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0007	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.529.271.766	77.306.800	0	0	1.606.578.566
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0007	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.529.271.766	77.306.800	0	0	1.606.578.566
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0007	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.529.271.766	77.306.800	0	0	1.606.578.566
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0008				PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN	1.872.591.239	121.298.200	0	0	1.993.889.439
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0008	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.872.591.239	121.298.200	0	0	1.993.889.439
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0008	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.872.591.239	121.298.200	0	0	1.993.889.439
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0008	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.872.591.239	121.298.200	0	0	1.993.889.439
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0009				PUSKESMAS BETAET	1.086.761.738	43.069.475	0	0	1.129.831.213
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0009	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.086.761.738	43.069.475	0	0	1.129.831.213
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0009	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.086.761.738	43.069.475	0	0	1.129.831.213
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0009	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.086.761.738	43.069.475	0	0	1.129.831.213
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0010				PUSKESMAS SAUMANGANYA	0	0	0	0	0
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0011				PUSKESMAS SIKAKAP	2.077.301.375	111.450.000	0	0	2.188.751.375
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0011	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.077.301.375	111.450.000	0	0	2.188.751.375
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0011	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.077.301.375	111.450.000	0	0	2.188.751.375
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0011	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.077.301.375	111.450.000	0	0	2.188.751.375
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0012				PUSKESMAS MALAKOPA	1.207.530.699	74.660.650	0	0	1.282.191.349
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0012	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.207.530.699	74.660.650	0	0	1.282.191.349
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0012	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.207.530.699	74.660.650	0	0	1.282.191.349
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0012	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.207.530.699	74.660.650	0	0	1.282.191.349
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0013				PUSKESMAS BULASAT	1.071.111.823	33.067.800	0	0	1.104.179.623
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0013	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.071.111.823	33.067.800	0	0	1.104.179.623
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0013	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.071.111.823	33.067.800	0	0	1.104.179.623
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0013	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.071.111.823	33.067.800	0	0	1.104.179.623
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0014				PUSKESMAS SAREREIKET	832.874.800	58.560.000	0	0	891.434.800
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0014	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	832.874.800	58.560.000	0	0	891.434.800

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0014	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	832.874.800	58.560.000	0	0	891.434.800
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0014	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	832.874.800	58.560.000	0	0	891.434.800
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0015				PUSKESMAS SIMATALU	717.375.810	12.028.100	0	0	729.403.910
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0015	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	717.375.810	12.028.100	0	0	729.403.910
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0015	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	717.375.810	12.028.100	0	0	729.403.910
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0015	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	717.375.810	12.028.100	0	0	729.403.910
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0016				PUSKESMAS SIGAPOKNA	658.449.550	36.116.000	0	0	694.565.550
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0016	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	658.449.550	36.116.000	0	0	694.565.550
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0016	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	658.449.550	36.116.000	0	0	694.565.550
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0016	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	658.449.550	36.116.000	0	0	694.565.550
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0017				PUSKESMAS SAUMANGANYA	1.300.698.250	27.600.000	0	0	1.328.298.250
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0017	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.300.698.250	27.600.000	0	0	1.328.298.250
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0017	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.300.698.250	27.600.000	0	0	1.328.298.250
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0017	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.300.698.250	27.600.000	0	0	1.328.298.250
1	**03**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**39.486.493.223**	**111.171.943.585**	**0**	**0**	**150.658.436.808**
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38.833.823.623	111.121.943.585	0	0	149.955.767.208
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.125.331.176	111.707.200	0	0	10.237.038.376
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.556.500	64.510.000	0	0	229.066.500
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	164.556.500	64.510.000	0	0	229.066.500
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.872.532.956	0	0	0	8.872.532.956
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.251.184.956	0	0	0	6.251.184.956
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.621.348.000	0	0	0	2.621.348.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	577.615.220	1.490.000	0	0	579.105.220
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.900.000	0	0	0	32.900.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.915.220	1.490.000	0	0	215.405.220
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95.660.000	0	0	0	95.660.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	135.000.000	0	0	0	135.000.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.140.000	0	0	0	100.140.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.600.000	0	0	0	101.600.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.600.000	0	0	0	101.600.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.026.500	45.707.200	0	0	454.733.700

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168.740.000	0	0	0	168.740.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.080.000	0	0	0	50.080.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.206.500	45.707.200	0	0	235.913.700
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.038.089.902	4.387.151.200	0	0	7.425.241.102
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.386.766.902	2.787.151.200	0	0	4.173.918.102
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	919.315.002	13.599.000	0	0	932.914.002
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	118.055.000	15.000.000	0	0	133.055.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	349.396.900	2.758.552.200	0	0	3.107.949.100
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.651.323.000	1.600.000.000	0	0	3.251.323.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	246.844.000	0	0	0	246.844.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	196.327.000	1.600.000.000	0	0	1.796.327.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.208.152.000	0	0	0	1.208.152.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.301.811.750	12.082.750.908	0	0	16.384.562.658
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.301.811.750	12.082.750.908	0	0	16.384.562.658
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.166.725.700	27.250.000	0	0	1.193.975.700
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	788.889.000	0	0	0	788.889.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	139.620.400	2.850.000.000	0	0	2.989.620.400
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	223.363.850	500.000.000	0	0	723.363.850
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	125.394.000	8.400.000.000	0	0	8.525.394.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1.857.818.800	305.500.908	0	0	2.163.319.708
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	614.119.600	0	0	0	614.119.600
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	614.119.600	0	0	0	614.119.600
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	614.119.600	0	0	0	614.119.600

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.163.199.900	766.750.000	0	0	1.929.949.900
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.163.199.900	766.750.000	0	0	1.929.949.900
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	914.925.000	0	0	0	914.925.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	248.274.900	766.750.000	0	0	1.015.024.900
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.083.573.600	11.368.039.000	0	0	15.451.612.600
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.083.573.600	11.368.039.000	0	0	15.451.612.600
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4.083.573.600	11.368.039.000	0	0	15.451.612.600
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	13.513.214.776	82.237.014.277	0	0	95.750.229.053
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	13.513.214.776	82.237.014.277	0	0	95.750.229.053
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	7.042.563.491	0	0	0	7.042.563.491
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	814.236.000	0	0	0	814.236.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	388.655.000	17.925.410.191	0	0	18.314.065.191
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	771.596.000	59.704.004.586	0	0	60.475.600.586
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	126.848.000	400.000.000	0	0	526.848.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	456.536.000	0	0	0	456.536.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	235.409.500	4.207.599.500	0	0	4.443.009.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3.677.370.785	0	0	0	3.677.370.785
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	125.041.000	0	0	0	125.041.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	125.041.000	0	0	0	125.041.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	125.041.000	0	0	0	125.041.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.869.441.919	168.531.000	0	0	2.037.972.919
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	395.474.000	0	0	0	395.474.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	274.503.000	0	0	0	274.503.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	63.688.000	0	0	0	63.688.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	57.283.000	0	0	0	57.283.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.089.923.859	52.879.000	0	0	1.142.802.859
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.089.923.859	52.879.000	0	0	1.142.802.859
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	323.546.060	115.652.000	0	0	439.198.060

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	216.916.400	65.000.000	0	0	281.916.400
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	106.629.660	50.652.000	0	0	157.281.660
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	60.498.000	0	0	0	60.498.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	60.498.000	0	0	0	60.498.000
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0001				UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT	652.669.600	50.000.000	0	0	702.669.600
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	652.669.600	50.000.000	0	0	702.669.600
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0001	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	652.669.600	50.000.000	0	0	702.669.600
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0001	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	652.669.600	50.000.000	0	0	702.669.600
1	**04**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**23.372.079.897**	**4.323.589.000**	**0**	**0**	**27.695.668.897**
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.372.079.897	4.323.589.000	0	0	27.695.668.897
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.934.275.297	108.115.000	0	0	4.042.390.297
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.988.000	0	0	0	38.988.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.988.000	0	0	0	38.988.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.907.061.697	0	0	0	2.907.061.697
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.822.101.697	0	0	0	2.822.101.697
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.960.000	0	0	0	84.960.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	281.499.600	0	0	0	281.499.600
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	0	0	0	20.000.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.384.000	0	0	0	33.384.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.063.000	0	0	0	75.063.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.115.600	0	0	0	33.115.600
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.995.000	0	0	0	19.995.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.942.000	0	0	0	99.942.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.040.000	108.115.000	0	0	110.155.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	49.300.000	0	0	49.300.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.040.000	58.815.000	0	0	60.855.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540.980.000	0	0	0	540.980.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.000.000	0	0	0	93.000.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	447.980.000	0	0	0	447.980.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.706.000	0	0	0	163.706.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.180.000	0	0	0	58.180.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.228.000	0	0	0	49.228.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.950.000	0	0	0	29.950.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.348.000	0	0	0	26.348.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	8.391.543.700	394.800.000	0	0	8.786.343.700
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	85.324.900	0	0	0	85.324.900
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	85.324.900	0	0	0	85.324.900
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	96.334.000	0	0	0	96.334.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	96.334.000	0	0	0	96.334.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	8.051.272.000	394.800.000	0	0	8.446.072.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	355.523.000	0	0	0	355.523.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	33.560.000	0	0	0	33.560.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	7.087.784.000	385.800.000	0	0	7.473.584.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	574.405.000	9.000.000	0	0	583.405.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	86.560.000	0	0	0	86.560.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	86.560.000	0	0	0	86.560.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	72.052.800	0	0	0	72.052.800
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	72.052.800	0	0	0	72.052.800
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10.317.373.900	13.500.000	0	0	10.330.873.900
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	394.999.400	0	0	0	394.999.400
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	394.999.400	0	0	0	394.999.400
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	9.922.374.500	13.500.000	0	0	9.935.874.500
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	9.455.824.100	0	0	0	9.455.824.100

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	291.140.000	4.500.000	0	0	295.640.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	175.410.400	9.000.000	0	0	184.410.400
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	728.887.000	3.807.174.000	0	0	4.536.061.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	728.887.000	3.807.174.000	0	0	4.536.061.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	670.274.000	3.807.174.000	0	0	4.477.448.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	05	2.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	58.613.000	0	0	0	58.613.000
1	**05**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**9.591.591.194**	**100.840.000**	**0**	**0**	**9.692.431.194**
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5.140.637.301	30.840.000	0	0	5.171.477.301
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.767.209.001	0	0	0	4.767.209.001
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.169.226.401	0	0	0	3.169.226.401
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.120.026.401	0	0	0	3.120.026.401
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.200.000	0	0	0	49.200.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.551.600	0	0	0	96.551.600
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.911.000	0	0	0	7.911.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000	0	0	0	1.500.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.064.600	0	0	0	48.064.600
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000	0	0	0	13.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.076.000	0	0	0	26.076.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.341.536.000	0	0	0	1.341.536.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.800.000	0	0	0	83.800.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.257.736.000	0	0	0	1.257.736.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.895.000	0	0	0	159.895.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.600.000	0	0	0	20.600.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.405.000	0	0	0	133.405.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.890.000	0	0	0	5.890.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	109.131.800	0	0	0	109.131.800
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.003.800	0	0	0	66.003.800

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	28.339.800	0	0	0	28.339.800
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	37.664.000	0	0	0	37.664.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	43.128.000	0	0	0	43.128.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	43.128.000	0	0	0	43.128.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	264.296.500	30.840.000	0	0	295.136.500
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.244.000	30.840.000	0	0	86.084.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.486.000	0	0	0	14.486.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.420.000	10.620.000	0	0	15.040.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	21.270.000	0	0	0	21.270.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.068.000	20.220.000	0	0	35.288.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	14.543.500	0	0	0	14.543.500
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	14.543.500	0	0	0	14.543.500
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	92.465.000	0	0	0	92.465.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	92.465.000	0	0	0	92.465.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	102.044.000	0	0	0	102.044.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	47.676.000	0	0	0	47.676.000
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	54.368.000	0	0	0	54.368.000
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.450.953.893	70.000.000	0	0	4.520.953.893
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.754.640.843	0	0	0	3.754.640.843
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.753.259.243	0	0	0	2.753.259.243
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.753.259.243	0	0	0	2.753.259.243
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.471.600	0	0	0	121.471.600
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.014.600	0	0	0	41.014.600
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.875.000	0	0	0	5.875.000
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.990.000	0	0	0	9.990.000
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.592.000	0	0	0	64.592.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	607.624.000	0	0	0	607.624.000
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.000.000	0	0	0	58.000.000
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	549.624.000	0	0	0	549.624.000
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.286.000	0	0	0	272.286.000
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.406.250	0	0	0	45.406.250
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.629.750	0	0	0	180.629.750
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.490.000	0	0	0	16.490.000
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.760.000	0	0	0	29.760.000
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	696.313.050	70.000.000	0	0	766.313.050
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	84.698.100	0	0	0	84.698.100
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	84.698.100	0	0	0	84.698.100
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	276.044.950	70.000.000	0	0	346.044.950
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	84.252.350	0	0	0	84.252.350
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	119.139.000	70.000.000	0	0	189.139.000
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	72.653.600	0	0	0	72.653.600
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	335.570.000	0	0	0	335.570.000
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	220.865.000	0	0	0	220.865.000
1	05	1.05.1.06.0.00.05.0000	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	114.705.000	0	0	0	114.705.000
1	**06**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**6.112.569.237**	**771.240.000**	**0**	**0**	**6.883.809.237**
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.112.569.237	771.240.000	0	0	6.883.809.237
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.844.526.587	21.240.000	0	0	3.865.766.587
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.290.892.087	0	0	0	3.290.892.087
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.277.092.087	0	0	0	3.277.092.087
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.800.000	0	0	0	13.800.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.947.900	21.240.000	0	0	117.187.900
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	0	0	0	5.000.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	18.500.000	0	0	18.500.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.132.000	2.740.000	0	0	40.872.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.025.900	0	0	0	7.025.900
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.790.000	0	0	0	45.790.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.550.000	0	0	0	275.550.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.900.000	0	0	0	47.900.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.650.000	0	0	0	227.650.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.136.600	0	0	0	182.136.600
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.497.250	0	0	0	23.497.250
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.841.600	0	0	0	29.841.600
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.080.000	0	0	0	30.080.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.717.750	0	0	0	98.717.750
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	103.880.100	0	0	0	103.880.100
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	45.026.300	0	0	0	45.026.300
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	45.026.300	0	0	0	45.026.300
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	58.853.800	0	0	0	58.853.800
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	58.853.800	0	0	0	58.853.800
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.363.992.600	0	0	0	1.363.992.600
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.363.992.600	0	0	0	1.363.992.600
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	1.119.795.100	0	0	0	1.119.795.100
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	143.544.900	0	0	0	143.544.900
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	100.652.600	0	0	0	100.652.600
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	431.029.400	0	0	0	431.029.400
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	431.029.400	0	0	0	431.029.400
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	317.374.000	0	0	0	317.374.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	113.655.400	0	0	0	113.655.400
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	369.140.550	750.000.000	0	0	1.119.140.550
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	197.258.550	700.000.000	0	0	897.258.550
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	197.258.550	700.000.000	0	0	897.258.550
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	171.882.000	50.000.000	0	0	221.882.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	171.882.000	50.000.000	0	0	221.882.000
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**66.373.800.895**	**14.050.834.504**	**0**	**0**	**80.424.635.399**
2	**07**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**83.363.200**	**0**	**0**	**0**	**83.363.200**
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	83.363.200	0	0	0	83.363.200
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	36.664.600	0	0	0	36.664.600
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	36.664.600	0	0	0	36.664.600
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	36.664.600	0	0	0	36.664.600
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	46.698.600	0	0	0	46.698.600
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	46.698.600	0	0	0	46.698.600
2	07	2.18.2.07.0.00.18.0000	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	46.698.600	0	0	0	46.698.600
2	**08**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**1.472.110.650**	**15.450.000**	**0**	**0**	**1.487.560.650**
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	999.231.150	0	0	0	999.231.150
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	656.424.000	0	0	0	656.424.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	86.437.000	0	0	0	86.437.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	27.218.000	0	0	0	27.218.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	59.219.000	0	0	0	59.219.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	569.987.000	0	0	0	569.987.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	569.987.000	0	0	0	569.987.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	59.292.500	0	0	0	59.292.500
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.292.500	0	0	0	59.292.500
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.292.500	0	0	0	59.292.500
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	118.124.750	0	0	0	118.124.750
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	118.124.750	0	0	0	118.124.750

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100.473.750	0	0	0	100.473.750
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.651.000	0	0	0	17.651.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	165.389.900	0	0	0	165.389.900
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	165.389.900	0	0	0	165.389.900
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	71.455.000	0	0	0	71.455.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	93.934.900	0	0	0	93.934.900
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001				UPTD PPA	472.879.500	15.450.000	0	0	488.329.500
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0001	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	88.600.000	0	0	0	88.600.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0001	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	88.600.000	0	0	0	88.600.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0001	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	88.600.000	0	0	0	88.600.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0001	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	384.279.500	15.450.000	0	0	399.729.500
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0001	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	297.333.500	0	0	0	297.333.500
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0001	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	297.333.500	0	0	0	297.333.500
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0001	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.946.000	15.450.000	0	0	102.396.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0001	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.946.000	15.450.000	0	0	102.396.000
2	**09**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**7.732.875.069**	**0**	**0**	**0**	**7.732.875.069**
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7.732.875.069	0	0	0	7.732.875.069
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.732.875.069	0	0	0	7.732.875.069
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.482.331.069	0	0	0	7.482.331.069
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.482.331.069	0	0	0	7.482.331.069
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.044.000	0	0	0	173.044.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.998.000	0	0	0	83.998.000
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000	0	0	0	14.000.000
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.046.000	0	0	0	75.046.000
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.500.000	0	0	0	77.500.000
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.500.000	0	0	0	77.500.000
2	**11**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**4.238.924.030**	**1.563.518.000**	**0**	**0**	**5.802.442.030**
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	4.238.924.030	1.563.518.000	0	0	5.802.442.030
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.648.736.230	0	0	0	3.648.736.230
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.703.223.406	0	0	0	2.703.223.406
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.703.223.406	0	0	0	2.703.223.406
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.547.900	0	0	0	298.547.900
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.840.000	0	0	0	11.840.000
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.039.000	0	0	0	165.039.000
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.804.900	0	0	0	4.804.900
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.990.000	0	0	0	18.990.000
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.874.000	0	0	0	97.874.000
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.696.000	0	0	0	396.696.000
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	0	0	0	48.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348.696.000	0	0	0	348.696.000
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.268.924	0	0	0	250.268.924
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.130.717	0	0	0	53.130.717
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.028.207	0	0	0	187.028.207
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.110.000	0	0	0	10.110.000
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	218.917.500	0	0	0	218.917.500
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	218.917.500	0	0	0	218.917.500
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	218.917.500	0	0	0	218.917.500
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	66.468.500	1.340.000.000	0	0	1.406.468.500
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	66.468.500	1.340.000.000	0	0	1.406.468.500

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	66.468.500	1.340.000.000	0	0	1.406.468.500
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	139.896.000	0	0	0	139.896.000
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	139.896.000	0	0	0	139.896.000
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	139.896.000	0	0	0	139.896.000
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	164.905.800	223.518.000	0	0	388.423.800
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01		Pengelolaan Sampah	164.905.800	223.518.000	0	0	388.423.800
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	144.711.500	0	0	0	144.711.500
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	20.194.300	223.518.000	0	0	243.712.300
2	**12**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**4.381.615.497**	**498.500.000**	**0**	**0**	**4.880.115.497**
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.381.615.497	498.500.000	0	0	4.880.115.497
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.861.321.647	498.500.000	0	0	4.359.821.647
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.941.299.847	0	0	0	2.941.299.847
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.905.299.847	0	0	0	2.905.299.847
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.000.000	0	0	0	36.000.000
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.989.800	498.500.000	0	0	831.489.800
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000	0	0	0	70.000.000
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.210.000	498.500.000	0	0	499.710.000
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.764.200	0	0	0	120.764.200
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.109.600	0	0	0	26.109.600
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	0	0	0	14.400.000
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.506.000	0	0	0	100.506.000
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	538.372.000	0	0	0	538.372.000
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.800.000	0	0	0	73.800.000
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	464.572.000	0	0	0	464.572.000
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.660.000	0	0	0	48.660.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.660.000	0	0	0	48.660.000
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	258.284.200	0	0	0	258.284.200
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	258.284.200	0	0	0	258.284.200
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	258.284.200	0	0	0	258.284.200
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	131.506.900	0	0	0	131.506.900
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	131.506.900	0	0	0	131.506.900
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	131.506.900	0	0	0	131.506.900
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	127.201.750	0	0	0	127.201.750
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	127.201.750	0	0	0	127.201.750
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	127.201.750	0	0	0	127.201.750
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	3.301.000	0	0	0	3.301.000
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	3.301.000	0	0	0	3.301.000
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	3.301.000	0	0	0	3.301.000
2	**13**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**5.204.520.408**	**11.378.000**	**0**	**0**	**5.215.898.408**
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.204.520.408	11.378.000	0	0	5.215.898.408
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.250.449.308	11.378.000	0	0	4.261.827.308
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.185.256.308	0	0	0	3.185.256.308
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.155.656.308	0	0	0	3.155.656.308
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.600.000	0	0	0	29.600.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.589.000	11.378.000	0	0	174.967.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	0	0	0	6.000.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	11.378.000	0	0	11.378.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.319.000	0	0	0	50.319.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.170.000	0	0	0	16.170.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.100.000	0	0	0	91.100.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	811.944.000	0	0	0	811.944.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000	0	0	0	72.000.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	739.944.000	0	0	0	739.944.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.000.000	0	0	0	44.000.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	0	0	0	15.000.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.000.000	0	0	0	29.000.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.13		Penataan Organisasi	45.660.000	0	0	0	45.660.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	45.660.000	0	0	0	45.660.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	02			PROGRAM PENATAAN DESA	231.886.100	0	0	0	231.886.100
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	231.886.100	0	0	0	231.886.100
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	231.886.100	0	0	0	231.886.100
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	195.840.000	0	0	0	195.840.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	195.840.000	0	0	0	195.840.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	45.840.000	0	0	0	45.840.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	150.000.000	0	0	0	150.000.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	526.345.000	0	0	0	526.345.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	526.345.000	0	0	0	526.345.000
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	526.345.000	0	0	0	526.345.000
2	**14**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**2.787.799.400**	**140.000.000**	**0**	**0**	**2.927.799.400**
2	13	2.13.2.14.0.00.13.0000				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.787.799.400	140.000.000	0	0	2.927.799.400
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	267.729.000	0	0	0	267.729.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	172.094.000	0	0	0	172.094.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	0	0	0	100.000.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	72.094.000	0	0	0	72.094.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	95.635.000	0	0	0	95.635.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	95.635.000	0	0	0	95.635.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.582.472.400	140.000.000	0	0	1.722.472.400
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	828.154.000	0	0	0	828.154.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	149.992.000	0	0	0	149.992.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	130.010.000	0	0	0	130.010.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	480.302.000	0	0	0	480.302.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	67.850.000	0	0	0	67.850.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	92.619.000	0	0	0	92.619.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	92.619.000	0	0	0	92.619.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	277.199.400	140.000.000	0	0	417.199.400
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.600.000	0	0	0	12.600.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	228.854.000	0	0	0	228.854.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	8.455.400	140.000.000	0	0	148.455.400
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.290.000	0	0	0	27.290.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	384.500.000	0	0	0	384.500.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	384.500.000	0	0	0	384.500.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	937.598.000	0	0	0	937.598.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	937.598.000	0	0	0	937.598.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	0	0	0	360.000.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	249.998.000	0	0	0	249.998.000
2	14	2.13.2.14.0.00.13.0000	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	327.600.000	0	0	0	327.600.000
2	**15**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**17.221.051.844**	**457.712.000**	**0**	**0**	**17.678.763.844**
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000				DINAS PERHUBUNGAN	17.221.051.844	457.712.000	0	0	17.678.763.844

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.758.247.409	0	0	0	6.758.247.409
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.113.097.625	0	0	0	5.113.097.625
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.021.397.625	0	0	0	5.021.397.625
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.700.000	0	0	0	91.700.000
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.001.810	0	0	0	234.001.810
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.063.210	0	0	0	21.063.210
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.010.600	0	0	0	75.010.600
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.079.000	0	0	0	18.079.000
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.995.000	0	0	0	19.995.000
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.854.000	0	0	0	99.854.000
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.345.218.974	0	0	0	1.345.218.974
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	0	0	0	132.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.213.218.974	0	0	0	1.213.218.974
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.929.000	0	0	0	65.929.000
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	0	0	0	10.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.929.000	0	0	0	55.929.000
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	699.446.336	457.712.000	0	0	1.157.158.336
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	333.878.200	0	0	0	333.878.200
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	333.878.200	0	0	0	333.878.200
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	55.260.336	0	0	0	55.260.336
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	55.260.336	0	0	0	55.260.336
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	83.697.800	457.712.000	0	0	541.409.800
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	83.697.800	457.712.000	0	0	541.409.800
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	67.510.600	0	0	0	67.510.600
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.510.600	0	0	0	67.510.600
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	159.099.400	0	0	0	159.099.400

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	159.099.400	0	0	0	159.099.400
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	9.763.358.099	0	0	0	9.763.358.099
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.060.822.283	0	0	0	7.060.822.283
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.060.822.283	0	0	0	7.060.822.283
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.702.535.816	0	0	0	2.702.535.816
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	104.840.500	0	0	0	104.840.500
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.597.695.316	0	0	0	2.597.695.316
2	**16**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**7.240.560.866**	**131.566.700**	**0**	**0**	**7.372.127.566**
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.240.560.866	131.566.700	0	0	7.372.127.566
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.301.227.566	32.960.000	0	0	3.334.187.566
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	0	0	0	40.000.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	0	0	0	40.000.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.267.940.966	0	0	0	2.267.940.966
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.231.940.966	0	0	0	2.231.940.966
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.000.000	0	0	0	36.000.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.644.000	0	0	0	304.644.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.060.000	0	0	0	13.060.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.000.000	0	0	0	110.000.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.000.000	0	0	0	65.000.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.990.000	0	0	0	15.990.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.594.000	0	0	0	100.594.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.010.000	32.960.000	0	0	34.970.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	2.010.000	32.960.000	0	0	34.970.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.716.000	0	0	0	457.716.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000	0	0	0	96.000.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.716.000	0	0	0	361.716.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.916.600	0	0	0	228.916.600
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.994.600	0	0	0	98.994.600

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.930.000	0	0	0	49.930.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.992.000	0	0	0	79.992.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	493.499.500	98.606.700	0	0	592.106.200
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	493.499.500	98.606.700	0	0	592.106.200
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	76.032.400	0	0	0	76.032.400
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	304.253.500	22.800.700	0	0	327.054.200
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	36.872.000	0	0	0	36.872.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	76.341.600	75.806.000	0	0	152.147.600
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.445.833.800	0	0	0	3.445.833.800
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.205.200.000	0	0	0	3.205.200.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.205.200.000	0	0	0	3.205.200.000
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	240.633.800	0	0	0	240.633.800
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	240.633.800	0	0	0	240.633.800
2	**17**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**6.095.057.249**	**0**	**0**	**0**	**6.095.057.249**
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.095.057.249	0	0	0	6.095.057.249
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.874.762.149	0	0	0	2.874.762.149
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.609.027.949	0	0	0	2.609.027.949
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.555.627.949	0	0	0	2.555.627.949
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.400.000	0	0	0	53.400.000
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.734.200	0	0	0	176.734.200
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.638.200	0	0	0	52.638.200
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.020.000	0	0	0	14.020.000
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	0	0	0	15.000.000
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.076.000	0	0	0	95.076.000
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.000.000	0	0	0	54.000.000
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000	0	0	0	54.000.000
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000	0	0	0	35.000.000
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	0	0	0	35.000.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	478.525.300	0	0	0	478.525.300
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	478.525.300	0	0	0	478.525.300
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	478.525.300	0	0	0	478.525.300
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	149.862.800	0	0	0	149.862.800
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.862.800	0	0	0	149.862.800
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	149.862.800	0	0	0	149.862.800
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	92.213.600	0	0	0	92.213.600
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	92.213.600	0	0	0	92.213.600
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	92.213.600	0	0	0	92.213.600
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.499.693.400	0	0	0	2.499.693.400
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.499.693.400	0	0	0	2.499.693.400
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2.499.693.400	0	0	0	2.499.693.400
2	**18**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**3.867.833.790**	**0**	**0**	**0**	**3.867.833.790**
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.867.833.790	0	0	0	3.867.833.790
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.311.020.790	0	0	0	3.311.020.790
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.669.516.030	0	0	0	2.669.516.030
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.634.716.030	0	0	0	2.634.716.030
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.800.000	0	0	0	34.800.000
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.244.000	0	0	0	11.244.000
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.244.000	0	0	0	11.244.000
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.056.200	0	0	0	276.056.200
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.717.500	0	0	0	5.717.500
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.493.200	0	0	0	148.493.200
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.801.500	0	0	0	18.801.500

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	0	0	0	3.000.000
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.044.000	0	0	0	100.044.000
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.367.060	0	0	0	291.367.060
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.800.000	0	0	0	100.800.000
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.567.060	0	0	0	190.567.060
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.837.500	0	0	0	62.837.500
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.487.500	0	0	0	47.487.500
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.350.000	0	0	0	15.350.000
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	76.813.000	0	0	0	76.813.000
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	76.813.000	0	0	0	76.813.000
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	76.813.000	0	0	0	76.813.000
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	480.000.000	0	0	0	480.000.000
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	480.000.000	0	0	0	480.000.000
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	263.310.000	0	0	0	263.310.000
2	18	2.18.2.07.0.00.18.0000	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	216.690.000	0	0	0	216.690.000
2	**19**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**688.643.550**	**15.000.000**	**0**	**0**	**703.643.550**
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	688.643.550	15.000.000	0	0	703.643.550
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	485.000.000	15.000.000	0	0	500.000.000
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	485.000.000	15.000.000	0	0	500.000.000
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	485.000.000	15.000.000	0	0	500.000.000
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	203.643.550	0	0	0	203.643.550
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	203.643.550	0	0	0	203.643.550
2	19	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	203.643.550	0	0	0	203.643.550
2	**20**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0	0
2	**22**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**1.238.076.300**	**0**	**0**	**0**	**1.238.076.300**

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.238.076.300	0	0	0	1.238.076.300
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	871.881.300	0	0	0	871.881.300
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	571.881.300	0	0	0	571.881.300
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	571.881.300	0	0	0	571.881.300
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	0	0	0	300.000.000
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	300.000.000	0	0	0	300.000.000
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	366.195.000	0	0	0	366.195.000
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	366.195.000	0	0	0	366.195.000
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	366.195.000	0	0	0	366.195.000
2	**23**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**3.953.792.342**	**11.217.709.804**	**0**	**0**	**15.171.502.146**
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.953.792.342	11.217.709.804	0	0	15.171.502.146
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.816.728.022	17.710.000	0	0	2.834.438.022
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.573.000	0	0	0	21.573.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.573.000	0	0	0	21.573.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.350.409.022	0	0	0	2.350.409.022
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.294.609.022	0	0	0	2.294.609.022
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.800.000	0	0	0	55.800.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.416.000	0	0	0	182.416.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	0	0	0	10.000.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.286.000	0	0	0	40.286.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.695.000	0	0	0	10.695.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.005.000	0	0	0	10.005.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.430.000	0	0	0	111.430.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	17.710.000	0	0	17.710.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	17.710.000	0	0	17.710.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.010.000	0	0	0	184.010.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.800.000	0	0	0	11.800.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.210.000	0	0	0	172.210.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.320.000	0	0	0	78.320.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	0	0	0	15.000.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.250.000	0	0	0	58.250.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.070.000	0	0	0	5.070.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.137.064.320	11.199.999.804	0	0	12.337.064.124
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	319.854.520	1.000.000.000	0	0	1.319.854.520
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	3.930.000	300.000.000	0	0	303.930.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.854.000	500.000.000	0	0	543.854.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	50.000.000	0	0	0	50.000.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	219.790.520	0	0	0	219.790.520
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	2.280.000	200.000.000	0	0	202.280.000
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	817.209.800	10.199.999.804	0	0	11.017.209.604
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	224.205.800	0	0	0	224.205.800
2	23	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	593.004.000	10.199.999.804	0	0	10.793.003.804
2	**24**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**167.576.700**	**0**	**0**	**0**	**167.576.700**
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	167.576.700	0	0	0	167.576.700
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	167.576.700	0	0	0	167.576.700
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	135.236.700	0	0	0	135.236.700
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	135.236.700	0	0	0	135.236.700
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	32.340.000	0	0	0	32.340.000
2	24	2.24.2.23.0.00.23.0000	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	32.340.000	0	0	0	32.340.000
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**42.017.865.681**	**1.630.275.000**	**0**	**0**	**43.648.140.681**
3	**25**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**24.100.200.375**	**127.000.000**	**0**	**0**	**24.227.200.375**
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000				DINAS PERIKANAN	23.951.760.455	0	0	0	23.951.760.455
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.732.510.365	0	0	0	4.732.510.365
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.134.548.865	0	0	0	4.134.548.865
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.708.671.365	0	0	0	3.708.671.365
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	425.877.500	0	0	0	425.877.500
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.261.500	0	0	0	163.261.500

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.750.000	0	0	0	9.750.000
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.329.000	0	0	0	29.329.000
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.486.500	0	0	0	9.486.500
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	0	0	0	15.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.696.000	0	0	0	99.696.000
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.000.000	0	0	0	348.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.000.000	0	0	0	348.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.700.000	0	0	0	86.700.000
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	0	0	0	75.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.700.000	0	0	0	11.700.000
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	18.772.729.250	0	0	0	18.772.729.250
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.684.489.400	0	0	0	18.684.489.400
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	18.684.489.400	0	0	0	18.684.489.400
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	88.239.850	0	0	0	88.239.850
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	88.239.850	0	0	0	88.239.850
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	216.616.840	0	0	0	216.616.840
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	216.616.840	0	0	0	216.616.840
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	216.616.840	0	0	0	216.616.840
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	229.904.000	0	0	0	229.904.000
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	29.999.900	0	0	0	29.999.900
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.999.900	0	0	0	29.999.900
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	99.914.900	0	0	0	99.914.900
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	99.914.900	0	0	0	99.914.900
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	99.989.200	0	0	0	99.989.200
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0000	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.989.200	0	0	0	99.989.200

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0001				BBIP SIKAKAP	148.439.920	127.000.000	0	0	275.439.920
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0001	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	148.439.920	127.000.000	0	0	275.439.920
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0001	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	148.439.920	127.000.000	0	0	275.439.920
3	25	3.25.0.00.0.00.25.0001	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	148.439.920	127.000.000	0	0	275.439.920
3	**26**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**6.502.157.006**	**946.475.000**	**0**	**0**	**7.448.632.006**
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.502.157.006	946.475.000	0	0	7.448.632.006
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.367.694.956	0	0	0	5.367.694.956
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.460.000	0	0	0	18.460.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.460.000	0	0	0	18.460.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.972.921.356	0	0	0	4.972.921.356
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.406.221.356	0	0	0	4.406.221.356
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	566.700.000	0	0	0	566.700.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	24.334.000	0	0	0	24.334.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24.334.000	0	0	0	24.334.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.589.600	0	0	0	184.589.600
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.149.600	0	0	0	94.149.600
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.440.000	0	0	0	20.440.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	0	0	0	70.000.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.000.000	0	0	0	84.000.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000	0	0	0	84.000.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.390.000	0	0	0	83.390.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.790.000	0	0	0	45.790.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.600.000	0	0	0	37.600.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	335.919.050	946.475.000	0	0	1.282.394.050
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	203.525.150	946.475.000	0	0	1.150.000.150
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	103.525.150	946.475.000	0	0	1.050.000.150
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000	0	0	0	100.000.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	132.393.900	0	0	0	132.393.900
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	132.393.900	0	0	0	132.393.900
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	167.710.000	0	0	0	167.710.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	167.710.000	0	0	0	167.710.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	67.710.000	0	0	0	67.710.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000	0	0	0	100.000.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	630.833.000	0	0	0	630.833.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	630.833.000	0	0	0	630.833.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	192.020.000	0	0	0	192.020.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	339.580.000	0	0	0	339.580.000
3	26	3.26.2.19.0.00.26.0000	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	99.233.000	0	0	0	99.233.000
3	**27**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**7.180.054.900**	**556.800.000**	**0**	**0**	**7.736.854.900**
2	09	2.09.3.27.0.00.09.0000				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7.180.054.900	556.800.000	0	0	7.736.854.900
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.124.769.000	0	0	0	1.124.769.000
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	974.456.000	0	0	0	974.456.000
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	974.456.000	0	0	0	974.456.000
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.933.000	0	0	0	89.933.000
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.933.000	0	0	0	65.933.000
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.000.000	0	0	0	24.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.380.000	0	0	0	60.380.000
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.380.000	0	0	0	53.380.000
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	0	0	0	7.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.991.176.100	0	0	0	5.991.176.100
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.705.920.000	0	0	0	3.705.920.000
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.705.920.000	0	0	0	3.705.920.000
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.285.256.100	0	0	0	2.285.256.100
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.285.256.100	0	0	0	2.285.256.100
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	64.109.800	556.800.000	0	0	620.909.800

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	64.109.800	556.800.000	0	0	620.909.800
3	27	2.09.3.27.0.00.09.0000	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	64.109.800	556.800.000	0	0	620.909.800
3	**30**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**167.914.900**	**0**	**0**	**0**	**167.914.900**
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	167.914.900	0	0	0	167.914.900
3	30	2.17.3.30.3.31.17.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	167.914.900	0	0	0	167.914.900
3	30	2.17.3.30.3.31.17.0000	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	167.914.900	0	0	0	167.914.900
3	30	2.17.3.30.3.31.17.0000	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	167.914.900	0	0	0	167.914.900
3	**31**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**4.067.538.500**	**0**	**0**	**0**	**4.067.538.500**
2	17	2.17.3.30.3.31.17.0000				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.067.538.500	0	0	0	4.067.538.500
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.180.000	0	0	0	150.180.000
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.180.000	0	0	0	150.180.000
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.180.000	0	0	0	150.180.000
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.917.358.500	0	0	0	3.917.358.500
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.917.358.500	0	0	0	3.917.358.500
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.917.358.500	0	0	0	3.917.358.500
4						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**72.127.144.799**	**3.749.139.027**	**0**	**0**	**75.876.283.826**
4	**01**					**SEKRETARIAT DAERAH**	**43.911.258.145**	**3.162.577.600**	**0**	**0**	**47.073.835.745**
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000				SEKRETARIAT DAERAH	43.911.258.145	3.162.577.600	0	0	47.073.835.745
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.941.725.045	3.162.577.600	0	0	29.104.302.645
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.700.000	0	0	0	10.700.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.700.000	0	0	0	10.700.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.284.730.293	0	0	0	10.284.730.293
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.158.730.293	0	0	0	10.158.730.293
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126.000.000	0	0	0	126.000.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.544.793.600	0	0	0	1.544.793.600
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	471.331.600	0	0	0	471.331.600
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	108.470.000	0	0	0	108.470.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	457.887.000	0	0	0	457.887.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	507.105.000	0	0	0	507.105.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	168.484.000	3.162.577.600	0	0	3.331.061.600
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.309.000	2.825.000.000	0	0	2.848.309.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	19.465.000	44.781.600	0	0	64.246.600

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.710.000	292.796.000	0	0	418.506.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.873.419.478	0	0	0	1.873.419.478
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	498.450.000	0	0	0	498.450.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.374.969.478	0	0	0	1.374.969.478
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.753.689.900	0	0	0	8.753.689.900
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	399.999.900	0	0	0	399.999.900
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.193.150.000	0	0	0	6.193.150.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	0	0	0	20.000.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.980.000	0	0	0	179.980.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.960.560.000	0	0	0	1.960.560.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.511.073.104	0	0	0	1.511.073.104
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	478.446.104	0	0	0	478.446.104
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	111.000.000	0	0	0	111.000.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	921.627.000	0	0	0	921.627.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	348.845.550	0	0	0	348.845.550
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	348.845.550	0	0	0	348.845.550
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13		Penataan Organisasi	627.189.320	0	0	0	627.189.320
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	201.243.000	0	0	0	201.243.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	107.143.000	0	0	0	107.143.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	161.849.120	0	0	0	161.849.120
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	39.694.200	0	0	0	39.694.200
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	117.260.000	0	0	0	117.260.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	818.799.800	0	0	0	818.799.800
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	255.729.000	0	0	0	255.729.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	308.568.200	0	0	0	308.568.200
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	254.502.600	0	0	0	254.502.600
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.000.303.400	0	0	0	14.000.303.400
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	515.471.800	0	0	0	515.471.800
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	152.266.000	0	0	0	152.266.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	115.665.900	0	0	0	115.665.900

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	247.539.900	0	0	0	247.539.900
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10.131.584.600	0	0	0	10.131.584.600
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.498.370.400	0	0	0	1.498.370.400
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4.301.258.200	0	0	0	4.301.258.200
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.331.956.000	0	0	0	4.331.956.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.070.247.000	0	0	0	1.070.247.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	220.333.200	0	0	0	220.333.200
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	694.873.000	0	0	0	694.873.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	155.040.800	0	0	0	155.040.800
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	2.283.000.000	0	0	0	2.283.000.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2.283.000.000	0	0	0	2.283.000.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.969.229.700	0	0	0	3.969.229.700
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	690.425.800	0	0	0	690.425.800
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	407.457.000	0	0	0	407.457.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	282.968.800	0	0	0	282.968.800
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	803.099.900	0	0	0	803.099.900
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	175.000.000	0	0	0	175.000.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	220.499.900	0	0	0	220.499.900
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	407.600.000	0	0	0	407.600.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.103.405.600	0	0	0	1.103.405.600
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	358.505.400	0	0	0	358.505.400
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	509.264.200	0	0	0	509.264.200
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	235.636.000	0	0	0	235.636.000
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.372.298.400	0	0	0	1.372.298.400
4	01	4.01.3.29.2.10.41.0000	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1.372.298.400	0	0	0	1.372.298.400
4	**02**					**SEKRETARIAT DPRD**	**28.215.886.654**	**586.561.427**	**0**	**0**	**28.802.448.081**
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000				SEKRETARIAT DPRD	28.215.886.654	586.561.427	0	0	28.802.448.081
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.599.148.254	586.561.427	0	0	16.185.709.681
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.110.346.604	0	0	0	3.110.346.604
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.026.346.604	0	0	0	3.026.346.604
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.000.000	0	0	0	84.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.368.000	0	0	0	79.368.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	79.368.000	0	0	0	79.368.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.021.985.500	256.048.927	0	0	1.278.034.427
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.224.000	0	0	0	23.224.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.600.000	197.048.927	0	0	307.648.927
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	352.195.800	59.000.000	0	0	411.195.800
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	283.778.200	0	0	0	283.778.200
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.980.500	0	0	0	72.980.500
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	78.975.000	0	0	0	78.975.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.232.000	0	0	0	100.232.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.610.000	330.512.500	0	0	333.122.500
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	2.610.000	330.512.500	0	0	333.122.500
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	905.416.000	0	0	0	905.416.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.500.000	0	0	0	264.500.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	640.916.000	0	0	0	640.916.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.200.000	0	0	0	786.200.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	269.200.000	0	0	0	269.200.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.710.000	0	0	0	109.710.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	407.290.000	0	0	0	407.290.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	9.603.990.550	0	0	0	9.603.990.550
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.380.080.550	0	0	0	9.380.080.550
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	223.910.000	0	0	0	223.910.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	89.231.600	0	0	0	89.231.600
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	89.231.600	0	0	0	89.231.600
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.616.738.400	0	0	0	12.616.738.400
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.587.580.000	0	0	0	1.587.580.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	290.948.000	0	0	0	290.948.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	984.244.000	0	0	0	984.244.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	280.888.000	0	0	0	280.888.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	31.500.000	0	0	0	31.500.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	694.448.000	0	0	0	694.448.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	24.767.800	0	0	0	24.767.800
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24.547.800	0	0	0	24.547.800
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	03	Pembahasan APBD	209.453.800	0	0	0	209.453.800

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	222.257.800	0	0	0	222.257.800
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	213.420.800	0	0	0	213.420.800
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.417.339.600	0	0	0	3.417.339.600
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	707.746.000	0	0	0	707.746.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	612.608.000	0	0	0	612.608.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	757.964.000	0	0	0	757.964.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	482.460.000	0	0	0	482.460.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	430.376.000	0	0	0	430.376.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	187.730.800	0	0	0	187.730.800
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	238.454.800	0	0	0	238.454.800
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	2.115.509.800	0	0	0	2.115.509.800
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	1.544.664.000	0	0	0	1.544.664.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	201.250.000	0	0	0	201.250.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	120.000.000	0	0	0	120.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	240.000.000	0	0	0	240.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	9.595.800	0	0	0	9.595.800
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.283.028.600	0	0	0	3.283.028.600
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.082.585.000	0	0	0	1.082.585.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	2.200.443.600	0	0	0	2.200.443.600
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	1.518.832.400	0	0	0	1.518.832.400
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.490.570.000	0	0	0	1.490.570.000
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	28.262.400	0	0	0	28.262.400
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**45.968.121.816**	**508.389.500**	**4.497.167.877**	**79.304.921.569**	**130.278.600.762**
5	**01**					**PERENCANAAN**	**6.728.461.662**	**418.700.000**	**0**	**0**	**7.147.161.662**
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.728.461.662	418.700.000	0	0	7.147.161.662
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.565.766.462	418.700.000	0	0	4.984.466.462
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.810.245.440	0	0	0	3.810.245.440
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.763.645.440	0	0	0	3.763.645.440
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.600.000	0	0	0	46.600.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.535.500	0	0	0	202.535.500
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.001.500	0	0	0	7.001.500
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.276.000	0	0	0	73.276.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.040.000	0	0	0	10.040.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.150.000	0	0	0	12.150.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.068.000	0	0	0	100.068.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.672.022	418.700.000	0	0	426.372.022
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.672.022	418.700.000	0	0	426.372.022

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.436.000	0	0	0	464.436.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.600.000	0	0	0	297.600.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.836.000	0	0	0	166.836.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.877.500	0	0	0	80.877.500
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.877.500	0	0	0	76.877.500
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	0	0	0	4.000.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.462.695.200	0	0	0	1.462.695.200
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.056.450.800	0	0	0	1.056.450.800
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	104.179.400	0	0	0	104.179.400
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	386.769.000	0	0	0	386.769.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	565.502.400	0	0	0	565.502.400
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	126.287.200	0	0	0	126.287.200
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	126.287.200	0	0	0	126.287.200
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	279.957.200	0	0	0	279.957.200
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	279.957.200	0	0	0	279.957.200
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	700.000.000	0	0	0	700.000.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	300.000.000	0	0	0	300.000.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.000.000	0	0	0	100.000.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	200.000.000	0	0	0	200.000.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	200.000.000	0	0	0	200.000.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	100.000.000	0	0	0	100.000.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	100.000.000	0	0	0	100.000.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	200.000.000	0	0	0	200.000.000
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	119.995.300	0	0	0	119.995.300
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	80.004.700	0	0	0	80.004.700
5	**02**					**KEUANGAN**	**32.364.556.335**	**88.519.500**	**4.497.167.877**	**79.304.921.569**	**116.255.165.281**
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000				BADAN KEUANGAN DAERAH	32.364.556.335	88.519.500	4.497.167.877	79.304.921.569	116.255.165.281
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.390.144.585	76.019.500	0	0	28.466.164.085
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.197.655.609	0	0	0	26.197.655.609
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.011.295.609	0	0	0	26.011.295.609
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	186.360.000	0	0	0	186.360.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	125.272.000	0	0	0	125.272.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	125.272.000	0	0	0	125.272.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.617.000	0	0	0	402.617.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.550.000	0	0	0	45.550.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.392.000	0	0	0	80.392.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.577.000	0	0	0	125.577.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.100.000	0	0	0	35.100.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.990.000	0	0	0	15.990.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.008.000	0	0	0	100.008.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.242.000	76.019.500	0	0	119.261.500
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.242.000	76.019.500	0	0	119.261.500
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.278.293.976	0	0	0	1.278.293.976
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	729.456.000	0	0	0	729.456.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.837.976	0	0	0	548.837.976
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.064.000	0	0	0	343.064.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.204.000	0	0	0	228.204.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.860.000	0	0	0	114.860.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.298.780.000	0	4.497.167.877	79.304.921.569	86.100.869.446
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.225.919.000	0	0	0	1.225.919.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	53.004.200	0	0	0	53.004.200

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	44.419.200	0	0	0	44.419.200
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	477.692.000	0	0	0	477.692.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	489.969.000	0	0	0	489.969.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	61.985.800	0	0	0	61.985.800
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	98.848.800	0	0	0	98.848.800
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	617.536.600	0	0	0	617.536.600
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	325.345.000	0	0	0	325.345.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	76.476.000	0	0	0	76.476.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	70.180.400	0	0	0	70.180.400
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	71.979.600	0	0	0	71.979.600
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	73.555.600	0	0	0	73.555.600
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	455.324.400	0	0	0	455.324.400
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	127.240.600	0	0	0	127.240.600
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	52.217.600	0	0	0	52.217.600
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	104.441.600	0	0	0	104.441.600
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	171.424.600	0	0	0	171.424.600
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	4.497.167.877	79.304.921.569	83.802.089.446
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	4.497.167.877	0	4.497.167.877
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0	0	0	79.304.921.569	79.304.921.569
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	447.537.300	0	0	0	447.537.300
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	447.537.300	0	0	0	447.537.300

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	24.497.600	0	0	0	24.497.600
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	62.383.600	0	0	0	62.383.600
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	157.759.600	0	0	0	157.759.600
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	115.162.000	0	0	0	115.162.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	56.741.500	0	0	0	56.741.500
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30.993.000	0	0	0	30.993.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.228.094.450	12.500.000	0	0	1.240.594.450
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.228.094.450	12.500.000	0	0	1.240.594.450
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	236.460.000	0	0	0	236.460.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	101.794.400	12.500.000	0	0	114.294.400
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	307.190.050	0	0	0	307.190.050
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	81.364.000	0	0	0	81.364.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	97.016.000	0	0	0	97.016.000
5	02	5.02.0.00.0.00.52.0000	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	404.270.000	0	0	0	404.270.000
5	**03**					**KEPEGAWAIAN**	**5.640.418.919**	**1.170.000**	**0**	**0**	**5.641.588.919**
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.640.418.919	1.170.000	0	0	5.641.588.919
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.750.023.319	1.170.000	0	0	3.751.193.319
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.089.151.467	0	0	0	3.089.151.467
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.053.251.467	0	0	0	3.053.251.467
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.900.000	0	0	0	35.900.000
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.124.594	1.170.000	0	0	210.294.594
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.509.000	0	0	0	8.509.000
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.629.594	1.170.000	0	0	71.799.594
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.061.000	0	0	0	15.061.000
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	0	0	0	15.000.000
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.925.000	0	0	0	99.925.000
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.830.458	0	0	0	381.830.458
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.000.000	0	0	0	234.000.000
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.830.458	0	0	0	147.830.458
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.916.800	0	0	0	69.916.800

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.696.800	0	0	0	39.696.800
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.220.000	0	0	0	30.220.000
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.890.395.600	0	0	0	1.890.395.600
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	266.997.000	0	0	0	266.997.000
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	192.000.000	0	0	0	192.000.000
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	74.997.000	0	0	0	74.997.000
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	736.605.000	0	0	0	736.605.000
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	661.625.000	0	0	0	661.625.000
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	74.980.000	0	0	0	74.980.000
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	682.039.600	0	0	0	682.039.600
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	682.039.600	0	0	0	682.039.600
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	204.754.000	0	0	0	204.754.000
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	204.754.000	0	0	0	204.754.000
5	**04**					**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**688.891.400**	**0**	**0**	**0**	**688.891.400**
5	03	5.03.5.04.0.00.53.0000				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	688.891.400	0	0	0	688.891.400
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	688.891.400	0	0	0	688.891.400
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	688.891.400	0	0	0	688.891.400
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	688.891.400	0	0	0	688.891.400
5	**05**					**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**545.793.500**	**0**	**0**	**0**	**545.793.500**
5	01	5.01.5.05.0.00.51.0000				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	545.793.500	0	0	0	545.793.500
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	545.793.500	0	0	0	545.793.500
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	545.793.500	0	0	0	545.793.500
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	295.260.500	0	0	0	295.260.500
5	05	5.01.5.05.0.00.51.0000	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	250.533.000	0	0	0	250.533.000
6						**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**9.502.898.877**	**85.414.000**	**0**	**0**	**9.588.312.877**
6	**01**					**INSPEKTORAT DAERAH**	**9.502.898.877**	**85.414.000**	**0**	**0**	**9.588.312.877**
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000				INSPEKTORAT	9.502.898.877	85.414.000	0	0	9.588.312.877
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.933.046.477	85.414.000	0	0	6.018.460.477
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.380.175.873	0	0	0	4.380.175.873
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.342.135.873	0	0	0	4.342.135.873
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.040.000	0	0	0	38.040.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.068.400	0	0	0	149.068.400

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	149.068.400	0	0	0	149.068.400
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	866.731.800	8.000.000	0	0	874.731.800
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000	0	0	0	13.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.890.000	8.000.000	0	0	9.890.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.794.000	0	0	0	187.794.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.000.000	0	0	0	44.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	0	0	0	20.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.047.800	0	0	0	600.047.800
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.285.000	77.414.000	0	0	157.699.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	455.000	57.080.000	0	0	57.535.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	79.830.000	20.334.000	0	0	100.164.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.680.404	0	0	0	287.680.404
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.820.900	0	0	0	134.820.900
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.859.504	0	0	0	152.859.504
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.105.000	0	0	0	169.105.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.750.000	0	0	0	76.750.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.820.000	0	0	0	56.820.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.535.000	0	0	0	35.535.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.993.694.600	0	0	0	2.993.694.600
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.701.398.500	0	0	0	2.701.398.500
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	267.970.000	0	0	0	267.970.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	432.175.000	0	0	0	432.175.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	671.197.900	0	0	0	671.197.900
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	117.760.000	0	0	0	117.760.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	05	Pengawasan Desa	634.375.000	0	0	0	634.375.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	429.703.000	0	0	0	429.703.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	148.217.600	0	0	0	148.217.600
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	292.296.100	0	0	0	292.296.100
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	292.296.100	0	0	0	292.296.100
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	576.157.800	0	0	0	576.157.800
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	221.424.000	0	0	0	221.424.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	221.424.000	0	0	0	221.424.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	354.733.800	0	0	0	354.733.800

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	0	0	0	100.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	49.129.800	0	0	0	49.129.800
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	139.842.400	0	0	0	139.842.400
6	01	6.01.0.00.0.00.61.0000	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	65.761.600	0	0	0	65.761.600
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**	**24.604.322.371**	**504.685.300**	**0**	**0**	**25.109.007.671**
7	**01**					**KECAMATAN**	**24.604.322.371**	**504.685.300**	**0**	**0**	**25.109.007.671**
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000				KECAMATAN SIBERUT UTARA	2.910.428.185	15.450.000	0	0	2.925.878.185
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.573.838.985	0	0	0	2.573.838.985
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.080.000	0	0	0	57.080.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.080.000	0	0	0	57.080.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.271.786.185	0	0	0	2.271.786.185
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.056.531.185	0	0	0	2.056.531.185
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	215.255.000	0	0	0	215.255.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.562.800	0	0	0	91.562.800
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.155.500	0	0	0	2.155.500
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.517.300	0	0	0	21.517.300
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.450.000	0	0	0	2.450.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.440.000	0	0	0	65.440.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.000.000	0	0	0	114.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	0	0	0	24.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000	0	0	0	90.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.410.000	0	0	0	39.410.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.450.000	0	0	0	19.450.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.500.000	0	0	0	4.500.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.460.000	0	0	0	15.460.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75.002.000	15.450.000	0	0	90.452.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	75.002.000	15.450.000	0	0	90.452.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	75.002.000	15.450.000	0	0	90.452.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.193.200	0	0	0	52.193.200
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52.193.200	0	0	0	52.193.200

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	31.528.200	0	0	0	31.528.200
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.665.000	0	0	0	20.665.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	134.389.000	0	0	0	134.389.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	134.389.000	0	0	0	134.389.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.044.000	0	0	0	100.044.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.345.000	0	0	0	34.345.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75.005.000	0	0	0	75.005.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75.005.000	0	0	0	75.005.000
7	01	7.01.0.00.0.00.71.0000	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75.005.000	0	0	0	75.005.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000				KECAMATAN SIBERUT TENGAH	2.036.782.128	47.703.300	0	0	2.084.485.428
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.797.322.178	47.703.300	0	0	1.845.025.478
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.680.000	0	0	0	51.680.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.680.000	0	0	0	51.680.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.486.992.178	0	0	0	1.486.992.178
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.374.312.178	0	0	0	1.374.312.178
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	112.680.000	0	0	0	112.680.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.650.000	0	0	0	83.650.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.729.000	0	0	0	2.729.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.642.000	0	0	0	21.642.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.009.000	0	0	0	5.009.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.270.000	0	0	0	54.270.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	47.703.300	0	0	47.703.300
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	18.098.800	0	0	18.098.800
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	9.604.500	0	0	9.604.500
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	20.000.000	0	0	20.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.500.000	0	0	0	133.500.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	0	0	0	6.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.500.000	0	0	0	127.500.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.500.000	0	0	0	41.500.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000	0	0	0	500.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	0	0	0	6.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	0	0	0	35.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.690.000	0	0	0	36.690.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	36.690.000	0	0	0	36.690.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36.690.000	0	0	0	36.690.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.474.000	0	0	0	33.474.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.474.000	0	0	0	33.474.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.516.000	0	0	0	13.516.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.958.000	0	0	0	19.958.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	78.661.200	0	0	0	78.661.200
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	78.661.200	0	0	0	78.661.200
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	59.758.000	0	0	0	59.758.000
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.903.200	0	0	0	18.903.200
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90.634.750	0	0	0	90.634.750
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90.634.750	0	0	0	90.634.750
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	90.634.750	0	0	0	90.634.750
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000				KECAMATAN SIBERUT BARAT	1.979.933.417	75.000.000	0	0	2.054.933.417
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.655.622.917	75.000.000	0	0	1.730.622.917
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.440.000	0	0	0	55.440.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.440.000	0	0	0	55.440.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.316.951.717	0	0	0	1.316.951.717
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.092.606.717	0	0	0	1.092.606.717

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	224.345.000	0	0	0	224.345.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.159.200	0	0	0	119.159.200
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.844.000	0	0	0	5.844.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.010.200	0	0	0	38.010.200
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.925.000	0	0	0	1.925.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.380.000	0	0	0	73.380.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	75.000.000	0	0	75.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	75.000.000	0	0	75.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.072.000	0	0	0	141.072.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	0	0	0	24.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.072.000	0	0	0	117.072.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.000.000	0	0	0	23.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000	0	0	0	13.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	0	0	0	10.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75.000.000	0	0	0	75.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	75.000.000	0	0	0	75.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	75.000.000	0	0	0	75.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.055.500	0	0	0	27.055.500
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.055.500	0	0	0	27.055.500
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.060.000	0	0	0	18.060.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.995.500	0	0	0	8.995.500
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	122.255.000	0	0	0	122.255.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	122.255.000	0	0	0	122.255.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.995.000	0	0	0	99.995.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.260.000	0	0	0	22.260.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.000.000	0	0	0	100.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.000.000	0	0	0	100.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100.000.000	0	0	0	100.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000				KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	2.164.530.313	0	0	0	2.164.530.313
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.914.992.113	0	0	0	1.914.992.113
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.890.000	0	0	0	35.890.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.890.000	0	0	0	35.890.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.606.466.613	0	0	0	1.606.466.613
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.308.126.613	0	0	0	1.308.126.613
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	298.340.000	0	0	0	298.340.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.499.500	0	0	0	135.499.500
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.057.000	0	0	0	4.057.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.830.700	0	0	0	51.830.700
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.551.800	0	0	0	2.551.800
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.060.000	0	0	0	77.060.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.136.000	0	0	0	137.136.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	0	0	0	24.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.136.000	0	0	0	113.136.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.380.000	0	0	0	39.380.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	39.380.000	0	0	0	39.380.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	39.380.000	0	0	0	39.380.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.823.200	0	0	0	34.823.200
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.823.200	0	0	0	34.823.200
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.886.200	0	0	0	25.886.200
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.937.000	0	0	0	8.937.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	79.005.000	0	0	0	79.005.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	79.005.000	0	0	0	79.005.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	67.970.000	0	0	0	67.970.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.035.000	0	0	0	11.035.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	96.330.000	0	0	0	96.330.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	96.330.000	0	0	0	96.330.000
7	01	7.01.0.00.0.00.74.0000	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	96.330.000	0	0	0	96.330.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000				KECAMATAN SIBERUT SELATAN	2.440.286.280	0	0	0	2.440.286.280
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.135.008.780	0	0	0	2.135.008.780
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.105.000	0	0	0	36.105.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.105.000	0	0	0	36.105.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.809.099.039	0	0	0	1.809.099.039
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.710.969.039	0	0	0	1.710.969.039
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.130.000	0	0	0	98.130.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.683.000	0	0	0	87.683.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.210.000	0	0	0	5.210.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.763.000	0	0	0	30.763.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.990.000	0	0	0	4.990.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.720.000	0	0	0	46.720.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.700.000	0	0	0	107.700.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	0	0	0	12.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.700.000	0	0	0	95.700.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.421.741	0	0	0	94.421.741
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000	0	0	0	37.500.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.850.000	0	0	0	20.850.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.071.741	0	0	0	36.071.741
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.435.000	0	0	0	45.435.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.440.000	0	0	0	15.440.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.440.000	0	0	0	15.440.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29.995.000	0	0	0	29.995.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29.995.000	0	0	0	29.995.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.109.000	0	0	0	42.109.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.109.000	0	0	0	42.109.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.749.000	0	0	0	20.749.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.360.000	0	0	0	21.360.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125.090.000	0	0	0	125.090.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	125.090.000	0	0	0	125.090.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	95.590.000	0	0	0	95.590.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29.500.000	0	0	0	29.500.000
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	92.643.500	0	0	0	92.643.500
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	92.643.500	0	0	0	92.643.500
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	70.817.500	0	0	0	70.817.500
7	01	7.01.0.00.0.00.75.0000	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21.826.000	0	0	0	21.826.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000				KECAMATAN SIPORA UTARA	2.517.437.650	19.200.000	0	0	2.536.637.650
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.260.189.650	19.200.000	0	0	2.279.389.650
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	0	0	0	75.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	0	0	0	75.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.576.744.250	0	0	0	1.576.744.250
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.543.144.250	0	0	0	1.543.144.250
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.600.000	0	0	0	33.600.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.191.600	0	0	0	132.191.600
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.925.000	0	0	0	4.925.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.937.800	0	0	0	49.937.800
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.504.800	0	0	0	7.504.800
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.824.000	0	0	0	69.824.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	855.000	19.200.000	0	0	20.055.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	855.000	19.200.000	0	0	20.055.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.388.000	0	0	0	215.388.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	0	0	0	24.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.388.000	0	0	0	191.388.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.010.800	0	0	0	260.010.800
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.450.000	0	0	0	29.450.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.650.000	0	0	0	28.650.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000	0	0	0	3.650.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.260.800	0	0	0	198.260.800
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	87.924.000	0	0	0	87.924.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	87.924.000	0	0	0	87.924.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	37.924.000	0	0	0	37.924.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.000.000	0	0	0	50.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.478.000	0	0	0	43.478.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43.478.000	0	0	0	43.478.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.868.000	0	0	0	15.868.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.610.000	0	0	0	27.610.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	84.115.000	0	0	0	84.115.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	84.115.000	0	0	0	84.115.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	64.115.000	0	0	0	64.115.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.000.000	0	0	0	20.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	41.731.000	0	0	0	41.731.000
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.731.000	0	0	0	41.731.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	41.731.000	0	0	0	41.731.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000				KECAMATAN SIPORA SELATAN	2.936.665.722	312.732.000	0	0	3.249.397.722
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.653.639.222	312.732.000	0	0	2.966.371.222
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.840.000	0	0	0	39.840.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.840.000	0	0	0	39.840.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.288.965.622	0	0	0	2.288.965.622
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.225.095.622	0	0	0	2.225.095.622
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.870.000	0	0	0	63.870.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.909.600	24.100.000	0	0	151.009.600
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.000	0	0	0	4.995.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	24.100.000	0	0	24.100.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.214.600	0	0	0	63.214.600
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	0	0	0	5.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.700.000	0	0	0	53.700.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.980.000	288.632.000	0	0	295.612.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.980.000	268.700.000	0	0	275.680.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	19.932.000	0	0	19.932.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.944.000	0	0	0	187.944.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	0	0	0	24.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.944.000	0	0	0	163.944.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000	0	0	0	3.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000	0	0	0	3.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.156.000	0	0	0	38.156.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	38.156.000	0	0	0	38.156.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.000.000	0	0	0	10.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	28.156.000	0	0	0	28.156.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	67.622.400	0	0	0	67.622.400
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.632.400	0	0	0	47.632.400
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27.632.400	0	0	0	27.632.400
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	0	0	0	20.000.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	19.990.000	0	0	0	19.990.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	19.990.000	0	0	0	19.990.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	103.522.900	0	0	0	103.522.900
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	103.522.900	0	0	0	103.522.900
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	81.522.900	0	0	0	81.522.900
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.000.000	0	0	0	22.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	73.725.200	0	0	0	73.725.200
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	73.725.200	0	0	0	73.725.200
7	01	7.01.0.00.0.00.77.0000	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	73.725.200	0	0	0	73.725.200
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000				KECAMATAN PAGAI UTARA	2.265.468.583	22.810.000	0	0	2.288.278.583
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.911.430.333	22.810.000	0	0	1.934.240.333
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.579.645.933	0	0	0	1.579.645.933
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.427.725.933	0	0	0	1.427.725.933
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.920.000	0	0	0	151.920.000
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.668.400	22.810.000	0	0	173.478.400
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.647.000	0	0	0	9.647.000
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	22.810.000	0	0	22.810.000
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.681.400	0	0	0	46.681.400
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.400.000	0	0	0	5.400.000
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.940.000	0	0	0	88.940.000
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.116.000	0	0	0	169.116.000
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	0	0	0	12.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.116.000	0	0	0	157.116.000
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000	0	0	0	12.000.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.000.000	0	0	0	12.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	120.832.500	0	0	0	120.832.500
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	120.832.500	0	0	0	120.832.500
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	47.977.500	0	0	0	47.977.500
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.855.000	0	0	0	72.855.000
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	109.475.750	0	0	0	109.475.750
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	109.475.750	0	0	0	109.475.750
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	74.961.000	0	0	0	74.961.000
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.514.750	0	0	0	34.514.750
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	123.730.000	0	0	0	123.730.000
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	123.730.000	0	0	0	123.730.000
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	74.990.000	0	0	0	74.990.000
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	48.740.000	0	0	0	48.740.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000				KECAMATAN PAGAI SELATAN	2.219.453.111	0	0	0	2.219.453.111
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.928.914.911	0	0	0	1.928.914.911
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.795.000	0	0	0	60.795.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.795.000	0	0	0	60.795.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.537.306.711	0	0	0	1.537.306.711
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.379.186.711	0	0	0	1.379.186.711
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.120.000	0	0	0	158.120.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.167.200	0	0	0	123.167.200
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.260.000	0	0	0	1.260.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.225.200	0	0	0	34.225.200
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.030.000	0	0	0	2.030.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.652.000	0	0	0	85.652.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.716.000	0	0	0	169.716.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	0	0	0	4.800.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.916.000	0	0	0	164.916.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.930.000	0	0	0	37.930.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.250.000	0	0	0	32.250.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	0	0	0	5.680.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	95.809.200	0	0	0	95.809.200
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	95.809.200	0	0	0	95.809.200
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.434.200	0	0	0	20.434.200
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.375.000	0	0	0	75.375.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	94.729.000	0	0	0	94.729.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	94.729.000	0	0	0	94.729.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75.000.000	0	0	0	75.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.729.000	0	0	0	19.729.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.000.000	0	0	0	100.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.000.000	0	0	0	100.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100.000.000	0	0	0	100.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000				KECAMATAN SIKAKAP	3.133.336.982	11.790.000	0	0	3.145.126.982
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.886.830.932	11.790.000	0	0	2.898.620.932
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.990.000	0	0	0	29.990.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.990.000	0	0	0	29.990.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.617.469.332	0	0	0	2.617.469.332
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.474.799.332	0	0	0	2.474.799.332
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	142.670.000	0	0	0	142.670.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.235.600	11.790.000	0	0	125.025.600
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.995.000	0	0	0	7.995.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	11.790.000	0	0	11.790.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.600	0	0	0	30.000.600
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.240.000	0	0	0	75.240.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.136.000	0	0	0	116.136.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	0	0	0	30.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.136.000	0	0	0	86.136.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	0	0	0	10.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	0	0	0	10.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.994.000	0	0	0	39.994.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	39.994.000	0	0	0	39.994.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	39.994.000	0	0	0	39.994.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	59.988.050	0	0	0	59.988.050
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	59.988.050	0	0	0	59.988.050
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.994.050	0	0	0	34.994.050
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.994.000	0	0	0	24.994.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	96.534.000	0	0	0	96.534.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	96.534.000	0	0	0	96.534.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	66.541.000	0	0	0	66.541.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29.993.000	0	0	0	29.993.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	49.990.000	0	0	0	49.990.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	49.990.000	0	0	0	49.990.000
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	49.990.000	0	0	0	49.990.000
8						**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**4.775.418.404**	**11.790.000**	**0**	**0**	**4.787.208.404**
8	**01**					**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**4.775.418.404**	**11.790.000**	**0**	**0**	**4.787.208.404**
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000				KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.775.418.404	11.790.000	0	0	4.787.208.404
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.397.739.204	11.790.000	0	0	1.409.529.204

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.123.086.704	0	0	0	1.123.086.704
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.087.086.704	0	0	0	1.087.086.704
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.000.000	0	0	0	36.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.058.100	0	0	0	130.058.100
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.047.000	0	0	0	5.047.000
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.001.200	0	0	0	35.001.200
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.005.900	0	0	0	5.005.900
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.990.000	0	0	0	9.990.000
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.014.000	0	0	0	75.014.000
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	11.790.000	0	0	11.790.000
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	11.790.000	0	0	11.790.000
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.472.000	0	0	0	119.472.000
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	0	0	0	24.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.472.000	0	0	0	95.472.000
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.122.400	0	0	0	25.122.400
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.002.400	0	0	0	20.002.400
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.120.000	0	0	0	5.120.000
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	650.071.900	0	0	0	650.071.900
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	650.071.900	0	0	0	650.071.900
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	650.071.900	0	0	0	650.071.900
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.237.314.000	0	0	0	2.237.314.000
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.237.314.000	0	0	0	2.237.314.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.209.907.000	0	0	0	2.209.907.000
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	27.407.000	0	0	0	27.407.000
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	27.037.800	0	0	0	27.037.800
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	27.037.800	0	0	0	27.037.800
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	27.037.800	0	0	0	27.037.800
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	271.553.600	0	0	0	271.553.600
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	271.553.600	0	0	0	271.553.600
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	129.030.600	0	0	0	129.030.600
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	64.136.000	0	0	0	64.136.000
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	78.387.000	0	0	0	78.387.000
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	191.701.900	0	0	0	191.701.900
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	191.701.900	0	0	0	191.701.900

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	36.058.500	0	0	0	36.058.500
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	37.164.400	0	0	0	37.164.400
8	01	8.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	118.479.000	0	0	0	118.479.000
						TOTAL	**635.681.054.019**	**239.607.613.815**	**4.497.167.877**	**79.304.921.569**	**959.090.757.280**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Martinus D.

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
01				**PELAYANAN UMUM**					
01	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	138.467.036.120	5.840.389.800	0	0	144.307.425.920
01	02	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	67.789.580.374	81.017.400	0	0	67.870.597.774
01	03	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.778.000.776	161.707.200	0	0	10.939.707.976
01	04	1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.934.275.297	108.115.000	0	0	4.042.390.297
01	05	1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.521.849.844	0	0	0	8.521.849.844
01	06	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.844.526.587	21.240.000	0	0	3.865.766.587
01	07	2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.732.875.069	0	0	0	7.732.875.069
01	08	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	3.648.736.230	0	0	0	3.648.736.230
01	09	2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.381.615.497	498.500.000	0	0	4.880.115.497
01	10	2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.204.520.408	11.378.000	0	0	5.215.898.408
01	11	2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	6.758.247.409	0	0	0	6.758.247.409
01	12	2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.301.227.566	32.960.000	0	0	3.334.187.566
01	13	2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.874.762.149	0	0	0	2.874.762.149
01	14	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.311.020.790	0	0	0	3.311.020.790
01	15	2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	0	0	0	0
01	16	2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.816.728.022	17.710.000	0	0	2.834.438.022
01	17	2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	167.576.700	0	0	0	167.576.700
01	18	3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.732.510.365	0	0	0	4.732.510.365
01	19	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.367.694.956	0	0	0	5.367.694.956
01	20	3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.124.769.000	0	0	0	1.124.769.000
01	21	3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	150.180.000	0	0	0	150.180.000
01	22	4	01	SEKRETARIAT DAERAH	43.911.258.145	3.162.577.600	0	0	47.073.835.745
01	23	4	02	SEKRETARIAT DPRD	28.215.886.654	586.561.427	0	0	28.802.448.081
01	24	5	01	PERENCANAAN	6.728.461.662	418.700.000	0	0	7.147.161.662
01	25	5	02	KEUANGAN	32.364.556.335	88.519.500	4.497.167.877	79.304.921.569	116.255.165.281
01	26	5	03	KEPEGAWAIAN	5.640.418.919	1.170.000	0	0	5.641.588.919
01	27	5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	688.891.400	0	0	0	688.891.400
01	28	5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	545.793.500	0	0	0	545.793.500
01	29	6	01	INSPEKTORAT DAERAH	9.502.898.877	85.414.000	0	0	9.588.312.877
01	30	7	01	KECAMATAN	24.604.322.371	504.685.300	0	0	25.109.007.671
01	31	8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.775.418.404	11.790.000	0	0	4.787.208.404
03				**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**					
03	01	1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.069.741.350	100.840.000	0	0	1.170.581.350
03	02	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	369.140.550	750.000.000	0	0	1.119.140.550
04				**EKONOMI**					
04	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.759.919.278	97.992.204.477	0	0	118.752.123.755

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
04	02	2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	83.363.200	0	0	0	83.363.200
04	03	2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	0	0	0	0
04	04	2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	10.462.804.435	457.712.000	0	0	10.920.516.435
04	05	2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.939.333.300	98.606.700	0	0	4.037.940.000
04	06	2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.220.295.100	0	0	0	3.220.295.100
04	07	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	556.813.000	0	0	0	556.813.000
04	08	3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	19.367.690.010	127.000.000	0	0	19.494.690.010
04	09	3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6.055.285.900	556.800.000	0	0	6.612.085.900
04	10	3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	167.914.900	0	0	0	167.914.900
04	11	3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.917.358.500	0	0	0	3.917.358.500
05				**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**					
05	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.646.761.419	935.281.000	0	0	4.582.042.419
05	02	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	590.187.800	1.563.518.000	0	0	2.153.705.800
06				**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**					
06	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.301.811.750	12.082.750.908	0	0	16.384.562.658
06	02	1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	19.437.804.600	4.215.474.000	0	0	23.653.278.600
07				**KESEHATAN**					
07	01	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	45.133.344.236	14.489.720.614	0	0	59.623.064.850
07	02	2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.787.799.400	140.000.000	0	0	2.927.799.400
08				**PARIWISATA**					
08	01	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.134.462.050	946.475.000	0	0	2.080.937.050
10				**PENDIDIKAN**					
10	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	40.358.786.895	82.288.346.085	0	0	122.647.132.980
10	02	2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	688.643.550	15.000.000	0	0	703.643.550
10	03	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.238.076.300	0	0	0	1.238.076.300
10	04	2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.137.064.320	11.199.999.804	0	0	12.337.064.124
11				**PERLINDUNGAN SOSIAL**					
11	01	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.898.902.100	0	0	0	1.898.902.100
11	02	2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.472.110.650	15.450.000	0	0	1.487.560.650
				TOTAL	**635.681.054.019**	**239.607.613.815**	**4.497.167.877**	**79.304.921.569**	**959.090.757.280**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Martinus D.

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
	A SPM Bidang Pendidikan			
	Pendidikan Dasar			
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	5.563.522.330
			Penambahan Ruang Kelas Baru	8.276.013.600
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	9.042.408.960
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	168.171.800
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	14.589.880.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.179.212.200
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.090.825.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	891.294.800
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**46.801.328.690**
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
			Penambahan Ruang Kelas Baru	10.718.825.100
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.124.221.300
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	7.423.990.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	195.794.600
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.326.387.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	479.508.800
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**23.268.726.800**
			Jumlah Pendidikan Dasar	**70.070.055.490**
	Pendidikan Kesetaraan			
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	149.995.000
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**149.995.000**
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	140.658.600
			Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**140.658.600**
			Jumlah Pendidikan Kesetaraan	**290.653.600**
	Pendidikan Anak Usia Dini			
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	370.878.200
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	704.897.600
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	149.996.800
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	260.269.900
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	130.059.800
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**1.616.102.300**
			Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini	**1.616.102.300**
			Jumlah SPM Bidang Pendidikan	**71.976.811.390**
	B SPM Bidang Kesehatan			
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	815.039.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**815.039.000**
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**815.039.000**
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.129.699.800
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**1.129.699.800**

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**1.129.699.800**
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.166.040.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**1.166.040.000**
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	**1.166.040.000**
	Pelayanan Kesehatan Balita			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	711.040.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**711.040.000**
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	**711.040.000**
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	470.525.460
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**470.525.460**
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	**470.525.460**
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.029.647.800
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**1.029.647.800**
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	**1.029.647.800**
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.117.926.798
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**1.117.926.798**
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	**1.117.926.798**
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	517.319.623
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**517.319.623**
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	**517.319.623**
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	273.087.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**273.087.000**
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	**273.087.000**
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	614.849.900
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**614.849.900**
			Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	**614.849.900**
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.140.898.950
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**1.140.898.950**
			Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	**1.140.898.950**
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.390.000.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**1.390.000.000**
	Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			**1.390.000.000**
			Jumlah SPM Bidang Kesehatan	**10.376.074.331**
	C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.193.975.700

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	788.889.000
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.989.620.400
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	723.363.850
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	8.525.394.000
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	2.163.319.708
	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			**16.384.562.658**
	Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			**16.384.562.658**
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	914.925.000
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.015.024.900
	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			**1.929.949.900**
	Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			**1.929.949.900**
	Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			**18.314.512.558**
	D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
	Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota			
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	355.523.000
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	33.560.000
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	7.473.584.000
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	583.405.000
	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			**8.446.072.000**
	Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota			**8.446.072.000**
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota			
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	85.324.900
	Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			**85.324.900**
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	96.334.000
	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			**96.334.000**
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	86.560.000
	Jumlah Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			**86.560.000**
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	72.052.800
	Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			**72.052.800**
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	394.999.400
	Jumlah Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			**394.999.400**
	Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota			**735.271.100**
	Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			**9.181.343.100**
	E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum			
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	28.339.800
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	37.664.000
	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			**66.003.800**
	Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum			**66.003.800**

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	84.252.350
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	189.139.000
	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			**273.391.350**
	Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			**273.391.350**
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	220.865.000
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	114.705.000
	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			**335.570.000**
	Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			**335.570.000**
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.486.000
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.040.000
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	21.270.000
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.288.000
	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			**86.084.000**
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	47.676.000
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	54.368.000
	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			**102.044.000**
	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			**188.128.000**
	Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			**863.093.150**
	F SPM Bidang Sosial			
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
			Penyediaan Permakanan	1.119.795.100
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	143.544.900
			Pemberian Layanan Rujukan	100.652.600
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			**1.363.992.600**
	Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			**1.363.992.600**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	897.258.550
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			**897.258.550**
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			**897.258.550**
	Jumlah SPM Bidang Sosial			**2.261.251.150**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Martinus D.

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	457.779.647.240	589.378.567.660
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	186.464.502.991	266.954.558.900
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	127.021.502.991	144.307.425.920
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	58.840.000.000	122.365.935.480
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	300.000.000	140.538.900
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	201.000.000	140.658.600
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	135.530.771.798	127.493.662.624
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.814.271.798	67.870.597.774
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	676.592.000.000	59.167.787.850
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	63.750.000	181.700.000
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	102.000.000	100.000.000
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	153.000.000	173.577.000
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	102.198.476.755	150.658.436.808
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.552.953.510	10.939.707.976
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.120.000.000	7.425.241.102
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.140.000.000	16.384.562.658
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	153.000.000	614.119.600
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	153.000.000	1.929.949.900
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	153.000.000	15.451.612.600
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	204.000.000	95.750.229.053
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	73.000.000.000	125.041.000
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	612.000.000	2.037.972.919
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.364.360.711	27.695.668.897
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.132.360.711	4.042.390.297
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.520.000.000	8.786.343.700
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.100.000.000	10.330.873.900
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	612.000.000	4.536.061.000
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15.259.482.570	9.692.431.194
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.235.482.570	8.521.849.844
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	204.000.000	109.131.800
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.220.000.000	766.313.050
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	600.000.000	295.136.500
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.962.052.415	6.883.809.237
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.328.752.415	3.865.766.587
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	200.000.000	103.880.100
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	18.300.000	1.363.992.600
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	400.000.000	431.029.400
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	15.000.000	1.119.140.550
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	91.396.830.968	80.424.635.399
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	970.000.000	83.363.200
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	100.000.000	36.664.600
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	612.000.000	46.698.600

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	924.200.000	1.487.560.650
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	322.400.000	656.424.000
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	285.600.000	147.892.500
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	204.000.000	118.124.750
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	408.000.000	565.119.400
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	12.861.274.829	7.732.875.069
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.861.274.829	7.732.875.069
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6.905.749.972	5.802.442.030
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.712.749.972	3.648.736.230
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	714.000.000	218.917.500
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	306.000.000	1.406.468.500
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	153.000.000	139.896.000
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	816.000.000	388.423.800
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.111.756.257	4.880.115.497
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.571.556.257	4.359.821.647
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	612.000.000	258.284.200
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	765.000.000	131.506.900
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	132.600.000	127.201.750
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	30.600.000	3.301.000
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.464.254.437	5.215.898.408
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.974.754.437	4.261.827.308
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	0	231.886.100
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.122.000.000	195.840.000
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	367.500.000	526.345.000
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.520.000.000	2.927.799.400
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	250.000.000	267.729.000
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	148.000.000	1.722.472.400
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.122.000.000	937.598.000
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	32.969.212.955	17.678.763.844
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.859.212.955	6.758.247.409
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	510.000.000	1.157.158.336
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	22.600.000.000	9.763.358.099
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.460.031.779	7.372.127.566
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.274.031.779	3.334.187.566
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	412.000.000	592.106.200
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.774.000.000	3.445.833.800
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.518.663.967	6.095.057.249
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.243.663.967	2.874.762.149
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	153.000.000	478.525.300
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	102.000.000	149.862.800
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	510.000.000	92.213.600

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	408.000.000	2.499.693.400
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.544.792.977	3.867.833.790
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.136.792.977	3.311.020.790
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	153.000.000	76.813.000
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	102.000.000	480.000.000
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	428.000.000	703.643.550
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	224.000.000	500.000.000
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	204.000.000	203.643.550
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	561.000.000	1.238.076.300
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	408.000.000	871.881.300
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	153.000.000	366.195.000
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.749.893.795	15.171.502.146
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.443.893.795	2.834.438.022
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	306.000.000	12.337.064.124
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	255.000.000	167.576.700
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	153.000.000	167.576.700
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	42.634.205.669	43.648.140.681
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.757.591.286	24.227.200.375
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.045.591.286	4.732.510.365
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.590.000.000	18.772.729.250
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.734.000.000	492.056.760
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	255.000.000	229.904.000
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.383.475.587	7.448.632.006
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.321.475.587	5.367.694.956
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	450.000.000	1.282.394.050
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	153.000.000	167.710.000
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	459.000.000	630.833.000
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	17.706.274.829	7.736.854.900
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.861.274.829	1.124.769.000
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.550.000.000	5.991.176.100
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.836.000.000	620.909.800
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.390.200.000	167.914.900
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.000.000.000	167.914.900
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.396.663.967	4.067.538.500
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.243.663.967	150.180.000
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0	3.917.358.500
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	74.712.540.843	75.876.283.826
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	41.748.088.874	47.073.835.745
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.747.628.874	29.104.302.645
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.526.000.000	14.000.303.400
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.474.460.000	3.969.229.700
4	02		SEKRETARIAT DPRD	32.964.451.969	28.802.448.081
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.664.451.969	16.185.709.681
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.300.000.000	12.616.738.400
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	163.415.228.235	130.278.600.762
5	01		PERENCANAAN	8.551.636.848	7.147.161.662
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.103.636.848	4.984.466.462

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.530.000.000	1.462.695.200
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	918.000.000	700.000.000
5	02		KEUANGAN	144.949.166.880	116.255.165.281
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.621.385.021	28.466.164.085
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	110.154.781.859	86.100.869.446
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	408.000.000	447.537.300
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	765.000.000	1.240.594.450
5	03		KEPEGAWAIAN	8.741.424.507	5.641.588.919
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.661.424.507	3.751.193.319
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.080.000.000	1.890.395.600
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	612.000.000	688.891.400
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	612.000.000	688.891.400
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	561.000.000	545.793.500
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	561.000.000	545.793.500
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.075.675.746	9.588.312.877
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	9.075.675.746	9.588.312.877
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.709.675.746	6.018.460.477
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.550.000.000	2.993.694.600
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	816.000.000	576.157.800
7			UNSUR KEWILAYAHAN	32.104.156.500	25.109.007.671
7	01		KECAMATAN	32.104.156.500	25.109.007.671
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.452.556.500	22.207.025.321
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	408.000.000	453.031.000
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.020.000.000	577.385.050
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	897.600.000	1.027.776.850
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.101.600.000	743.789.450
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.709.718.315	4.787.208.404
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.709.718.315	4.787.208.404
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.539.118.315	1.409.529.204
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0	650.071.900
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.783.000.000	2.237.314.000
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	81.600.000	27.037.800
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	153.000.000	271.553.600
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	153.000.000	191.701.900

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Martinus D.

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	196.003.274.919	195.330.765.871	268.192.635.200
1.01.2.22.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	195.275.224.019	194.775.554.671	266.954.558.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	195.275.224.019	194.775.554.671	266.954.558.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	140.660.224.019	138.800.257.781	144.307.425.920
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	138.638.224.019	136.515.880.881	135.259.289.204
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	138.438.224.019	136.254.300.881	134.997.709.204
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200.000.000	261.580.000	261.580.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000	267.150.600	316.820.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	250.000.000	267.150.600	316.820.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	542.000.000	563.191.500	1.719.224.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	299.975.500	1.558.453.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	45.216.000	42.741.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	18.000.000	18.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	200.000.000	100.030.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	990.000.000	1.208.080.000	751.555.716
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	84.000.000	84.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.000.000	1.124.080.000	667.555.716
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.000.000	245.954.800	6.260.537.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	76.750.000	76.750.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	39.960.000	39.960.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000	29.250.000	29.250.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.000.000	99.994.800	6.114.577.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	54.315.000.000	55.675.803.390	122.365.935.480
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	28.770.000.000	31.872.283.546	72.427.648.875
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.000.000.000	1.807.370.380	5.563.522.330
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.400.000.000	2.479.802.600	8.276.013.600
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	700.000.000	1.103.077.200	4.093.218.924
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	582.785.000	1.292.795.800
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	700.000.000	670.947.600	979.738.400
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.000.000.000	1.124.085.200	3.975.372.890

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	700.000.000	1.314.225.000	6.986.842.700
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.500.000.000	1.026.384.400	9.042.408.960
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	168.171.800	168.171.800
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	168.146.800	168.146.800
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	800.000.000	421.051.500	2.747.402.121
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	14.000.000.000	12.369.692.016	14.589.880.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	300.000.000	600.000.000	1.179.212.200
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	300.000.000	200.000.000	720.571.600
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.000.000.000	6.000.000.000	7.090.825.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200.000.000	150.000.000	891.294.800
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000	188.769.800	350.460.800
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	120.000.000	120.000.000	367.320.800
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0	1.377.774.250	3.944.449.350
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.670.000.000	21.023.175.944	44.552.070.205
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.500.000.000	2.278.800.000	10.718.825.100
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	500.000.000	500.000.000	5.648.935.760
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	300.000.000	300.000.000	1.478.674.720
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	600.000.000	600.000.000	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	800.000.000	800.000.000	3.903.592.810
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	08	Pembangunan Asrama Sekolah	300.000.000	300.000.000	5.540.508.720
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	800.000.000	800.000.000	1.922.023.440
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	800.000.000	964.616.280
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	800.000.000	800.000.000	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	600.000.000	600.000.000	1.124.221.300
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	500.000.000	500.000.000	664.056.500
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	500.000.000	500.000.000	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	500.000.000	58.680.000	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	500.000.000	285.865.144	192.040.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	7.000.000.000	7.000.000.000	7.423.990.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	350.000.000	195.214.600	195.794.600
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	350.000.000	200.005.000	423.947.975
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	150.000.000	149.999.900	190.501.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.300.000.000	3.800.162.500	3.326.387.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200.000.000	199.999.600	479.508.800
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.000.000	204.449.200	229.831.200
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200.000.000	150.000.000	124.615.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.475.000.000	1.830.849.000	2.996.964.200
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0	204.208.600	370.878.200
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	484.234.900	704.897.600
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	200.000.000	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	150.000.000	100.000.000	100.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	250.000.000	149.999.800	149.996.800
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	200.000.000	149.999.900	260.269.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	175.000.000	174.999.800	130.059.800
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.500.000.000	567.406.000	1.280.861.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.400.000.000	949.494.900	2.389.252.200
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	250.000.000	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	250.000.000	149.999.900	155.779.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	100.000.000	104.080.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.000.000	150.000.000	150.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	149.995.000	149.995.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	150.000.000	154.820.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	250.000.000	249.500.000	1.674.577.300
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	150.000.000	149.999.900	140.538.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	150.000.000	149.999.900	140.538.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	150.000.000	149.999.900	140.538.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	150.000.000	149.493.600	140.658.600
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	149.493.600	140.658.600

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	149.493.600	140.658.600
1.01.2.22.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	728.050.900	555.211.200	1.238.076.300
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	728.050.900	555.211.200	1.238.076.300
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	578.050.900	405.211.200	871.881.300
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	278.050.900	200.000.000	571.881.300
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	278.050.900	200.000.000	571.881.300
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	205.211.200	300.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	300.000.000	205.211.200	300.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	150.000.000	150.000.000	366.195.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	366.195.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	150.000.000	150.000.000	366.195.000
1.02.0.00.0.00.02.0000						DINAS KESEHATAN	110.066.511.955	106.888.640.369	127.493.662.624
1.02.0.00.0.00.02.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	110.066.511.955	106.888.640.369	127.493.662.624
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	110.066.511.955	106.888.640.369	127.493.662.624
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.620.591.371	81.973.109.681	67.870.597.774
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	60.000.000	60.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	30.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	30.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78.066.210.211	76.725.081.221	63.681.274.964
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59.307.348.277	61.776.563.135	48.916.591.858
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.758.861.934	14.948.518.086	14.764.683.106
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.187.381.160	1.206.334.100	1.133.688.250
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.227.160	45.026.000	37.547.750
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	49.800.000	81.017.400
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000	34.999.000	34.999.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	660.000.000	678.529.100	690.826.100
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.154.000	332.980.000	224.298.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.540.500.000	3.166.990.560	2.042.543.260
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	540.500.000	540.500.000	506.500.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.000.000.000	2.626.490.560	1.536.043.260
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	766.500.000	814.703.800	953.091.300
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	366.500.000	364.004.000	382.071.500
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000	350.700.000	471.020.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	99.999.800	99.999.800
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	25.110.920.584	24.580.530.688	59.167.787.850
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.526.820.584	17.710.421.888	18.683.625.062
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	800.000.000	800.000.000	785.196.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	0	0	0
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	800.000.000	4.055.830.840	5.148.622.100
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	500.000.000	0	0
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	0
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.082.882.326	452.916.000	2.157.397.050
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.000.000.000	5.000.093.500	6.593.976.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	3.862.420.915	3.671.723.760	2.011.255.885
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.120.157.343	3.369.857.788	1.625.818.027
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	361.360.000	360.000.000	361.360.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.334.100.000	6.620.108.800	40.338.352.788
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.000.000	99.999.500	815.039.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	650.000.000	649.998.300	1.129.699.800
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.000.000	100.000.000	1.166.040.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000	100.000.000	711.040.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	150.000.000	150.000.000	470.525.460
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	99.980.000	1.029.647.800
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	70.000.000	70.000.000	1.117.926.798

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	70.000.000	70.000.000	517.319.623
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	50.000.000	50.000.000	273.087.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.000.000	100.000.000	614.849.900
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100.000.000	100.000.000	1.140.898.950
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	60.000.000	60.000.000	1.390.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	150.000.000	150.000.000	149.887.900
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	400.000.000	397.931.100	1.016.220.307
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	75.000.000	75.000.000	150.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.000.000	50.000.000	50.112.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	60.000.000	60.000.000	49.999.800
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	75.000.000	75.000.000	128.146.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	200.000.000	200.000.000	884.423.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3.200.000.000	1.700.000.000	2.689.339.524
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.374.100.000	1.119.099.900	1.640.739.650
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	0	0	21.710.405.276
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	300.000.000	300.000.000	427.153.500
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	500.000.000	543.100.000	765.851.500
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	250.000.000	250.000.000	145.810.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	200.000.000	200.000.000	95.810.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	110.000.000	110.000.000	181.700.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	60.000.000	60.000.000	60.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	35.000.000	35.000.000	35.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	121.700.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	121.700.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	125.000.000	125.000.000	173.577.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	98.577.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	50.000.000	50.000.000	98.577.000
1.03.0.00.0.00.03.0000						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	69.503.585.569	65.565.499.380	150.658.436.808
1.03.0.00.0.00.03.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	69.503.585.569	65.565.499.380	150.658.436.808
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.034.523.106	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.034.523.106	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.034.523.106	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.034.523.106	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	68.469.062.463	65.565.499.380	150.658.436.808
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.723.821.757	12.486.280.813	10.939.707.976
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	67.665.380	229.066.500
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	67.665.380	229.066.500

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.665.421.757	11.275.802.733	8.872.532.956
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.165.421.757	7.138.922.733	6.251.184.956
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.500.000.000	4.136.880.000	2.621.348.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	550.000.000	634.161.200	579.105.220
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	32.900.000	32.900.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	197.974.000	215.405.220
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150.000.000	101.535.200	95.660.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.500.000	135.000.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	281.252.000	100.140.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.400.000	85.800.000	101.600.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.400.000	85.800.000	101.600.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.000.000	422.851.500	1.157.403.300
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	184.205.000	168.740.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	0	702.669.600
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	49.960.000	50.080.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	188.686.500	235.913.700
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.400.000.000	3.750.510.000	7.425.241.102
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	2.349.150.000	4.173.918.102
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	0	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	0	0	932.914.002
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	0	0	133.055.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	0	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	02	2.01	12	Pembangunan Kanal Banjir	0	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0	1.749.150.000	3.107.949.100
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	02	2.01	33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	500.000.000	600.000.000	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	02	2.01	43	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000	1.401.360.000	3.251.323.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	0	201.360.000	246.844.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	0	0	1.796.327.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	900.000.000	1.200.000.000	1.208.152.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.350.000.000	8.202.029.800	16.384.562.658
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.350.000.000	8.202.029.800	16.384.562.658
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	0	703.028.000	1.193.975.700
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	150.000.000	535.414.000	788.889.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.000.000.000	2.960.470.400	2.989.620.400
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	700.000.000	722.476.400	723.363.850
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.000.000.000	1.998.470.000	8.525.394.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1.500.000.000	1.282.171.000	2.163.319.708
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	340.000.000	340.000.000	614.119.600
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	340.000.000	340.000.000	614.119.600
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	340.000.000	340.000.000	614.119.600
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	500.000.000	607.227.047	1.929.949.900
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	607.227.047	1.929.949.900
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	914.925.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	400.000.000	607.227.047	1.015.024.900
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	05	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	500.000.000	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	06	2.01	10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	70.000.000	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	430.000.000	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.700.000.000	2.099.686.200	15.451.612.600

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3.700.000.000	2.099.686.200	15.451.612.600
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	200.000.000	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000.000	2.099.686.200	15.451.612.600
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	500.000.000	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	500.000.000	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	39.805.240.706	36.300.747.000	95.750.229.053
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	39.805.240.706	36.300.747.000	95.750.229.053
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	0	3.213.945.000	7.042.563.491
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	0	1.250.853.000	814.236.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	3.000.000.000	10.762.109.000	18.314.065.191
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	26.636.180.024	8.559.137.775	60.475.600.586
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.500.000.000	2.636.060.000	526.848.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.500.000.000	1.392.808.000	456.536.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	4.693.527.946	4.386.905.500	4.443.009.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	325.532.736	330.924.500	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	150.000.000	150.000.000	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2.000.000.000	3.618.004.225	3.677.370.785
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0	157.340.000	125.041.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	0	157.340.000	125.041.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	0	157.340.000	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	0	0	125.041.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	650.000.000	1.621.678.520	2.037.972.919
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	250.000.000	268.211.000	395.474.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	274.503.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	50.000.000	63.688.000	63.688.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	50.000.000	54.523.000	57.283.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0	1.000.938.860	1.142.802.859
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	0	1.000.938.860	1.142.802.859
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	292.187.660	439.198.060
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	200.000.000	186.008.000	281.916.400
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	100.000.000	106.179.660	157.281.660
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	60.341.000	60.498.000
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	50.000.000	0	0
1.03.0.00.0.00.03.0000	1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	50.000.000	60.341.000	60.498.000
1.04.2.10.0.00.04.0000						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.797.394.855	8.361.996.099	27.695.668.897
1.04.2.10.0.00.04.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.797.394.855	8.361.996.099	27.695.668.897
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.797.394.855	8.361.996.099	27.695.668.897
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.347.394.855	4.236.278.799	4.042.390.297
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	38.988.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	38.988.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.948.796.355	2.948.796.349	2.907.061.697
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.845.836.355	2.845.836.349	2.822.101.697
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.960.000	102.960.000	84.960.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.000.000	290.241.600	281.499.600
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	10.000.000	33.384.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	60.296.000	75.063.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	30.000.600	33.115.600
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	19.995.000	19.995.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	149.950.000	99.942.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.258.500	90.122.000	110.155.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	50.000.000	52.004.000	49.300.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.258.500	38.118.000	60.855.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808.364.000	695.220.000	540.980.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.000.000	93.000.000	93.000.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	713.364.000	602.220.000	447.980.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.976.000	181.898.850	163.706.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	50.070.000	58.180.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000	17.994.850	49.228.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	29.950.000	29.950.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.976.000	83.884.000	26.348.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	400.000.000	1.771.825.900	8.786.343.700
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	99.999.900	85.324.900
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	99.999.900	85.324.900
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	96.334.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000	100.000.000	96.334.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	02	2.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	1.413.858.000	8.446.072.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0	148.064.000	355.523.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	80.365.000	33.560.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	0	1.185.429.000	7.473.584.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	583.405.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	79.415.000	86.560.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	79.415.000	86.560.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.000.000	78.553.000	72.052.800
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.000.000	78.553.000	72.052.800
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.400.000.000	1.497.208.400	10.330.873.900

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	150.000.000	150.000.000	394.999.400
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	150.000.000	150.000.000	394.999.400
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.250.000.000	1.347.208.400	9.935.874.500
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	600.000.000	797.500.000	9.455.824.100
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	400.000.000	350.000.000	295.640.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	250.000.000	199.708.400	184.410.400
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	650.000.000	856.683.000	4.536.061.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	650.000.000	856.683.000	4.536.061.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	450.000.000	798.070.000	4.477.448.000
1.04.2.10.0.00.04.0000	1	04	05	2.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	200.000.000	58.613.000	58.613.000
1.05.0.00.0.00.05.0000						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.303.267.238	9.105.538.629	5.171.477.301
1.05.0.00.0.00.05.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.303.267.238	9.105.538.629	5.171.477.301
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.303.267.238	9.105.538.629	5.171.477.301
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.462.552.746	8.346.580.829	4.767.209.001
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.383.711.168	3.452.118.029	3.169.226.401
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.242.711.168	3.402.918.029	3.120.026.401
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.000.000	49.200.000	49.200.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.662.010	308.070.800	96.551.600
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.997.450	7.996.000	7.911.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.175.000	4.957.000	1.500.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.000.000	87.998.800	48.064.600
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.489.560	37.145.000	13.000.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000	169.974.000	26.076.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	263.092.000	262.447.000	0
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.092.000	162.455.000	0
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	99.992.000	0
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.206.487.568	4.044.660.000	1.341.536.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.527.568	119.800.000	83.800.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.143.960.000	3.924.860.000	1.257.736.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.600.000	279.285.000	159.895.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.000.000	29.915.000	20.600.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.600.000	235.240.000	133.405.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	9.170.000	5.890.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	4.960.000	0
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	249.637.000	249.402.800	109.131.800
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	174.637.000	174.630.800	66.003.800
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	89.637.000	89.636.800	28.339.800
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	85.000.000	84.994.000	37.664.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	75.000.000	74.772.000	43.128.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	75.000.000	74.772.000	43.128.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	591.077.492	509.555.000	295.136.500
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	205.000.000	178.483.000	86.084.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	56.031.000	14.486.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	35.620.000	15.040.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	55.000.000	46.996.000	21.270.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	39.836.000	35.288.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0	0	0
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	66.499.000	66.090.000	14.543.500
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	66.499.000	66.090.000	14.543.500
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	178.079.492	124.065.000	92.465.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	178.079.492	124.065.000	92.465.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	141.499.000	140.917.000	102.044.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	75.000.000	74.606.000	47.676.000
1.05.0.00.0.00.05.0000	1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	66.499.000	66.311.000	54.368.000
1.05.1.06.0.00.05.0000						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.565.739.390	6.299.660.771	4.520.953.893
1.05.1.06.0.00.05.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.565.739.390	6.299.660.771	4.520.953.893
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6.565.739.390	6.299.660.771	4.520.953.893
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.615.739.390	5.202.325.971	3.754.640.843
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	23.575.000	0
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	23.575.000	0
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.485.208.649	3.355.989.571	2.753.259.243
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.335.208.649	3.286.989.571	2.753.259.243
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.000.000	69.000.000	0
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.530.741	254.989.400	121.471.600
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	6.985.000	0
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	76.342.400	41.014.600
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.030.741	11.750.000	5.875.000
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.990.000	9.990.000
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	149.922.000	64.592.000
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.523.000.000	1.232.470.000	607.624.000
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.000.000	70.400.000	58.000.000
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.450.000.000	1.162.070.000	549.624.000
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.000.000	335.302.000	272.286.000
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	53.660.000	45.406.250
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	212.010.000	180.629.750
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	19.660.000	16.490.000
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	49.972.000	29.760.000
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	950.000.000	1.097.334.800	766.313.050
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	185.481.600	84.698.100
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	150.000.000	185.481.600	84.698.100

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	500.000.000	571.140.200	346.044.950
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	184.767.600	84.252.350
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	202.070.000	189.139.000
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	150.000.000	184.302.600	72.653.600
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300.000.000	340.713.000	335.570.000
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	0	0	0
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	221.706.000	220.865.000
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	119.007.000	114.705.000
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0	0	0
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
1.05.1.06.0.00.05.0000	1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000						DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.963.945.906	6.713.945.760	8.371.369.887
1.06.2.08.0.00.06.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.118.156.306	5.937.478.660	6.883.809.237
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.118.156.306	5.937.478.660	6.883.809.237
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.071.336.306	4.803.227.660	3.865.766.587
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.860.231.726	3.620.354.932	3.290.892.087
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.780.231.726	3.592.754.932	3.277.092.087
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.000.000	27.600.000	13.800.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.741.427	333.510.775	117.187.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.089.750	10.088.500	5.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.298.880	40.414.075	18.500.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.370.997	88.024.700	40.872.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.800	15.001.500	7.025.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.982.000	179.982.000	45.790.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	602.890.000	602.890.000	275.550.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.950.000	49.950.000	47.900.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	552.940.000	552.940.000	227.650.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.473.153	246.471.953	182.136.600
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.998.000	29.997.200	23.497.250
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.180.000	23.179.600	29.841.600
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.880.000	16.880.000	30.080.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176.415.153	176.415.153	98.717.750
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	250.000.000	250.000.000	103.880.100
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	50.000.000	50.000.000	45.026.300
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	50.000.000	50.000.000	45.026.300
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	58.853.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	58.853.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	50.000.000	50.000.000	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	246.820.000	794.300.100	1.363.992.600
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	246.820.000	794.300.100	1.363.992.600
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	50.000.000	750.000.000	1.119.795.100
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000	10.000.100	143.544.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	46.820.000	10.000.000	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	50.000.000	5.000.000	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	50.000.000	19.300.000	100.652.600
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.400.000.000	54.950.900	431.029.400
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.400.000.000	54.950.900	431.029.400
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	49.951.000	317.374.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.000.000.000	4.999.900	113.655.400
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	150.000.000	35.000.000	1.119.140.550

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	50.000.000	20.000.000	897.258.550
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	50.000.000	20.000.000	897.258.550
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	15.000.000	221.882.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	100.000.000	15.000.000	221.882.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	845.789.600	776.467.100	1.487.560.650
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	845.789.600	776.467.100	1.487.560.650
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	295.000.000	201.704.000	656.424.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	78.949.000	86.437.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	38.932.000	27.218.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	50.000.000	40.017.000	59.219.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	63.720.000	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	35.000.000	30.580.000	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	35.000.000	33.140.000	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000	59.035.000	569.987.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	40.023.000	569.987.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	19.012.000	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100.000.000	124.684.000	147.892.500
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	59.292.500
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	59.292.500
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	70.000.000	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	24.684.000	88.600.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	24.684.000	88.600.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	50.000.000	20.593.000	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	20.593.000	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	20.593.000	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	215.000.000	192.703.000	118.124.750
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	110.000.000	94.114.000	118.124.750
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	63.414.000	100.473.750
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	30.700.000	17.651.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	105.000.000	98.589.000	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	65.794.000	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	32.795.000	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	185.789.600	236.783.100	565.119.400
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	90.000.000	165.389.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	90.000.000	90.000.000	71.455.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	93.934.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	50.993.500	297.333.500
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	35.000.000	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	15.993.500	297.333.500
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.789.600	95.789.600	102.396.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.789.600	95.789.600	102.396.000
2.09.3.27.0.00.09.0000						DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	19.411.842.659	20.723.338.448	15.469.729.969
2.09.3.27.0.00.09.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.708.843.659	8.675.738.898	7.732.875.069
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	8.708.843.659	8.675.738.898	7.732.875.069
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.708.843.659	8.675.738.898	7.732.875.069
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.376.843.659	8.343.788.898	7.482.331.069
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.376.843.659	8.343.788.898	7.482.331.069
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.000.000	248.000.000	173.044.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.000.000	84.000.000	83.998.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000	14.000.000	14.000.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	150.000.000	75.046.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.000.000	83.950.000	77.500.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000	83.950.000	77.500.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	0	0	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10.702.999.000	12.047.599.550	7.736.854.900
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	10.702.999.000	12.047.599.550	7.736.854.900
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.152.999.000	2.733.112.850	1.124.769.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.879.999.000	2.460.119.000	974.456.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.879.999.000	2.460.119.000	974.456.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.000.000	141.000.000	89.933.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.000.000	93.000.000	65.933.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.000.000	48.000.000	24.000.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.000.000	81.993.850	60.380.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	74.993.850	53.380.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.750.000.000	7.816.888.900	5.991.176.100
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.950.000.000	4.201.600.000	3.705.920.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.950.000.000	4.201.600.000	3.705.920.000
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	260.135.900	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	300.000.000	260.135.900	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.500.000.000	3.355.153.000	2.285.256.100
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.500.000.000	3.355.153.000	2.285.256.100
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.350.000.000	1.047.599.800	620.909.800
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	200.000.000	200.000.000	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	200.000.000	200.000.000	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	1.150.000.000	847.599.800	620.909.800
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100.000.000	99.999.800	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.050.000.000	747.600.000	620.909.800
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	0	0	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	150.000.000	150.000.000	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	150.000.000	150.000.000	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	150.000.000	150.000.000	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100.000.000	99.999.800	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100.000.000	99.999.800	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.000	99.999.800	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	200.000.000	199.998.200	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	200.000.000	199.998.200	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	200.000.000	199.998.200	0
2.09.3.27.0.00.09.0000	3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0	0	0
2.11.0.00.0.00.11.0000						DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	7.401.326.828	7.450.861.511	5.802.442.030
2.11.0.00.0.00.11.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.401.326.828	7.450.861.511	5.802.442.030
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7.401.326.828	7.450.861.511	5.802.442.030
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.254.798.658	5.304.359.985	3.648.736.230
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.158.237.598	3.118.442.589	2.703.223.406

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.075.242.598	3.075.242.589	2.703.223.406
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.995.000	43.200.000	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	659.738.220	751.244.550	298.547.900
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.731.000	4.730.500	11.840.000
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000	249.998.850	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	232.506.720	324.055.400	165.039.000
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.860.000	7.859.800	4.804.900
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.994.500	23.990.000	18.990.000
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.646.000	140.610.000	97.874.000
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.200.000	82.807.920	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	83.200.000	82.807.920	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.062.665.640	1.061.640.000	396.696.000
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.000.000	48.000.000	48.000.000
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.013.665.640	1.013.640.000	348.696.000
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.957.200	290.224.926	250.268.924
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.380.000	79.319.492	53.130.717
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.995.200	189.845.434	187.028.207
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.582.000	21.060.000	10.110.000
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	600.000.000	600.000.000	218.917.500
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	600.000.000	600.000.000	218.917.500
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	600.000.000	600.000.000	218.917.500
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0	0	1.406.468.500
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0	0	1.406.468.500
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0	0	1.406.468.500
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0	0	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0	0	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	0	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0	0	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	0	0	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	0	0	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0	0	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	0	0	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	116.631.000	116.631.000	139.896.000
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.631.000	116.631.000	139.896.000
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.631.000	116.631.000	139.896.000
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	154.493.950	154.473.000	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	81.530.500	81.515.000	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	81.530.500	81.515.000	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	72.963.450	72.958.000	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	72.963.450	72.958.000	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.275.403.220	1.275.397.526	388.423.800
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	1.225.403.220	1.225.397.726	388.423.800
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	139.254.220	139.254.100	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	78.860.000	78.855.026	144.711.500
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	131.000.000	130.999.800	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	0	0	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	876.289.000	876.288.800	243.712.300
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	50.000.000	49.999.800	0
2.11.0.00.0.00.11.0000	2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	50.000.000	49.999.800	0
2.12.0.00.0.00.12.0000						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.170.492.280	6.090.930.248	4.880.115.497
2.12.0.00.0.00.12.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.170.492.280	6.090.930.248	4.880.115.497
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.170.492.280	6.090.930.248	4.880.115.497
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.683.361.600	4.668.010.648	4.359.821.647
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	0	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	0	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.329.524.856	3.305.524.848	2.941.299.847
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.279.124.856	3.279.124.848	2.905.299.847
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.400.000	26.400.000	36.000.000
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	392.806.744	416.955.800	831.489.800
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.158.636	70.000.000	70.000.000
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	13.980.000	499.710.000
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.991.400	120.764.200	120.764.200
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.240.000	26.109.600	26.109.600
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	14.400.000	14.400.000
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.016.708	171.702.000	100.506.000
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	0	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	888.270.000	896.870.000	538.372.000
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.800.000	73.800.000	73.800.000
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825.470.000	823.070.000	464.572.000
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.760.000	48.660.000	48.660.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.760.000	48.660.000	48.660.000
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	675.000.000	544.615.000	258.284.200
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	525.000.000	544.615.000	258.284.200
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0	0	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	525.000.000	544.615.000	258.284.200
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	0	0	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	0	0	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	150.000.000	0	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	150.000.000	0	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	02	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	0	0	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0	0	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	0	0	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	306.967.000	361.268.100	131.506.900
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	306.967.000	361.268.100	131.506.900
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	306.967.000	361.268.100	131.506.900
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	341.213.680	363.052.500	127.201.750
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	196.930.000	219.288.500	127.201.750
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	84.180.000	84.053.000	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	112.750.000	135.235.500	127.201.750
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	144.283.680	143.764.000	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	144.283.680	143.764.000	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	163.950.000	153.984.000	3.301.000
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	163.950.000	153.984.000	3.301.000
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	135.750.000	126.641.000	0
2.12.0.00.0.00.12.0000	2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	28.200.000	27.343.000	3.301.000
2.13.2.14.0.00.13.0000						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.665.541.320	9.409.896.686	8.143.697.808
2.13.2.14.0.00.13.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.665.541.320	9.409.896.686	8.143.697.808

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.007.793.567	7.753.651.336	5.215.898.408
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.662.793.567	6.288.651.436	4.261.827.308
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.644.755.753	3.522.895.746	3.185.256.308
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.461.695.753	3.461.695.746	3.155.656.308
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	183.060.000	61.200.000	29.600.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	660.500.000	660.437.142	174.967.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	30.000.000	6.000.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	150.024.447	11.378.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	49.995.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	149.996.200	50.319.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000	45.000.000	16.170.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.500.000	15.495.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	19.934.495	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	199.992.000	91.100.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350.000.000	349.975.040	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	250.000.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	100.000.000	99.975.040	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.692.537.814	1.440.700.408	811.944.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	72.000.000	72.000.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	29.960.408	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.587.537.814	1.338.740.000	739.944.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.000.000	284.643.100	44.000.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	30.000.000	15.000.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	29.999.100	29.000.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	49.680.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000	174.964.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.13		Penataan Organisasi	30.000.000	30.000.000	45.660.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	30.000.000	30.000.000	45.660.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	0	0	231.886.100
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	0	0	231.886.100
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	0	0	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	0	0	231.886.100
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	02	2.01	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	748.122.000	748.121.900	195.840.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	748.122.000	748.121.900	195.840.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	35.000.000	35.000.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	70.000.000	70.000.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	50.000.000	50.000.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	50.000.000	50.000.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	75.000.000	75.000.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	75.000.000	75.000.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	15.000.000	15.000.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	178.122.000	178.122.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	100.000.000	99.999.900	45.840.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50.000.000	50.000.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	50.000.000	50.000.000	150.000.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	596.878.000	716.878.000	526.345.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	596.878.000	716.878.000	526.345.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	40.000.000	40.000.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	120.000.000	120.000.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000	50.000.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000	100.000.000	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	286.878.000	406.878.000	526.345.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	13	05	2.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.657.747.753	1.656.245.350	2.927.799.400
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	392.279.800	392.112.800	267.729.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	225.000.000	224.839.000	172.094.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	40.000.000	40.000.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	90.000.000	90.000.000	100.000.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	35.000.000	34.920.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	20.000.000	19.935.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	20.000.000	19.990.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	20.000.000	19.994.000	72.094.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	167.279.800	167.273.800	95.635.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	10.000.000	10.000.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	10.000.000	9.994.200	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	147.279.800	147.279.600	95.635.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.265.467.953	1.264.132.550	1.722.472.400
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	565.467.953	564.181.250	828.154.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30.000.000	29.994.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	24.994.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	30.000.000	29.998.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	24.978.000	23.712.000	149.992.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.01	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	15.000.000	14.995.000	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	192.335.000	192.335.000	130.010.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	171.187.500	171.186.000	480.302.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	76.967.453	76.967.250	67.850.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	700.000.000	699.951.300	92.619.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	300.000.000	299.999.300	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	90.000.000	90.000.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	60.000.000	60.000.000	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	250.000.000	249.952.000	92.619.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	0	0	417.199.400
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	0	12.600.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0	0	228.854.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	0	148.455.400
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	0	27.290.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	0	384.500.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0	0	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	0	0	384.500.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0	0	937.598.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	937.598.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	360.000.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	249.998.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	327.600.000
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	0
2.13.2.14.0.00.13.0000	2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0	0	0
2.15.0.00.0.00.15.0000						DINAS PERHUBUNGAN	20.585.831.389	20.325.530.866	17.678.763.844
2.15.0.00.0.00.15.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20.585.831.389	20.325.530.866	17.678.763.844
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	20.585.831.389	20.325.530.866	17.678.763.844
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.522.603.478	11.579.485.130	6.758.247.409
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	26.511.000	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	26.511.000	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.913.264.428	5.869.500.430	5.113.097.625
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.776.500.428	5.776.500.430	5.021.397.625
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	136.764.000	93.000.000	91.700.000
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.026.103	405.209.500	234.001.810
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.000.000	21.069.500	21.063.210
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.026.103	134.926.000	75.010.600
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	37.679.000	18.079.000
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	19.995.000	19.995.000
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	191.540.000	99.854.000
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	70.474.000	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	70.474.000	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.931.312.947	5.034.850.200	1.345.218.974
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.726.947	132.000.000	132.000.000
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.805.586.000	4.902.850.200	1.213.218.974
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000	172.940.000	65.929.000
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	162.940.000	55.929.000
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	993.227.911	915.067.036	1.157.158.336
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	375.000.000	372.814.000	333.878.200
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	375.000.000	372.814.000	333.878.200
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	128.227.911	55.260.336	55.260.336
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	128.227.911	55.260.336	55.260.336
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	0	0	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	0	0	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	140.000.000	140.000.200	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	90.000.000	90.000.200	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	50.000.000	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	541.409.800
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	541.409.800
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	96.906.900	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	96.906.900	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	75.085.600	67.510.600
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	75.085.600	67.510.600
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	175.000.000	159.099.400
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	175.000.000	159.099.400
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	7.070.000.000	7.830.978.700	9.763.358.099
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.950.000.000	7.710.575.200	7.060.822.283
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.950.000.000	7.710.575.200	7.060.822.283
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	120.000.000	120.403.500	2.702.535.816
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	03	2.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	120.000.000	120.403.500	104.840.500
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	2.597.695.316

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	0	0	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	0	0	0
2.15.0.00.0.00.15.0000	2	15	03	2.13	07	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	0	0	0
2.16.2.21.2.20.16.0000						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.272.176.637	8.854.992.697	7.372.127.566
2.16.2.21.2.20.16.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.272.176.637	8.854.992.697	7.372.127.566
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.232.176.637	8.814.992.697	7.372.127.566
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.422.176.637	4.282.614.457	3.334.187.566
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.541.220.616	2.497.220.607	2.267.940.966
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.461.220.616	2.461.220.607	2.231.940.966
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.000.000	36.000.000	36.000.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	370.065.500	370.013.000	304.644.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.065.500	3.060.000	13.060.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	85.000.000	110.000.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.000.000	65.000.000	65.000.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000	15.990.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.000.000	204.953.000	100.594.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.370.000	71.363.000	34.970.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	35.000.000	34.999.000	34.970.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.370.000	36.364.000	0
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.204.520.521	1.109.100.000	457.716.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	120.000.000	96.000.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.084.520.521	989.100.000	361.716.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.000.000	194.917.850	228.916.600
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.000.000	64.995.850	98.994.600
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	49.930.000	49.930.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	79.992.000	79.992.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.250.000.000	1.249.999.900	592.106.200
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.250.000.000	1.249.999.900	592.106.200
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	0	0	0
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0	0	0
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	150.000.000	150.000.000	76.032.400
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	650.000.000	650.000.000	327.054.200
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	250.000.000	250.000.000	36.872.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	199.999.900	152.147.600
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.560.000.000	3.282.378.340	3.445.833.800
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.060.000.000	2.782.378.340	3.205.200.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.060.000.000	2.782.378.340	3.205.200.000
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	500.000.000	240.633.800
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	200.000.000	200.000.000	0
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0	0	0
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	0	0	0
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	0	0
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	300.000.000	300.000.000	240.633.800
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	0	0	0
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	40.000.000	40.000.000	0
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	40.000.000	40.000.000	0
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	0
2.16.2.21.2.20.16.0000	2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	40.000.000	40.000.000	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.17.0000						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.666.622.496	8.059.110.081	10.330.510.649
2.17.3.30.3.31.17.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.715.230.034	6.091.331.881	6.095.057.249
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.715.230.034	6.091.331.881	6.095.057.249
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.265.230.034	3.297.715.281	2.874.762.149
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.855.489.016	2.887.967.631	2.609.027.949
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.785.489.016	2.843.567.631	2.555.627.949
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.000.000	44.400.000	53.400.000
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.741.018	296.661.400	176.734.200
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.660.000	7.754.000	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.081.018	92.419.400	52.638.200
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	24.646.500	14.020.000
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.002.500	15.000.000
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	151.839.000	95.076.000
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000	70.100.000	54.000.000
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000	70.100.000	54.000.000
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000	42.986.250	35.000.000
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000	42.986.250	35.000.000
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	200.000.000	200.000.000	478.525.300
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	478.525.300
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	200.000.000	200.000.000	478.525.300

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	05	2.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	200.000.000	200.000.000	149.862.800
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	149.862.800
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	149.862.800
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	450.000.000	398.616.800	92.213.600
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	450.000.000	398.616.800	92.213.600
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	150.000.000	135.611.000	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	300.000.000	263.005.800	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0	92.213.600
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.600.000.000	1.994.999.800	2.499.693.400
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.600.000.000	1.994.999.800	2.499.693.400
2.17.3.30.3.31.17.0000	2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.600.000.000	1.994.999.800	2.499.693.400
2.17.3.30.3.31.17.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.951.392.462	1.967.778.200	4.235.453.400
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	400.000.000	374.439.200	167.914.900
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	400.000.000	374.439.200	167.914.900

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	400.000.000	374.439.200	167.914.900
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	350.000.000	324.439.200	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.000	50.000.000	167.914.900
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.551.392.462	1.593.339.000	4.067.538.500
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	360.580.000	402.550.000	150.180.000
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.580.000	402.550.000	150.180.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.580.000	402.550.000	150.180.000
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.190.812.462	1.190.789.000	3.917.358.500
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.190.812.462	1.190.789.000	3.917.358.500
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.190.812.462	1.190.789.000	3.917.358.500
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.17.0000	3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	0
2.18.2.07.0.00.18.0000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.564.553.792	6.456.893.759	3.951.196.990
2.18.2.07.0.00.18.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.564.553.792	6.456.893.759	3.951.196.990
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.170.000.000	1.008.062.150	83.363.200
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	300.000.000	193.639.800	36.664.600
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	300.000.000	193.639.800	36.664.600
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	300.000.000	193.639.800	36.664.600
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	650.000.000	594.422.450	46.698.600
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	650.000.000	594.422.450	46.698.600
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	500.000.000	494.422.450	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	150.000.000	100.000.000	46.698.600
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	220.000.000	219.999.900	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000	219.999.900	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	220.000.000	219.999.900	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.394.553.792	5.448.831.609	3.867.833.790
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.342.453.792	4.314.851.209	3.311.020.790
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.999.800	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	29.999.800	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.010.593.792	2.980.393.793	2.669.516.030
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.941.393.792	2.941.393.793	2.634.716.030
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69.200.000	39.000.000	34.800.000
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.200.000	35.573.000	11.244.000
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.200.000	10.597.000	11.244.000
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	24.976.000	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.500.000	481.416.000	276.056.200
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000	12.995.500	5.717.500
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.500.000	209.469.500	148.493.200
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	18.801.500
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	3.000.000
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	227.951.000	100.044.000
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000	0	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	0	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	653.160.000	568.532.116	291.367.060
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.200.000	101.675.000	100.800.000
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	537.960.000	466.857.116	190.567.060
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.000.000	218.936.500	62.837.500
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000	76.712.500	47.487.500
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	14.940.000	15.350.000
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000	119.964.000	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	7.320.000	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	690.000.000	539.228.900	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	240.000.000	89.229.000	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	240.000.000	89.229.000	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	450.000.000	449.999.900	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	450.000.000	449.999.900	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	201.600.000	201.565.500	76.813.000
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	201.600.000	201.565.500	76.813.000
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	201.600.000	201.565.500	76.813.000
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	160.500.000	393.186.000	480.000.000
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	160.500.000	393.186.000	480.000.000
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100.000.000	237.340.000	263.310.000
2.18.2.07.0.00.18.0000	2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	60.500.000	155.846.000	216.690.000
2.24.2.23.0.00.23.0000						DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	14.206.150.993	14.054.900.862	15.339.078.846
2.24.2.23.0.00.23.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.206.150.993	14.054.900.862	15.339.078.846
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	13.971.100.993	13.819.850.862	15.171.502.146
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.671.100.993	3.519.856.412	2.834.438.022
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.999.900	21.573.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	29.999.900	21.573.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.810.567.513	2.673.717.512	2.350.409.022
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.617.917.513	2.617.917.512	2.294.609.022
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	192.650.000	55.800.000	55.800.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.263.480	268.205.000	182.416.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.263.480	51.256.000	40.286.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.000.000	17.000.000	10.695.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	10.005.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	174.949.000	111.430.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.000.000	37.594.000	17.710.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.000.000	37.594.000	17.710.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.270.000	419.270.000	184.010.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	13.800.000	11.800.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	439.270.000	405.470.000	172.210.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000	91.070.000	78.320.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	71.000.000	58.250.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.070.000	5.070.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	10.300.000.000	10.299.994.450	12.337.064.124
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	149.995.000	1.319.854.520
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0	0	303.930.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.995.000	543.854.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	219.790.520
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	0	0	202.280.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.150.000.000	10.149.999.450	11.017.209.604
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	150.000.000	149.999.450	224.205.800
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000.000	10.000.000.000	10.793.003.804
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	235.050.000	235.050.000	167.576.700
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	235.050.000	235.050.000	167.576.700
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	170.000.000	135.236.700
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	170.000.000	170.000.000	135.236.700
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	65.050.000	65.050.000	32.340.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	65.050.000	65.050.000	32.340.000
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	0	0	0
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0	0	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0	0	0
2.24.2.23.0.00.23.0000	2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	0	0	0
3.25.0.00.0.00.25.0000						DINAS PERIKANAN	21.514.682.289	26.321.403.119	24.227.200.375
3.25.0.00.0.00.25.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21.514.682.289	26.321.403.119	24.227.200.375
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	21.514.682.289	26.321.403.119	24.227.200.375
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.832.574.872	6.653.751.869	4.732.510.365
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	0
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	0
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.772.324.872	5.594.533.115	4.134.548.865
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.333.070.615	4.333.070.615	3.708.671.365
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.439.254.257	1.261.462.500	425.877.500
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.500.000	317.603.700	163.261.500
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	9.750.000
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	84.999.700	29.329.000
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.500.000	37.500.000	9.486.500
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	15.000.000
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	150.104.000	99.696.000
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000	74.029.054	0
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	74.029.054	0
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.000.000	399.960.000	348.000.000
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000	399.960.000	348.000.000
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.750.000	217.626.000	86.700.000
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	29.994.500	0
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	119.991.500	75.000.000
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.750.000	67.640.000	11.700.000
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	13.800.000.000	18.885.629.350	18.772.729.250
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.700.000.000	18.785.629.500	18.684.489.400

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	13.700.000.000	18.785.629.500	18.684.489.400
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100.000.000	99.999.850	88.239.850
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100.000.000	99.999.850	88.239.850
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	550.000.000	549.999.700	492.056.760
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	550.000.000	549.999.700	216.616.840
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	250.000.000	249.999.900	0
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	100.000.000	100.000.000	0
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	200.000.000	199.999.800	216.616.840
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	0	0	275.439.920
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	275.439.920
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	332.107.417	232.022.200	229.904.000
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	57.107.417	57.107.200	29.999.900
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.107.417	57.107.200	29.999.900
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	200.000.000	99.915.000	99.914.900
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	200.000.000	99.915.000	99.914.900
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	75.000.000	75.000.000	99.989.200
3.25.0.00.0.00.25.0000	3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000	99.989.200
3.26.2.19.0.00.26.0000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	13.015.431.448	12.520.184.706	8.152.275.556
3.26.2.19.0.00.26.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	600.000.000	599.999.800	703.643.550
3.26.2.19.0.00.26.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	600.000.000	599.999.800	703.643.550
3.26.2.19.0.00.26.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	400.000.000	400.000.000	500.000.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	0	0	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.26.2.19.0.00.26.0000	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	400.000.000	500.000.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	400.000.000	400.000.000	500.000.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	200.000.000	199.999.800	203.643.550
3.26.2.19.0.00.26.0000	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	200.000.000	199.999.800	203.643.550
3.26.2.19.0.00.26.0000	2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	200.000.000	199.999.800	203.643.550
3.26.2.19.0.00.26.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12.415.431.448	11.920.184.906	7.448.632.006
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	12.415.431.448	11.920.184.906	7.448.632.006
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.144.726.998	6.966.081.856	5.367.694.956
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	18.460.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	18.460.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.303.403.498	6.124.771.356	4.972.921.356
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.453.453.498	4.436.221.356	4.406.221.356
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.849.950.000	1.688.550.000	566.700.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	24.334.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	50.000.000	50.000.000	24.334.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	468.323.500	468.310.500	184.589.600
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.323.500	23.323.500	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.000.000	175.000.000	94.149.600
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	50.000.000	20.440.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	19.995.000	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	199.992.000	70.000.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.000.000	113.000.000	84.000.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.000.000	113.000.000	84.000.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000	160.000.000	83.390.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	100.000.000	45.790.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	60.000.000	37.600.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.750.000.000	4.433.399.000	1.282.394.050
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	330.000.000	330.000.000	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	330.000.000	330.000.000	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	400.000.000	4.103.399.000	1.150.000.150
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	400.000.000	4.103.399.000	1.050.000.150
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	100.000.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.020.000.000	0	132.393.900
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.020.000.000	0	132.393.900
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	100.000.000	99.999.850	167.710.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000	99.999.850	167.710.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	100.000.000	99.999.850	67.710.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	100.000.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	04	2.02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	420.704.450	420.704.200	630.833.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	420.704.450	420.704.200	630.833.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0	0	192.020.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	0	0	339.580.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200.000.000	199.999.800	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	220.704.450	220.704.400	99.233.000
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0	0	0
3.26.2.19.0.00.26.0000	3	26	05	2.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	0	0	0
4.01.3.29.2.10.41.0000						SEKRETARIAT DAERAH	49.085.726.481	50.325.057.881	47.073.835.745
4.01.3.29.2.10.41.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	49.085.726.481	50.325.057.881	47.073.835.745
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	49.085.726.481	50.325.057.881	47.073.835.745
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.463.506.431	31.386.010.831	29.104.302.645
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	50.020.000	10.700.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.020.000	10.700.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.766.219.358	11.629.721.357	10.284.730.293
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.412.219.358	11.503.721.357	10.158.730.293
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	354.000.000	126.000.000	126.000.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.833.936.300	2.833.859.000	1.544.793.600
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	699.998.300	699.999.000	471.331.600
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	167.678.000	167.600.000	108.470.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	700.000.000	700.000.000	457.887.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.266.260.000	1.266.260.000	507.105.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.657.105.905	2.175.425.600	3.331.061.600
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.300.000.000	1.818.400.000	2.848.309.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	82.105.905	82.035.600	64.246.600
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	275.000.000	274.990.000	418.506.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.305.851.668	2.691.340.500	1.873.419.478
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	498.450.000	498.450.000	498.450.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.807.401.668	2.192.890.500	1.374.969.478
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.647.541.900	8.647.521.400	8.753.689.900
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000	399.999.900	399.999.900
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.547.550.000	6.547.550.000	6.193.150.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	20.000.000	20.000.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.000.000	179.980.000	179.980.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.499.991.900	1.499.991.500	1.960.560.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.460.000.000	1.589.446.104	1.511.073.104
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	350.000.000	478.446.104	478.446.104
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	110.000.000	111.000.000	111.000.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	921.627.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	449.996.000	449.995.550	348.845.550
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	449.996.000	449.995.550	348.845.550
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	600.000.000	626.000.120	627.189.320
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	312.000.000	312.000.000	201.243.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	66.000.000	66.000.000	107.143.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	84.000.000	110.000.120	161.849.120
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	78.000.000	78.000.000	39.694.200
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60.000.000	60.000.000	117.260.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	692.855.300	692.681.200	818.799.800
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	348.490.000	348.471.000	255.729.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	104.994.800	104.985.800	308.568.200
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	239.370.500	239.224.400	254.502.600
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.535.501.300	14.650.866.400	14.000.303.400
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	563.860.000	566.125.800	515.471.800
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	150.000.000	152.266.000	152.266.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	222.320.000	222.319.900	115.665.900
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	191.540.000	191.539.900	247.539.900
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.868.345.000	10.835.749.600	10.131.584.600
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.200.000.000	1.551.718.400	1.498.370.400
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	168.345.000	4.784.031.200	4.301.258.200
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.500.000.000	4.500.000.000	4.331.956.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	820.296.300	965.991.000	1.070.247.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	220.333.300	220.333.200	220.333.200
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	500.000.000	590.617.000	694.873.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	99.963.000	155.040.800	155.040.800
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	2.283.000.000	2.283.000.000	2.283.000.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2.283.000.000	2.283.000.000	2.283.000.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.086.718.750	4.288.180.650	3.969.229.700
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	457.924.500	490.800.800	690.425.800
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	291.325.000	307.502.000	407.457.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	166.599.500	183.298.800	282.968.800
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	600.000.000	723.515.250	803.099.900
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	175.000.000	184.601.500	175.000.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	175.000.000	180.549.900	220.499.900
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	250.000.000	358.363.850	407.600.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	939.152.250	1.150.223.600	1.103.405.600
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	341.337.400	374.493.400	358.505.400
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	521.460.850	540.094.200	509.264.200
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	76.354.000	235.636.000	235.636.000
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	89.642.000	1.923.641.000	1.372.298.400
4.01.3.29.2.10.41.0000	4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	89.642.000	1.923.641.000	1.372.298.400
4.02.0.00.0.00.42.0000						SEKRETARIAT DPRD	33.485.122.252	33.104.350.238	28.802.448.081
4.02.0.00.0.00.42.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	33.485.122.252	33.104.350.238	28.802.448.081
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	33.485.122.252	33.104.350.238	28.802.448.081
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.933.010.039	16.628.078.438	16.185.709.681
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.726.271.199	3.540.871.211	3.110.346.604
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.456.871.199	3.456.871.211	3.026.346.604
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	269.400.000	84.000.000	84.000.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	100.416.000	79.368.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	100.416.000	79.368.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.013.984.640	993.114.627	1.278.034.427
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	23.224.000	23.224.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	160.268.927	307.648.927
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	49.960.000	411.195.800
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000	354.158.200	283.778.200
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	72.980.500	72.980.500
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	78.984.640	78.975.000	78.975.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	253.548.000	100.232.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	194.560.000	333.122.500
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	200.000.000	194.560.000	333.122.500
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.576.072.000	1.461.600.000	905.416.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	301.500.000	264.500.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.276.072.000	1.160.100.000	640.916.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.000.000	632.692.800	786.200.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275.000.000	282.532.800	269.200.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	142.870.000	109.710.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	207.290.000	407.290.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	9.591.682.200	9.615.592.200	9.603.990.550
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.426.682.200	9.426.682.200	9.380.080.550
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	165.000.000	188.910.000	223.910.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	100.000.000	89.231.600	89.231.600
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	100.000.000	89.231.600	89.231.600
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.552.112.213	16.476.271.800	12.616.738.400
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.655.832.136	1.758.082.000	1.587.580.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	265.832.136	290.948.000	290.948.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.100.000.000	1.154.746.000	984.244.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	250.000.000	280.888.000	280.888.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	40.000.000	31.500.000	31.500.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.015.000.000	766.343.600	694.448.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	32.500.000	31.835.800	24.767.800
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	32.500.000	32.414.800	24.547.800
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	350.000.000	231.940.600	209.453.800
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	350.000.000	234.266.600	222.257.800
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	250.000.000	235.885.800	213.420.800
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.200.000.000	3.636.762.600	3.417.339.600
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	650.000.000	750.374.000	707.746.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	550.000.000	692.576.000	612.608.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	650.000.000	757.964.000	757.964.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	500.000.000	553.602.000	482.460.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	350.000.000	430.376.000	430.376.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	250.000.000	213.415.800	187.730.800
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	250.000.000	238.454.800	238.454.800
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	2.600.000.000	2.593.379.800	2.115.509.800

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	1.900.000.000	1.893.784.000	1.544.664.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	270.000.000	270.000.000	201.250.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	180.000.000	180.000.000	120.000.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	240.000.000	240.000.000	240.000.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	10.000.000	9.595.800	9.595.800
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.431.280.077	5.195.513.400	3.283.028.600
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	2.131.280.077	2.017.688.000	1.082.585.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	3.300.000.000	3.177.825.400	2.200.443.600
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	2.650.000.000	2.526.190.400	1.518.832.400
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.500.000.000	2.497.928.000	1.490.570.000
4.02.0.00.0.00.42.0000	4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	150.000.000	28.262.400	28.262.400
5.01.5.05.0.00.51.0000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.387.779.747	10.387.558.800	7.692.955.162
5.01.5.05.0.00.51.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	10.387.779.747	10.387.558.800	7.692.955.162
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01				PERENCANAAN	9.637.779.747	9.592.758.900	7.147.161.662
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.373.779.747	6.270.961.900	4.984.466.462
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.465.919.747	4.381.919.750	3.810.245.440
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.315.919.747	4.315.919.750	3.763.645.440
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.000.000	66.000.000	46.600.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	639.000.000	638.904.400	202.535.500
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.000.000	23.949.500	7.001.500
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.000.000	159.999.900	73.276.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.000	85.000.000	10.040.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	19.995.000	12.150.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	349.960.000	100.068.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155.000.000	154.738.000	426.372.022
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	79.950.000	426.372.022
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	59.800.000	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	14.988.000	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	776.860.000	758.735.000	464.436.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340.000.000	339.975.000	297.600.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	436.860.000	418.760.000	166.836.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.000.000	336.664.750	80.877.500
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.000.000	139.983.750	76.877.500

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.000.000	16.689.000	4.000.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	99.992.000	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	80.000.000	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.914.000.000	1.971.797.800	1.462.695.200
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.250.000.000	1.369.541.200	1.056.450.800
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	300.000.000	192.698.400	104.179.400
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	350.000.000	399.078.800	386.769.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	777.764.000	565.502.400
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	350.000.000	223.978.400	126.287.200
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000	109.875.200	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	150.000.000	114.103.200	126.287.200
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	314.000.000	378.278.200	279.957.200
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	314.000.000	378.278.200	279.957.200
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.350.000.000	1.349.999.200	700.000.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	450.000.000	450.000.000	300.000.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.000.000	60.000.000	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0	0	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0	0	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	0	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100.000.000	100.000.000	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	190.000.000	190.000.000	200.000.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	450.000.000	449.999.300	200.000.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	140.000.000	139.999.800	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	70.000.000	69.999.800	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	50.000.000	49.999.900	100.000.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	140.000.000	139.999.800	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0	0	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	50.000.000	50.000.000	100.000.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	450.000.000	449.999.900	200.000.000
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	180.000.000	180.000.000	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60.000.000	60.000.000	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100.000.000	99.999.900	119.995.300
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	110.000.000	110.000.000	80.004.700
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	750.000.000	794.799.900	545.793.500
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	750.000.000	794.799.900	545.793.500
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	300.000.000	275.218.900	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	300.000.000	275.218.900	0
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	450.000.000	519.581.000	545.793.500
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	250.000.000	258.079.000	295.260.500
5.01.5.05.0.00.51.0000	5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	200.000.000	261.502.000	250.533.000
5.02.0.00.0.00.52.0000						BADAN KEUANGAN DAERAH	160.411.410.994	159.651.951.100	116.255.165.281
5.02.0.00.0.00.52.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	160.411.410.994	159.651.951.100	116.255.165.281

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02				KEUANGAN	160.411.410.994	159.651.951.100	116.255.165.281
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.304.773.156	36.948.803.017	28.466.164.085
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254.736.000	246.459.000	0
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254.736.000	246.459.000	0
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.768.367.656	34.050.832.661	26.197.655.609
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.667.027.656	33.667.027.661	26.011.295.609
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.101.340.000	383.805.000	186.360.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100.000.000	125.272.000	125.272.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	100.000.000	125.272.000	125.272.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	799.589.500	683.939.880	402.617.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.800.000	45.550.000	45.550.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	176.908.880	80.392.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	260.726.000	125.577.000	125.577.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.330.000	35.100.000	35.100.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.997.500	15.990.000	15.990.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.736.000	284.814.000	100.008.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328.000.000	119.261.500	119.261.500
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	328.000.000	119.261.500	119.261.500
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.469.336.000	1.379.973.976	1.278.293.976
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	782.156.000	729.456.000	729.456.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	687.180.000	650.517.976	548.837.976
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.744.000	343.064.000	343.064.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.000.000	0	0
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	209.000.000	228.204.000	228.204.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	247.744.000	114.860.000	114.860.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	120.604.491.838	120.711.506.933	86.100.869.446
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.547.915.805	2.547.915.900	1.225.919.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	101.309.305	101.309.200	53.004.200
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	77.450.000	77.449.800	44.419.200

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	842.109.000	842.109.000	477.692.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	839.018.500	839.019.000	489.969.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	216.897.000	216.896.900	61.985.800
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	471.132.000	471.132.000	98.848.800
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	957.893.700	1.064.909.200	617.536.600
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	308.514.000	324.977.000	325.345.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	183.910.000	199.355.200	76.476.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	116.965.700	130.318.800	70.180.400
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	223.013.000	253.868.200	71.979.600
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	125.491.000	156.390.000	73.555.600
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.139.129.500	1.139.129.000	455.324.400
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	61.209.200	61.209.100	0
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	59.391.000	59.390.800	0
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	201.787.800	201.787.800	127.240.600
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	206.211.000	206.211.000	52.217.600
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	122.609.000	122.609.000	104.441.600
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	148.186.000	148.185.800	0
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	339.735.500	339.735.500	171.424.600
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	115.959.552.833	115.959.552.833	83.802.089.446

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12.485.992.060	12.485.992.060	4.497.167.877
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	103.473.560.773	103.473.560.773	79.304.921.569
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	418.873.000	418.735.550	447.537.300
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	418.873.000	418.735.550	447.537.300
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	36.645.000	36.644.450	24.497.600
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	92.353.000	92.272.200	62.383.600
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	76.250.000	76.225.400	157.759.600
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	121.297.000	121.272.000	115.162.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	56.793.000	56.791.000	56.741.500
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	35.535.000	35.530.500	30.993.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.083.273.000	1.572.905.600	1.240.594.450
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.083.273.000	1.572.905.600	1.240.594.450
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	186.692.000	183.213.600	236.460.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	182.588.500	227.487.000	114.294.400
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	127.299.000	204.982.000	307.190.050
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	99.983.500	97.138.000	81.364.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	129.595.000	379.918.000	97.016.000
5.02.0.00.0.00.52.0000	5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	357.115.000	480.167.000	404.270.000
5.03.5.04.0.00.53.0000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.150.079.408	11.150.079.135	6.330.480.319
5.03.5.04.0.00.53.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	11.150.079.408	11.150.079.135	6.330.480.319
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	8.050.079.408	7.574.342.535	5.641.588.919
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.100.079.408	5.064.741.835	3.751.193.319
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.781.756.826	3.750.356.721	3.089.151.467
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.631.756.826	3.631.756.821	3.053.251.467
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000	68.600.000	35.900.000
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25.000.000	25.000.000	0
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.000.000	24.999.900	0
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	365.000.000	390.237.844	210.294.594
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	13.011.250	8.509.000
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	55.907.000	0
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000	69.999.594	71.799.594

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	15.061.000	15.061.000
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	221.259.000	99.925.000
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.000.000	672.317.088	381.830.458
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	274.800.000	234.000.000
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.000.000	397.517.088	147.830.458
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.322.582	251.830.182	69.916.800
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	29.994.800	39.696.800
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	20.500.000	30.220.000
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	48.012.800	0
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.322.582	153.322.582	0
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.950.000.000	2.509.600.700	1.890.395.600
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	375.000.000	387.168.700	266.997.000
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	200.000.000	192.318.900	192.000.000
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	75.000.000	74.997.000	74.997.000
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100.000.000	119.852.800	0
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	725.000.000	727.579.800	736.605.000
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	650.000.000	652.599.800	661.625.000
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	75.000.000	74.980.000	74.980.000
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	1.700.000.000	1.244.852.300	682.039.600
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	0	0	0
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	700.000.000	1.244.852.300	682.039.600
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.000.000.000	0	0
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	150.000.000	149.999.900	204.754.000
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	75.000.000	74.999.900	0
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	75.000.000	75.000.000	204.754.000
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.100.000.000	3.575.736.600	688.891.400
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.100.000.000	3.575.736.600	688.891.400
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	800.000.000	1.275.736.600	0
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	800.000.000	1.275.736.600	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.300.000.000	2.300.000.000	688.891.400
5.03.5.04.0.00.53.0000	5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.300.000.000	2.300.000.000	688.891.400
6.01.0.00.0.00.61.0000						INSPEKTORAT	9.790.307.543	9.703.438.607	9.588.312.877
6.01.0.00.0.00.61.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.790.307.543	9.703.438.607	9.588.312.877
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	9.790.307.543	9.703.438.607	9.588.312.877
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.458.516.270	6.117.962.407	6.018.460.477
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.139.055.743	4.699.607.707	4.380.175.873
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.989.055.743	4.654.367.707	4.342.135.873
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.000.000	45.240.000	38.040.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.617.104	130.991.800	149.068.400
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	81.617.104	130.991.800	149.068.400
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.000.000	409.652.400	874.731.800
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000	13.000.000	13.000.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.750.000	9.890.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000	121.363.400	187.794.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	35.000.000	44.000.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	209.539.000	600.047.800
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	244.245.423	305.200.600	157.699.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	122.445.000	0
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.663.423	72.650.000	57.535.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	71.582.000	110.105.600	100.164.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.598.000	426.514.900	287.680.404
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.000.000	134.820.900	134.820.900
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.598.000	291.694.000	152.859.504
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.000.000	145.995.000	169.105.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	60.000.000	76.750.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.000.000	55.995.000	56.820.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000	35.535.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.705.000.000	2.886.849.200	2.993.694.600

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.213.000.000	2.228.377.200	2.701.398.500
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	423.000.000	422.995.600	267.970.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	330.000.000	329.997.800	432.175.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	400.000.000	399.998.400	671.197.900
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	110.000.000	111.303.000	117.760.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	500.000.000	499.983.600	634.375.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	200.000.000	211.225.000	429.703.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	250.000.000	252.873.800	148.217.600
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	492.000.000	658.472.000	292.296.100
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	95.000.000	164.065.400	0
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	397.000.000	494.406.600	292.296.100
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	626.791.273	698.627.000	576.157.800
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	206.791.273	273.536.200	221.424.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	12.000.000	78.745.000	0
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	194.791.273	194.791.200	221.424.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	420.000.000	425.090.800	354.733.800
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	100.001.000	100.000.000
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	85.000.000	85.000.000	49.129.800
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	150.000.000	155.090.000	139.842.400
6.01.0.00.0.00.61.0000	6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	85.000.000	84.999.800	65.761.600
7.01.0.00.0.00.71.0000						KECAMATAN SIBERUT UTARA	6.818.195.941	6.801.144.567	2.925.878.185
7.01.0.00.0.00.71.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	6.818.195.941	6.801.144.567	2.925.878.185
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01				KECAMATAN	6.818.195.941	6.801.144.567	2.925.878.185
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.641.304.441	6.618.558.367	2.573.838.985
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	79.810.000	57.080.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	79.810.000	57.080.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.606.744.341	2.593.124.067	2.271.786.185
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.354.333.618	2.290.589.067	2.056.531.185
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	252.410.723	302.535.000	215.255.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.050.100	124.684.300	91.562.800
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.100	2.500.000	2.155.500
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	24.630.400	21.517.300
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.550.000	2.549.900	2.450.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000	95.004.000	65.440.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.580.000.000	3.584.100.000	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	80.000.000	79.900.000	0
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.500.000.000	3.504.200.000	0
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.750.000	197.380.000	114.000.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.500.000	24.000.000	24.000.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.250.000	173.380.000	90.000.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.760.000	39.460.000	39.410.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	20.000.000	19.450.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.500.000	4.000.000	4.500.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.260.000	15.460.000	15.460.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.200.000	7.200.000	90.452.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.200.000	7.200.000	90.452.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.200.000	7.200.000	90.452.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	59.709.000	59.708.200	52.193.200
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	59.709.000	59.708.200	52.193.200
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.709.000	34.709.200	31.528.200
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000	24.999.000	20.665.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74.982.500	74.998.000	134.389.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	74.982.500	74.998.000	134.389.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.982.500	23.974.000	100.044.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	51.000.000	51.024.000	34.345.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.000.000	40.680.000	75.005.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.000.000	40.680.000	75.005.000
7.01.0.00.0.00.71.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.000.000	40.680.000	75.005.000
7.01.0.00.0.00.72.0000						KECAMATAN SIBERUT TENGAH	2.462.239.078	2.440.988.822	2.084.485.428

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.72.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.462.239.078	2.440.988.822	2.084.485.428
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01				KECAMATAN	2.462.239.078	2.440.988.822	2.084.485.428
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.239.475.678	2.206.221.372	1.845.025.478
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	30.003.000	51.680.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	30.003.000	51.680.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.652.749.178	1.699.888.072	1.486.992.178
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.502.749.178	1.557.668.072	1.374.312.178
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.000.000	142.220.000	112.680.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.966.500	109.498.000	83.650.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.023.700	5.009.000	2.729.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.406.200	29.400.000	21.642.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.011.600	5.009.000	5.009.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.525.000	70.080.000	54.270.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.000.000	73.062.300	47.703.300
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	18.000.000	18.098.800	18.098.800
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	34.963.500	9.604.500
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.000.000	250.050.000	133.500.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	6.000.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.000.000	238.050.000	127.500.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.760.000	43.720.000	41.500.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.760.000	2.720.000	500.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	6.000.000	6.000.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	35.000.000	35.000.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.911.000	23.930.000	36.690.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	23.911.000	23.930.000	36.690.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	23.911.000	23.930.000	36.690.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.999.900	39.974.000	33.474.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.999.900	39.974.000	33.474.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000	20.016.000	13.516.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.999.900	19.958.000	19.958.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	82.298.500	80.228.700	78.661.200
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	82.298.500	80.228.700	78.661.200
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	18.782.500	18.827.500	59.758.000
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	63.516.000	61.401.200	18.903.200
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	76.554.000	90.634.750	90.634.750
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	76.554.000	90.634.750	90.634.750
7.01.0.00.0.00.72.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	76.554.000	90.634.750	90.634.750
7.01.0.00.0.00.73.0000						KECAMATAN SIBERUT BARAT	2.380.087.572	2.344.975.535	2.054.933.417
7.01.0.00.0.00.73.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.380.087.572	2.344.975.535	2.054.933.417
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01				KECAMATAN	2.380.087.572	2.344.975.535	2.054.933.417
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.130.485.363	2.085.129.535	1.730.622.917
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.770.000	74.280.400	55.440.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.770.000	74.280.400	55.440.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.522.644.061	1.538.082.935	1.316.951.717
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.322.644.061	1.324.162.935	1.092.606.717
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200.000.000	213.920.000	224.345.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.516.443	135.646.200	119.159.200
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	5.844.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.016.443	38.016.200	38.010.200
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000	2.500.000	1.925.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	87.130.000	73.380.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000	75.000.000	75.000.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	75.000.000	75.000.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.200.000	219.120.000	141.072.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	24.000.000	24.000.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.200.000	195.120.000	117.072.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.354.859	43.000.000	23.000.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.354.859	13.000.000	13.000.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	10.000.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.960.000	51.962.000	75.000.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	51.960.000	51.962.000	75.000.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51.960.000	51.962.000	75.000.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55.725.709	61.011.000	27.055.500
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.725.709	61.011.000	27.055.500
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	41.903.000	47.190.000	18.060.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.822.709	13.821.000	8.995.500
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	76.846.500	73.518.000	122.255.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	76.846.500	73.518.000	122.255.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21.485.000	18.157.000	99.995.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	55.361.500	55.361.000	22.260.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65.070.000	73.355.000	100.000.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	65.070.000	73.355.000	100.000.000
7.01.0.00.0.00.73.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	65.070.000	73.355.000	100.000.000
7.01.0.00.0.00.74.0000						KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	2.516.836.691	2.490.006.479	2.164.530.313
7.01.0.00.0.00.74.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.516.836.691	2.490.006.479	2.164.530.313
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01				KECAMATAN	2.516.836.691	2.490.006.479	2.164.530.313
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.354.836.691	2.358.971.979	1.914.992.113
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.995.000	49.769.500	35.890.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.995.000	49.769.500	35.890.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.769.005.000	1.855.913.979	1.606.466.613
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.364.000.000	1.645.263.979	1.308.126.613
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	405.005.000	210.650.000	298.340.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.036.691	154.062.000	135.499.500

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	4.057.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.036.691	99.035.000	51.830.700
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	2.551.800
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	45.027.000	77.060.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000.000	77.226.500	0
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	50.000.000	49.195.500	0
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	8.431.000	0
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	19.600.000	0
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.800.000	222.000.000	137.136.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	40.000.000	24.000.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.800.000	182.000.000	113.136.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.000.000	6.191.250	39.380.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.000.000	6.191.250	39.380.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.000.000	6.191.250	39.380.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55.000.000	49.088.750	34.823.200
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.000.000	49.088.750	34.823.200
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.000.000	24.731.250	25.886.200
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000	24.357.500	8.937.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.000.000	56.925.300	79.005.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.000.000	56.925.300	79.005.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35.000.000	31.925.500	67.970.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.000.000	24.999.800	11.035.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40.000.000	18.829.200	96.330.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000	18.829.200	96.330.000
7.01.0.00.0.00.74.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.000.000	18.829.200	96.330.000
7.01.0.00.0.00.75.0000						KECAMATAN SIBERUT SELATAN	3.234.634.966	3.194.684.953	2.440.286.280

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.75.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	3.234.634.966	3.194.684.953	2.440.286.280
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01				KECAMATAN	3.234.634.966	3.194.684.953	2.440.286.280
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.922.685.966	2.894.696.953	2.135.008.780
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.998.000	100.225.500	36.105.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.998.000	100.225.500	36.105.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.171.429.783	2.229.937.043	1.809.099.039
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.041.429.783	2.050.907.043	1.710.969.039
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130.000.000	179.030.000	98.130.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.863.183	165.953.000	87.683.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.812.800	6.812.000	5.210.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.050.383	42.001.000	30.763.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	4.990.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	107.140.000	46.720.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.700.000	213.500.000	107.700.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	12.000.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	239.700.000	201.500.000	95.700.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.695.000	185.081.410	94.421.741
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.000	91.210.000	37.500.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.135.000	25.065.000	20.850.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.560.000	68.806.410	36.071.741
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	61.215.000	72.830.000	45.435.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.215.000	33.230.000	15.440.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.215.000	33.230.000	15.440.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.000.000	39.600.000	29.995.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	35.000.000	39.600.000	29.995.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.734.000	51.028.000	42.109.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.734.000	51.028.000	42.109.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24.519.000	24.618.000	20.749.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.215.000	26.410.000	21.360.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.000.000	90.970.000	125.090.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.000.000	90.970.000	125.090.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50.000.000	32.140.000	95.590.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000	58.830.000	29.500.000
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.000.000	85.160.000	92.643.500
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.000.000	85.160.000	92.643.500
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	50.000.000	51.030.000	70.817.500
7.01.0.00.0.00.75.0000	7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	50.000.000	34.130.000	21.826.000
7.01.0.00.0.00.76.0000						KECAMATAN SIPORA UTARA	2.972.673.930	2.906.775.900	2.536.637.650
7.01.0.00.0.00.76.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.972.673.930	2.906.775.900	2.536.637.650
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01				KECAMATAN	2.972.673.930	2.906.775.900	2.536.637.650
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.713.159.130	2.647.728.000	2.279.389.650
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.940.452	21.940.400	75.000.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.940.452	21.940.400	75.000.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.924.481.828	1.836.911.220	1.576.744.250
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.896.081.828	1.803.311.220	1.543.144.250
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.400.000	33.600.000	33.600.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.960.850	158.193.200	132.191.600
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.960.850	4.925.000	4.925.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	74.645.400	49.937.800
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000	8.254.800	7.504.800
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000	70.368.000	69.824.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000	89.203.180	20.055.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	89.203.180	20.055.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.776.000	434.880.000	215.388.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	24.000.000	24.000.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	484.776.000	410.880.000	191.388.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000	106.600.000	260.010.800

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	31.490.000	29.450.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	28.650.000	28.650.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	11.680.000	3.650.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	34.780.000	198.260.800
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.000.000	53.000.000	87.924.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	53.000.000	53.000.000	87.924.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	28.000.000	28.000.000	37.924.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25.000.000	25.000.000	50.000.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.794.800	47.328.000	43.478.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.794.800	47.328.000	43.478.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.794.800	22.728.000	15.868.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000	24.600.000	27.610.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	113.720.000	113.719.900	84.115.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	113.720.000	113.719.900	84.115.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	33.720.000	33.720.000	64.115.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	80.000.000	79.999.900	20.000.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.000.000	45.000.000	41.731.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000	45.000.000	41.731.000
7.01.0.00.0.00.76.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	45.000.000	45.000.000	41.731.000
7.01.0.00.0.00.77.0000						KECAMATAN SIPORA SELATAN	3.475.642.107	3.383.121.177	3.249.397.722
7.01.0.00.0.00.77.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	3.475.642.107	3.383.121.177	3.249.397.722
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01				KECAMATAN	3.475.642.107	3.383.121.177	3.249.397.722
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.261.642.107	3.169.122.077	2.966.371.222
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	80.000.000	39.840.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	80.000.000	39.840.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.604.440.507	2.523.548.977	2.288.965.622
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.504.440.507	2.423.548.977	2.225.095.622
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000	100.000.000	63.870.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.000.000	179.987.100	151.009.600
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.995.000	4.995.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	15.000.000	24.100.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	49.992.200	63.214.600
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	9.999.900	5.000.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	100.000.000	53.700.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.000.000	52.151.000	295.612.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000	32.219.000	275.680.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.932.000	19.932.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.000.000	310.240.000	187.944.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	24.000.000	24.000.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.000.000	286.240.000	163.944.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.201.600	23.195.000	3.000.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.201.600	13.196.000	3.000.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.999.000	0
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	55.000.000	54.999.800	38.156.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	55.000.000	54.999.800	38.156.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.000.000	20.000.000	10.000.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	35.000.000	34.999.800	28.156.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70.000.000	69.999.700	67.622.400
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.000.000	49.999.800	47.632.400
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.000.000	29.999.800	27.632.400
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	20.000.000	19.999.900	19.990.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	20.000.000	19.999.900	19.990.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	59.000.000	58.999.800	103.522.900
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	59.000.000	58.999.800	103.522.900
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24.000.000	23.999.900	81.522.900
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	35.000.000	34.999.900	22.000.000
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.000.000	29.999.800	73.725.200
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000	29.999.800	73.725.200
7.01.0.00.0.00.77.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30.000.000	29.999.800	73.725.200
7.01.0.00.0.00.78.0000						KECAMATAN PAGAI UTARA	2.688.703.015	2.636.330.736	2.288.278.583
7.01.0.00.0.00.78.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.688.703.015	2.636.330.736	2.288.278.583
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01				KECAMATAN	2.688.703.015	2.636.330.736	2.288.278.583
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.424.479.015	2.390.330.736	1.934.240.333
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.819.104.231	1.852.159.836	1.579.645.933
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.711.871.815	1.685.772.336	1.427.725.933
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	107.232.416	166.387.500	151.920.000
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.092.784	229.770.900	173.478.400
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	9.647.000	9.647.000
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.092.784	79.060.000	22.810.000
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	46.681.400	46.681.400
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000	5.400.000	5.400.000
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000	88.982.500	88.940.000
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.782.000	296.400.000	169.116.000
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	12.000.000
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.782.000	284.400.000	157.116.000
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.500.000	12.000.000	12.000.000
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.500.000	12.000.000	12.000.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.000.000	0	0
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87.224.000	70.832.500	120.832.500
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	87.224.000	70.832.500	120.832.500
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	57.224.000	47.977.500	47.977.500
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000	22.855.000	72.855.000
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	92.000.000	91.437.500	109.475.750
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	92.000.000	91.437.500	109.475.750
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50.000.000	49.930.000	74.961.000
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	42.000.000	41.507.500	34.514.750
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	85.000.000	83.730.000	123.730.000
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85.000.000	83.730.000	123.730.000
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.000.000	34.990.000	74.990.000
7.01.0.00.0.00.78.0000	7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	50.000.000	48.740.000	48.740.000
7.01.0.00.0.00.79.0000						KECAMATAN PAGAI SELATAN	2.783.557.434	2.846.545.480	2.219.453.111
7.01.0.00.0.00.79.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.783.557.434	2.846.545.480	2.219.453.111
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01				KECAMATAN	2.783.557.434	2.846.545.480	2.219.453.111
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.512.230.434	2.605.350.480	1.928.914.911
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.038.000	143.026.250	60.795.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.038.000	143.026.250	60.795.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.778.530.388	1.831.497.530	1.537.306.711
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.556.427.004	1.621.394.230	1.379.186.711
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	222.103.384	210.103.300	158.120.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.442.046	288.606.700	123.167.200
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	1.260.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.161.790	57.330.000	0
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.431.700	68.431.700	34.225.200
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	2.030.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.848.556	152.845.000	85.652.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.050.000	294.050.000	169.716.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	4.800.000	4.800.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.250.000	289.250.000	164.916.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.170.000	48.170.000	37.930.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.960.000	35.960.000	32.250.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.210.000	12.210.000	5.680.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.332.000	41.332.000	95.809.200
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.332.000	41.332.000	95.809.200
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.290.000	25.290.000	20.434.200
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.042.000	16.042.000	75.375.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.775.000	50.643.000	94.729.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	80.775.000	50.643.000	94.729.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.775.000	643.000	75.000.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000	50.000.000	19.729.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	149.220.000	149.220.000	100.000.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	149.220.000	149.220.000	100.000.000
7.01.0.00.0.00.79.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	149.220.000	149.220.000	100.000.000
7.01.0.00.0.00.80.0000						KECAMATAN SIKAKAP	3.464.878.408	3.434.880.296	3.145.126.982
7.01.0.00.0.00.80.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	3.464.878.408	3.434.880.296	3.145.126.982
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01				KECAMATAN	3.464.878.408	3.434.880.296	3.145.126.982
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.288.307.158	3.258.336.946	2.898.620.932
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.994.700	29.990.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.994.700	29.990.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.842.507.158	2.847.867.646	2.617.469.332
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.792.507.158	2.705.190.646	2.474.799.332
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.000.000	142.677.000	142.670.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.000.000	144.805.600	125.025.600

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	7.995.000	7.995.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	49.460.000	11.790.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	30.000.600	30.000.600
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	57.350.000	75.240.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.000.000	33.349.000	0
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.000.000	33.349.000	0
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.800.000	186.320.000	116.136.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000	30.000.000	30.000.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.800.000	156.320.000	86.136.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.000.000	16.000.000	10.000.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.000.000	16.000.000	10.000.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000	19.995.550	39.994.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.000.000	19.995.550	39.994.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20.000.000	19.995.550	39.994.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60.000.000	59.991.800	59.988.050
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60.000.000	59.991.800	59.988.050
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.000.000	34.994.200	34.994.050
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000	24.997.600	24.994.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66.571.250	66.558.000	96.534.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	66.571.250	66.558.000	96.534.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	36.571.250	36.558.800	66.541.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.000.000	29.999.200	29.993.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.000.000	29.998.000	49.990.000
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000	29.998.000	49.990.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.80.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30.000.000	29.998.000	49.990.000
8.01.0.00.0.00.08.0000						KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.190.344.236	7.193.186.893	4.787.208.404
8.01.0.00.0.00.08.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.190.344.236	7.193.186.893	4.787.208.404
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.190.344.236	7.193.186.893	4.787.208.404
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.789.544.236	1.731.827.693	1.409.529.204
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.317.554.237	1.242.528.193	1.123.086.704
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.180.106.236	1.206.528.193	1.087.086.704
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.448.001	36.000.000	36.000.000
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.049.999	130.058.100	130.058.100
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.049.999	5.047.000	5.047.000
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	35.001.200	35.001.200
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	5.005.900	5.005.900
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.990.000	9.990.000
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	75.014.000	75.014.000
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	81.519.000	11.790.000
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	81.519.000	11.790.000
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.940.000	252.600.000	119.472.000
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.200.000	25.800.000	24.000.000
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.740.000	226.800.000	95.472.000
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000	25.122.400	25.122.400
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	20.002.400	20.002.400
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.120.000	5.120.000
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0	0	650.071.900
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	0	650.071.900
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	650.071.900
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	02	2.01	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0	0	0
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.550.000.000	4.600.875.800	2.237.314.000
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.550.000.000	4.600.875.800	2.237.314.000
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.500.000.000	4.550.000.000	2.209.907.000
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50.000.000	50.875.800	27.407.000
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	50.000.000	51.198.600	27.037.800
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	50.000.000	51.198.600	27.037.800
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	0	0
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000	51.198.600	27.037.800
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	330.000.000	336.013.800	271.553.600
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	330.000.000	336.013.800	271.553.600
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50.000.000	50.000.000	129.030.600

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120.000.000	119.968.000	64.136.000
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	160.000.000	166.045.800	78.387.000
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	470.800.000	473.271.000	191.701.900
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	470.800.000	473.271.000	191.701.900
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	0	0
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	0	0
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.000.000	95.628.000	36.058.500
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85.800.000	85.800.000	37.164.400
8.01.0.00.0.00.08.0000	8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000	291.843.000	118.479.000

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Martinus D.

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**								
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	36.664.600	0	0	0	36.664.600	100
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.705.920.000	0	0	0	3.705.920.000	100
2	**Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			KECAMATAN SIPORA UTARA	75.000.000	0	0	0	75.000.000	100
3	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	261.580.000	0	0	0	261.580.000	100
			DINAS KESEHATAN	30.000.000	0	0	0	30.000.000	100
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	32.900.000	0	0	0	32.900.000	100
			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	19.995.000	0	0	0	19.995.000	100
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	49.200.000	0	0	0	49.200.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	43.128.000	0	0	0	43.128.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	45.026.300	0	0	0	45.026.300	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	113.655.400	0	0	0	113.655.400	100
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	171.882.000	50.000.000	0	0	221.882.000	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	88.600.000	0	0	0	88.600.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7.482.331.069	0	0	0	7.482.331.069	100
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	29.600.000	0	0	0	29.600.000	100
			DINAS PERHUBUNGAN	91.700.000	0	0	0	91.700.000	100
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36.000.000	0	0	0	36.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36.872.000	0	0	0	36.872.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	53.400.000	0	0	0	53.400.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	99.233.000	0	0	0	99.233.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	974.456.000	0	0	0	974.456.000	100
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	35.900.000	0	0	0	35.900.000	100
			KECAMATAN SIBERUT BARAT	1.925.000	0	0	0	1.925.000	100
			KECAMATAN SIPORA UTARA	4.925.000	0	0	0	4.925.000	100
			KECAMATAN PAGAI SELATAN	5.680.000	0	0	0	5.680.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			KECAMATAN SIPORA SELATAN	19.990.000	0	0	0	19.990.000	100
			KECAMATAN PAGAI SELATAN	20.434.200	0	0	0	20.434.200	100
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
			KECAMATAN PAGAI SELATAN	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
			KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	27.037.800	0	0	0	27.037.800	100
4	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**								
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	27.218.000	0	0	0	27.218.000	100
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.651.000	0	0	0	17.651.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	571.881.300	0	0	0	571.881.300	100
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
			KECAMATAN SIBERUT BARAT	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100
5	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29.250.000	0	0	0	29.250.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	118.055.000	15.000.000	0	0	133.055.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	248.274.900	766.750.000	0	0	1.015.024.900	100
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.083.573.600	11.368.039.000	0	0	15.451.612.600	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	126.848.000	400.000.000	0	0	526.848.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.089.923.859	52.879.000	0	0	1.142.802.859	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	574.405.000	9.000.000	0	0	583.405.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
			DINAS PERHUBUNGAN	333.878.200	0	0	0	333.878.200	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			KECAMATAN SIBERUT TENGAH	500.000	0	0	0	500.000	100
			KECAMATAN SIBERUT BARAT	55.440.000	0	0	0	55.440.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
			KECAMATAN SIBERUT TENGAH	36.690.000	0	0	0	36.690.000	100
			KECAMATAN SIPORA SELATAN	10.000.000	0	0	0	10.000.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
			KECAMATAN SIBERUT TENGAH	13.516.000	0	0	0	13.516.000	100
			KECAMATAN SIBERUT BARAT	8.995.500	0	0	0	8.995.500	100
			KECAMATAN SIPORA SELATAN	20.000.000	0	0	0	20.000.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
			KECAMATAN SIBERUT TENGAH	59.758.000	0	0	0	59.758.000	100
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
			KECAMATAN SIBERUT TENGAH	90.634.750	0	0	0	90.634.750	100
6	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**								
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	84.698.100	0	0	0	84.698.100	100

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
7	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.000.000	0	0	0	5.000.000	100
			SEKRETARIAT DAERAH	23.309.000	2.825.000.000	0	0	2.848.309.000	100
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
			SEKRETARIAT DAERAH	2.283.000.000	0	0	0	2.283.000.000	100
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							
			SEKRETARIAT DAERAH	407.457.000	0	0	0	407.457.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	46.600.000	0	0	0	46.600.000	100
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	104.179.400	0	0	0	104.179.400	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			INSPEKTORAT	1.890.000	8.000.000	0	0	9.890.000	100
			KECAMATAN SIBERUT UTARA	24.000.000	0	0	0	24.000.000	100
			KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	35.890.000	0	0	0	35.890.000	100
			KECAMATAN SIBERUT SELATAN	36.105.000	0	0	0	36.105.000	100
			KECAMATAN SIPORA SELATAN	4.995.000	0	0	0	4.995.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
			KECAMATAN SIBERUT BARAT	75.000.000	0	0	0	75.000.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
			KECAMATAN SIBERUT BARAT	99.995.000	0	0	0	99.995.000	100

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Martinus D.

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : O4 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	SKPD	Program	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)**			**135.855.417.354,00**
		1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	122.365.935.480,00
		1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	140.538.900,00
		1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	140.658.600,00
		2.24.2.23.0.00.23.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	12.337.064.124,00
		2.24.2.23.0.00.23.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	167.576.700,00
		2.24.2.23.0.00.23.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
		3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	500.000.000,00
		3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	203.643.550,00
2	**Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)**			**156.775.335.284,00**
		1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.870.597.774,00
		1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	59.167.787.850,00
		1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	181.700.000,00
		1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100.000.000,00
		1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	173.577.000,00
		1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.425.241.102,00
		1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.384.562.658,00
		1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	614.119.600,00
		1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.929.949.900,00
		1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
		2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	267.729.000,00
		2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.722.472.400,00
		2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	937.598.000,00
3	**Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas(Mentawai Mantap)**			**149.000.100.157,00**
		1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	15.451.612.600,00
		1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
		1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	95.750.229.053,00
		1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	125.041.000,00
		1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.037.972.919,00
		1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	8.786.343.700,00
		1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10.330.873.900,00
		1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.536.061.000,00
		1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	295.136.500,00

No	Prioritas Pembangunan Daerah	SKPD	Program	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		1.05.1.06.0.00.05.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	766.313.050,00
		1.05.1.06.0.00.05.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-
		2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.157.158.336,00
		2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	9.763.358.099,00
4	**Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)**			**2.153.705.800,00**
		2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	218.917.500,00
		2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.406.468.500,00
		2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-
		2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-
		2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	139.896.000,00
		2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
		2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	388.423.800,00
5	**Pembangunan Pertanian Terpadu Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (MentawaiBerdaya Saing)**			**26.106.775.910,00**
		2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
		2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
		2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
		2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.991.176.100,00
		2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	620.909.800,00
		2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
		2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
		3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	18.772.729.250,00
		3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	492.056.760,00
		3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	229.904.000,00
6	**Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)**			**2.721.113.250,00**
		2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	36.664.600,00
		2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	46.698.600,00
		2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
		2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	76.813.000,00
		2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	480.000.000,00
		3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.282.394.050,00
		3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	167.710.000,00

No	Prioritas Pembangunan Daerah	SKPD	Program	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
		3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	630.833.000,00
7	**Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)**			**7.455.748.500,00**
		2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
		2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	478.525.300,00
		2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	149.862.800,00
		2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	92.213.600,00
		2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.499.693.400,00
		2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
		2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	167.914.900,00
		2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
		2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
		2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.180.000,00
		2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.917.358.500,00
		2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
8	**Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)**			**469.792.070.425,00**
		1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	144.307.425.920,00
		1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.939.707.976,00
		1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.042.390.297,00
		1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.767.209.001,00
		1.05.1.06.0.00.05.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.754.640.843,00
		1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.865.766.587,00
		2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.732.875.069,00
		2.09.3.27.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.124.769.000,00
		2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.648.736.230,00
		2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.359.821.647,00
		2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.261.827.308,00
		2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.758.247.409,00
		2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.334.187.566,00
		2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.874.762.149,00
		2.18.2.07.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.311.020.790,00

No	Prioritas Pembangunan Daerah	SKPD	Program	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		2.24.2.23.0.00.23.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.834.438.022,00
		3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.732.510.365,00
		3.26.2.19.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.367.694.956,00
		4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.104.302.645,00
		4.02.0.00.0.00.42.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.185.709.681,00
		5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.984.466.462,00
		5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.466.164.085,00
		5.03.5.04.0.00.53.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.751.193.319,00
		6.01.0.00.0.00.61.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.018.460.477,00
		7.01.0.00.0.00.71.0000 KECAMATAN SIBERUT UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.573.838.985,00
		7.01.0.00.0.00.72.0000 KECAMATAN SIBERUT TENGAH	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.845.025.478,00
		7.01.0.00.0.00.73.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.730.622.917,00
		7.01.0.00.0.00.74.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.914.992.113,00
		7.01.0.00.0.00.75.0000 KECAMATAN SIBERUT SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.135.008.780,00
		7.01.0.00.0.00.76.0000 KECAMATAN SIPORA UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.279.389.650,00
		7.01.0.00.0.00.77.0000 KECAMATAN SIPORA SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.966.371.222,00
		7.01.0.00.0.00.78.0000 KECAMATAN PAGAI UTARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.934.240.333,00
		7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.928.914.911,00
		7.01.0.00.0.00.80.0000 KECAMATAN SIKAKAP	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.898.620.932,00
		8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.409.529.204,00
		2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	258.284.200,00
		2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	131.506.900,00
		2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	127.201.750,00
		2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	3.301.000,00
		2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	231.886.100,00
		2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	195.840.000,00
		2.13.2.14.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	526.345.000,00
		2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	592.106.200,00
		2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.445.833.800,00
		2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
		4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.000.303.400,00
		4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.969.229.700,00
		4.02.0.00.0.00.42.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.616.738.400,00
		5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-
		5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.462.695.200,00
		5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	700.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Daerah	SKPD	Program	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	545.793.500,00
		5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	86.100.869.446,00
		5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	447.537.300,00
		5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.240.594.450,00
		5.03.5.04.0.00.53.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.890.395.600,00
		5.03.5.04.0.00.53.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	688.891.400,00
		6.01.0.00.0.00.61.0000 INSPEKTORAT	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.993.694.600,00
		6.01.0.00.0.00.61.0000 INSPEKTORAT	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	576.157.800,00
		7.01.0.00.0.00.71.0000 KECAMATAN SIBERUT UTARA	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	90.452.000,00
		7.01.0.00.0.00.71.0000 KECAMATAN SIBERUT UTARA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.193.200,00
		7.01.0.00.0.00.71.0000 KECAMATAN SIBERUT UTARA	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	134.389.000,00
		7.01.0.00.0.00.71.0000 KECAMATAN SIBERUT UTARA	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75.005.000,00
		7.01.0.00.0.00.72.0000 KECAMATAN SIBERUT TENGAH	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.690.000,00
		7.01.0.00.0.00.72.0000 KECAMATAN SIBERUT TENGAH	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.474.000,00
		7.01.0.00.0.00.72.0000 KECAMATAN SIBERUT TENGAH	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	78.661.200,00
		7.01.0.00.0.00.72.0000 KECAMATAN SIBERUT TENGAH	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90.634.750,00
		7.01.0.00.0.00.73.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75.000.000,00
		7.01.0.00.0.00.73.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.055.500,00
		7.01.0.00.0.00.73.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	122.255.000,00
		7.01.0.00.0.00.73.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.000.000,00
		7.01.0.00.0.00.74.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.380.000,00
		7.01.0.00.0.00.74.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.823.200,00
		7.01.0.00.0.00.74.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	79.005.000,00
		7.01.0.00.0.00.74.0000 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	96.330.000,00
		7.01.0.00.0.00.75.0000 KECAMATAN SIBERUT SELATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.435.000,00
		7.01.0.00.0.00.75.0000 KECAMATAN SIBERUT SELATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.109.000,00
		7.01.0.00.0.00.75.0000 KECAMATAN SIBERUT SELATAN	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125.090.000,00
		7.01.0.00.0.00.75.0000 KECAMATAN SIBERUT SELATAN	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	92.643.500,00
		7.01.0.00.0.00.76.0000 KECAMATAN SIPORA UTARA	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	87.924.000,00
		7.01.0.00.0.00.76.0000 KECAMATAN SIPORA UTARA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.478.000,00
		7.01.0.00.0.00.76.0000 KECAMATAN SIPORA UTARA	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	84.115.000,00
		7.01.0.00.0.00.76.0000 KECAMATAN SIPORA UTARA	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	41.731.000,00
		7.01.0.00.0.00.77.0000 KECAMATAN SIPORA SELATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.156.000,00
		7.01.0.00.0.00.77.0000 KECAMATAN SIPORA SELATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	67.622.400,00
		7.01.0.00.0.00.77.0000 KECAMATAN SIPORA SELATAN	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	103.522.900,00
		7.01.0.00.0.00.77.0000 KECAMATAN SIPORA SELATAN	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	73.725.200,00
		7.01.0.00.0.00.78.0000 KECAMATAN PAGAI UTARA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	120.832.500,00
		7.01.0.00.0.00.78.0000 KECAMATAN PAGAI UTARA	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	109.475.750,00
		7.01.0.00.0.00.78.0000 KECAMATAN PAGAI UTARA	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	123.730.000,00

No	Prioritas Pembangunan Daerah	SKPD	Program	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	95.809.200,00
		7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	94.729.000,00
		7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.000.000,00
		7.01.0.00.0.00.80.0000 KECAMATAN SIKAKAP	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.994.000,00
		7.01.0.00.0.00.80.0000 KECAMATAN SIKAKAP	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	59.988.050,00
		7.01.0.00.0.00.80.0000 KECAMATAN SIKAKAP	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	96.534.000,00
		7.01.0.00.0.00.80.0000 KECAMATAN SIKAKAP	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	49.990.000,00
9	**Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)**			**9.230.490.600,00**
		1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	871.881.300,00
		1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	366.195.000,00
		1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	109.131.800,00
		1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	103.880.100,00
		1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.363.992.600,00
		1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	431.029.400,00
		1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.119.140.550,00
		1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	656.424.000,00
		1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	147.892.500,00
		1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
		1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	118.124.750,00
		1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	565.119.400,00
		8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	650.071.900,00
		8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.237.314.000,00
		8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	27.037.800,00
		8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	271.553.600,00
		8.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	191.701.900,00
			JUMLAH TOTAL	**959.090.757.280,00**

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai
Nomor : O4 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e		1						1
Golongan IV/d								0
Golongan IV/c		22						22
Golongan IV/b		6	31			47	2	86
Golongan IV/a		1	51	10		141	10	213
JUMLAH GOLONGAN IV		**30**	**82**	**10**		**188**	**12**	**322**
Golongan III/d			39	50		192	22	303
Golongan III/c			3	55		151	71	280
Golongan III/b				35		244	201	480
Golongan III/a				4		87	553	644
JUMLAH GOLONGAN III			**42**	**144**		**674**	**847**	**1707**
Golongan II/d						54	143	197
Golongan II/c						56	158	214
Golongan II/b						8	89	97
Golongan II/a						2	32	34
JUMLAH GOLONGAN II						**120**	**422**	**542**
Golongan I/d							7	7
Golongan I/c							3	3
Golongan I/b								0
Golongan I/a							2	2
JUMLAH GOLONGAN I							**12**	**12**
Golongan VII						36		36
Golongan IX						164		164
Golongan X						3		3
JUMLAH PPPK						**203**	**0**	**203**
TOTAL		**30**	**124**	**154**		**1185**	**1293**	**2786**

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai
Nomor : O4 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
		NIHIL				
Jumlah						

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : O4 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Inventasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (Investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
												-
Jumlah					-	-	-	-	-	-		-

NIHIL

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XIV A : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : O4 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun T-2	Perkiraan penambahan tahun T-1	Perkiraan pengurangan tahun T-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Tanah	01.03.01	81.645.374.920,00	50.000.000,00	-	81.695.374.920,00
2	Peralatan dan Mesin	01.03.02	373.213.406.608,30	25.658.321.997,00	-	398.871.728.605,30
3	Gedung dan Bangunan	01.03.03	665.360.403.073,00	45.414.592.611,00	-	710.774.995.684,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	01.03.04	1.339.750.739.736,00	92.222.747.969,00	-	1.431.973.487.705,00
5	Aset Tetap Lainnya	01.03.05	20.580.681.404,00	2.659.700.785,00	-	23.240.382.189,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	01.03.06	52.955.574.094,00		-	52.955.574.094,00
Jumlah			**2.533.506.179.835,30**	**166.005.363.362,00**	**-**	**2.699.511.543.197,30**

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XIV B : Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai
Nomor : O4 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Aset	Saldo pada akhir tahun T-2	Perkiraan penambahan tahun T-1	Perkiraan pengurangan tahun T-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Rusak Berat	65.021.757.382,00	21.621.293.832,00	960.416.387,00	85.682.634.827,00
2	Hibah	137.857.372.737,00	-	-	137.857.372.737,00
3	Aset Dalam Penulusuran	8.833.710.408,00	-	-	8.833.710.408,00
4	Aset Hilang (TGR)	179.813.700,00	-	-	179.813.700,00
5	Dikuasai oleh pihak ketiga	3.054.095.796,00	-	843.773.500,00	2.210.322.296,00
6	Mutasi Aset	1.021.459.675,00		130.459.675,00	891.000.000,00
Jumlah		**215.968.209.698,00**	**21.621.293.832,00**	**1.934.649.562,00**	**235.654.853.968,00**

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : O4 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai dengan akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst								
	Jumlah							

NIHIL

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XVI : Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan
Nomor : O4 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tujuan Pembentukan dana cadangan	Dasar Hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1								
2								
3								
dst								
Jumlah								

NIHIL

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : O4 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sumber Pinjama/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Presentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
dst											
Jumlah											

NIHIL

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

b. bahwa dalam rangka penganggaran Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-272-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 30 Mei 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI,

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023
NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	76.087.257.700	103.606.380.700	27.519.123.000	36 %
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	500.000.000	500.000.000	0	0 %
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	500.000.000	500.000.000	0	0 %
	Jumlah Belanja	**959.090.757.280**	**1.043.258.026.807**	**84.167.269.527**	**9 %**
	Total Surplus/(Defisit)	**(41.089.969.831)**	**(94.251.377.654)**	**(53.161.407.823)**	**-129 %**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**41.089.969.831**	**94.251.377.654**	**53.161.407.823**	**129 %**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.089.969.831	94.251.377.654	53.161.407.823	129 %
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	30.860.215.772	90.118.087.870	59.257.872.099	192 %
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.860.215.772	90.118.087.870	59.257.872.099	192 %
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.860.215.772	90.118.087.870	59.257.872.099	192 %
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	10.229.754.060	4.133.289.784	(6.096.464.276)	60 %
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	5.097.942.601	1.168.428.093	(3.929.514.508)	77 %
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	5.097.942.601	1.168.428.093	(3.929.514.508)	77 %
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	5.131.811.459	2.964.861.691	(2.166.949.768)	42 %
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	5.131.811.459	2.964.861.691	(2.166.949.768)	42 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**41.089.969.831**	**94.251.377.654**	**53.161.407.823**	**129 %**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	**0 %**
	Pembiayaan Netto	**41.089.969.831**	**94.251.377.654**	**53.161.407.823**	**129 %**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**	**0**	**0**	**2 %**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.000.000	11.000.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 00	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**300.000.000**	**300.000.000**	**0**		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	300.000.000	300.000.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	300.000.000	300.000.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	300.000.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	26.865.000	26.865.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.865.000	26.865.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	61.500.000	61.500.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	41.000.000	41.000.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.500.000	20.500.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	211.635.000	211.635.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	211.635.000	211.635.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**366.195.000**	**366.195.000**	**0**		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 00	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**366.195.000**	**366.195.000**	**0**		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	366.195.000	366.195.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	366.195.000	366.195.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	366.195.000	366.195.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	63.686.000	63.686.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	63.686.000	63.686.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	88.800.000	88.800.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	76.800.000	76.800.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000	12.000.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	213.709.000	213.709.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	213.709.000	213.709.000	0		
Jumlah Belanja		**268.192.635.200**	**251.669.157.084**	**(16.523.478.116)**		
Total Surplus/(Defisit)		**(268.192.635.200)**	**(251.669.157.084)**	**16.523.478.116**		
0 00 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
											Peralatan dan Mesin					
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.999.800	99.999.800	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1				BELANJA OPERASI	99.999.800	99.999.800	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	99.999.800	99.999.800	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	99.999.800	99.999.800	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.999.800	99.999.800	0		
											Jumlah Belanja	**100.171.177.147**	**101.908.772.035**	**1.737.594.888**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(100.131.184.147)**	**(101.868.779.035)**	**(1.737.594.888)**		
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Henguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
											Honorarium					
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	468.300.000	570.600.000	102.300.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	73.200.000	75.500.000	2.300.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	73.200.000	75.500.000	2.300.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	395.100.000	495.100.000	100.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.100.000	185.100.000	100.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02	03	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	310.000.000	310.000.000	0		
											Jumlah Belanja	**27.322.485.477**	**27.288.421.536**	**(34.063.941)**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(15.736.679.747)**	**(15.702.615.806)**	**34.063.941**		
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.080.000	25.790.000	(24.290.000)		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	50.080.000	25.790.000	(24.290.000)		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.080.000	25.790.000	(24.290.000)		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.913.700	235.913.700	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	190.206.500	190.206.500	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 01	Belanja Pegawai	2.200.000	2.200.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.200.000	2.200.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	2.200.000	2.200.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	188.006.500	188.006.500	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	15.986.500	15.986.500	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.986.500	15.986.500	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.220.000	10.220.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.220.000	10.220.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	161.800.000	161.800.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	161.800.000	161.800.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2	BELANJA MODAL	45.707.200	45.707.200	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.707.200	45.707.200	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000	500.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 02 03 03	Belanja Modal Alat Ukur	500.000	500.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.735.200	40.735.200	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	40.735.200	40.735.200	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	4.472.000	4.472.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.472.000	4.472.000	0		
Jumlah Belanja		**150.658.436.808**	**194.762.284.390**	**44.103.847.582**		
Total Surplus/(Defisit)		**(150.140.049.336)**	**(194.243.896.918)**	**(44.103.847.582)**		
0 00 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	36.658.000	36.658.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	36.658.000	36.658.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.500.000	4.500.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000	4.500.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	8.070.000	0	(8.070.000)		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.070.000	0	(8.070.000)		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.950.000	29.950.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	29.950.000	29.950.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.950.000	29.950.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	29.950.000	29.950.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.950.000	29.950.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.348.000	66.300.000	39.952.000		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	26.348.000	66.300.000	39.952.000		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.348.000	66.300.000	39.952.000		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	26.348.000	66.300.000	39.952.000		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.348.000	66.300.000	39.952.000		
Jumlah Belanja		**27.695.668.897**	**22.507.427.964**	**(5.188.240.933)**		
Total Surplus/(Defisit)		**(27.695.668.897)**	**(22.507.427.964)**	**5.188.240.933**		
0 00 1.04.2.10.0.00.04.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.600.000	5.600.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	15.000.000	15.000.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.405.000	133.405.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	133.405.000	133.405.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	133.405.000	133.405.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	43.065.000	43.065.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	43.065.000	43.065.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	12.000.000	12.000.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000	12.000.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	77.000.000	77.000.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77.000.000	77.000.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	1.340.000	1.340.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.340.000	1.340.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.890.000	5.890.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	5.890.000	5.890.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.890.000	5.890.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	5.890.000	5.890.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.890.000	5.890.000	0		
											Jumlah Belanja	**5.171.477.301**	**5.180.485.735**	**9.008.434**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(5.171.477.301)**	**(5.180.485.735)**	**(9.008.434)**		
0	**00**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.1.06.0.00.05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115.000.000	115.000.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	6.340.000	6.340.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.340.000	6.340.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.490.000	16.490.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	16.490.000	16.490.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.490.000	16.490.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	16.490.000	16.490.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.490.000	16.490.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.760.000	29.760.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	29.760.000	29.760.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.760.000	29.760.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	29.760.000	29.760.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.760.000	29.760.000	0		
Jumlah Belanja		**4.520.953.893**	**13.387.902.434**	**8.866.948.541**		
Total Surplus/(Defisit)		**(4.520.953.893)**	**(13.387.902.434)**	**(8.866.948.541)**		
0 00 1.05.1.06.0.00.05.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Tonggiuran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2 08 1.06.2.08.0.00.06.0000 07 2.03 02 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	15.450.000	15.450.000	0		
	Jumlah Belanja	**8.371.369.887**	**8.709.665.506**	**338.295.619**		
	Total Surplus/(Defisit)	**(8.371.369.887)**	**(8.709.665.506)**	**(338.295.619)**		
0 00 1.06.2.08.0.00.06.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Tonggutan Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.3.27.0.00.09 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	24.000.000	24.000.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60.380.000**	**60.380.000**	**0**		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.380.000	53.380.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	53.380.000	53.380.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.380.000	53.380.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	26.700.000	26.700.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.700.000	26.700.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.500.000	10.500.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.500.000	10.500.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	16.180.000	16.180.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.180.000	16.180.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	7.000.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000	7.000.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	7.000.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 01	Belanja Barang	170.000	170.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	170.000	170.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.830.000	6.830.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.830.000	6.830.000	0		
	Jumlah Belanja	**15.469.729.969**	**15.965.675.536**	**495.945.567**		
	Total Surplus/(Defisit)	**(15.469.729.969)**	**(15.965.675.536)**	**(495.945.567)**		
0 00 2.09.3.27.0.00.09.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	187.028.207	187.028.207	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	187.028.207	187.028.207	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	128.028.207	128.028.207	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	128.028.207	128.028.207	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	59.000.000	59.000.000	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.000.000	59.000.000	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.110.000	10.110.000	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.110.000	10.110.000	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.110.000	10.110.000	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.110.000	10.110.000	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.110.000	10.110.000	0		
Jumlah Belanja		**5.802.442.030**	**5.811.977.587**	**9.535.557**		
Total Surplus/(Defisit)		**(5.802.442.030)**	**(5.811.977.587)**	**(9.535.557)**		
0 00 2.11.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor 07 Tahun 2023
Tanggal 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	464.572.000	471.972.000	7.400.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	464.572.000	471.972.000	7.400.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	464.572.000	471.972.000	7.400.000		
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48.660.000**	**48.660.000**	**0**		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.660.000	48.660.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	48.660.000	48.660.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	48.660.000	48.660.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	33.660.000	33.660.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	33.660.000	33.660.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	15.000.000	15.000.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000	0		
											Jumlah Belanja	**4.880.115.497**	**4.856.002.953**	**(24.112.544)**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(4.880.115.497)**	**(4.856.002.953)**	**24.112.544**		
0	**00**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	0	58.395.000	58.395.000		
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0	58.395.000	58.395.000		
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	327.600.000	379.400.000	51.800.000		
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	327.600.000	31.800.000	(295.800.000)		
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	347.600.000	347.600.000		
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	0	26.112.000	26.112.000		
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0	26.112.000	26.112.000		
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	11.000.000	11.000.000		
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	11.000.000	11.000.000		
Jumlah Belanja		**8.143.697.808**	**8.728.811.905**	**585.114.097**		
Total Surplus/(Defisit)		**(8.143.697.808)**	**(8.728.811.905)**	**(585.114.097)**		
0 00 2.13.2.14.0.00.13.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**			

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	99.854.000	121.588.000	21.734.000		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.854.000	121.588.000	21.734.000		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.345.218.974**	**1.345.218.974**	**0**		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	132.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	132.000.000	132.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000	132.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	132.000.000	132.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	132.000.000	132.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.213.218.974	1.213.218.974	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.213.218.974	1.213.218.974	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.213.218.974	1.213.218.974	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.213.218.974	1.213.218.974	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.600.000	1.200.600.000	0		
2 15 2.15.0 00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.618.974	12.618.974	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.929.000**	**65.929.000**	**0**		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	10.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.000.000	10.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000	10.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.929.000	55.929.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	55.929.000	55.929.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	55 929.000	55 929.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 01	Belanja Barang	49.839.000	49.839.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	49.839.000	49.839.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.090.000	6.090.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.090.000	6.090.000	0		
Jumlah Belanja		**17.678.763.844**	**21.609.793.675**	**3.931.029.831**		
Total Surplus/(Defisit)		**(17.450.234.517)**	**(21.381.264.348)**	**(3.931.029.831)**		
0 00 2.15.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Plt Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49.930.000	49.930.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.992.000	79.992.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1				BELANJA OPERASI	79.992.000	79.992.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000	680.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000	680.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000	680.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	79.312.000	79.312.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	02	01		Belanja Barang	324.000	324.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	324.000	324.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	78.988.000	78.988.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	78.988.000	78.988.000	0		
Jumlah Belanja												**7.372.127.566**	**7.380.472.062**	**8.344.496**		
Total Surplus/(Defisit)												**(7.372.127.566)**	**(7.380.472.062)**	**(8.344.496)**		
0	**00**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan												**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran												**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggurah Simanjuntak

Lampiran II . Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
											Jalan, Jaringan, dan Irigasi					
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	549.710.000	110.294.000	(439.416.000)		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	549.710.000	110.294.000	(439.416.000)		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	2				BELANJA MODAL	0	1.622.743.450	1.622.743.450		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1.622.743.450	1.622.743.450		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	0	1.622.743.450	1.622.743.450		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	1.622.743.450	1.622.743.450		
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**150.180.000**	**152.544.000**	**2.364.000**		
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**150.180.000**	**152.544.000**	**2.364.000**		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.180.000	152.544.000	2.364.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	150.180.000	152.544.000	2.364.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	150.180.000	152.544.000	2.364.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	150.180.000	152.544.000	2.364.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	150.180.000	152.544.000	2.364.000		
											Jumlah Belanja	**10.330.510.649**	**12.119.293.634**	**1.788.782.985**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(10.313.935.649)**	**(12.102.718.634)**	**(1.788.782.985)**		
0	**00**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.2.07.0.00.18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
	Jumlah Belanja	**3.951.196.990**	**4.219.804.449**	**268.607.459**		
	Total Surplus/(Defisit)	**(3.951.196.990)**	**(4.219.804.449)**	**(268.607.459)**		
0 00 2.18.2.07.0.00.18.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**167.576.700**	**167.576.700**	**0**		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 0.00 00	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**167.576.700**	**167.576.700**	**0**		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 00	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**135.236.700**	**135.236.700**	**0**		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	135.236.700	135.236.700	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	135.236.700	135.236.700	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	135.236.700	135.236.700	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	23.768.700	23.768.700	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.768.700	23.768.700	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.170.000	22.170.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.300.000	9.300.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.870.000	12.870.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	89.298.000	89.298.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.298.000	89.298.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 00	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**32.340.000**	**32.340.000**	**0**		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	32.340.000	32.340.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	32.340.000	32.340.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.340.000	32.340.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	922.000	922.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	922.000	922.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.000.000	10.000.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000	10.000.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	21.418.000	21.418.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.418.000	21.418.000	0		
Jumlah Belanja		**15.339.078.846**	**15.347.846.441**	**8.767.595**		
Total Surplus/(Defisit)		**(15.339.078.846)**	**(15.347.846.441)**	**(8.767.595)**		
0 00 2.24.2.23.0.00.23.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	99.696.000	99.696.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.696.000	99.696.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**348.000.000**	**348.000.000**	**0**		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.000.000	348.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	348.000.000	348.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	348.000.000	348.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	348.000.000	348.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	348.000.000	348.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**86.700.000**	**86.700.000**	**0**		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	75.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	75.000.000	75.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	75.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	30.000.000	30.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000	30.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	45.000.000	45.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.000.000	45.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.700.000	11.700.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	11.700.000	11.700.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000	11.700.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	11.700.000	11.700.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.700.000	11.700.000	0		
	Jumlah Belanja	**24.227.200.375**	**24.274.572.700**	**47.372.325**		
	Total Surplus/(Defisit)	**(24.032.014.975)**	**(24.079.387.300)**	**(47.372.325)**		
0 00 3.25.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	197.900.000	197.900.000	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	179.900.000	179.900.000	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.000.000	18.000.000	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 02 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	85.567.000	85.567.000	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.567.000	85.567.000	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	254.502.600	254.502.600	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03 5 1	BELANJA OPERASI	254.502.600	254.502.600	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	254.502.600	254.502.600	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.359.600	1.359.600	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.359.600	1.359.600	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	150.000.000	150.000.000	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	150.000.000	150.000.000	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	103.143.000	103.143.000	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.143.000	103.143.000	0		
Jumlah Belanja		**47.073.835.745**	**50.273.311.389**	**3.199.475.644**		
Total Surplus/(Defisit)		**(47.073.835.745)**	**(50.273.311.389)**	**(3.199.475.644)**		
0 00 4.01.3.29.2.10.41.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Iorgyuran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02	5	1				BELANJA OPERASI	89.231.600	89.231.600	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	89.231.600	89.231.600	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02	5	1	02	01		Belanja Barang	89.231.600	89.231.600	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	89.231.600	89.231.600	0		
											Jumlah Belanja	**28.802.448.081**	**28.796.936.626**	**(5.511.455)**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(28.802.448.081)**	**(28.796.936.626)**	**5.511.455**		
0	**00**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
(Pj. Bupati Kepulauan Mentawai
Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
5 05 5.01.5.05.0.00.51.0000 02 2.02 10 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	82.806.000	95.599.000	12.793.000		
5 05 5.01.5.05.0.00.51.0000 02 2.02 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	82.806.000	95.599.000	12.793.000		
5 05 5.01.5.05.0.00.51.0000 02 2.02 10 5 2	BELANJA MODAL	0	5.500.000	5.500.000		
5 05 5.01.5.05.0.00.51.0000 02 2.02 10 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	5.500.000	5.500.000		
5 05 5.01.5.05.0.00.51.0000 02 2.02 10 5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	5.500.000	5.500.000		
5 05 5.01.5.05.0.00.51.0000 02 2.02 10 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	0	5.500.000	5.500.000		
Jumlah Belanja		**7.692.955.162**	**8.231.366.322**	**538.411.160**		
Total Surplus/(Defisit)		**(7.692.955.162)**	**(8.231.366.322)**	**(538.411.160)**		
0 00 5.01.5.05.0.00.51.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Plt. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SU RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keteran
	Bangunan Lainnya					
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	114.860.000	114.860.000	0		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	114.860.000	114.860.000	0		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	114.860.000	114.860.000	0		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114.860.000	114.860.000	0		
	Jumlah Belanja	**116.255.165.281**	**151.951.011.541**	**35.695.846.260**		
	Total Surplus/(Defisit)	**780.635.346.239**	**775.945.361.683**	**(4.689.984.556)**		
0 00 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**41.089.969.831**	**94.251.377.654**	**53.161.407.823**		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.089.969.831	94.251.377.654	53.161.407.823		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01 07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	30.860.215.772	90.118.087.870	59.257.872.099		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01 07 01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.860.215.772	90.118.087.870	59.257.872.099		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01 08	Sisa Belanja Lainnya	10.229.754.060	4.133.289.784	(6.096.464.276)		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01 08 02	Sisa Dana BOS	5.097.942.601	1.168.428.093	(3.929.514.508)		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01 08 03	Sisa Dana Kapitasi	5.131.811.459	2.964.861.691	(2.166.949.768)		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**41.089.969.831**	**94.251.377.654**	**53.161.407.823**		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01 07 01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.860.215.772	90.118.087.870	59.257.872.099		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01 08 02	Sisa Dana BOS	5.097.942.601	1.168.428.093	(3.929.514.508)		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01 08 03	Sisa Dana Kapitasi	5.131.811.459	2.964.861.691	(2.166.949.768)		
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.53 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening												Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	189.588.000	189.588.000	0		
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	189.588.000	189.588.000	0		
												Jumlah Belanja	**6.330.480.319**	**6.341.564.462**	**11.084.143**		
												Total Surplus/(Defisit)	**(6.330.480.319)**	**(6.341.564.462)**	**(11.084.143)**		
0	**00**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**						**PEMBIAYAAN**					
												Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
												Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.61 INSPEKTORAT

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 01 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	5.570.000	5.570.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.570.000	5.570.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.820.000	56.820.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	56.820.000	56.820.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.820.000	56.820.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	22.320.000	22.320.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.320.000	22.320.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.500.000	8.500.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.500.000	8.500.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	26.000.000	26.000.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.000.000	26.000.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.535.000	35.535.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	35.535.000	35.535.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.535.000	35.535.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 06 5 1 02 01	Belanja Barang	455.000	455.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	455.000	455.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	35.080.000	35.080.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.080.000	35.080.000	0		
Jumlah Belanja		**9.588.312.877**	**9.310.018.846**	**(278.294.031)**		
Total Surplus/(Defisit)		**(9.588.312.877)**	**(9.310.018.846)**	**278.294.031**		
0 00 6.01.0.00.0.00.61.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.72 KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000	500.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	500.000	500.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	500.000	500.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	500.000	500.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	500.000	500.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	6.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	6.000.000	6.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	6.000.000	6.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000	6.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	35.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10	5	1				BELANJA OPERASI	35.000.000	35.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	35.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	35.000.000	35.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000	35.000.000	0		
											Jumlah Belanja	**2.084.485.428**	**2.090.229.744**	**5.744.316**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(2.084.485.428)**	**(2.090.229.744)**	**(5.744.316)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.71 KECAMATAN SIBERUT UTARA

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.000.000	15.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.500.000	4.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.500.000	4.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	4.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000	1.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000	1.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.000.000	3.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000	3.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.460.000	15.460.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	15.460.000	15.460.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.460.000	15.460.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.460.000	15.460.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.460.000	15.460.000	0		
Jumlah Belanja		**2.925.878.185**	**2.932.446.472**	**6.568.287**		
Total Surplus/(Defisit)		**(2.925.878.185)**	**(2.932.446.472)**	**(6.568.287)**		
0 00 7.01.0.00.0.00.71.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Joenguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.74 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.551.800	2.551.800	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.060.000	77.060.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	77.060.000	77.060.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.060.000	77.060.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	17.700.000	17.700.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.700.000	17.700.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	59.360.000	59.360.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.360.000	59.360.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**137.136.000**	**137.136.000**	**0**		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	24.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	24.000.000	24.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	24.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.000.000	24.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000	24.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.136.000	113.136.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	113.136.000	113.136.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	113.136.000	113.136.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	113.136.000	113.136.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	113.136.000	113.136.000	0		
Jumlah Belanja		**2.164.530.313**	**2.112.941.367**	**(51.588.946)**		
Total Surplus/(Defisit)		**(2.164.530.313)**	**(2.112.941.367)**	**51.588.946**		
0 00 7.01.0.00.0.00.74.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.75 KECAMATAN SIBERUT SELATAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000	37.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 01 5 1 02 01	Belanja Barang	12.000.000	12.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000	12.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000	1.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000	1.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	24.000.000	24.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.000.000	24.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.850.000	20.850.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	20.850.000	20.850.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.850.000	20.850.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.250.000	2.250.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.250.000	2.250.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	18.600.000	18.600.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.600.000	18.600.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.071.741	36.071.741	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 11 5 1	BELANJA OPERASI	36.071.741	36.071.741	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.071.741	36.071.741	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 11 5 1 02 01	Belanja Barang	31.571.741	31.571.741	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.571.741	31.571.741	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.500.000	4.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000	4.500.000	0		
Jumlah Belanja		**2.440.286.280**	**2.445.788.969**	**5.502.689**		
Total Surplus/(Defisit)		**(2.440.286.280)**	**(2.445.788.969)**	**(5.502.689)**		
0 00 7.01.0.00.0.00.75.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggutan Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.73 KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode Rekening												Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	1.000.000	1.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	12.000.000	12.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000	12.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10	5	1					BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	10.000.000	10.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000	10.000.000	0		
Jumlah Belanja													**2.054.933.417**	**2.059.069.848**	**4.136.431**		
Total Surplus/(Defisit)													**(2.054.933.417)**	**(2.059.069.848)**	**(4.136.431)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**						**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan													**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran													**0**	**0**	**0**		

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
Plt. Bupati Kepulauan Mentawai
Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.76 KECAMATAN SIPORA UTARA

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.000.000	21.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000	3.650.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	3.650.000	3.650.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	3.650.000	3.650.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	3.650.000	3.650.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.650.000	3.650.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.260.800	198.260.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1				BELANJA OPERASI	198.260.800	198.260.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000	680.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000	680.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000	680.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	197.580.800	197.580.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	01		Belanja Barang	1.580.800	1.580.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.580.800	1.580.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	02		Belanja Jasa	20.000.000	20.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.000.000	20.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	176.000.000	176.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	176.000.000	176.000.000	0		
											Jumlah Belanja	**2.536.637.650**	**2.542.328.383**	**5.690.733**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(2.536.637.650)**	**(2.542.328.383)**	**(5.690.733)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernandes Longguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.78 KECAMATAN PAGAI UTARA

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.116.000	157.116.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	157.116.000	157.116.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	157.116.000	157.116.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	157.116.000	157.116.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	157.116.000	157.116.000	0		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.000.000**	**12.000.000**	**0**		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.000.000	12.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	12.000.000	12.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	12.000.000	12.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000	12.000.000	0		
											Jumlah Belanja	**2.288.278.583**	**2.293.029.097**	**4.750.514**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(2.288.278.583)**	**(2.293.029.097)**	**(4.750.514)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.79 KECAMATAN PAGAI SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
											Air dan Listrik					
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	4.800.000	4.800.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	4.800.000	4.800.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	4.800.000	4.800.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	4.800.000	4.800.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.916.000	164.916.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	164.916.000	164.916.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	164.916.000	164.916.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	164.916.000	164.916.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	164.916.000	164.916.000	0		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**37.930.000**	**37.930.000**	**0**		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.250.000	32.250.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	32.250.000	32.250.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	32.250.000	32.250.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	12.250.000	12.250.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.250.000	12.250.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	20.000.000	20.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000	20.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	5.680.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	5.680.000	5.680.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.680.000	5.680.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	5.680.000	5.680.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.680.000	5.680.000	0		
											Jumlah Belanja	**2.219.453.111**	**2.224.341.718**	**4.888.607**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(2.219.453.111)**	**(2.224.341.718)**	**(4.888.607)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jogaguran Simanjuntak

Lampiran XIII :
Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
FORMULIR KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH
MENGANGGARKAN BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL BERUPA
PRODUK DALAM NEGERI (PDN), TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING	AKUN	ANGGARAN	TKDN	NILAI TKDN
5.1.02.01	Belanja Barang	69,187,075,579	**95%**	65,727,721,800.05
5.1.02.02	Belanja Jasa	141,762,493,030	**100%**	141,762,493,030.00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2,238,817,400	**100%**	2,238,817,400.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	27,000,000	**65%**	17,550,000.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	199,500,000	**50%**	99,750,000.00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	141,209,700	**60%**	84,725,820.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2,530,861,777	**50%**	1,265,430,888.50
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1,440,314,863	**30%**	432,094,458.90
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3,442,266,580	**30%**	1,032,679,974.00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7,589,880,000	**30%**	2,276,964,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	86,646,642,883	**100%**	86,646,642,883.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	121,747,671,681	**100%**	121,747,671,681.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	11,440,133,553	**100%**	11,440,133,553.00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	7,766,750,000	**100%**	7,766,750,000.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	15,633,890,000	**100%**	15,633,890,000.00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200,000,000	**85%**	170,000,000.00
		471,994,507,046	**75%**	**458,343,315,488.45**
TOTAL BELANJA BARANG, JASA DAN MODAL		**435,241,518,576**		
PERSENTASE TKDN		**105.31%**		

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Anggaran Simanjuntak

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	DANA BOS REGULER 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
26	SMP NEGERI 1 SIPORA	Sipora Selatan	256	355,840,000.00	
27	SMP NEGERI 2 SIPORA SELATAN	Sipora Selatan	128	177,920,000.00	-
28	SMP NEGERI 3 SIPORA SELATAN	Sipora Selatan	54	75,060,000.00	-
29	SMP NEGERI 1 SIPORA UTARA	Sipora Utara	84	116,760,000.00	-
30	SMP NEGERI 2 SIPORA	Sipora Utara	412	572,680,000.00	-
31	SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH MENTAWAI	Sipora Utara	24	33,360,000.00	
32	SMP KRISTEN CAHAYA BANGSA TUAPEJAT	Sipora Utara	41	56,990,000.00	-
33	SMP SANTO PETRUS TUAPEJAT	Sipora Utara	67	93,130,000.00	-
		Jumlah Total SMP	**5341**	**7,423,990,000.00**	-
		JUMLAH TOTAL SD DAN SMP	**17811**	**22,013,870,000.00**	-

Plt. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Tonegguran Simanjuntak

Lampiran XI Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor 07 Tahun 2023
Tanggal . 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA KAPITASI PER FKTP
TAHUN ANGGARAN 2023

REKENING					PUSKESMAS	KAPITASI / JASA PELAYANAN	JASA OPERASIONAL 30-40%	TOTAL
1					2	3	4	5=3+4
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN	459,000,000.00	306,000,000.00	765,000,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SIGAPOKNA	40,244,400.00	17,247,600.00	57,492,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS BETAET	299,880,000.00	128,520,000.00	428,400,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SIMATALU	18,421,200.00	7,894,800.00	26,316,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS PEIPEI	408,979,200.00	175,276,800.00	584,256,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SAREREIKET	103,908,000.00	44,532,000.00	148,440,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SIBERUT	394,272,000.00	262,848,000.00	657,120,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP	486,444,000.00	208,476,000.00	694,920,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS MAPADEGAT	668,292,998.00	445,528,665.00	1,113,821,663.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SIOBAN	550,008,000.00	366,672,000.00	916,680,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS BOSUA	117,062,400.00	50,169,600.00	167,232,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SAUMANGANYA	315,840,000.00	135,360,000.00	451,200,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SIKAKAP	613,656,000.00	409,104,000.00	1,022,760,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS MALAKOPA	356,916,000.00	152,964,000.00	509,880,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS BULASAT	192,108,000.00	82,332,000.00	274,440,000.00
					JUMLAH TOTAL	**5,025,032,198.00**	**2,792,925,465.00**	**7,817,957,663.00**

Plt. Bupati Kepulauan Mentawai

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sumber Dana	OPD	Program	Kegiatan	Rincian
1	2	3	4	5
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	162.905.687
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	648.728.100
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	584.257.300
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	693.933.561
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	766.649.689
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	420.649.340
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.023.076.000
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	509.877.899
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	274.375.933
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	148.331.000
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.316.100
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	118.414.400
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	418.551.150

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Lampiran IX : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi

Kode Rekening										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1										2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										NIHIL		

P. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggutan Simanjuntak

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/ TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi

Kode Rekening										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1										2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										NIHIL		

Plt. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran VII : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi

Kode Rekening										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1										2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										NIHIL		

Plt. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran VI : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH				
	5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				
	Tuapejat	Kelurahan/Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara	606.636.276	606.636.276	0
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan		**606.636.276**	**606.636.276**	**0**
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD		**606.636.276**	**606.636.276**	**0**
	Jumlah Total		**606.636.276**	**606.636.276**	**0**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Tonggoran Simanjuntak

Lampiran V : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH				
	5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				
	Tuapejat	Kelurahan/Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara	500.000.000	500.000.000	0
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		**500.000.000**	**500.000.000**	**0**
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		**500.000.000**	**500.000.000**	**0**
	Jumlah Total		**500.000.000**	**500.000.000**	**0**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Benjamin Jonggoran Simanjuntak

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan					
		[?]	Penyediaan Permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar Spesifikasi : Permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar	175.000.000	175.000.000	0
		[?]	Penyediaan Permakanan bagi Lansia terlantar Spesifikasi : Permakanan bagi Lansia terlantar	346.750.000	346.750.000	0
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			**521.750.000**	**521.750.000**	**0**
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			**521.750.000**	**521.750.000**	**0**
	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH					
	4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					
	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai Yang Membutuhkan DKK	[?]	Belanja Meteran Listrik Spesifikasi : 450 watt	982.500.000	1.282.500.000	300.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			**982.500.000**	**1.282.500.000**	**300.000.000**
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			**982.500.000**	**1.282.500.000**	**300.000.000**
	Jumlah Total			**1.504.250.000**	**1.804.250.000**	**300.000.000**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	TK KASIH IBU	JL. RAYA TUAPEJAT KM. 6	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Spesifikasi : Pembangunan Areal Bermain Beserta APE luar ruangan TK Kasih Ibu Sipora Utara	155.760.000	155.760.000	0
	TK KASIH IBU	JL. RAYA TUAPEJAT KM. 6	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi : Perencanaa Pembangunan Areal Bermain Beserta PE Luar TK Kasih Ibu Sipora Utara	8.242.300	8.242.300	0
	TK KASIH IBU	JL. RAYA TUAPEJAT KM. 6	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan Areal Bermain beserta APE Luar TK Kasih Ibu SIpora Utara	8.242.300	8.242.300	0
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			**590.460.200**	**590.460.200**	**0**
	Jumlah Hibah Pada SKPD			**2.790.983.720**	**2.790.983.720**	**0**
	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	[#] Belanja Hibah Barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan					
	Kendaraan Operasi Kantor/Lapangan	Tuapejat	Kendaraan Operasi Kantor / Lapangan Spesifikasi : Roda 4	0	522.500.000	522.500.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			**0**	**522.500.000**	**522.500.000**
	Jumlah Hibah Pada SKPD			**0**	**522.500.000**	**522.500.000**
	Jumlah Total			**2.790.983.720**	**3.313.483.720**	**522.500.000**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000	24.000.000	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.472.000	99.372.000	3.900.000		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	95.472.000	99.372.000	3.900.000		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	95.472.000	99.372.000	3.900.000		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	95.472.000	99.372.000	3.900.000		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	95.472.000	99.372.000	3.900.000		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.122.400**	**25.122.400**	**0**		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.002.400	20.002.400	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1	BELANJA OPERASI	20.002.400	20.002.400	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.002.400	20.002.400	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 01	Belanja Barang	18.002.400	18.002.400	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.002.400	18.002.400	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000	2.000.000	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000	2.000.000	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.120.000	5.120.000	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.120.000	5.120.000	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000	5.120.000	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.120.000	5.120.000	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.120.000	5.120.000	0		
Jumlah Belanja		**4.787.208.404**	**4.791.066.313**	**3.857.909**		
Total Surplus/(Defisit)		**(4.787.208.404)**	**(4.791.066.313)**	**(3.857.909)**		
0 00 8.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Longguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.77 KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7 01 7.01.0.00.0.00.77.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000	500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.77.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000	500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.77.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.440.000	2.440.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.77.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.440.000	2.440.000	0		
Jumlah Belanja		**3.249.397.722**	**3.224.406.713**	**(24.991.009)**		
Total Surplus/(Defisit)		**(3.249.397.722)**	**(3.224.406.713)**	**24.991.009**		
0 00 7.01.0.00.0.00.77.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.80 KECAMATAN SIKAKAP

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.240.000	75.240.000	0		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**116.136.000**	**116.136.000**	**0**		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	30.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	30.000.000	30.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	30.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	30.000.000	30.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	30.000.000	30.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.136.000	86.136.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	86.136.000	86.136.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	86.136.000	86.136.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	86.136.000	86.136.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	86.136.000	86.136.000	0		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	10.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	10.000.000	10.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000	0		
											Jumlah Belanja	**3.145.126.982**	**3.097.908.563**	**(47.218.419)**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(3.145.126.982)**	**(3.097.908.563)**	**47.218.419**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggouran Simanjuntak

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang :

a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023-2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Mentawai sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Kepulauan Mentawai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 4 (empat) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026.
(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan.
BAB II	:	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.
BAB III	:	Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah.
BAB IV	:	Tujuan dan Saran.
BAB V	:	Strategi dan Arah Kebijakan.
BAB VI	:	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
BAB VII	:	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	:	Penutup.

(2) Matrik Rencana, Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Renstra Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022 NOMOR : 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN
2023-2026

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Keuangan Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Perikanan
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
19. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
20. Dinas Kearsipan dan Kepustakaan
21. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
22. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23. Dinas Komunikasi dan Informatika
24. Rumah Sakit Umum Daerah
25. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
26. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
27. Kecamatan Sipora Utara
28. Kecamatan Sipora Selatan
29. Kecamatan Pagai Utara
30. Kecamatan Pagai Selatan
31. Kecamatan Sikakap
32. Kecamatan Siberut Utara
33. Kecamatan Siberut Selatan
34. Kecamatan Siberut Tengah
35. Kecamatan Siberut Barat
36. Kecamatan Siberut Barat Daya

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

YUDAS SABAGGALET

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan diluar ketentuan yang diatur didalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pedoman penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2023 pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu ditetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bershiftat umum maupun yang bershiftat khusus.
6. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Indeks biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Indeks biaya keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
10. Rencana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
20. Tambahan Penghasilan Pegawai Yang selanjutnya disingkat TPP adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok, honorarium dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA Tahun Anggaran 2023 serta pedoman untuk melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Satuan Biaya Honorarium;

b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas;

c. Satuan Harga Penyelenggaraan Rapat;

d. Satuan Biaya Khusus; dan

e. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pakaian Dinas.

Pasal 3

(1) Satuan Biaya Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. honorarium pengelola dan penanggung jawab keuangan pada Perangkat Daerah;

b. honorarium pengadaan barang/jasa;

c. honorarium perangkat Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

d. honorarium narasumber/ pembahas/ moderator/ pembawa acara/panitia;

e. honorarium narasumber/ pembahas/ moderator/ pembawa acara profesional;

f. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;

g. honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli dan beracara;

h. honorarium tenaga administrasi/penyuluh/tenaga kontrak Non Pegawai Negeri Sipil;

i. honorarium rohaniwan;

j. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola *website;*

k. honorarium penyelenggara ujian;

l. honorarium penulisan butir soal tingkat daerah;

m. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat);

n. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

o. honorarium tim penyusun rancangan Peraturan Daerah;

p. honorarium tim penyusun rancangan Peraturan Bupati;

q. satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi ASN; dan

r. vakasi, uang lembur, dan insentif bagi Non ASN.

(2) Satuan Biaya Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

b. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri.

(2) Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Satuan Harga Penyelenggaraan Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor

b. satuan biaya konsumsi rapat, tamu, peserta pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, kegiatan perlombaan, dan kegiatan sejenis lainnya; dan

c. belanja jasa akomodasi dan transportasi narasumber/tenaga ahli/peserta.

(2) Satuan Biaya Penyelenggaraan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari satuan biaya khusus pada Perangkat

Daerah:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

e. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

f. Dinas Perhubungan;

g. Sekretariat Daerah;

h. Sekretariat DPRD;

i. Dinas Perikanan;

j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

k. Inspektorat;

l. Badan Keuangan Daerah;

m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

n. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

p. Kecamatan;

q. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

r. Dinas Komunikasi dan Informatika;

s. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

u. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

v. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan

x. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

(2) Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Satuan Biaya Pemeliharaan dan pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri dari:

a. satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri;

b. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas;

c. satuan biaya pemeliharaan sarana kantor; dan

d. satuan biaya pengadaan pakaian dinas.

(2) Satuan Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 15 Juli 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 15 Juli 2022

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

RINALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN BIAYA HONORARIUM

A. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1. Honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan pada Perangkat Daerah

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Satuan	BESARAN HONORARIUM (Rp)					
			PPKD	PA/KPA	PPTK	Pejabat Penata usahaan Keuangan Perangkat Daerah	Bendahara Penge luaran/ Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Penerimaan Pembantu
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	1.040.000	450.000	300.000	400.000	300.000	200.000
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000	500.000	350.000	450.000	350.000	250.000
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	1.450.000	600.000	400.000	500.000	400.000	300.000
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	1.660.000	700.000	450.000	600.000	450.000	350.000
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	1.970.000	800.000	500.000	700.000	500.000	400.000
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	2.280.000	1.000.000	600.000	900.000	600.000	500.000
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	2.590.000	1.200.000	700.000	1.000.000	700.000	600.000
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	3.010.000	1.500.000	800.000	1.250.000	800.000	700.000
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	3.420.000	1.700.000	900.000	1.400.000	900.000	800.000
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	3.840.000	1.900.000	1.000.000	1.550.000	1.000.000	900.000
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	4.250.000	2.200.000	1.100.000	1.700.000	1.100.000	1.000.000
12.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	4.770.000	2.500.000	1.200.000	2.000.000	1.200.000	1.100.000
13.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	5.290.000	3.000.000	2.000.000	2.500.000	2.250.000	1.750.000

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Satuan	BESARAN HONORARIUM (Rp)					
			PPKD	PA/KPA	PPTK	Pejabat Penata usahaan Keuangan Perangkat Daerah	Bendahara Penge luaran/ Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Penerimaan Pembantu
14.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	5.810.000	3.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
15.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	6.330.000	4.000.000	3.000.000	3.500.000	2.750.000	2.250.000
16.	Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	7.370.000	5.000.000	3.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000

Keterangan :

a. Dalam hal kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran tidak melimpahkan kegiatan/sub kegiatan kepada Kepala Unit Kerja selaku KPA, dapat diberikan honorarium sebesar honorarium KPA berdasarkan nilai pagu kegiatan/sub kegiatan yang tidak dilimpahkan.
b. Kepada PA/KPA/PPTK yang mengelola lebih dari 1 (satu) kegiatan/sub kegiatan dapat diberikan honorarium berdasarkan akumulasi jumlah pagu anggaran yang dikelolanya;
c. Bendahara pengeluaran pembantu/penerimaan pembantu dapat lebih dari 1 orang dengan memperhatikan besaran anggaran yang dikelola atau lokasi unit kerja di luar tempat kedudukan Perangkat Daerah induk;
d. Pembuat daftar gaji ASN dikelompokan ke dalam bendahara pengeluaran pembantu;
e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan dan Penatausahaan Pengelolaan Anggaran Kas Keuangan Daerah

No	Uraian	Sat	Biaya Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	15.000.000	Dapat dibayarkan apabila belum diakomodir dalam penghitungan pemberian TPP ASN

3. Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah

a. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Satuan	
1	Pemegang Kekuasaan Barang	15.000.000	OB	Dapat dibayarkan apabila belum diakomodir dalam perhitungan pemberian TPP ASN

b. Penatausahaan Pengguna Barang Perangkat Daerah

No	Nilai Aset yang Dikelola	Satuan	Besaran (Rp)		Ket
			Pengurus Barang Pengguna	Pengurus Barang Pembantu	
1.	Nilai Aset 100 juta s.d. 250 juta	OB	800.000	200.000	Dapat dibayarkan apabila belum diakomodir dalam penghitungan pemberian TPP ASN
2.	Nilai Aset di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	900.000	350.000	
3.	Nilai Aset di atas 500 juta s.d. 1 milyar	OB	1.100.000	450.000	
4.	Nilai Aset di atas 1 milyar s.d. 5 milyar	OB	1.400.000	550.000	
5.	Nilai Aset di atas 5 milyar s.d. 10 milyar	OB	1.500.000	650.000	
6.	Nilai Aset di atas 10 milyar s.d. 50 milyar	OB	1.600.000	750.000	
7.	Nilai Aset di atas 50 milyar s.d. 100 milyar	OB	1.700.000	850.000	
8.	Nilai Aset di atas 100 milyar	OB	2.000.000	950.000	

B. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

   Pejabat Pengadaan Barang/Jasa = Rp.680.000/OB

2. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa

   a. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) dan Pengadaan Barang (Non Konstruksi)

No.	Nilai Pagu Yang Dikelola	Satuan	Besaran Honorarium (Rp)	
			Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan Barang Non Konstruksi)
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp.200 juta	OP	680.000	760.000
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	850.000	760.000
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	1.020.000	920.000
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OP	1.270.000	1.140.000
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.2,5 m s.d. Rp.5 miliar	OP	1.520.000	1.370.000
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OP	1.780.000	1.600.000

7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OP	2.120.000	1.910.000
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OP	2.450.000	2.210.000
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OP	2.790.000	2.520.000
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	3.130.000	2.820.000
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	3.580.000	3.230.000
12.	Di atas Rp.250 miliar	OP	4.030.000	3.640.000

b. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)

No.	Nilai Pagu Yang Dikelola	Satuan	Besaran Honorarium
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OP	450.000
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OP	480.000
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OP	600.000
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	720.000
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OP	910.000
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OP	1.090.000
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OP	1.270.000
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OP	1.510.000
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OP	1.750.000
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OP	1.990.000
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	2.230.000
12.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OP	2.560.000
13.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.250 miliar	OP	2.880.000

Keterangan:

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Pengguna Anggaran (PA)

a. PA Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

No.	Nilai Pagu Yang Dikelola	Satuan	Besaran Honorarium)
1.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	3.580.000
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	4.030.000
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	4.490.000
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OP	4.940.000
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.1 triliun	OP	5.560.000

b. PA Pengadaan Barang (Non Konstruksi)

No.	Nilai Pagu Yang Dikelola	Satuan	Besaran Honorarium
1.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	3.640.000
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	4.040.000
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OP	4.450.000
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.1 triliun	OP	5.010.000

c. PA Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)

No.	Nilai Pagu Yang Dikelola	Satuan	Besaran Honorarium
1.	Nilai pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1.510.000
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OP	1.750.000
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OP	1.990.000
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	2.230.000
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	2.560.000
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.250 miliar	OP	2.880.000

Keterangan:
Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa diberikan dalam hal :

a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

No.	Nilai Pagu Pekerjaan	Satuan	Besaran (Rp)	
			Non Konstruksi	Konstruksi
1.	kurang dari Rp.200 juta	OB	400.000	500.000
2.	Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	OB	450.000	550.000
3.	Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 m	OB	500.000	600.000
4.	Di atas Rp.1 m s.d. Rp.2,5 m	OB	550.000	700.000
5.	Di atas Rp.2,5 m s.d. Rp.5 m	OB	600.000	750.000
6.	Di atas Rp.5 m s.d. Rp.10 m	OB	650.000	850.000
7.	Di atas Rp.10 m s.d. Rp.25 m	OB	700.000	900.000
8.	Di atas Rp.25 m s.d. Rp.50 m	OB	750.000	1.100.000
9.	Di atas Rp.50 m s.d. Rp.75 m	OB	950.000	1.200.000
10.	Di atas Rp.75 m s.d. Rp.100 m	OB	1.050.000	1.300.000
11.	Di atas Rp.100 m s.d. Rp.250 m	OB	1.150.000	1.400.000
12.	Di atas Rp.250 m s.d. Rp.500 m	OB	1.300.000	1.500.000
13.	Di atas Rp.500 m s.d. Rp.750 m	OB	1.400.000	1.600.000

Keterangan:

a. PA/KPA yang sekaligus ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen hanya dapat diberikan salah satu jenis honorarium, yakni honorarium PA/KPA atau honorarium PPK;

b. Pemberian Honorarium PPK terhitung mulai 1 (satu) bulan sebelum penandatanganan kontrak atau SPK sampai dengan berakhirnya kontrak/SPK (tidak termasuk jangka waktu pemberian kesempatan kerja akibat kelalaian pihak penyedia).

5. Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola

a. Tim Perencana/Pengawas Swakelola Pengadaan Barang/jasa

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Ketua	500.000	OB
2.	Sekretaris	450.000	OB
3.	Anggota	400.000	OB

Keterangan :

- Honorarium diberikan per paket perencanaan atau pengawasan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola.
- maksimal 5 orang untuk tim perencana.
- maksimal 3 orang untuk tim pengawas.
- Honorarium diberikan untuk paling lama 2 bulan untuk tim perencana.
- Honorarium diberikan selama masa kontrak untuk tim pengawas
- Ditetapkan dengan Keputusan PA.

b. Tim Pelaksana Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lainnya

1) Tenaga Ahli/Peneliti Perseorangan dalam rangka pengkajian/penelitian

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Bersertifikat		
	a. Ahli Muda	8.000.000	OP

	b. Ahli Madya	9.000.000	OP
	c. Ahli Utama	10.500.000	OP
	d. Ahli Kepala	12.000.000	OP
2.	Non sertifikat (minimal S-1)		
	a. Pengalaman 3 – 5 Tahun	6.000.000	OP
	b. Pengalaman diatas 5 – 10 Tahun	7.500.000	OP
	c. Pengalaman diatas 10 tahun	9.000.000	OP
3.	Peneliti Perorangan		
	a. Peneliti Muda	25.000.000	OP
	b. Peneliti Madya	30.000.000	OP
	c. Peneliti Utama	35.500.000	OP
	d. Peneliti Kepala	40.000.000	OP

2) Honorarium Tim Penunjang Pelaksana Kegiatan Penelitian/Pengkajian

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Pengolah Data	Per penelitian/kajian	2.000.000	
2.	Petugas Survei	Orang/Responden	5.000	
3.	Pembantu Lapangan			
	a. PNS	OH	75.000	
	b. Non PNS/Tenaga Kontrak	OH	50.000	

Keterangan :

a. Honorarium diberikan per paket pekerjaan pengkajian/penelitian secara swakelola;
b. Jumlah tenaga ahli per pelaksanaan kajian/penelitian maksimal 5 orang;
c. Peneliti perorangan dapat dibantu oleh tim penunjang penelitian maksimal 3 orang;
d. Jumlah tim penunjang pelaksana kegiatan maksimal 5 orang;
e. Ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dan pimpinan instansi pemerintah lainnya.

c. Tim Pelaksana Swakelola oleh Masyarakat

a) Pengurus Kelompok

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Ketua	750.000	OB
2.	Sekretaris	700.000	OB
3.	Bendahara	650.000	OB

Keterangan :

a. Pengurus kelompok bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan;
b. Tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sekaligus menjadi anggota kelompok dan diberi imbalan sesuai standar satuan harga pemerintah daerah;
c. Pengurus kelompok tidak dapat menjadi tenaga kerja dan untuk itu tidak diberi upah tenaga kerja;

d. Pengurus diberi honorarium selama masa kontrak yang ditandatangan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok.

b) Tim Teknis Pendamping Pekerjaan Swakelola

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Ketua	750.000	OP
2.	Sekretaris	700.000	OP
3.	Anggota	650.000	OP
Keterangan: a. Honorarium diberikan per paket untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat; b. Tim berasal dari PNS dan ditetapkan dengan Keputusan PA; c. Jumlah personil maksimal 3 orang; d. Ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA.			

6. Honorarium Pengawas Lapangan

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu s/d 50 juta	600.000	OB
2.	Nilai pagu Rp. 50 juta sd 100 juta	650.000	OB
3.	Nilai pagu Rp. 100 juta sd 250 juta	700.000	OB
4.	Nilai pagu Rp. 250 juta sd 500 juta	750.000	OB
5.	Nilai pagu Rp.500 juta sd 1 m	900.000	OB
6.	Nilai pagu Rp.1 m s/d 2,5 m	950.000	OB
7.	Nilai pagu Rp.2,5 miliar s/d 5 miliar	1.000.000	OB
8.	Nilai pagu Rp.5 miliar s/d 10 miliar	1.050.000	OB
9.	Nilai pagu Rp.10 m s/d 50 m	1.200.000	OB
10.	Nilai pagu Rp.50 m s/d 100 m	1.300.000	OB
11.	Nilai pagu di atas Rp.100 m	1.400.000	OB
Cat : Honorarium pengawasan diberikan selama waktu pengerjaan dan sesuai pagu dana pengadaan.			

7. Honorarium Tim Pengadaan Tanah Milik Pemerintah atau untuk investasi

a. Tim Persiapan Pengadaan Tanah

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Tim persiapan pengadaan tanah s.d 5 ha	OP		
	a. Penanggung Jawab	OP	1.000.000	
	b. Ketua	OP	800.000	
	c. Sekretaris	OP	700.000	
	d. Anggota	OP	500.000	Max. 3 org
	Cat. - Tim pengadaan tanah pada tingkat Perangkat Daerah yang diadakan langsung oleh Perangkat Daerah bersangkutan; - Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah			

2.	Tim persiapan pengadaan tanah diatas 5 ha s.d 20 ha (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)			
	a. Penanggung Jawab	OP	1.200.000	
	b. Ketua	OP	1.100.000	
	c. Wakil Ketua	OP	1.000.000	
	d. Sekretaris	OP	900.000	
	e. Wakil Sekretaris	OP	800.000	
	f. Anggota	OP	700.000	
3.	Tim persiapan pengadaan tanah diatas 20 ha s.d 50 ha (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)			
	a. Penanggung Jawab	OP	1.800.000	
	b. Ketua	OP	1.500.000	
	c. Wakil Ketua	OP	1.400.000	
	d. Sekretaris	OP	1.300.000	
	e. Wakil Sekretaris	OP	1.200.000	
	f. Anggota	OP	1.100.000	
4.	Tim persiapan pengadaan tanah diatas 50 ha (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)			
	a. Penanggung Jawab	OP	2.775.000	
	b. Ketua	OP	2.175.000	
	c. Wakil Ketua	OP	1.800.000	
	d. Sekretaris	OP	1.600.000	
	e. Wakil Sekretaris	OP	1.400.000	
	f. Anggota	OP	1.300.000	

b. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Proses Pengadaan Tanah

No	Nilai Pengadaan Tanah	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Sd Rp.10 m	Tanah	300.000.000	
2	Rp.10 miliar s.d. 15 m	Tanah	337.500.000	
3	Rp.15 miliar s.d. 30 m	Tanah	637.500.000	
4	Rp.30 miliar s.d. 55 m	Tanah	825.000.000	
5	Rp.55 miliar s.d. 105 m	Tanah	1.012.500.000	
6	Di atas Rp.105 m	Tanah	1.200.000.000	

c. Tim penyelesaian konflik pertanahan atau pengurusan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Ket
a	Penyelesaian konflik pertanahan milih pemerintah daerah			
	- Pengarah	Orang/konflik	2.000.000	

	- Wakil Pengarah	Orang/konflik	1.750.000	
	- Penanggung jawab	Orang/konflik	1.600.000	
	- Ketua	Orang/konflik	1.500.000	
	- Sekretaris	Orang/konflik	1.350.000	
	- Anggota	Orang/konflik	1.000.000	
	- Sekretariat	Orang/konflik	800.000	
b	Penyelesaian sertifikat tanah milik pemerintah daerah			
	- Penanggung jawab	Orang/sertifikat	200.000	
	- Wakil Penanggung jawab	Orang/sertifikat	180.000	
	- Ketua	Orang/sertifikat	170.000	
	- Sekretaris	Orang/sertifikat	160.000	
	- Anggota	Orang/sertifikat	150.000	
	- Sekretariat	Orang/sertifikat	125.000	

C. HONORARIUM PERANGKAT UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Ket
Perangkat Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			
- Kepala	OB	1.000.000	
- Sekretaris	OB	750.000	
- Staf Pendukung	OB	750.000	

Keterangan : Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan delam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

D. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA

Jabatan	Satuan	Besaran Honorarium (Rp)
1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
a. Narasumber		
1. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	OJ	1.700.000
2. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	OJ	1.400.000
3. Pejabat Eselon I	OJ	1.200.000
4. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
5. Pejabat eselon III/yang disetarakan	OJ	900.000
6. Pejabat eselon IV ke bawah/yang disetarakan	OJ	500.000

b. Pembahas dokumen kajian/naskah/produk hukum		
1. Bupati/Wakil Bupati	OR	500.000
2. Setara pejabat eselon II	OR	300.000
3. Setara pejabat eselon III	OR	250.000
4. Setara pejabat eselon IV	OR	100.000
2. Honorarium Moderator	OK	400.000
3. Honorarium Pembawa Acara	OK	250.000
4. Honorarium Panitia		
a. Penanggung jawab	OK	450.000
b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
c. Sekretaris	OK	300.000
d. Anggota	OK	300.000

Keterangan:

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. satuan orang/jam (OJ) yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

b. satuan orang/rapat (OR) yang digunakan dalam memberikan honorarium pembahas adalah penyelenggaraan rapat paling kurang 4 (empat) jam atau lebih.

c. narasumber berasal dari:

   1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

   2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

d. dalam hal narasumber tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar honorarium narasumber.

e. honorarium Pembahas diberikan kepada tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati dalam rangka pelaksanaan pembahasan dokumen perencanaan/pelaksanaan/evaluasi penyelenggaraa pemerintahan guna menghasilkan dokumen kajian atau rancangan produk hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

f. honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

g. dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

h. untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

E. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi dan kegiatan sejenisnya.

Jabatan	Satuan	Besaran Honorarium (Rp)
1. Honorarium Narasumber/ Pembahas	OJ	1.700.000
2. Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3. Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Keterangan :
Pemberian honorarium dapat melebihi besaran sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill.

F. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

No	Jabatan	Satuan	Dengan Kep. Bupati	Dengan Kep. Sekretaris Daerah
1.	Pengarah/Wakil Pengarah	OB	1.500.000	750.000
2.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000	700.000
3.	Ketua	OB	1.000.000	650.000
4.	Wakil Ketua	OB	850.000	600.000
5.	Sekretaris	OB	750.000	500.000
6.	Anggota	OB	750.000	500.000
7.	Ketua Sekretariat Tim	OB	600.000	250.000
8.	Anggota	OB	500.000	220.000

Keterangan:
1. Dalam hal kepada Tim diberikan honorarium Pembahas, tidak dibayarkan honorarium tim kecuali untuk ketua sekretariat dan anggota sekretariat;
2. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon II	2	3	4

2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV ke bawah	5	6	7

a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

3. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.
4. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
   a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
   b. bershiftat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
      1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
      2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
5. bershiftat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
6. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
7. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
8. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
   a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
   b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

G. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
2.	Honorarium Beracara		
	a. Ketua Tim	OK	900.000
	b. Anggota	OK	700.000
	c. Sekretariat	OK	500.000

Keterangan:

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

H. HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI/PENYULUH/TENAGA KONTRAK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

a. Tenaga Pendidikan Non ASN

1) Guru Pada Satuan Pendidikan Dasar/Menengah

No	Uraian	Satuan	Dasar Honorarium
1	Pendidikan D2-D3	OB	1.932.000
2	Pendidikan D4-S1	OB	2.221.500
3	Pendidikan S2	OB	2.500.000
4	Pendidikan S3	OB	2.750.000

2) Dosen pada perguruan tinggi kerja sama Pemerintah Daerah

No	Pendidikan	Gaji Pokok (OB)	Tunjangan Perumahan (OB)	Tunjangan Transportasi (OB)
1	Pendidikan S-2/S-3 (Linier)	4.000.000	500.000	500.000
2	Pendidikan S-1/D-IV	2.750.000	-	-
3	Dosen/Teknisi D-3	1.836.000	-	-
4	Dosen/Teknisi D-2	1.739.000	-	-

b. Tenaga Kesehatan Non ASN

1) Pada RSUD/RS Pratama

No	Uraian	Satuan	Honorarium
1.	Dokter spesialis		
	a) Kebidanan	OB	24.291.000
	b) Penyakit Dalam	OB	24.291.000
	c) Bedah	OB	24.291.000
	d) Anak	OB	24.291.000
	e) Anastesi	OB	20.000.000
	f) Radiologi dan patologi klinik	OB	15.000.000
2.	Dokter umum/dokter gigi	OB	7.500.000
3.	Penata Anastesi	OB	7.000.000
4.	D3 Kesehatan lainnya	OB	1.650.000
5.	D4-S1 Kesehatan	OB	1.750.000
6.	D3 Analis/labor	OB	2.000.000
7.	D4-S1 Analis/Labor	OB	2.200.000
8.	S1 Profesi (Ners, Apoteker)	OB	2.000.000
9.	SMK Kesehatan	OB	1.400.000

2) Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringannya (Puskesmas Pembantu/Pustu, Pos Kesehatan Desa/Pokesdes, Pondok Bersalin Desa/Polindes, dan lain-lain)

No	Uraian	Lokasi	Tingkat Kesulitan Lokasi			
			Terpencil (OB)	Sangat Terpencil (OB)	Tidak Diminati (OB)	Sangat Tidak Diminati (OB)
1)	SMK Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya	1.400.000	1.500.000	-	-
2)	D III Kesehatan	Puskesmas	1.650.000	1.750.000	-	-
		Desa (Pustu, Poskesdes, Polindes, dll)	1.750.000	2.200.000	2.500.000	3.000.000
3)	D IV/S1 Kesehatan	Puskesmas	1.750.000	2.000.000	-	-
		Desa (Pustu, Poskesdes, Polindes, dll)	2.000.000	2.350.000	2.750.000	3.250.000
4)	D III Analis/ Labor	Puskesmas	2.000.000	2.400.000	-	-
5)	D IV/S1 Analis/ Labor	Puskesmas	2.200.000	2.600.000	-	-
6)	S 1 Provesi (Ners, Apoteker)	Puskesmas	1.800.000	2.000.000	-	-
		Desa (Pustu, Poskesdes, Polindes, dll)	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000
7)	Dokter Umum/ Dokter Gigi	Puskesmas	8.500.000	10.500.000	-	-

Cat. :
- Tingkat kesulitan lokasi ditentukan berdasarkan kondisi geografis tempat bertugas antara lain ketersediaan/akses sarana transportasi menuju ke lokasi.
- Tingkat kesulitan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan.

3) Pada Pusat Kesehatan Hewan dan jaringannya

No	Uraian	Satuan	Dasar Honorarium
1	Dokter hewan	OB	4.850.000

c. Tenaga Non ASN/Penyuluh Non ASN Lainnya

No	Uraian	Satuan	Dasar Honorarium
1.	Tamatan SLTA sederajat s.d D1	OB	1.256.000
2.	Tamatan D2 s.d D3	OB	1.500.000

3.	Tamatan D4 s.d S1	OB	1.650.000
4.	Tamatan S2	OB	1.850.000
5.	Tamatan S3	OB	2.000.000
6.	Tenaga kebersihan/ keamanan/ sopir/ operator boat/ Anak Buah Kapal/ pramusaji/ pemadam kebakaran/ Bantuan polisi Pamong Praja	OB	1.300.000

Keterangan:

a. honorarium penyuluh diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan perjanjian kerja;

b. kepada penyuluh non ASN atau tenaga kontrak daerah dapat diberikan biaya asuransi kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Premi Asuransi Kesehatan sebesar 5% x gaji pokok dengan ketentuan 3% ditanggung oleh yang bersangkutan dan 2% ditanggung oleh APBD;
   2) Jaminan ketenagakerjaan:
      a) Program Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dari gaji pokok;
      b) Program kematian sebesar 0,3% dari gaji pokok.

I. HONORARIUM ROHANIWAN

1. Honorarium Rohaniwan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pengambilan sumpah jabatan	OK	400.000
2.	Ceramah/khotbah pada kegiatan Pemerintah Daerah	OK	400.000

Keterangan :

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pengkhotbah atau penceramah pada kegiatan keagamaan.

2. Honorarium Petugas Kerohanian

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas kegiatan kerohanian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	OK	250.000

Honorarium petugas kerohanian diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai petugas kegiatan kerohanian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

J. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE

No.	Uraian	Satuan	Besaran Honorarium (Rp)
1.	Tim penyusun jurnal		
	a. Penanggung jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000

	c. Penyunting/editor	Oter	300.000
	d. Desain grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. pembuat artikel	Per halaman	200.000
2.	Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/editor	Oter	250.000
	d. Desain grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. pembuat artikel	Per halaman	100.000
3.	Tim pengelola Teknologi Informasi/ *Web site*		
	a. Penanggung jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per halaman	100.000
4	Tim pengelola jaringan internet daerah		
	a. Penanggung jawab/koordinator	OB	500.000
	b. Teknisi ASN/Non ASN	OH	75.000

Keterangan:

a. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* dan pengelola jaringan internet daerah sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud;

b. Honorarium kepada teknisi Non ASN diberikan berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Perangkat Daerah.

K. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000

	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ mata ujian	5.000

L. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Besaran Honorarium (Rp)
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per butir soal	100.000
2.	Honorarium Telaahan Butir Soal		
	a. Telaahan materi soal	Per butir soal	45.000
	b. Telaahan bahasa soal	Per butir soal	20.000

M. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

No.	Uraian	Satuan	Dasar Honorarium (Rp)
1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
2.	Honorarium Pengajar dari luar Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300.000
3.	Honorarium Pengajar dari dalam Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000
4.	Honorarium penyusun modul Diklat	Per modul	5.000.000
5.	Honorarium penyelenggara Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	450.000
	2) Ketua/wakil ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	675.000
	2) Ketua/wakil ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	900.000
	2) Ketua/wakil ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000

Keterangan:
Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

N. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

No.	Uraian	Satuan	Dasar Honorarium
1.	Honorarium Tim TAPD		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
2.	Honorarium Sekretariat TAPD		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

Keterangan:
a. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
b. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

O. HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Dasar Honorarium
1.	Pembina	OB	2.500.000
2.	Pengarah	OB	2.000.000
3.	Ketua	OB	1.750.000
4.	Wakil Ketua	OB	1.600.000
5.	Sekretaris	OB	1.500.000
6.	Anggota	OB	1.000.000
7.	Anggota Sekretariat	OB	750.000
8.	Tenaga Ahli	OB	5.000.000

Keterangan:

a. Honorarium tim penyusun Rancangan Perda dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah.
b. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 4 (empat) orang;
c. Tenaga ahli paling banyak 3 orang;
d. Honorarium tim diberikan paling lama 3 bulan.

P. HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

No.	Uraian	Satuan	Dasar Honorarium
1	Pembina	OB	2.000.000
2	Pengarah	OB	1.750.000
3	Ketua	OB	1.500.000
4	Wakil Ketua	OB	1.300.000
5	Sekretaris	OB	1.200.000
6	Anggota	OB	800.000
7	Anggota Sekretariat	OB	650.000
8	Tenaga Ahli	OB	3.000.000

Keterangan:

a. Honorarium tim penyusun Rancangan Peraturan Bupati dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah.
b. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 3 (tiga) orang;
c. Tenaga ahli paling banyak 2 orang;
d. Honorarium tim diberikan paling lama 2 bulan.

Q. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI ASN

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Uang Lembur		
	a. ASN setara Golongan I	OJ	13.000
		OH	39.000
	b. ASN setara Golongan II	OJ	17.000
		OH	51.000
	c. ASN setara Golongan III	OJ	20.000
		OH	60.000
	d. ASN setara Golongan IV	OJ	25.000
		OH	75.000
2.	Uang Makan Lembur		
	a. ASN setara Golongan I dan II	OH	35.000
	b. ASN setara Golongan III	OH	37.000
	c. ASN setara Golongan IV	OH	41.000

Keterangan:

1. Uang lembur dan uang makan lembur diberikan kepada ASN yang diperintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pekerjaan tertentu di luar jam kerja maksimal 10 hari dalam kurun waktu 1 bulan;
2. Dalam hal pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 jam, maka uang lembur dihitung 1 (satu) hari;
3. Uang makan lembur dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 jam.

R. VAKASI, UANG LEMBUR, DAN INSENTIF BAGI NON ASN

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Uang Lembur Tenaga Non ASN		
	a. Uang Lembur	OJ	12.000
		OH	36.000
	b. Uang Makan	OH	31.000
2.	Vakasi Petugas keamanan/ Satpam		
	1. Komandan regu	OH	80.000
	2. Anggota	OH	70.000
3.	Uang Lembur		
	1. Supir kendaraan operasional (tangki air/dum truk/kendaraan operasional lainnya)	OJ	12.000
		OH	80.000
	2. Petugas kebersihan/pramusaji dan sejenisnya	OJ	12.000
		OH	80.000
	3. Petugas pemilah/pengentrian/pengverifikasi/ data atau dokumen	OJ	12.000
		OH	80.000
4.	Insentif sopir kendaraan dinas eselon II.b	OB	900.000
5.	Insentif Sekretaris pribadi pejabat eselon II.b	OB	800.000

Keterangan:

1. Vakasi diberikan kepada tenaga keamanan (Banpol PP/Satpam) pada Perangkat Daerah yang bertugas pada *shift* di luar jam kerja normal (di luar jam 08.00 WIB s.d 16.00 WIB).
2. Uang lembur dan uang makan lembur diberikan kepada ASN yang diperintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pekerjaan tertentu di luar jam kerja maksimal 10 hari dalam kurun waktu 1 bulan;
3. Dalam hal pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 jam, maka uang lembur dihitung 1 (satu) hari.
4. Uang makan lembur dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 jam.

Penjelasan istilah:

a. OB : Orang/Bulan
b. OP : Orang/Paket
c. OH : Orang/Hari
d. OJ : Orang/Jam
e. OR : Orang/Rapat
f. OK : Orang/Kegiatan
g. Oter : Orang/Terbitan
h. OJP : Orang/Jam Pelajaran

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri meliputi : perjalanan dinas luar daerah; dan perjalanan dinas dalam daerah. Perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari uang harian, uang penginapan, uang transportasi laut, uang transportasi darat, uang tiket pesawat, uang representatif dan biaya pengurusan dokumen kesehatan.

1. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

a) Uang Harian

No	Provinsi	Besaran (Rp)					
		Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ setara Pejabat Eselon II	ASN setara Pejabat Eselon III	ASN setara Pejabat Eselon IV/ Gol. IV	ASN setara Gol.III	ASN setara Gol. I/II dan Non. ASN
1.	ACEH	360,000	360,000	360,000	330,000	310,000	280.000
2.	SUMATERA UTARA	370,000	370,000	370,000	340,000	320,000	280.000
3.	RIAU	370,000	370,000	370,000	340,000	320,000	280.000
4.	KEPULAUAN RIAU	370,000	370,000	370,000	340,000	320,000	280.000
5.	JAMBI	370,000	370,000	370,000	340,000	320,000	280.000
6.	SUMATERA BARAT	380,000	380,000	380,000	350,000	330,000	280.000
7.	SUMATERA SELATAN	380,000	380,000	380,000	350,000	330,000	280.000
8.	LAMPUNG	380,000	380,000	380,000	350,000	330,000	280.000
9.	BENGKULU	380,000	380,000	380,000	350,000	330,000	280.000
10.	BANGKA BELITUNG	410,000	410,000	410,000	380,000	360,000	280.000
11.	BANTEN	370,000	370,000	370,000	340,000	320,000	280.000
12.	JAWA BARAT	430,000	430,000	430,000	400,000	380,000	280.000
13.	D.K.I Jakarta	530,000	530,000	530,000	450,000	380,000	350.000
14.	JAWA TENGAH	370,000	370,000	370,000	340,000	320,000	280.000
15.	D.I Yogyakarta	420,000	420,000	420,000	390,000	370,000	280.000
16.	JAWA TIMUR	410,000	410,000	410,000	380,000	360,000	280.000
17.	BALI	480,000	480,000	480,000	450,000	430,000	280.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	440,000	440,000	440,000	410,000	390,000	280.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	430,000	430,000	430,000	400,000	380,000	280.000

20.	KALIMANTAN BARAT	380,000	380,000	380,000	350,000	330,000	280.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	360,000	360,000	360,000	330,000	310,000	280.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	380,000	380,000	380,000	350,000	330,000	280.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	430,000	430,000	430,000	400,000	380,000	280.000
24.	KALIMANTAN UTARA	430,000	430,000	430,000	400,000	380,000	280.000
25.	SULAWESI UTARA	370,000	370,000	370,000	340,000	320,000	280.000
26.	GORONTALO	370,000	370,000	370,000	340,000	320,000	280.000
27.	SULAWESI BARAT	410,000	410,000	410,000	380,000	360,000	280.000
28.	SULAWESI SELATAN	430,000	430,000	430,000	400,000	380,000	280.000
29.	SULAWESI TENGAH	370,000	30,000	370,000	340,000	320,000	280.000
30.	SULAWESI TENGGARA	380,000	380,000	380,000	350,000	330,000	280.000
31.	MALUKU	380,000	380,000	380,000	350,000	330,000	280.000
32.	MALUKU UTARA	430,000	430,000	430,000	400,000	380,000	280.000
33.	PAPUA	580,000	580,000	580,000	550,000	530,000	280.000
34.	PAPUA BARAT	480,000	480,000	480,000	450,000	430,000	280.000

Keterangan:
Uang harian dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari penugasan.

b) Uang Penginapan

No.	Provinsi	Besaran (Rp)					
		Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	ASN Setara pejabat Eselon III	ASN Setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV	ASN Setara Gol III	ASN setara Gol. I/II dan Non. ASN
1.	ACEH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000	530.000
3.	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	600.000	500.000
7.	SUMATERA SELATAN	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000	580.000
9.	BENGKULU	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000	630.000

10.	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000	570.000
13.	D.K.I JAKARTA	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	600.000	600.000
14.	JAWA TENGAH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000	600.000
15.	D.I YOGYAKARTA	5.017.000	1.480.000	1.384.000	845.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000	664.000
17.	BALI	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000	600.000
33.	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000	718.000

Keterangan:

1. Biaya Penginapan dibayarkan dengan menggunakan rumus n=p-1, n= jumlah hari yang diperhitungkan, p= jumlah hari penugasan.
2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, sesuai dengan rumus n=p-1.

c) Satuan Biaya Transportasi Laut

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tuapejat-Padang	Orang/PP	500.000
2.	Sikakap-Padang	Orang/PP	600.000
3.	Pokai-Padang	Orang/PP	500.000
4.	Maileppet-Padang	Orang/PP	500.000

Keterangan : Pembiayaan transportasi laut dapat melebihi besaran standar sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill.

d) Satuan Biaya Transportasi Darat

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	ACEH	Orang / Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang / Kali	232.000
3.	RIAU	Orang / Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang / Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT		
	a. Kota Padang	Orang / Kali	190.000
	b. Kota Pariaman	Orang / Kali	200.000
	c. Kota Padang Panjang	Orang / Kali	210.000
	d. Kota Bukittinggi	Orang / Kali	215.000
	e. Kota Sawahlunto	Orang / Kali	215.000
	f. Kota Solok	Orang / Kali	210.000
	g. Kota Payakumbuh	Orang / Kali	225.000
	h. Kab. Agam	Orang / Kali	225.000
	i. Kab. Pesisir Selatan	Orang / Kali	205.000
	j. Kab. Tanah Datar	Orang / Kali	220.000
	k. Kab. Lima Puluh Kota	Orang / Kali	225.000
	l. Kab. Padang Pariaman	Orang / Kali	205.000
	m.Kab. Pasaman	Orang / Kali	250.000
	n. Kab. Sijunjung	Orang / Kali	225.000
	o. Kab. Pasaman Barat	Orang / Kali	250.000
	p. Kab. Dharmasraya	Orang / Kali	250.000
	q. Kab. Solok Selatan	Orang / Kali	250.000
	r. Kab. Solok	Orang / Kali	210.000
	s. Kab. Kep. Mentawai		
	1) Pagai Selatan-Pelabuhan Sikakap	Orang / Kali	150.000
	2) Pagai Utara-Pelabuhan Sikakap	Orang / Kali	100.000
	3) Sipora Selatan-Pelabuhan Tuapejat	Orang / Kali	150.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	167.000

9.	BENGKULU	Orang / Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Kali	90.000
11.	BANTEN	Orang / Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang / Kali	166.000
13.	D.K.I Jakarta	Orang / Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang / Kali	75.000
15.	D.I Yogyakarta	Orang / Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang / Kali	194.000
17.	BALI	Orang / Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang / Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang / Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang / Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang / Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang / Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang / Kali	182.000

Keterangan:

1. Biaya transportasi darat dibayarkan secara lumpsum;
2. Satuan biaya transportasi darat yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan darat pada saat keberangkatan dan/ pada saat kepulangan (khusus dalam ibu kota provinsi) :
   a) Pada saat keberangkatan:
      1) Dari pelabuhan menuju hotel/ penginapan;
      2) Dari hotel/ penginapan menuju lokasi tujuan.
   b) Pada saat kepulangan:
      1) Dari lokasi tujuan menuju hotel/ penginapan;
      2) Dari hotel/ penginapan menuju pelabuhan di Padang.
3. Satuan biaya transportasi darat yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 2 (dua) kali perjalanan darat pada saat keberangkatan dan/ pada saat kepulangan (khusus luar ibu kota provinsi):
   a) Pada saat keberangkatan:
      1) Dari pelabuhan menuju hotel/ penginapan/ bandara/ terminal;

2) Dari hotel/ penginapan/ bandara/ terminal menuju bandara/ terminal;
3) Dari bandara/ terminal menuju hotel/ penginapan di kota tujuan;
4) Dari hotel/ penginapan kota tujuan menuju lokasi tujuan.

b) Pada saat kepulangan:
1) Dari lokasi tujuan menuju hotel/ penginapan di kota tujuan;
2) Dari hotel/ penginapan menuju bandara/ terminal di kota tujuan;
3) Dari bandara/ terminal menuju hotel/ penginapan;
4) Dari hotel/ penginapan menuju pelabuhan.

4. Khusus kecamatan di luar lokasi pelabuhan penyeberangan dapat menyusun perencanaan kebutuhan biaya dengan tambahan 1 (satu) kali perjalanan darat; pada saat keberangkatan dari kecamatan menuju pelabuhan penyeberangan; dan pada saat kepulangan dari pelabuhan penyeberangan ke tempat kedudukan.
5. Pembiayaan transportasi darat dapat melebihi besaran standar sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill.

e) Satuan Biaya Tiket Pesawat

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kelas Bisnis	Orang / PP	5.530.000
2.	Kelas Ekonomi	Orang / PP	2.952.000
3.	Rokot (Sipora Selatan)-BIM (Padang)	Orang / PP	2.400.000
4.	Transit	Orang / PP	2.500.000

Keterangan:
1. biaya tiket pesawat dibayarkan sesuai harga *riil cost* tiket pada saat pelaksanaan perjalanan dinas;
2. kelas bisnis hanya disediakan untuk pejabat negara;
3. pembiayaan tiket pesawat dapat dibayarkan melebihi besaran standar sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill.

f) Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OH	250.000
2.	Eselon II/ Anggota DPRD	OH	150.000

Keterangan:
Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari penugasan.

g) Satuan Biaya pengurusan dokumen kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Rapid Test Anti Gen	Orang/Kali	100.000	*riil cost*
2.	Swab test	Orang/Kali	300.000	

2. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1. Perjalanan Dinas dalam daerah luar kota

Satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari uang harian, uang penginapan, uang transportasi laut, sewa *long boat*, uang transportasi darat dan uang representatif. Satuan biaya perjalanan dinas

dapat diberikan apabila perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 8 (Delapan) jam dan jarak tempuh ke lokasi tujuan lebih dari 8 kilo meter atau menyeberang laut dengan menggunakan *long boat* lebih dari 1 jam. Perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari ketentuan yang dimaksud hanya dapat diberikan uang transportasi lokal

a. Uang Harian

No	Daerah Tujuan	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	ASN Setara pejabat Eselon III	ASN Setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV	ASN Setara Gol III	ASN setara Gol. I/II	Non ASN
1.	Sipora Utara	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
2.	Sipora Selatan	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
3.	Pagai Selatan	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
4.	Pagai Utara	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
5.	Sikakap	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
6.	Siberut Barat Daya	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
7.	Siberut Selatan	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
8.	Siberut Tengah	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
9.	Siberut Utara	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
10.	Siberut Barat	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000

Keterangan:
Khusus perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas APIP (Inspektorat) pada Perangkat Daerah, uang harian dapat dibayarkan apabila pelaksanaan tugas lebih dari 8 (Delapan) jam dalam 1 (satu) hari.

b. Uang Penginapan

No	Kecamatan Tujuan	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	ASN Setara pejabat Eselon III	ASN Setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV	ASN Setara Gol III	ASN setara Gol. I/II	Non ASN
1.	Sipora Utara	1.000.000	700.000	600.000	400.000	300.000	300.000	150.000
2.	Sipora Selatan	1.000.000	700.000	600.000	400.000	300.000	300.000	150.000
3.	Pagai Selatan	800.000	600.000	500.000	300.000	200.000	200.000	150.000
4.	Pagai Utara	800.000	600.000	500.000	300.000	200.000	200.000	150.000

5.	Sikakap	1.000.000	700.000	600.000	400.000	300.000	300.000	150.000
6.	Siberut Barat Daya	1.000.000	700.000	600.000	400.000	300.000	300.000	150.000
7.	Siberut Selatan	1.000.000	700.000	600.000	400.000	300.000	300.000	150.000
8.	Siberut Tengah	1.000.000	700.000	600.000	400.000	300.000	300.000	150.000
9.	Siberut Utara	1.000.000	700.000	600.000	400.000	300.000	300.000	150.000
10.	Siberut Barat	800.000	600.000	500.000	300.000	200.000	200.000	150.000

Keterangan:

1. Biaya Penginapan dibayarkan dengan menggunakan rumus n=p-1, n= jumlah hari yang diperhitungkan, p= jumlah hari penugasan.
2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, sesuai dengan rumus n=p-1.

c. Satuan Biaya Transportasi Laut

No	Jenis Transportasi	Satuan	Besaran	Ket.
1.	Kapal antar pulau (ekonomi)	Orang / PP	200.000	Dibayarkan sesuai harga rill
2.	Kapal cepat	Orang / PP	600.000	

Keterangan : Pembiayaan transportasi laut dapat melebihi besaran standar sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill.

d. Sewa Long Boat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
1.	Sewa Boat dari Tuapejat ke Kecamatan Induk/Padang			
	a) Kecamatan Sipora Utara			
	- Tuapejat-Matubtuman	PP	6.045.000	
	- Tuapejat-Pukarayat	PP	2.000.000	
	b) Kecamatan Sipora Selatan			
	- Tuapejat-Beriulou	PP	6.045.000	
	- Tuapejat-Bosua	PP	6.045.000	
	c) Kecamatan Pagai Utara			
	- Tuapejat-Saumanganya	PP	9.090.000	
	- Tuapejat-Silabu	PP	9.090.000	
	- Tuapejat-Betumonga	PP	10.075.000	
	d) Kecamatan Sikakap			
	- Tuapejat-Sikakap	PP	10.075.000	
	e) Kecamatan Pagai Selatan			
	- Tuapejat-Malakopa	PP	13.123.000	

	- Tuapejat-Sinakak	PP	17.153.000	
	- Tuapejat-Makalo	PP	11.108.000	
	- Tuapejat-Surat Aban	PP	17.153.000	
	- Tuapejat- Bungo Rayo	PP	16.120.000	
	f) Kecamatan Siberut Barat			
	- Tuapejat-Betaet (Simatalu, Simalegi, Sigapokna)	PP	20.500.000	
	g) Kecamatan Siberut Selatan			
	- Tuapejat-Muara Siberut	PP	7.201.000	
	h) Kecamatan Siberut Tengah			
	- Tuapejat-Saibi	PP	8.060.000	
	- Tuapejat-Cimpungan	PP	8.060.000	
	i) Kecamatan Siberut Utara			
	- Tuapejat-Sikabaluan	PP	11.856.000	
	- Tuapejat-Bose	PP	11.856.000	
	j) Kecamatan Siberut Barat Daya			
	- Tuapejat-Peipei	PP	6.045.000	
	- Tuapejat-Sagulubbek	PP	16.120.000	
	k) Tuapejat-Padang	PP	14.105.000	
2	Sewa boat dari Kecamatan Induk ke Kecamatan/desa lainnya			
	a. Tuapejat-Katiet	PP	5.566.000	
	b. Sikakap-Malakopa	PP	3.450.000	
	c. Sikakap-Saumanganya	PP	3.450.000	
	d. Siberut Selatan-Peipei	PP	2.875.000	
	e. Siberut Selatan-Siberut Tengah	PP	3.450.000	
	f. Siberut Utara-Siberut Barat	PP	10.350.000	

Keterangan :
Sewa *long boat* sudah termasuk pajak, kebutuhan BBM dan keuntungan pemilik.

e. Satuan Biaya Transportasi Darat

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Bupati/Wakil Bupati	Orang / PP	1.000.000
2.	Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD	Orang / PP	800.000
3.	Anggota DPRD/Eselon II.b	Orang / PP	700.000
4.	Eselon III	Orang / PP	500.000
5.	Eselon IV	Orang / PP	500.000
6.	Staf Gol. III/IV	Orang / PP	500.000
7.	Staf Gol. II/I/Tenaga Kontrak	Orang / PP	300.000

Keterangan:
1) Transportasi Darat dibayarkan secara lumpsum;

2) Transportasi darat dibayarkan apabila jarak tempuh dari pelabuhan/tempat kedudukan bertugas lebih dari 8 kilo meter;
3) Dalam hal transportasi yang digunakan menggunakan pompong/long boat, biaya transportasi darat dibayarkan secara *riil cost* sesuai kuitansi pembayaran.

f. Satuan Biaya Representatif

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OH	250.000
2.	Eselon II/ Anggota DPRD	OH	150.000

Keterangan:

1. Uang Representatif dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari penugasan.
2. Biaya Representatif dibayarkan apabila perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam dan jarak tempuh ke lokasi tujuan lebih dari 8 kilo meter atau menyeberang laut dengan menggunakan *long boat* lebih dari 1 jam.

2. Perjalanan Dinas Dalam Kota

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota dapat dibayarkan uang harian tanpa biaya transportasi dan penginapan, dengan besaran sebagai berikut:

No.	Daerah Tujuan	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	ASN Setara pejabat Eselon III	ASN Setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV	ASN Setara Gol III	ASN setara Gol. I/II	Non ASN
1.	Dalam Kota	150.000	150.000	150.000	130.000	120.000	110.000	100.000

Keterangan : Khusus perjalanan dinas dalam kota dalam rangka pelaksanaan tugas ASN/Non ASN dapat dibayarkan apabila pelaksanaan tugas lebih dari 8 (Delapan) jam dalam 1 (satu) hari.

B. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada satuan biaya perjalanan dinas luar negeri pada kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Istilah :

Orang/PP : Orang/Pulang Pergi
OH : Orang/Hari
PP : Pulang Pergi

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN RAPAT

A. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intenshift dan bershiftat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi 4 (empat) jenis yaitu :

a. Paket *Fullboard* adalah Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
b. Paket *Fullday* adalah Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan)jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
c. Paket *Halfday* adalah Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)		
			Halfday	*Fullday*	*Fullboard*
			Dalam Kota	Dalam Kota	Dalam Kota /Luar Kota
1.	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	OP	331.000	432.000	987.000
2.	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	OP	331.000	432.000	987.000
3.	Pejabat Eselon III ke Bawah	OP	178.000	248.000	663.000
4.	Uang Harian Peserta Rapat	OH	85.000	85.000	120.000

Keterangan:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
   1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
   2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan

penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

B. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, TAMU, PESERTA PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, KEGIATAN PERLOMBAAN, DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	
			Makan	Snack
1.	Rapat koordinasi tingkat kepala daerah/eselon I/setara	Orang/kali	110.000	49.000
2.	Rapat biasa	Orang/kali	30.000	17.000

Keterangan:

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah/eselon I/setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara
b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementrian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

C. BELANJA JASA AKOMODASI DAN TRANSPORTASI NARASUMBER/TENAGA AHLI/PESERTA

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Jasa Akomodasi			Jasa Akomodasi dibayarkan sebesar harga kamar yang digunakan (Faktur / Kuitansi/ Bill Terlampir)
	a. Narasumber			
	1) Luar Daerah/Transit	OH	800.000	
	2) Dalam Daerah	OH	400.000	
	b. Peserta			
	1) Luar Daerah	OH	400.000	
	2) Dalam Daerah	OH	250.000	
2	Jasa Transportasi			Jasa Transportasi dibayarkan sebesar harga tiket (Tiket Terlampir)
	a. Narasumber			
	1) Transportasi Udara	PP	3.000.000	
	2) Transportasi Laut	PP	500.000	
	3) Transportasi Darat/Taksi	PP	400.000	
	b. Peserta			
	1) ke Padang	PP	500.000	
	2) antar kecamatan	PP	300.000	
	3) transportasi udara	PP	2.000.000	

Keterangan:

Untuk pejabat eselon I/II dapat didampingi oleh 1 (satu) orang asisten narasumber.

Penjelasan Istilah Satuan :

a. OP : Orang/Paket
b. OH : Orang/Hari
c. PP : Pulang Pergi

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA KHUSUS

A. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Insentif Pengamanan Asrama Sekolah	OB	300.000	
2.	Honorarium Penyuluh Pendidikan SI/D4	OB	300.000	
3.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik)			
	- Penanggung jawab	OB	750.000	
	- Koordinator	OB	600.000	
	- Operator Data SD atau SMP	OB	500.000	
	- Operator Data PAUD	OB	500.000	
4.	Pengelola Tunjangan Profesi Guru			
	- Penanggung jawab	OB	750.000	1 orang
	- Koordinator	OB	600.000	1 orang
	- Admin	OB	500.000	2 orang
5.	Pengelola Dana BOS			
	- Pengarah	OTR	2.000.000	1 orang
	- Penanggung jawab	OTR	1.500.000	1 orang
	- Koordinator	OTR	1.250.000	1 orang
	- Ketua Tim	OTR	1.000.000	2 orang
	- Anggota	OTR	750.000	5 orang
	- Sekretariat	OTR	500.000	3 orang
6.	Tunjangan Pengelola Perguruan Tinggi (melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi)			Apabila dijabat oleh PNS Daerah hanya diberi tunjangan sebesar 75%
	- Ketua	OB	2.000.000	
	- Wakil Ketua	OB	1.500.000	
	- Ketua Prodi	OB	1.000.000	
	- Pelaksana Administrasi	OB	750.000	
	- Pelaksana Keuangan	OB	750.000	
7.	Tunjangan Pengelola Kemahasiswaan			
	- Ketua	OS	800.000	
	- Dosen pembimbing	OS	750.000	
	- Dosen Penguji	OS	500.000	
	- Admin	OS	300.000	
8.	Honorarium Tim Penilai (PAK)	Max 2 x		

	Jabatan Fungsional Guru	setahun		
	a. Ketua	OP	1.000.000	
	b. Sekretaris	OP	750.000	
	c. Penilai	OP	750.000	
	d. Sekretariat	OP	500.000	

B. DINAS KESEHATAN

a. Vakasi/Insentif Tenaga Kesehatan Pada Rumah Sakit Pratama/Puskesmas dan jajarannya.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	VAKASI/HONORARIUM JASA PELAKSANA TEKNIS			
	a) Dokter umum, apoteker jaga sore s/d malam (tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya)	Orang/ Malam	100.000	
	b) Apoteker dan Nurse atau S1 Bidan jaga sore s/d malam (Puskesmas dan jaringannya)	Orang/ Malam	50.000	1 orang per hari
	c) Perawat, bidan, asisten Apoteker, gizi, *medical record*, teg. Laboratorium (tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya)	Orang/ Malam	40.000	
	d) Pemasang/pencabut Implant	Orang	75.000	
	e) Fogging	OH	100.000	
	f) Penyemprotan dengan *spray can*	Per Rumah	20.000	
	g) Bantuan transportasi Kader Posyandu			
	1) Terdekat dari puskesmas	OK	50.000	
	2) Dekat dari Puskesmas	OK	100.000	
	3) Jauh dari Puskesmas	OK	150.000	
	4) Terjauh dari Puskesmas	OK	200.000	
2	Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jasa Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)			
	a) FKTP Daerah Terpencil	%	60%	
	b) FKTP Daerah Sangat Terpencil	%	70%	
3	Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN untuk Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Di FKTP			
	a) FKTP Daerah Terpencil	%	40%	
	b) FKTP Daerah Sangat Terpencil	%	30%	
4	Honorarium Tim Seleksi Penerimaan Bidan PTT Pusat dan Daerah tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati			
	a) Penanggung Jawab	OP	1.300.000	
	b) Ketua	OP	1.200.000	
	c) Sekretaris	OP	1.000.000	
	d) Anggota	OP	750.000	
	e) Sekretariat	OP	500.000	
5	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Kesehatan yang (melibatkan unsur Perangkat Daerah lainnya/RSUD/BKD)	Max 2 x setahun		

	a) Ketua	OP	1.000.000	Sidang =2 kali/semester
	b) Sekretaris	OP	800.000	Maksimal1 orang
	c) Penilai Perawat	OP	1.000.000	4 Orang
	d) Penilai Bidan	OP	1.000.000	3 Orang
	e) Penilai Lainnya	OP	1.000.000	2 Orang
	f) Sekretariat	OP	500.000	Maksimal 6 orang
6	Insentif Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) pusat (dana APBN) di sarana kesehatan			
	Dengan kriteria :			
	a) Terpencil	OB	1.000.000	
	b) Sangat Terpencil	OB	1.200.000	
	c) Tidak Diminati/Sangat Tidak Diminati	OB	1.400.000	
7	Vakasi			
	Vakasi Petugas Siaga Bencana Jaga Malam (Piket Radio) Jam 16.00 – 07.00	OH	50.000	2 Orang
8	Honorarium Tim Penguji			
	Ketua	OK	500.000	
	Anggota	OK	400.000	
9.	Honorarium Pengelola E-Logistik	OB	250.000	
10.	Honorarium pengelola ASPAC	OB	500.000	
11.	Honorarium Pengelola P-care	OB	500.000	
12.	Honorarium Bendahara JKN	OB	750.000	
13.	Insentif Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan			
	a. Dokter Umum/Dokter gigi			
	1. FKTP Daerah Terpencil	OB	1.000.000	
	2. FKTP Daerah Sangat Terpencil	OB	1.500.000	
	b. Profesi			
	1. FKTP Daerah Terpencil	OB	700.000	
	2. FKTP Daerah Sangat Terpencil	OB	1.200.000	
	c. S1			
	1. FKTP Daerah Terpencil	OB	600.000	
	2. FKTP Daerah Sangat Terpencil	OB	1.100.000	
	d. D III			
	1. FKTP Daerah Terpencil	OB	500.000	
	2. FKTP Daerah Sangat Terpencil	OB	1.000.000	
14.	Vakasi Sopir Ambulans	OB	750.000	1 ambulans 1 sopir

Keterangan:
Vakasi diberikan kepada Pegawai ASN pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah yang mendapatkan giliran dinas (shift) di luar jam kerja normal (08.00 WIB s.d 16.00 WIB).

b. Penanganan Covid-19

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	Petugas *Check Point* di Pelabuhan			
	a. Petugas kesehatan	OH	100.000	
	b. Petugas keamanan	OH	100.000	
	c. Petugas kepelabuhanan	OH	100.000	
	d. Petugas Penyemprotan	OH	100.000	
2	Petugas swab test			
	a. Dokter penanggung jawab	OH	150.000	
	b. Petugas pengambil RT-PCR (Swab)	OH	100.000	
	c. Petugas Adminstrasi	OH	75.000	
3	Tim Pelacakan/Penelusuran			
	a. Penanggung jawab	OK	200.000	
	b. Petugas penyemprotan	OK	100.000	
	c. Petugas keamanan	OK	100.000	
	d. Petugas kesehatan	OK	100.000	
4	Penanganan isolasi			
	a. Petugas keamanan	Orang/*Shift*	100.000	2 *shift* per hari
	b. Petugas kesehatan	Orang/*Shift*	100.000	2 *shift* per hari
	c. Petugas kebersihan	Orang/*Shift*	100.000	2 *shift* per hari
	d. Makan minum pasien isolasi	OH	60.000	

c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	Vakasi Jasa Medis			
	a. Dokter Umum/dokter gigi/*Manager on duty*	Orang/jaga	200.000	
	b. Supervisor/*Case Manager*	Orang/jaga	150.000	
	c. Sarjana Keperawatan (NERS), Kebidanan	Orang/jaga	100.000	
	d. Pengelola perawatan	Orang/jaga	150.000	
	e. Apoteker	Orang/jaga	150.000	
	f. Penata Rontgen	Orang/jaga	100.000	
	g. Koordinator IPRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana RS)	Orang/jaga	100.000	
	h. Nutrisionis D-IV/S-1	Orang/jaga	100.000	
	i. Pranata Laboratorium/Petugas BDRS	Orang/jaga	75.000	
	j. Perawat/Bidan (D.III)	Orang/jaga	75.000	
	k. Ass Apoteker	Orang/jaga	75.000	
	l. MR/Petugas BPJS/Kasir	Orang/jaga	75.000	
	m. Ahli Madya Gizi	Orang/jaga	75.000	
	n. Fisioterapi	Orang/jaga	75.000	
	o. Petugas Kamar mayat	Jenazah	300.000	

	p. Tenaga IPRS (Genset, Oksigen, IPAL, WTP, Sopir WTP)	Orang/jaga	50.000	
	q. Tenaga Tukang Masak	Orang/jaga	50.000	
	r. Tenaga *Cleaning Service*	Orang/jaga	50.000	
	s. Tenaga *laundry*	Orang/jaga	50.000	
	t. Tenaga *Security*	Orang/jaga	50.000	
	u. Sopir Ambulance	Orang/jaga	50.000	
	v. Tenaga bank darah rumah sakit (BDRS)	Orang/ Donor	60.000	
	w. Penata Apotek/ Laboratorium setingkat SMA	Orang/jaga	30.000	
2	Honorarium Verifikator Klaim Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) RSUD			
	a. Koodinator	OB	500.000	1 Orang
	b. Anggota	OB	400.000	Maksi mal 3
	c. Petugas entri	Orang/ *shift*	75.000	
3	Honorarium Komite Rumah Sakit			
	a. Ketua	OTR	400.000	
	b. Sekretaris	OTR	300.000	
	c. Sub Komite	OTR	250.000	
4	Insentif/tunjangan kesejahteraan tenaga Kesehatan non ASN pada RSUD/RS Pratama			
	Dokter Spesialis			
	a. Kebidanan	OB	24.000.000	
	b. penyakit dalam	OB	24.000.000	
	c. bedah	OB	24.000.000	
	d. anak	OB	24.000.000	
	e. anastesi	OB	20.000.000	
	f. radiologi dan patologi klinik	OB	15.000.000	
5	Insentif dokter residen spesialis (kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau kementerian kesehatan), antara lain:			
	a. Dokter spesialis dasar (obstertric dan ginekologi, penyakit dalam, anak, bedah, dan anastesi)	OB	20.000.000	
	b. Dokter spesialis penunjang	OB	15.000.000	
6	Honorarium Dokter Residen Spesialistik (berdasarkan kerjasama/kontrak Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi Negeri atau Kementerian Kesehatan)			
	a. Dokter spesialis dasar (obstertric dan	OB	20.000.000	

	ginekologi, penyakit dalam, anak, bedah, dan anastesi)			
	b. Dokter spesialis penunjang	OB	15.000.000	
7	Honorarium Tim Akreditasi Rumah Sakit			
	a. Ketua	OK	1.000.000	
	b. Sekretaris	OK	750.000	
	c. Anggota	OK	500.000	
	d. IPCD/IPCN	OB	750.000	
	e. Pengelola TB, Survailens rumah sakit	OB	250.000	
	f. PPRA	OB	300.000	
8	Honorarium/Insentif			
	a. Kepala instalansi/ruangan	OB	500.000	
	b. Pengelola/admin aplikasi kesehatan	OTR	500.000	
	c. Pengelola/admin aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit, SDM, rencana kebutuhan dan produk aplikasi kemenkes	OB	400.000	
	d. Tenaga informasi dan teknologi aplikasi rumah sakit	OB	3.500.000	
	e. Apoteker (dengan SIPA yang masih berlaku)	OB	750.000	
	Catatan: Honorarium/insentif sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a s.d d khusus bagi PNS, dapat dibayarkan sepanjang belum diperhitungkan dalam pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP).			

Keterangan:

Vakasi diberikan kepada Pegawai ASN/Tenaga Kontrak pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah yang mendapat jadwal dinas (*shift*) di luar jam kerja normal (08.00 WIB s.d 16.00 WIB).

C. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMDAM KEBAKARAN

1. Penegakan Perda/Perbup

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
A	Tim Koordinasi Penegakan Perda/Perbup			
	- Pengarah	OTR	1.500.000	
	- Wakil pengarah	OTR	1.250.000	
	- Penanggung jawab	OTR	1.250.000	
	- Ketua	OTR	1.150.000	
	- Wakil Ketua	OTR	1.150.000	
	- Sekretaris	OTR	1.100.000	
	- Anggota	OTR	900.000	
	- Sekretariat	OTR	750.000	
b.	Operasi Penegakan Perda/Perbup			
	- Penanggung jawab	OK	150.000	
	- Wakil Penanggung jawab	OK	150.000	
	- Petugas Operasi (Banpol/Polri/TNI)	OK	100.000	

	- Petugas Administrasi	OK	75.000	
c.	PPNS/Penyidik Polri	OK	300.000/ kasus	

2. Perlindungan Masyarakat

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
a.	VAKASI JASA OPERASIONAL DAMKAR (PNS dan Non PNS)			
	1. Vakasi Kejadian Kebakaran	Orang /kejadian	100.000	Dibayarkan perkejadian kebakaran
	2. Pengawas dan Piket /Jaga	OH	30.000	
	3. Insentif Operasional	OB	165.000	
	4. Vakasi Komandan Regu DAMKAR	OH	50.000	
	5. Vakasi Piket Jaga Provos Damkar	OH	50.000	
	6. Vakasi Piket Jaga Sopir	OH	50.000	
	7. Vakasi Piket Jaga Anggota DAMKAR	OH	45.000	
b.	Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran	Unit/ tahun	40.000.000	

3. Ketertiban Umum

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
a.	Honorarium Kegiatan Operasi Harian (Banpol PP) (PNS dan Non PNS)			
	1) Petugas Tindak Internal (PTI)	OB	800.000	O/tindakan
	2) Intel Banpol PP	OB	800.000	O/laporan intelijen
b.	Vakasi Kegiatan Operasional Harian Banpol (PNS dan Non PNS)			
	1) Sopir Patroli dan Petugas Patroli	OH	50.000	
	2) Sopir kendaraan roda 6	OH	50.000	
	3) Pengawas	OH	55.000	
	4) Insentif Operasional	OH	150.000	
	5) Huru-Hara	OH	200.000	Per Insiden
	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati			
c.	Honorarium Penyelesaian Perkara Ketertiban Umum dan Pelanggaran Tindak Internal			
	1) Ketua Tim	OS	600.000	
	2) Sekretaris	OS	500.000	
	3) Anggota	OS	400.000	
d.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Patroli Ketertiban Umum/Penertiban IMB/Reklame Spanduk/Keramaian/Penyelamatan Aset Negara/Peti/ Pekat Dan Penegakkan Perda Lainnya, Serta Pengamanan Pejabat Negara			Maksimal untuk 7 Operasi
	1) PNS			
	a) Penanggung jawab	OK	100.000	1 orang
	b) Ketua	OK	70.000	1 orang
	c) Sekretaris	OK	65.000	1 orang
	d) Anggota	OK	60.000	2 orang
	e) Sekretariat	OK	40.000	5 orang
	2) BANPOL	OK	50.000	
	3) Apabila Melibatkan POLRI/ TNI			

	a) Pimpinan	OK	100.000	2 orang
	b) Anggota	OK	60.000	10 orang
e.	Insentif Banpol PP dan Damkar (PNS dan Non PNS)			
	1) Koordinator	OB	700.000	
	2) Komandan Pleton	OB	600.000	
	3) Komandan Regu	OB	500.000	
	4) Provost	OB	500.000	
	5) Supir Banpol dan Damkar	OB	500.000	

D. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Tunjangan Tugas Belajar

NO	PENDIDIKAN	SATUAN	BESARAN BANTUAN/ BEASISWA	KET
1.	D-III	OB	2.500.000	Sudah termasuk tambahan biaya hidup dan beli buku
2.	S-1 Sumbar	OB	3.000.000	
	S-1 Jawa	OB	3.500.000	
3.	S-2 Dokter Spesialis (Bedah, Obsgyn, Anak, Internis)	OB	10.000.000	
4.	S-2 Dokter Spesialis Lainnya	OB	7.000.000	
5.	S-2 Umum Sumbar	OB	3.500.000	
	S-2 Umum Luar Sumbar	OB	4.500.000	
Catatan: 1. Apabila pemberian tugas belajar di biayai oleh instansi pemerintah lainnya, maka selisih besaran bantuan/beasiswa tugas belajar ditanggung oleh APBD. 2. PNS Tugas Belajar tidak diberi tambahan penghasilan PNS kecuali tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.				

2. Honorarium Tim Penilai Kinerja, Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Tim Penilai Kinerja			
	a. Penanggung jawab/Pengarah	OS	2.000.000	
	b. Wakil Penanggung jawab/Wakil Pengarah	OS	1.750.000	
	c. Ketua	OS	1.500.000	
	d. Sekretaris	OS	1.250.000	
	e. Anggota	OS	1.000.000	
	f. Sekretariat	OS	800.000	
2.	Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi			
	a. Pembina	OK	2.000.000	
	b. Wakil Pembina	OK	1.750.000	
	c. Ketua	OK	1.400.000	
	d. Anggota	OK	1.200.000	
	e. Sekretaris bukan anggota	OK	1.200.000	
	f. Sekretariat	OK	800.000	
3.	Assesor	OK	1.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
4.	Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai			
	a. Pembina	OS	2.000.000	
	b. Wakil Pembina	OS	1.750.000	
	c. Ketua	OS	1.500.000	
	d. Wakil Ketua	OS	1.250.000	
	c. Sekretaris	OS	1.000.000	
	f. Anggota	OS	750.000	
	g. Sekretariat	OS	500.000	

3. Honorarium Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN)

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
a. Penanggung Jawab	OB	2.000.000	
b. Wakil Penanggung Jawab	OB	1.750.000	
c. Ketua	OB	1.250.000	
d. Wakil Ketua	OB	1.150.000	
e. Sekretaris	OB	1.000.000	
f. Koordinator	OB	850.000	
g. Anggota	OB	750.000	
h. Tenaga Pengaman			
1. Perwira	OP	1.000.000	
2. Bintara	OP	500.000	
3. Banpol/Dishub	OP	300.000	
i. Honorarium Pengawas Ujian CPNS	OP	300.000	
j. Upah Kebersihan (Non PNS)	OP	150.000	

4. Biaya Pendidikan dan Pelatihan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Makan dan Minum Peserta Diklat	OH	120.000	
2.	Penginapan			
	a. Dalam Daerah Dalam Kabupaten	Kamar	350.000	2 orang / kamar
	b. Luar Daerah Dalam/ Luar Provinsi	Kamar	600.000	
3.	Makan dan Minum Peserta Diklat Untuk Observasi Lapangan	OH	120.000	
4.	Penginapan Peserta Diklat Untuk Observasi Lapangan	Kamar	600.000	2 orang/ kamar
5.	Sewa Bus Pariwisata Untuk Observasi Lapangan	Per hari	3.500.000	
6.	Honorarium MC Untuk Observasi Lapangan	Paket	300.000	
7.	Honorarium Moderator Untuk Observasi Lapangan	Paket	400.000	
8.	Uang Saku Diklat			
	a. Diklat Struktural/Kepemimpinan			
	1) PIM II	OP	40.000.000	
	2) PIM III			
	a) Luar Daerah Dalam Propinsi	OP	15.000.000	
	b) Luar Daerah Luar Propinsi	OP	22.500.000	
	c) Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OP	17.500.000	

	3) PIM IV			
	a) Luar Daerah Dalam Propinsi	OP	10.000.000	
	b) Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OP	12.000.000	
	b. Diklat Fungsional			
	1) Golongan III			
	a) Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OH	500.000	
	b) Luar Daerah Luar Propinsi	OH	400.000	
	2) Golongan II			
	a) Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OH	400.000	
	b) Luar Daerah Luar Propinsi	OH	300.000	
9	Kontribusi Peserta Diklat			
	a. PKN Tingkat II	OP	30.261.000	
	b. PKA	OP	22.125.000	
	c. PKP	OP	20.230.000	
10.	Luar Daerah Luar Propinsi	OP	5.250.000	Sesuai standar penyelenggara
11.	Kontribusi Peserta *Management of Training* (MOT)	OP	5.250.000	

5. Biaya Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
Seleksi pengembangan karir Pegawai Aparatur Sipil Negara			
a. Di dalam Kantor BKN	OP	100.000	
b. Di luar kantor BKN	OP	100.000	

Keterangan :
Standar biaya yang digunakan dalam Pelaksanaan Pelatihan Dasar calon Pegawai Negeri Sipil mempedomani Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Dasar.

E. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

a. Atraksi/Pertunjukan Kebudayaan

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
a.	Sikerei			
	a. Pertunjukan di luar provinsi	OH	800.000	
	b. Pertunjukan di tingkat kabupaten dan provinsi	OH	700.000	
b.	Pelatih tari			Maksimal 2 orang
	1. Pertunjukan di luar provinsi	OH	600.000	
	2. Pertunjukan di tingkat kabupaten dan provinsi	OH	500.000	

c.	Penari/Tim Kesenian Kreatif			
	1. Pertunjukan di luar provinsi	OH	350.000	
	2. Pertunjukan di tingkat kabupaten dan provinsi	OH	250.000	
d.	Tim tari kolosal (selama latihan)			
	1. Pelatih	OH	100.000	Maksimal 4 orang
	2. Penari	OH	25.000	

b. Pariwisata

No	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
1.	Vakasi			
	a. Pengawas Pantai (Non PNS)			Dibayar pada saat *shift* jaga di luar jam/hari kerja dan minimal 6 jam
	1. Koordinator	OH	90.000	
	2. Anggota	OH	85.000	
	b. Tenaga Tourism Information Center (TIC) - Non PNS			
	1. Koordinator	OH	100.000	
	2. Anggota	OH	90.000	
2.	Honorarium Petugas TIC			
	1. di TMII di Jakarta	OB	3.000.000	Non PNS
	2. di Mentawai/Padang	OB	2.000.000	Non PNS

c. Pemuda dan Olah Raga

URAIAN	SAT	BIAYA	KET
Hadiah Lomba/*Event*			Total hadiah seluruhnya
a. Internasional	Orang/Event	150.000.000	
b. Nasional	Orang/Event	50.000.000	
c. Daerah	Orang/Event	20.000.000	

F. DINAS PERHUBUNGAN/BIDANG PERHUBUNGAN

a. Jasa Tenaga Pelaut Indonesia (Pelayaran Antar Pulau/Dalam Negeri) dan Operator Boat

1) Jasa upah pokok tenaga pelaut bersertifikat ANT IV/ATT IV

No	Jabatan	Jasa Pokok (Rp)	Ket
1.	Nakhoda	2.700.000	
2.	Mualim I	2.200.000	
3.	Mualim II	1.900.000	
4.	Mualim III	1.700.000	
5.	KKM	2.500.000	
6.	Masinis I	2.100.000	
7.	Masinis II	1.900.000	
8.	Masinis III	1.700.000	
9.	Serang	1.200.000	
10.	Juru Mudi	1.000.000	
11.	Juru Minyak	1.000.000	

12.	Koki	1.200.000	
13.	Pelayan	1.000.000	
14.	Kelasi	1.000.000	

2) Jasa upah pokok tenaga pelaut bersertifikat Dasar/SKK

No	Jabatan	Jasa Pokok (Rp)	Ket
1.	Nakhoda	1.750.000	
2.	KKM	1.500.000	
3.	Juru mudi	750.000	
4.	Klasi	650.000	

Keterangan :

a. Jika Tenaga Kontrak sudah terdaftar kepesertaannya pada BPJS maka BPJS Kesehatan dibayar dari APBD sebesar 3% x Gaji Pokok, dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Program Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% x Gaji Pokok dan Program Kematian 0,3% x Gaji Pokok dibayar APBD, dan Jika tidak terdaftar maka tidak di bayarkan.

b. Apabila Tenaga Kontrak telah tertanggung BPJS Kesehatan maka gaji yang diterima dipotong 2%.

3) Jasa Tunjangan Keahlian dan Tunjangan Jabatan Anak Buah Kapal

No	Sertifikat	Jabatan	Jasa Keahlian	Jasa Jabatan di Kapal	Ket.
1.	ANT. III (Ahli Nautika Tingkat III)	- Nakhoda - Mualim I - Mualim II - Mualim III	1.300.000 1.000.000 900.000 700.000	800.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
2.	ATT. III (Ahli Teknika Tingkat III)	- KKM - Masinis I - Masinis II - Masinis III	1.200.000 1.000.000 900.000 700.000	700.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
3.	ANT. IV (Ahli Nautika Tingkat IV)	- Nakhoda - Mualim I - Mualim II - Mualim III	1.200.000 900.000 800.000 600.000	800.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
4.	ATT. IV (Ahli Teknika Tingkat IV)	- KKM - Masinis I - Masinis II - Masinis III	1.100.000 900.000 800.000 600.000	700.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
5.	ANT. V (Ahli Nautika Tingkat V)	- Nakhoda - Mualim I - Mualim II - Mualim III	950.000 800.000 700.000 600.000	800.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
6.	ATT. V (Ahli Teknika Tingkat V)	- KKM - Masinis I - Masinis II - Masinis III	900.000 800.000 700.000 600.000	700.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi

7.	ANT-D (Ahli Nautika Tingkat Dasar)	- Nakhoda - Mualim I - Mualim II - Mualim III	500.000 450.000 430.000 420.000	800.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
8.	ATT-D(Ahli Teknika Tingkat Dasar)/SKK Mesin	- KKM - Masinis I - Masinis II - Masinis III	480.000 450.000 430.000 420.000	700.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
9.	Bersertifikat Dasar / SKK	- Nakhoda - KKM	500.000 480.000	700.000 680.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
10.		Serang	400.000	380.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
11.		Juru Mudi	380.000	360.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
12.		Kelasi	350.000	350.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
13.		Mandor Mesin	400.000	380.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
14.		Juru Minyak	380.000	360.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
15.		Koki	400.000	380.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
16.		Kadet	200.000	200.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi

4) Jasa Berlayar Anak Buah Kapal (ABK Kapal Pelayaran Umum)

No	Jabatan	Satuan	Jasa Berlayar	Ket.
1.	Nakhoda	Mil	1.700/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
2.	Mualim I	Mil	1.500/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
3.	Mualim II	Mil	1.300/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

4.	KKM	Mil	1.400/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
5.	Masinis I	Mil	1.250/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
6.	Masinis II	Mil	1.150/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
7.	Serang	Mil	1.100/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
8.	Juru Mudi	Mil	1.000/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
9.	Juru Minyak	Mil	1.000/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
10.	Juru Masak	Mil	1.100/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
11.	Kelasi	Mil	1.000/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

5) Jasa Berlayar Anak Buah Kapal (ABK Kapal Pelayaran Umum) yang jaraknya < 10 Mil

No	Jabatan	Satuan	Jasa Berlayar	Ket.
1.	Nakhoda	Trip	20.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
2.	Mualim I	Trip	18.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
3.	Mualim II	Trip	16.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
4.	KKM	Trip	17.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
5.	Masinis I	Trip	15.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
6.	Masinis II	Trip	14.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
7.	Serang	Trip	13.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
8.	Juru Mudi	Trip	12.500/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
9.	Juru Minyak	Trip	11.500/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
10.	Juru Masak	Trip	11.500/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
11.	Kelasi	Trip	11.500/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

6) Uang Makan Anak Buah Kapal (Berlayar)

No.	Jabatan	Satuan	Uang Makan	Ket.
1.	Jasa Uang Makan ABK (Jabatan sama dg angka 4 diatas)	OH	27.500	

7) Uang Makan Anak Buah Kapal (Tidak Berlayar)

No	Jabatan	Satuan	Uang Makan	Ket.
1.	ABK Jaga	OH	27.500	

8) Jasa, Penginapan, dan Uang Makan Operator Boat

No	Jabatan	Satuan	Biaya	Ket.
1.	Operator			
	- Jasa berlayar	OH	350.000	
	- Penginapan	OH	75.000	
	- Uang makan	OH	25.000	
2	Kooperator			
	- Jasa berlayar	OH	300.000	
	- Penginapan	OH	75.000	
	- Uang makan	OH	25.000	

Keterangan:

a. Jasa berlayar, biaya penginapan, dan uang makan dibayarkan bagi operator dan kooperator boat non PNS dan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

b. Jasa berlayar, biaya penginapan, dan uang makan dibayarkan sesuai dengan jumlah hari dalam perintah berlayar.

c. Perintah berlayar disesuaikan dengan surat perintah tugas aparatur yang akan bertugas ke lapangan dengan menggunakan boat.

b. Vakasi Petugas Pelabuhan dan Lalu Lintas Darat

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET.
1	Vakasi Petugas Piket Hari Raya Keagamaan			
	a. Koordinator Piket	OH	70.000	Vakasi dapat di bayarkan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan
	b. Komandan Piket	OH	60.000	
	c. Petugas Piket	OH	50.000	
2	Vakasi piket harian pelabuhan kapal			
	a. Pelabuhan Penyeberangan (ASDP)	O/Piket	35.000	Vakasi dapat di bayarkan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan
	b. Pelabuhan Antar Pulau	O/Piket	35.000	
3	Vakasi petugas LLAJ			
	a. Komandan Regu	OH	35.000	Minimal dinas lapangan 2 jam pagi dan 2 jam sore hari
	b. Anggota LLAJ	OH	30.000	
4	Vakasi petugas pelayanan kedatangan/keberangkatan kapal (Non PNS)			
	a. Komandan regu	OH	35.000	Dinas lapangan pada saat kedatangan dan keberangkatan kapal Penumpang.
	b. Anggota	OH	30.000	

G. SEKRETARIAT DAERAH

a. Jasa Anak Buah Kapal Dinas Operasional dan Kapal Operasional Dinas Jabatan Kepala Daerah (minimal 10 GT ke atas)

No	Jabatan	Satuan	Jasa Berlayar	Ket.
1.	Nakhoda	Mil	2.000/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
2.	Mualim I	Mil	1.700/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
3.	Mualim II	Mil	1.600/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
4.	KKM	Mil	1.800/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
5.	Masinis I	Mil	1.550/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
6.	Masinis II	Mil	1.450/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
7.	Serang	Mil	1.400/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
8.	Juru Mudi	Mil	1.300/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
9.	Juru Minyak	Mil	1.300/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
10.	Juru Masak	Mil	1.400/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
11.	Kelasi	Mil	1.300/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
Keterangan: a. Pembayaran Jasa ABK didasarkan pada surat perintah dan *voyage report* b. Surat Perintah ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum dan *voyage report* dibuat oleh nakhoda dan disahkan oleh koordinator pengelola kapal				

b. Honorarium Penunjang Operasional Pelaksanaan Kedinasan Pimpinan

No	Uraian	Sat	Biaya (Rp)	Ket
1.	Bupati/ Wakil Bupati			
	a. Koordinator Sekretaris Pribadi	OB	1.500.000	ASN
	b. Ajudan/Pengawal pribadi	OB	2.500.000	ASN/Non ASN
	c. Sopir	OB	1.500.000	
	d. Staf Sekretaris Pribadi	OB	1.500.000	
2.	Sekretaris Daerah			
	a. Koordinator Sekretaris Pribadi	OB	1.500.000	ASN
	b. Ajudan	OB	1.750.000	ASN/Non ASN
	c. Sopir	OB	1.150.000	
	d. Staf Sekretaris Pribadi	OB	1.000.000	

c. Uang Harian Tenaga Pengawalan VIP/VVIP/Tamu

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Ket
1.	Koordinator	OH	380.000	1 orang
2.	Anggota	OH	250.000	Max. 2 org

d. Jasa Penyediaan Bantuan Hukum oleh Advokat/pengacara profesional

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kasus Pidana	Per kasus	15.000.000
2.	Kasus Perdata	Per kasus	25.000.000
3.	Non Litigasi	Per kegiatan	15.000.000

e. Pendaftaran gugatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Perdata		
	- Pendaftaran gugatan	Kasus	5.000.000
	- Pendaftaran banding	Kasus	3.000.000
	- Pendaftaran kasasi	Kasus	3.000.000
	- Pendaftaran peninjauan kembali	Kasus	3.000.000
	- Salinan putusan	Lembar	1.000
2	Tata Usaha Negara		
	- Pendaftaran gugatan	Kasus	750.000
	- Pendaftaran banding	Kasus	1.100.000
	- Pendaftaran kasasi	Kasus	1.300.000
	- Pendaftaran peninjauan kembali	Kasus	3.400.000
	- Salinan putusan	Lembar	1.000

f. Jasa Konsultan Penyediaan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Perkara Perdata/Tatausaha Negara

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tahap Mediasi	Per kasus	10.000.000
2.	Tahap Pengadilan Tingkat Pertama	Per kasus	35.000.000
3.	Tahap Banding	Per Kasus	10.000.000
4.	Tahap Kasasi/Peninjauan Kembali	Per Kasus	10.000.000

g. Jasa penyelenggara kegiatan upacara/acara resmi nasional/daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Honorarium Kegiatan Petugas Upacara			Upacara Resmi Nasional
	a. Perwira Upacara	OK	300.000	
	b. Perwira Upacara Cadangan	OK	300.000	
	c. Komandan Upacara	OK	300.000	
	d. Komandan Upacara Cadangan	OK	300.000	
	e. Petugas Paskibra	OK	300.000	
2.	Honorarium Petugas Upacara HUT-RI			
	a. Perwira Upacara	OK	750.000	
	b. Perwira Upacara Cadangan	OK	750.000	
	c. Komandan Upacara	OK	750.000	
	d. Komandan Upacara Cadangan	OK	750.000	
	e. Komandan Kompi (Danki)	OK	300.000	

	f. Pengawal Paskibra	OK	100.000	
3.	Jasa Grup Penari Turuk Laggai	Grup/ Kali	2.000.000	acara resmi/ penyambutan tamu daerah

h. Uang Penghargaan dan Pembinaan atas Prestasi Perlombaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Daerah atau Nasional

No	Uraian	Besaran (Rp)		
		Juara I/ Medali Emas	Juara II/ Medali Perak	Juara III/ Medali Perunggu
	a) Tingkat Provinsi			
	- Perorangan	500.000	400.000	350.000
	- Grup (jumlah peserta sampai dengan 15 orang)	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	- Grup (jumlah peserta lebih dari 15 orang)	5.000.000	4.000.000	3.000.000
	b) Tingkat Nasional			
	- Perorangan	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	- Grup (jumlah peserta sampai dengan 15 orang)	5.000.000	4.000.000	3.000.000
	- Grup (jumlah peserta lebih dari 15 orang)	8.000.000	6.000.000	4.000.000

i. Biaya Hidup Mahasiswa/Peserta Diklat Kerjasama Kelembagaan

No	Uraian	Satuan	Besaran	Ket
1.	Mahasiswa Kerjasama Kelembagaan			
	a. Luar Daerah Provinsi Sumatera Barat	OB	1.000.000	
	b. Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat	OB	1.000.000	
	c. Dalam Daerah Kabupaten	OB	500.000	
2.	Peserta Pendidikan dan Pelatihan			Minimal 5 hari maksimal 10 hari
	a. Luar Daerah Provinsi Sumatera Barat	OH	500.000	
	b. Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	300.000	
	c. Dalam Daerah Kabupaten	OH	200.000	

H. SEKRETARIAT DPRD

a. Kelompok Pembantu Alat Kelengkapan DPRD (AKD)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Honorarium Pelaksanaan Pelantikan Pimpinan/ Anggota DPRD			
	a. Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri	OA	5.000.000	
	b. Panitera Pengadilan Negeri	OA	2.000.000	

2.	Tenaga Ahli Fraksi	OB	5.000.000	1 orang/ fraksi
3.	Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD	OB	5.000.000	
4.	Ajudan Pimpinan DPRD	OB	1.000.000	
5.	Sopir Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	1.500.000	
6.	Sopir alat kelengkapan DPRD	OB	1.000.000	
7.	Sekretaris Pribadi Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	800.000	Maksimal 2 orang/ pimpinan
8.	Sekretaris Alat Kelengkapan DPRD	OB	800.000	Maksimal 1 orang per AKD

b. Penyelenggaraan Reses DPRD

1) Konsumsi

No	Uraian	Harga (Rp)
1	Nasi kotak	30.000/kotak
2	Snack	17.000/kotak
3	Prasmanan	85.000/porsi

2) Tranportasi Darat Pimpinan/Anggota DPRD

No	Rute	Satuan	Harga (Rp)
1.	Sikakap ke		
	- Silabu	PP	1.200.000
	- Betumonga	PP	1.200.000
	- Bulasat	PP	1.400.000
	- Makalo	PP	1.200.000
	- Sinaka	PP	1.400.000
	- Matobe	PP	800.000
	- Ma. Taikako	PP	800.000
	- Malakopa	PP	1.000.000
	- Saumanganya	PP	900.000
2.	Tuapejat ke		
	- Mara	PP	1.000.000
	- Nemnem Leleu	PP	1.000.000
	- Sioban	PP	1.000.000
	- Saurenuk	PP	1.000.000
	- Matobek	PP	1.000.000
	- Goisooinan	PP	800.000
	- Sidomakmur	PP	500.000
	- Bukit Pamewa	PP	500.000
3	Sikabaluan ke		
	- Sotboyak	PP	1.000.000
	- Monganpoula	PP	1.000.000
4	Ma. Siberut ke		
	- Matotonan	PP	1.800.000
	- Magosi	PP	1.400.000
	- Madobag	PP	1.400.000

	- Salapak	PP	1.400.000
	- Bekeiluk	PP	1.400.000
	- Ugai	PP	1.400.000
	- Buttui	PP	1.400.000
	- Mangorut	PP	1.000.000
	- Maileppet	PP	1.000.000
	- Muntei	PP	1.000.000
	- Puro	PP	1.000.000
5	Betaet ke		
	- Simalibeg	PP	2.000.000
	- Bojo	PP	2.000.000
	- Limu	PP	1.500.000
	- Saikoan	PP	1.500.000
6	Simalibeg ke		
	- Masaba/Limau	PP	1.200.000
	- Paipajet Hulu	PP	1.000.000
	- Lubaga/ Bai	PP	1.200.000
7	Saibi ke		
	- Sirisurak	PP	1.000.000
	- Saliguma/ Tinambuk	PP	1.000.000
	- Cimpungan/Subbelen/Simaubuk	PP	1.000.000
8	Sagulubbeg ke		
	- Masi	PP	1.000.000
	- Bunga	PP	1.000.000
	- Kaleak/ Mapinang	PP	1.000.000
	- Buga	PP	1.000.000
	- Sirigabak	PP	1.000.000

Keterangan : Dalam hal penggunaan transportasi darat tidak dapat menunjukkan bukti transaksi maka dibayarkan secara lumsum.

3) Transportasi Laut

No	Rute	Satuan	Harga (Rp)
1.	Sikakap ke		
	- Surat Aban – Limosua – Maonai	PP	4.000.000
	- Mabola – Korit Bua – Bagat Sagai	PP	4.000.000
2.	Muara Sikabaluan ke		
	- Sirilogui	PP	1.000.000
	- Bojakan	PP	1.100.000
	- Malancan	PP	1.100.000
3	Siberut Barat Daya		
	- Katurei – Tiop – Sarausau – Toro Laggo	PP	1.000.000
	- Tailelëu	PP	1.000.000
4.	Siberut Barat		
	- Simalegi – Simatalu	PP	5.000.000
	- Simalegi – Sigapokna	PP	5.000.000

5.	Saibi Samukop		
	Saibi Ssamukop – Gotap - Hulu (Lewat Sungai)	PP	2.000.000

Keterangan :

1. Transportasi laut yang dipakai dibayarkan secara *at cost* (sesuai harga riil)
2. Biaya transportasi laut sudah termasuk pajak.

I. DINAS PERIKANAN

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
VAKASI/HONORARIUM JASA PERIKANAN/ KAPAL PERIKANAN			
a. Teknisi Laboratorium	OH	35.000	
b. Teknisi Observasi, Riset dan Lingkungan	OH	35.000	
c. Teknisi dan Pembenihan Larva	OH	35.000	
d. Teknisi Pakan Alami	OH	35.000	
e. Teknisi Hama dan Penyakit	OH	35.000	
f. Teknisi Pengelolaan Induk	OH	35.000	
g. Teknisi Kerang Mutiara	OH	35.000	
h. Teknisi/Operator Pabrik-Es	OH	35.000	
i. Teknisi/Mekanik Mesin Perikanan	OH	35.000	
j. Pencacah Statistik	OB	750.000	

J. DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1.	Honorarium Tim Swakelola Pekerjaan Konstruksi oleh Perangkat Daerah			
	a. Tim Perencana			
	a. Ketua	Paket	750.000	
	b. Sekretaris	Paket	600.000	
	c. Anggota	Paket	500.000	Maksimal 3 Orang
	b. Tim Pelaksana			
	a. Penanggung jawab	OH	100.000	
	b. Sekretaris	OH	80.000	
	c. Anggota	OH	70.000	Maksimal 2 Orang
	c. Tim Pengawas			
	a. Kepala	OB	600.000	
	b. Anggota	OB	500.000	Maksimal 3 Orang
	d. Tenaga Kerja			
	1) Bidang Bina Marga			
	a. Operator Alat Berat	OH	50.000	
	b. Pembantu Operator Alat Berat	OH	50.000	
	c. Sopir Tronton	OH	50.000	
	d. Pembantu Sopir Tronton	OH	45.000	
	e. Sopir Dump Truck Roda 6	OH	50.000	
	f. Pembantu Supir Dump Truck Roda 6	OH	45.000	

	g. Mekanik Alkal	OH	70.000	
	h. Pembantu Mekanik Alkal	OH	45.000	
	i. Pengamat jalan	OB	600.000	
	j. Mandor jalan	OB	500.000	
	k. Juru jalan	OB	250.000	
	l. Pekerja harian	OH	100.000	
	m. Kepala Kerja/Mandor	OH	125.000	
	n. Tukang	OH	125.000	
	o. Kepala Tukang	OH	150.000	
	p. Jasa ukur	OH	150.000	
	q. Pembantu jasa ukur	OH	75.000	
	r. Juru gambar	OH	170.000	
	s. Estimatran/enginer design	OH	200.000	
	2) Bidang Cipta Karya			
	a. Supir Tank Air	OH	50.000	
	b. Pembantu Supir Tank Air	OH	45.000	
	c. Pencatat Meteran Air	OH	50.000	
	d. Penjaga gudang/ logistik	OH	60.000	
	e. Operator mesin genset (WTP)	OH	60.000	
	f. Pembantu Operator mesin genset (WTP)	OH	45.000	
	g. Koordinator jaringan perpipaan	OH	60.000	
	h. Pekerja jaringan perpipaan	OH	150.000	
	i. Pemantau operasional perpipaan	OB	250.000	
	j. Pemungut retribusi air	OB	250.000	
	k. Pembantu Pemungut retribusi air	OB	200.000	
	l. Operator zat kimia/penjernih air bersih	OB	250.000	
	3) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air			
	a. Pengamat Pengairan	OB	600.000	
	b. Mandor Pengairan	OB	500.000	
	c. Juru Pintu/Penjaga Pintu	OB	200.000	
	d. Penjaga/Juru Bendung sungai/saluran	OB	250.000	
	e. Pencatat Duga Banjir/Sungai/Saluran	OB	250.000	
	f. Pencatat Pengukur dan Laporan Curah Hujan	OB	250.000	
	g. Pendata Daerah Rawan Banjir	OH	50.000	
	h. Juru ukur	OH	50.000	
	i. Juru gambar	OH	50.000	
	j. Pekerja harian lepas	OH	100.000	
	k. Tukang batu/kayu harian lepas	OH	125.000	
	l. Pembantu Tukang batu/kayu harian lepas	OH	100.000	

K. INSPEKTORAT

1. Insentif Penyusunan/Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

No.	Jabatan dalam Tim	Jenis Pemeriksaan		
		Pemeriksaan Reguler (Orang/ Surat Tugas)	Pemeriksaan Tujuan Tertentu (Orang/Surat Tugas)	Reviu Dokumen Pendampingan/ Asistensi (Orang/Surat Tugas)
1.	Penanggung Jawab	3.000.000	3.000.000	2.500.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Supervisor	2.500.000	2.500.000	2.000.000
4.	Ketua	2.250.000	2.250.000	1.750.000
5.	Anggota	2.000.000	2.000.000	1.500.000
6.	Pengumpul Data	1.500.000	1.500.000	1.000.000

2. Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)

No.	Jabatan	Perkiraan Nilai Kerugian (Per Kasus)		
		s.d 500 jt	Di atas 500 jt s.d 1 miliar	Di atas 1 miliar
1.	Ketua	2.500.000/kasus	3.500.000/kasus	4.500.000/Kasus
2.	Anggota	2.000.000/kasus	3.000.000/kasus	4.000.000/kasus
3.	Koordinator Sekretariat	1.500.000/kasus	2.000.000/kasus	2.500.000/kasus
4.	Anggota Sekretariat	1.000.000/kasus	1.500.000/kasus	2.000.000/kasus

3. Jasa Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan ASN Fungsional tertentu oleh Instansi Pembina

No.	Jenis Pelatihan	Biaya Pelatihan	
		Tatap Muka (OH)	*e-learning*/jarak jauh (OH)
1.	Terampil	665.000	324.000
2.	Ahli Pertama	628.000	302.000
3.	Ahli Muda	665.000	324.000
4.	Ahli Madya	702.000	346.000
5.	Ahli Utama	665.000	324.000

Keterangan :

Standar biaya untuk Diklat Auditor sudah termasuk biaya penginapan peserta.

4. Jasa Tim Penilai Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional pada inspektorat (dilaksanakan melalui kerjasama dengan inspektorat provinsi/kabupaten/kota lain).

No.	Jabatan	Satuan	Besaran
1.	Penanggung Jawab	OP	1.500.000
2.	Ketua	OP	1.000.000
3.	Sekretaris	OP	1.000.000
4.	Anggota	OP	800.000

L. BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Honorarium Jasa Register Surat Berharga			
	a. Teknisi Perporasi	Lembar	100	
	b. Teknisi Scanning SP2D	Lembar	1.000	Orang per lembar SP2D
2.	Honorarium Programer IT Pengelola Keuangan Daerah	OB	6.000.000	(Non ASN)
3.	Honorarium Pendataan Objek Pajak PBB	Objek	5.000	Orang per Objek PBB
4.	Honorarium Penilaian Massal PBB	Desa	2.500.000	
5.	Honorarium Tim Validasi BPHTB	OH	400.000	
6.	Honorarium penyampaian dan Pemungutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB ke Masyarakat	Surat	3.000	
7.	Honorarium Pendataan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)			
	a. Honorarium Pendata PBB	Lembar	5.000	Upah Pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan
	b. Honorarium Penagih/ Pemungut PBB	Lembar	3.000	
8.	Honorarium OC (Operator Consule)	OB	500.000	12 Bulan
9.	Vakasi pengawas lapangan objek retribusi daerah			
	a. Penanggung jawab	OH	120.000	Pengawasan pelayanan kepelabuhanan, penyeberangan air dan produksi usaha daerah (es batu), di luar jam kerja dibayarkan berdasarkan laporan hasil pengawasan)
	b. Koordinator (PNS)	OH	80.000	
	c. Anggota (Non PNS)	OH	50.000	
10.	Majelis TP-TGR Keuangan/Barang Daerah			
	a. Pembina	Orang/kasus	2.000.000	
	b. Wakil Pembina	Orang/kasus	1.800.000	
	c. Ketua	Orang/kasus	1.650.000	
	d. Wakil Ketua	Orang/kasus	1.600.000	
	e. Sekretaris	Orang/kasus	1.500.000	
	f. Anggota	Orang/kasus	1.300.000	
	g. Sekretariat	Orang/kasus	750.000	

M. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1. Biaya jasa Penguji Laboratorium			
- Non PNS	Orang/ Operasi	250.000	
2. Penjaga Pusat Promosi			
- Hari Kerja (Pukul 16.00 - 21.00 WIB)	OH	30.000	1 orang setiap jaga
- Hari Libur (Pukul 10.00 - 21.00 WIB)	OH	50.000	1 orang setiap jaga

N. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
1.	Dewan Riset Daerah			
	a. Honorarium Dewan Riset Dacrah			
	- Penanggung jawab	OTR	3.500.000	
	- Pengarah	OTR	3.250.000	
	- Ketua	OTR	3.000.000	
	- Sekretaris	OTR	2.750.000	
	- Ketua Komisi	OTR	2.500.000	
	- Anggota Komisi	OTR	2.500.000	
	- Badan Pekerja	OTR	2.000.000	
	b. Penunjang Penelitian/Riset Daerah			
	- Bantuan Penulisan Penelitian/Jurnal	Per lembar	200.000	
	- Insentif Riset	OP	50.000.000	
2.	Survey Akses Air Minum (Data AMPL), Uang Saku Enumerator (Pengumpul Data) PNS dan Non PNS	Kuesioner	10.000	
3.	Supervisor, Bantuan Uang Saku (Non PNS)	Kuesioner	12.500	
4.	Pengelolaan Data Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)			
	A. Koordinator Lapangan	OP	1.500.000	
	B. Pengelola Program dan Aplikasi	OP	1.250.000	
	C. Kelola Data	RT	3.000	
	D. Entry data	Responden	3.000	
	E. Penggantian transportasi pengisian Kuesioner	Responden	15.000	
5.	Honorarium Panitia Kemitraan (Pakem) PAMSIMAS			
	a. Ketua	OP	1.500.000	
	b. Wakil Ketua	OP	1.250.000	
	c. Sekretaris	OP	1.000.000	
	d. Anggota	OP	750.000	

	Catatan : Panitia Kemitraan (Pakem) PAMSIMAS terdiri dari PNS dan LSM tokoh masyarakat (Non PNS)			
6.	Pelaksana Kegiatan Penelitian/Pengkajian (swakelola)			
	1. Pengelola Data	OP	2.000.000	
	2. Tenaga Fasilitator	OB	6.000.000	Memberikan pendampingan serta fasilitasi tenaga survei sosial di lapangan berupa data secara tertulis maupun informasi lapangan
	3. Petugas Survei			
	(1) Petugas Survey Sosial	Orang/ Survey	10.000	Tidak termasuk uang harian
	(2) Petugas Survey Teknis	OB	6.586.100	Telah dikalikan dengan indeks provinsi Sumatera Barat 0,983 x 6.700.000,- (harus bersertifikat)
	4. Tenaga Administrasi	OB	500.000	
	5. Pembantu Lapangan (Porter)			
	1) PNS	OH	75.000	
	2) Non PNS/ Tenaga Kontrak	OH	50.000	
	6. Tenaga Ahli Fungsional – Pendidikan S1, S2 dan S3			Maksimal 4 jam per hari
	- Ahli Pertama	OJ	35.000	
	- Ahli Muda	OJ	40.000	
	- Ahli Madya	OJ	50.000	
	- Ahli Utama	OJ	60.000	
	Catatan : Untuk pekerjaan pengkajian/penelitian menggunakan Jasa Konsultansi mempedomani Peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Resmi.			
7.	Hadiah diberikan kepada masyarakat pada lomba Inovasi			
	a) Juara I	Group	15.000.000	
	b) Juara II	Group	10.000.000	
	c) Juara III	Group	8.500.000	
	d) Uang Saku peserta + Akomodasi / Paket	Group	250.000	
	e) Uang untuk bahan perlengkapan lomba peserta	Group	1.500.000	
	f) Uang Pengganti Transportasi	Group	350.000	

	Kategori Orang / Individu			
	g) Juara I	Orang	5.000.000	
	h) Juara II	Orang	4.000.000	
	i) Juara III	Orang	3.500.000	
8.	Honorarium Tim Juri Inovasi Daerah/ BUMDes/ Infrastruktur Desa Terbaik	Per paket	5.000.000	
9.	Honorarium Tim Seleksi BUMD	OP	5.000.000	Maksimal 5 orang
10.	Honorarium Operator Peta	Lembar	10.000	
11.	Honorarium Programmer IT Pengelola Aplikasi Perencanaan Pembangunan	OB	6.000.000	(Non PNS)
12.	Pembuat Peta berbasis GIS	Per tema	1.400.000	
13.	Honorarium tenaga ahli dan tenaga teknis kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			
	a) Honorarium Tenaga Ahli			
	a. Team Leader/Tenaga Manajemen Pelayanan Publik	OB	1.500.000	
	b. Ahli Survey Pelayanan Publik	OB	1.500.000	
	c. Ahli Pendidikan	OB	1.500.000	
	d. Ahli Kesehatan	OB	1.500.000	
	e. Tenaga Teknis (Surveyor)	OB	1.500.000	
	b) Peralatan Penunjang			
	a. Transportasi Darat	Unit/Bulan	525.000	
	b. Sewa Komputer	Unit/ Bulan	350.000	
	c. Sewa Proyektor	Unit/ Bulan	250.000	
	d. Sewa Printer	Unit/ Bulan	250.000	
	c) Perjalanan dan Akomodasi			
	a. Lumpsum team Leader	Kali	400.000	
	b. Lumpsum Tenaga Ahli	Kali	400.000	
	c. Perjalanan Team Leader dan Tenaga Ahli	Kali	500.000	
	d. Akomodasi Team Leader dan Tenaga Ahli	Kali	400.000	
	e. Akomodasi Surveyor	Kali	350.000	
	f. Transportasi Surveyor	Kali	125.000	

O. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.	Honorarium Tenaga Teknis			
	Tenaga Teknis Arsitek (Bersertifikat)	OB	2.500.000	(Per Bulan)
2.	Honorarium Instruktur Pelatihan (Balai Latihan Kerja)			
	Instruktur	OJ	50.000	

P. KECAMATAN

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Tim Evaluasi/Klarifikasi APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban APBDesa			Maksimal 3 Paket
a. Penanggung Jawab	OP	1.500.000	
b. Ketua	OP	1.250.000	
c. Sekretaris	OP	1.200.000	
d. Anggota	OP	1.000.000	
e. Sekretariat	OP	750.000	

Cat :
1. Honorarium Tim Evaluasi APBDesa, Evaluasi Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa diberikan maksimal 3 (paket), yakni dalam rangka evaluasi/klarifikasi APBDesa, evaluasi/klarifikasi Perubahan APBDesa, dan evaluasi/klarifikasi Pertanggungjawaban APBDesa.
2. Jumlah anggota tim maksimal:
   - 4 orang untuk kecamatan dengan jumlah desa sampai dengan 3 desa; dan
   - 6 orang untuk kecamatan dengan jumlah desa lebih dari 3 desa.
3. Jika desa tidak mengajukan Perubahan APBDesa, maka honorarium tim hanya diberikan maksimal 2 paket.
4. Ditetapkan atas dasar Keputusan Camat.

Q. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

a. Honorarium/vakasi/insentif

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Honorarium/Vakasi/Insentif Penanggung jawab, Manajer Pusdalops PB dan Uang Lelah			
	a. Penanggung Jawab	OTR	2.250.000	per triwulan
	b. Manajer Pusdalops PB	OTR	2.000.000	
	c. Uang Lelah Penanggulangan Bencana	OH	100.000	Selama masa tanggap darurat
2	Vakasi Piket Regu Pusdalops PB (Non PNS)			
	a. Komandan Regu	OH	75.000	Maksimal 1 orang/piket
	b. Anggota	OH	65.000	Maksimal 5 orang/piket
3	Sopir Rescue	OH	75.000	Pada saat terjadi bencana

4	Insentif Satgas Penanggulangan Bencana	OB	200.000	Satgas di 10 Kecamatan
5	Insentif Personil Pusdalops PB			
	a. Supervisor	OB	500.000	
	b. Koordinator Administrasi	OB	400.000	
	c. Operator	OB	350.000	
	d. Staf Keuangan	OB	300.000	
	e. Staf Dokumentasi	OB	300.000	
	f. Staf Sarana Prasarana	OB	300.000	
6	Vakasi Operator radio BPBD Daerah di Kantor Camat	OB	100.000	Dibayarkan berdasarkan laporan kebencanaan dan laporan roll call

b. Fasilitator/Motivator

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1	Honorarium fasilitator desa tangguh			
	a. Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 3-4 tahun	OB	3.700.000	
	b. Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 5-6 tahun	OB	3.800.000	
	c. Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 7-8 tahun	OB	3.900.000	
	d. Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan > 8 tahun	OB	4.000.000	
2	Tunjangan operasional Fasilitator Desa tangguh bencana			
	a. Tunjangan perumahan	OB	500.000	
	b. Tunjangan komunikasi	OB	500.000	
	c. Tunjangan transportasi			
	1) Lokasi Normal	OB	1.000.000	
	2) Lokasi Sulit	OB	1.500.000	
	3) Lokasi Ekstrim	OB	2.000.000	
3	Gaji dasar Asisten Fasilitator /Motivator desa Tangguh bencana	OB		
	a. Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 0-2 tahun	OB	2.700.000	
	b. Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 3-4 tahun	OB	2.800.000	
	c. Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 5-6 tahun	OB	2.900.000	
	d. Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan > 6 tahun	OB	3.000.000	
4	Tunjangan operasional asisten			

	/motivator desa tangguh bencana			
	a. Tunjangan perumahan	OB	500.000	
	b. Tunjangan komunikasi	OB	500.000	
	c. Tunjangan transportasi			
	1) Lokasi Normal	OB	1.000.000	
	2) Lokasi Sulit	OB	1.500.000	
	3) Lokasi Ekstrim	OB	2.000.000	
5	Gaji dasar Konsultan Pendamping BPBD/Fasilitator Kabupaten			
	a. Masa kerja/pengalaman 6-7 tahun	OB	6.600.000	
	b. Masa kerja/pengalaman 8-9 tahun	OB	7.000.000	
	c. Masa kerja/pengalaman 10-11 tahun	OB	7.400.000	
6	Tunjangan Konsultan Pendamping BPBD / Fasilitator Kabupaten	OB		
	a. Tunjangan perumahan	OB	500.000	
	b. Tunjangan komunikasi	OB	500.000	
	c. Tunjangan transportasi			
	1) Lokasi Normal	OB	1.000.000	
	2) Lokasi Sulit	OB	1.500.000	
	3) Lokasi Ekstrim	OB	2.000.000	
7	Tunjangan Operator Kebencanaan			Di bayarkan pada saat beroperasi / bencana
	b. Tunjangan operator boat	OH	100.000	
	c. Uang makan operator boat	OH	25.000	

c. Tunjangan Pelaksanaan Penanganan Kebencanaan/Pencarian dan Pertolongan

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1	Tunjangan Penanganan Kebencanaan			
	a. Pejabat Eselon II/b	OH	800.000	1. Pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang; 2. Dibayarkan sesuai lama penanganan kebencanaan
	b. Pejabat Eselon III/b	OH	500.000	
	c. Pejabat Eselon IV/a	OH	450.000	
	d. Pelaksana Gol. III/IV	OH	400.000	
	e. Pelaksana Gol. I/II	OH	380.000	
	f. Non PNS	OH	280.000	
2	Tunjangan Penginapan Penanganan Kebencanaan			
	Tunjangan Penginapan	OH	100.000	Dibayarkan sesuai jumlah hari penginapan dalam pelaksanaan penanganan kebencanaan

3	Tunjangan Makan dan Minum Penanganan Bencana			
	Tunjangan Makan dan Minum	OH	50.0000	Dibayarkan selama penanganan kebencanaan

R. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Tenaga Kontrak Programer			
	a. Kompetensi Dasar	OB	4.000.000	
	b. Kompetensi Menengah	OB	5.000.000	
	c. Ahli	OB	7.000.000	
2	Tenaga Kontrak Pengelola Jaringan			
	a. Kompetensi Dasar	OB	4.000.000	
	b. Kompetensi Menengah	OB	5.500.000	
	c. Ahli	OB	7.000.000	
3	Tenaga Kontrak Ahli Basis Data			
	a. Kompetensi Dasar	OB	4.000.000	
	b. Kompetensi Menengah	OB	5.500.000	
	c. Ahli	OB	7.000.000	

S. DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1	Tali Asih Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	OTR	500.000	Penggantian Biaya Transportasi
2	Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kab Kepulauan Mentawai	OTR	600.000	
	Catatan : Ditetapkan dengan Keputusan Bupati			
3	Insentif Bagi Koordinator Daerah, Operator dan Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)			
	a. Koordinator PKH	OB	500.000	
	b. Operator PKH	OB	400.000	
	c. Pendamping PKH	OB	300.000	
4.	Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)			
	Petugas Pencacah Lapangan	Per Kuesioner	7.000	
	Petugas Entry Data	Per Kuesioner	3.000	
5.	Insentif Pendamping Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan			
	a. Pekerja Sosial Provisional	OH	40.000	
	b. Psikolog	OH	40.000	
	c. Konselor	OH	40.000	
	d. Petugas pendamping	OH	40.000	
	e. Petugas Keamanan	OH	30.000	
	f. Pengemudi	OH	30.000	
	g. Petugas Kebersihan	OH	30.000	

T. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Uraian	Sat	Biaya	Ket
1	Biaya Operasional SPMD			Pembagian zona kerja ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan tingkat kesulitan akses letak geografis dan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana.
	4) Zona I	Paket	800.000	
	5) Zona II	Paket	700.000	
	6) Zona III	Paket	600.000	
	7) Zona IV	Paket	500.000	
2	Biaya Operasional PLKB			
	1. Zona I	Paket	800.000	
	2. Zona II	Paket	700.000	
	3. Zona III	Paket	600.000	
	4. Zona IV	Paket	500.000	
3	Honor PPKBD	OB	300.000	
4	Honor Sub PPKBD	OB	150.000	
5	Honor Petugas Pengambil Data	KK	10.000	
6	Koordinator Petugas Pengambil Data	KK	5.000	
7	Koordinator Kabupaten/Entri Data	KK	20.000	

U. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	Tim Kewaspadaan Dini di Daerah			Ditetapkan dengan SK Bupati
	a. Ketua	OTR	2.000.000	
	b. Pelaksana Harian	OTR	1.750.000	
	c. Sekretaris	OTR	1.500.000	
	d. Anggota	OTR	1.250.000	
	e. Sekretariat	OTR	1.000.000	
2	Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat			
	a. Ketua	OTR	2.000.000	
	b. Pelaksana Harian	OTR	1.750.000	
	c. Sekretaris	OTR	1.500.000	
	d. Anggota	OTR	1.250.000	
	e. Sekretariat	OTR	1.000.000	

V. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	VAKASI/JASA PETERNAKAN			
	a. Inseminasi buatan	Ekor	75.000	
	b. Pemeriksaan kebuntingan hewan (PKB)	Ekor	25.000	
	c. Pemeriksaan status reproduksi (ATR)	Ekor	25.000	
	d. Sterility Control (SC) terapi	Ekor	25.000	

	penanganan penyakit reproduksi			
	e. Pemeriksaan kesehatan hewan	Ekor	20.000	
	f. Vaksinasi rabies	Ekor	10.000	
	g. Vaksinasi SE	Ekor	10.000	
	h. Vaksinasi ND	Ekor	2.000	
	i. Vaksinasi Al/flu burung	Ekor	3.000	
	j. Biosecurity/penyemprotan kendang	Spray	10.000	
	k. Eliminasi/peracunan anjing liar	Ekor	20.000	
	l. Pengumpulan dan penguburan bangkai	Ekor	15.000	
	m. Pelaksana embrio transfer (ET)	Paket	300.000	
	n. Pelayanan pengobatan kasus ringan	Ekor	7.500	
	o. Pelayanan pengobatan kasus berat	Ekor	15.000	
	p. Pendataan dan monitoring ternak pemerintah	Ekor	7.500	
	q. Vaksinasi antrax	Ekor	3.000	
2	Biaya Operasional Penyuluh (BOP) untuk penyuluh pertanian PNS/CPNS dan tenaga harian lepas tenaga bantu medik/ paramedic veteriner (THL-TBM/PV) dan tenaga kontrak dokter hewan			
	a. Coordinator penyuluh pertanian tingkat kecamatan/penyuluh PNS berdasarkan zonasi			
	1) Zona I (Kecamatan Siberut Barat, Siberut Utara dan Pagai Selatan)	OB	700.000	
	2) Zona II (Kecamatan Pagai Utara dan Siberut Tengah)	OB	600.000	
	3) Zona III (Kecamatan Siberut Selatan, Siberut Barat Daya dan Sikakap	OB	500.000	
	4) Zona IV (Kecamatan Sipora Selatan, Sipora Utara)	OB	400.000	
	b. THL-TBPP			
	1) Zona I (Kecamatan Siberut Barat, Siberut Utara dan Pagai Selatan)	OB	700.000	
	2) Zona II (Kecamatan Pagai Utara dan Siberut Tengah)	OB	600.000	
	3) Zona III (Kecamatan Siberut Selatan, Siberut Barat Daya dan Sikakap	OB	500.000	
	4) Zona IV (Kecamatan Sipora Selatan, Sipora Utara)	OB	400.000	
	c. THL-TB medic/paramedic veteriner	OB	700.000	
	d. Tenaga Kontrak Dokter Hewan	OB	700.000	
3	Honorarium Pegawai Kontrak Paramedic Veteriner			
	a. D-3 Kesehatan hewan	OB	1.500.000	
	b. Sarjana Kesehatan hewan	OB	2.300.000	
4	Honorarium Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)			
	a. Petugas pendamping lapangan	OB	350.000	
	b. Narasumber	OJ	500.000	
5	Honorarium Pejabat Penetap angka kredit dan tim penilai angka kredit jabatan			Periode penilaian

	fungsional tertentu di lingkungan pertanian			maksimal dua kali dalam setahun
	a. Pejabat pengambil keputusan/ penetapan angka kredit	Periode penilaian	1.500.000	1 orang
	b. Tim penilai angka kredit			
	1) Ketua	Periode penilaian	1.000.000	1 orang
	2) Wakil Ketua	Periode penilaian	800.000	1 orang
	3) Seketaris	Periode penilaian	750.000	1 orang
	4) Anggota	Periode penilaian	500.000	Maksimal 5 orang

W. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	KEARSIPAN			
	1. Penataan dan Pengelolaan Arsip Aktif dan Inafktif	Berkas	3.000	
	2. Labelisasi Boks Arsip	Boks	400	
	3. Menilai Arsip untuk Penyusutan Laminasi	Boks	400	
	4. Proses Komputerisasi Data Daftar Pertelaahan Arsip dan Daftar Inventarisasi Arsip	Lembar	150	
	5. Pembuatan Transkrip Hasil Wawancara Sejarah Lisan	durasi 10 Menit	20.000	
	6. Proses Alih Media Arsip Film ke Video	400 file	200.000	
	7. Proses Alih Media Arsip Video ke VCD	Disk	50.000	
	8. Proses Alih Media Arsip Kertas ke Microfilm 16 mm	Reel	350.000	
	9. Alih Media Arsip ke Foto Digital	Record	2.500	
	10. Alih Media ke Negatif Foto	Ekspose	15.000	
	11. Pembimbing Praktek	OJP	75.000	
2	Pengolahan Naskah Kuno			
	a. Penulisan Draft Naskah Kuno	Lembar	5.000	
	b. Editing Naskah Kuno	Lembar	10.000	
	c. Penjilidan dan Percetakan Naskah Kuno	Lembar	50.000	
	d. Terjemahan Naskah Kuno	Lembar	50.000	
3	Vakasi/Honorarium Jasa Pengelolaan Kearsipan dan Kepustakaan			
	a. Pengelola/Petugas Layanan Perpustakaan	OB	300.000	
	b. Pengelola/Petugas Layanan Pustaka Keliling	OB	300.000	
	c. Pengelola/Petugas Katalog Elektronik (Vivot)	OB	300.000	
	d. Pengelola/Petugas Perpustakaan Desa	OB	300.000	
4	Vakasi/ Honorarium Jasa Pengelolaan Kearsipan dan Kepustakaan			
	a. Pengelola/ Petugas Layanan Perpustakaan	OH	40.000	
	b. Pengelola/ Petugas Layanan Pustaka Keliling	OH	40.000	
	c. Pengelola/ Petugas Perpustakaan Desa	OB	300.000	

X. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Vakasi Petugas Pengangkut Sampah			
1. Koordinator	OB	500.000	
2. Petugas Sampah	OH	100.000	

Penjelasan istilah satuan :

a. OB : Orang/Bulan
b. OTR : Orang/Triwulan
c. OS : Orang/Sidang
d. OP : Orang/Paket
e. OH : Orang/Hari
f. OK : Orang/Kegiatan
g. OA : Orang/Acara
h. PP : Pulang Pergi
i. RT : Rumah Tangga
j. OR : Orang/Rapat
k. OJ : Orang/Jam
l. KK : Kepala Keluarga
m. OJP : Orang/Jam Pelajaran

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS

A. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Gedung Bertingkat	m^2/tahun	182.000
2.	Gedung tidak bertingkat	m^2/tahun	124.000
3.	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m^2/tahun	10.000

Keterangan:

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki speshiftikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Kendaraan Bermotor Darat		
	a) Kendaraan Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	25.000.000
	b) Kendaraan Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	Unit/Tahun	20.000.000
	c) Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	15.000.000
	d) Kendaraan *Double Gardan*	Unit/Tahun	17.000.000
	e) Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	1.000.000
	f) Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	20.000.000
2.	Kendaraan Bermotor di Air		
	a) Mesin boat	Unit/Tahun	4.000.000
	b) Body boat	Unit/Tahun	2.000.000

Keterangan:
a. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya bahan bakar;
b. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
   1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris;
   2) Pemeliharaan kendaraan yang bershiftat rekondisi dan/atau *overhaul.*

C. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Personal Komputer/ *Notebook*	Unit/tahun	730.000
2.	Printer	Unit/tahun	690.000
3.	*Air Conditioner* (AC)	Unit/tahun	610.000
4.	Genset		
	a. Lebih kecil dari 50 Kva	Unit/tahun	5.000.000
	b. 75 Kva	Unit/tahun	7.500.000
	c. 100 Kva	Unit/tahun	9.000.000
	d. 125 Kva	Unit/tahun	9.500.000
	e. 150 Kva	Unit/tahun	12.000.000
	f. 175 Kva	Unit/tahun	13.000.000
	g. 200 Kva	Unit/tahun	14.000.000
	h. 250 Kva	Unit/tahun	15.000.000
	i. 275 Kva	Unit/tahun	16.000.000
	j. 300 Kva	Unit/tahun	19.000.000
	k. 350 Kva	Unit/tahun	21.000.000
	l. 450 Kva	Unit/tahun	24.000.000
	m. 500 Kva	Unit/tahun	30.000.000
5.	Pemeliharaan Plotter		
	a. Rusak Ringan	Unit/Tahun	5.000.000
	b. Rusak Sedang	Unit/Tahun	10.000.000
	c. Rusak Berat	Unit/Tahun	15.000.000
6.	Pemeliharaan Radio Rig		
	a. Rusak ringan	Unit	150.000
	b. Rusak berat	Unit	500.000
7.	Pemeliharaan Radio SSB		
	a. Rusak ringan	Unit	750.000
	b. Rusak berat	Unit	1.000.000
8.	Pemeliharaan Repiater		
	a. Rusak ringan	Unit	3.500.000
	b. Rusak berat	Unit	5.000.000
9.	Pemeliharaan *Handy Talky* (HT)	Unit	200.000

Keterangan:

Dalam hal satuan biaya pemeliharaan yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat mempedomani satuan biaya pemeliharaan pada instansi Pemerintah Pusat, harga pasar, dan/atau hasil survei lapangan.

D. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pakaian Dinas		
	Bupati/Wakil Bupati	Stel	847.000
	Pejabat Eselon II	Stel	847.000
	Golongan I,II,III, dan IV	Stel	847.000
2.	Pakaian Dinas Dokter	Stel	1.217.000
3.	Pakaian Dinas Perawat	Stel	847.000
4.	Pakaian Kerja Satpam	Stel	1.517.000
5.	Pakaian Kerja Non ASN Lainnya	Stel	647.000

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

b. bahwa dalam rangka penganggaran Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-272-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 30 Mei 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI,

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023
NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	76.087.257.700	103.606.380.700	27.519.123.000	36 %
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	500.000.000	500.000.000	0	0 %
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	500.000.000	500.000.000	0	0 %
	Jumlah Belanja	**959.090.757.280**	**1.043.258.026.807**	**84.167.269.527**	**9 %**
	Total Surplus/(Defisit)	**(41.089.969.831)**	**(94.251.377.654)**	**(53.161.407.823)**	**-129 %**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**41.089.969.831**	**94.251.377.654**	**53.161.407.823**	**129 %**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.089.969.831	94.251.377.654	53.161.407.823	129 %
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	30.860.215.772	90.118.087.870	59.257.872.099	192 %
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.860.215.772	90.118.087.870	59.257.872.099	192 %
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.860.215.772	90.118.087.870	59.257.872.099	192 %
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	10.229.754.060	4.133.289.784	(6.096.464.276)	60 %
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	5.097.942.601	1.168.428.093	(3.929.514.508)	77 %
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	5.097.942.601	1.168.428.093	(3.929.514.508)	77 %
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	5.131.811.459	2.964.861.691	(2.166.949.768)	42 %
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	5.131.811.459	2.964.861.691	(2.166.949.768)	42 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**41.089.969.831**	**94.251.377.654**	**53.161.407.823**	**129 %**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	**0 %**
	Pembiayaan Netto	**41.089.969.831**	**94.251.377.654**	**53.161.407.823**	**129 %**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**	**0**	**0**	**2 %**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.000.000	11.000.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 00	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**300.000.000**	**300.000.000**	**0**		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	300.000.000	300.000.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	300.000.000	300.000.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	300.000.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	26.865.000	26.865.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.865.000	26.865.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	61.500.000	61.500.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	41.000.000	41.000.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.500.000	20.500.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	211.635.000	211.635.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	211.635.000	211.635.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**366.195.000**	**366.195.000**	**0**		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 00	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**366.195.000**	**366.195.000**	**0**		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	366.195.000	366.195.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	366.195.000	366.195.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	366.195.000	366.195.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	63.686.000	63.686.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	63.686.000	63.686.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	88.800.000	88.800.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	76.800.000	76.800.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000	12.000.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	213.709.000	213.709.000	0		
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	213.709.000	213.709.000	0		
Jumlah Belanja		**268.192.635.200**	**251.669.157.084**	**(16.523.478.116)**		
Total Surplus/(Defisit)		**(268.192.635.200)**	**(251.669.157.084)**	**16.523.478.116**		
0 00 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
											Peralatan dan Mesin					
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.999.800	99.999.800	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1				BELANJA OPERASI	99.999.800	99.999.800	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	99.999.800	99.999.800	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	99.999.800	99.999.800	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.999.800	99.999.800	0		
											Jumlah Belanja	**100.171.177.147**	**101.908.772.035**	**1.737.594.888**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(100.131.184.147)**	**(101.868.779.035)**	**(1.737.594.888)**		
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Henguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
											Honorarium					
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	468.300.000	570.600.000	102.300.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	73.200.000	75.500.000	2.300.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	73.200.000	75.500.000	2.300.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	395.100.000	495.100.000	100.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.100.000	185.100.000	100.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	01	2.09	06	5	1	02	03	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	310.000.000	310.000.000	0		
											Jumlah Belanja	**27.322.485.477**	**27.288.421.536**	**(34.063.941)**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(15.736.679.747)**	**(15.702.615.806)**	**34.063.941**		
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.02.0001**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.080.000	25.790.000	(24.290.000)		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	50.080.000	25.790.000	(24.290.000)		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.080.000	25.790.000	(24.290.000)		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.913.700	235.913.700	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	190.206.500	190.206.500	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 01	Belanja Pegawai	2.200.000	2.200.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.200.000	2.200.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	2.200.000	2.200.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	188.006.500	188.006.500	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	15.986.500	15.986.500	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.986.500	15.986.500	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.220.000	10.220.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.220.000	10.220.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	161.800.000	161.800.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	161.800.000	161.800.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2	BELANJA MODAL	45.707.200	45.707.200	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.707.200	45.707.200	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000	500.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 02 03 03	Belanja Modal Alat Ukur	500.000	500.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.735.200	40.735.200	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	40.735.200	40.735.200	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	4.472.000	4.472.000	0		
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.472.000	4.472.000	0		
Jumlah Belanja		**150.658.436.808**	**194.762.284.390**	**44.103.847.582**		
Total Surplus/(Defisit)		**(150.140.049.336)**	**(194.243.896.918)**	**(44.103.847.582)**		
0 00 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	36.658.000	36.658.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	36.658.000	36.658.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.500.000	4.500.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000	4.500.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	8.070.000	0	(8.070.000)		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.070.000	0	(8.070.000)		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.950.000	29.950.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	29.950.000	29.950.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.950.000	29.950.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	29.950.000	29.950.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.950.000	29.950.000	0		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.348.000	66.300.000	39.952.000		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	26.348.000	66.300.000	39.952.000		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.348.000	66.300.000	39.952.000		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	26.348.000	66.300.000	39.952.000		
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.348.000	66.300.000	39.952.000		
Jumlah Belanja		**27.695.668.897**	**22.507.427.964**	**(5.188.240.933)**		
Total Surplus/(Defisit)		**(27.695.668.897)**	**(22.507.427.964)**	**5.188.240.933**		
0 00 1.04.2.10.0.00.04.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.600.000	5.600.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	15.000.000	15.000.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.405.000	133.405.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	133.405.000	133.405.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	133.405.000	133.405.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	43.065.000	43.065.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	43.065.000	43.065.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	12.000.000	12.000.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000	12.000.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	77.000.000	77.000.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77.000.000	77.000.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	1.340.000	1.340.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.340.000	1.340.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.890.000	5.890.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	5.890.000	5.890.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.890.000	5.890.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	5.890.000	5.890.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.890.000	5.890.000	0		
											Jumlah Belanja	**5.171.477.301**	**5.180.485.735**	**9.008.434**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(5.171.477.301)**	**(5.180.485.735)**	**(9.008.434)**		
0	**00**	**1.05.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.1.06.0.00.05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115.000.000	115.000.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	6.340.000	6.340.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.340.000	6.340.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.490.000	16.490.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	16.490.000	16.490.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.490.000	16.490.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	16.490.000	16.490.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.490.000	16.490.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.760.000	29.760.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	29.760.000	29.760.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.760.000	29.760.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	29.760.000	29.760.000	0		
1 05 1.05.1.06.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.760.000	29.760.000	0		
Jumlah Belanja		**4.520.953.893**	**13.387.902.434**	**8.866.948.541**		
Total Surplus/(Defisit)		**(4.520.953.893)**	**(13.387.902.434)**	**(8.866.948.541)**		
0 00 1.05.1.06.0.00.05.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Tonggiuran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2 08 1.06.2.08.0.00.06.0000 07 2.03 02 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	15.450.000	15.450.000	0		
	Jumlah Belanja	**8.371.369.887**	**8.709.665.506**	**338.295.619**		
	Total Surplus/(Defisit)	**(8.371.369.887)**	**(8.709.665.506)**	**(338.295.619)**		
0 00 1.06.2.08.0.00.06.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Tonggutan Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.3.27.0.00.09 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	24.000.000	24.000.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60.380.000**	**60.380.000**	**0**		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.380.000	53.380.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	53.380.000	53.380.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.380.000	53.380.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	26.700.000	26.700.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.700.000	26.700.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.500.000	10.500.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.500.000	10.500.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	16.180.000	16.180.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.180.000	16.180.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	7.000.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000	7.000.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	7.000.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 01	Belanja Barang	170.000	170.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	170.000	170.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.830.000	6.830.000	0		
3 27 2.09.3.27.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.830.000	6.830.000	0		
	Jumlah Belanja	**15.469.729.969**	**15.965.675.536**	**495.945.567**		
	Total Surplus/(Defisit)	**(15.469.729.969)**	**(15.965.675.536)**	**(495.945.567)**		
0 00 2.09.3.27.0.00.09.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	187.028.207	187.028.207	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	187.028.207	187.028.207	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	128.028.207	128.028.207	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	128.028.207	128.028.207	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	59.000.000	59.000.000	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.000.000	59.000.000	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.110.000	10.110.000	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.110.000	10.110.000	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.110.000	10.110.000	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.110.000	10.110.000	0		
2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.110.000	10.110.000	0		
Jumlah Belanja		**5.802.442.030**	**5.811.977.587**	**9.535.557**		
Total Surplus/(Defisit)		**(5.802.442.030)**	**(5.811.977.587)**	**(9.535.557)**		
0 00 2.11.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor 07 Tahun 2023
Tanggal 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	464.572.000	471.972.000	7.400.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	464.572.000	471.972.000	7.400.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	464.572.000	471.972.000	7.400.000		
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48.660.000**	**48.660.000**	**0**		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.660.000	48.660.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	48.660.000	48.660.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	48.660.000	48.660.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	33.660.000	33.660.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	33.660.000	33.660.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	15.000.000	15.000.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000	0		
											Jumlah Belanja	**4.880.115.497**	**4.856.002.953**	**(24.112.544)**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(4.880.115.497)**	**(4.856.002.953)**	**24.112.544**		
0	**00**	**2.12.0.00.0.00.12.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	0	58.395.000	58.395.000		
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0	58.395.000	58.395.000		
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	327.600.000	379.400.000	51.800.000		
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	327.600.000	31.800.000	(295.800.000)		
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	347.600.000	347.600.000		
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	0	26.112.000	26.112.000		
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0	26.112.000	26.112.000		
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	11.000.000	11.000.000		
2 14 2.13.2.14.0.00.13.0000 04 2.01 05 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	11.000.000	11.000.000		
Jumlah Belanja		**8.143.697.808**	**8.728.811.905**	**585.114.097**		
Total Surplus/(Defisit)		**(8.143.697.808)**	**(8.728.811.905)**	**(585.114.097)**		
0 00 2.13.2.14.0.00.13.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**			

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	99.854.000	121.588.000	21.734.000		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.854.000	121.588.000	21.734.000		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.345.218.974**	**1.345.218.974**	**0**		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	132.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	132.000.000	132.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000	132.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	132.000.000	132.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	132.000.000	132.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.213.218.974	1.213.218.974	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.213.218.974	1.213.218.974	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.213.218.974	1.213.218.974	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.213.218.974	1.213.218.974	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.600.000	1.200.600.000	0		
2 15 2.15.0 00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.618.974	12.618.974	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.929.000**	**65.929.000**	**0**		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	10.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.000.000	10.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000	10.000.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.929.000	55.929.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	55.929.000	55.929.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	55 929.000	55 929.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 01	Belanja Barang	49.839.000	49.839.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	49.839.000	49.839.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.090.000	6.090.000	0		
2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.090.000	6.090.000	0		
Jumlah Belanja		**17.678.763.844**	**21.609.793.675**	**3.931.029.831**		
Total Surplus/(Defisit)		**(17.450.234.517)**	**(21.381.264.348)**	**(3.931.029.831)**		
0 00 2.15.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Plt Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49.930.000	49.930.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.992.000	79.992.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1				BELANJA OPERASI	79.992.000	79.992.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000	680.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000	680.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000	680.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	79.312.000	79.312.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	02	01		Belanja Barang	324.000	324.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	324.000	324.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	78.988.000	78.988.000	0		
2	16	2.16.2.21.2.20.16.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	78.988.000	78.988.000	0		
Jumlah Belanja												**7.372.127.566**	**7.380.472.062**	**8.344.496**		
Total Surplus/(Defisit)												**(7.372.127.566)**	**(7.380.472.062)**	**(8.344.496)**		
0	**00**	**2.16.2.21.2.20.16.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan												**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran												**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggurah Simanjuntak

Lampiran II . Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
											Jalan, Jaringan, dan Irigasi					
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	549.710.000	110.294.000	(439.416.000)		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	549.710.000	110.294.000	(439.416.000)		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	2				BELANJA MODAL	0	1.622.743.450	1.622.743.450		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1.622.743.450	1.622.743.450		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	0	1.622.743.450	1.622.743.450		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	02	2.01	05	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	1.622.743.450	1.622.743.450		
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**150.180.000**	**152.544.000**	**2.364.000**		
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**150.180.000**	**152.544.000**	**2.364.000**		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.180.000	152.544.000	2.364.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	150.180.000	152.544.000	2.364.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	150.180.000	152.544.000	2.364.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	150.180.000	152.544.000	2.364.000		
3	31	2.17.3.30.3.31.17.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	150.180.000	152.544.000	2.364.000		
											Jumlah Belanja	**10.330.510.649**	**12.119.293.634**	**1.788.782.985**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(10.313.935.649)**	**(12.102.718.634)**	**(1.788.782.985)**		
0	**00**	**2.17.3.30.3.31.17.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.2.07.0.00.18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
	Jumlah Belanja	**3.951.196.990**	**4.219.804.449**	**268.607.459**		
	Total Surplus/(Defisit)	**(3.951.196.990)**	**(4.219.804.449)**	**(268.607.459)**		
0 00 2.18.2.07.0.00.18.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**167.576.700**	**167.576.700**	**0**		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 0.00 00	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**167.576.700**	**167.576.700**	**0**		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 00	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**135.236.700**	**135.236.700**	**0**		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	135.236.700	135.236.700	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	135.236.700	135.236.700	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	135.236.700	135.236.700	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	23.768.700	23.768.700	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.768.700	23.768.700	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.170.000	22.170.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.300.000	9.300.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.870.000	12.870.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	89.298.000	89.298.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.298.000	89.298.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 00	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**32.340.000**	**32.340.000**	**0**		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	32.340.000	32.340.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	32.340.000	32.340.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.340.000	32.340.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	922.000	922.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	922.000	922.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.000.000	10.000.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000	10.000.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	21.418.000	21.418.000	0		
2 24 2.24.2.23.0.00.23.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.418.000	21.418.000	0		
Jumlah Belanja		**15.339.078.846**	**15.347.846.441**	**8.767.595**		
Total Surplus/(Defisit)		**(15.339.078.846)**	**(15.347.846.441)**	**(8.767.595)**		
0 00 2.24.2.23.0.00.23.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	99.696.000	99.696.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.696.000	99.696.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**348.000.000**	**348.000.000**	**0**		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.000.000	348.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	348.000.000	348.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	348.000.000	348.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	348.000.000	348.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	348.000.000	348.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**86.700.000**	**86.700.000**	**0**		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	75.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	75.000.000	75.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	75.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	30.000.000	30.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000	30.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	45.000.000	45.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.000.000	45.000.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.700.000	11.700.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	11.700.000	11.700.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000	11.700.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	11.700.000	11.700.000	0		
3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.700.000	11.700.000	0		
	Jumlah Belanja	**24.227.200.375**	**24.274.572.700**	**47.372.325**		
	Total Surplus/(Defisit)	**(24.032.014.975)**	**(24.079.387.300)**	**(47.372.325)**		
0 00 3.25.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.3.29.2.10.41 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	197.900.000	197.900.000	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	179.900.000	179.900.000	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.000.000	18.000.000	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 02 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	85.567.000	85.567.000	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.567.000	85.567.000	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	254.502.600	254.502.600	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03 5 1	BELANJA OPERASI	254.502.600	254.502.600	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	254.502.600	254.502.600	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.359.600	1.359.600	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.359.600	1.359.600	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	150.000.000	150.000.000	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	150.000.000	150.000.000	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	103.143.000	103.143.000	0		
4 01 4.01.3.29.2.10.41.0000 01 2.14 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.143.000	103.143.000	0		
Jumlah Belanja		**47.073.835.745**	**50.273.311.389**	**3.199.475.644**		
Total Surplus/(Defisit)		**(47.073.835.745)**	**(50.273.311.389)**	**(3.199.475.644)**		
0 00 4.01.3.29.2.10.41.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Iorgyuran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.42 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02	5	1				BELANJA OPERASI	89.231.600	89.231.600	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	89.231.600	89.231.600	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02	5	1	02	01		Belanja Barang	89.231.600	89.231.600	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.42.0000	01	2.16	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	89.231.600	89.231.600	0		
											Jumlah Belanja	**28.802.448.081**	**28.796.936.626**	**(5.511.455)**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(28.802.448.081)**	**(28.796.936.626)**	**5.511.455**		
0	**00**	**4.02.0.00.0.00.42.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
(Pj. Bupati Kepulauan Mentawai
Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
5 05 5.01.5.05.0.00.51.0000 02 2.02 10 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	82.806.000	95.599.000	12.793.000		
5 05 5.01.5.05.0.00.51.0000 02 2.02 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	82.806.000	95.599.000	12.793.000		
5 05 5.01.5.05.0.00.51.0000 02 2.02 10 5 2	BELANJA MODAL	0	5.500.000	5.500.000		
5 05 5.01.5.05.0.00.51.0000 02 2.02 10 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	5.500.000	5.500.000		
5 05 5.01.5.05.0.00.51.0000 02 2.02 10 5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	5.500.000	5.500.000		
5 05 5.01.5.05.0.00.51.0000 02 2.02 10 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	0	5.500.000	5.500.000		
Jumlah Belanja		**7.692.955.162**	**8.231.366.322**	**538.411.160**		
Total Surplus/(Defisit)		**(7.692.955.162)**	**(8.231.366.322)**	**(538.411.160)**		
0 00 5.01.5.05.0.00.51.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Plt. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SU RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.52 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keteran
	Bangunan Lainnya					
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	114.860.000	114.860.000	0		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	114.860.000	114.860.000	0		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	114.860.000	114.860.000	0		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114.860.000	114.860.000	0		
	Jumlah Belanja	**116.255.165.281**	**151.951.011.541**	**35.695.846.260**		
	Total Surplus/(Defisit)	**780.635.346.239**	**775.945.361.683**	**(4.689.984.556)**		
0 00 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**41.089.969.831**	**94.251.377.654**	**53.161.407.823**		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.089.969.831	94.251.377.654	53.161.407.823		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01 07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	30.860.215.772	90.118.087.870	59.257.872.099		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01 07 01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.860.215.772	90.118.087.870	59.257.872.099		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01 08	Sisa Belanja Lainnya	10.229.754.060	4.133.289.784	(6.096.464.276)		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01 08 02	Sisa Dana BOS	5.097.942.601	1.168.428.093	(3.929.514.508)		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01 08 03	Sisa Dana Kapitasi	5.131.811.459	2.964.861.691	(2.166.949.768)		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**41.089.969.831**	**94.251.377.654**	**53.161.407.823**		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01 07 01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.860.215.772	90.118.087.870	59.257.872.099		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01 08 02	Sisa Dana BOS	5.097.942.601	1.168.428.093	(3.929.514.508)		
5 02 5.02.0.00.0.00.52.0000 00 0.00 00 6 1 01 08 03	Sisa Dana Kapitasi	5.131.811.459	2.964.861.691	(2.166.949.768)		
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.53 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening												Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	189.588.000	189.588.000	0		
5	04	5.03.5.04.0.00.53.0000	02	2.02	07	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	189.588.000	189.588.000	0		
												Jumlah Belanja	**6.330.480.319**	**6.341.564.462**	**11.084.143**		
												Total Surplus/(Defisit)	**(6.330.480.319)**	**(6.341.564.462)**	**(11.084.143)**		
0	**00**	**5.03.5.04.0.00.53.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**						**PEMBIAYAAN**					
												Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
												Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.61 INSPEKTORAT

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 01 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	5.570.000	5.570.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.570.000	5.570.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.820.000	56.820.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	56.820.000	56.820.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.820.000	56.820.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	22.320.000	22.320.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.320.000	22.320.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.500.000	8.500.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.500.000	8.500.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	26.000.000	26.000.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.000.000	26.000.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.535.000	35.535.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	35.535.000	35.535.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.535.000	35.535.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 06 5 1 02 01	Belanja Barang	455.000	455.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	455.000	455.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	35.080.000	35.080.000	0		
6 01 6.01.0.00.0.00.61.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.080.000	35.080.000	0		
Jumlah Belanja		**9.588.312.877**	**9.310.018.846**	**(278.294.031)**		
Total Surplus/(Defisit)		**(9.588.312.877)**	**(9.310.018.846)**	**278.294.031**		
0 00 6.01.0.00.0.00.61.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.72 KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000	500.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	500.000	500.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	500.000	500.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	500.000	500.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	500.000	500.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	6.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	6.000.000	6.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	6.000.000	6.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000	6.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	35.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10	5	1				BELANJA OPERASI	35.000.000	35.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	35.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	35.000.000	35.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.72.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000	35.000.000	0		
											Jumlah Belanja	**2.084.485.428**	**2.090.229.744**	**5.744.316**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(2.084.485.428)**	**(2.090.229.744)**	**(5.744.316)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.72.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.71 KECAMATAN SIBERUT UTARA

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.000.000	15.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.500.000	4.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.500.000	4.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	4.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000	1.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000	1.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.000.000	3.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000	3.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.460.000	15.460.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	15.460.000	15.460.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.460.000	15.460.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.460.000	15.460.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.71.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.460.000	15.460.000	0		
Jumlah Belanja		**2.925.878.185**	**2.932.446.472**	**6.568.287**		
Total Surplus/(Defisit)		**(2.925.878.185)**	**(2.932.446.472)**	**(6.568.287)**		
0 00 7.01.0.00.0.00.71.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Joenguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.74 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.551.800	2.551.800	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.060.000	77.060.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	77.060.000	77.060.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.060.000	77.060.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	17.700.000	17.700.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.700.000	17.700.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	59.360.000	59.360.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.360.000	59.360.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**137.136.000**	**137.136.000**	**0**		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	24.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	24.000.000	24.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	24.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.000.000	24.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000	24.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.136.000	113.136.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	113.136.000	113.136.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	113.136.000	113.136.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	113.136.000	113.136.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.74.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	113.136.000	113.136.000	0		
Jumlah Belanja		**2.164.530.313**	**2.112.941.367**	**(51.588.946)**		
Total Surplus/(Defisit)		**(2.164.530.313)**	**(2.112.941.367)**	**51.588.946**		
0 00 7.01.0.00.0.00.74.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.75 KECAMATAN SIBERUT SELATAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000	37.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 01 5 1 02 01	Belanja Barang	12.000.000	12.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000	12.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000	1.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000	1.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	24.000.000	24.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.000.000	24.000.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.850.000	20.850.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	20.850.000	20.850.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.850.000	20.850.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.250.000	2.250.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.250.000	2.250.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	18.600.000	18.600.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.600.000	18.600.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.071.741	36.071.741	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 11 5 1	BELANJA OPERASI	36.071.741	36.071.741	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.071.741	36.071.741	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 11 5 1 02 01	Belanja Barang	31.571.741	31.571.741	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.571.741	31.571.741	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.500.000	4.500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.75.0000 01 2.09 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000	4.500.000	0		
Jumlah Belanja		**2.440.286.280**	**2.445.788.969**	**5.502.689**		
Total Surplus/(Defisit)		**(2.440.286.280)**	**(2.445.788.969)**	**(5.502.689)**		
0 00 7.01.0.00.0.00.75.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggutan Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.73 KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode Rekening												Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	1.000.000	1.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	12.000.000	12.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000	12.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10	5	1					BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	10.000.000	10.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.73.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000	10.000.000	0		
Jumlah Belanja													**2.054.933.417**	**2.059.069.848**	**4.136.431**		
Total Surplus/(Defisit)													**(2.054.933.417)**	**(2.059.069.848)**	**(4.136.431)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.73.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**						**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan													**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran													**0**	**0**	**0**		

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
Plt. Bupati Kepulauan Mentawai
Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.76 KECAMATAN SIPORA UTARA

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.000.000	21.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000	3.650.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	3.650.000	3.650.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	3.650.000	3.650.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	3.650.000	3.650.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.650.000	3.650.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.260.800	198.260.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1				BELANJA OPERASI	198.260.800	198.260.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	01			Belanja Pegawai	680.000	680.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000	680.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	680.000	680.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	197.580.800	197.580.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	01		Belanja Barang	1.580.800	1.580.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.580.800	1.580.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	02		Belanja Jasa	20.000.000	20.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.000.000	20.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	176.000.000	176.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.76.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	176.000.000	176.000.000	0		
											Jumlah Belanja	**2.536.637.650**	**2.542.328.383**	**5.690.733**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(2.536.637.650)**	**(2.542.328.383)**	**(5.690.733)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.76.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernandes Longguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.78 KECAMATAN PAGAI UTARA

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.116.000	157.116.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	157.116.000	157.116.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	157.116.000	157.116.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	157.116.000	157.116.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	157.116.000	157.116.000	0		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.000.000**	**12.000.000**	**0**		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.000.000	12.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	12.000.000	12.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	12.000.000	12.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.78.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000	12.000.000	0		
											Jumlah Belanja	**2.288.278.583**	**2.293.029.097**	**4.750.514**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(2.288.278.583)**	**(2.293.029.097)**	**(4.750.514)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.78.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.79 KECAMATAN PAGAI SELATAN

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
											Air dan Listrik					
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	4.800.000	4.800.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	4.800.000	4.800.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	4.800.000	4.800.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	4.800.000	4.800.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.916.000	164.916.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	164.916.000	164.916.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	164.916.000	164.916.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	164.916.000	164.916.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	164.916.000	164.916.000	0		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**37.930.000**	**37.930.000**	**0**		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.250.000	32.250.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	32.250.000	32.250.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	32.250.000	32.250.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	12.250.000	12.250.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.250.000	12.250.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	20.000.000	20.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000	20.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	5.680.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	5.680.000	5.680.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.680.000	5.680.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	5.680.000	5.680.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.79.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.680.000	5.680.000	0		
											Jumlah Belanja	**2.219.453.111**	**2.224.341.718**	**4.888.607**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(2.219.453.111)**	**(2.224.341.718)**	**(4.888.607)**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.79.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jogaguran Simanjuntak

Lampiran XIII :
Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
FORMULIR KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH
MENGANGGARKAN BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL BERUPA
PRODUK DALAM NEGERI (PDN), TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING	AKUN	ANGGARAN	TKDN	NILAI TKDN
5.1.02.01	Belanja Barang	69,187,075,579	**95%**	65,727,721,800.05
5.1.02.02	Belanja Jasa	141,762,493,030	**100%**	141,762,493,030.00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2,238,817,400	**100%**	2,238,817,400.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	27,000,000	**65%**	17,550,000.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	199,500,000	**50%**	99,750,000.00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	141,209,700	**60%**	84,725,820.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2,530,861,777	**50%**	1,265,430,888.50
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1,440,314,863	**30%**	432,094,458.90
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3,442,266,580	**30%**	1,032,679,974.00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7,589,880,000	**30%**	2,276,964,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	86,646,642,883	**100%**	86,646,642,883.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	121,747,671,681	**100%**	121,747,671,681.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	11,440,133,553	**100%**	11,440,133,553.00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	7,766,750,000	**100%**	7,766,750,000.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	15,633,890,000	**100%**	15,633,890,000.00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200,000,000	**85%**	170,000,000.00
		471,994,507,046	**75%**	**458,343,315,488.45**
TOTAL BELANJA BARANG, JASA DAN MODAL		**435,241,518,576**		
PERSENTASE TKDN		**105.31%**		

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Anggaran Simanjuntak

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	DANA BOS REGULER 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
26	SMP NEGERI 1 SIPORA	Sipora Selatan	256	355,840,000.00	
27	SMP NEGERI 2 SIPORA SELATAN	Sipora Selatan	128	177,920,000.00	-
28	SMP NEGERI 3 SIPORA SELATAN	Sipora Selatan	54	75,060,000.00	-
29	SMP NEGERI 1 SIPORA UTARA	Sipora Utara	84	116,760,000.00	-
30	SMP NEGERI 2 SIPORA	Sipora Utara	412	572,680,000.00	-
31	SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH MENTAWAI	Sipora Utara	24	33,360,000.00	
32	SMP KRISTEN CAHAYA BANGSA TUAPEJAT	Sipora Utara	41	56,990,000.00	-
33	SMP SANTO PETRUS TUAPEJAT	Sipora Utara	67	93,130,000.00	-
		Jumlah Total SMP	**5341**	**7,423,990,000.00**	-
		JUMLAH TOTAL SD DAN SMP	**17811**	**22,013,870,000.00**	-

Plt. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Tonegguran Simanjuntak

Lampiran XI Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor 07 Tahun 2023
Tanggal . 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA KAPITASI PER FKTP
TAHUN ANGGARAN 2023

REKENING					PUSKESMAS	KAPITASI / JASA PELAYANAN	JASA OPERASIONAL 30-40%	TOTAL
1					2	3	4	5=3+4
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN	459,000,000.00	306,000,000.00	765,000,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SIGAPOKNA	40,244,400.00	17,247,600.00	57,492,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS BETAET	299,880,000.00	128,520,000.00	428,400,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SIMATALU	18,421,200.00	7,894,800.00	26,316,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS PEIPEI	408,979,200.00	175,276,800.00	584,256,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SAREREIKET	103,908,000.00	44,532,000.00	148,440,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SIBERUT	394,272,000.00	262,848,000.00	657,120,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP	486,444,000.00	208,476,000.00	694,920,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS MAPADEGAT	668,292,998.00	445,528,665.00	1,113,821,663.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SIOBAN	550,008,000.00	366,672,000.00	916,680,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS BOSUA	117,062,400.00	50,169,600.00	167,232,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SAUMANGANYA	315,840,000.00	135,360,000.00	451,200,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS SIKAKAP	613,656,000.00	409,104,000.00	1,022,760,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS MALAKOPA	356,916,000.00	152,964,000.00	509,880,000.00
1	2	2	202	33	OPERASIONAL PUSKESMAS BULASAT	192,108,000.00	82,332,000.00	274,440,000.00
					JUMLAH TOTAL	**5,025,032,198.00**	**2,792,925,465.00**	**7,817,957,663.00**

Plt. Bupati Kepulauan Mentawai

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sumber Dana	OPD	Program	Kegiatan	Rincian
1	2	3	4	5
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	162.905.687
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	648.728.100
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	584.257.300
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	693.933.561
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	766.649.689
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	420.649.340
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.023.076.000
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	509.877.899
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	274.375.933
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	148.331.000
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.316.100
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	118.414.400
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	418.551.150

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Lampiran IX : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi

Kode Rekening										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1										2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										NIHIL		

P. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggutan Simanjuntak

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/ TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi

Kode Rekening										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1										2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										NIHIL		

Plt. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran VII : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi

Kode Rekening										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1										2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										NIHIL		

Plt. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran VI : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH				
	5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				
	Tuapejat	Kelurahan/Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara	606.636.276	606.636.276	0
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan		**606.636.276**	**606.636.276**	**0**
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD		**606.636.276**	**606.636.276**	**0**
	Jumlah Total		**606.636.276**	**606.636.276**	**0**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Tonggoran Simanjuntak

Lampiran V : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	5.02.0.00.0.00.52.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH				
	5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				
	Tuapejat	Kelurahan/Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara	500.000.000	500.000.000	0
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		**500.000.000**	**500.000.000**	**0**
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		**500.000.000**	**500.000.000**	**0**
	Jumlah Total		**500.000.000**	**500.000.000**	**0**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Benjamin Jonggoran Simanjuntak

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	1.06.2.08.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan					
		[?]	Penyediaan Permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar Spesifikasi : Permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar	175.000.000	175.000.000	0
		[?]	Penyediaan Permakanan bagi Lansia terlantar Spesifikasi : Permakanan bagi Lansia terlantar	346.750.000	346.750.000	0
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			**521.750.000**	**521.750.000**	**0**
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			**521.750.000**	**521.750.000**	**0**
	4.01.3.29.2.10.41.0000 SEKRETARIAT DAERAH					
	4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					
	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai Yang Membutuhkan DKK	[?]	Belanja Meteran Listrik Spesifikasi : 450 watt	982.500.000	1.282.500.000	300.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			**982.500.000**	**1.282.500.000**	**300.000.000**
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			**982.500.000**	**1.282.500.000**	**300.000.000**
	Jumlah Total			**1.504.250.000**	**1.804.250.000**	**300.000.000**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	TK KASIH IBU	JL. RAYA TUAPEJAT KM. 6	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Spesifikasi : Pembangunan Areal Bermain Beserta APE luar ruangan TK Kasih Ibu Sipora Utara	155.760.000	155.760.000	0
	TK KASIH IBU	JL. RAYA TUAPEJAT KM. 6	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi : Perencanaa Pembangunan Areal Bermain Beserta PE Luar TK Kasih Ibu Sipora Utara	8.242.300	8.242.300	0
	TK KASIH IBU	JL. RAYA TUAPEJAT KM. 6	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan Areal Bermain beserta APE Luar TK Kasih Ibu SIpora Utara	8.242.300	8.242.300	0
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			**590.460.200**	**590.460.200**	**0**
	Jumlah Hibah Pada SKPD			**2.790.983.720**	**2.790.983.720**	**0**
	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	[#] Belanja Hibah Barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan					
	Kendaraan Operasi Kantor/Lapangan	Tuapejat	Kendaraan Operasi Kantor / Lapangan Spesifikasi : Roda 4	0	522.500.000	522.500.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			**0**	**522.500.000**	**522.500.000**
	Jumlah Hibah Pada SKPD			**0**	**522.500.000**	**522.500.000**
	Jumlah Total			**2.790.983.720**	**3.313.483.720**	**522.500.000**

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000	24.000.000	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.472.000	99.372.000	3.900.000		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	95.472.000	99.372.000	3.900.000		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	95.472.000	99.372.000	3.900.000		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	95.472.000	99.372.000	3.900.000		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	95.472.000	99.372.000	3.900.000		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.122.400**	**25.122.400**	**0**		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.002.400	20.002.400	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1	BELANJA OPERASI	20.002.400	20.002.400	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.002.400	20.002.400	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 01	Belanja Barang	18.002.400	18.002.400	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.002.400	18.002.400	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000	2.000.000	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000	2.000.000	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.120.000	5.120.000	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.120.000	5.120.000	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000	5.120.000	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.120.000	5.120.000	0		
8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.120.000	5.120.000	0		
Jumlah Belanja		**4.787.208.404**	**4.791.066.313**	**3.857.909**		
Total Surplus/(Defisit)		**(4.787.208.404)**	**(4.791.066.313)**	**(3.857.909)**		
0 00 8.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Longguran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.77 KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7 01 7.01.0.00.0.00.77.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000	500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.77.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000	500.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.77.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.440.000	2.440.000	0		
7 01 7.01.0.00.0.00.77.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.440.000	2.440.000	0		
Jumlah Belanja		**3.249.397.722**	**3.224.406.713**	**(24.991.009)**		
Total Surplus/(Defisit)		**(3.249.397.722)**	**(3.224.406.713)**	**24.991.009**		
0 00 7.01.0.00.0.00.77.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggoran Simanjuntak

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.80 KECAMATAN SIKAKAP

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.06	09	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.240.000	75.240.000	0		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**01**	**2.08**	**00**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**116.136.000**	**116.136.000**	**0**		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	30.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02	5	1				BELANJA OPERASI	30.000.000	30.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	30.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	30.000.000	30.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	30.000.000	30.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.136.000	86.136.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	86.136.000	86.136.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	86.136.000	86.136.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	86.136.000	86.136.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	86.136.000	86.136.000	0		
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**01**	**2.09**	**00**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	10.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	10.000.000	10.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.80.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000	0		
											Jumlah Belanja	**3.145.126.982**	**3.097.908.563**	**(47.218.419)**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(3.145.126.982)**	**(3.097.908.563)**	**47.218.419**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.80.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

Fernando Jonggouran Simanjuntak

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah perlu adanya pembangunan yang terencana, baik dan tepat sasaran yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sampai triwulan II serta perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah menyebabkan perlu adanya perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah yang sesuai dengan keadaan ekonomi dan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode waktu tersisa dalam 1 (satu) tahun berjalan.
7. Perubahan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut Perubahan PPAS adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2023 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat evaluasi hasil sampai triwulan II tahun 2023;
    c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
    e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
    f. bab VI penutup.

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan:
   a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
   b. pedoman penyusunan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS.

(2) Perubahan KUA serta Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2023.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 11 Agustus 2023

PJ. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023 NOMOR

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, perlu pengaturan Disiplin Kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

b. bahwa ketentuan disiplin kerja PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2017 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu dilakukan pengaturan kembali untuk menyesuaikan dengan tatanan normal baru produktif dan aman dari pandemi wabah suatu penyakit bagi Pegawai Negeri Sipil dalam aktifitas keseharian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Pada Lembaga Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Perangkat Daerah.
8. Disiplin PNS adalah sikap dan perilaku PNS yang dalam melaksanakan tugasnya menaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Disiplin Kerja adalah menaati kehadiran dan kepulangan PNS sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Hari Kerja adalah hari dimana PNS harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap minggu.
11. Jam Kerja adalah jumlah jam dimana PNS harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap Hari Kerja.
12. Absensi adalah dokumen yang mencatat kehadiran kerja setiap PNS pada Perangkat Daerah.
13. Apel adalah kegiatan yang dilaksanakan pada awal dan akhir Jam Kerja secara bersama di lingkungan Perangkat Daerah untuk mendapatkan arahan dari pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
14. Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah perencanaan anggaran Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

DISIPLIN KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

Disiplin kerja PNS meliputi:

a. disiplin masuk kerja pada hari dan jam kerja;
b. disiplin melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam aktifitas keseharian.

Bagian Kesatu

Disiplin Masuk Kerja Pada Hari dan Jam Kerja

Pasal 3

(1) Setiap PNS wajib masuk kerja pada hari dan jam kerja.
(2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu bagi PNS pada UPT satuan pendidikan formal dan UPT bidang kesehatan, yakni mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu;
    b. selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu bagi PNS pada Perangkat Daerah di luar UPT sebagaimana dimaksud pada huruf a, yakni mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(3) Jam Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. jumlah Jam Kerja bagi PNS yang wajib masuk kerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu adalah selama 6,5 (enam koma lima) jam dalam 1 (satu) Hari Kerja; dan
    b. jumlah Jam Kerja bagi PNS yang wajib masuk kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu adalah selama 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) Hari Kerja.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Jam Kerja bagi PNS yang wajib masuk kerja selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu diatur sebagai berikut:
   a. jam masuk kerja mulai pukul 07.30 Waktu Indonesia Barat (WIB);
   b. jam pulang kerja mulai pukul 16.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis dan pukul 16.30 WIB untuk hari Jumat;
   c. jam istirahat mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis dan pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB untuk hari Jumat;
   d. bagi PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

(2) Pelaksanaan Jam Kerja bagi PNS yang wajib masuk kerja selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu dapat dilaksanakan secara bergiliran atau sif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan jam masuk kerja, jam istirahat, dan jam pulang bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh kepala UPT setelah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

(1) Setiap PNS wajib mengisi Absensi secara elektronik pada waktu masuk kerja dan pulang kerja.

(2) Waktu pengisian Absensi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pengisian Absensi pada hari Senin sampai dengan hari Kamis:
      1. dibuka mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB untuk Absensi masuk kerja; dan
      2. dibuka mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB untuk Absen pulang kerja.
   b. pengisian Absensi pada hari Jumat:
      1. dibuka mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB untuk absen masuk kerja; dan
      2. dibuka mulai pukul 16.30 WIB sampai dengan 17.30 WIB untuk absen pulang kerja.

(3) Dalam hal pada Perangkat Daerah/UPT belum tersedia sistem pengisian Absensi secara elektronik atau sedang dalam keadaan rusak, PNS wajib mengisi Absensi secara manual.

(4) Bentuk dan format Absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT.

Pasal 6

(1) Setiap Perangkat Daerah dengan jumlah Hari Kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu wajib menyelenggarakan apel pagi dan apel sore.

(2) Penyelenggaraan apel pagi dan apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh seluruh PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apel pagi dan apel sore dipimpin oleh kepada Perangkat Daerah dan dapat didelegasikan kepada Pejabat lainnya di lingkungan Perangkat Daerah bersangkutan;

b. apel pagi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari kamis pada pukul 07.30 WIB;

c. apel sore dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari kamis pada pukul 16.00 WIB;

d. bagi PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan atau sedang mengikuti rapat kerja di luar tempat kerja dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf c.

(3) Setiap PNS yang mengikuti apel pagi dan apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengisi daftar hadir apel secara manual.

(4) Bagi UPT dengan jumlah hari kerja PNS selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu tidak diwajib menyelenggarakan apel pagi dan apel sore.

(5) Bentuk dan format daftar hadir apel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT.

Pasal 7

(1) Setiap PNS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tanpa disertai alasan yang sah, dijatuhkan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PNS yang bersangkutan dikenakan pemotongan tambahan penghasilan dari APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Setiap PNS yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tanpa disertai alasan yang sah, dikenakan pemotongan tambahan penghasilan dari APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati terkait pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Disiplin Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 9

(1) Setiap PNS wajib menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing secara profesional, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam lembaran sasaran kerja yang disusun dalam jangka waktu 1 (satu) bulan oleh PNS bersangkutan setiap awal bulan.

(3) Lembaran sasaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diketahui oleh atasan langsung.

(4) Bentuk dan format sasaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT.

Pasal 10

(1) Atasan langsung melakukan evaluasi dan penilaian atas lembaran sasaran kerja PNS setiap akhir bulan.

(2) Evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap pencapaian target setiap sasaran kerja PNS pada bulan berkenaan.

(3) Bentuk dan format evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT.

Pasal 11

(1) Selain penetapan dan penilaian lembaran sasaran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), setiap PNS wajib:
   a. menyusun dan menandatangani sasaran kinerja dalam 1 (satu) tahun;
   b. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja dalam 1 (satu) tahun;
   c. melaporkan harta kekayaan bagi wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara;
   d. melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan; dan
   e. pelaporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara penyusunan dan pelaporan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 12

(1) Setiap PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tidak mendapatkan penilaian dari atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pernyataan tidak puas dari atasan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pemotongan tambahan penghasilan dari APBD.

(3) Tata cara pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati terkait pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dari APBD.

(4) Setiap PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian Ketiga

Disiplin Menjalankan Protokol Kesehatan Dalam Keadaan Darurat Bencana Tertentu

Pasal 13

(1) Dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Daerah menetapkan keadaan darurat bencana tertentu, terutama yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, setiap Perangkat Daerah wajib menyesuaikan sistem kerja PNS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi PNS, yang meliputi:

a. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor; dan/atau

b. pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal.

(3) Penerapan sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap setiap PNS ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Protokol Kesehatan Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Kantor

Pasal 14

(1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a wajib melaksanakan protokol kesehatan selama berada di tempat kerja.

(2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. selama perjalanan ke/dari tempat kerja:
   1. selalu menggunakan masker;
   2. upayakan menggunakan kendaraan sendiri;
   3. bila harus menggunakan kendaraan umum, maka:
      a) menjaga jarak duduk dengan orang lain paling kurang 1 (satu) meter;
      b) selalu membawa dan menggunakan *hand sanitizer;*
      c) upayakan membayar secara non tunai;
      d) tidak menyentuh bagian wajah dengan tangan tanpa cuci tangan dengan sabun terlebih dahulu.

b. selama di tempat kerja:
   1. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja;
   2. selalu menggunakan masker;
   3. selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan *hand sanitizer* setiap akan memasuki ruangan kerja;
   4. tidak berkerumun dengan rekan kerja lainnya;
   5. selalu jaga jarak tempat duduk paling kurang 1 (satu) meter;
   6. tidak berpindah-pindah tempat duduk; dan
   7. biasakan tidak berjabat tangan.

c. Saat tiba di rumah:
   1. jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
   2. cuci pakaian dan masker dengan detergen;
   3. bersihkan telepon genggam, kacamata, tas dan peralatan kerja lainnya dengan cairan desinfektan.

Pasal 15

(1) Dalam hal di tempat kerja terdapat PNS yang dalam kondisi demam, nyeri tenggorokan, batuk, pilek, sesak nafas, Kepala Perangkat Daerah wajib memerintahkan yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada fasilitas

kesehatan terdekat dan menugaskan yang bersangkutan untuk kerja dari rumah.

(2) Satuan pengamanan kantor (Satpam) melarang memasuki ruangan perkantoran bagi:

a. PNS/tamu/pengunjung yang memiliki gejala suhu tubuh di atas 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celsius), batuk, pilek, sesak nafas berdasarkan hasil skrining petugas; dan

b. PNS/tamu/pengunjung yang tidak menggunakan masker.

Pasal 16

(1) Dalam hal jumlah PNS dan pekerja lainnya pada 1 (satu) ruangan kantor tidak memungkinkan untuk menerapkan jarak paling kurang 1 (satu) meter, Kepala Perangkat Daerah dapat menerapkan sistem kerja di kantor secara bergantian setiap hari.

(2) PNS dan pekerja lainnya yang dapat ditugaskan untuk bekerja secara bergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada level pekerja kontrak, pejabat pelaksana atau pejabat fungsional umum.

(3) PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas secara bergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Selama pemberlakuan darurat tertentu bencana, terutama pandemi wabah suatu penyakit, maka:

a. pengisian Absensi dilakukan secara manual;

b. pelaksanaan apel pagi dan apel sore dapat melalui media teknologi secara daring/online;

c. penyelenggaraan rapat diupayakan menggunakan media teknologi secara online; dan

d. penyelenggaraan rapat secara tatap muka dilaksanakan secara terbatas dengan menjaga jarak tempat duduk paling kurang 1 (satu) meter.

Paragraf 2

Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada PNS dengan kriteria:

a. memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala kesehatan berisiko lainnya;

b. memiliki riwayat kontak dengan orang penderita pandemi suatu wabah penyakit;

c. memiliki riwayat perjalanan dari daerah-daerah yang dinyatakan zona merah dan episentrum penyebaran pandemi suatu wabah penyakit;

d. tidak sedang ditugaskan pada unit kerja di bidang pelayanan kepada masyarakat secara langsung;

e. memiliki rumah/tempat tinggal di wilayah tempat kedudukan tempat bertugas;

f. bersedia melaksanakan tugas di kantor apabila dibutuhkan;

g. mampu mengoperasikan sistem dan teknologi informasi;

h. tidak sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi setingkat eselon III.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi disiplin kerja sebagaimana diaur dalam Peraturan Bupati ini kecuali kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), setiap PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas dari rumah/tempat tinggal wajib:

a. membuat dan menyampaikan rencana kerja harian kepada atasan langsung paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari;

b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari kepada atasan langsung dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah.

(2) PNS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pemotongan tambahan penghasilan dari APBD.

(3) Tata cara dan besaran pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati terkait pemberian tambahan penghasilan PNS dari APBD.

Pasal 20

PNS yang baru kembali dari wilayah daerah terjangkit suatu pandemi wabah penyakit, baik karena alasan perjalanan dinas maupun karena alasan pribadi, wajib ditugaskan untuk bekerja dari rumah sampai hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan bebas dari suatu wabah penyakit.

BAB III

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara berjenjang mulai dari pejabat pengawas, kepala unit kerja, Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin PNS.

Pasal 22

(1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melakukan pembinaan disiplin PNS di Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2017 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 5 Juni 2020
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 5 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020 NOMOR: 29